

LAPORAN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA

Alamat :

Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Kecamatan Pulau Punjung

Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Telp. (0754) 451506 - Fax. (0754) 451506

Kode Pos 27573



BUPATI DHARMASRAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**
Jabatan : **BUPATI DHARMASRAYA**

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dimaksud adalah :

1. Penurunan Kualitas Air Permukaan;
2. Kegiatan Pertambangan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan;
3. Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan;
4. Pengelolaan Limbah Domestik (Sampah Domestik dan Limbah Cair Domestik);
5. Tata Ruang Dalam Penataan Drainase;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Pulau Punjung, April 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Kehadirat ALLAH, SWT, karena atas karunia-NYA kami diberikan kemudahan sehingga dapat menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pasal ayat (3) menyebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan melalui proses konsultasi publik penjaringan isu prioritas dan melakukan analisis berdasarkan data yang meliputi: tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana, dan perkotaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016, serta memuat inisiatif yang dilakukan dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh Tim DIKPLHD yang telah mendukung penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Semoga Dokumen ini dapat menjadi data dan informasi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya di masa mendatang.

Pulau-Punjung, April 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Himp', written over a circular official stamp.

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ISU PRIORITAS DAERAH.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 PROFIL DAERAH DAN EKOLOGISNYA.....	I-4
1.3 PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA DAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS.....	I-9
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-12
1.4.1 Maksud.....	I-12
1.4.2 Tujuan.....	I-12
1.5 RUANG LINGKUP PENULISAN.....	I-13
BAB II ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.....	II-1
2.1 ISU LINGKUNGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN DHARMASRAYA.....	II-1
2.2 PROSES PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA.....	II-4
2.3 PENETAPAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA.....	II-7
BAB III ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.....	III-1
3.1 TATAGUNA LAHAN.....	III-1
3.1.1 Tekanan Terhadap Tataguna Lahan.....	III-2





3.1.2	Kondisi/Status Tataguna Lahan.....	III-14
3.1.3	Respon.....	III-26
3.2	KUALITAS AIR.....	III-28
3.2.1	Tekanan Terhadap Perubahan Kualitas Air.....	III-31
3.2.2	Kondisi Sungai.....	III-48
3.2.3	Kondisi Danau / Waduk / Situ / Embung.....	III-55
3.2.4	Kualitas Air Sungai.....	III-62
3.2.5	Kualitas Air Danau/Situ/Embung.....	III-79
3.2.6	Kualitas Air Sumur	III-85
3.2.7	Kualitas Air Laut	III-94
3.2.8	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan.....	III-94
3.2.9	Respon Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Air di Kabupaten Dharmasraya.....	III-101
3.3	KUALITAS UDARA.....	III-119
3.3.1	Tekanan Terhadap Perubahan Kualitas Udara.....	III-119
3.3.2	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan.....	III-125
3.3.3	Kualitas Air Hujan.....	III-128
3.3.4	Kualitas Udara Ambien.....	III-134
3.3.5	Respon Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Udara di Kabupaten Dharmasraya.....	III-145
3.4	RESIKO BENCANA.....	III-153
3.4.1	Bencana Gerakan Tanah.....	III-158
3.4.2	Kerawanan Longsor.....	III-161
3.4.3	Bencana Banjir.....	III-162
3.4.4	Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	III-164
3.4.5	Kejadian Bencana Lainnya.....	III-170



3.5	PERKOTAAN.....	III-173
3.5.1	Tekanan Terhadap Lingkungan Hidup.....	III-173
3.5.1.1	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan serta Tingkat Pendidikan.....	III-174
3.5.1.2	Jumlah Rumah Tangga Miskin Terhadap Jumlah Rumah Tangga.....	III-178
3.5.1.3	Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum.....	III-180
3.5.1.4	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Buang Air Besar....	III-181
3.5.1.5	Air Limbah Domestik Perkotaan.....	III-183
3.5.1.6	Timbulan Sampah Domestik.....	III-188
3.5.2.	Status Lingkungan Hidup Perkotaan.....	III-192
3.5.2.1	Kualitas Air Sungai Sekitar Perkotaan.....	III-192
3.5.2.2	Kualitas Air Embung/Retensi Sekitar Perkotaan.....	III-198
3.5.2.3	Kualitas Air Sumur Sebagai Air Baku Masyarakat.....	III-200
3.5.2.4	Kualitas Udara Ambient pada Perkotaan.....	III-203
3.5.2.5	Jenis Penyakit Utama yang Diderita Masyarakat.....	III-206
3.5.3	Upaya / Respon Daerah Dalam Penanganan Permasalahan Lingkungan Perkotaan.....	III-208
 BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN		
	LINGKUNGAN HIDUP.....	IV-1
4.1.	KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	IV-1
4.2.	INISIATIF KEPALA DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	IV-5
4.2.1	Kelembagaan.....	IV-5
4.2.2	Peningkatan Kapasitas Personil.....	IV-9
4.2.3	Anggaran Kegiatan OPD Bidang Lingkungan Hidup.....	IV-12
4.2.4	Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	IV-15





4.2.5	Prioritas Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan...	IV-16
4.2.6	Pengembangan Jejaring Kerja.....	IV-47
4.2.7	Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.....	IV-48
4.3.	INISIATIF YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT.....	IV-48
BAB V	PENUTUP.....	V-1
5.1	KESIMPULAN.....	V-1
5.2	SARAN TINDAK LANJUT.....	V-14
	DAFTAR PUSTAKA.....	VI-1
	LAMPIRAN I.....	L.I-1
	LAMPIRAN II.....	L.II-1
	LAMPIRAN III.....	L.III-1
	LAMPIRAN IV.....	L.IV-1
	LAMPIRAN V.....	L.V-1





DAFTAR TABEL

		Hal
BAB I	PENDAHULUAN	
Tabel 1.1	Jumlah Nagari dan Jorong pada Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	I-5
BAB II	ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP	
BAB III	ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
3.1	TATAGUNA LAHAN	
Tabel 3.1.1.	Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Dharmasraya.....	III-8
Tabel 3.1.2.	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian.....	III-9
Tabel 3.1.3.	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air pada Lahan PT Bukit Raya Mudisa.....	III-23
Tabel 3.1.4.	Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering pada Kecamatan Sitiung.....	III-25
3.2	KUALITAS AIR	
Tabel 3.2.1.	Inventarisasi Sungai Berdasarkan Panjang dan Debit Sungai per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	III-49
Tabel 3.2.2.	Inventarisasi Sungai Berdasarkan Lebar Permukaan, Lebar Dasar dan Kedalaman Sungai per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	III-50
Tabel 3.2.3.	Perbandingan Sumber Air, Luas dan Volume Embung, Luas Sawah Irigasi Yang Dapat Dialiri, Serta Panjang Saluran Pembawa.....	III-59
Tabel 3.2.4.	Hasil Analisis Statistik Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016.....	III-71
Tabel 3.2.5.	Perbandingan Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	III-72
Tabel 3.2.6.	Perbandingan Kualitas Air Embung Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Berdasarkan Standar Baku Mutu.....	III-83
Tabel 3.2.7.	Hasil Analisis Statistik Kualitas Air Embung Tahun 2016.....	III-84
Tabel 3.2.8.	Perbandingan Kualitas Air Sumur Tahun 2015 dengan Tahun 2016 Berdasarkan Standar Baku Mutu.....	III-92
Tabel 3.2.9.	Hasil Analisis Statistik Kualitas Air Sumur Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-93
Tabel 3.2.10.	Hasil Analisis Statistik Sederhana Curah Hujan Pada 5 (Lima) Stasiun Pemantauan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya..	III-96





Tabel 3.2.11.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Daerah Resapan Air dan Penyangga Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-101
Tabel 3.2.12.	Produk Hukum Dalam Pengembangan Koto Hijau Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-102
Tabel 3.2.13.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Sanitasi Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.	III-104
Tabel 3.2.14.	Produk Hukum Dalam Pengelolaan Sanitasi Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-106
Tabel 3.2.15.	Produk Hukum Dalam Upaya Peningkatan Edukasi Masyarakat dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-109
Tabel 3.2.16.	Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-111
Tabel 3.2.17.	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Persampahan dan Limbah Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-111
Tabel 3.2.18.	Hasil Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Terhadap Usaha/Kegiatan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-114
Tabel 3.2.19.	Kegiatan Fisik dalam Perbaikan Jaringan Irigasi dan Penguatan Tebing DAS oleh Dinas PU Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-116
3.3.	KUALITAS UDARA	
Tabel 3.3.1.	Jumlah Penggunaan Bahan Bakar Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-121
Tabel 3.3.2.	Jumlah Penjualan Kendaraan Bermotor Tahun 2013 Sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-122
Tabel 3.3.3.	Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2010 Sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-122
Tabel 3.3.4.	Analisis Statistik Sederhana Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Pada Tahun 2016	III-126
Tabel 3.3.5.	Analisis Statistik Sederhana Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya	III-127
Tabel 3.3.6.	Analisis Statistik Kualitas Air Hujan Tahun 2016	III-129
Tabel 3.3.7.	Perbandingan Parameter Kualitas Udara Ambien Yang Diukur di Mesjid Al-Ichwan Sei, Rumbai dengan Baku Mutu Tahun 2016	III-137
Tabel 3.3.8.	Perbandingan Indeks Kualitas Udara Hasil Pengukuran	





	Passive Sampler Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	III-140
3.4.	RESIKO BENCANA	
Tabel 3.4.1.	Gerakan Tanah pada Wilayah Kabupaten Dharmasraya.....	III-159
Tabel 3.4.2.	Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawanan di Kabupaten Dharmasraya.....	III-161
3.5.	PERKOTAAN	
Tabel 3.5.1.	Prakiraan Limbah Domestik Kegiatan Hotel Tahun 2016.....	III-184
Tabel 3.5.2.	Prakiraan Volume Limbah Padat Kegiatan Lainnya Tahun 2016.....	III-189
Tabel 3.5.3.	Indeks Pencemaran Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016.....	III-197
Tabel 3.5.4.	Perbandingan Hasil Pengukuran Tahun 2016 Terhadap Baku Mutu Udara Ambien.....	III-204
BAB IV	INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	
4.1.	Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
Tabel 4.1.1.	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021.....	IV-2
4.2.	Inisiatif Kepala Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	
Tabel 4.2.1.	Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	IV-16



DAFTAR GAMBAR

		Hal
BAB I	PENDAHULUAN	
Gambar 1.1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	I-6
BAB II	ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP	
Gambar 2.1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	II-3
BAB III	ANALISIS <i>PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE</i> ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	
3.1.	TATAGUNA LAHAN	
Gambar 3.1.1.	Persentase Penggunaan Lahan Utama pada Kabupaten Dharmasraya.....	III-3
Gambar 3.1.2.	Tren Perubahan Penggunaan Lahan Utama.....	III-4
Gambar 3.1.3.	Total Luasan Wilayah Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Data Base Pengolahan GIS untuk Penggunaan Lahan.....	III-4
Gambar 3.1.4.	Perubahan Tutupan Lahan pada Kawasan dan Luar Kawasan Hutan	III-5
Gambar 3.1.5.	Luasan Sawah pada Kabupaten Dharmasraya.....	III-6
Gambar 3.1.6.	Perubahan Luasan Penggunaan Lahan.....	III-7
Gambar 3.1.7.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan RTRW.....	III-12
Gambar 3.1.8.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Data WWF Indonesia.....	III-13
Gambar 3.1.9.	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW.....	III-15
Gambar 3.1.10.	Persentase Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW yang Telah Beralih Fungsi Menjadi Areal Terbangun dan Tanah Terbuka.....	III-16
Gambar 3.1.11.	Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya.....	III-17
Gambar 3.1.12.	Kawasan Hutan Berdasarkan Statusnya.....	III-17
Gambar 3.1.13.	Sebaran Hutan Lindung di Kabupaten Dharmasraya.....	III-18
Gambar 3.1.14.	Sebaran Produksi HPK di Kabupaten Dharmasraya.....	III-19
Gambar 3.1.15.	Sebaran Produksi HPT di Kabupaten Dharmasraya.....	III-20
Gambar 3.1.16.	Luasan Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya.....	III-21





Gambar 3.1.17.	Tren Luasan Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya.....	III-22
3.2. KUALITAS AIR		
Gambar 3.2.1.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-31
Gambar 3.2.2.	Lokasi Penambangan Tanpa Izin Yang Dipantau melalui Google Earth Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-32
Gambar 3.2.3.	Lokasi Lahan Akses Terbuka Akibat PETI di Sungai Nyunyo dan Palangko Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.....	III-33
Gambar 3.2.4.	Lokasi Lahan Akses Terbuka Akibat PETI di Sungai Koto Balai Bukit Gading Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	III-34
Gambar 3.2.5.	Lokasi Lahan Akses Terbuka Akibat PETI di Sungai Rotan Jorong Bunga Tanjung Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.....	III-35
Gambar 3.2.6.	Akibat PETI di Sungai Balih Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.....	III-35
Gambar 3.2.7.	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-36
Gambar 3.2.8.	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	III-37
Gambar 3.2.9.	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-39
Gambar 3.2.10.	Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-39
Gambar 3.2.11.	Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-41
Gambar 3.2.12.	Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya.....	III-42
Gambar 3.2.13.	Jumlah Penderita Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-43
Gambar 3.2.14.	Perbandingan Persentase Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-43
Gambar 3.2.15.	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2016 per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	III-44





Gambar 3.2.16.	Jumlah Sumber Pencemaran dan Luas Wilayah Usaha/ Kegiatan di Kabupaten Dharmasraya.....	III-46
Gambar 3.2.17.	Jumlah Penduduk dan Perkiraan Timbunan Sampah Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-46
Gambar 3.2.18.	Peta Hidrologi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya 2011-2031.....	III-54
Gambar 3.2.19.	Perbandingan Debit Maksimum dan Debit Minimum Sungai Per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	III-55
Gambar 3.2.20.	Luas dan Volume Embung di Kabupaten Dharmasraya.....	III-57
Gambar 3.2.21.	Luas Sawah Irigasi Yang Dialiri Air Embung.....	III-58
Gambar 3.2.22.	Persentase Panjang Saluran Pembawa Masing-Masing Embung di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	III-61
Gambar 3.2.23.	Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika.....	III-65
Gambar 3.2.24.	Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Mikrobiologi.....	III-66
Gambar 3.2.25.	Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Organik.....	III-66
Gambar 3.2.26.	Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Anorganik.....	III-67
Gambar 3.2.27.	Indeks Pencemaran Air Sungai Batanghari Tahun 2016.....	III-69
Gambar 3.2.28.	Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Logam Berat.....	III-70
Gambar 3.2.29.	Kualitas Air Sungai dari Beberapa Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika.....	III-74
Gambar 3.2.30.	Kualitas Air Sungai dari Beberapa Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika (2).....	III-74
Gambar 3.2.31.	Kualitas Air Sungai dari Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Anorganik.....	III-75
Gambar 3.2.32.	Kualitas Air Sungai dari Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Anorganik (2).....	III-76
Gambar 3.2.33.	Indeks Pencemaran Air Anak-Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016.....	III-78
Gambar 3.2.34.	Kualitas Air Embung Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika.....	III-80
Gambar 3.2.35.	Kualitas Air Embung Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Anorganik.....	III-81
Gambar 3.2.36.	Kualitas Air Embung Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Organik.....	III-82
Gambar 3.2.37.	Kualitas Air Sumur Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika.....	III-86
Gambar 3.2.38.	Kualitas Air Sumur Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia	





	Anorganik.....	III-87
Gambar 3.2.39.	Kualitas Air Sumur Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Organik.....	III-88
Gambar 3.2.40.	Kualitas Air Sumur Tahun 2016 Untuk Parameter Mikrobiologi.....	III-88
Gambar 3.2.41.	Kualitas Air Sumur Pulau Punjung Tahun 2016 Yang Memenuhi Baku Mutu.....	III-89
Gambar 3.2.42.	Kualitas Air Sumur Sungai Dareh Tahun 2016 Yang Memenuhi Baku Mutu.....	III-90
Gambar 3.2.43.	Kualitas Air Sumur Gunung Medan Tahun 2016 Yang Memenuhi Baku Mutu.....	III-90
Gambar 3.2.44.	Kualitas Air Sumur Sungai Rumbai Tahun 2016 Yang Memenuhi Baku Mutu.....	III-91
Gambar 3.2.45.	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Pada Tahun 2016 di Lima Stasiun Kabupaten Dharmasraya.....	III-96
Gambar 3.2.46.	Perbandingan Klasifikasi Tipe Iklim Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-98
Gambar 3.2.47.	Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Pada Tahun 2016	III-99
Gambar 3.2.48.	Perbandingan Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Pada Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-100
Gambar 3.2.49.	Konsep Pengembangan Pemulihan Lahan Akses Terbuka Bekas Tambang di Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.....	III-102
Gambar 3.2.50.	Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten Dharmasraya.....	III-103
Gambar 3.2.51.	Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya.....	III-106
Gambar 3.2.52.	Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Pemurnian Air Kabupaten Dharmasraya.....	III-107
Gambar 3.2.53.	Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Penguraian Limbah Kabupaten Dharmasraya.....	III-108
Gambar 3.2.54.	Peta Layanan Persampahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.....	III-113
Gambar 3.2.55.	Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Terhadap Usaha/Kegiatan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-114

3.3

KUALITAS UDARA

Gambar 3.3.1.	Citra Satelit Sebaran Titik Panas Tahun 2016 di Kabupaten
---------------	---





	Dharmasraya.....	III-123
Gambar 3.3.2.	Jumlah Sebaran Titik Panas Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-124
Gambar 3.3.3.	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Pada Dua Stasiun Pemantauan Pada Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-125
Gambar 3.3.4.	Perbandingan Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016.....	III-127
Gambar 3.3.5.	Hasil Analisis Parameter Kualitas Air Hujan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-128
Gambar 3.3.6.	Perbandingan Nilai pH Air Hujan Terhadap Baku Mutu Tahun 2016.....	III-129
Gambar 3.3.7.	Perbandingan Nilai pH Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016.....	III-130
Gambar 3.3.8.	Perbandingan Nilai pH Rata-Rata Maksimum dan Minimum Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016.....	III-131
Gambar 3.3.9.	Perbandingan Nilai Sulfat Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016.....	III-132
Gambar 3.3.10.	Perbandingan Nilai Nitrat Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016.....	III-132
Gambar 3.3.11.	Perbandingan Nilai Amonium Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016.....	III-133
Gambar 3.3.12.	Perbandingan Rata-Rata Parameter Kualitas Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016.....	III-134
Gambar 3.3.13.	Kualitas Udara Ambien Tahun 2016 di Masjid Al-Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.....	III-136
Gambar 3.3.14.	Perbandingan Kualitas Udara Ambien Tahun 2016 di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.....	III-137
Gambar 3.3.15.	Indeks Pencemaran Udara Tahun 2016.....	III-138
Gambar 3.3.16.	Perbandingan Indeks Pencemaran Udara Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-139
Gambar 3.3.17.	Kualitas Udara Hasil Pengukuran Passive Sampler Tahap I dan Tahap II Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-140
Gambar 3.3.18.	Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Incasi Raya Pangian Tahun 2016.....	III-141
Gambar 3.3.19.	Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Selago Makmur Plantation Tahun 2016.....	III-142
Gambar 3.3.20.	Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Bina Pratama Sakato Jaya Tahun 2016.....	III-143
Gambar 3.3.21.	Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Sumbar Andalas Kencana Tahun 2016.....	III-143





Gambar 3.3.22.	Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Tidar Kerinci Agung Tahun 2016.....	III-144
Gambar 3.3.23.	Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Transco Pratama Tahun 2016.....	III-145
Gambar 3.3.24.	Perbandingan Penggunaan BBM per-Kecamatan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-147
Gambar 3.3.25.	Perbandingan Penggunaan BBM per-Bulan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-148
Gambar 3.3.26.	Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-148
Gambar 3.3.27.	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Uji KIR Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-149
Gambar 3.3.28.	Perbandingan Perubahan Penambahan Ruas Jalan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.....	III-150
Gambar 3.3.29.	Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Pemurnian Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya.....	III-151
3.4	RESIKO BENCANA	
Gambar 3.4.1.	Peta DDDT Bencana Kabupaten Dharmasraya.....	III-157
Gambar 3.4.2.	Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2016.....	III-164
Gambar 3.4.3.	Curah Hujan Rata-Rata di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	III-165
Gambar 3.4.4.	Tren Curah Hujan Rata-Rata 4 (empat) Tahun Terakhir di Kabupaten Dharmasraya.....	III-166
Gambar 3.4.5.	Hotspot Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Satelit NOAA19.....	III-168
Gambar 3.4.6.	Hotspot Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Satelit NOAA19.....	III-169
Gambar 3.4.7.	Tren Penurunan Jumlah Hotspot di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s.d 2016.....	III-169
3.5.	PERKOTAAN	
Gambar 3.5.1.	Tingkat Pendidikan Penduduk Dharmasraya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	III-175
Gambar 3.5.2.	Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Dharmasraya Tahun 2016.....	III-176
Gambar 3.5.3.	Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sungai Rumbai Tahun 2016.....	III-177
Gambar 3.5.4.	Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016.....	III-177





Gambar 3.5.5.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2016.....	III-179
Gambar 3.5.6.	Persentase Jumlah Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minumnya.....	III-180
Gambar 3.5.7.	Tren Jumlah Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minumnya pada 3 (tiga) Tahun Terakhir.....	III-181
Gambar 3.5.8.	Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	III-182
Gambar 3.5.9..	Tren Jumlah Rumah Tangga dengan Fasilitas BAB.....	III-183
Gambar 3.5.10.	Volume Air Limbah dari Kegiatan Hotel.....	III-184
Gambar 3.5.11.	Tren Volume Air Limbah dari Kegiatan Hotel.....	III-185
Gambar 3.5.12.	Tren Beban Pencemar BOD Air Limbah dari Kegiatan Hotel.....	III-186
Gambar 3.5.13.	Tren Beban Pencemar COD Air Limbah dari Kegiatan Hotel.....	III-186
Gambar 3.5.14.	Tren Timbulan Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk.....	III-188
Gambar 3.5.15.	Kualitas Paramater BOD pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016.....	III-193
Gambar 3.5.16.	Kualitas Paramater COD pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016.....	III-194
Gambar 3.5.17.	Kualitas Parameter Minyak Lemak pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016.....	III-195
Gambar 3.5.18.	Tren Perubahan Kualitas Paramater BOD pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016.....	III-195
Gambar 3.5.19.	Tren Perubahan Kualitas Paramater COD pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016.....	III-196
Gambar 3.5.20.	Tren Perubahan Kualitas Paramater Minyak Lemak pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016.....	III-196
Gambar 3.5.21.	Tren Perubahan Kualitas Paramater BOD pada Embung Kamang Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016.....	III-198
Gambar 3.5.22.	Tren Perubahan Kualitas Paramater COD pada Embung Kamang Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016.....	III-199
Gambar 3.5.23.	Tren Perubahan Kualitas Paramater Minyak Lemak pada Embung Kamang Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016.....	III-200
Gambar 3.5.24.	Kualitas Air Sumur Penduduk Paramater BOD dan COD Tahun 2016.....	III-201
Gambar 3.5.25.	Kualitas Air Sumur Penduduk Paramater Minyak Lemak	





	Tahun 2016.....	III-201
Gambar 3.5.26.	Tren Perubahan Kualitas Paramater BOD pada Sumur Penduduk Tahun 2015 dan 2016.....	III-202
Gambar 3.5.27.	Tren Perubahan Kualitas Paramater COD pada Sumur Penduduk Tahun 2015 dan 2016.....	III-203
Gambar 3.5.28.	Hasil Kualitas Udara Ambient Lokasi Sampling Masjid Al Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	III-204
Gambar 3.5.29.	Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara pada Masjid Al Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai Tahun 2016.....	III-205
Gambar 3.5.30.	Tren Penurunan Konsentrasi Paramater SO ₂ , NO ₂ , dan O ₃ dari Tahun 2015 ke Tahun 2016.....	III-206
Gambar 3.5.31.	Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.....	III-207
Gambar 3.5.32.	Perbandingan Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	III-207

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1.

KEBIJAKAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.2.

INISIATIF KEPALA DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Gambar 4.2.1.	Struktur Organisasi OPD Dinas Lingkungan Hidup.....	IV-7
Gambar 4.2.2.	Konsep Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya...	IV-8
Gambar 4.2.3.	Komposisi Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup.....	IV-10
Gambar 4.2.4.	Diklat Teknis di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pernah Diikuti.....	IV-11
Gambar 4.2.5.	Belanja Langsung DLH Tahun 2015 s.d 2017.....	IV-13
Gambar 4.2.6.	Tren Perkembangan APBD dan DAK LH 2015 s.d 2017....	IV-14
Gambar 4.2.7.	Tren Rasio Belanja Langsung DLH terhadap Belanja Langsung APBD Kabupaten Dharmasraya.....	IV-15
Gambar 4.2.8.	Pohon Jabon Tanaman Pelindung pada Jalan Nagari Sitiung.....	IV-17
Gambar 4.2.9.	Kebun Jabon Kelompok Tani Sako Mandiri Nagari Sitiung.....	IV-19
Gambar 4.2.10.	Kewajiban Menanam Pohon oleh Calon Pengantin pada Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar.....	IV-20
Gambar 4.2.11.	Mikrohidro pada Tambak Ikan Jorong Pisang Barabus.....	IV-26





Gambar 4.2.12.	Pemandangan Sungai Batanghari dari Pulau Punjung.....	IV-29
Gambar 4.2.13.	Rencana Pengembangan Wisata Outdoor Rumah Pompa Suharto di Pisang Barabus.....	IV-30
Gambar 4.2.14.	Potensi Lebah Galo-Galo pada Perkebunan Karet.....	IV-34
Gambar 4.2.15.	Pencitraan Udara Lahan Akses Terbuka di Kabupaten Dharmasraya.....	IV-34
Gambar 4.2.16.	DED Green Edu Ecoturisme Lahan Akses Terbuka Nagari Tabiang Tinggi yang disusun oleh KLHK Desember 2016..	IV-36
Gambar 4.2.17.	Bank Sampah Sajati III Gunung Selasih.....	IV-39



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*The United Nations Conference on Environment and Development/UNCED*) di Rio de Janeiro, tahun 1992, telah menghasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40, menjelaskan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multisektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, dan penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif. Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pada bidang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lingkungan hidup termasuk kedalam Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah





kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau; Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Kewenangan pengelolaan lingkungan hidup telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintah daerah Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 lampiran k yang terbagi atas sebelas sub bidang, yaitu: Perencanaan Lingkungan Hidup; Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Keanekaragaman Hayati (Kehati); Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup; dan Persampahan.

Pelaporan status lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai, menentukan prioritas masalah, membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Berdasarkan UU KIP tersebut informasi dikategorisasikan menjadi informasi tersedia setiap saat, berkala, serta merta dan informasi yang dikecualikan. Pelaporan status





lingkungan hidup merupakan informasi yang disediakan secara berkala. Informasi tersebut disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pada tahun 2002 pemerintah mulai menerbitkan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI). Bersamaan dengan itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menerbitkan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Penyediaan data dan informasi lingkungan hidup di daerah diawali pada tahun 1982 melalui penerbitan Neraca Lingkungan Hidup (NLH). Kemudian pada tahun 1986 diubah menjadi Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Selanjutnya pada tahun 1994 berubah menjadi Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (NKLD). Penyusunan laporan SLHD yang dilakukan sejak 2002 didasarkan pada surat Menteri Lingkungan Hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dengan mengacu kepada Pedoman Umum Penyusunan SLHD yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Seiring perkembangan waktu dan perkembangan kebijakan pemerintah, pada tahun 2016 Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan syarat dan indikator untuk penilaian kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) terkait kebijakan dan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya, penghargaan tersebut dinamakan Piala Bergilir Nirwasita Tantra yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia setiap tahunnya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) di Indonesia. Terkait dengan kesesuaian terhadap penghargaan dan dokumen yang menjadi syarat dan indikator untuk penghargaan tersebut, maka penghargaan Piala Bergilir Nirwasita Tantra Tahun 2017 ini, maka berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S156/Setjen/Datin/Set.0/2/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, maka Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2016 dinamakan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2016. DIKPLHD dilakukan penyusunan oleh daerah dan menjadi syarat dan indikator penilaian untuk seleksi Penghargaan Nirwasita Tantra 2017 bagi kepala daerah.





Keterkaitan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2016 yang akan menjadi informasi kinerja Bupati Dharmasraya dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2016.

1.2. PROFIL DAERAH DAN EKOLOGISNYA

Kabupaten Dharmasraya berada pada Jalur Lintas Sumatera yang menghubungkan antara Kota Padang, Pekanbaru dan Jambi. Secara geografis Kabupaten Dharmasraya terletak pada koordinat $00^{\circ}48'25,367''$ - $1^{\circ}41'40,269''$ LS (Lintang Selatan) dan $101^{\circ}8'32,52''$ - $101^{\circ}53'3,166''$ BT (Bujur Timur). Kabupaten Dharmasraya sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Kuantan Singingi (Propinsi Riau), sebelah Selatan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo di Propinsi Jambi dan di sebelah Barat dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Kabupaten Dharmasraya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 bersama Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten .

Aktifitas Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya secara resmi telah berjalan sejak dilantiknya Pejabat Bupati Dharmasraya pada tanggal 10 Januari 2004. Mulai tanggal 12 Agustus 2005 Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Bupati Definitif hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Ketika ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, dimana jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 (empat) kecamatan menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Lebih jelasnya dapat dilihat di tabel berikut.





Tabel 1.1.

Jumlah Nagari dan Jorong pada Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya

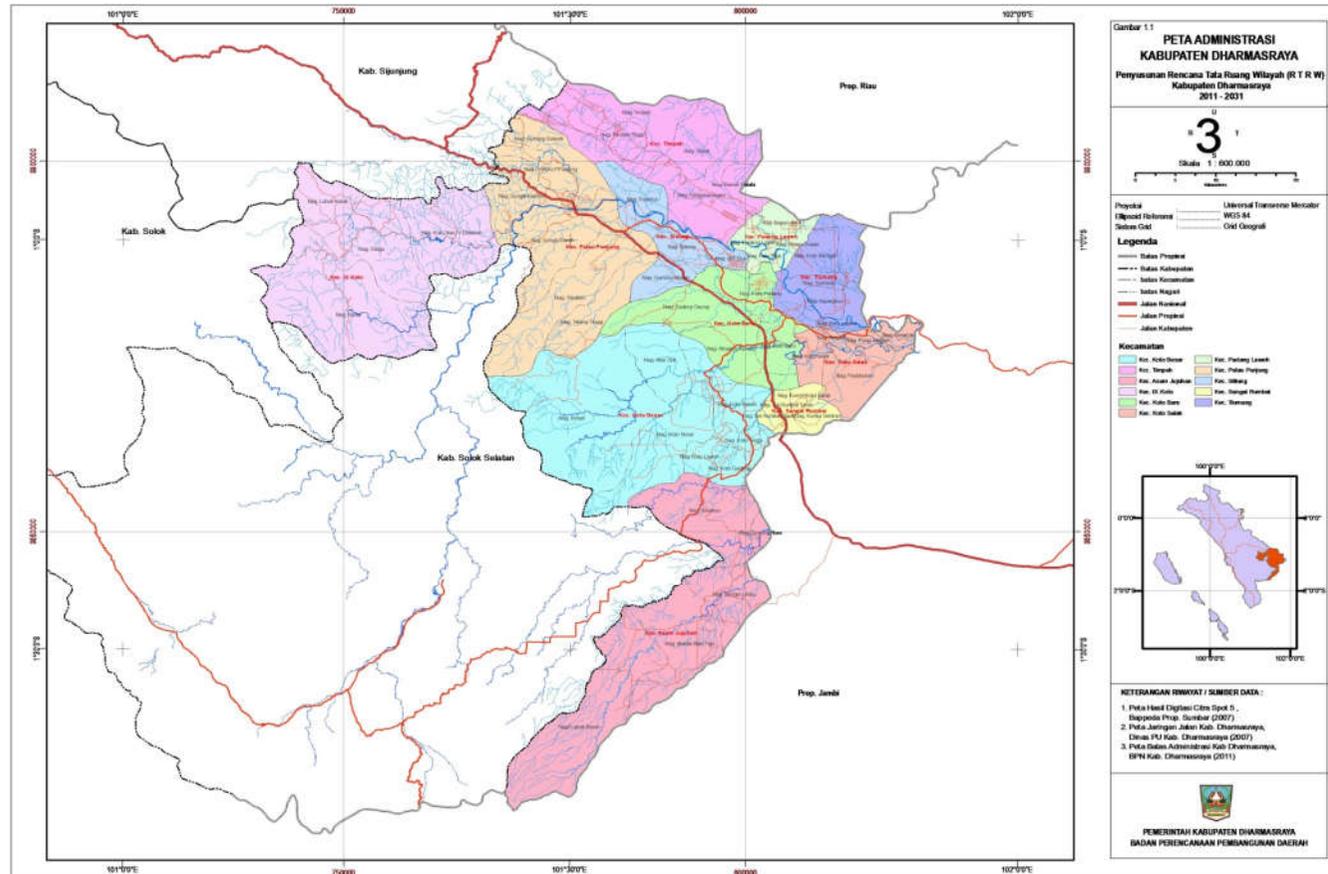
NO	KECAMATAN	NAGARI		JORONG	
		2005-2008	2009-2011	2005-2008	2009-2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kecamatan Sungai Rumbai	6	4	26	24
2	Kecamatan Koto Besar	-	7	-	32
3	Kecamatan Asam Jujuhan	-	5	-	22
4	Kecamatan Koto Baru	7	4	38	26
5	Kecamatan Koto Salak	-	5	-	27
6	Kecamatan Tiumang	-	4	-	17
7	Kecamatan Padang Laweh	-	4	-	17
8	Kecamatan Sitiung	3	4	20	22
9	Kecamatan Timpeh	-	5	-	21
10	Kecamatan Pulau Punjung	5	6	25	31
11	Kecamatan IX Koto	-	4	-	21
TOTAL		21	52	109	260

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya 4 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari maka terdapat beberapa nagari yang dimekarkan sehingga dari 21 nagari menjadi 52 nagari di Kabupaten Dharmasraya. Sedangkan jorong dimekarkan menjadi 260 jorong. Tujuan dari pemekaran ini agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih luas sehingga dapat melayani seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya..



Gambar 1.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Dharmasraya





Kondisi topografi Kabupaten Dharmasraya yang mayoritas merupakan lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1.525 meter dari permukaan laut. Luas wilayah menurut Kabupaten Dharmasraya menurut RTRW Kabupaten Dharmasraya seluas 302.599 Ha. Dari luas wilayah tersebut berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya seluas 21.797,3 Ha adalah kawasan lindung dan kawasan berfungsi lindung. Sedangkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 tentang Fungsi dan Status Kawasan Hutan, untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya seluas 92.150 Ha adalah kawasan hutan dimana 74.755 Ha adalah hutan produksi dan sisanya 17.395 Ha adalah hutan lindung, taman nasional dan cagar alam.

Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya mayoritas merupakan kegiatan perkebunan yaitu sekitar 63,7 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya keseluruhan. Kegiatan perkebunan tersebut di dominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Dominasi kegiatan perkebunan tersebut terlihat pada dominasi komoditi perkebunan tahunan pada Produk Domestik Bruto dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni mencapai lebih dari 20 % dari Produk Domestik Bruto Kabupaten Dharmasraya keseluruhan.

Tingginya komoditas perkebunan tersebut mendorong perkembangan industri pengolahan hasil perkebunan berkembang pesat di wilayah ini sehingga sampai saat ini terdapat 7 (tujuh) unit pabrik kelapa sawit dan 1 (satu) unit pabrik pengolahan karet skala menengah besar yang beroperasi untuk mengolah hasil perkebunan tersebut dengan nilai Produk Domestik Bruto mencapai 6,6 % dari Produk Domestik Bruto Kabupaten Dharmasraya keseluruhan.

Untuk kegiatan pertanian bahan makanan luas penggunaan lahan lahan sawah mencapai 1,6 % dan lahan kering mencapai 10,0 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya. Jumlah Produk Domestik Bruto untuk komoditi pertanian bahan makanan mencapai 3,6 % dari Produk Domestik Bruto Kabupaten Dharmasraya keseluruhan.

Kegiatan pertambangan dan penggalian sebenarnya secara Produk Domestik Bruto cukup tinggi yakni mencapai 11,8 % pada tahun 2012 tetapi terus mengalami penurunan mencapai 9,9 % dari Produk Domestik Bruto secara keseluruhan di tahun 2015, hal ini disebabkan oleh menurunnya produktifitas





komoditi batubara dan beberapa komoditi galian C dan peningkatan ketegasan pemerintah terhadap penindakan penambangan emas tanpa izin dan galian C tanpa izin.

Sumber daya air pada Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi, pada Kabupaten Dharmasraya terdapat 78 sungai besar dan kecil dengan debit mencapai 1.979 m³/dt dan memiliki embung sebanyak 16 buah embung dengan jumlah volume mencapai 115 ribu m³. Ketersediaan sumber daya air yang cukup tinggi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya. Selain ketersediaan sumber daya air, fasilitas sumber daya air cukup memadai dengan adanya Bendungan Sungai Batanghari dan Bendungan Sungai Siat yang mampu mengairi ribuan hektar lahan persawahan.

Salah satu sungai besar di Kabupaten Dharmasraya adalah Sungai Batanghari. Secara geografis daerah aliran Sungai Batanghari berada pada posisi 00° 43' sampai dengan 00° 46' Lintang Selatan dan 100° 45' sampai dengan 104° 25' Bujur Timur. Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang + 775 km. Hulunya berada di Propinsi Sumatera Barat dan mengalir ke Timur bermuara ke laut melalui Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Pada bagian hulu, pasokan air Sungai Batanghari berasal dari Gunung Talang yang mengalir melalui Danau Diatas (Kabupaten Solok) terus mendapat pasokan air sungai – sungai di Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya.

Sungai Batanghari pada cluster Kabupaten Dharmasraya sepanjang + 77 km dimana air Sungai Batanghari dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, industri dan keperluan domestik. Selain pemanfaatan, Sungai Batanghari pada cluster Kabupaten Dharmasraya banyak mendapat beban pencemaran yang cukup tinggi juga dari aktifitas ekonomi seperti limbah industri, limbah domestik, aktifitas pertambangan galian C, aktifitas pertambangan emas rakyat pada anak sungai dan Sungai Batanghari.

Bagian hulu DAS Batanghari berada di Provinsi Sumatera Barat yang meliputi wilayah seluas 19% luas DAS, bagian tengah dan hilir berada di Provinsi Jambi yang meliputi 80% luas DAS. Sisanya, sekitar 1% berada di Kabupaten





Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Kementerian Kehutanan, 2002). Keseluruhan wilayah Kabupaten Dharmasraya merupakan wilayah DAS bagian hulu Sungai Batanghari.

Pada bagian barat laut wilayah administratif Kabupaten Dharmasraya adalah berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sehingga sebagian besar wilayah tersebut merupakan buffer zone TNKS. Berdasarkan status kawasan sebagaimana pada SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013, pada wilayah tersebut terdapat 3.546 Ha wilayah TNKS dan 11.986 Ha hutan lindung. Pada wilayah tersebut juga terdapat Hutan Konservasi Prof DR. Soemitro Joyo Hadi Kusumo yang dikelola oleh PT Tidar Kerinci Agung, pada hutan konservasi tersebut terdapat penangkaran satwa liar korban konflik, atas kontribusi PT Tidar Krinci Agung tersebut terhadap kelestarian lingkungan hidup, maka pada tahun 2015 owner PT Tidar Krinci Agung mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Pemerintah Republik Indonesia.

1.3. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA DAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2017 melalui beberapa proses antara lain :

- Pada tahun 2016 dilakukan pembentukan Tim Pengumpulan Data yang anggotanya adalah stakeholder terkait antara lain : Bagian Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Bagian Hukum dan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPML2NPPKB, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag dan UMKM, Dinas Energi





dan Sumber Daya Mineral, Dinas PU, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dishubkominfoparbud, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, DPPKD, Dinas Sosnakertrans, BPS Kabupaten Dharmasraya, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat, dan LSM WWF serta Tim dari Bidang terkait Dinas Lingkungan Hidup;

- Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Tim Penyusun beranggotakan 3 (tiga) orang staf teknis Dinas Lingkungan Hidup, 1 (satu) orang akademisi dari Universitas Andalas dan 1 orang penggiat lingkungan hidup dari LSM WWF.
- Pengumpulan data primer berupa analisa laboratorium untuk kualitas air sungai, kualitas air embung, kualitas air sumur, kualitas hujan, kualitas udara ambient, dan kualitas air limbah kegiatan hotel yang dilakukan selama tahun 2016;
- Pengumpulan data sekunder dari stakeholder terkait tersebut dilakukan pada bulan Januari 2017;
- Penyusunan data primer dan sekunder yang dituangkan kedalam 53 tabel utama;
- Konsultasi Publik Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup melalui penyaringan isu lingkungan yang berkembang dan dominan terjadi di masyarakat yang akan dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016;
- Penetapan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Tahun 2016 oleh Bupati Dharmasraya, yang ditetapkan melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Dharmasraya;
- Pengintegrasian isu prioritas lingkungan hidup kedalam analisis *Pressure, state* dan *response* berdasarkan isu lingkungan tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan, memuat inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam bentuk tindak lanjut program kegiatan dan kebijakan yang akan dimuat dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016;



- Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 pada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera dan Pusat Data Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya melalui konsultasi publik terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya dan penyaringan isu dari peserta konsultasi publik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Peserta konsultasi publik terdiri seluruh tim teknis pengumpul data dan penyusun, unsur keterwakilan dari akademisi, pemerintahan, tokoh masyarakat, dan lembaga penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Adapun kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah : kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Hasil konsultasi publik perumusan isu prioritas lingkungan hidup pada Kabupaten Dharmasraya diperoleh 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup sebagai berikut :

- 1) Penurunan kualitas air permukaan;
- 2) Kegiatan Pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan;
- 3) Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan
- 4) Penanganan Limbah Domestik (Sampah Domestik dan Limbah Cair Domestik)
- 5) Tata Ruang Dalam Penataan Drainase

Isu prioritas lingkungan hidup tersebut akan ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya dan akan menjadi prioritas penanganan dalam program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kedepannya. Secara rinci proses perumusan isu prioritas lingkungan hidup akan dijelaskan pada Bab II dokumen ini.



1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 mempunyai maksud adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan isu prioritas, status kualitas lingkungan hidup dan kecenderungan perubahan yang terjadi terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Dharmasraya;
- b. Merumuskan sumber dan bentuk tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup serta kecenderungan sumber dan tekanan;
- c. Merumuskan bentuk upaya pengelolaan lingkungan serta peningkatan upaya yang dilakukan guna perbaikan lingkungan hidup dan pengurangan beban tekanan dari sumber pencemaran/kerusakan lingkungan;
- d. Menganalisis kebijakan dan merumuskan rekomendasi kebijakan daerah guna agenda pengelolaan lingkungan hidup kedepannya;

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman stakeholder terhadap kecenderungan dan kondisi lingkungan hidup;
- b. Menyediakan informasi tentang kondisi lingkungan hidup saat ini, prospeknya di masa mendatang yang akurat, berkala, dan terjangkau bagi publik, pemerintah, organisasi non-pemerintah, serta pengambil keputusan;
- c. Menyediakan data dasar bagi pengambilan kebijakan pada semua tingkat untuk memperbaiki kualitas lingkungan;
- d. Memberikan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup didaerahnya;
- e. Melaporkan keefektifan kebijakan dan program yang dirancang untuk menjawab perubahan lingkungan hidup, termasuk kemajuan dalam mencapai standar dan target lingkungan hidup;
- f. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pengambil kebijakan di daerah.





1.5. RUANG LINGKUP PENULISAN

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini meliputi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, perumusan isu prioritas lingkungan daerah dan penyajian informasi dengan model P-S-R (Pressure-State-Response), serta inovasi daerah yang dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun ruang lingkup dokumen ini meliputi :

1. Status lingkungan hidup yang berdasarkan media air, udara, lahan, dan keanekaragaman hayati;
2. Beban pencemaran dan laju/tingkat kerusakan serta indeks kualitas lingkungan meliputi indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks tutupan lahan;
3. Kelembagaan, kebijakan, program, dan kegiatan serta inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup;
4. Data pendukung (demografi sosial ekonomi dan pendapatan domestik bruto);
5. Data terkait potensi resiko bencana dan informasi bencana alam;
6. Dokumentasi kebijakan daerah berupa beberapa kebijakan yang dilakukan oleh daerah baik secara kelembagaan, anggaran, program dan kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
7. Hasil perumusan isu prioritas daerah melalui konsultasi publik dengan kriteria isu prioritas berupa (a) kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; (b) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan (c) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen);
8. Analisis Pressure, State, dan Response (P-S-R) isu lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yang meliputi :
 - a. Tataguna lahan, tataguna lahan berikut tutupan lahannya, tataguna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, dan lain sebagainya, data



yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya), data berbentuk spasial (peta) untuk mendukung. Analisis *pressure, state* dan *response* juga didukung dengan data berkala (*time series*). Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. *Response* telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Dan data-data lain yang dapat digunakan untuk mendukung analisis PSR.

- b. Kualitas air, data meliputi kualitas air sungai, air danau/embung, dan air tanah. *Response* mendorong penataan kegiatan dan/atau usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, sungai, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar dan data tambahan yang menunjang analisis.
- c. Kualitas udara, kualitas udara meliputi status mutu udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kebakaran hutan dan lahan, ISPA, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. *Response* berupa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut dalam bentuk kebijakan dan program.
- d. Resiko bencana, berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuh, banjir, longsor), bencana non alam (epidemi, dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial). *Pressure* berupa persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (land use), penyempitan badan sungai, kondisi drainase atau data lainnya yang menunjang. *Response* adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari



- peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan lingkungan diperlukan untuk analisis dan data tambahan yang menunjang analisis.
- e. Perkotaan, perkembangan kota berupa perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan yang indikasinya dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbunan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang mutlak dituangkan dalam analisis. Pressure dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan response-nya berupa kebijakan dan program yang dikembangkan.
9. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh bupati dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik) dan inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.



BAB II
ISU PRIORITAS
LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH



BAB II

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2.1. ISU LINGKUNGAN YANG TERJADI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi saat ini telah menjadi perhatian dan tema penting baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Hal ini wajar terjadi karena lingkungan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas fungsi lingkungan baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumberdaya alam, tataguna lahan dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan resiko bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab perubahan lingkungan itu terjadi. Dengan mengetahui penyebab dan besaran dampak yang telah terjadi inilah selanjutnya dapat ditentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan, sehingga pada satu sisi dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun pada sisi lainnya dapat seoptimal mungkin mengurangi dampak yang terjadi.

Pada proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dilakukan penyampaian isu-isu lingkungan melalui pendapat publik, yang dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pemerintahan daerah, pemerintahan camat dan nagari, perwakilan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta anggota tim data dan tim





penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Isu lingkungan yang diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Beberapa isu lingkungan yang muncul yaitu diantaranya:

- 1) Permasalahan persampahan dan drainase pada pemukiman penduduk yang tidak terkelola dengan baik. Sering kali terjadi pembangunan perumahan namun tidak disertai dengan pembangunan drainase dan fasilitas pengelolaan sampah.
- 2) Masih ada ditemukan penduduk yang MCK di sungai, perlu adanya sosialisasi lingkungan sehat ke nagari-nagari melalui kelompok-kelompok tani, seperti KWT (Kelompok Tani Wanita) yang dengan sukarela menjangir pendanaan dan membangun MCK di sepanjang DAS, supaya tidak ada lagi masyarakat yang MCK di Sungai, dan menjaga agar lingkungan sepanjang sungai bersih dari limbah manusia.
- 3) Terjadinya banjir jika musim penghujan datang, seperti yang terjadi di Kecamatan Timpeh, banyak rumah penduduk terendam dan mengalami kerugian harta benda.
- 4) Isu penataan drainase yang tidak dirawat dan dibersihkan, sehingga menyebabkan permasalahan banjir di kawasan perumahan, bahkan ada di kawasan perumahan yang tidak memiliki aliran drainase yang jelas aliran buangnya.
- 5) Adanya lahan tandus yang tidak terkelola, sehingga menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi pada sungai yang berada dekat dari lahan tersebut.
- 6) Masih adanya masyarakat yang membakar sampah dan membakar sisa penebasan rumput di lahan perkebunan pada saat musim kemarau sehingga menambah polusi udara dan dapat memicu kebakaran lahan.
- 7) Masalah persampahan terutama yang berasal dari sampah pasar, karena di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya ada terdapat pasar yang menghasilkan sampah organik yang cukup banyak. Jika diolah dan dimanfaatkan bisa menjadi pupuk kompos organik.



- 8) Masih ditemukan adanya pertambangan tanpa izin yang menyebabkan terjadinya pencemaran air dan air sungai yang ada tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sungai.
- 9) Perlu adanya koordinasi dan tindakan terkait adanya penggunaan merkuri pada pertambangan tanpa izin, aliran air dari pertambangan yang mengandung merkuri dapat masuk ke sungai, seperti ke sungai Batanghari yang merupakan sumber air irigasi sawah penduduk dan juga banyak dimanfaatkan untuk perikanan dan peternakan. Penggunaan merkuri dapat meresap kedalam air tanah. Jika air sungai Batanghari telah terkontaminasi merkuri perlu upaya dan kebijakan atas pemanfaatan air sungai Batanghari tersebut karena dampak yang ditimbulkan akan semakin luas jika tidak dilakukan pencegahan dari saat ini. Selain itu, ikan dan biota dalam perairan yang telah terkontaminasi oleh merkuri perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan untuk kadar merkuri dalam ikan sungai.
- 10) Terjadinya perubahan fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perkebunan, yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Dharmasraya, selain itu juga berdampak terhadap ketersediaan pasokan air karena sawit banyak mengkonsumsi air tanah.
- 11) Pencemaran udara akibat aktivitas pabrik dan juga asap kabut akibat dari kebakaran hutan/lahan dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, seperti pada kasus tahun 2015, Kabupaten Dharmasraya menerima asap kiriman yang sangat pekat dari provinsi tetangga, Riau dan Jambi
- 12) Perlu adanya pengelolaan limbah domestik terpadu melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), atau dikenal dengan sanitasi total bermasyarakat yang sudah mencakup pengelolaan sanitasi masyarakat, jamban, sampah, drainase, limbah domestik, dll).

Penyampaian isu-isu lingkungan oleh para peserta konsultasi publik tersebut akan disaring untuk diseleksi menjadi isu prioritas daerah. Melalui pelaksanaan konsultasi publik ini, diharapkan nantinya akan diperoleh isu prioritas lingkungan Kabupaten Dharmasraya minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu prioritas sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Juknis Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang





dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

2.2. PROSES PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Isu prioritas berisikan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) isu. Penetapan isu priritas didasarkan pada proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah

Proses pelaksanaan konsultasi publik untuk menentukan isu prioritas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap persiapan, yaitu persiapan daftar undangan peserta yang akan terlibat dalam konsultasi publik, yaitu terdiri dari perwakilan dari instansi pemerintahan daerah, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Badan Keuangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Trasnigrasi dan Tenaga Kerja, Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Komunikasi dan informatika, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Badan Pusat Statistik, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat, perguruan tinggi dan LSM WWF, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Bagian Hukum Sekda, Camat Pulau Punjung, Camat IX Koto, Camat Sitiung, Camat Timpeh, Camat Padang Laweh, Camat Koto Baru, Camat Tiumbang, Camat Koto Salak, Camat Koto Besar, Camat Sungai Rumbai, Camat Asam Jujuhan, Tim Data dan Analisis,





- Tim Penyusun, serta dari Bidang terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.
2. Persiapan bahan presentasi, data primer dan data sekunder yang telah dihimpun selama tahun 2016 yang terangkum dan disusun dalam 53 tabel utama dan analisis kondisi lingkungan berdasarkan data.
 3. Pelaksanaan konsultasi publik dilaksanakan atas izin Bupati Dharmasraya dan Wakil Bupati Dharmasraya, yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 April 2017 di Aula Lantai II Kantor Bupati, Kecamatan Pulau Punjung.
 4. Kegiatan konsultasi publik dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan moderator Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.
 5. Tahap awal dibuka dengan penyampaian isu-isu lingkungan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya selama periode 5 (lima) tahun yang telah disusun dalam buku Status Lingkungan Hidup Dharmasraya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Selain itu juga penyampaian permasalahan lingkungan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya selaku leading sektor bidang lingkungan hidup.
 6. Partisipatif peserta juga terlihat pada saat penyampaian beberapa isu lingkungan yang sedang berkembang dan terjadi di masyarakat, yaitu dari Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Capil, Bidang Fisik Prasarana BAPPEDA, Staf teknis Dinas Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Koperindag, Transnaker, Sekretaris Camat Sungai Rumbai, Bagian Pemerintahan Kecamatan Timpeh, Wali Nagari.
 7. Semua isu-isu yang ada diterima dan dicatat sebagai isu publik. Sementara itu, setiap peserta diberikan kertas selebar dan diminta untuk menuliskan satu isu yang sangat krusial dari sekian banyak isu yang telah diungkapkan oleh peserta konsultasi publik.
 8. Isu yang telah dicatat, dikumpulkan dan ditempelkan pada papan tulis yang tersedia, lalu dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sama. Isu-isu utama yang banyak muncul yaitu seputar pencemaran air, pencemaran udara, tata



- ruang, pengelolaan sampah, limbah domestik, alih fungsi lahan, dan pertambangan. Masing-masing isu yang telah dikelompokkan tersebut diurutkan mulai dari yang terbanyak mendapatkan respon sampai yang sedikit memperoleh respon.
9. Kemudian dibuka tahap diskusi untuk melakukan analisis dan menetapkan apa-apa saja yang akan dijadikan isu prioritas lingkungan dengan mempertimbangkan tekanan atau penyebab yang terjadi, kondisi saat ini dan upaya peningkatan kualitas lingkungan, serta berdasarkan pada kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas yaitu:
 - a) Kerusakan sumber daya alam, kerusakan keanekaragaman hayati;
 - b) Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup.
 - c) Mendapat perhatian publik luas dan perlu ditangani segera (urgen).
 10. Pada tahap penjaringan isu, seluruh peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap isu prioritas lingkungan sementara (pencemaran air, pencemaran udara, tata ruang, pengelolaan sampah dan limbah domestik, alih fungsi lahan, dan pertambangan), berdasarkan 3 (tiga) kriteria tersebut diatas, dengan point 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) dan dituliskan pada lembaran yang telah tersedia. Lalu panitia mengumpulkan lembaran kertas penilaian, menghitung dan menjumlahkan penilaian masing-masing peserta per-masing-masing isu prioritas lingkungan sementara tersebut.
 11. Hasil penjumlahan isu prioritas diurutkan kembali sesuai penilaian tertinggi ke penilaian terendah dengan jumlah kertas penilaian sebanyak jumlah peserta yang ikut polling yaitu 35 (tiga puluh lima) peserta. Adapun hasil penjumlahan nilai Isu Prioritas adalah: Pencemaran air 962 poin, pertambangan 936 poin, alih fungsi lahan 868 poin, limbah domestik 863 poin, tata ruang 832 poin dan pencemaran udara 809 poin.
 12. Tahapan analisis dibuka kembali dengan memberikan saran dan pertimbangan, serta solusi dari masing-masing peserta untuk menetapkan isu prioritas lingkungan demi perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dimasa mendatang.



13. Adapun hasil konsultasi publik perumusan isu prioritas lingkungan hidup pada Kabupaten Dharmasraya diperoleh 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup sebagai berikut :

- 1) Penurunan kualitas air permukaan;
- 2) Kegiatan Pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan;
- 3) Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan;
- 4) Penanganan Limbah Domestik (Sampah Domestik dan Limbah Cair Domestik);
- 5) Tata Ruang Dalam Penataan Drainase.

2.3. PENETAPAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan melalui konsultasi publik dengan melakukan penyaringan terhadap isu lingkungan yang berkembang dan dominan terjadi di masyarakat, serta kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Adapun kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dan analisis isu prioritas adalah: kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Konsultasi Publik dan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup dilakukan melalui penyaringan yang akan dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya berdasarkan hasil konsultasi publik yang ditetapkan melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Bupati Dharmasraya.

Adapun 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya yang telah ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya yaitu sebagai berikut :

- 1 Penurunan kualitas air permukaan;
- 2 Kegiatan Pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan;
- 3 Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan;





- 4 Penanganan Limbah Domestik (Sampah Domestik dan Limbah Cair Domestik);
- 5 Tata Ruang Dalam Penataan Drainase.

Isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan akan diintegrasikan kedalam analisis *Pressure, state* dan *response* untuk tataguna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko bencana dan perkotaan, serta memuat inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah melalui program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kedepannya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalisir isu prioritas lingkungan dalam bentuk tindak lanjut program kegiatan dan kebijakan yang akan dimuat dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.



BAB III

ANALISIS PRESSURE,

STATE, DAN

RESPONSE, ISU

LINGKUNGAN HIDUP

DAERAH



BAB III

ANALISIS PRESSURE, STATE, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP

3.1. TATAGUNA LAHAN

Tataguna lahan (*land use*) adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misalnya pemukiman, perdagangan, industri dan lain-lain. Rencana tataguna lahan merupakan kerangka kerja yang menetapkan keputusan-keputusan terkait tentang lokasi, kapasitas dan jadwal pembuatan jalan, saluran air bersih dan air limbah, gedung sekolah, pusat kesehatan, taman dan pusat-pusat pelayanan serta fasilitas umum lainnya. Tataguna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama dalam pengelolaan lingkungan.

Pengertian lahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. Hamparan ekosistem daratan tersebut berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Analisa yang digunakan untuk menguraikan permasalahan tataguna lahan pada Kabupaten Dharmasraya dikelompokkan pada tekanan/pressure, status/statue and upaya/respons (P-S-R). Untuk tekanan terkait tataguna lahan diantaranya :

- Luas wilayah menurut penggunaan lahan utama;
- Luas perubahan penggunaan lahan;
- Jenis pemanfaatan lahan;
- Luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian





Sedangkan terkait status tataguna lahan digambarkan pada uraian terkait diantaranya :

- Luas kawasan lindung berdasarkan RTRW;
- Luas hutan berdasarkan fungsi dan status;
- Luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah

Terkait upaya atau respon yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terkait pengendalian perusakan lingkungan hidup tersebut digambarkan melalui upaya pencegahan kerusakan lingkungan, upaya penanggulangan kerusakan lingkungan, dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan yang diantaranya berupa upaya realisasi penghijauan dan reboisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Pendekatan analisis P-S-R yang dilakukan dengan menggambarkan uraian sebagai berikut :

- Gambaran umum kondisi dan kedalaman (*magnitudo*);
- Perbandingan antar waktu, antar lokasi, dan perbandingan terhadap baku mutu;
- Analisa statistik sederhana.

3.1.1. TEKANAN TERHADAP TATAGUNA LAHAN

Tekanan (*pressure*) yang menjadi penyebab berubahnya kondisi tataguna lahan di Kabupaten Dharmasraya sebagian besar disebabkan oleh perubahan lahan dari tutupan alaminya menjadi penggunaan budi daya bahkan menjadi lahan kritis diantaranya:

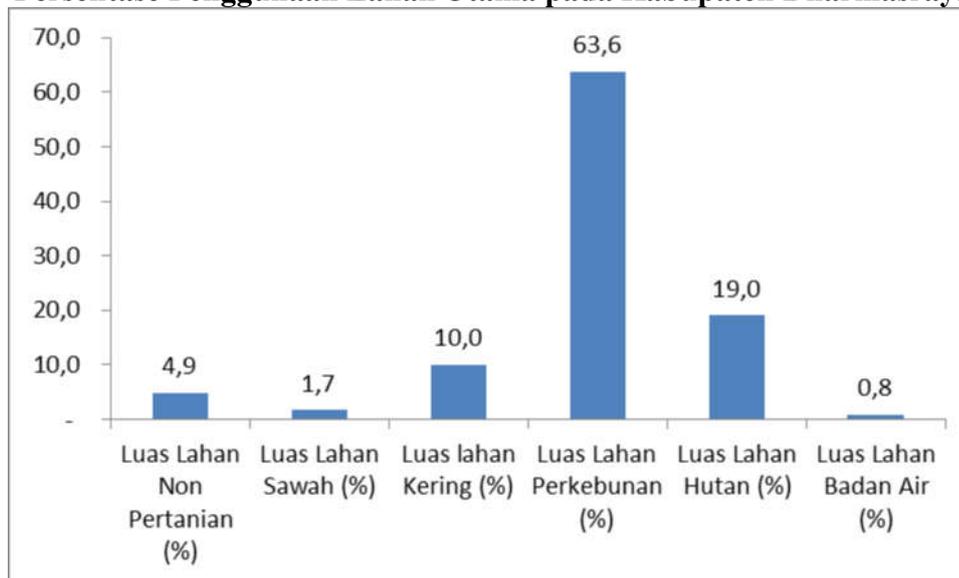
a Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama;

Penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya digunakan pada sektor non pertanian, sawah, lahan kering, perkebunan, hutan dan badan air. Berdasarkan data dari WWF Indonesia yang merupakan hasil interpretasi Citra Landsat 8 OLI. Penggunaan lahan utama yang paling dominan adalah untuk perkebunan dengan luas 191.653 Ha, kemudian hutan dengan luas 57.288 Ha, lahan kering dengan



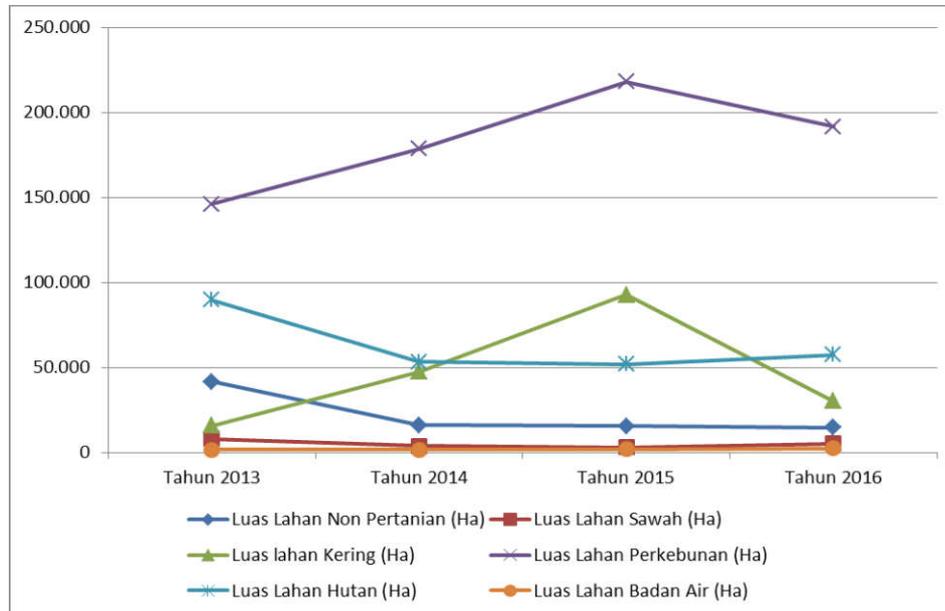
luas 30.148 Ha, non pertanian dengan luas 14.665 Ha, lahan sawah 5.048 Ha, dan badan air dengan luas 2.314 Ha. Secara persentase penggunaan lahan tertinggi yakni sector perkebunan terdiri dari perkebunan karet dan kelapa sawit mencapai 63,6 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Dharmasraya, dan penggunaan lahan terendah adalah badan air yakni mencapai 0,8% dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 3.1.1.
Persentase Penggunaan Lahan Utama pada Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-2. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Jika dilihat tren perubahannya untuk lahan perkebunan dari tahun 2013 ke tahun 2015 mengalami peningkatan tetapi selanjutnya pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlahnya begitupun untuk tren perubahan penggunaan untuk lahan kering. Sedangkan untuk penggunaan lahan hutan dan non pertanian relatif menurun jumlahnya dari tahun 2013 ke tahun 2014 dan selanjutnya relatif stabil, sedangkan untuk luasan sawah dan badan air relative stabil.

**Gambar 3.1.2. Tren Perubahan Penggunaan Lahan Utama**

Sumber: Olahan Tabel-2B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Tetapi setelah dilakukan analisa lebih mendalam, dari tren data penggunaan lahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 ternyata data tahun 2015 mengalami deviasi yang cukup tinggi.

Gambar 3.1.3. Total Luasan Wilayah Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Data Base Pengolahan GIS untuk Penggunaan Lahan

Sumber: Olahan Tabel-2B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

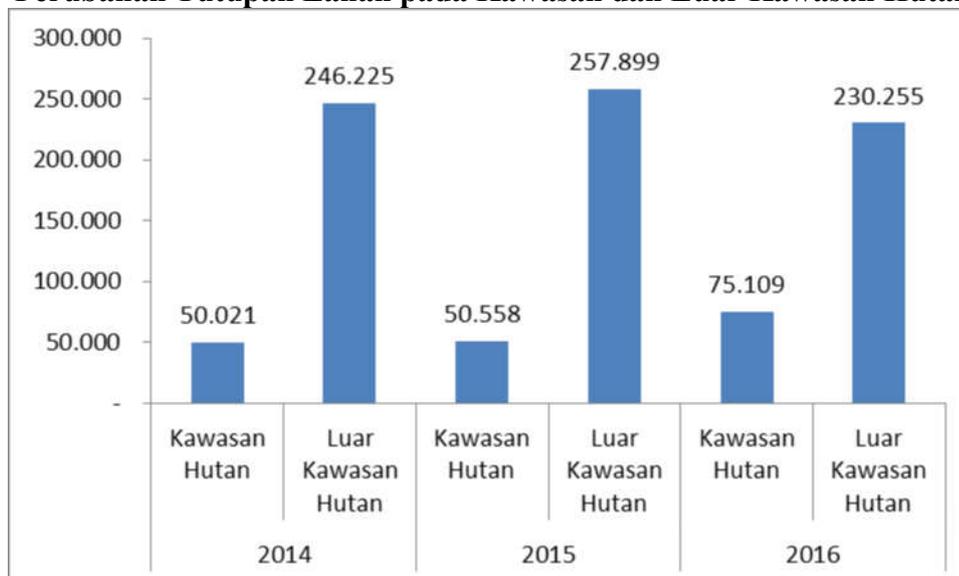




Berdasarkan evaluasi ternyata ada perbedaan data base GIS peta administratif yang digunakan dalam analisa data melalui GIS. Pada tahun 2015 berdasarkan peta administratif GIS luasan lahan di Kabupaten Dharmasraya mencapai 382.600 Ha padahal idealnya adalah 301 ribu Ha. sedangkan berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 adalah 302.599 Ha.

Dari sisi tutupan lahan dimana definisinya adalah kondisi lahan yang masih memiliki tutupan baik perkebunan maupun hutan pada kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan, gambaran informasi ini diambil dari interpretasi Citra Landsat 8 OLI Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 overlay dengan Fungsi Hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 dan Status Hutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 terlihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1.4.
Perubahan Tutupan Lahan pada Kawasan dan Luar Kawasan Hutan



Sumber: Olahan Tabel-2C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

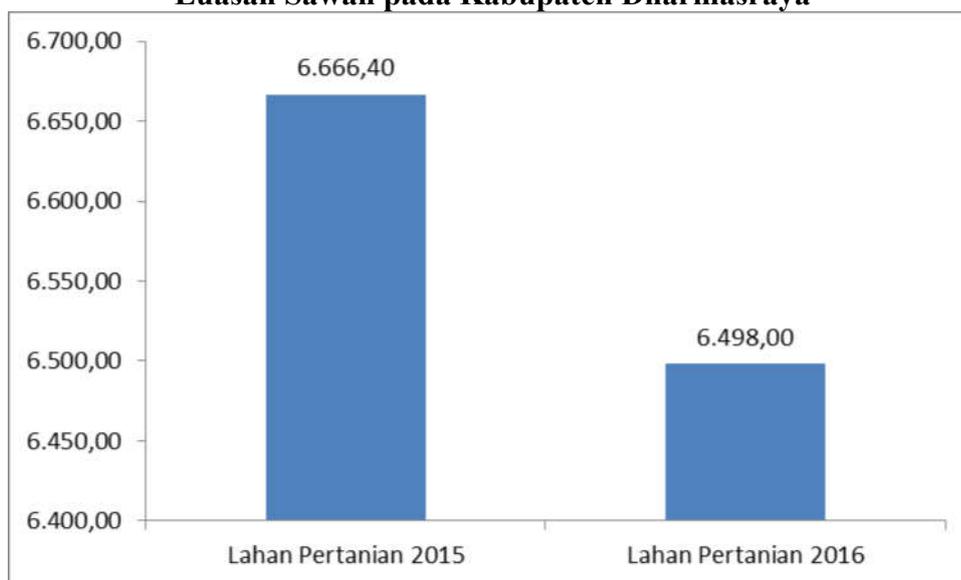
Berdasarkan olahan data oleh WWF tersebut, tutupan lahan pada kawasan hutan meningkat pada tahun 2016, tapi hal ini tidak dapat dinilai baik, mungkin beberapa tahun sebelumnya berdasarkan pencitraan satelit adalah lahan kawasan



hutan yang terbuka tetapi saat ini telah beralih fungsi menjadi perkebunan homogen.

Dari sisi pertanian, berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Dharmasraya tahun 2016, ternyata pada tahun 2016 terjadi penurunan luasan lahan pertanian sawah baik irigasi maupun non irigasi pada Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu wilayah rencana pengembangan pertanian lumbung padi nasional, sebab pada Kabupaten Dharmasraya terdapat Bendungan Sungai Batanghari yang direncanakan dapat memenuhi kebutuhan sawah untuk lebih dari 14 ribu hektar sawah pada Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura tersebut sawah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 hanya mencapai 6.400 hektar.

Gambar 3.1.5.
Luasan Sawah pada Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-2D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

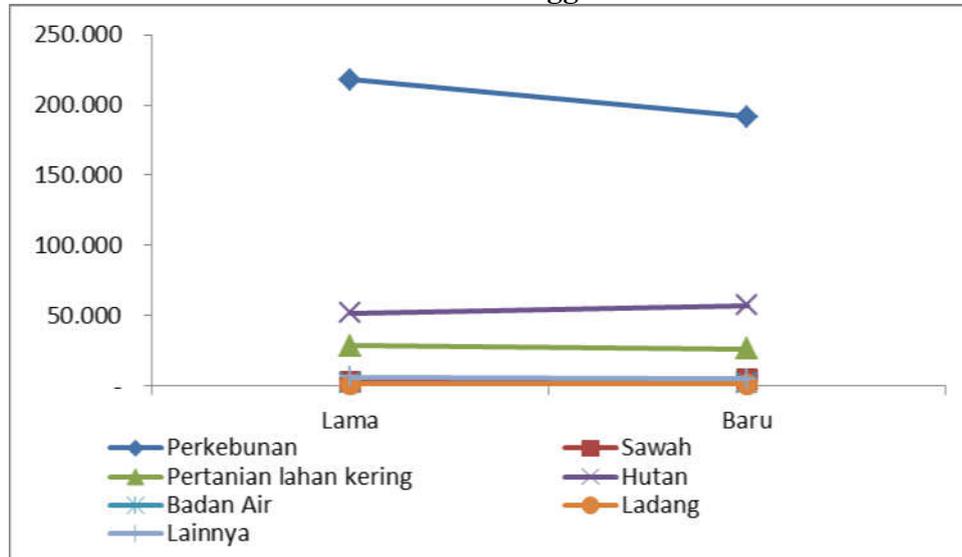
b Luas Perubahan Penggunaan Lahan;

Pada Tabel 11 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, yang menggabungkan data dari WWF Indonesia, 2016, Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya melalui Dharmasraya Dalam Angka, 2016, dan Dinas Lingkungan Hidup



Kabupaten Dharmasraya, 2016 diperoleh gambaran perubahan penggunaan lahan sebagai berikut :

Gambar 3.1.6.
Perubahan Luasan Penggunaan Lahan



Sumber: Olahan Tabel-11. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Sama seperti yang diuraikan sebelumnya, ternyata luasan lahan perkebunan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni diperkirakan hal ini bukan disebabkan oleh berkurangnya antusiasme masyarakat pada komoditi karet dan kelapa sawit tetapi disebabkan beberapa perusahaan perkebunan besar dan masyarakat sedang dalam tahap replanting atau peremajaan kembali perkebunannya. Sedangkan untuk penggunaan lahan lainnya seperti sawah, hutan, lading, da pertanian lahan kering relatif stabil tidak mengalami perubah yang significant.

c Jenis Pemanfaatan Lahan;

Gambaran tentang pemanfaatan lahan akan diuraikan disini adalah pemanfaatan lahan skala usaha (Tabel 12 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016). Data yang berhasil dihimpun hanya data yang berasal dari Izin Pertambangan dan Izin Perkebunan skala usaha dan/atau kegiatan. Berikut ini gambaran pemanfaatn



lahan berdasarkan Tabel 12 Lampiran Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Tabel 3.1.1.
Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas (Ha)	Keterangan
1	Pertambangan	0	Besar	0	
		2	Menengah	752,73	Data UKL/UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
		6	Kecil	18,00	Data UKL/UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
		0	Rakyat	0	
2	Perkebunan	6	Besar	71.375,69	Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan
		0	Menengah	0	
		0	Kecil	0	
		0	Rakyat	0	
3	Pertanian	0	Besar	0	
		0	Menengah	0	
		0	Kecil	0	
		0	Rakyat	0	
4	Pemanfaatan Hutan	0	Besar	0	
		0	Menengah	0	
		0	Kecil	0	
		0	Rakyat	0	
5	Perindustrian	0	Besar	0	
		7	Menengah	0	
		0	Kecil	0	
		591	Rakyat	0	SIPD Koperindag

Sumber: Olahan Tabel-12. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Untuk pertambangan batubara sampai dengan saat ini hanya tinggal 2 (dua) IUP Produksi Batu Bara yakni IUP Produksi Batubara PT Sinamarinda Lintas Sumatera dan IUP Produksi Batubara KUD Sinamar Sakato. Sedangkan untuk perkebunan pada Kabupaten Dharmasraya terdapat 5 Izin Usaha Perkebunan dan 1 Izin Hutan Tanaman Industri. Untuk industri kecil berdasarkan data dari Dinas Koperindag Kabupaten Dharmasraya terdapat 591 usaha skala kecil.





d Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

Untuk kegiatan pertambangan dimana pada akhir tahun 2016 ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya dilakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerah disebabkan TUPOKSI Pertambangan berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 2014 tidak lagi menjadi TUPOKSI kabupaten/kota sehingga dilakukan rasionalisasi OPD. Untuk itu data Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian berdasarkan data pada Dokumen Lingkungan Kegiatan dan Data pada Laporan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan dan/atau Usaha.

Tabel 3.1.2.
Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Batu Bara	KUD Sinamar Sakato	197,33	-	75.457,43
2	Batu Bara	Sinamar Lintas Sumatera (SLN)	555,40	-	55.035,46
3	Batuan (Sirtukil)	Ridwan R	3,00	-	5.851,00
4	Batuan (Sirtukil)	Asrida	2,00	-	2.000,00
5	Batuan (Sirtukil)	Arjuna	4,00	-	280,00
6	Batuan (Sirtukil)	H. Abdul Haris Tuanku Sati	3,00	-	1.750,00
7	Batuan (Sirtukil)	Syahrial Salam	3,00	-	600,00
8	Batuan (Sirtukil)	Amrizal Dt Rajo Medan	3,00	-	4.700,00

Sumber: Olahan Tabel-12. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Ada 2 (dua) jenis kegiatan pertambangan yang berjalan secara legal pada Kabupaten Dharmasraya yakni pertambangan batubara dan pertambangan batuan sirtukil, sedangkan pertambangan emas yang kerap beroperasi pada anak-anak sungai dan lokasi yang terpencil adalah pertambangan emas tanpa izin (illegal).

Ada komoditi jenis mineral mangan pada bagian timur wilayah Kabupaten Dharmasraya tetapi sampai saat ini kegiatan penambangan terbuka yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Timpeh tersebut belum ditetapkan pemerintah



sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga belum dapat diterbitkan Izin Pertambangan Emas Rakyat (IPR) mineral mangan.

Aktifitas pertambangan yang paling berdampak terhadap kerusakan lingkungan adalah aktifitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang beroperasi pada Kabupaten Dharmasraya. permasalahan ini adalah permasalahan yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan tetapi telah banyak terjadi pengurangan aktifitas disebabkan telah makin berkurangnya lokasi yang memiliki potensi kandungan emas.

Secara kronologisnya, sejarah penambangan emas pada Kabupaten Dharmasraya sejak dari nenek moyang dahulu tetapi aktifitasnya menggunakan peralatan sederhana yakni mendulang. Pada tahun 1998, perkembangan penambangan emas rakyat mulai berubah teknologi dengan menggunakan peralatan relative modern yakni menggunakan mesin sedot yakni dompeng. Keadaan ini mulai berkembang dengan munculnya investor dan tenaga kerja dariluar yakni dari Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan sehingga masyarakat local lebih banyak sebagai penyedia lahan bagi aktitas tersebut.

Keadaan ini terus berlangsung skala ekoregion yakni mulai dari hulu Sungai Batanghari yakni Propinsi Sumatera Barat (Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya) dan Propinsi Jambi (Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo). Permasalahan ini telah pernah diselesaikan secara nasional bahkan pernah masuk dalam Indonesia Lawyer Club dimana Bupati Kabupaten Solok Selatan memaparkan masalah ini tetapi belum ada solusi yang terintegrasi dari pemerintah.

Gambaran aktifitas PETI pada Kabupaten Dharmasraya terbagi pada 2 (dua) aktifitas yaitu terjadi pada badan air yakni menggunakan kapal yang dilengkapi dengan mesin penyedot. Kegiatan penambangan emas menggunakan kapal ini terjadi pada beberapa titik pada alur Sungai Batanghari pada Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya adalah aktifitas PETI dengan menggunakan mesin dompeng yakni dengan melakukan peyemprotan dinding sungai dan bantaran sungai kemudian dilakukan penyedotan dan dialirkan pada pemisahan secara fisik berdasarkan berat jenis pada filter/karpet. Aktifitas dompeng ini dominan terjadi pada anak-anak Sungai Batanghari yakni Sungai Palangko, Sungai Nyunyo,



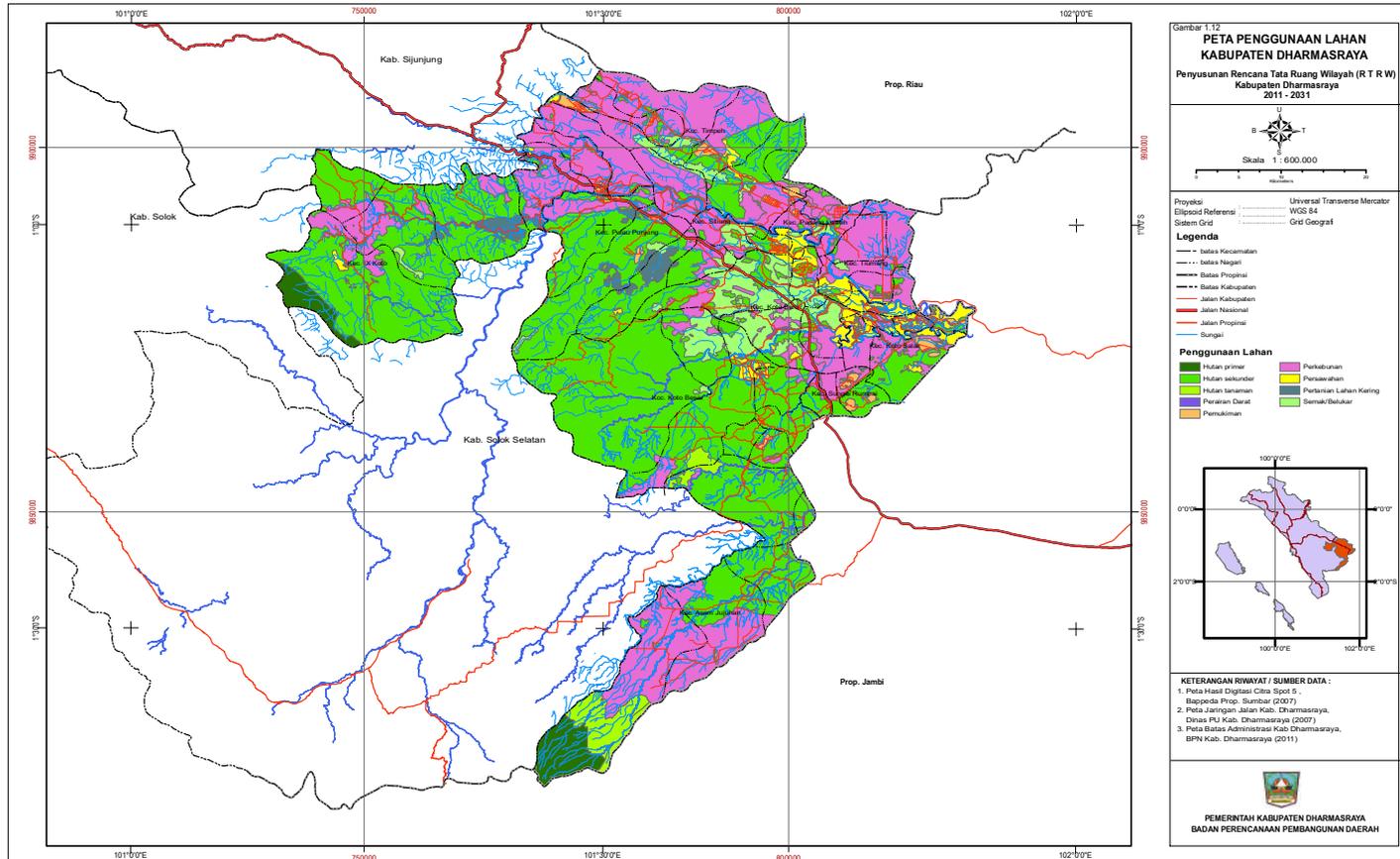


Sungai Piruko, Sungai Koto Balai (secara administratif pada bagian barat wilayah Kabupaten Dharmasraya).

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yakni berupaya melakukan tindakan pengendalian yakni dengan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan melalui penataan dan koordinasi terpadu stakeholder. Penataan PETI terkendala bahwa lokasi potensi kandungan emas tidak berhasil diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sehingga Izin Pertambangan Rakyatnya tidak dapat diterbitkan. Sedangkan koordinasi dengan stakeholder telah dilakukan baik oleh Kementerian Lingkungan Hidup Ekoregion Sumatera dengan membentuk Sekretariat Bersama DAS Batanghari dan penyusunan masterplan pengelolaan Sungai Batanghari, dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat melalui Sekretariat Bersama DAS Batanghari yakni Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya. Untuk hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah membuat Tim Pemberantasan PETI yang dikoordinir oleh Dinas ESDM Kabupaten Dharmasraya yang melibatkan stakeholder terkait mulai dari Kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan Pemerintah Nagari setempat.

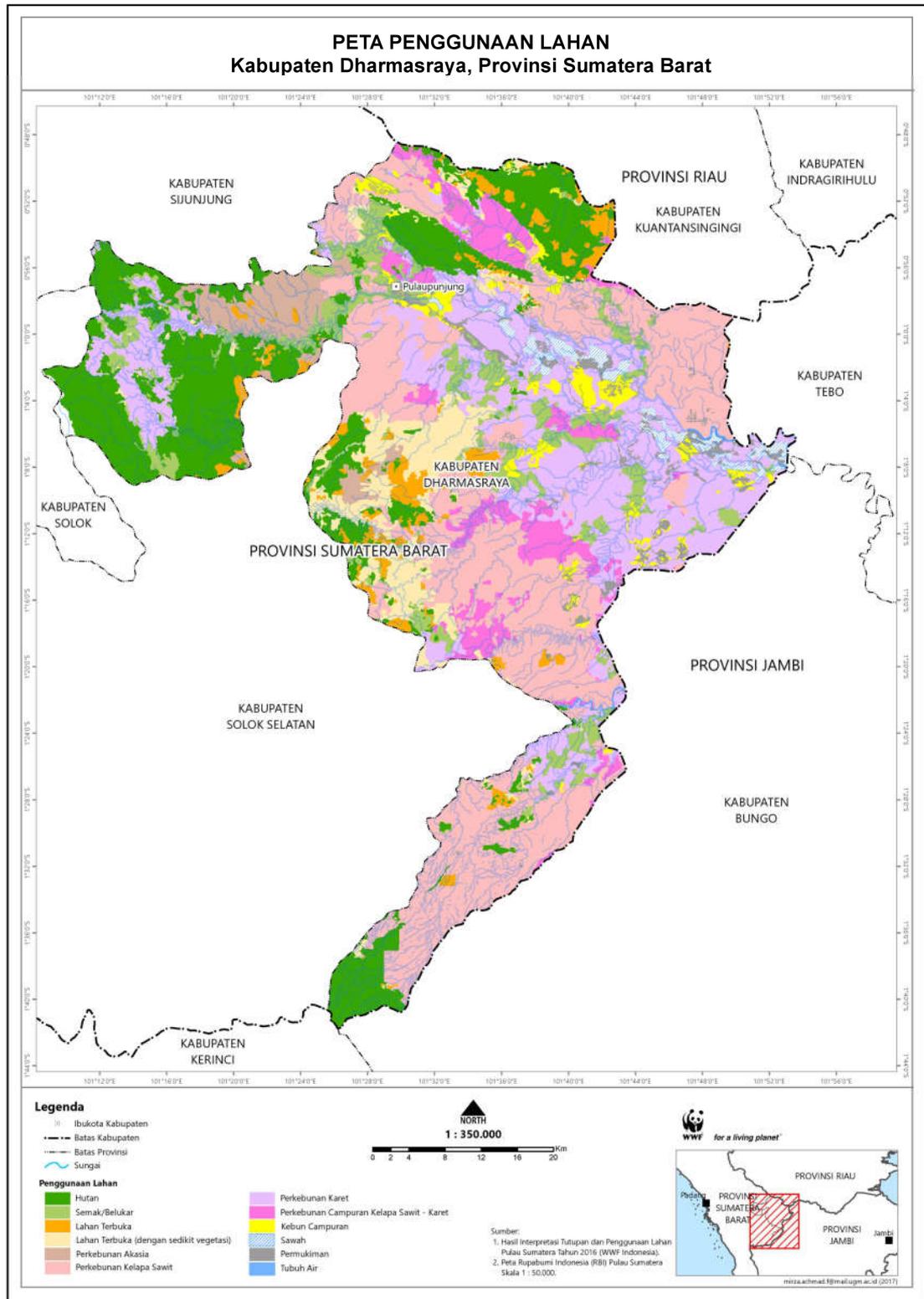
Terjadi beberapa perubahan aktifitas PETI dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini, penurunan drastic aktifitas PETI berupa kapal pada Sungai Batanghari dan aktifitas PETI dompeng pada anak-anak sungai. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan lahan yang semakin sempit dan didukung oleh tindakan dari aparat penegak hukum yang semakin tegas. Tindakan tegas dari aparat penegak hukum (Kepolisian Daerah Resort Kabupaten Dharmasraya) ini disebabkan oleh pada tahun 2013 terjadi penyanderaan Kepala Polisi Resort Kabupaten Dharmasraya oleh masyarakat pelaku PETI. Drama penyanderaan ini berakhir dengan tindakan tegas oleh aparat kepolisian yang didukung oleh Brimob dari Kota Padang Panjang yang didatangkan untuk menangani permasalahan ini. Sejak kejadian tersebut aparat penegak hukum kepolisian lebih bertidak tegas dalam melakukan pemberantasan PETI.





Gambar 3.1.7. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan RTRW





Gambar 3.1.8. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Data WWF Indonesia



3.1.2. KONDISI/STATUS TATAGUNA LAHAN

Terkait kondisi/status tataguna lahan pada Kabupaten Dharmasraya digambarkan pada uraian terkait diantaranya:

- Luas kawasan lindung berdasarkan RTRW;
- Luas hutan berdasarkan fungsi dan status;
- Luas lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering;
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah

Dari kondisi-kondisi tersebut diatas dapat terlihat gambaran kualitas tataguna lahan dan kualitas kerusakan lahan pada Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut.

a Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 kawasan lindung pada Kabupaten Dharmasraya terdiri atas, kawasan hutan lindung, kawasan sempadan sungai, kawasan suaka alam, cagar alam, taman nasional, cagar budaya, dan kawasan plasma nutfah dengan luasan mencapai 26.902,71 Ha, dengan luas wilayah Kabupaten Dharmasraya mencapai 301.116 Ha. Dari gambaran tersebut bahwa persentase luasan kawasan lindung mencapai 8,93% dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Kawasan lindung ini terdiri dari:

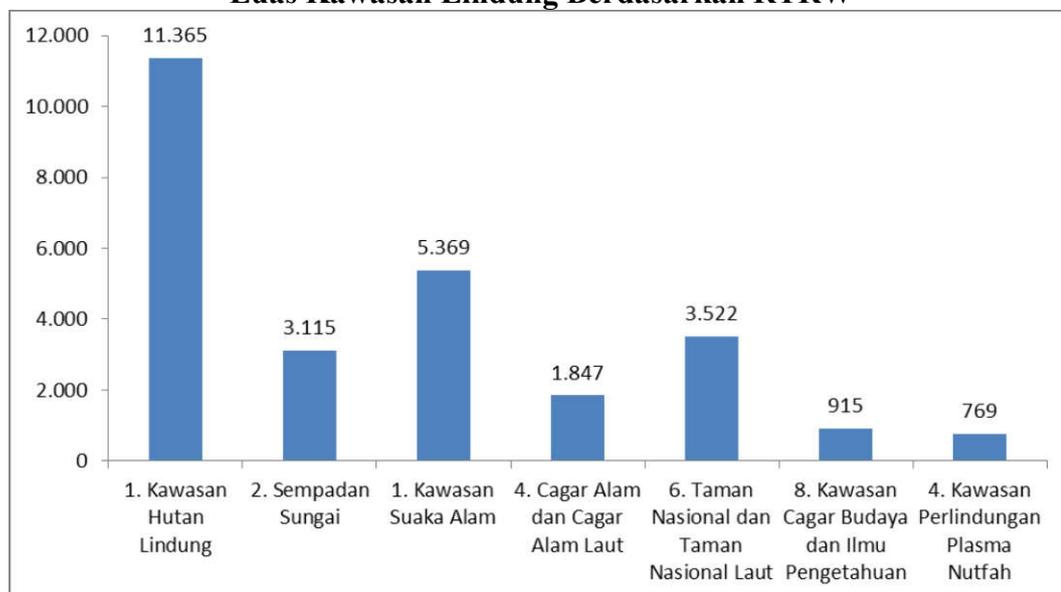
- a. Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.;
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan ruang terbuka hijau;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya terdiri dari kawasan suaka ala, kawasan suaka laut, kawasan suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;



- d. Kawasan rawan bencana terdiri dari kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.
- e. Kawasan lindung geologi terdiri dari kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
- f. Kawasan lindung lainnya seperti Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah dan lain sebagainya.

Berikut ini gambaran pembagian kawasan lindung berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya 2011-2031 sebagai berikut.

Gambar 3.1.9.
Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW



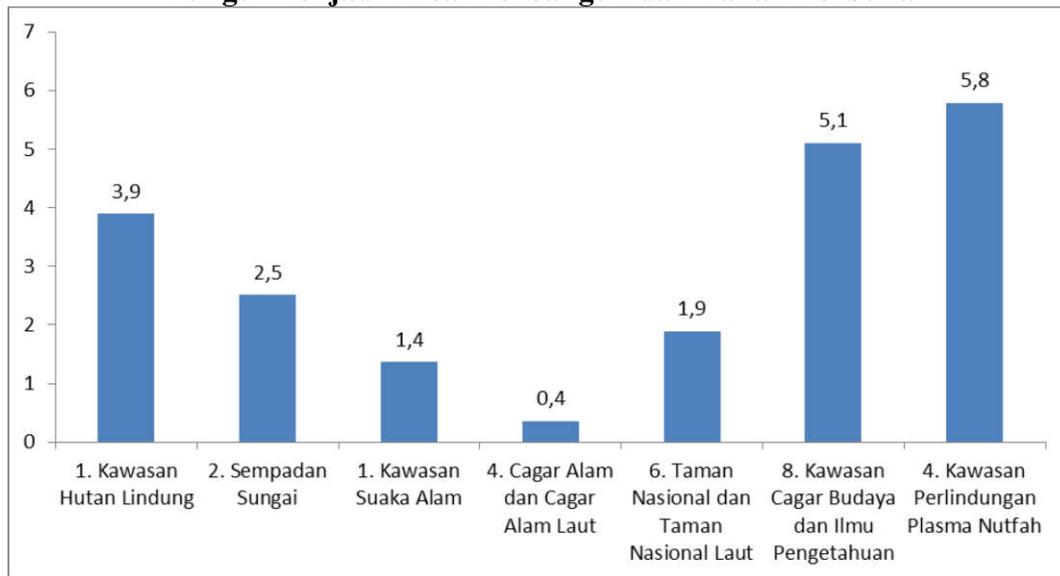
Sumber: Olahan Tabel-1. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Diluar dari kawasan lindung tersebut adalah kawasan budi daya mencapai 43.854 Ha dan sisanya adalah hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Gambaran kawasan hutan tersebut akan diuraikan pada sub bab Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status. Berdasarkan fungsi hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 dan berdasarkan status hutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031.



Dari pembagian kawasan lindung berdasarkan RTRW tersebut, jika dirincikan untuk kawasan lindung yang telah menjadi areal terbuka dan telah menjadi areal terbangun persentasenya terhadap peruntukan kawasan lindung berdasarkan RTRW adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1.10.
Persentase Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW yang Telah Beralih Fungsi Menjadi Areal Terbangun dan Tanah Terbuka



Sumber: Olahan Tabel-1. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Kawasan lindung plasma nutfah yang paling tinggi alih fungsinya dari kawasan lindung menjadi areal terbangun dan lahan terbuka yakni sebesar 5,8 % dan yang terendah adalah cagar alam yakni sebesar 0,4 %. Gambaran ini berdasarkan pencitraan saat penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

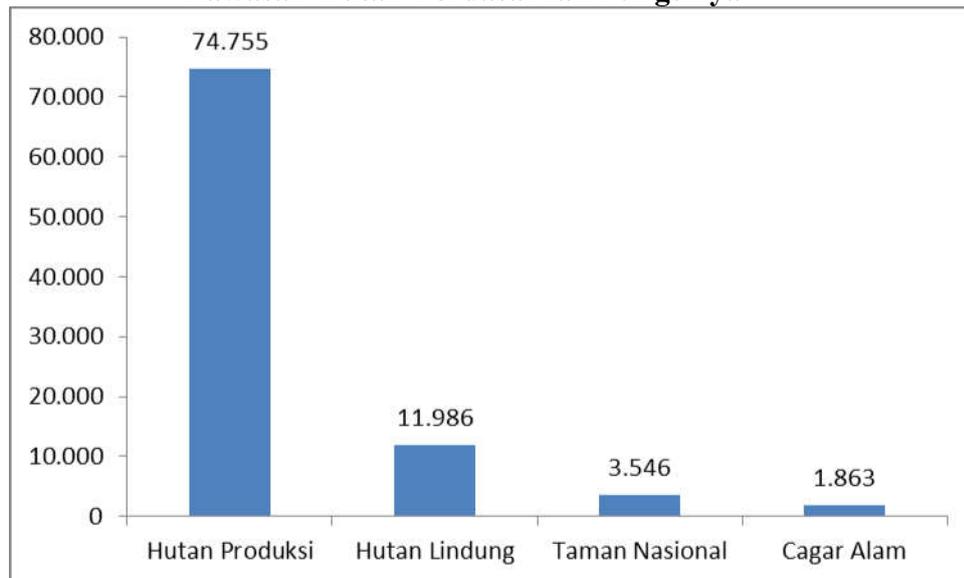
b Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status;

Kawasan hutan menurut fungsi di Kabupaten Dharmasraya mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-11/2013. Dalam Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah peruntukan fungsi kawasan hutan akan mengacu pada regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut. pembagian kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-11/2013. Dari 92.150 Ha kawasan hutan yang ditetapkan oleh



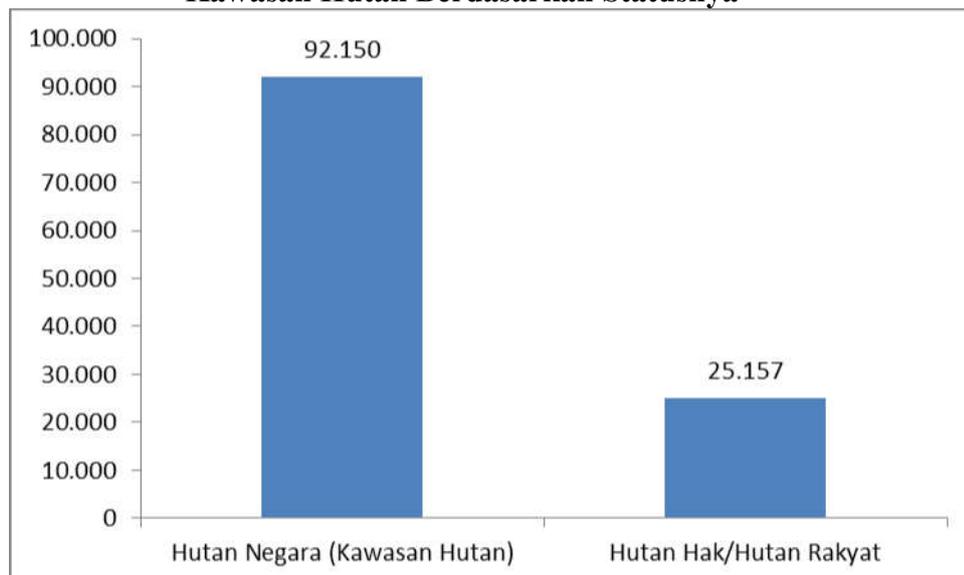
Kementerian Kehutanan pada Kabupaten Dharmasraya, mayoritas adalah kawasan hutan produksi yang terdiri Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi Konversi (HPK) dimana total luasannya adalah 74.755 Ha. Kawasan Hutan Lindung 11.986 Ha dan Taman Nasional 3.546 Ha serta Cagar Alam seluas 1.863 Ha.

Gambar 3.1.11.
Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya



Sumber: Olahan Tabel-3. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.1.12.
Kawasan Hutan Berdasarkan Statusnya



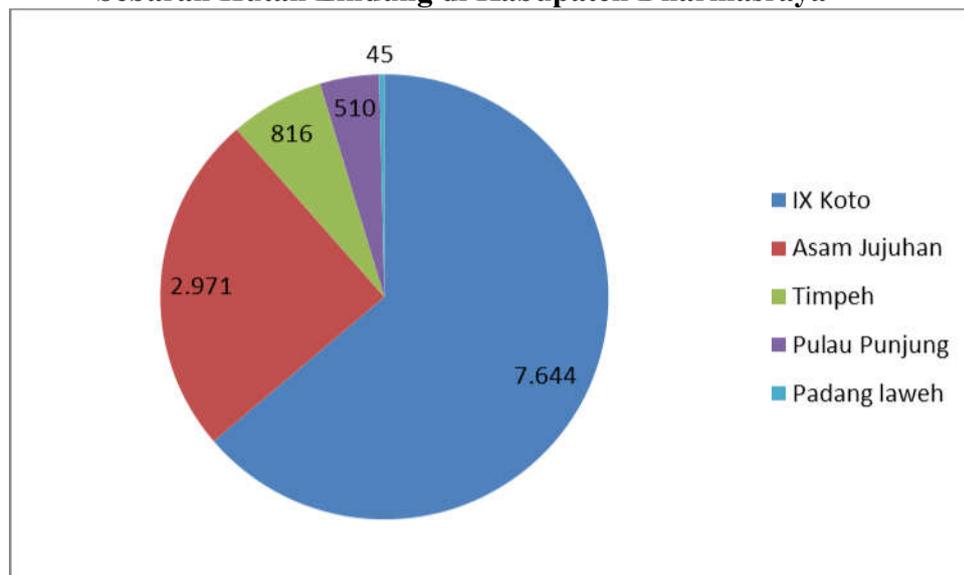
Sumber: Olahan Tabel-3. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Sedangkan mengacu pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 kawasan hutan statusnya terbagi sebagai Hutan Negara yang merupakan Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat yang merupakan hutan yang dikuasai oleh nagari atau adat.

Tetapi realitanya walaupun telah memiliki dasar hukum penetapan yang kuat, saat ini sebagian besar masyarakat ulayat atau adat tetap menganggap semua hutan adalah milik adat/ulayat sehingga sebagian besar hutan negara juga ikut tereksploitasi oleh kegiatan ekonomi masyarakat. Permasalahan ini tidak sepenuhnya salah masyarakat sebab, banyak konsesi pada hutan produksi yang dilakukan perusahaan kayu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yakni, tebang pilih dan tanam kembali baru melakukan penggarapan pada wilayah konsesi selanjutnya. Kawasan hutan yang menjadi konsesi beberapa perusahaan pengolah hasil hutan melakukan penebangan habis komoditi kayu dan kemudian ditinggalkan tanpa dilakukan reboisasi kembali. Dengan infrastruktur jalan telah terbuka, hutan produksi yang ditinggalkan oleh perusahaan konsesi kayu dilakukan penggarapan oleh masyarakat menjadi lahan perkebunan kelapa sawit atau karet sebab fasilitas infrastruktur jalan telah tersedia. Permasalahan ini akan menimbulkan konflik agraria dengan pemerintah pada kemudian harinya.

Gambar 3.1.13.
Sebaran Hutan Lindung di Kabupaten Dharmasraya



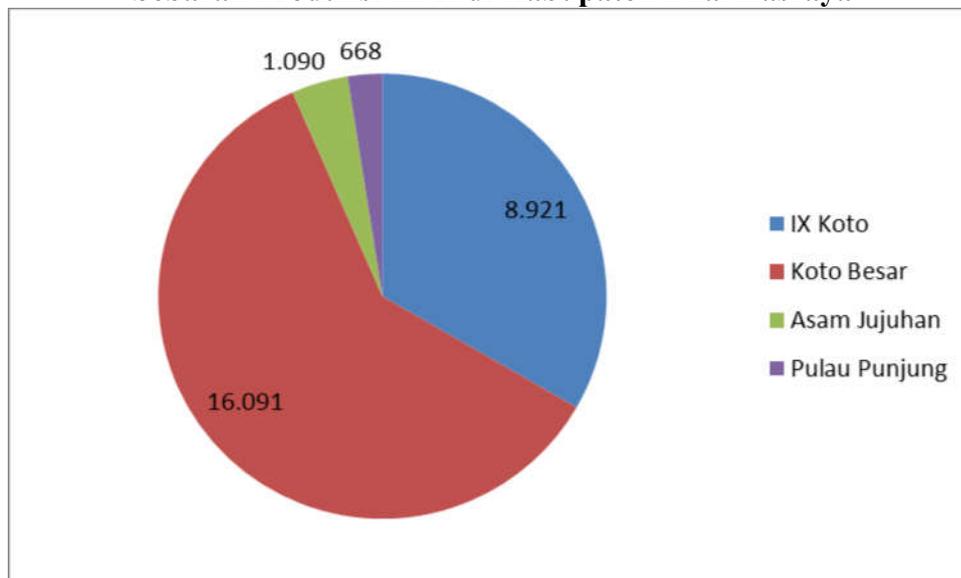
Sumber: Olahan Tabel-3A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Mengacu kembali kepada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-11/2013, untuk sebaran hutan lindung pada Kabupaten Dharmasraya mayoritas terdapat pada Kecamatan IX Koto seluas 7.644 Ha, kemudian pada Kecamatan Asam Jujuhan seluas 2.971 Ha yang merupakan hutan lindung penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat.

Selanjutnya untuk Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) terdapat pada Kecamatan IX Koto seluas 11.724 Ha dan Kecamatan Timpeh seluas 5.037 Ha (Tabel-3A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016). Sedangkan untuk Hutan Produksi (HP) sebarannya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1.14.
Sebaran Produksi HPK di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-3C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

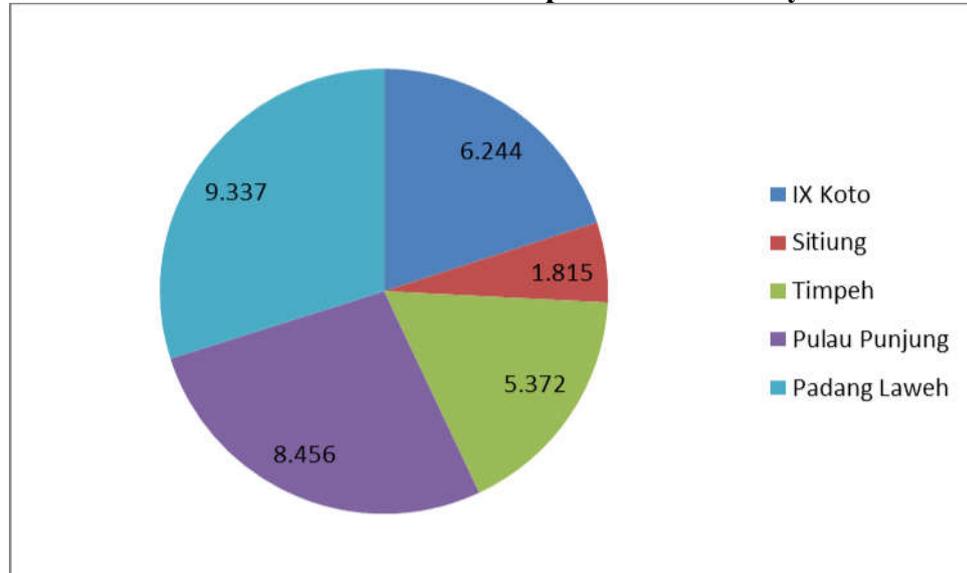
Luasan Hutan Produksi terluas terdapat pada Kecamatan Koto Besar lebih dari 50 % dari keseluruhan Hutan Produksi pada Kabupaten Dharmasraya, tetapi sebagian besar disebabkan ditinggalkan oleh perusahaan konsesi pengolahan hasil hutan telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan karet.

Untuk lokasi Hutan Suaka Alam sebarannya pada Kecamatan IX Koto seluas 2.863 Ha dan Kecamatan Asam Jujuhan seluas 3.546 Ha (Tabel-3D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016). Sedangkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang luasannya mencapai 31.224 Ha atau



mecapai 10 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya sebarannya sebagai berikut.

Gambar 3.1.15.
Sebaran Produksi HPT di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-3E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Sebarannya untuk Hutan Produksi Terbatas pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yang terbanyak pada Kecamatan Padang Laweh dan Kecamatan IX Koto dan paling sedikit pada Kecamatan Sitiung.

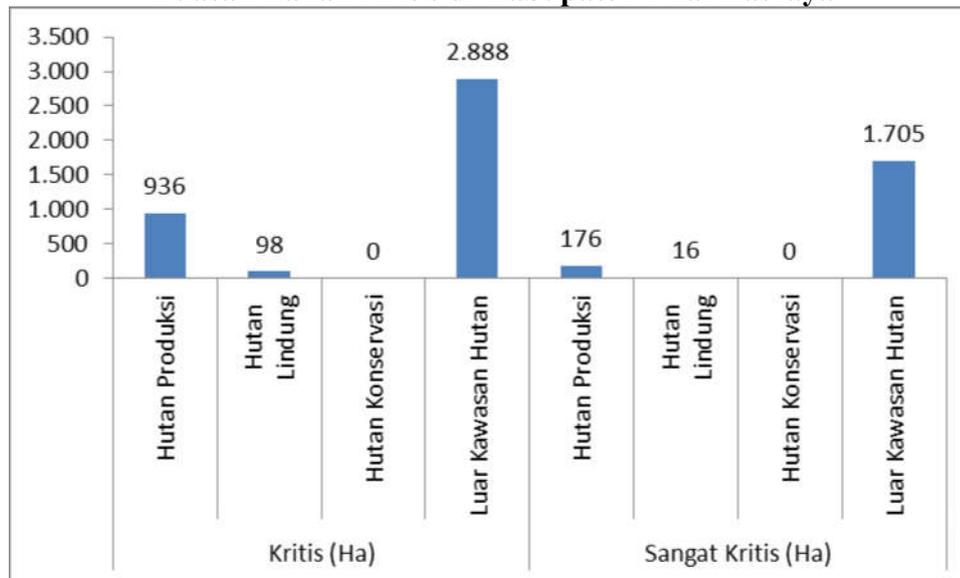
c Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan;

Lahan kritis dapat didefinisikan sebagai lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada defenisi tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya lahan kritis diantaranya: terjadinya longsor dan letusan gunung berapi, penebangan liar, kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berasaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan yang belum berjalan, pola pengelolaan lahan yang tidak konservatif dan pengalihan status lahan.



Secara jumlah luasan lahan kritis berada pada luar kawasan hutan yakni mencapai 2.888 Ha atau 74 % dari luasan lahan kritis yang ada dan lahan sangat kritis juga berada pada luar kawasan hutan yakni mencapai 1.705 Ha atau mencapai 90 % dari luasan lahan sangat kritis yang ada. Sedangkan hutan konservasi kondisi lahannya tidak menunjukkan indikator kritis atau sangat kritis.

Gambar 3.1.16.
Luasan Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-4. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Informasi gambaran lahan kritis diperoleh dari penelaahan menggunakan pencitraan oleh WWF dan penggambungan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan informasi penyebab lahan kritis adalah dengan memadukan berbagai informasi kejadian dan kondisi kegiatan yang ada di atasnya. Adapun beberapa informasi penyebab lahan kritis adalah sebagai berikut :

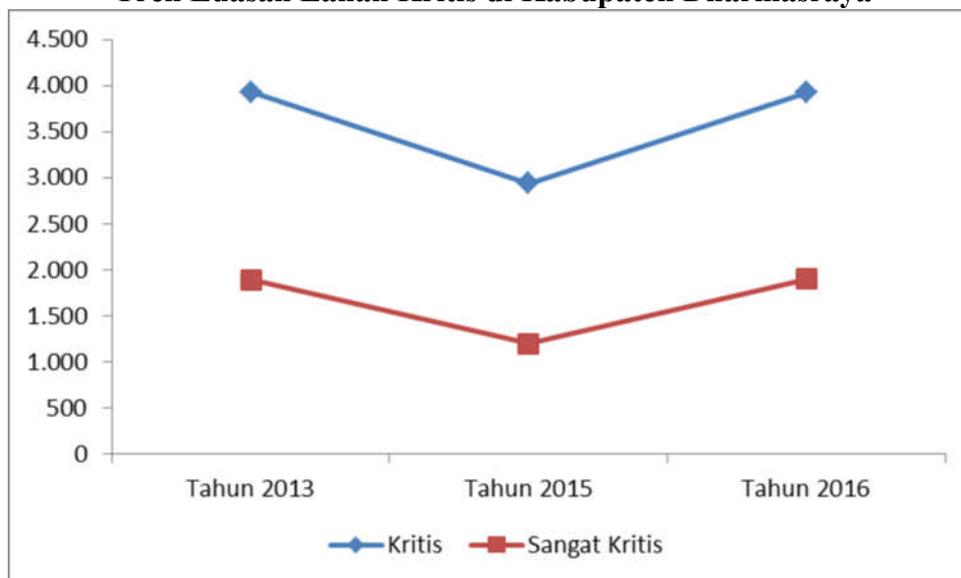
- Perkebunan, pemukiman dan lahan terbuka bekas tambang batubara
- Perkebunan, pertanian, pemukiman, kebakaran lahan dan lahan terbuka bekas PETI
- Perkebunan, pertanian dan pemukiman
- Perkebunan, pertanian dan pemukiman
- Perkebunan, pertanian, pemukiman dan kebakaran lahan.
- Perkebunan dan kebakaran hutan/lahan



- Pemukiman, pertanian, Perkebunan, Hutan Tanaman Industri dan kebakaran lahan
- Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri

Jika dilakukan perbandingan antar waktu pada 3 (tiga) tahun terakhir, berikut ini adalah tren perubahan luasan lahan kritis dan sangat kritis pada Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 3.1.17.
Tren Luasan Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-4B dan Tabel-4C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada tren gambar tersebut menunjukkan luasan lahan kritis pada tahun 2015 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2016. Jika diuraikan lebih rinci lagi dengan menambahkan kriteria agak kritis dan potensial pada tahun 2016 ini terdapat 17.725 Ha yang masuk kriteria kritis dan 58.182 Ha yang berpotensi kritis. Kriteria dalam pengklasifikasian tersebut berdasarkan klasifikasi warna dalam interpretasi Citra Satelit yang dilakukan WWF Program RIMBA di Kabupaten Dharmasraya. (Sumber: Olahan Tabel-4D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016).

d Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 penyebab kerusakan lahan ialah makin meningkatnya pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan



industri yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian. Secara garis besar, penyebab kerusakan lahan disebabkan oleh 2 hal yaitu; 1) Natural hazards, dimana secara instrinsik lahan mempunyai potensi untuk mengalami kerusakan; 2) Manusia, dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang tidak tepat (Baskoro dkk, 2010). Salah satu bentuk kerusakan lahan pertanian yang disebabkan oleh faktor diatas yaitu erosi. Erosi adalah proses berpindahnya/terangkutnya tanah atau bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain (Sinukaban, 1989).

Menurut Arsyad (1989) kerusakan yang ditimbulkan karena erosi terjadi di dua tempat yaitu 1) pada tanah tempat erosi terjadi; 2) pada tempat tujuan akhir tanah yang terangkut tersebut diendapkan. Oleh karena dampak erosi dapat sangat berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah maka erosi ini harus dapat dicegah yang bertujuan untuk mengontrol laju erosi supaya berada dalam batas yang dapat ditoleransikan dan melestarikan produktifitas lahan.

Gambaran kerusakan tanah di Kabupaten Dharmasraya akibat erosi air dengan pengambilan sampel tanah di Kecamatan Pulau Punjung yakni kawasan perkebunan PT Bukit Raya Mudisa. Berikut gambaran evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air pada lahan PT Bukit Raya Mudisa yang telah ditanami dengan tanaman industri berupa kayu akasia.

Tabel 3.1.3.
Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air pada Lahan PT Bukit Raya Mudisa

No	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
1	< 20 cm	0,2 - 1,3	1,98	Melebihi
2	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	4,89	Melebihi
3	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	4,98	Tidak
4	100 - 150 cm	9,0 - 12	9,84	Tidak
5	> 150 cm	> 12	12,83	Tidak

Hasil Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Sumber: Olahan Tabel-5. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





Pada lapisan permukaan terlihat pada lokasi titik pantau Hutan Tanaman Industri PT Bukit Raya Medusa telah melebihi baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah akibat Memproduksi Biomassa. Tetapi pada lapisan 50 cm sampai lebih dari 150 cm masih berada pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tersebut.

Prediksi erosi dari sebidang tanah adalah metode untuk memperkirakan laju erosi yang akan terjadi dari tanah yang dipergunakan dalam penggunaan lahan dan pengelolaan tertentu. Jika laju erosi yang akan terjadi dapat ditetapkan, maka dapat ditentukan kebijaksanaan penggunaan tanah dan tindakan konservasi tanah yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah dan tanah dapat dipergunakan secara produktif dan lestari. Tindakan konservasi tanah dan penggunaan lahan yang diterapkan adalah yang dapat menekan laju erosi agar sama atau lebih kecil dari laju erosi yang masih dapat dibiarkan.

Metode prediksi erosi juga merupakan alat untuk menilai apakah suatu program atau tindakan konservasi tanah telah berhasil mengurangi erosi dari suatu bidang tanah atau suatu daerah aliran sungai (DAS). Prediksi erosi adalah alat bantu untuk mengambil keputusan dalam mengambil perencanaan konservasi tanah pada suatu areal tanah (Arsyad, 1989).

e Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering;

Pemanfaatan lahan untuk berbagai keperluan dan aktifitas manusia cepat atau lambat akan menyebabkan kerusakan tanah. Tanah sebagai salah satu komponen lahan, adalah lapisan teratas kerak bumi. Tanah terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta memiliki sifat fisik, kimia dan biologi serta memiliki kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kegiatan yang perlu dilakukan mengingat aktifitas manusia dengan memanfaatkan tanah sebagai media, yang dilakukan dengan berlebihan dapat menurunkan kualitas dan fungsi tanah serta mengetahui sejauh mana kerusakan itu terjadi dan menentukan upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.

Hasil evaluasi kerusakan tanah di lahan kering yang dilakukan pada Kecamatan Sitiung yakni pada lahan perkebunan kelapa sawit pada Jorong Aur





Jaya III Kecamatan Sitiung dengan komoditi kelapa sawit tahun tanam 10 tahun. Evaluasi kerusakan tanah tersebut membandingkan hasil analisa kualitas tanah baik fisika maupun kimia pada baku mutu yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000.

Tabel 3.1.4.
Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering pada Kecamatan Sitiung

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
1	Ketebalan Solum	> 20 cm	60	Tidak
2	Kebatuan Permukaan	< 40 %	1,67	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	-	-
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	-
4	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,22	Tidak
5	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	53,96	Tidak
6	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	4,63	Tidak
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	6,18	Tidak
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	13	Tidak
9	Redoks	< 200 mV	30,0	Tidak
10	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	8,4 x 10 ⁵	Tidak

Hasil Uji Labor oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Lab BPTP Sukarame Solok, Des 2016

Sumber: Olahan Tabel-6. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Hasil analisa laboratorium menunjukkan bahwa kualitas tanah baik fisika maupun kimia tanah masih berada pada baku mutu Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah akibat Memproduksi Biomassa.

f Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Wilayah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki lahan gambut, sehingga tidak dilakukan evaluasi kerusakan tanah di lahan basah.

g Evaluasi Kerusakan Mangrove di Kabupaten Dharmasraya

Wilayah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki laut, sehingga tidak ada komponen mangrove.





h Evaluasi Kerusakan Padang Lamun di Kabupaten Dharmasraya

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terdapat komponen padang lamun.

i Evaluasi Kerusakan Padang Lamun di Kabupaten Dharmasraya

Wilayah Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki laut, sehingga tidak ada komponen terumbu karang.

3.1.3 RESPON

Terkait upaya atau respon yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupa pengendalian kerusakan lingkungan hidup tersebut dilakukan melalui upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup, dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang diantaranya berupa upaya realisasi penghijauan dan reboisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Beberapa upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain adalah penataan kegiatan dan/atau usaha yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan melalui perizinan lingkungan dan perizinan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan penerapan regulasi lingkungan pada kegiatan dan/atau usaha tersebut. Selain penerapan ketentuan pada kegiatan dan/atau usaha, dalam sisi pencegahan kerusakan lingkungan melalui Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan dokumen-dokumen perencanaan/masterplan yang dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain: dengan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dari kegiatan/atau usaha, sosialisasi pada masyarakat terkait dampak akibat kerusakan lingkungan hidup, dan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup.



Sedangkan upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain: dengan melakukan upaya restorasi, reklamasi, reboisasi dan penghijauan terkait kerusakan lingkungan yang ada. Beberapa upaya restorasi seperti rencana pemulihan lahan akses terbuka Nagari Tabiang Tinggi yang proses DED nya telah berlangsung pada tahun 2016 dan pembangunan fisiknya akan dilaksanakan pada tahun 2017. Upaya reklamasi biasanya terkait pada pelaksanaan komitmen dari pelaku pertambangan baik pertambangan batubara maupun pertambangan galian C. Sedangkan upaya reboisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 tidak terlaksana disebabkan penarikan wewenang kehutanan dari urusan pemerintah kabupaten. Untuk upaya penghijauan beberapa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup seperti penanaman rumput vetrifer pada sempadan Sungai Batanghari pada Jorong Sungai Kilangan Nagari Sungai Dareh, beberapa penanaman bibit kayu-kayuan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perkebunan dan hutan tananam industri pada lokasi lahan peruntukan konservasi diwilayahnya. Upaya tersebut dilakukan oleh perusahaan antara lain PT Tidar Kerinci Agung dan PT Bukit Raya Mudisa. Selain pananaman langsung, PT Tidar Kerinci Agung juga menyalurkan bibit kayu-kayuan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. (Sumber: Tabel-14 Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016).



3.2. KUALITAS AIR

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.

Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Negara mengamanatkan kepada pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, bahwa sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.





Pencemaran air terjadi pada kegiatan sehari-hari manusia secara tidak sengaja telah menyumbang sejumlah bahan atau komponen berbahaya lain kedalam perairan, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas air. Kualitas air merupakan subjek yang sangat kompleks, agar tetap dapat dimanfaatkan air harus dijaga supaya tidak tercemar, karena sifat air yang mudah berubah baik dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya.

Mutu air menunjukkan kondisi kualitas air yang dapat diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat tingkat kondisi mutu air apakah menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu, maka dibandingkan dengan baku mutu air yang telah ditetapkan. Pengelolaan kualitas air merupakan upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran air adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Dalam rencana pendayagunaan air harus memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. Konservasi sumber daya air perlu dilakukan sebagai upaya dalam memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.





Melimpahnya sumber air yang berada di darat maupun di laut, seringkali membuat manusia tidak begitu mempedulikan keberlanjutan dari kesediaan air di alam. Namun, lambat laun, baik kuantitas air dan kualitas air dimanapun semakin menunjukkan keadaan genting dari waktu ke waktu. Bila perlakuan terhadap air tidak diubah, di masa depan air akan menjadi mata konflik yang keras tidak saja antara manusia, tapi juga antara makhluk hidup yang membutuhkan air untuk keberlangsungan regenerasi mereka.

Kualitas sumber air seperti air sungai, air embung, air tanah/sumur masih menjadi permasalahan dan isu prioritas bidang lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Setiap tahunnya selalu terjadi perubahan kuantitas dan kualitas air, dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kuantitas sumber air dan ketersediaan air bagi kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, ketersediaan kualitas sumber airpun juga tidak memenuhi standar baku mutu untuk parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan, karena telah tercemar oleh polutan dari berbagai sumber pencemaran.

Pembahasan pada perubahan kondisi kualitas air ini akan dianalisis berdasarkan *Pressure* (tekanan), *State* (kondisi), dan *Response* (respon), dengan menyajikan informasi tekanan apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan kualitas air, mengungkapkan kondisi (kualitas dan kuantitas) sumber-sumber air di daratan termasuk air sungai, air embung, dan air tanah/sumur, dan curah hujan rata-rata bulanan, serta respon berupa tindakan dan kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan kualitas air di Kabupaten Dharmasraya, dengan melakukan perbandingan dengan baku mutu (standar/kriteria), perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu, serta analisis statistik sederhana menurut frekuensi, maksimum, minimum dan rata-rata hasil pengukuran kualitas udara ambien dan air hujan.

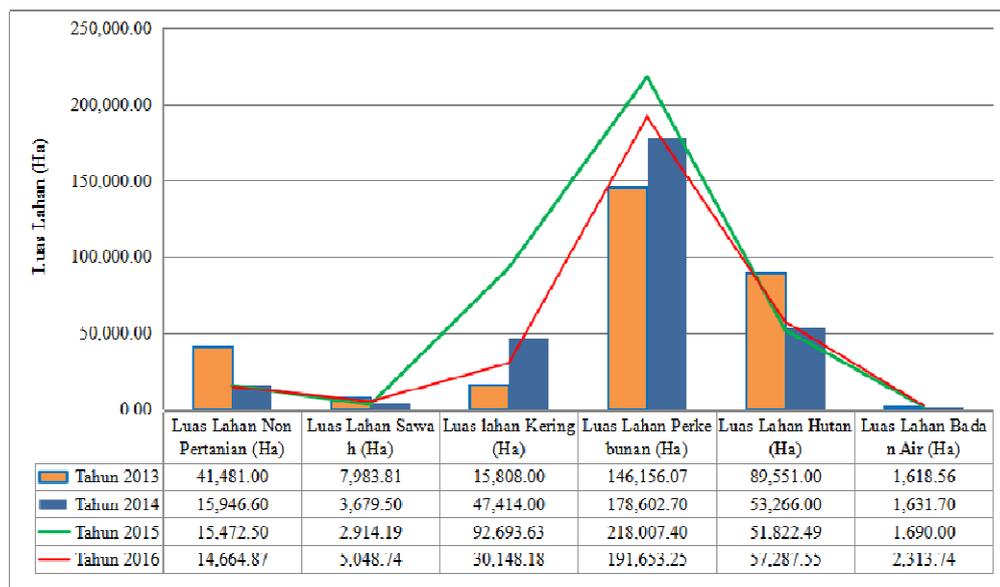


3.2.1. TEKANAN TERHADAP PERUBAHAN KUALITAS AIR

Pressure atau tekanan yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kondisi kualitas air yang ada di Kabupaten Dharmasraya diantaranya yaitu:

- a) Penurunan kuantitas dan kualitas air dapat terjadi akibat adanya perubahan alih fungsi lahan pada hulu sungai dan berkurangnya daerah tangkapan air. Penggunaan lahan yang berlebihan mengakibatkan kerusakan dan penambahan terlahan baru, seperti adanya pembukaan lahan untuk perkebunan, pemukiman, dan peruntukan lainnya dan lahan terbuka yang menyebabkan terjadinya erosi tanah yang masuk ke badan air, yang memberikan tekanan terhadap kondisi sumber air, seperti perubahan kuantitas (debit air sungai, pendangkalan permukaan air sungai, dll) dan kualitas air sungai (pencemaran air sungai dari materi yang masuk ke sungai). Hal ini terlihat dari data residu tersuspensi kualitas air sungai yang melebihi nilai baku mutu dan Indeks Pencemaran Air yang tercemar ringan (*Sumber: Olahan Tabel 17. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016*).

Gambar 3.2.1.
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel 2. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016





Pada Gambar 3.2.1. terlihat trend perubahan penggunaan lahan utama tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang cenderung mengalami peningkatan luas lahan untuk perkebunan (191.653,25 Ha), sawah (5.048,74 Ha), lahan kering (30.148,18 Ha), dan badan air/rawa (2.313,74 Ha). (Sumber: Olahan Tabel 2. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

- b) Kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) akibat Penambangan Tanpa Izin (PETI) pada DAS yang menyebabkan terjadinya perubahan pada kondisi sungai (debit, lebar, kedalaman dan alur sungai), penurunan kualitas dan kuantitas air sungai. Hasil pemantauan lapangan dengan menggunakan *drone* dan aplikasi *Google Maps* oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2016 bahwa ada 4 lokasi PETI yang mengalami kerusakan cukup luas dan menjadi lahan akses terbuka baru.

Gambar 3.2.2.
Lokasi Penambangan Tanpa Izin Yang Dipantau melalui Google Earth Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016

Beberapa titik lokasi perlu penanganan lebih lanjut baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah yang berada pada Daerah Aliran



Sungai, yaitu Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Latitude 1° 42,23" Longitude 101° 33' 43,75" sepanjang ±10 km atau seluas ±300 Ha (Sungai Nyunyo dan Sungai Palangko), Jorong Bunga Tanjung Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung (Sungai Rotan) Latitude 1° 4' 3,89" Longitude 101° 37' 2,51" sepanjang ±9.444 m atau seluas ±283,32 Ha; Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru (Sungai Balih) Latitude 1° 4' 55,96", Longitude 101° 37' 54,03" sepanjang ±4.823 m atau seluas ±144,69 Ha; Bukit Gading Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru (Sungai Koto Balai) Latitude 1° 6' 55,26" Longitude 101° 35' 59,84" sepanjang ±17.747 m atau seluas ±532,41 Ha. Bentuk kerusakan yang ditimbulkan akibat PETI ini dapat dilihat pada Gambar 3.2.3. sampai Gambar 3.2.6.

Gambar 3.2.3.
Lokasi Lahan Akses Terbuka Akibat PETI di Sungai Nyunyo dan Palangko Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Pemantauan melalui Drone, Latitude 1° 1' 42,23" Longitude 101° 33' 43,75", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Air sungai tersebut pada umumnya dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan perindustrian. Akibat aktifitas pertambangan galian C dan pertambangan emas rakyat ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun yang dilakukan di lokasi tersebut telah memberikan dampak pencemaran terhadap kualitas anak-anak sungai dari Sungai Batang Siat dan Batanghari, serta kerusakan badan dan sempadan sungai akibat lahan bekas tambang yang ditinggalkan oleh masyarakat. Kerusakan aliran Sungai tersebut sangat merugikan masyarakat, tidak dapat lagi memanfaatkan air sungai. Daerah bibir sungai yang semakin lama mengalami erosi atau pengikisan mengakibatkan air sungai menjadi keruh.

Gambar 3.2.4.
Lokasi Lahan Akses Terbuka Akibat PETI di Sungai Koto Balai Bukit Gading Jorong Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Pemantauan melalui Drone, Latitude 1°6'55,26" Longitude 101°35'59,84", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Gambar 3.2.5.
Lokasi Lahan Akses Terbuka Akibat PETI di Sungai Rotan Jorong
Bunga Tanjung Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten
Dharmasraya



Sumber: Pemantauan melalui Drone, Latitude 1°4'3,89" Longtitude 101°37'2,51", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.2.6.
Akibat PETI di Sungai Balih Aur Jaya Nagari Koto Padang Kecamatan
Koto Baru Kabupaten Dharmasraya



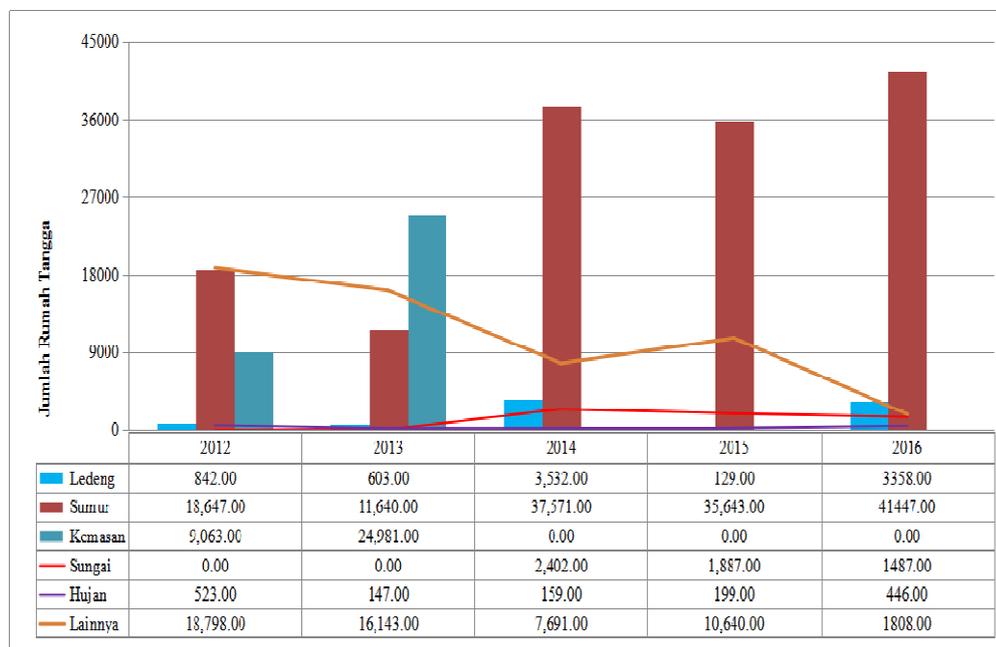
Sumber: Pemantauan melalui Drone, Latitude 1°4'55,96", Longtitude 101°37'54,03", Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Aliran Sungai Nyunyo, Sungai Palangko, Sungai Rotan di Nagari Gunung Medan, Sungai Koto Balai di Nagari Koto Padang dan Sungai di Aur Jaya akan bermuara ke Sungai Batang Siat yang merupakan juga DAS Batanghari. Selain itu kegiatan galian C rakyat (ilegal) pada badan dan sempadan sungai menyebabkan perubahan pola aliran, penggerusan tebing, perusakan perkebunan sawit dan karet masyarakat sekitar, dan kerusakan sempadan.

- c) Masih rendahnya ketersediaan Sumber Air Minum Rumah Tangga di Kabupaten Dharmasraya yang bersumber dari pengelolaan air bersih seperti ledeng. Pada Gambar 3.2.7. terlihat perbandingan jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. (Sumber: Olahan Tabel-22. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.2.7.
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

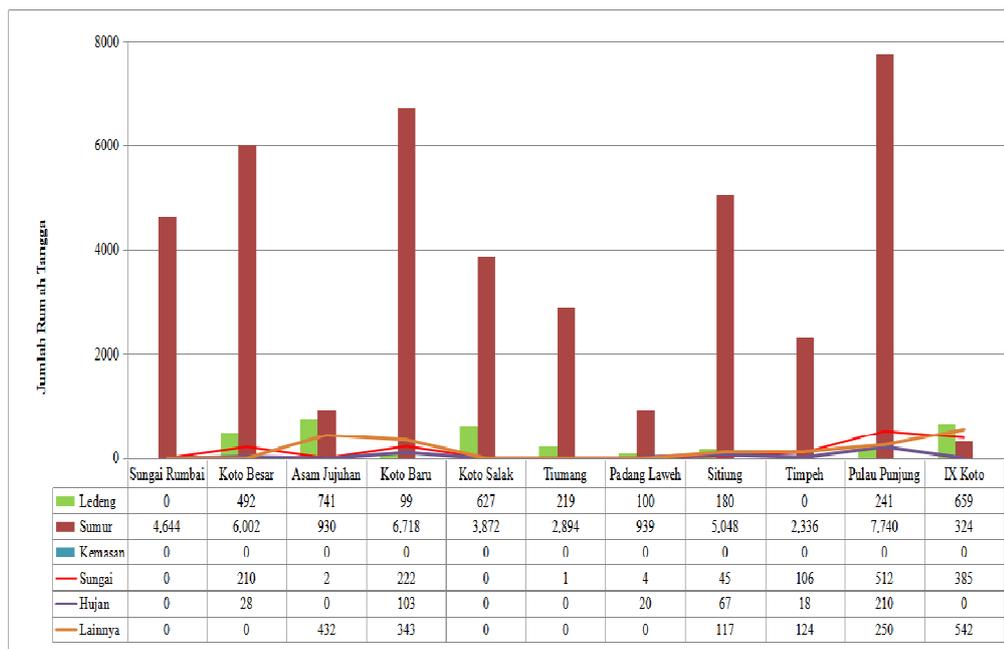


Sumber: Olahan Tabel-22. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Sumber air bersih yang digunakan rumah tangga masih didominasi oleh air sumur dan sumber lainnya seperti mata air. Namun pada gambar terlihat penggunaan air ledeng dan air sumur semakin meningkat pada tahun 2016 karena mulai adanya pembangunan sistem pelayanan air minum (SPAM). Namun, pada tahun 2016 masih ditemukan rumah tangga yang menggunakan air sungai dan air hujan sebagai sumber air minum. Dengan melihat kondisi lingkungan terutama sungai, sumber air minum yang berasal dari air sungai akan menjadi permasalahan dimana pencemaran yang terjadi pada sungai yang umumnya telah tercemar dapat berdampak kepada kesehatan masyarakat dimasa yang akan datang

Gambar 3.2.8.
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-22. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Gambar 3.2.8. terlihat perbandingan jumlah rumah tangga dan sumber air minum per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, yang memperlihatkan bahwa sumber air minum rumah tangga yang ada di kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berasal dari sumur sebesar 41.447 RT dan ledeng sebesar 93.358 RT. Namun, pada tahun 2016 masih ada yang

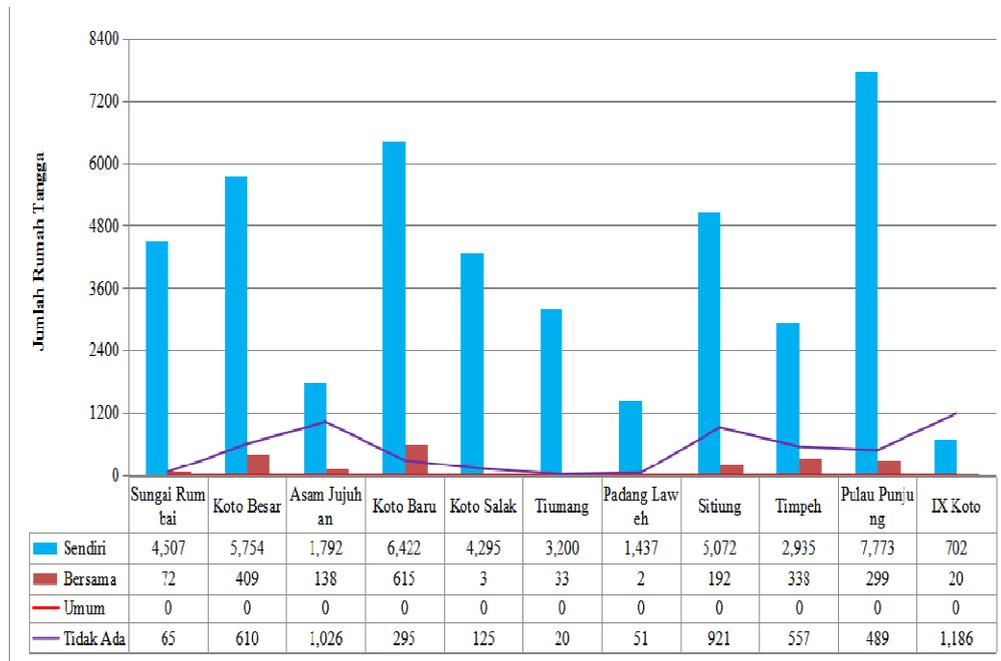


menggunakan air sungai sebagai sumber air minum yaitu sebanyak 1.487 RT, mulai dari yang tertinggi terdapat di Kecamatan Pulau Punjung (512 RT), diikuti oleh Kecamatan IX Koto (385 RT), Kecamatan Koto Baru (222 RT), Kecamatan Koto Besar (220 RT), Kecamatan Timpeh (106 RT), dan air sungai sedikit dikonsumsi oleh rumah tangga di Kecamatan Sitiung (45 RT), Kecamatan Padang Laweh (4 RT), Asam Jujuhan (2 RT), dan Tiumang (1 RT), dan tidak dikonsumsi oleh rumah tangga yang ada di Kecamatan Sungai Rumbai dan Koto Salak. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan akan sumber air bersih sangat tinggi dan membutuhkan sarana dan prasarana pengolahan air bersih untuk kebutuhan air minum, seperti melalui program PAMSIMAS dan SPAM (Sistem Pelayanan Air Minum).

- d) Jumlah rumah tangga dan ketersediaan fasilitas buang air besar menjadi tekanan terhadap perubahan kualitas lingkungan di Kabupaten Dharmasraya. Limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan dari limbah domestik rumah tangga inipun dapat memberikan tekanan yang cukup signifikan terhadap kondisi sumber air dan kualitas air. Pada Gambar 3.2.9. memperlihatkan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar tahun 2016 per-kecamatan. Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas MCK sendiri tertinggi terdapat di Kecamatan Pulau Punjung, lalu diikuti oleh Kecamatan Koto Baru, Koto Besar, Sitiung, Sungai Rumbai, Koto Salak, Timpeh, Asam Jujuhan, Padang Laweh dan IX Koto, dengan total 43.889 RT. Jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas MCK bersama masih cukup tinggi yaitu 2.121 RT, dan yang tidak memiliki MCK sebanyak 5.345 RT. (Sumber: Olahan Tabel-23. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

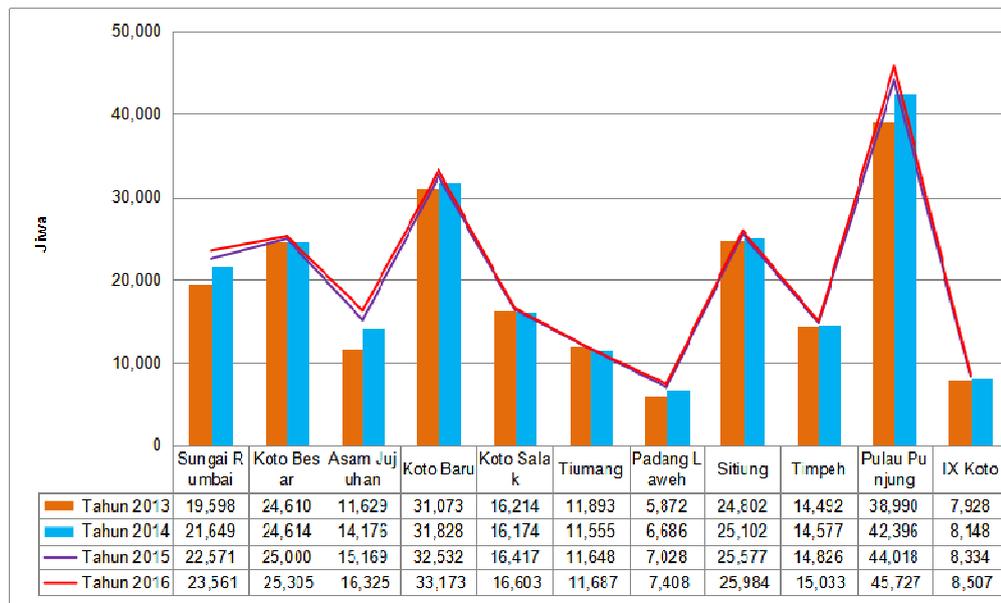


Gambar 3.2.9.
Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-23. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.2.10.
Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-41. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

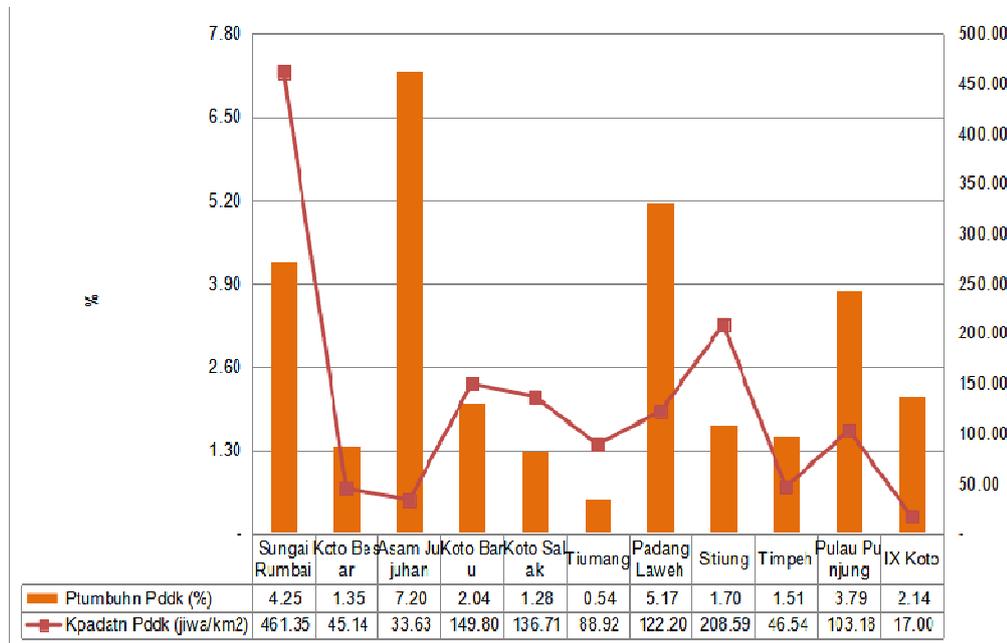


Menurut BPS, Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 adalah 229.313 jiwa dan setiap tahun jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya meningkat dengan persentase penambahan penduduk tahun 2016 sebesar 2,82%. Pada Gambar 3.2.10. terlihat perbandingan penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. (Sumber: Olahan Tabel-41. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016). Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan, sehingga ketersediaan fasilitas tempat buang air besar atau IPAL juga seharusnya semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun, jika dilihat dari ketersediaan fasilitas MCK rumah tangga yang terbangun sesuai dengan yang terdata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, yaitu hanya 46.010 RT (fasilitas sendiri dan bersama) dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 204.848 RT, berarti masih ada sekitar 158.838 RT yang belum terdata memiliki fasilitas MCK. Hal ini masih belum seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga jumlah limbah yang dihasilkan tidak cukup tertampung dengan fasilitas yang tersedia, dan dibuang ke badan air melalui saluran terbuka yang dapat menyerap ke tanah. Hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumber air, baik itu air sungai, embung ataupun air tanah/sumur.

- e) Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan akan menimbulkan permasalahan baru bagi pembangunan daerah. Baik permasalahan sosial maupun permasalahan lingkungan. Menurut BPS pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,82% dengan tingkat kepadatan penduduk 128,46 jiwa/km², seperti terlihat pada Gambar 3.2.11. (Sumber: Olahan Tabel-41. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).



Gambar 3.2.11.
Pertumbuhan Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2016
di Kabupaten Dharmasraya

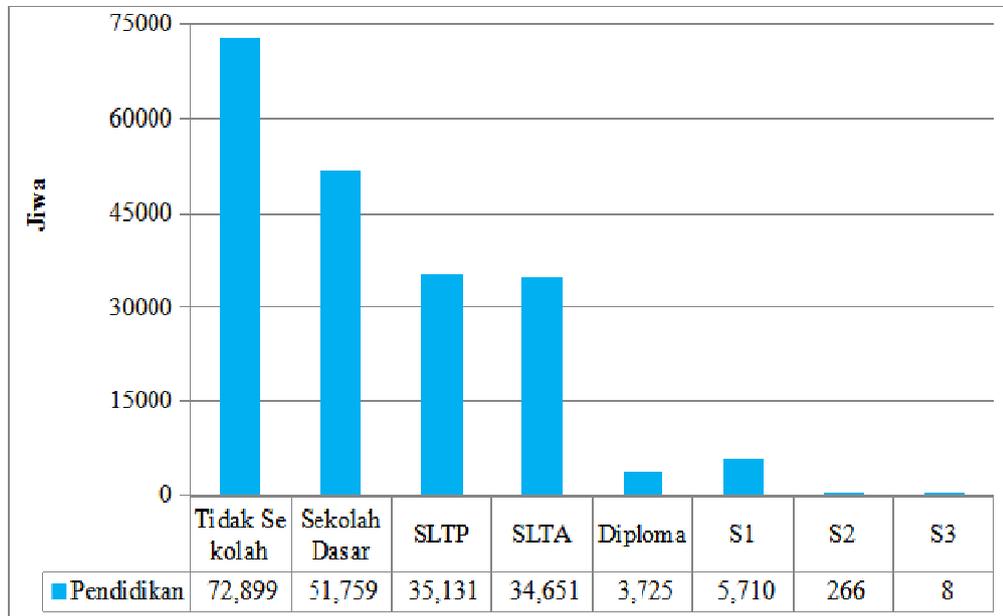


Sumber: Olahan Tabel -1. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Berdasarkan olahan data Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.12., menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Dharmasraya yang bersumber dari data Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 dengan tingkat tertinggi Diploma hingga S3 adalah sebesar 4,76% (9.709 jiwa), SLTA sebesar 16,97% (34.651 jiwa), SLTP sebesar 16,97% (34.651 jiwa), dan SD sebesar 17,21% (35.131 jiwa), sedangkan yang tidak sekolah sebesar 35,71% (72,889 jiwa). (Sumber: Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dapat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah domestik.



Gambar 3.2.12.
Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya



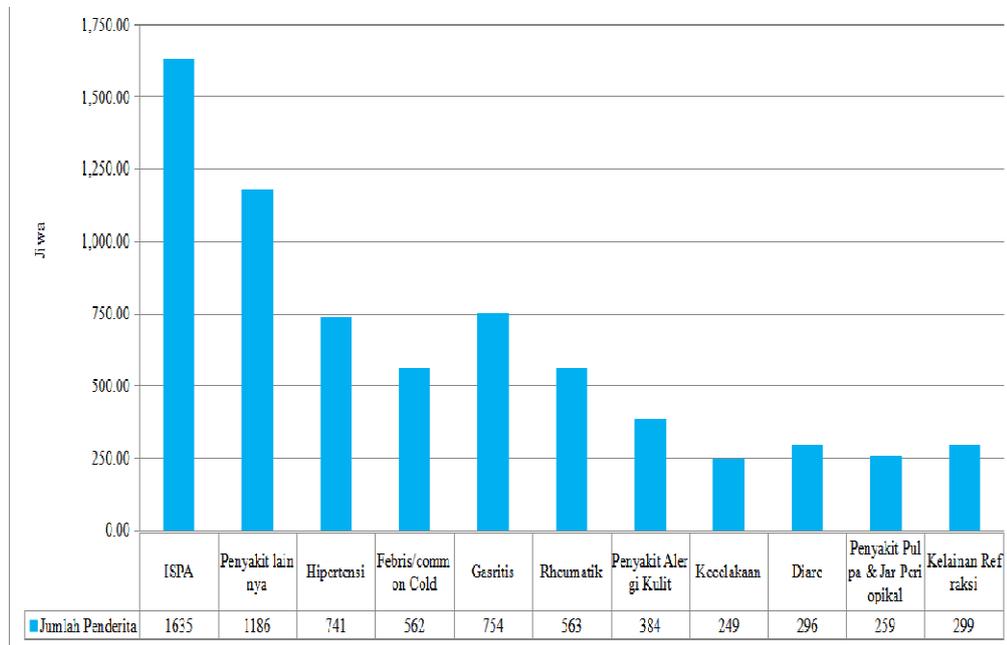
Sumber: Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

- f) Lingkungan yang tidak layak huni dan kotor dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Jenis penyakit utama yang diderita penduduk dapat berasal dari kualitas air yang tidak layak konsumsi, kualitas udara ambien yang dihirup sehari-hari, dan limbah cair dan limbah padat domestik yang tidak dikelola dengan baik. Pada Gambar 3.2.13. merupakan gambaran jumlah penderita jenis penyakit utama yang diderita penduduk tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya, terlihat bahwa penyakit ISPA menjadi dominasi penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk Dharmasraya, dan diikuti oleh jenis penyakit lainnya yang cukup beragam.

Pada Gambar 3.2.14. terlihat perbandingan persentase jenis penyakit utama yang diderita penduduk tahun 2015 dan tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya, bahwasanya penyakit utama yang diderita oleh khalayak banyak masyarakat adalah penyakit ISPA.

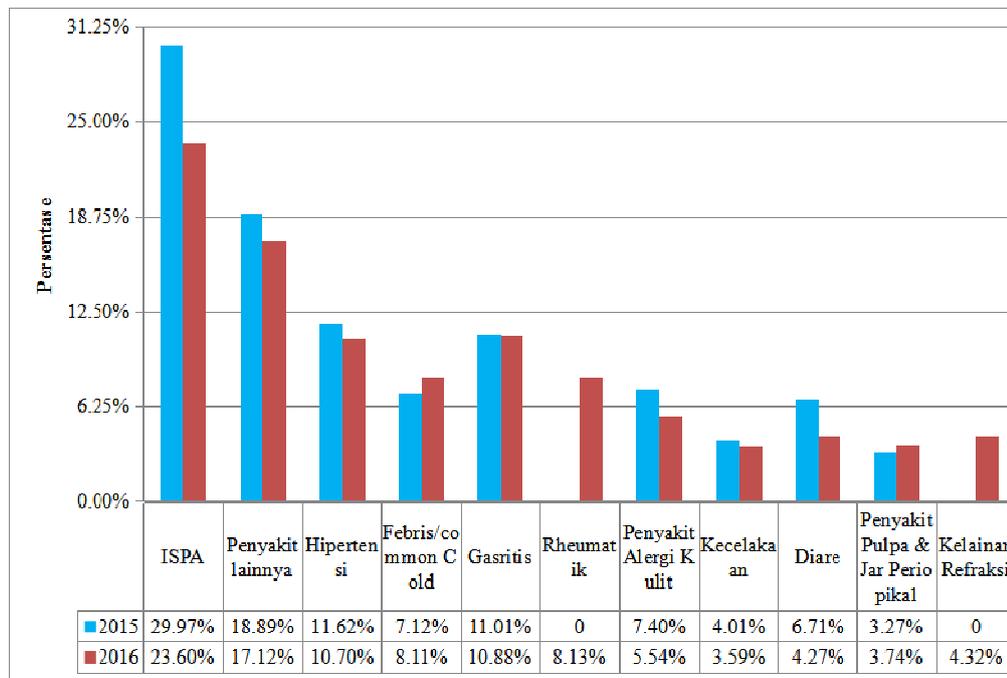


Gambar 3.2.13.
Jumlah Penderita Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-25. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.2.14.
Perbandingan Persentase Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



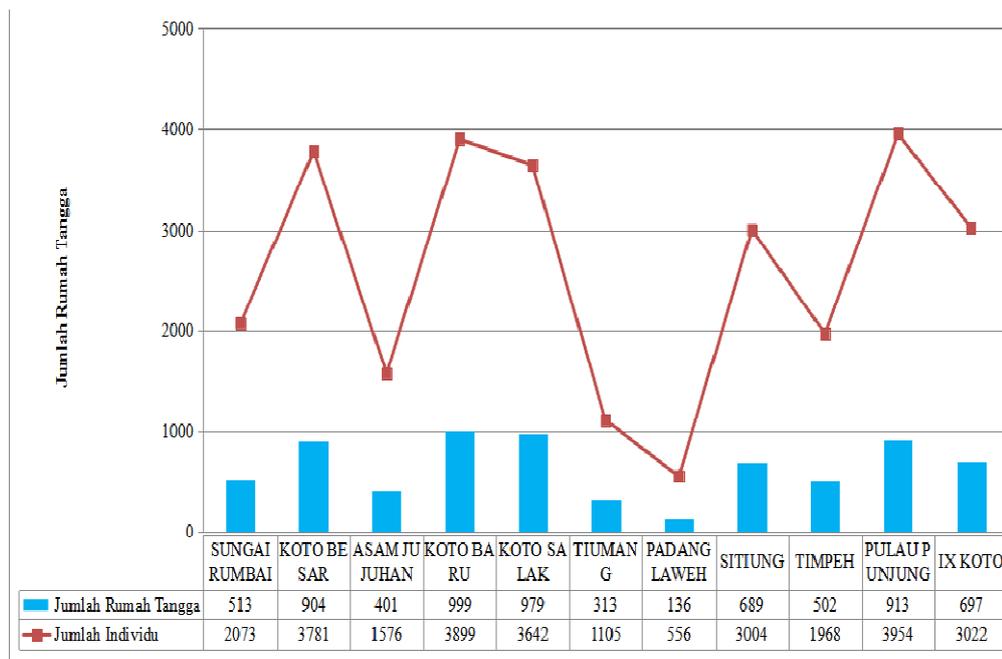
Sumber: Olahan Tabel-25. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



ISPA adalah penyakit infeksi saluran pernapasan bagian atas yang cenderung disebabkan oleh faktor lingkungan, seperti air dan udara. Sedangkan penyakit febris/common cold, alergi kulit, dan diare yang juga banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan tidak begitu tinggi persentasenya.

- g) Tekanan terhadap kualitas air juga dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah rumah tangga dengan ekonomi rendah akan sulit untuk memenuhi pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan cenderung berada pada lingkungan yang kurang bersih karena keterbatasan kebutuhan primer, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

Gambar 3.2.15.
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-26B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Berdasarkan data jumlah rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah rumah tangga yang memperoleh JKN per-Kecamatan, rumah tangga miskin ditemukan di Kecamatan Pulau Punjung, Koto Besar, Koto Baru dan Sitiung pada tahun 2014 dan menurun pada tahun 2016. (Sumber: Olahan Data Tabel-26. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016). Hal ini diharapkan juga



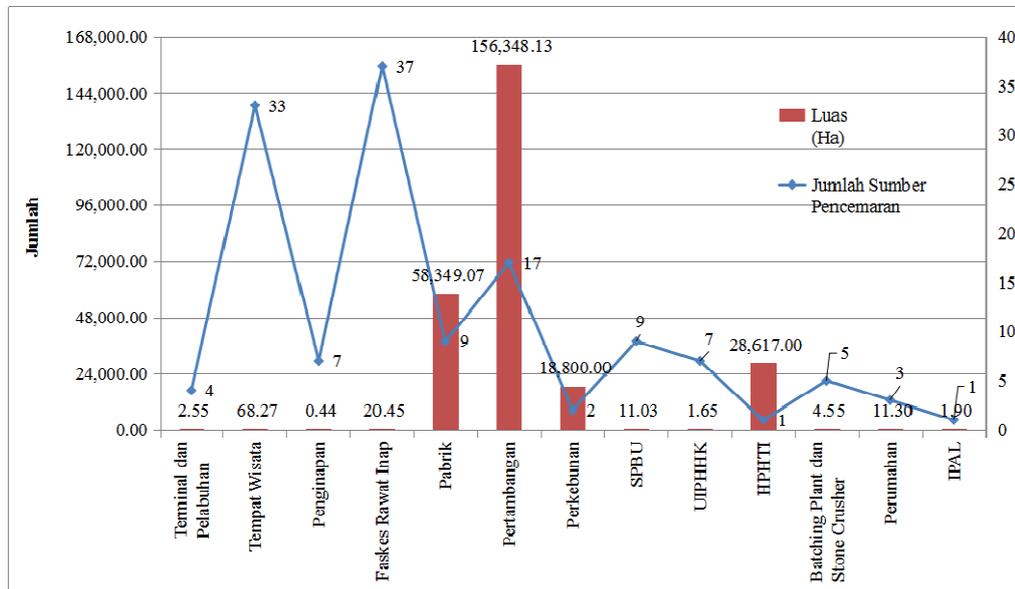
dapat meningkatkan kehidupan yang layak dan lingkungan yang layak bagi rumah tangga tersebut sehingga akan berdampak juga terhadap peningkatan kualitas lingkungan. Namun, berdasarkan fakta dilapangan, bahwa sasaran penerima jumlah rumah tangga miskin tidak sesuai dengan yang diharapkan dimana banyak penerima JKN bukan merupakan rumah tangga prasejahtera. Berdasarkan data BPS dalam buku Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2016 bahwa jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 5.467 keluarga. Sedangkan beradsarkan basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial tahun 2015, jumlah rumah tangga dan individu menurut status kesejahteraan di Kabupaten Dharmasraya yaitu sebanyak 7.046 RT dan 28.580 jiwa.

- h) Pengelolaan limbah padat dan cair masih belum terkelola dengan baik, begitu juga untuk pengelolaan limbah B3 padat dan Limbah B3 cair. Hal ini disebabkan oleh masih banyak pemrakarsa yang belum sepenuhnya melaksanakan upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan yang ada pada dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat.

Ada banyak sumber pencemar yang memberikan kontribusi terhadap faktor pencemaran kualitas air di Kabupaten Dharmasraya. Ada 13 (tiga belas) jenis usaha/kegiatan yang berkontribusi sebagai sumber pencemaran, diantaranya yaitu berasal dari terminal dan pelabuhan penyeberangan, tempat wisata, penginapan (hotel/wisma), fasilitas kesehatan rawat inap, pabrik kelapa sawit dan karet, pertambangan (batubara, biji besi dan batuan), perkebunan, SPBU, pemanfaatan hasil kayu, hutan tanaman industri, batching plant dan stone crusher, perumahan dan IPAL, dengan total sekitar 135 usaha/kegiatan yang terdata, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.16. (Sumber: Olahan Data Tabel-27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016). Namun, belum semua usaha/kegiatan tersebut yang melakukan pengelolaan LH dan memberikan laporan pemantauan dan pengelolaan LH. Hal ini perlu upaya penertiban dan penegakan hukum terhadap usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidupnya.

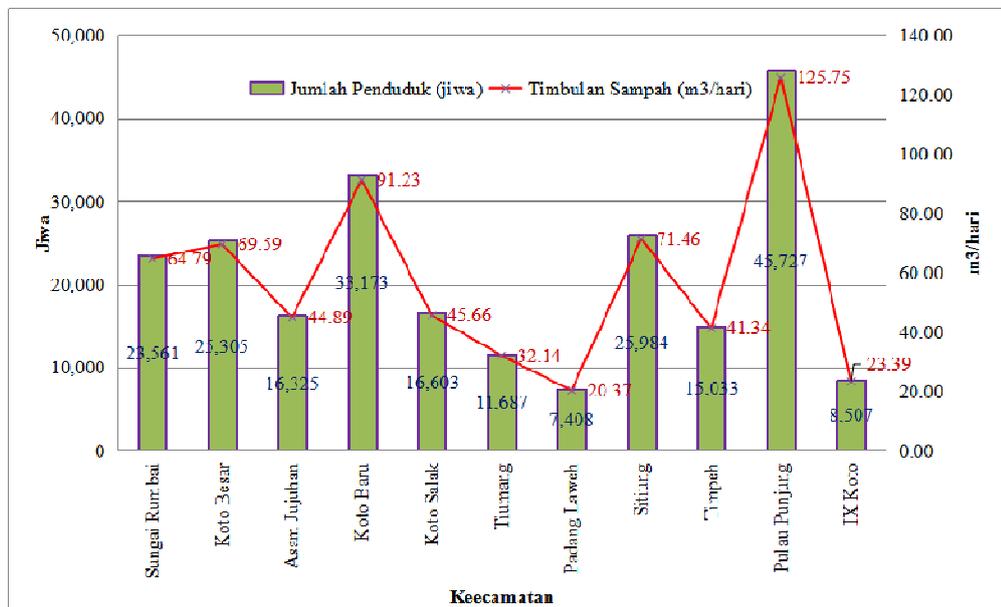


Gambar 3.2.16.
Jumlah Sumber Pencemaran dan Luas Wilayah Usaha/ Kegiatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.2.17.
Jumlah Penduduk dan Perkiraan Timbulan Sampah Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-42. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Gambar 3.2.17. terlihat perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Dharmasraya.



(Sumber: Olahan Data Tabel 42. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016). Total timbulan sampah yang dihasilkan per-harinya untuk 11 kecamatan sekitar 630,61 m³/hari atau rata-rata timbulan sampah per-hari 57,32 m³/hari. Jika dikalkulasi jumlah perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2016 adalah 20.924,81 m³/tahun.

Untuk pengelolaan limbah padat sampah dan sampah rumah tangga juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kualitas air. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan masih ditemukan masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Selain itu, pengelolaan limbah cair yang berasal dari beberapa usaha/kegiatan yang tersebar di Kabupaten Dharmasraya menjadi tekanan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Pengawasan terhadap pengelolaan usaha/kegiatan, limbah padat/cair, B3 dan limbah domestik belum dapat terpantau secara keseluruhan disebabkan oleh keterbatasan anggaran kegiatan pengawasan usaha/kegiatan terhadap pengelolaan LH.

- i) Banyaknya areal terbangun pada lokasi DAS yang berpotensi terhadap berkurangnya daerah penyangga resapan air. Dengan berkurangnya daerah resapan air dan dengan adanya curah hujan yang tinggi menyebabkan aliran air hujan tidak dapat meresap dan tertampung sehingga dapat menimbulkan banjir. Debit air sungai juga dipengaruhi oleh curah hujan. Kondisi curah hujan rata-rata per-tahun yang terpantau oleh 5 (lima) stasiun pemantau di Kabupaten Dharmasraya berkisar antara 20 - 585 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2016 dan terendah pada bulan Desember 2016, sedangkan rata-rata curah hujan per-tahun sekitar 221,53 mm. Semakin tinggi curah hujan menyebabkan semakin tinggi debit air sungai. (Sumber: Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Selain itu, tingkat penguapan air dipengaruhi oleh suhu udara. Suhu udara rata-rata per-tahun berkisar antara 21,60 - 30,20 °C, dengan rata-rata suhu per-tahun 26,94 °C. Suhu udara yang cukup tinggi menyebabkan tingkat



penguapan air tinggi dan mempengaruhi terhadap kuantitas dan kualitas air sungai (debit). (Sumber: *Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016*).

- j) Pembuatan embung menjadi solusi efektif untuk mengatasi banjir di kawasan pertanian. Embung merupakan tempat penampungan air hujan yang berfungsi menampung kelebihan genangan air terutama di wilayah pertanian. Namun karena tidak terawat, maka terjadi pendangkalan yang menyebabkan timbulnya banjir di persawahan dari aliran irigasi embung. Pintu air embung rentan mengalami kerusakan, pertumbuhan enceng gondok yang subur, dan menjadi tempat pembuangan sampah dan limbah rumah tangga di badan air embung, sehingga sawah kerap tidak terairi dengan baik.

Berikut adalah penjelasan dari kondisi/status sumber air yang mempengaruhi perubahan kualitas air di Kabupaten Dharmasraya:

3.2.2. Kondisi Sungai

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Air sungai adalah air yang mengalir melalui terusan daratan alami yang kedua pinggirnya dibatasi oleh tanggul-tanggul dan airnya mengalir dengan kecepatan tertentu dari hulu ke hilir menuju ke laut, ke danau, atau ke sungai lain yang merupakan sungai induk. Manfaat air sungai bagi kehidupan sangat besar artinya, selain sebagai bahan baku air minum, juga untuk mengairi pertanian di pesawahan, perikanan, lalu lintas perairan, pembangkit tenaga listrik, dan pariwisata. Sungai juga berfungsi sebagai media dalam siklus hidrologi untuk





tempat berkumpulnya air hujan, mata air, aliran air tanah dan aliran erosi tanah. Air sungai merupakan sumber air permukaan dapat menjadi sumber yang paling tercemar, baik karena kegiatan manusia, fauna, flora, dan zat-zat lainnya.

Hasil inventarisasi kondisi sungai tahun 2016 terdapat banyak sungai besar dan sungai kecil yang tersebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, dengan total keseluruhan sebanyak 78 sungai dan total panjang 1.799,40 Km. Berdasarkan Tabel 15. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, setiap sungai memiliki variasi panjang, lebar, kedalaman dan debit, Pada Tabel 3.2.1. dan Tabel 3.2.2. terlihat inventarisasi sungai berdasarkan panjang dan debit sungai per-kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, dan inventarisasi sungai berdasarkan lebar permukaan, lebar dasar dan kedalaman sungai per-kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Tabel 3.2.1.
Inventarisasi Sungai Berdasarkan Panjang dan Debit Sungai per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sungai	Jumlah Panjang (km)	Panjang (km)		Debit (m ³ /dtk)	
				Maks	Min	Maks	Min
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pulau Punjung	15,00	959,00	747,00	3,00	1645,14	0,08
2	IX Koto	21,00	275,00	49,00	4,00	18,62	0,06
3	Sitiung	9,00	54,00	12,00	2,00	2,03	0,02
4	Timpeh	12,00	139,40	45,00	1,00	7,55	0,05
5	Koto Baru	4,00	31,00	15,00	3,00	2,05	0,02
6	Padang Laweh	1,00	3,00	3,00	3,00	0,18	0,07
7	Koto Salak	1,00	4,00	4,00	4,00	0,31	0,05
8	Koto Besar	6,00	132,00	73,00	5,00	90,77	0,07
9	Asam Jujuhan	4,00	146,00	59,00	17,00	27,33	3,18
10	Sungai Rumbai	2,00	15,00	6,00	4,00	0,25	0,03
11	Tiumang	3,00	41,00	20,00	8,00	1,37	0,37
		78,00	1799,40	747,00	1,00	1645,14	0,02

Sumber: Olahan Tabel-15. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





Tabel 3.2.2.
Inventarisasi Sungai Berdasarkan Lebar Permukaan, Lebar Dasar dan Kedalaman Sungai per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

No	Nama Kecamatan	Lebar Permukaan (m)		Lebar Dasar (m)		Kedalaman (m)	
		Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pulau Punjung	124,00	3,00	109,00	2,00	3,64	0,30
2	IX Koto	37,00	3,00	33,00	2,00	1,70	0,30
3	Sitiung	10,00	2,50	8,00	2,00	0,65	0,20
4	Timpeh	53,00	3,50	51,00	2,50	1,70	0,35
5	Koto Baru	9,00	2,50	7,00	2,00	1,30	0,65
6	Padang Laweh	3,00	3,00	2,00	2,00	0,45	0,45
7	Koto Salak	7,00	7,00	5,00	5,00	1,40	0,31
8	Koto Besar	22,00	5,50	21,00	4,00	2,28	0,35
9	Asam Jujuhan	45,00	16,00	44,00	15,00	2,10	0,90
10	Sungai Rumbai	6,00	4,00	5,00	3,00	0,45	0,40
11	Tiumang	9,00	6,00	8,00	5,00	1,25	0,65
		124,00	2,50	109,00	2,00	3,64	0,20

Sumber: Olahan Tabel-15. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Kecamatan Pulau Punjung memiliki sebanyak 15 sungai dengan total panjang 959 km, panjang 109 m, kedalaman maksimum 3,64 m, serta debit maksimum 1.645,14 m³/detik. Sungai Batanghari merupakan sungai terpanjang dan terlebar di Kabupaten Dharmasraya, yang melewati 4 kecamatan yaitu termasuk Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang, dan Kecamatan Koto Salak. Sungai Batanghari memiliki panjang 747 km, lebar permukaan 124 m, lebar dasar 109 m, dan kedalaman 3,64 m. Debit Maksimum sungai Batanghari pada tahun 2016 adalah 1.645,14 m³/detik dan debit minimumnya adalah 49,43 m³/detik. Sungai ke-2 terbesar yang mengalir di Kecamatan Pulau Punjung dan bermuara ke Sungai Batanghari adalah Sungai Batang Pangian yang memiliki panjang 59 km, lebar permukaan 30 m, lebar dasar 27 m, kedalaman 0,7 m dengan debit maksimum 25,72 m³/detik dan debit minimumnya adalah 4,33 m³/detik. Sungai Batang Piruko juga merupakan sungai besar yang ada di kecamatan Pulau Punjung yang mengalir melewati Kecamatan Sitiung dan bermuara ke Batang Siat Kecamatan Koto Baru, memiliki panjang 45 km, lebar permukaan 21 m, lebar dasar 18 m, kedalaman 1,65 m dengan debit maksimum 10,30 m³/detik dan debit minimumnya adalah 5,22 m³/detik. Sungai





Batang Mimpi mengalir dari Kecamatan Pulau Punjung melewati Kecamatan Sitiung dan bermuara ke Batang Hari, memiliki panjang 20 km, lebar permukaan 24 m, lebar dasar 22 m, kedalaman 1,5 m dengan debit maksimum 8,56 m³/detik dan debit minimumnya adalah 4,01 m³/detik. Beberapa sungai lainnya yang mengalir di Kecamatan Pulau Punjung jika diurutkan berdasarkan panjangnya berturut-turut yaitu Batang Lolo 15 km, Batang Tandun 12 km, Batang Palangko 10 km, sungai Pauh 9 km, Batang Neli 8 km, Batang Nyunyo 7 km, Sungai Kamang 7 km, Batang Asahan 6 km, Sungai Lamak 6 km, Sei Patapahan 5 km, dan sungai Balit 3 km.

Pada Kecamatan IX Koto memiliki sungai terbanyak yaitu 21 sungai besar dan anak sungai dengan total panjang 275 km, panjang maksimum 49 km, lebar permukaan maksimum 37 m, lebar dasar maksimum 33 m, kedalaman maksimum 1,70 m, dan debit maksimum 18,62 m³/detik. Sungai terpanjang dan terlebar di Kecamatan IX Koto adalah Batang Muaro Momong, yang bermuara di Sungai Batanghari mengalir melewati Kecamatan Pulau Punjung dengan panjang 49 km, lebar permukaan 37 m, lebar dasar 37 m, kedalaman 1,4 m dengan debit maksimum 18,62 m³/detik dan debit minimum 4,30 m³/detik. Sungai kedua terbesar di Kecamatan IX Koto adalah Sungai Sipotar dengan panjang 28 km, lebar permukaan 9 m, lebar dasar 1,70 m, debit maksimum 3,82 m³/detik dan debit minimum 1,01 m³/detik. Sungai-sungai lainnya yang ada di Kecamatan IX Koto diurut dari yang terpanjang adalah Batang Labo 25 km, Batang Siraho 18 km, Sungai Keru 15 km, Batang Bugah 15 km, Batang Silago 12 km, Batang Bakur 12 km, Batang Singolan 12 km, Sungai Tonang 10 km, Batang Olek 10 km, Batang Rambah 9 km, Batang Pakani 9 km, Batang Salilik 8 km, Batang Tosin 8 km, Sungai Talang 8 km, Batang Sabilah 7 km, Batang Sigunggung 6 km, Batang Banai 5 km, Sungai Tarok 5 km dan Batang Silogu 4 km,

Kecamatan Sitiung memiliki 9 sungai dengan total panjang 54 km, panjang maksimum sungai yang ada 12 km, lebar permukaan maksimum 10 m, lebar dasar 8 m, kedalaman maksimum 0,65 m, debit maksimum 2,03 m³/detik, dan debit minimum 0,02 m³/detik, Ada 9 sungai yang mengalir di Kecamatan Sitiung dengan urutan dari yang terpanjang yaitu Sei Tolu 13 km, Sei Kuko 10 km,





Sei Udang 9 km, Sei Sarik 7 km, Sei Murai 5 km, Sei Lubuk Agung 4 km, Sei Durian 3 km, Batang Tiung 2 km dan Sungai Duo 2 km,

Untuk Kecamatan Timpeh dialiri oleh 12 sungai dengan total panjang 139 km, panjang maksimum 45 km, lebar permukaan maksimum 53 m, lebar dasar maksimum 51 m, kedalaman maksimum 1,70 m, debit maksimum 7,55 m³/detik, dan debit minimum 0,05 m³/detik. Sungai Batang Timpeh merupakan sungai terpanjang dan terlebar di Kecamatan Timpeh yang bermuara ke Batang Hari dengan melewati Kecamatan Padang Laweh, dengan panjang 45 km, lebar permukaan 53 m, lebar dasar 51 m, kedalaman 1,3 m, debit maksimum 7,55 m³/detik dan debit minimum 2,61 m³/detik. Sungai-sungai lain yang mengalir di Kecamatan Timpeh yaitu Batang Timpeh Usau 25 km, Sei Palabi 12 km, Sei Pinang 10 km, Sei Temperatur 9 km, Sungai Ngalau 8 km, Sei Kambang Mani 8 km, Sei Ambacang 7 km, Sei Garingging 6,40 km, Ari Gemuruh 4 km, Sarana Baru 4 km, dan Batang Lodan 1 km.

Pada Kecamatan Koto Baru terdapat 4 sungai dengan total panjang 31 km, panjang maksimum 15 km, lebar permukaan maksimum 9 m, lebar dasar 7 m, kedalaman maksimum 1,3 m, debit maksimum 2,05 m³/detik dan debit minimum 0,02 m³/detik. Adapun sungai-sungai yang mengalir di Kecamatan Koto Baru yaitu Sungai Betung AR sepanjang 15 km dan lebar 9 km, Sungai Rimbo panjang 8 km dan lebar 6 m, Batang Tarok panjang 5 km dan lebar 2,5 km, dan Sungai Kaciak panjang 3 km dan lebar 3,5 km.

Sementara itu, pada Kecamatan Padang Laweh hanya terdapat 1 (satu) sungai yaitu Sungai Sopan Jaya yang mengalir sepanjang 3 km, lebar permukaan 3 m, lebar dasar 2 m, kedalaman 0,45 m, dengan debit maksimum 0,18 m³/detik dan debit minimum 0,07 m³/detik.

Sama halnya pada Kecamatan Koto Salak hanya terdapat 1 (satu) Sungai Aman dengan panjang 4 km, lebar permukaan 7 m, lebar dasar 5 m, kedalaman 1,4 m, dengan debit maksimum 0,31 m³/detik dan debit minimum 0,05 m³/detik.

Sedangkan pada Kecamatan Koto Besar memiliki 6 aliran sungai dengan total panjang 132 km, panjang maksimum 73 km, lebar permukaan maksimum 22





m, lebar dasar maksimum 21 m, kedalaman maksimum 2,28 m, debit maksimum 90,77 m³/detik, dan debit minimum 0,07 m³/detik. Adapun sungai terpanjang dan terlebar di Kecamatan Koto Besar yaitu Batang siat, yang mengalir melintasi Kecamatan Koto Baru sampai bermuara ke Sungai Batanghari di Kecamatan Koto Salak, dengan panjang 73 km, lebar permukaan 22 m, lebar dasar 21 m, kedalaman 2,28 m, debit maksimum 90,77 m³/detik, dan debit minimum 1,54 m³/detik. Sungai-sungai lain yang mengalir di Kecamatan Koto Besar berurutan dari terpanjang adalah Sungai Betung 18 km, Sungai Nabuan 17 km, Sungai Bayeh 10 km, Sungai Bungin 9 km, dan Sei Muai 5 km,

Pada Kecamatan Asam Jujuhan dialiri oleh 4 sungai dengan total panjang 146 km, panjang maksimum 59 km, lebar permukaan 45 m, lebar dasar 44 m, kedalaman 2,1 m, debit maksimum 27,33m³/detik, debit minimum 3,18 m³/detik, Sungai Pangian adalah yang terpanjang dengan lebar permukaan 24 m, lebar dasar 24 m, kedalaman 2 m dengan debit maksimum 20,17 m³/detik dan debit minimum 6,23 m³/detik. Sungai-sungai lainnya yang mengalir di Kecamatan Asam Jujuhan dari yang terpanjang berturut-turut yaitu Batang Sinamar panjang 40 km dan lebar 35 m, Sungai Jujuhan panjang 30 km dan lebar 45 m, dan Sungai Asam panjang 17 km dan lebar 16 m.

Pada Kecamatan Sungai Rumbai memiliki 2 aliran Sungai dengan total panjang 15 km, yaitu Sei Jernih dan Sei Cendrawasih, masing-masing berurutan Sei Jernih memiliki panjang 8 km, lebar permukaan 6 m, lebar dasar 4 m, dan kedalaman 0,6 m, sedangkan Sei Cendrawasih memiliki panjang 7 km, lebar permukaan 4 m, lebar dasar 2 m, dan kedalaman 0,55 m. Debit maksimum Sei Jernih dan Sei Cendrawasih masing-masingnya 1,85 m³/detik dan 0,15 m³/detik dan debit minimum masing-masingnya 0,53 m³/detik dan 0,05 m³/detik.

Sementara itu, pada Kecamatan Tiumang terdapat 3 Sungai dengan total panjang 35 km. Adapun sungai yang mengalir di Kecamatan Tiumang masing-masingnya yaitu Batang Bungo panjang 20 km dan lebar 7 m, Sungai Kalang panjang 13 km dan lebar 9 m, dan Sungai Atang panjang 8 km dan lebar 6 m.

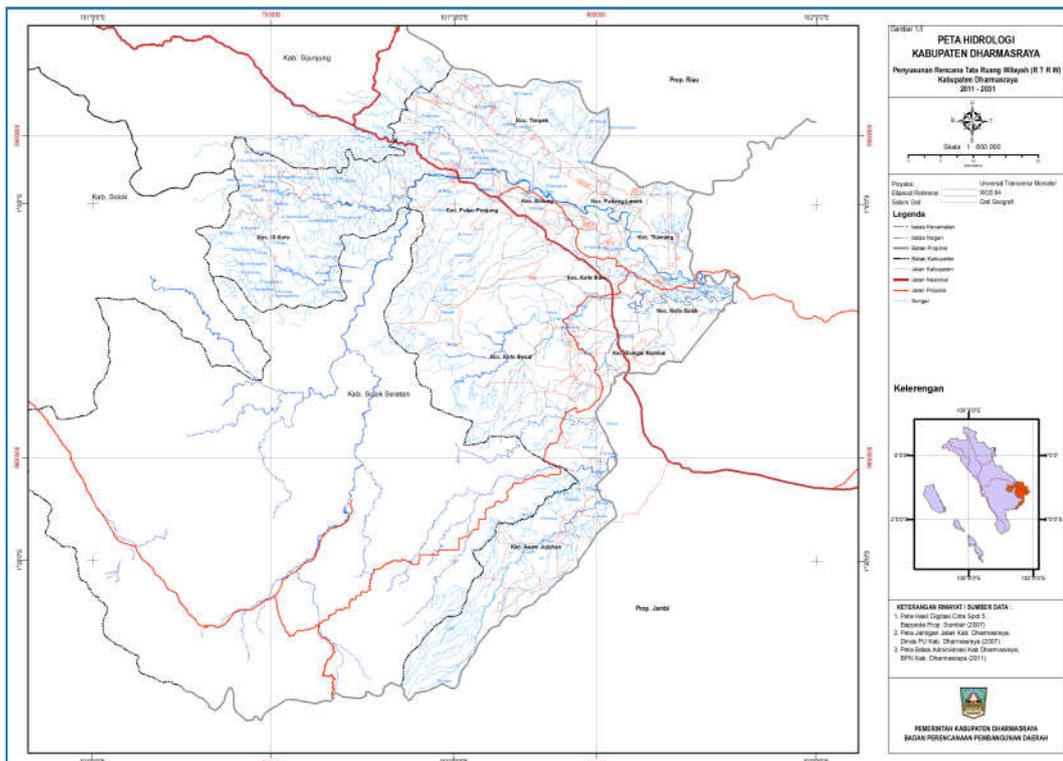
Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Batanghari telah mengembangkan proyeksi kebutuhan air untuk Wilayah Sungai Batanghari





dengan hasil kajian bahwa untuk proyeksi kebutuhan air DAS Batanghari dan DAS Batang Siat yaitu berturut-turut sebesar 97,08 m³/detik dan 10,51 m³/detik.

Gambar 3.2.18.
Peta Hidrologi Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Dharmasraya 2011-2031



Sumber: Dokumen Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya 2011-2031.

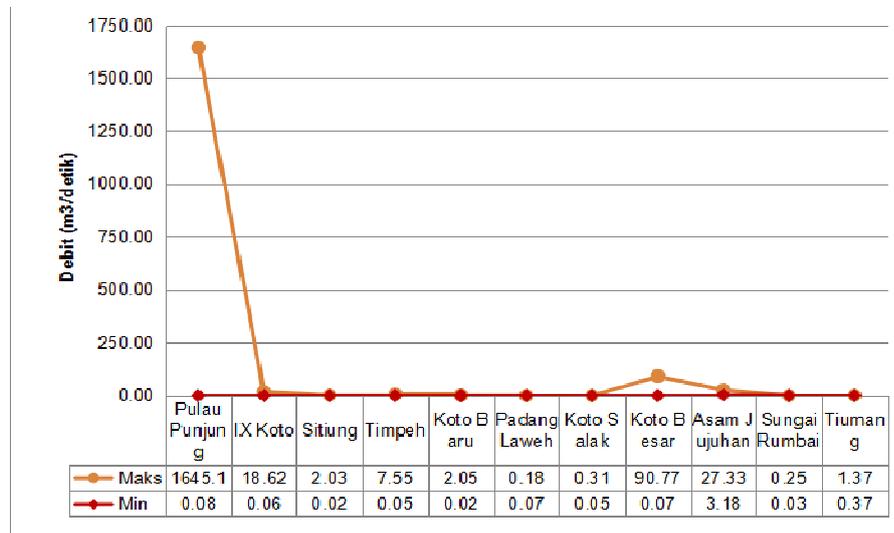
Pada Gambar 3.2.18. merupakan Peta Hidrologi berdasarkan dokumen Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yang diperoleh dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Darmasraya.

Pada Gambar 3.2.19. terlihat perbandingan debit maksimum dan debit minimum sungai per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Debit terbesar dihasilkan oleh Sungai Batang Hari dan Sungai Batang Siat, masing-masing 1645.14 m³/detik dan 90,77 m³/detik.





Gambar 3.2.19.
Perbandingan Debit Maksimum dan Debit Minimum Sungai Per-
Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-15. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

3.2.3. Kondisi Danau/ Waduk /Situ/Embung

Embung atau tandon air merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian (*small farm reservoir*) yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan di musim hujan. Air yang ditampung tersebut selanjutnya digunakan sebagai sumber irigasi suplementer untuk budidaya komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi (*high added value crops*) di musim kemarau atau di saat curah hujan makin jarang. Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air (*water harvesting*) yang sangat sesuai di segala jenis agroekosistem. Teknologi embung atau tandon air merupakan salah satu pilihan yang menjanjikan untuk mengatur ketersediaan air agar dapat memenuhi kebutuhan air (*water demand*) yang semakin sulit dilakukan dengan cara-cara alamiah (*natural manner*) karena teknologinya sederhana, biayanya relatif murah dan dapat dijangkau kemampuan petani. Di lahan rawa namanya *pond* yang berfungsi sebagai tempat penampungan air drainase saat kelebihan air di musim hujan dan sebagai sumber air irigasi pada musim kemarau. Sementara pada ekosistem tadah hujan atau lahan kering dengan



intensitas dan distribusi hujan yang tidak merata, embung dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Secara operasional sebenarnya embung berfungsi untuk mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan.

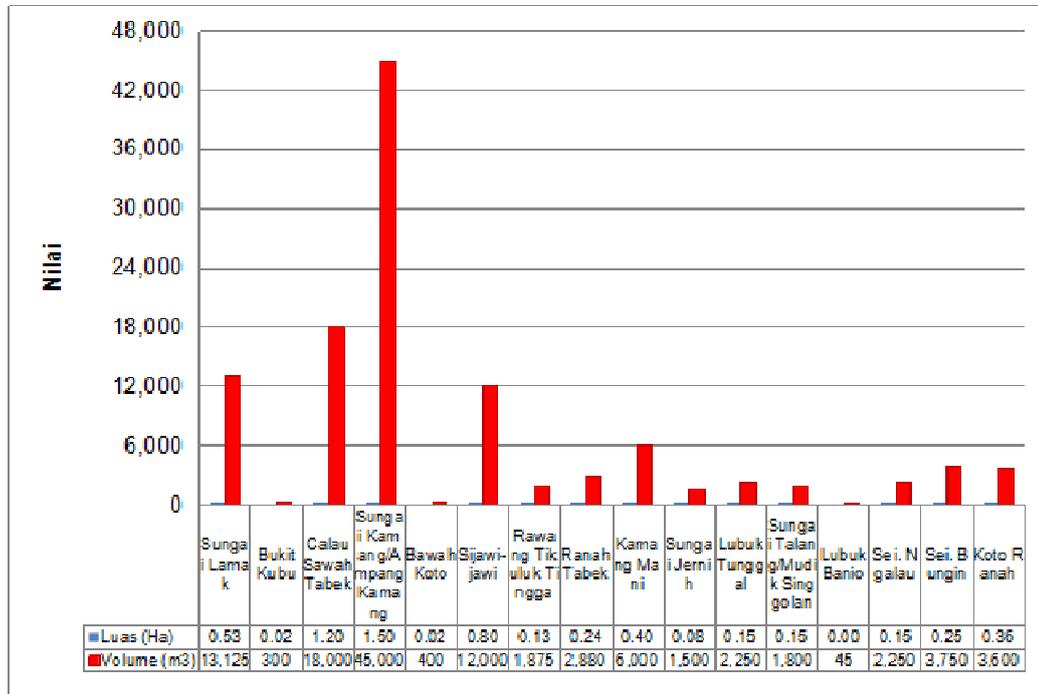
Hasil inventarisasi danau, situ dan waduk pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki danau dan situ/waduk, tetapi memiliki Embung yang tersebar di beberapa kecamatan. Kabupaten Dharmasraya memiliki 16 (enam belas) embung yaitu embung Sei Lamak, Bukit Labu, Calau/Sawah Tabek, Sungai Kamang/Ampang Kamang, Bawah Koto, Si Jawi-Jawi, Rawang Tikuluk Tingga, Ranah Tabek, Kamang Mani, Sungai Jernih, Lubuk Tunggai, Sungai Talang/Mudik Singgolan, Lubuk Banio, Sei Ngalau, Sei Bungin, dan Koto Ranah.

Pada Gambar 3.2.20. terlihat perbandingan luas dan volume masing-masing embung yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Semua embung yang ada di Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 5,42 Ha dan kapasitas volume sebesar 101,350 m³. Embung Ampang Kamang adalah embung terluas dan terbesar dengan luas 1,50 Ha dan kapasitas embung 45,000 m³. (*Sumber: Tabel-16. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016*).

Pada tahun 2016 tidak terjadi perubahan jumlah embung, karena tidak ada pembangunan embung baru dan hanya berupa perbaikan, hal ini terlihat dari jumlah embung yang sama dengan tahun sebelumnya yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya. Embung yang terdata oleh Dinas PU Kabupaten Dharmasraya ini tersebar di 6 (enam) Kecamatan yaitu 1 (satu) embung di Kecamatan Sungai Rumbai, 2 (dua) embung di Kecamatan Koto Besar, 2 (dua) embung di Kecamatan Sitiung, 3 (tiga) embung di Kecamatan Timpeh, 5 (lima) embung di Kecamatan Pulau Punjung, dan 3 (tiga) embung di Kecamatan IX Koto, dengan total keseluruhan berjumlah 16 (enam belas) embung. (*Sumber: Tabel-16A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016*).



Gambar 3.2.20.
Luas dan Volume Embung di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-16. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Kecamatan Sungai Rumbai hanya terdapat 1 (satu) embung yaitu Embung Sungai Jernih yang berlokasi di Kodran Nagari Kurnia Koto Salak.

Embung juga terdapat di Kecamatan Koto Besar dengan jumlah 2 (dua) embung yang berlokasi yaitu, Embung Sei Bungin di Mayang Taurai Nagari Koto Gadang, dan Embung Koto Ranah di Koto Ranah Nagari Koto Gadang.

Pada Kecamatan Situng terdapat sebanyak 2 (dua) embung dengan lokasi yaitu Embung Si Jawi-Jawi di Nagari Siguntur, dan Embung Ranah Tikuluk Tinggi di Nagari Sitiung.

Kecamatan Timpeh memiliki 3 (tiga) embung yang masing-masingnya berlokasi yaitu, Embung Ranah/Tabek di Nagari Trimulya, Embung Kamang Mani di Nagari Tabek Penyubarangan, dan Embung Sei Ngalau di Nagari Timpeh.

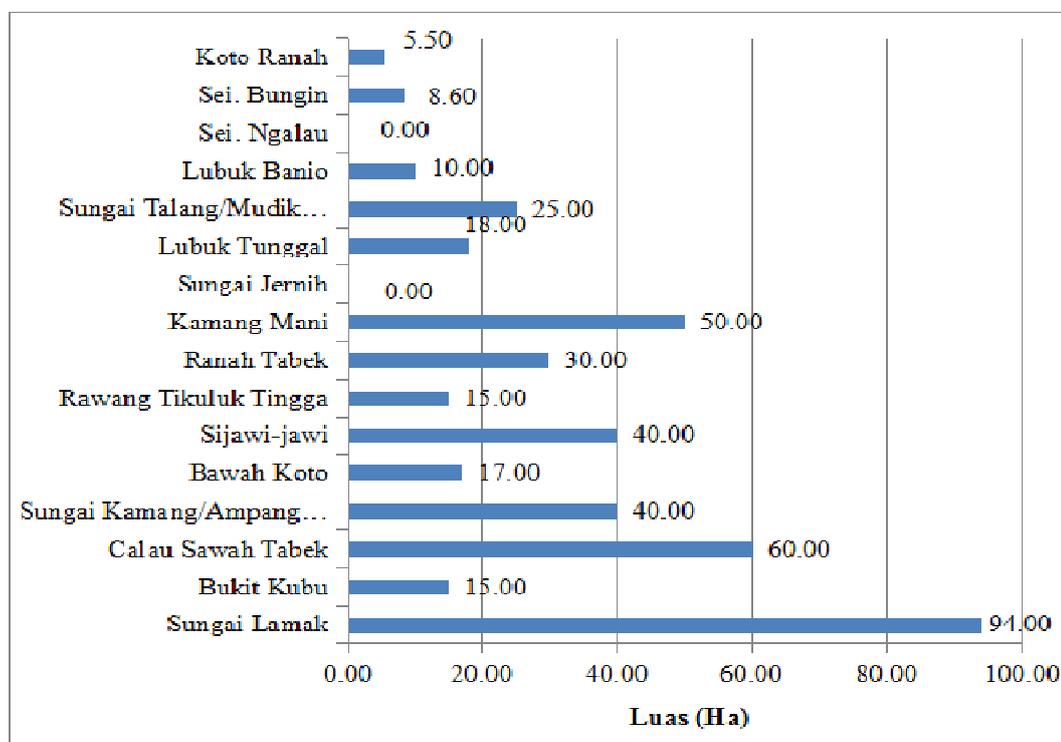
Lima Embung yang terdapat di Kecamatan Pulau Punjung masing-masing berlokasi yaitu, Embung Sungai Lamak di Lubuk Bulang Nagari Gunung Selasih, Embung Bukit Kubu di Nagari IV Koto Pulau Punjung, Embung Sungai



Kamang/Ampang Kamang di Sei Kilangan Nagari Sungai Dareh, Embung Calau Sawah Tabek di Nagari Sei Kambut/IV Koto, dan Embung Bawah Koto di Koto Gadang Nagari Sungai Dareh.

Selebihnya, 3 (tiga) Embung terdapat pada Kecamatan IX Koto yang berlokasi masing-masingnya yaitu, Embung Lubuk Tunggal di Koto Baru Nagari Silago. Embung Sungai Talang/Mudik Singgolan di Ampang Kuranji Nagari Silago dan Embung Lubuk Banio di Koto Baru Nagari Silago. (Sumber: Tabel-16B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.2.21.
Luas Sawah Irigasi Yang Dialiri Air Embung



Sumber: Olahan Tabel-16C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Embung dapat berfungsi untuk mengairi lahan pertanian, termasuk sawah irigasi. Embung yang dibuat di Kabupaten Dharmasraya dapat mengairi sawah irigasi seluas 428,10 Ha. Perbandingan luasan sawah yang dapat dialiri oleh air embung dapat dilihat pada Gambar 3.2.21.

Untuk embung Sei Lamak yang berlokasi di Kecamatan Pulau Punjung mampu mengairi sawah irigasi seluas 94 Ha dengan kapasitas 13.125 m³. Embung





Calau Sawah Tabek yang juga berlokasi di Kecamatan Pulau Punjung mampu mengairi sawah irigasi seluas 60 Ha dengan kapasitas 18.000 m³. Embung Kamang mani di Kecamatan Timpeh mampu mengairi sawah irigasi seluas 50 Ha dengan kapasitas 6.000 m³. Jadi tidak semua embung dengan luas dan volume yang lebih besar dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengairi sawah irigasi. Perbandingan sumber air embung, luas dan volume embung, luas sawah irigasi yang dapat dialiri, serta panjang saluran pembawa air irigasi embung yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 3.2.3. (Sumber: Tabel-16, Tabel-16C, Tabel-16D, Tabel-16E, Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Tabel 3.2.3.
Perbandingan Sumber Air, Luas dan Volume Embung, Luas Sawah Irigasi Yang Dapat Dialiri, Serta Panjang Saluran Pembawa

No	Nama Embung	Sumber Air	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Sawah Irigasi (Ha)	Saluran Pembawa (km)	
						Primer	Sekunder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sungai Lamak	Sei Lamak	0,525	13,125	94,00	1,68	2,837
2	Bukit Kubu	Mata Air	0,02	300,00	15,00	0,00	0,554
3	Calau Sawah Tabek	Mata Air	1,20	18,00	60,00	0,00	0,252
4	Sungai Kamang/ Ampang Kamang	Sei Kamang	1,50	45,00	40,00	0,33	0,969
5	Bawah Koto	Mata Air	0,02	400	17,00	0,00	0,986
6	Sijawi-jawi	Sei Udang	0,80	12,00	40,00	0,00	1,512
7	Rawang Tikuluk Tingga	Sei London	0,125	1,875	15,00	0,00	0,355
8	Ranah Tabek	Mata Air	0,24	2,88	30,00	0,00	2,070
9	Kamang Mani	Sei Kamang Mani	0,40	6,00	50,00	0,00	0,300
10	Sei, Ngalau	Sei, Jernih	0,075	1,50	0,00	0,00	2,130
11	Sungai Jernih	Sungai Labuai	0,15	2,250	18,00	0,00	0,768
12	Lubuk Tungal	Sei Talang	0,15	1,80	25,00	0,00	0,322
13	Sungai Talang/ Mudik Singgolan	Lubuk Banio	0,005	45,00	10,00	0,00	0,428
14	Lubuk Banio	Sei Ngalau	0,15	2,20	0,00	0,00	1,114
15	Sei, Bungin	Sei Bungin	0,25	3,75	8,60	0,00	0,001



No	Nama Embung	Sumber Air	Luas (Ha)	Volume (m ³)	Sawah Irigasi (Ha)	Saluran Pembawa (km)	
						Primer	Sekunder
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Koto Ranah	Mata Air	0,36	3,60	5,50	0,00	0,001
Total			5,97	114,775	428,10	2,01	14,60

Sumber: Olahan Tabel-16, 16C, 16D, 16E, Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Sumber air embung yang ada di Kabupaten Dharmasraya berasal dari sumber yang berbeda, ada yang berasal dari mata air dan ada pula yang berasal dari air sungai. Beberapa embung yang bersumber dari air sungai yaitu embung Sungai Lamak bersumber dari Sungai Lamak, embung Ampang Kamang bersumber dari Sungai Kamang, embung Si Jawi-jawi bersumber dari Sungai Udang, embung Rawang Tikuluk Tingga bersumber dari Sungai Lodan, embung Kamang Mani bersumber dari Sungai Kamang Mani, embung Sungai Jernih bersumber dari Sungai Jernih, embung Lubuk Tunggal bersumber dari Sungai Labuai, embung Sungai Talang/Mudik Singgolan bersumber dari Sungai Talang, embung Lubuk Banio bersumber dari Lubuk Banio, embung Sei Ngalau bersumber dari Sungai Ngalau, dan embung Sei Bungin bersumber dari Sungai Bungin. Embung yang bersumber dari mata air yaitu air embung Bukik Labu, embung Calau Sawah Tabek, embung Bawah Koto, embung Ranah Tabek, dan embung Koto Ranah. (Sumber: Tabel-16D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

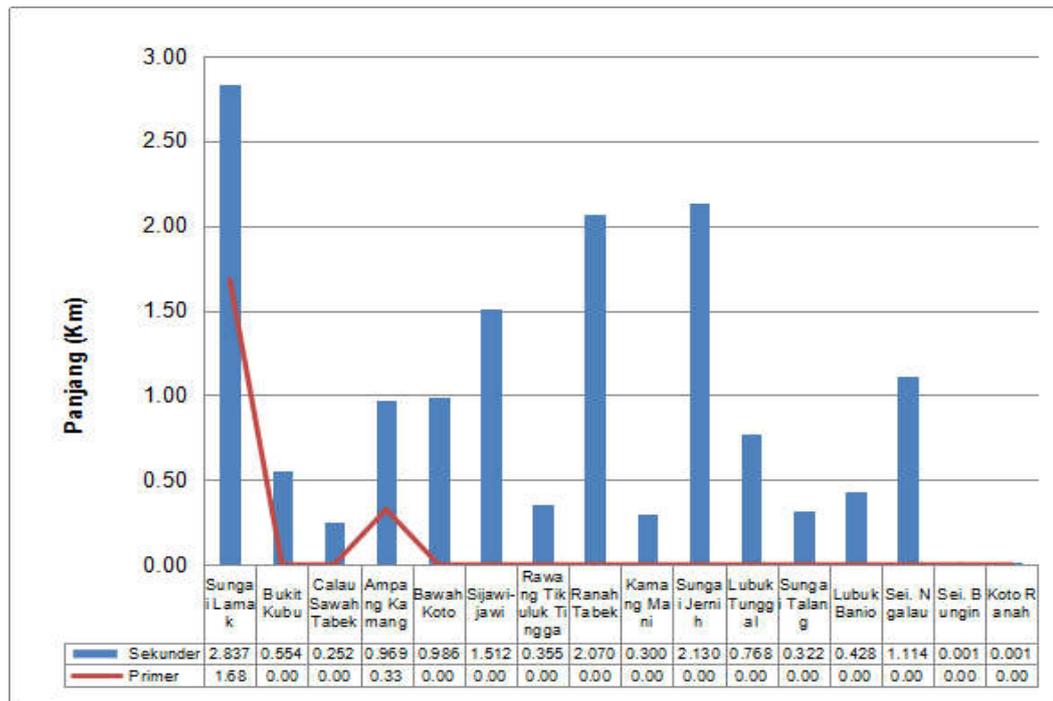
Saluran pembawa air embung terdiri dari saluran primer sepanjang 2,01 Km dan saluran sekunder sepanjang 14,60 Km, sehingga total panjang saluran pembawa adalah 16,60 Km, Saluran pembawa terpanjang terdapat pada embung Sungai Lamak di Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung sepanjang 4,518 Km yang terdiri dari saluran primer 1,68 Km dan saluran sekunder 2,837 Km, sedangkan saluran pembawa terpendek terdapat pada embung Sei Bungin dan embung Koto Ranah di Kecamatan Koto Besar sepanjang 0,001 Km yang merupakan saluran sekunder, persentase panjang saluran pembawa masing-masing embung yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 3.2.22. Berdasarkan hasil perbandingan persentase saluran primer dan sekunder tersebut, bahwa pada umumnya air embung lebih banyak dialirkan melalui saluran





sekunder karena terlihat saluran pembawa sekunder lebih panjang dibanding saluran primer, (Sumber: Tabel-16E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.2.22.
Persentase Panjang Saluran Pembawa Masing-Masing Embung di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-16E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Respon atau tindakan yang dilakukan dalam mengatasi kondisi dan tekanan Embung melalui Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah yaitu:

- Melakukan normalisasi dengan pengerukan sedimen, pembersihan sampah, enceng gondok dan perbaikan pintu air, dan mencegah agar sedimentasi tidak mudah terjadi dengan membangun pengendalian aliran lumpur pada embung.
- Melakukan perbaikan renovasi dan embung dirancang sesuai kaidah fungsi hidrologis yang mampu menyerap dan menyimpan kelebihan genangan air yang tidak dikehendaki, simpanan air ini dapat digunakan sebagai cadangan air atau sumber air baku maupun air pertanian pada musim kemarau.
- Embung menjadi alternatif kedua sebagai sumber air irigasi setelah air sungai.



3.2.4. Kualitas Air Sungai

Kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003). Kualitas air dapat dinyatakan dengan parameter kualitas air yang meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pemanfaatan sumber air harus dikelola dengan baik terutama kualitas dan kuantitasnya. Limbah yang mengandung beban pencemar masuk ke lingkungan perairan dapat menyebabkan perubahan terhadap kualitas air.

Baku mutu air adalah batas kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yg ada dan atau unsur pencemar yang diperkenankan keberadaannya di dalam air, namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya serta tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu air.

Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkatan mutu air ini dibagi berdasarkan kemungkinan penggunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*). Sedangkan status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.

Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :

- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
- b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.





Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Klasifikasi dan kriteria mutu air mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang menetapkan mutu air ke dalam empat kelas yaitu:

- a. **Kelas satu**, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. **Kelas dua**, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana kegiatan rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. **Kelas tiga**, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. **Kelas empat**, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Sumitomo dan Nemerow (1970), Universitas Texas, A.S., mengusulkan suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan. Indeks ini dinyatakan sebagai Indeks Pencemaran (Pollution Index) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Indeks ini memiliki konsep yang berlainan dengan Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index*). Indeks Pencemaran (IP) ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Pengelolaan kualitas air atas dasar Indeks Pencemaran (IP) ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa





pencemar. IP mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independent dan bermakna.

Evaluasi terhadap nilai Indeks Pencemaran (IP) adalah :

$0 \leq IP \leq 1,0 \implies$ memenuhi baku mutu (kondisi baik)

$1,0 < IP \leq 5,0 \implies$ cemar ringan

$5,0 < IP \leq 10 \implies$ cemar sedang

$IP > 10 \implies$ cemar berat

Pemantauan kualitas air sungai Batanghari telah dilakukan pada tahun 2016 untuk 5 (lima) titik pantau dengan masing-masing kode yaitu, BH1 (Batanghari Batu Bakawuik) di Kecamatan Pulau Punjung, BH2 (Batanghari Sungai Dareh) di Kecamatan Pulau Punjung, BH3 (Batanghari Siguntur) di Kecamatan Sitiung, BH4 (Batanghari Pulai) di Kecamatan Sitiung dan BH5 (Batanghari Teluk Lancang) di Kecamatan Koto Salak. Pemantauan kualitas air sungai juga dilakukan untuk beberapa titik sampling sungai besar dan anak sungai lainnya, seperti Batang Momong (Hulu di Kecamatan IX Koto dan Muara di Kecamatan Pulau Punjung), Batang Pangian (Sialang Kecamatan Pulau Punjung), Batang Timpeh (Kecamatan Padang Laweh), Batang Mimpi (Sikabau Kecamatan Pulau Punjung), Batang Piruko (Nagari Gunung Medan di Kecamatan Sitiung), Batang Siat (Koto Baru Kecamatan Koto Baru dan Abai Siat Kecamatan Koto Besar), Sungai Koto Balai (Kecamatan Koto Baru), Sungai Betung (Kecamatan Sungai Rumbai), dan Batang Sinabuhan (Abai Siat Kecamatan Koto Besar). Pemantauan air sungai Batanghari dan sungai besar lainnya ini dilakukan secara rutin minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

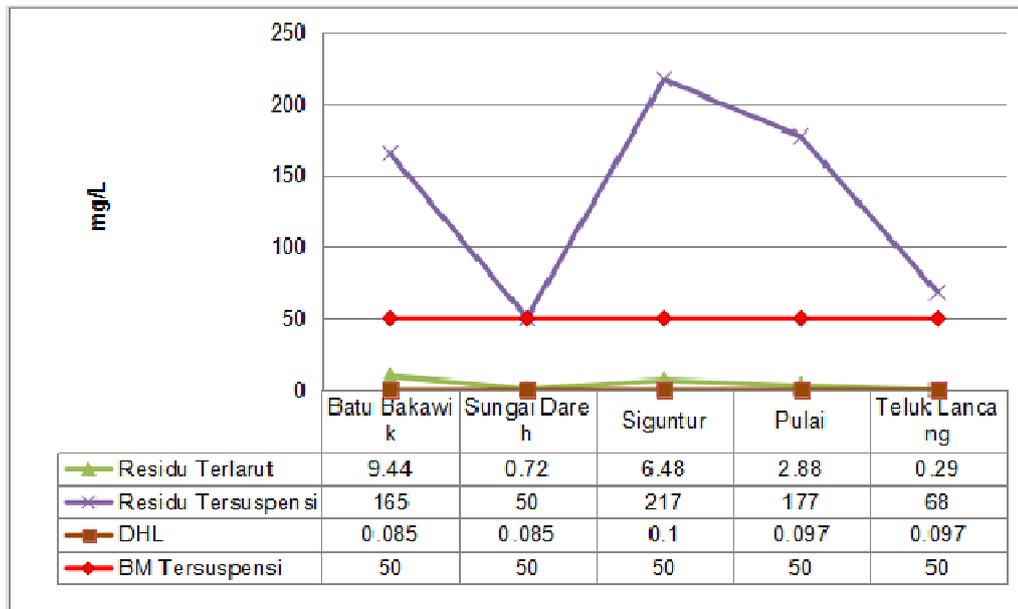
Pada sub bab ini akan menjelaskan hasil pemantauan kualitas air sungai Batanghari yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2016 dan dilakukan analisis masing-masing sampel air sungai untuk parameter fisika (temperatur, residu terlarut, residu tersuspensi dan daya hantar listrik), kimia anorganik (pH, DO/*Dissolved Oxygen*, BOD/*Biological Oxygen Demand*, COD/*Chemical Oxygen Demand*, NO₂/Nitrit, NO₃/Nitrat, NH₃/Amoniak, Klorin Bebas, T-P/Total Posfat, Sianida, dan H₂S), kimia organik (Fenol, Minyak Lemak, dan Detergen), dan





mikrobiologi (Fecal Coliform dan Total Coliform). (Sumber: Tabel 17. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.2.23.
Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika



Sumber: Olahan Tabel-17A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

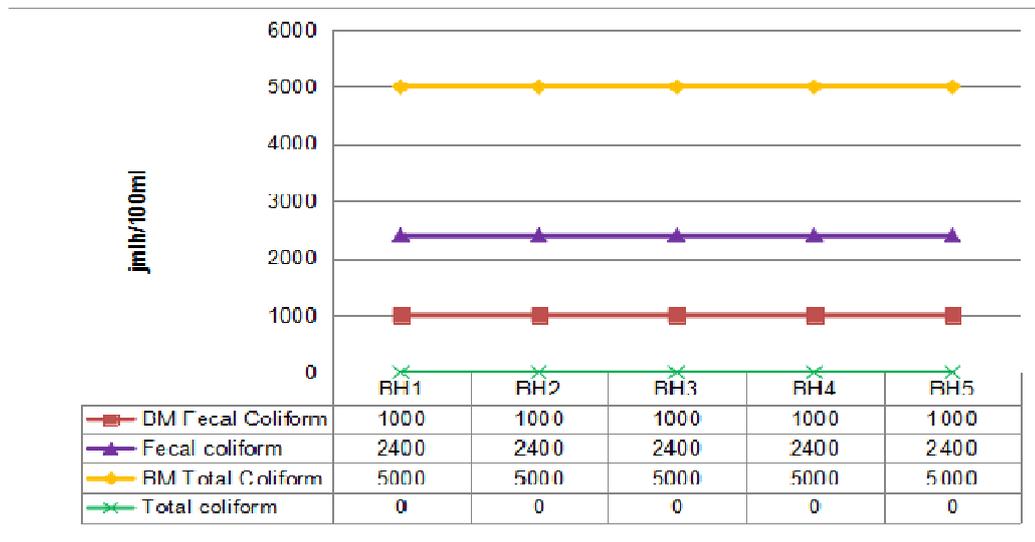
Pada Gambar 3.2.23. memperlihatkan hasil analisis kualitas air sungai Batanghari untuk parameter fisika, bahwa parameter residu tersuspensi (TSS) untuk semua lokasi titik pemantauan BH1, BH2, BH3, BH4, dan BH5 telah melebihi nilai baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 (≤ 50 mg/L), dengan nilai masing-masingnya berurutan adalah 165 mg/L, 50 mg/L, 217 mg/L, 177 mg/L, dan 68 mg/L. Konsentrasi TSS terendah yaitu pada BH2 (Batanghari Sungai Dareh), dan Konsentrasi TSS tertinggi terdeteksi pada BH3 (Batanghari Siguntur). Sementara itu, untuk parameter residu terlarut (TDS) masih dalam batas baku mutu air kelas II (≤ 1000 mg/L), (Sumber: Tabel-17A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Hasil analisis kualitas air sungai Batanghari seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.24. untuk parameter mikrobiologi yaitu Fecal Coliform telah melebihi nilai baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 (batas ≤ 1000 jmlh/100 mL) untuk semua titik sampling air sungai Batanghari, yaitu >2400 jmlh/100 mL. Sedangkan



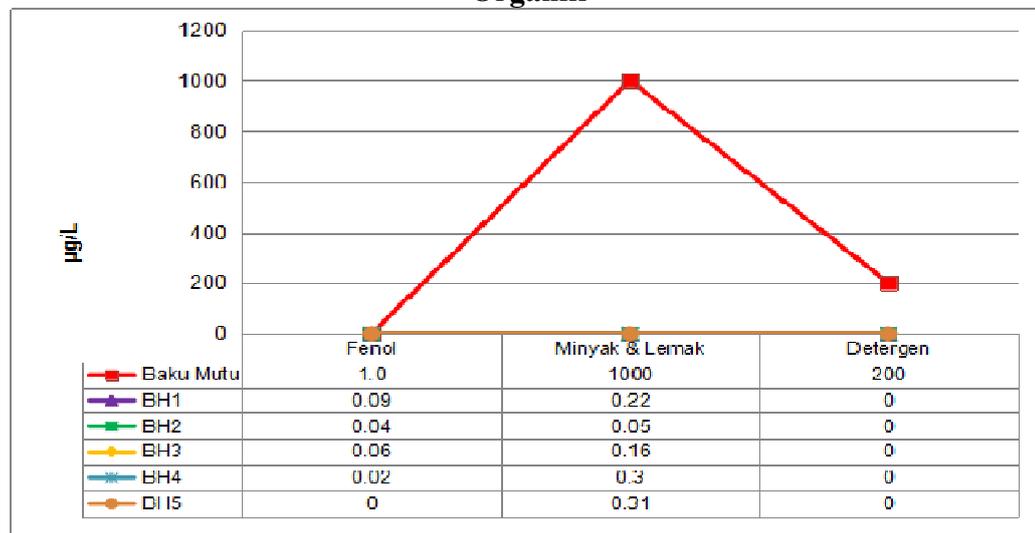
hasil analisis untuk parameter Total Coliform masih dalam batas baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 (batas ≤ 5000 jmlh/100 mL).

Gambar 3.2.24.
Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Mikrobiologi



Sumber: Olahan Tabel-17A. Lampiran II Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.2.25.
Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Organik



Sumber: Olahan Tabel-17A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

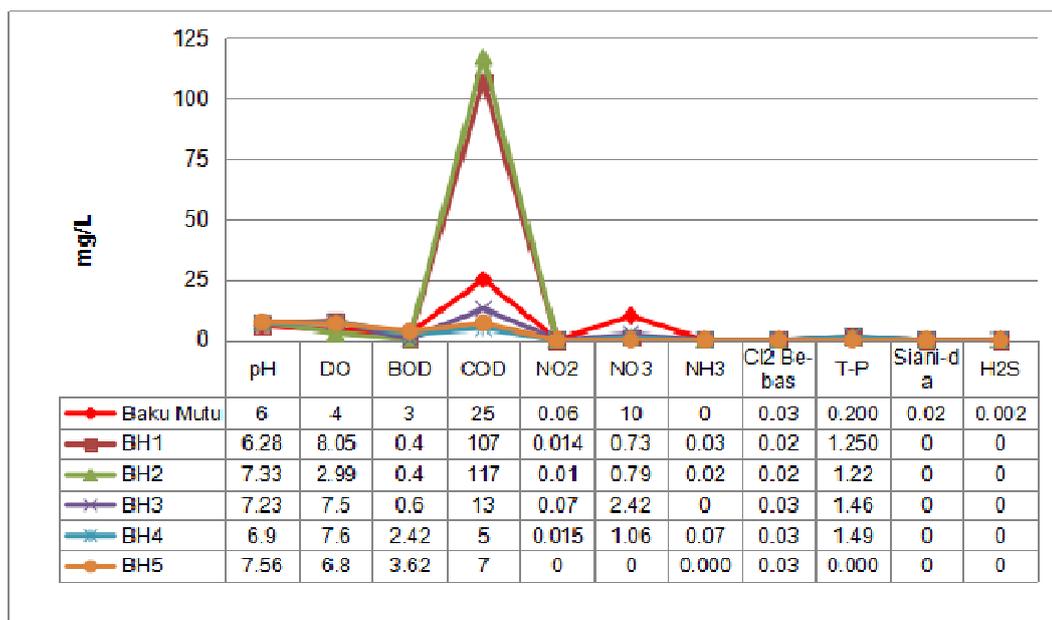
Sementara itu, hasil analisis kualitas air sungai Batanghari untuk parameter kimia organik seperti ditunjukkan pada Gambar 3.2.25. memperlihatkan bahwa kualitas air di semua titik sampling air sungai Batanghari untuk parameter Fenol



masih memenuhi nilai baku mutu air kelas II PP 82/2001 ($\leq 1,0 \mu\text{g/L}$), masing-masing berturut-turut yaitu Batanghari Batu Bakawuik (BH1) $0,090 \mu\text{g/L}$, Batanghari Sungai Dareh (BH2) $0,040 \mu\text{g/L}$, Batanghari Siguntur (BH3) $0,060 \mu\text{g/L}$, Batanghari Pulai (BH4) $0,020 \mu\text{g/L}$, dan Batanghari Teluk Lancang (BH5) tidak terdeteksi.

Pada Gambar 3.2.26. terlihat bahwa kualitas air sungai Batanghari untuk beberapa parameter Kimia Anorganik telah melewati atau tidak memenuhi nilai baku mutu yang ditetapkan untuk air kelas II dalam PP 82/2001, yaitu parameter DO (baku mutu $\geq 4 \text{ mg/L}$) untuk titik sampling air sungai Batanghari Sungai Dareh (BH2) $2,99 \text{ mg/L}$, dan untuk parameter BOD (baku mutu $\leq 3 \text{ mg/L}$) yang melebihi nilai baku mutu yaitu untuk titik sampling sungai Batanghari Teluk Lancang (BH5) $3,62 \text{ mg/L}$. Sedangkan untuk parameter COD (baku mutu $\leq 25 \text{ mg/L}$) untuk titik sampling air sungai Batanghari Batu Bakawuik (BH1) 107 mg/L dan Batanghari Sungai Dareh (BH2) 117 mg/L . Untuk Parameter Nitrat/NO₂ (baku mutu $\leq 0,06 \text{ mg/L}$) telah melebihi nilai baku mutu untuk titik sampling air sungai Batanghari Siguntur (BH3) $0,07 \text{ mg/L}$.

Gambar 3.2.26.
Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Anorganik



Sumber: Olahan Tabel-17B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





Parameter Klorin Bebas (baku mutu $\leq 0,03$ mg/L) yang melebihi baku mutu yaitu untuk titik sampling air sungai Batanghari Siguntur (BH3) 0,03 mg/L, Batanghari Pulai (BH4) 0,03 mg/L dan Batanghari Teluk Lancang (BH5) 0,03 mg/L. Sedangkan parameter T-P/Total Posfat (baku mutu $\leq 0,2$ mg/L) yang melebihi nilai baku mutu yaitu untuk titik sampling sungai Batanghari Batu Bakawuik (BH1) 1,25 mg/L, Batanghari Sungai Dareh (BH2) 1,22 mg/L, Batanghari Siguntur (BH3) 1,46 mg/L, dan Batanghari Pulai (BH4) 1,49 mg/L. (Sumber: Tabel-17B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Hasil analisis kualitas air sungai Batanghari pada tahun 2016 untuk parameter NO₃, Sianida (baku mutu $\leq 0,02$ mg/L) dan H₂S (baku mutu $\leq 0,002$ mg/L) masih memenuhi nilai baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. (Sumber: Tabel-17B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2016 telah dilakukan berdasarkan hasil analisis konsentrasi dari parameter TSS, BOD, COD, TP, Fecal

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan kualitas air sungai Batanghari terlihat dari adanya peningkatan nilai Indeks Pencemaran Air dari 50,00% pada tahun 2015 menjadi 58,88% Tahun 2016 .

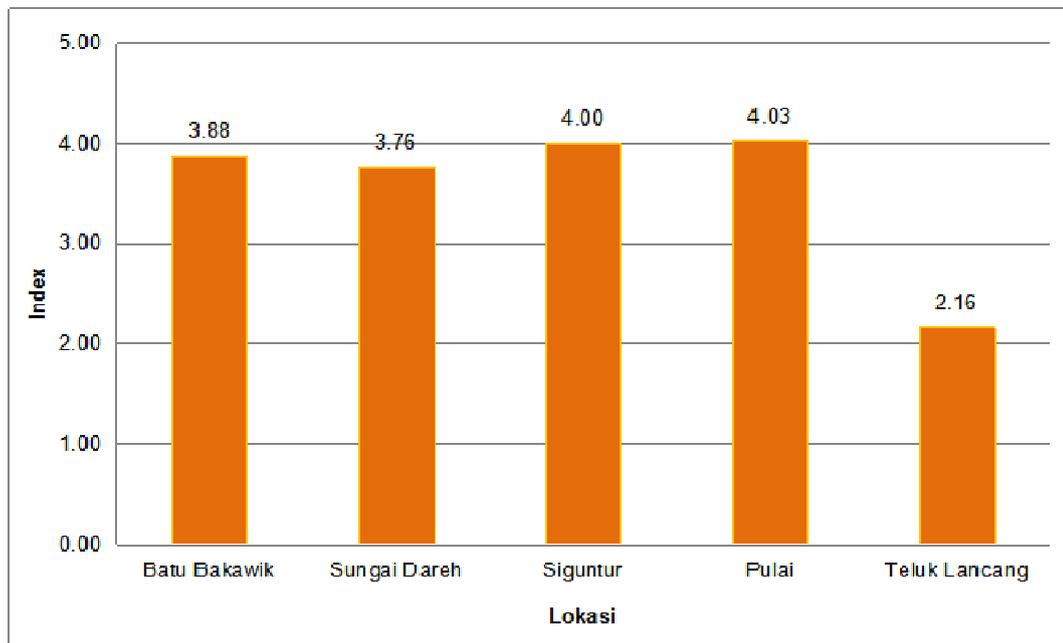
Coliform dan Total Coliform dan menunjukkan hasil bahwa Air Sungai Batanghari memiliki status mutu air tercemar ringan dan tercemar sedang. Adapun index masing-masing-masing lokasi titik pantau Batanghari yaitu Batu Bakawuik (3,88) tercemar ringan, Sungai Dareh (3,76) tercemar ringan, Siguntur (4,00) tercemar ringan, Pulai (4,03) tercemar ringan, dan Teluk Lancang (2,16) tercemar ringan. Sedangkan indeks rata-rata IPA Sungai Batanghari secara keseluruhan bernilai 3,57 atau tercemar

ringan. Perhitungan nilai IPA air sungai Batanghari tahun 2016 yaitu 58,88%.





Gambar 3.2.27.
Indeks Pencemaran Air Sungai Batanghari Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-17E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

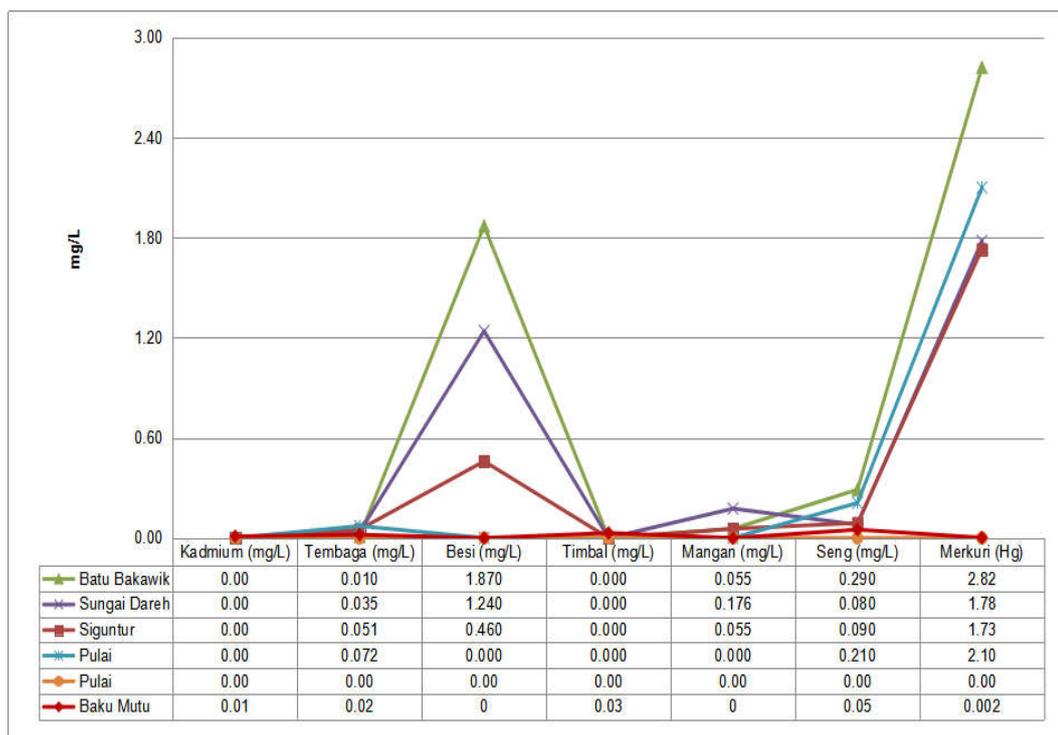
Pada Gambar 3.2.27. terlihat indeks masing-masing titik sampling air sungai Batanghari. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kualitas air sungai Batanghari dibanding tahun 2015 indeks rata-rata IPA yaitu 3,48 atau dengan nilai IPA 50,00%. Namun, air sungai Batanghari tetap tidak layak digunakan, karena masih ada beberapa parameter yang tidak memenuhi nilai baku mutu untuk peruntukan air Kelas II, yaitu untuk prasarana/sarana kegiatan rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, (Sumber: Tabel-17E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Perbandingan kualitas air sungai Batanghari pada 5 (lima) titik pantau untuk parameter logam berat seperti Cd (Cadmium), Cu (Tembaga), Fe (Besi), Pb (Timbal), Mn (Mangan) dan Zn (Seng) dapat dilihat pada Gambar 3.2.28. Hasil analisis untuk parameter Cd, Fe, Pb, dan Mn pada masing-masing titik pantau masih memenuhi nilai baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 ($Cd \leq 0,01$ mg/L, $Pb \leq 0,03$ mg/L, Fe dan Mn tidak ada baku mutu). Sementara itu, hasil analisis



pada parameter Cu telah melebihi baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 ($Cu \leq 0,02$ mg/L) untuk titik sampling air sungai Batanghari yaitu Batanghari Sungai Dareh (0,035 mg/L), Batanghari Siguntur (0,051 mg/L), dan Batanghari Pulau (0,072 mg/L). Sedangkan untuk hasil analisis parameter Fe dan Mn tidak memiliki batas baku mutu air, namun parameter Fe terdeteksi tertinggi pada Batanghari Batubakwuk 1,87 mg/L dan parameter Mn terdeteksi pada Batanghari Sungai Dareh 0,176 mg/L. Namun, yang perhatian adalah parameter Seng ($Zn \leq 0,05$ mg/L) dan Merkuri ($Hg \leq 0,002$ mg/L) yang terdeteksi melebihi nilai baku mutu untuk semua titik sampling, dan terdeteksi tertinggi Zn di Batanghari Pulau (0,210 mg/L) dan Hg di Batanghari Batubakawuik (2,82 mg/L). (Sumber: Tabel-17F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.2.28.
Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Logam Berat



Sumber: Olahan Tabel-17F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Hasil analisis statistik sederhana kualitas air sungai Batanghari pada tahun 2016 untuk parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi pada Tabel 3.2.4. menunjukkan nilai minimum, rata-rata dan maksimum pada 5 (lima) titik pantau sungai Batanghari. Nilai rata-rata kualitas air sungai Batanghari



pada tahun 2016 untuk masing-masing parameter yaitu residu terlarut 3,962 mg/L, residu tersuspensi 135,4 mg/L, pH 7,06, DO 0 mg/L, BOD 1,48 mg/L, COD 49,80 mg/L, NO₂ 0,027 mg/L, NO₃ 1,25 mg/L, NH₃ 0,04 mg/L, Klorin bebas 0,26 mg/L, TP 1,35 mg/L, H₂S dan Sianida tidak terdeteksi, Fenol 0,0525 µg/L, Minyak & Lemak 0,31 µg/L, Detergen tidak terdeteksi, Fecal coliform 2400 jumlah/100 ml, dan Total coliform 2400 jumlah/100 ml. Beberapa hasil statistik tersebut masih berada dalam standar baku mutu air kelas II PP 82/200, kecuali untuk parameter mikrobiologi (fecal coliform).

Tabel 3.2.4.
Hasil Analisis Statistik Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2016

No.	Parameter	Baku Mutu (PP 82/2001 Kelas II)	Min.	Rata- Rata	Maks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Parameter Fisika					
1	Temperatur (°C)	Deviasi 3	26,3	26,9	28,0
2	Residu Terlarut (mg/L)	1000	0,29	3,962	9,44
3	Residu Tersuspensi (mg/L)	50	50	135,4	217
B. Parameter Anorganik					
1	pH	6-9	6,28	7,06	7,56
2	DO (mg/L)	Minimum 4	2,99	0	8,05
3	BOD (mg/L)	3	0,4	1,488	3,62
4	COD (mg/L)	25	5	49,8	117
5	NO ₂ (mg/L)	0,06	0,01	0,027	0,07
6	NO ₃ (mg/L)	10	0,73	1,25	2,42
7	NH ₃ (mg/L)	(-)	0,02	0,04	0,07
8	Klorin Bebas (mg/L)	0,03	0,02	0,026	0,03
9	T-P (mg/L)	0,2	1,22	1,355	1,49
10	H ₂ S (mg/L)	0,002	0	0	0
11	Sianida (mg/L)	0,02	0	0	0
C. Parameter Organik					
1	Fenol (µg/L)	1	0,02	0,0525	0,09
2	Minyak & Lemak (µg/L)	1,000	0,05	0,208	0,31
3	Detergen (µg/L)	200	0	0	0
D. Parameter Mikrobiologi					
1	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	1,000	2,400	2,400	2,400
2	Total coliform (jmlh/100 ml)	5,000	2,400	2,400	2,400

Sumber: Olahan Tabel-17C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





Perbandingan analisis kualitas air Sungai Batanghari pada tahun 2015 dan tahun 2016 terlihat pada Tabel 3.2.5. Kualitas air sungai diambil dari nilai rata-rata kualitas air Sungai Batanghari di 5 (lima) lokasi titik pantau dibandingkan dengan nilai baku mutu untuk air kelas II dalam PP 82/2001. Kualitas air Sungai Batanghari pada tahun 2016 untuk parameter fisika menunjukkan persentase keterpenuhan baku mutu yang sama dengan tahun 2015, tapi pada tahun 2016 terjadi penurunan konsentrasi rata-rata untuk parameter TDS dan TSS dibanding tahun 2015. Begitu juga untuk parameter kimia anorganik pada tahun 2016 menunjukkan persentase keterpenuhan baku mutu yang sama dengan tahun 2015, dan pada umumnya terjadi penurunan konsentrasi rata-rata untuk parameter anorganik tahun 2016. Sedangkan untuk parameter kimia organik tahun 2016 menunjukkan peningkatan persentase dibanding tahun 2015, ditunjukkan dengan terjadinya penurunan konsentrasi rata-rata parameter kimia organik. Sementara itu, hasil analisis untuk parameter mikrobiologi pada tahun 2016 menunjukkan persentase keterpenuhan baku mutu yang sama dengan tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kualitas air sungai Batanghari pada tahun 2016 dibanding tahun 2015. Hal ini juga terbukti dengan terjadinya peningkatan nilai IPA (Indeks Pencemaran Air) untuk Sungai Batanghari, yaitu dari 50,00% tahun 2015 menjadi 58,88% tahun 2016.

Tabel 3.2.5.
Perbandingan Kualitas Air Sungai Batanghari Tahun 2015 dan Tahun 2016

Parameter	Baku Mutu PP 82/2001 Kelas II	2015			2016		
		Nilai Rata-Rata	Melebihi Baku Mutu	%	Nilai Rata-Rata	Melebihi Baku Mutu	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Parameter Fisika							
Temperatur (°C)	Deviasi 3	25,92	Tidak Ada	Melebihi = 33,33%	26,90	Tidak Ada	Melebihi = 33,33%
Residu Terlarut (mg/L)	1,000	127,04	Tidak Ada		3,96	Tidak Ada	
Residu Tersuspensi (mg/L)	50	252,00	Ada		135,40	Ada	
Parameter Anorganik							
pH	6	6,23	Tidak Ada	Melebihi = 27,27%	7,06	Tidak Ada	Melebihi = 27,27%
DO (mg/L)	Min, 4	0,00	Tidak Ada		0,00	Tidak Ada	





Parameter	Baku Mutu PP 82/2001 Kelas II	2015			2016		
		Nilai Rata-Rata	Melebihi Baku Mutu	%	Nilai Rata-Rata	Melebihi Baku Mutu	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BOD (mg/L)	3	0,74	Tidak Ada		1,49	Tidak Ada	
COD (mg/L)	25	66,20	Ada		49,80	Ada	
NO ₂ (mg/L)	0,06	0,029	Tidak Ada		0,03	Tidak Ada	
NO ₃ (mg/L)	10	0,506	Tidak Ada		1,25	Tidak Ada	
NH ₃ (mg/L)	(-)	0,234	Tidak Ada		0,04	Tidak Ada	
Klorin Bebas (mg/L)	0,03	0,268	Ada		0,03	Ada	
T-P (mg/L)	0,2	0,305	Tidak Ada		1,36	Ada	
H ₂ S (mg/L)	0,002	0,012	Ada		0,00	Tidak Ada	
Sianida (mg/L)	0,02	0,004	Tidak Ada		0,00	Tidak Ada	
Parameter Organik							
Fenol (µg/L)	1,0	1.023,80	Ada	Melebihi = 33,33%	0,05	Tidak Ada	Melebihi = 0,0%
Minyak & Lemak (µg/L)	1,000	179,60	Tidak Ada		0,21	Tidak Ada	
Detergen (µg/L)	200	83,00	Tidak Ada		0,00	Tidak Ada	
Parameter Mikrobiologi							
Fecal coliform (jmlh/100 ml)	1,000	2.400,0	Ada	Melebihi =50%	2.400,0	Ada	Melebihi =50%
Total coliform (jmlh/100 ml)	5,000	2.400,0	Tidak Ada		2.400,0	Tidak Ada	

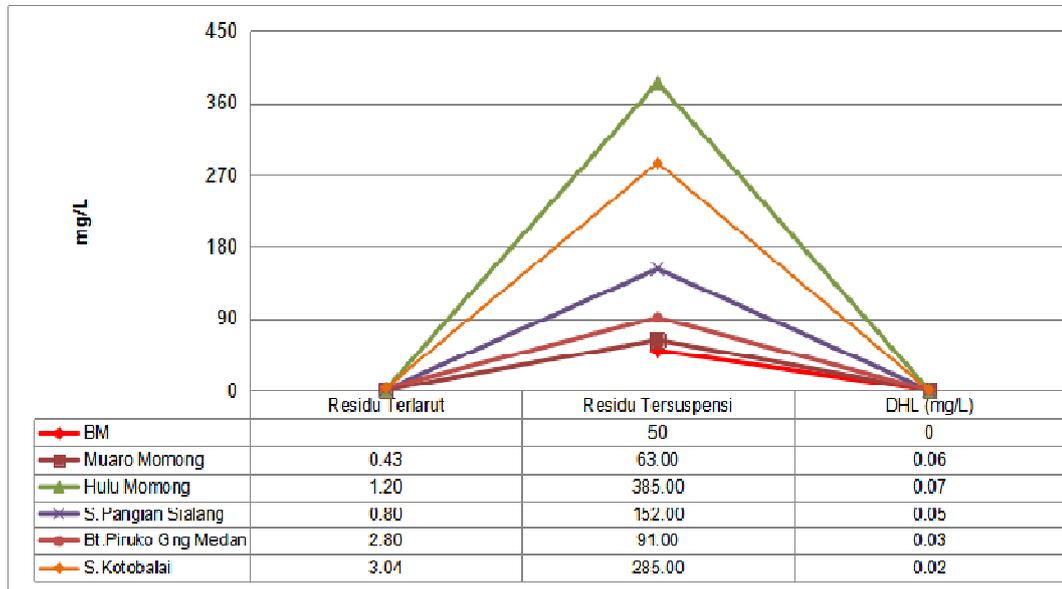
Sumber: Olahan Tabel-17D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Kondisi kualitas air sungai untuk beberapa sungai besar dan anak sungai lainnya, yang semuanya bermuara di Sungai Batanghari, seperti Batang Momong, Batang Pangian, Batang Timpeh, Batang Mimpi, Batang Piruko, Batang Siat, Sungai Koto Balai, Sungai Betung, dan Batang Sinabuhan, juga dilakukan pengukuran kualitas air sungai untuk parameter fisika, kimia organik, kimia anorganik dan mikrobiologi. Pada Gambar 3.2.29. dan Gambar 3.2.30. terlihat hasil kualitas air sungai dari beberapa anak sungai DAS Batanghari untuk parameter fisika.



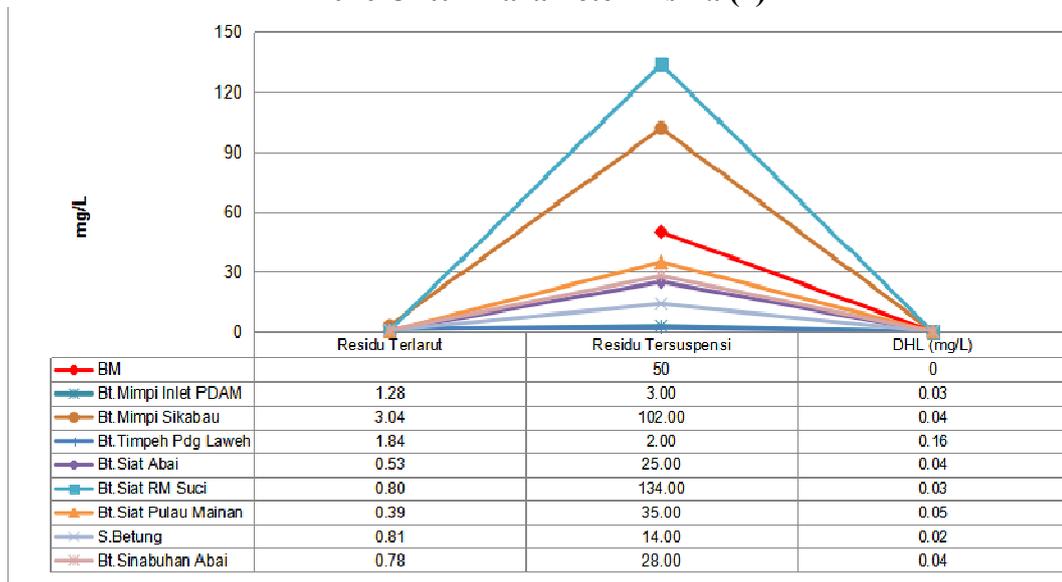


Gambar 3.2.29.
Kualitas Air Sungai dari Beberapa Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika



Sumber: Olahan Tabel-17H. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.2.30.
Kualitas Air Sungai dari Beberapa Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika (2)



Sumber: Olahan Tabel-17H. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

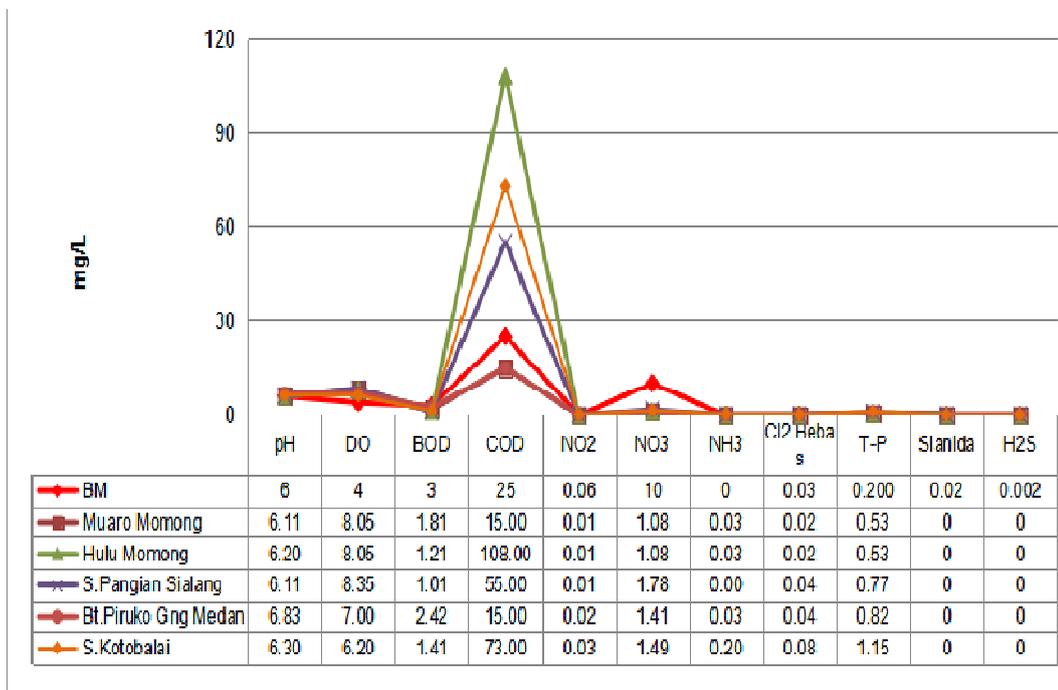
Berdasarkan olahan data dari Tabel.17.Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya terlihat residu tersuspensi dari titik sampling Sungai Batang Momong di muara dan hulu sungai, Sungai Pangian di Sialang, Batang Piruko di Gunung Medan, Sungai Kotobal'ai di Kotobaru, Batang Mimpi di



Sikabau, dan Batang Siat di RM Suci Koto Baru telah melebihi nilai baku mutu (baku mutu ≤ 50 mg/L). Lokasi titik sampling yang memiliki nilai residu tersuspensi tinggi pada umumnya adalah daerah pemukiman penduduk, perkebunan, dan ada terindikasi penambangan ilegal pada bagian hulu sungai. Sedangkan untuk parameter residu terlarut masih memenuhi nilai baku mutu (baku mutu maks.1000 mg/L).

Pada Gambar 3.2.31 dan Gambar 3.2.32. merupakan hasil pengukuran kualitas air beberapa anak sungai dari DAS Batanghari pada tahun 2016 untuk parameter Kimia Anorganik. Untuk parameter pH, DO, NO₂, NO₃, NH₃, Sianida dan H₂S pada semua titik sampling masih memenuhi nilai baku mutu yang ditetapkan dalam PP 82/2001. Sedangkan untuk parameter BOD pada titik sampling Batang Sinabuhan Abai Siat Kecamatan Koto Besar telah melebihi baku mutu 3,22 mg/L (BM < 3 mg/L).

Gambar 3.2.31.
Kualitas Air Sungai dari Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Anorganik

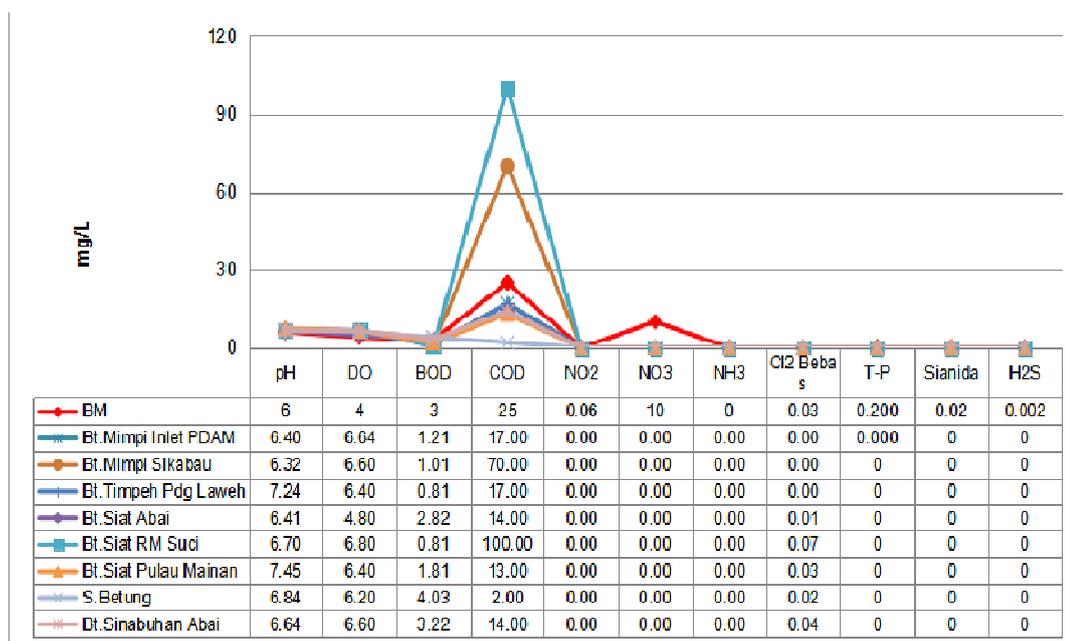


Sumber: Olahan Tabel-17G. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Parameter COD terdeteksi melebihi baku mutu (BM < 25 mg/L) pada titik sampling Hulu Batang Momong Kecamatan IX Koto, Batang Pangian Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Sungai Koto Balai Kecamatan Koto Baru. Parameter Khlorin bebas terdeteksi melebihi nilai baku mutu (BM < 0,03 mg/L) yaitu pada titik sampling Batang Pangian, Batang Piruko, Sungai Koto Balai, Batang Siat RM Suci Koto Baru, Batang Siat Pulau Mainan Kecamatan Koto Salak dan Batang Sinabuhan Abai Siat Kecamatan Koto Besar. Sedangkan untuk parameter Total Posfat telah melebihi nilai baku mutu (BM < 0,2 mg/L) pada titik Hulu Batang Momong, Sungai Pangian Sialang Kecamatan Pulau Punjung, Batang Piruko Gunung Medan Kecamatan Sitiung dan Sungai Koto Balai Kecamatan Koto Baru.

Gambar 3.2.32.
Kualitas Air Sungai dari Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016 Untuk Parameter Anorganik (2)



Sumber: Olahan Tabel-17G. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Untuk parameter mikrobiologi fecal coliform, kualitas air sungai pada 5 (lima) titik sampling pada umumnya telah melebihi nilai baku mutu (BM < 2400 jmlh/100 mL), yaitu di hulu dan muara Batang Momong, Batang Pangian, Batang Piruko dan Sungai Kotobalai. Sedangkan untuk total coliform masih memenuhi



nilai baku mutu. Untuk parameter kimia organik, seperti fenol, minyak lemak dan detergen masih memenuhi nilai baku mutu yang ditetapkan. (Sumber: Tabel-17H. Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Beberapa parameter kualitas air sungai telah melebihi nilai baku mutu dan berstatus tercemar ringan sampai tercemar sedang untuk beberapa titik sampling sungai-sungai kecil, seperti Batang momong yang merupakan aliran sungai yang sumber pencemar berasal dari perkebunan kelapa sawit, karet, perkebunan HTI, lahan terbuka, dan pemukiman penduduk, serta adanya lokasi PETI di Kecamatan IX Koto. Dengan perhitungan indeks pencemaran air diperoleh bahwa pada bagian hulu dan muara berstatus tercemar ringan dengan indeks pencemaran air 2,39 pada bagian muara dan 4,18 pada bagian hulu. Rata-rata Indeks Pencemaran Air Batang Momong sebesar 3,29 atau dengan nilai IPA sebesar 50.00%. Hal ini menunjukkan bahwa beban pencemaran banyak terdapat pada bagian hulu sungai. Aliran Sungai Batang Momong akan bermuara di Sungai Batanghari di Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.

Batang Pangian Sialang merupakan sungai lintas kabupaten yang perbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, kemungkinan sumber pencemar berasal dari Pabrik Kelapa Sawit yang berada di perbatasan Sijunjung, dan daerah Sialang juga banyak terdapat Perkebunan sawit, karet dan campuran, pertanian dan pemukiman penduduk. Aliran air sungai Batang Pangian akan bermuara di Sungai Batanghari di Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung. Indeks pencemaran air dari hasil perhitungan untuk Batang Pangian yaitu 3,10 atau tercemar ringan.

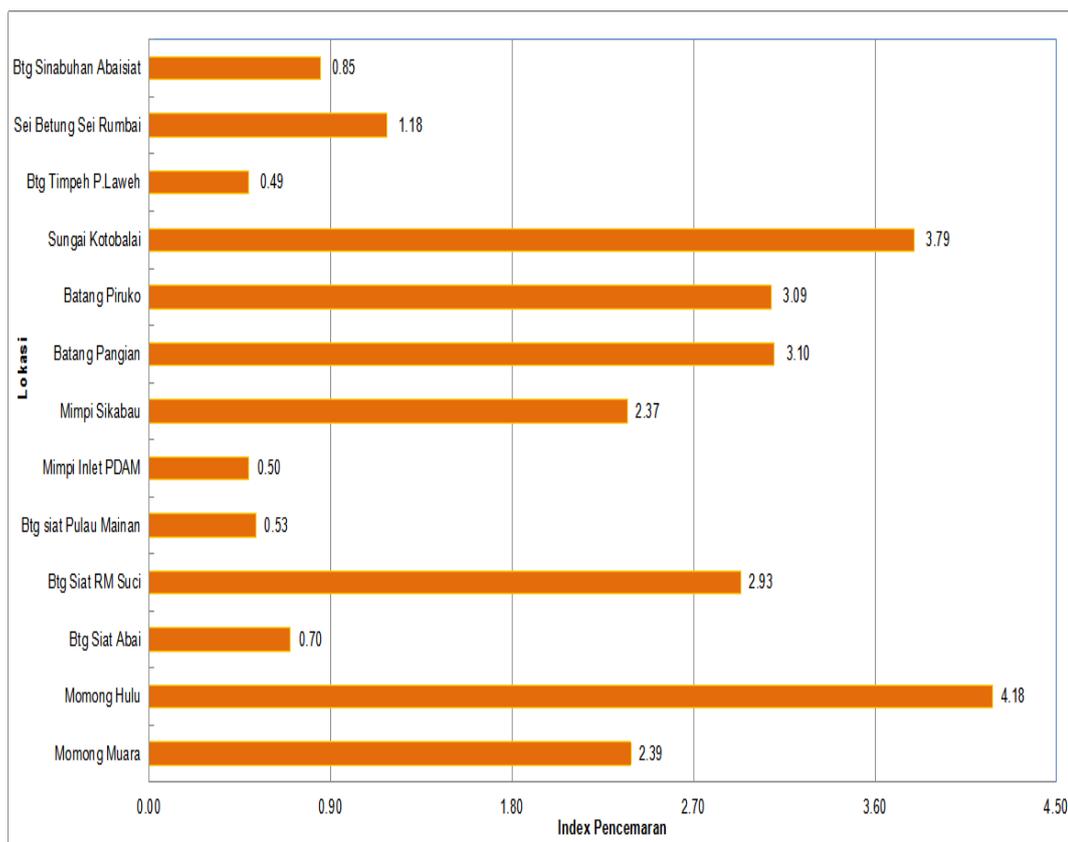
Pencemaran yang terjadi di Batang Piruko memiliki sumber pencemar yang cukup kompleks yaitu berasal dari perkebunan masyarakat, pemukiman penduduk, pertanian (sawah) dan adanya lahan akses terbuka serta PETI dibagian hulu Batang Piruko di Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung. Sungai Koto Balai dengan sumber pencemar dapat berasal dari pabrik PKS, perkebunan karet, sawit, dan lahan terbuka serta PETI di bagian hulu sungai Koto Balai. Aliran Sungai Batang Piruko dan Sungai Koto Balai akan bermuara di Batang Siat di Kecamatan Koto Baru. Dengan Indeks pencemaran air dari hasil perhitungan



diperoleh masing-masingnya yaitu Batang Piruko 3,09 (tercemar ringan) dan sungai Koto Balai 3,79 (tercemar ringan).

Batang Siat juga menjadi muara dari banyak sungai-sungai kecil, seperti Batang Piruko, Sungai Koto Balai, Sungai Sinabuhan dan Sungai Betung. Hal inilah yang mempengaruhi kualitas air sungai Batang Siat. Batang Siat merupakan sungai kedua terbesar setelah Batanghari yang melewati 3 (tiga) Kecamatan (Koto Besar, Koto Baru dan Koto Salak), sehingga sumber pencemar sudah sangat kompleks, dapat berasal dari perkebunan sawit, karet, kebun campuran, pabrik PKS, lahan terbuka dan PETI di bagian hulu sungai. Namun, dari hasil perhitungan rata-rata Indeks Pencemaran Air di Batang Siat tergolong tercemar ringan (1,39) atau dengan nilai IPA sebesar 63.33%.

Gambar 3.2.33.
Indeks Pencemaran Air Anak-Anak Sungai DAS Batanghari Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-171. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Pada Gambar 3.2.33. terlihat perbandingan indeks pencemaran air dari anak-anak sungai DAS Batanghari tahun 2016, yang mewakili 9 (sembilan) sungai.

Batang Mimpi berhulu di Kecamatan Pulau Punjung dan sumber pencemar dapat berasal dari perkebunan karet dan sawit, pertanian (sawah), pemukiman penduduk, dan lahan terbuka. Aliran sungai Batang Mimpi akan bermuara di Sungai Batanghari di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung. Hasil perhitungan rata-rata Indeks Pencemaran Air di Batang Mimpi dapat tergolong tercemar ringan (1,47) atau dengan nilai IPA 63,33%.

Batang Timpeh mengalir sepanjang 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Padang Laweh. Sumber pencemar Batang Timpeh umumnya berasal dari perkebunan sawit, karet dan campuran, dan lahan terbuka. Aliran sungai Batang Timpeh akan bermuara di sungai Batanghari di Kecamatan Padang Laweh. Hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air di Batang Timpeh diperoleh status mutu air Batang Timpeh tergolong tercemar ringan (1,47).

3.2.5. Kualitas Air Danau/Situ/Embung

Kualitas air Embung pada tahun 2016 dilakukan analisis pada dua embung yaitu, embung Ampang Kamang dan Kamang Mani pada bagian hulu dan hilir embung, yang dilakukan pada tanggal 1 November 2016. Pengukuran kualitas air embung dilakukan masing-masingnya untuk parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi.

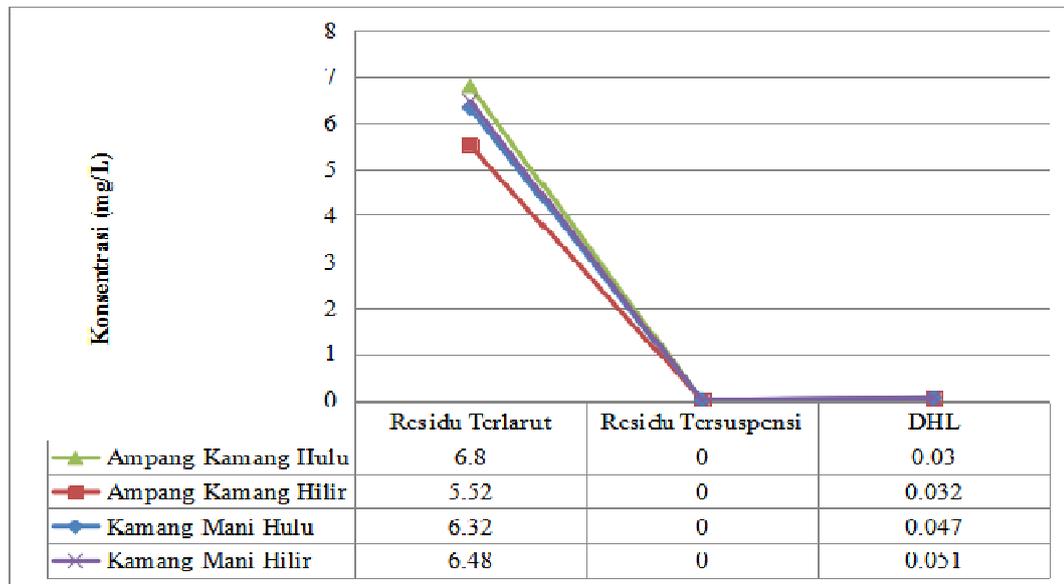
Untuk parameter fisika dilakukan analisis untuk residu terlarut, residu tersuspensi, dan daya hantar listrik, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.34. yang menunjukkan bahwa semua parameter fisika masih memenuhi batas baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 (TSS \leq 50 mg/L dan TDS \leq 1000 mg/L),

Pada tahun 2016 terjadi peningkatan kualitas air embung terutama untuk parameter kimia Anorganik dan Organik.



(Sumber: Tabel-18A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.2.34.
Kualitas Air Embung Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika

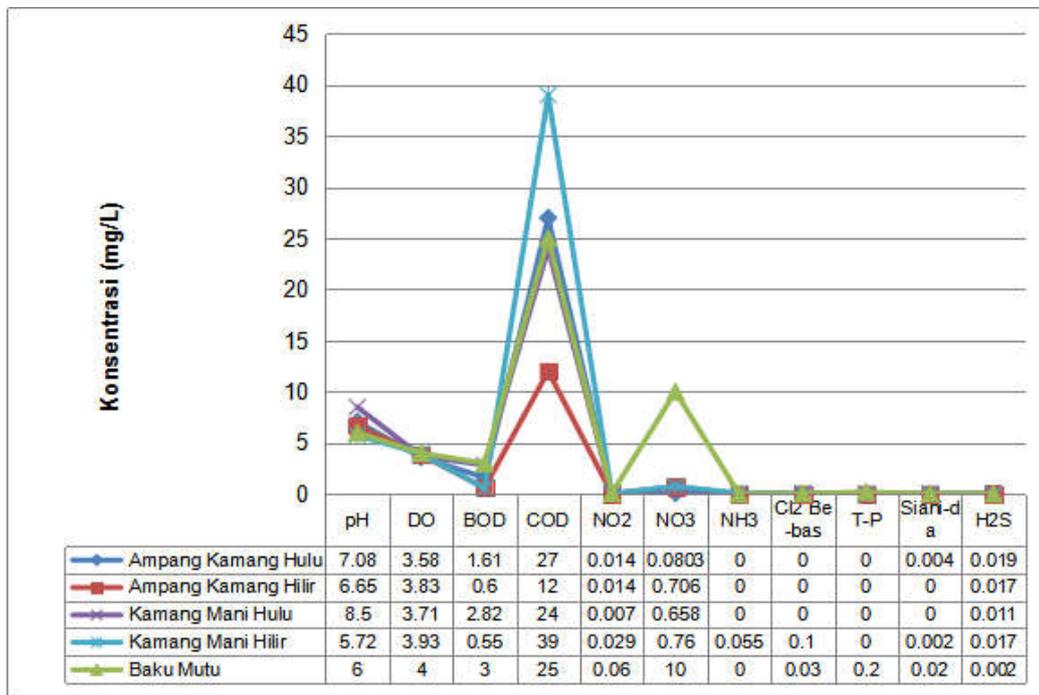


Sumber: Olahan Tabel-18A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Parameter kimia anorganik dilakukan analisis masing-masing pada bagian hulu maupun hilir embung Ampang Kamang dan Kamang Mani untuk parameter pH, DO, BOD, COD, NO₂, NO₃, NH₃, Klorin Bebas, T-P, Sianida dan H₂S, pada Gambar 3.2.35. menunjukkan bahwa beberapa parameter kimia anorganik telah melewati batas nilai baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001, seperti pH pada embung Kamang Mani hilir, DO pada embung Ampang Kamang dan Kamang Mani, COD pada embung Ampang Kamang hulu dan Kamang Mani hilir, dan H₂S pada embung Ampang Kamang dan Kamang Mani. (Sumber: Olahan Tabel-18B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).



Gambar 3.2.35.
Kualitas Air Embung Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Anorganik



Sumber: Olahan Tabel -8B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

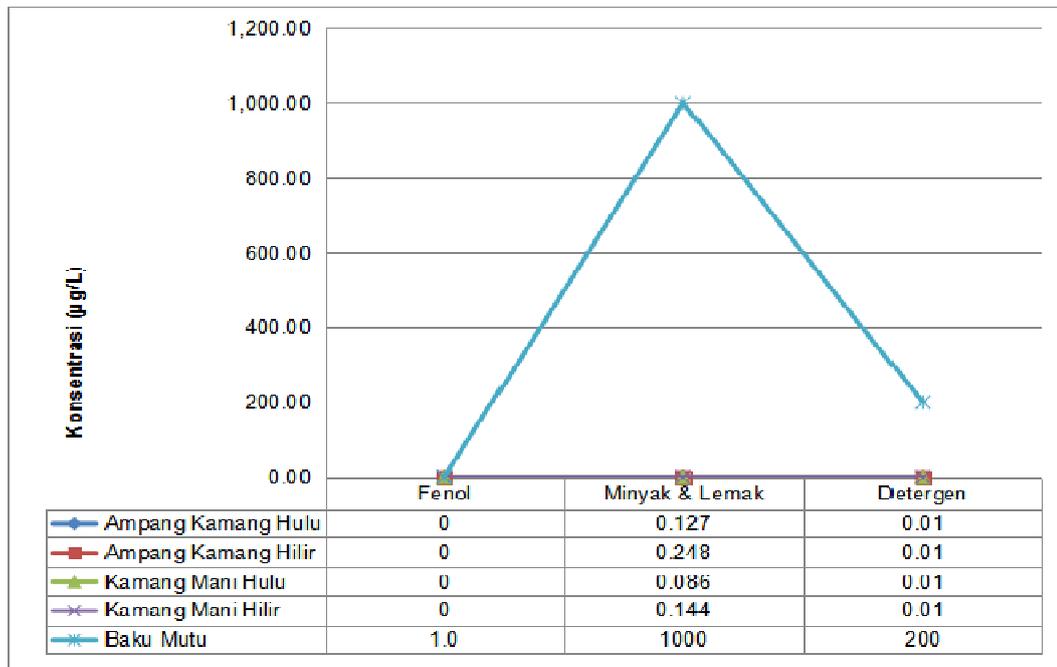
Hasil analisis kualitas air embung Ampang Kamang dan Kamang Mani pada bagian hulu dan hilir untuk parameter kimia organik, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.36. menjelaskan bahwa hampir semua parameter kimia organik seperti Minyak Lemak dan Detergen masih memnuhi batas baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 (Minyak Lemak ≥ 1000 mg/L dan Detergen ≥ 200 $\mu\text{g/L}$), sedangkan Fenol tidak terdeteksi untuk semua titik sampling air embung. (Sumber: Olahan Tabel-18C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Kualitas air embung Ampang Kamang dan Kamang Mani pada bagian Hulu dan Hilir untuk parameter mikrobiologi Fecal Coliform dan Total Coliform, tidak dilakukan analisis karena disebabkan oleh Bahan Kimia Laboratorium yang melakukan analisis tersebut sedang tidak tersedia. Untuk Parameter Fecal Coliform seharusnya memiliki batas baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001 (Fecal Coliform ≤ 1000 jumlah/100 ml dan Total Coliform ≤ 5000 jumlah/100 ml).



(Sumber: Olahan Tabel-18D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.2.36.
Kualitas Air Embung Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Organik



Sumber: Olahan Tabel-18C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Perbandingan kualitas air embung Kamang pada bagian hulu dan hilir pada tahun 2015 dan 2016 berdasarkan Standar Baku Mutu air kelas II dalam PP 82/2001, seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.6. menunjukkan bahwa tidak ada persentase yang melebihi nilai baku mutu untuk parameter fisika. Sementara itu untuk parameter kimia anorganik, persentase yang melebihi nilai baku mutu pada tahun 2014 dan tahun 2015 adalah sama sebesar 36,36%, Sedangkan persentase yang melebihi nilai baku mutu untuk parameter kimia organik mengalami peningkatan dari 66,67% tahun 2015 menjadi 18,18%, dalam artian bahwa hanya ada 2 parameter yang melebihi nilai baku mutu yaitu COD dan H₂S). Begitu juga untuk parameter organik mengalami peningkatan kualitas dari 66,67% menjadi 0% (tidak ada yang melebihi baku mutu). Sementara itu untuk parameter mikrobiologi tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015 dengan keterpenuhan terhadap baku mutu 50% pada taun 2015. Hal ini dapat menjelaskan bahwa terjadi



peningkatan kualitas air embung pada tahun 2016 untuk parameter kimia organik dan anorganik. (Sumber: Olahan Tabel-18E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Tabel 3.2.6.
Perbandingan Kualitas Air Embung Tahun 2015 dengan Tahun 2016
Berdasarkan Standar Baku Mutu

Parameter	Baku Mutu (PP 82/2001 Kelas II)	2015		2016	
		Parameter yang Melebihi Baku Mutu	Persentase (%)	Parameter yang Melebihi Baku Mutu	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Parameter Fisika					
Temperatur (°C)	Deviasi 3	Tidak Ada	Melebihi = 0%	Tidak Ada	Melebihi = 0%
Residu Terlarut (mg/L)	≤ 1,000	Tidak Ada		Tidak Ada	
Residu Tersuspensi (mg/L)	≤ 50	Tidak Ada		Tidak Ada	
Parameter Anorganik					
pH	6-9	Tidak Ada	Melebihi = 36,36%	Tidak Ada	Melebihi = 18,18%
DO (mg/L)	≥ 4	Ada		Tidak Ada	
BOD (mg/L)	≤ 3	Tidak Ada		Tidak Ada	
COD (mg/L)	≤ 25	Ada		Ada	
NO ₂ (mg/L)	≤ 0,06	Tidak Ada		Tidak Ada	
NO ₃ (mg/L)	≤ 10	Tidak Ada		Tidak Ada	
NH ₃ (mg/L)	(-)	Tidak Ada		Tidak Ada	
Klorin Bebas (mg/L)	≤ 0,03	Ada		Tidak Ada	
T-P (mg/L)	≤ 0,2	Tidak Ada		Tidak Ada	
Sianida (mg/L)	≤ 0,02	Tidak Ada		Tidak Ada	
H ₂ S (mg/L)	≤ 0,002	Ada	Ada		
Parameter Organik					
Fenol (µg/L)	≤ 1,0	Ada	Melebihi = 67,67%	Tidak Ada	Melebihi = 0,0%
Minyak dan Lemak (µg/L)	≤ 1,000	Tidak Ada		Tidak Ada	
Detergen (µg/L)	≤ 200	Ada		Tidak Ada	
Parameter Mikrobiologi					
Fecal coliform (jmlh/100 ml)	≤ 1,000	Tidak Ada	Melebihi = 0%	-	Melebihi = -
Total coliform (jmlh/100 ml)	≤ 5,000	Tidak Ada		-	

Sumber: Olahan Tabel-18E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Tabel 3.2.7. terlihat hasil analisis statistik sederhana terhadap kualitas air embung Ampang Kamang dan Kamang Mani pada bagian Hulu dan Hilir untuk nilai minimum, rata-rata dan maksimum masing-masing parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik, dan mikrobiologi. Hasil analisis statistik





menjelaskan beberapa parameter telah melewati nilai baku mutu air kelas II berdasarkan standar baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001. Nilai rata-rata masing-masing parameter yang melebihi baku mutu diantaranya yaitu DO 3,075 mg/L pada embung Ampang Kamang dan 3,45 mg/L pada embung Kamang Mani; Parameter H₂S pada embung Ampang Kamang 0,018 mg/L dan pada embung Kamang Mani 0,014 mg/L, sedangkan nilai rata-rata untuk parameter organik dan mikrobiologi tidak ada yang melebihi baku mutu. (Sumber: Olahan data Tabel-18E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Tabel 3.2.7.
Hasil Analisis Statistik Kualitas Air Embung Tahun 2016

No	Parameter	Baku Mutu (PP 82/2001 Kelas II)	Ampang Kamang			Kamang Mani		
			Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Parameter Fisika								
1	Temperatur (°C)	Deviasi 3	31	31	31	25,9	26,7	27,5
2	Residu Terlarut (mg/L)	1000	5,5	6,16	6,80	6,32	6,40	6,48
3	Residu Tersuspensi (mg/L)	50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Parameter Anorganik								
1	pH	6-9	6,65	6,87	7,08	7,22	7,86	8,5
2	DO (mg/L)	Min. 4	3,58	3,705	3,83	2,54	3,13	3,71
3	BOD (mg/L)	3	0,60	1,11	1,61	2,42	2,62	2,82
4	COD (mg/L)	25	12,00	19,50	27,00	24,00	27,50	31,00
5	NO ₂ (mg/L)	0,06	0,014	0,014	0,014	0,007	0,013	0,018
6	NO ₃ (mg/L)	10	0,080	0,393	0,706	0,658	0,789	0,920
7	NH ₃ (mg/L)	(-)	0,00	< 0,014	0,00	0,00	< 0,014	0,00
8	Klorin Bebas (mg/L)	0,03	0,00	< 0,002	0,00	0,00	< 0,002	0,00
9	T-P (mg/L)	0,2	0,00	< 0,013	0,00	0,00	< 0,013	0,00
10	Sianida (mg/L)	0,02	0,00	0,004	0,004	0,00	< 0,002	0,00
11	H ₂ S (mg/L)	0,002	0,017	0,018	0,019	0,011	0,014	0,016
C. Parameter Organik								
1	Fenol (µg/L)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Minyak dan Lemak (µg/L)	1000	0,127	0,188	0,248	0,086	0,115	0,144
3	Detergen (µg/L)	200	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
D. Parameter Mikrobiologi								



No	Parameter	Baku Mutu (PP 82/2001 Kelas II)	Ampang Kamang			Kamang Mani		
			Min.	Rata-Rata	Maks.	Min.	Rata-Rata	Maks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total coliform (jmlh/100 ml)	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Olahan Tabel-18F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

3.2.6. Kualitas Air Sumur

Sebagian air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan diserap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Air akan menembus melalui beberapa lapisan yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah sebelum mencapai lapisan tempat air tanah, dan menyebabkan air mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi yang berbeda. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam atau artesis. Air tanah dangkal terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah dan air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. Sementara itu air tanah dalam terdapat diantara dua lapisan kedap air atau dikenal dengan lapisan akuifer yang banyak menampung air. Jika lapisan kedap air retak, secara alami air akan keluar ke permukaan disebut mata air artesis. Pengambilan air tanah dalam, tak semudah pada air tanah dangkal.

Kualitas air tanah di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 dilakukan pengambilan sampel air sumur masyarakat 1 (satu) kali setahun yang berada di beberapa lokasi titik sampling,

Kualitas Air Tanah atau Sumur yang ada di Kabupaten Dharmasraya rata-rata masih belum memenuhi kriteria baku mutu untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi, sehingga untuk dapat dijadikan air baku harus dilakukan pengelolaan yang baik.

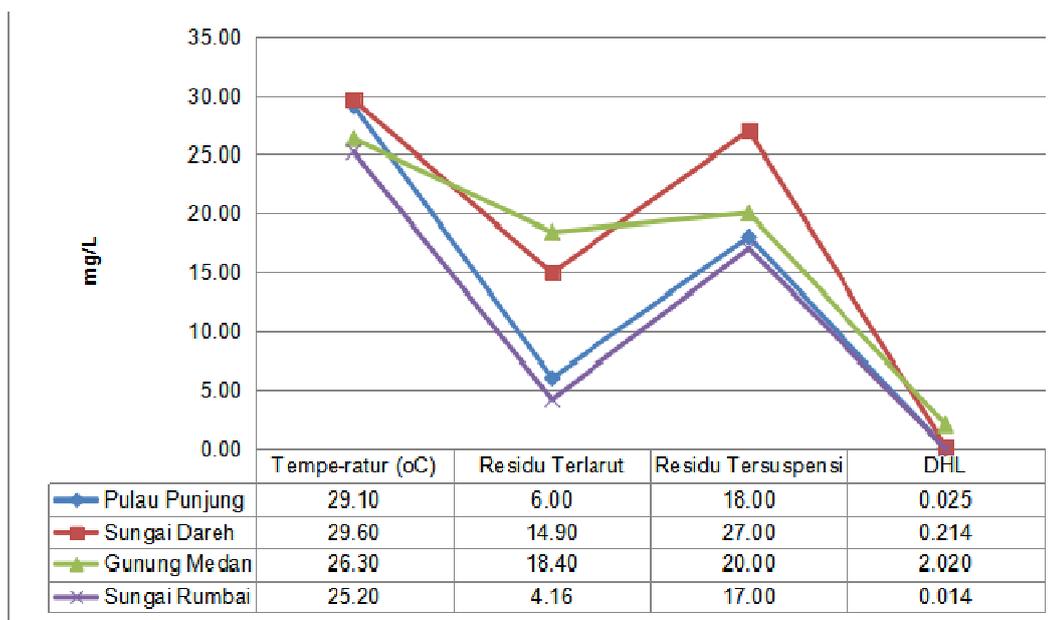




yaitu di Gunung Medan Kecamatan Sitiung, Sungai Rumbai Kecamatan Sungai Rumbai, Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung, dan Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung. Masing-masing sampel air sumur dianalisis untuk parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi. Hasil analisis masing-masing sampel air sumur akan dibandingkan dengan nilai baku mutu untuk air kelas I dalam PP 82/2001 masing-masingnya untuk parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi.

Hasil analisis parameter fisika terlihat pada Gambar 3.2.37. untuk masing-masing sampel air sumur tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua parameter fisika yang dianalisis masih berada dalam standar baku mutu air kelas I dalam PP 82/2001 (residu terlarut ≤ 1000 mg/L dan residu tersuspensi ≤ 50 mg/L), Konsentrasi residu terlarut tertinggi terdeteksi pada air sumur Sungai Dareh 18,40 mg/L dan konsentrasi residu terlarut terendah terdeteksi pada air sumur Sungai Rumbai 4,16 mg/L, Sedangkan residu tersuspensi tertinggi terdeteksi pada air Sumur Sungai Dareh 27 mg/L dan daya hantar listrik tertinggi 2,02 mg/L pada air Sumur Gunung Medan.

Gambar 3.2.37.
Kualitas Air Sumur Tahun 2016 Untuk Parameter Fisika

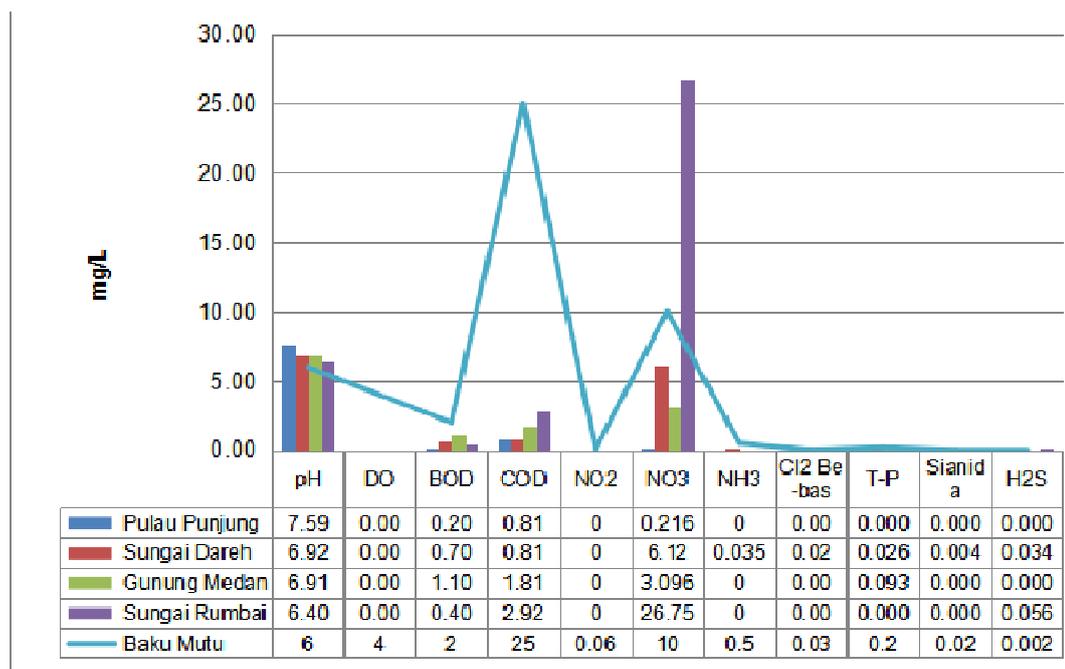


Sumber: Olahan Tabel -19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Kualitas air sumur pada tahun 2016 untuk parameter kimia anorganik seperti pH, DO, BOD, COD, NO₂, NO₃, NH₃, Klorin Bebas, T-P, Sianida dan H₂S dari sampel air sumur dapat dilihat pada Gambar 3.2.38. Untuk Parameter pH, DO, BOD, COD, NO₂, NH₃, Klorin Bebas, TP, dan Sianida pada semua sampel air sumur masih memenuhi baku mutu air kelas I PP 82/2001 (pH 6-9, DO \geq 6 mg/L, BOD \leq 2mg/L, NO₂ \leq 0,06 mg/L, NH₃ \leq 0,05 mg/L, Cl₂ \leq 0,03 mg/L, TP \leq 0,2 mg/L dan Sianida \leq 0,02 mg/L). Sedangkan hasil analisis parameter NO₃ untuk sampel air sumur Sungai Rumbai telah melebihi nilai baku mutu air kelas I (NO₃ \leq 10 mg/L), dan H₂S pada air sumur Sungai Dareh dan Sungai Rumbai telah melebihi nilai baku mutu air kelas I (H₂S \leq 0.002 mg/L).

Gambar 3.2.38.
Kualitas Air Sumur Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Anorganik



Sumber: Olahan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

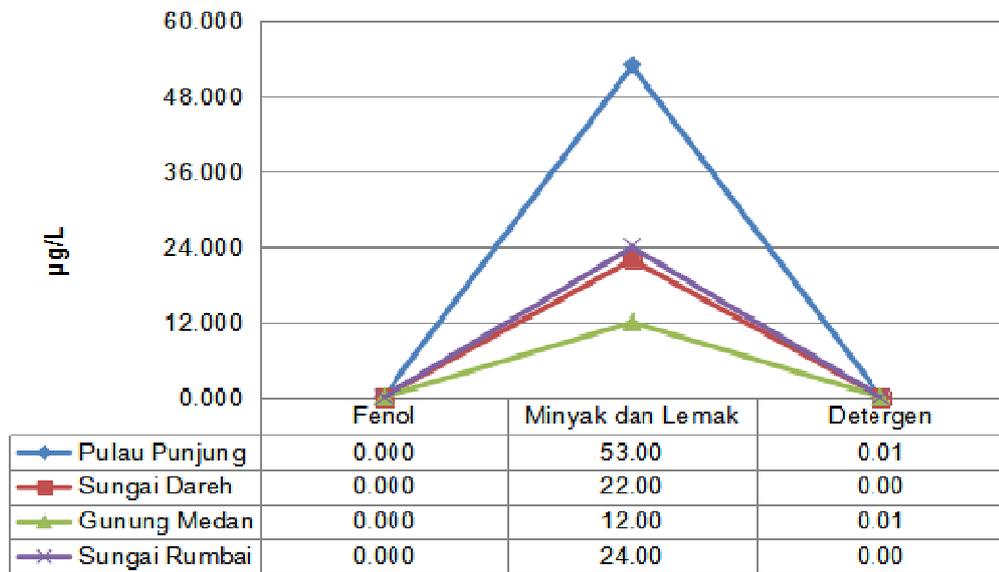
Parameter kimia organik pada sampel air sumur tahun 2016 dilakukan analisis untuk parameter fenol, minyak dan lemak, serta detegen. Pada Gambar 3.2.39. terlihat hasil analisis yang menunjukkan bahwa semua sampel air sumur masih memenuhi batas baku mutu air kelas I dalam PP 82/2001 (Fenol \leq 1,0 μ g/L, Minyak & Lemak \leq 1000 μ g/L, Detergen \leq 200 μ g/L). Sedangkan pada Gambar 3.2.40. terlihat hasil analisis untuk parameter mikrobiologi untuk Fecal Coliform





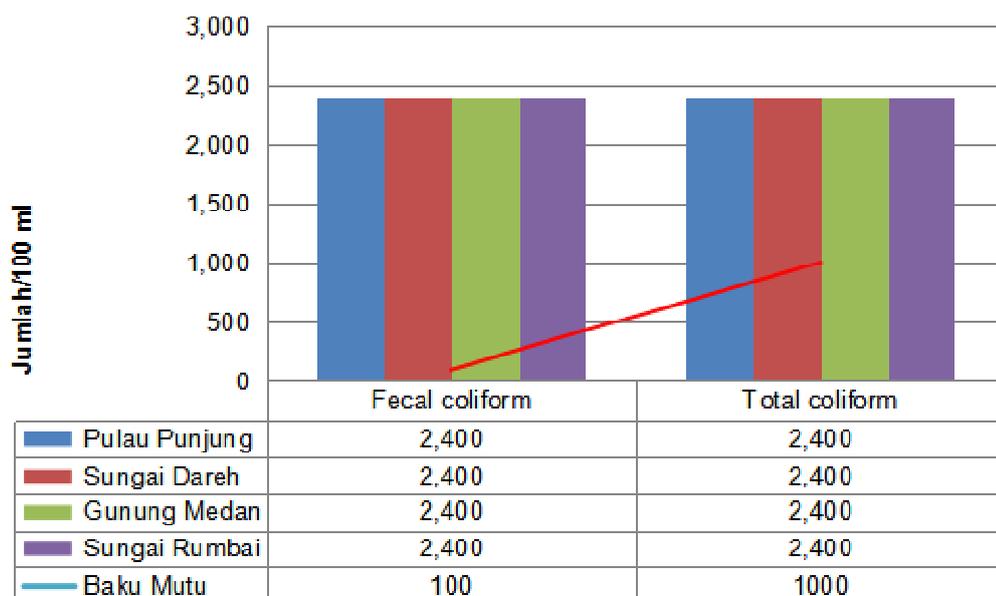
dan Total Coliform telah melewati standar baku mutu air kelas I (Fecal Coliform ≤ 100 jumlah/100 ml dan Total Coliform ≤ 1000 jumlah/100 ml).

Gambar 3.2.39.
Kualitas Air Sumur Tahun 2016 Untuk Parameter Kimia Organik



Sumber: Olahan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.2.40.
Kualitas Air Sumur Tahun 2016 Untuk Parameter Mikrobiologi

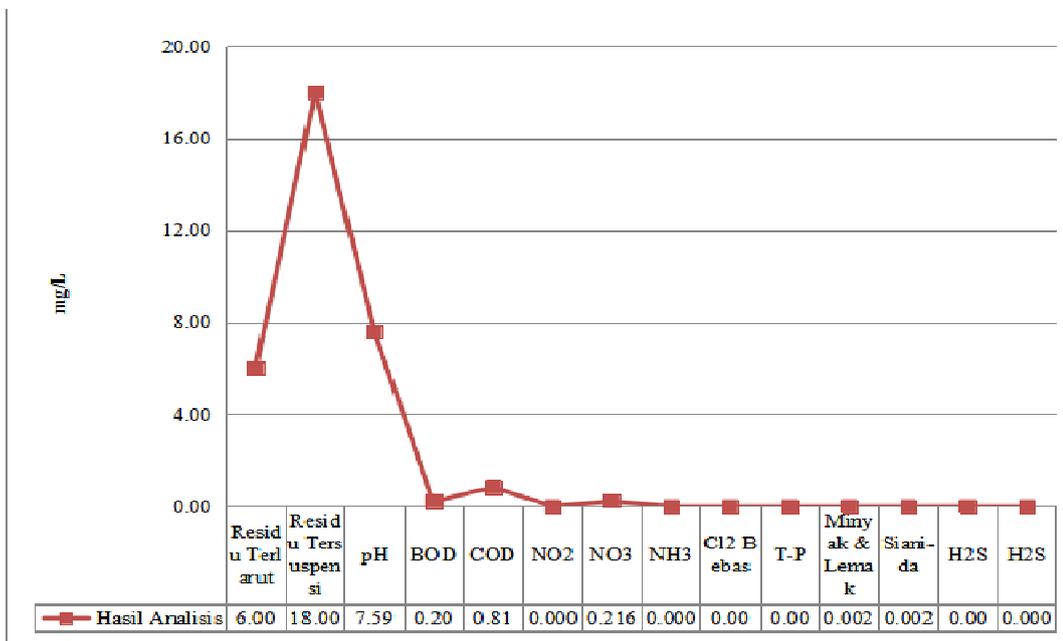


Sumber: Olahan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Pada Gambar 3.2.41. terlihat hasil analisis kualitas air sumur Pulau Punjung tahun 2016 yang memenuhi baku mutu, sesuai dengan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Pada Gambar 3.2.42. dapat dilihat hasil analisis kualitas air sumur Sungai Dareh tahun 2016 yang memenuhi baku mutu, sesuai dengan Tabel 19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

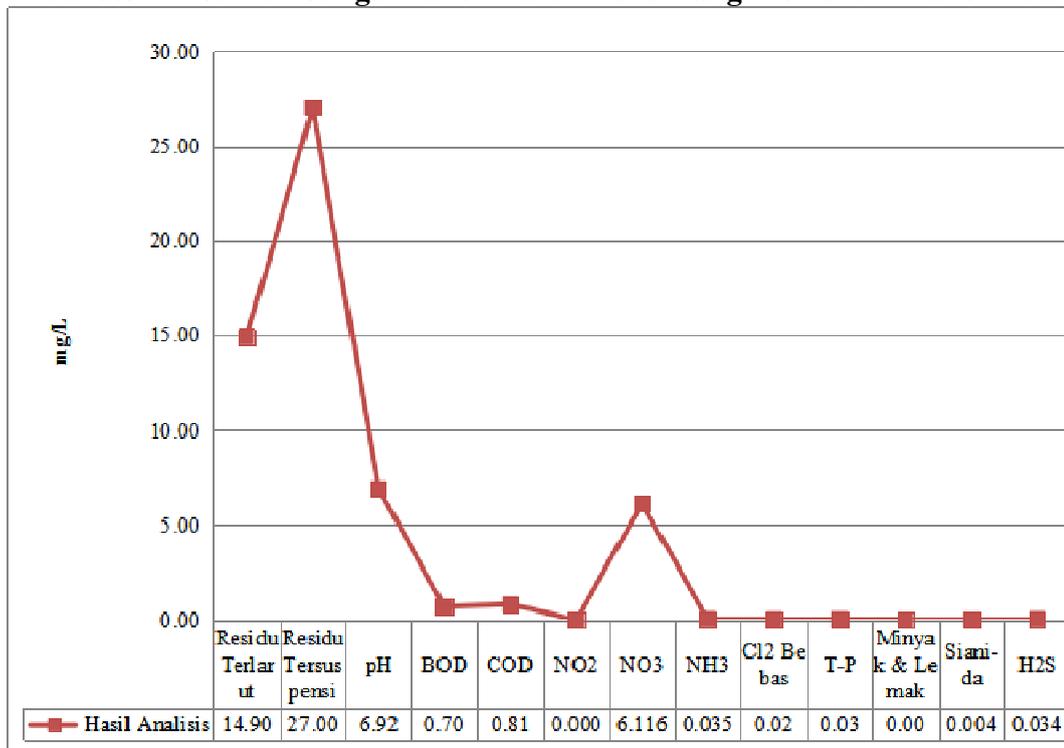
Gambar 3.2.41.
Kualitas Air Sumur Pulau Punjung Tahun 2016 Yang Memenuhi Baku Mutu



Sumber: Olahan Tabel-19A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

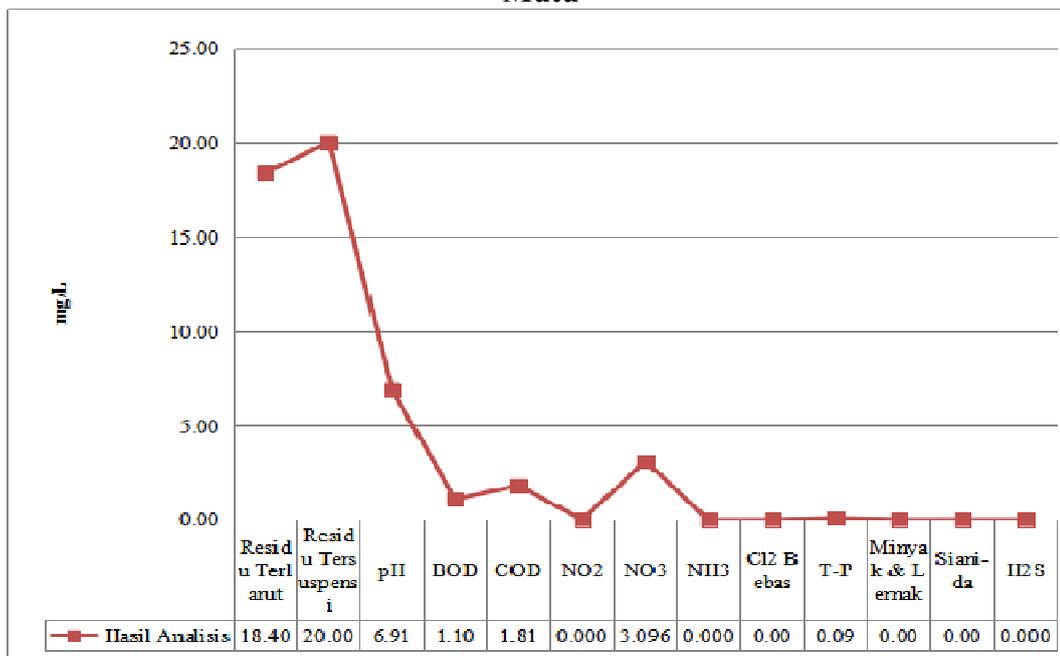


Gambar 3.2.42.
Kualitas Air Sumur Sungai Dareh Tahun 2016 Yang Memenuhi Baku Mutu



Sumber: Olahan Tabel-19B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.2.43.
Kualitas Air Sumur Gunung Medan Tahun 2016 Yang Memenuhi Baku Mutu



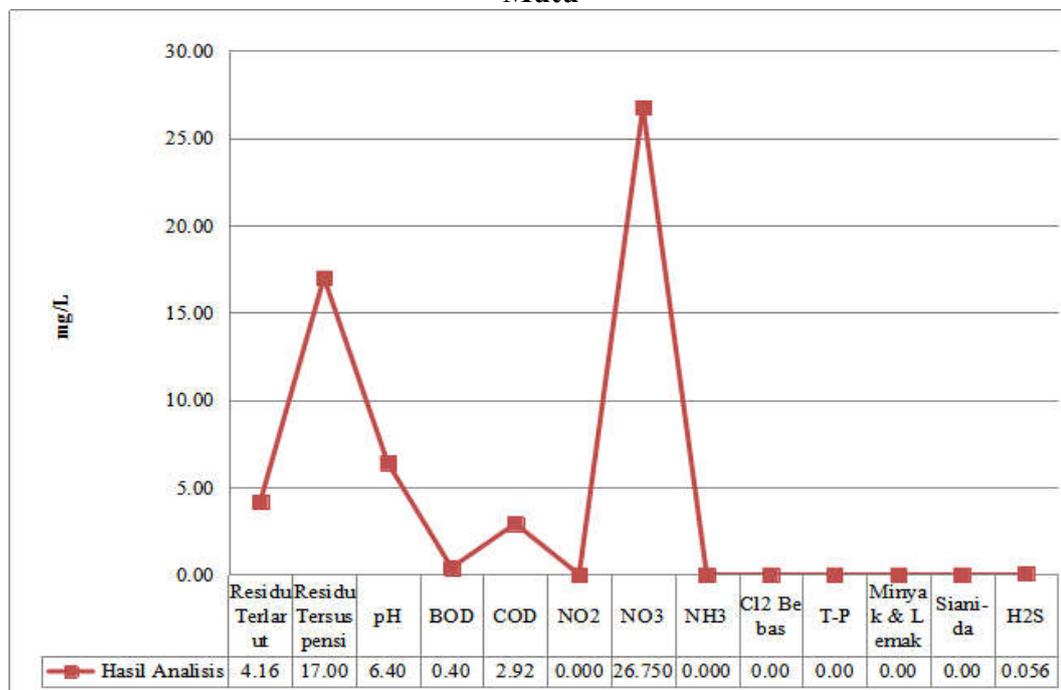
Sumber: Olahan Tabel-19C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Pada Gambar 3.2.43. dapat dilihat hasil analisis kualitas air sumur Gunung Medan tahun 2016 yang memenuhi baku mutu, sesuai dengan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Pada Gambar 3.2.44. dapat dilihat hasil analisis kualitas air sumur Gunung Medan tahun 2016 yang memenuhi baku mutu, sesuai dengan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.

Gambar 3.2.44.
Kualitas Air Sumur Sungai Rumbai Tahun 2016 Yang Memenuhi Baku Mutu



Sumber: Olahan Tabel-19D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Perbandingan berdasarkan antar lokasi terhadap kualitas air sumur tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.8. untuk parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik, dan mikrobiologi, serta persentase yang tidak memenuhi baku mutu sesuai dengan standar baku mutu air kelas I dalam PP 82/2001 untuk masing-masing lokasi titik pantau air sumur.

Berdasarkan perbandingan antar lokasi dan antar waktu menjelaskan bahwa persentase kualitas sampel air sumur Pulau Punjung, Gunung Medan dan Sungai Rumbai tidak memenuhi baku mutu yaitu untuk parameter mikrobiologi, dimana persentase terhadap baku mutu masih belum terpenuhi. Air Sumur Sungai



Dareh dan Sungai Rumbai untuk parameter kimia anorganik masih belum memenuhi baku mutu. Namun, dapat disimpulkan bahwa secara umum pada tahun 2016 kualitas air sumur pada 4 (empat) lokasi tersebut telah mengalami peningkatan kualitas air sumur yang terlihat dari semakin sedikitnya parameter yang tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan sebagai Kelas 1 dalam PP 82/2001.

Tabel 3.2.8.
Perbandingan Kualitas Air Sumur Tahun 2015 dengan Tahun 2016
Berdasarkan Standar Baku Mutu

No	Lokasi Sampling	Parameter	Tahun 2015		Tahun 2016	
			Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu	%	Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pulau Punjung	Fisika	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00
		Kimia Anorganik	pH, DO, BOD, COD	33,33	Tidak Ada	0,00
		Kimia Organik	Tidak Ada, (detergen dan fenol tidak ada data)	0,00	Tidak Ada	0,00
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total Coliform	100,0	Fecal coliform, Total Coliform	100,0
2	Sungai Dareh	Fisika	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00
		Kimia Anorganik	pH, DO, BOD, COD, H ₂ S	41,67	H ₂ S	8,33
		Kimia Organik	Tidak Ada, (detergen dan fenol tidak ada data)	0,00	Tidak Ada	0,00
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total Coliform	100,0	Tidak Ada	100,0
3	Gunung Medan	Fisika	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00
		Kimia Anorganik	pH, DO, BOD, COD, H ₂ S	41,67	Tidak Ada	0,00
		Kimia Organik	Tidak Ada, (detergen dan fenol tidak ada data)	0,00	Tidak Ada	0,00
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total Coliform	100,0	Fecal coliform, Total Coliform	100,0
4	Sungai Rumbai	Fisika	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00
		Kimia Anorganik	pH, DO, BOD, COD, H ₂ S	41,67	NO ₃	8,33
		Kimia Organik	Tidak Ada, (detergen dan fenol tidak ada data)	0,00	Tidak Ada	0,00
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total Coliform	100,0	Fecal coliform, Total Coliform	100,0

Sumber: Olahan Tabel-19E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





Hasil analisis statistik dari kualitas air sumur tahun 2016 terlihat berupa nilai maksimum, rata-rata dan minimum dari 4 (empat) lokasi sampel air sumur di Kabupaten Dharmasraya untuk masing-masing parameter fisika, kimia anorganik, kimia organik dan mikrobiologi dapat dilihat pada Tabel 3.2.9. Berdasarkan hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa sampel air sumur rata-rata masih belum terpenuhinya baku mutu air kelas I untuk parameter kimia anorganik dan mikrobiologi.

Tabel 3.2.9.
Hasil Analisis Statistik Kualitas Air Sumur Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No,	Parameter	Baku Mutu (PP 82/2001 Kelas I)	Maks.	Rata-Rata	Min.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Parameter Fisik					
1	Temperatur (°C)	Deviasi 3	29,60	27,55	25,20
2	Residu Terlarut (mg/L)	1.000	18,40	10,87	4,16
3	Residu Tersuspensi (mg/L)	50	27,00	20,50	17,00
4,	DHL	-	2,02	0,57	0,01
B. Parameter Anorganik					
1	pH	6-9	7,59	6,96	6,40
2	DO (mg/L)	6	-	-	-
3	BOD (mg/L)	2	1,10	0,60	0,20
4	COD (mg/L)	10	2,92	1,59	0,81
5	NO ₂ (mg/L)	0,06	-	-	-
6	NO ₃ (mg/L)	10	26,750	9,045	0,216
7	NH ₃ (mg/L)	0,5	0,364	0,196	0,112
8	Klorin Bebas (mg/L)	0,2	0,02	0,02	0,02
9	T-P (mg/L)	0,03	0,093	0,060	0,026
10	Sianida (mg/L)	0,02	0,004	0,000	0,004
11	H ₂ S (mg/L)	0,002	0,056	0,045	0,034
C. Parameter Organik					
1	Fenol (µg/L)	1	0,000	0,000	0,000
2	Minyak dan Lemak (µg/L)	1,000	0,004	0,003	0,002
3	Detergen (µg/L)	200	0,012	0,000	0,010
D. Parameter Mikrobiologi					
1	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	100	2400,0	2400,0	2400,0
2	Total coliform (jmlh/100 ml)	1.000	2400,0	2400,0	2400,0

Sumber: Olahan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Permasalahan kuantitas dan kualitas air tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, namun upaya dan peran aktif masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Daerah. Adapun upaya sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air yaitu:

- a) Mengurangi pencemaran air, yaitu dengan tidak membuang limbah langsung ke perairan terbuka dan melakukan pengelolaan limbah secara terpadu;
- b) Melakukan proses sedimentasi terhadap air yang keruh pada bak penampungan dan penyaringan sebelum digunakan;
- c) Ikut menjaga kelestarian lingkungan, memperluas jumlah serapan air dengan cara tidak menebang pohon di daerah serapan air dan membuat sumur resapan;
- d) Menggunakan air seperlunya saja (tidak boros air);
- e) Meminimalisir kadar zat kapur pada air minum.

3.2.7. Kualitas Air Laut

Analisis data pada Tabel 20 Lampiran Dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 yang menjelaskan tentang informasi **Kualitas Air Laut tidak ada, disebabkan oleh Kabupaten Dharmasraya tidak memiliki wilayah laut, pesisir dan pantai,** maka tidak bisa dilakukan pembahasan pada bagian ini,

3.2.6. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi lintang antara $00^{\circ} 48'25,367''$ - $1^{\circ} 41'40,269''$ LS dan posisi bujur antara $101^{\circ} 8'32,52''$ - $101^{\circ}53'3,166''$ BT, berdasarkan iklim Koppen, maka dapat tergolong pada iklim tropis. Topografi Kabupaten Dharmasraya mayoritas berupa lahan datar dengan ketinggian dari 82 meter sampai 1,525 meter dari permukaan laut, sehingga dapat dikelompokkan ke zona iklim sedang dengan ketinggian antara 700 meter sampai 1,500 meter di atas permukaan laut,



Informasi tentang curah hujan bulanan untuk menjawab kondisi lingkungan hidup terhadap isu perubahan iklim akan menyajikan kondisi berdasarkan perbandingan standar/kriteria, nilai antar lokasi dan antar waktu, dan analisis statistik sederhana dengan menampilkan nilai maksimum, minimum dan rata-rata curah hujan bulanan.

Pemantauan rutin curah hujan dikelola melalui lima stasiun pemantauan oleh Balai PSDA Sumatera Barat yang berkantor cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Adapun 5 (lima) stasiun pemantauan tersebut terletak di beberapa lokasi, yaitu Stasiun Durian Simpai Silago di Kecamatan IX Koto, Stasiun Bendungan Batu Bakawuik Batanghari di Kecamatan Pulau Punjung, Stasiun Komplek Sedasi di Kecamatan Pulau Punjung, Stasiun Padang Sidondang di Kecamatan Sitiung dan Stasiun Piruko di Kecamatan Koto Baru.

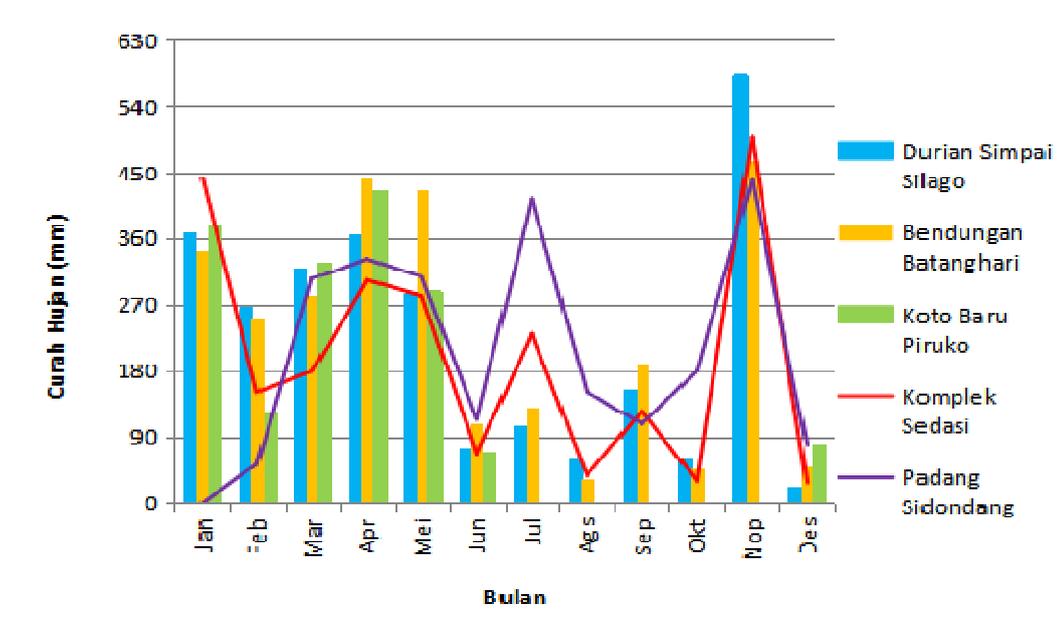
Perbandingan curah hujan rata-rata bulanan selama tahun 2016 yang dipantau oleh lima stasiun pemantauan yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat trend per-bulannya pada Gambar 3.2.45. Data curah hujan tersebut menjelaskan bahwa setiap lokasi memiliki intensitas curah hujan yang berbeda-beda, hal ini terlihat dari data yang fluktuatif pada bulan yang sama untuk kelima stasiun pemantauan. Akan tetapi umumnya memiliki kecenderungan yang sama hampir setiap bulannya, kecuali pada stasiun Sedasi dan Padang Sidondang terlihat lebih tinggi pada bulan Juli. Pada Stasiun Pemantauan Koto Baru Piruko tidak ada tercatat data curah hujan untuk bulan Juli sampai November disebabkan oleh adanya kerusakan pada sistem. Intensitas curah hujan terlihat sangat rendah pada bulan Juni sampai Oktober 2016 dan Desember 2016, dan intensitas curah hujan

Jika dibandingkan curah hujan tahun 2013 s/d 2016, maka curah hujan rata-rata tertinggi selalu terjadi pada bulan November. Pada tahun 2016 curah hujan tertinggi sebesar 496,98 mm/tahun dan curah hujan terendah selalu terjadi pada bulan desember.



tertinggi terjadi pada bulan November 2016, (Sumber: Tabel-21. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016).

Gambar 3.2.45.
Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Pada Tahun 2016 di Lima Stasiun Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-21. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Tabel 3.2.10.
Hasil Analisis Statistik Sederhana Curah Hujan Pada 5 (Lima) Stasiun Pemantauan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Maksimum	Rata-rata	Minimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Durian Sampai Silago	585,00	221,92	20,00
2	Bendungan Batanghari	466,90	230,50	33,60
3	Komplek Sedasi	497,00	197,38	27,00
4	Padang Sidondang	439,00	225,36	52,00
5	Koto Baru Piruko	424,20	240,86	67,60
	Rata-Rata	482,42	223,20	40,04

Sumber: Olahan Tabel-21. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Hasil analisis statistik sederhana curah hujan pada 5 (lima) stasiun pemantauan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.10. Curah hujan rata-rata dari 5 (lima) stasiun tersebut adalah 223,20 mm/tahun, rata-rata maksimum 482,42



mm/tahun, dan rata-rata minimum 40,04 mm/tahun. Curah hujan maksimum dan minimum tercatat pada Stasiun Durian Simpai yang berlokasi di Kecamatan IX Koto, hal ini memperlihatkan bahwa setiap lokasi memiliki intensitas curah hujan yang berbeda-beda.

Daerah tropis dapat diklasifikasikan iklimnya, menurut Schmidt dan Ferguson jumlah curah hujan rata-rata yang jatuh setiap bulan dapat ditentukan apakah termasuk bulan basah, lembap, dan bulan kering. Bulan basah adalah bulan-bulan yang memiliki tebal curah hujan lebih dari 100 mm. Bulan lembap adalah bulan-bulan yang memiliki tebal curah hujan antara 60 mm–100 mm, sedangkan bulan kering adalah bulan-bulan yang memiliki tebal curah hujan kurang dari 60 mm.

Klasifikasi penggolongan iklim menurut teori Schmidt-Ferguson, menggunakan perhitungan atas nilai Q, yaitu persentase perbandingan rata-rata jumlah bulan basah dan bulan kering, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q = (Md/Mw) \times 100\%$$

Dimana:

- Q = perbandingan bulan kering dan bulan basah (%)
Md = mean (rata-rata) bulan kering, yaitu perbandingan antara jumlah bulan kering dibagi dengan jumlah tahun pengamatan
Mw = mean (rata-rata) bulan basah, yaitu perbandingan antara jumlah bulan basah dibagi dengan jumlah tahun pengamatan,

Sistem klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson akan ditentukan menurut tipe iklim sebagai berikut,

1. Tipe Iklim A (sangat basah), jika nilai Q antara 0%–14,33%
2. Tipe Iklim B (basah), jika nilai Q antara 14,33%–33,3%
3. Tipe Iklim C (agak basah), jika nilai Q antara 33,3%–60%
4. Tipe Iklim D (sedang), jika nilai Q antara 60%–100%
5. Tipe Iklim E (agak kering), jika nilai Q antara 100%–167%
6. Tipe Iklim F (kering), jika nilai Q antara 167%–300%
7. Tipe Iklim G (sangat kering), jika nilai Q antara 300%–700%

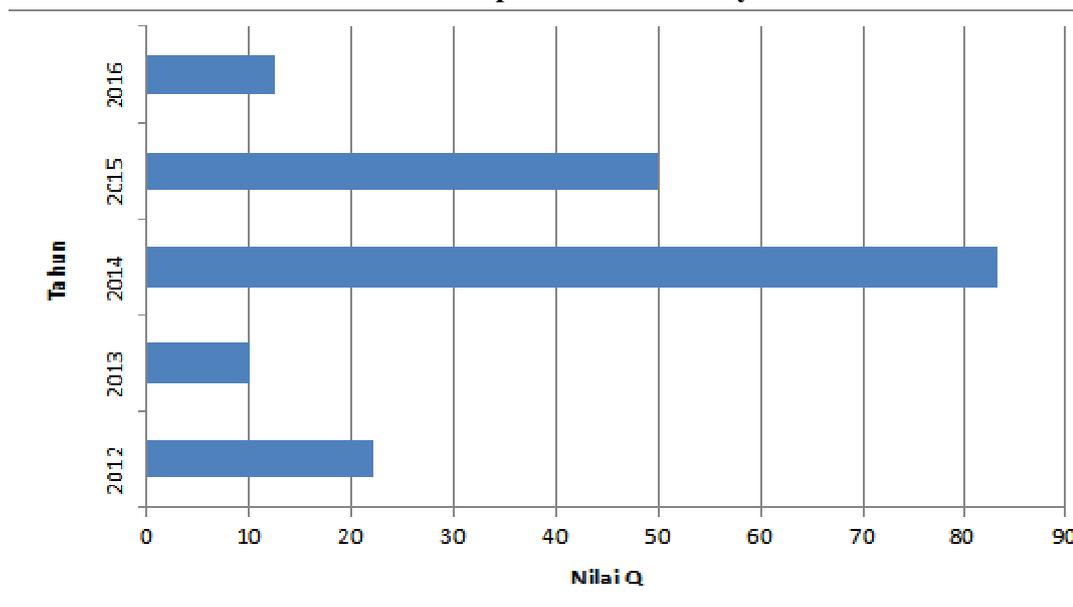




8. Tipe Iklim H (kering sangat ekstrim), jika nilai Q lebih dari 700%

Berdasarkan perhitungan menurut teori Schmidt-Ferguson, pada tahun 2016 memiliki 8 bulan basah, 3 bulan lembab dan 1 bulan kering dengan nilai Q sebesar 12,50%, sehingga dapat diklasifikasikan kepada tipe iklim A (sangat basah). Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya di Kabupaten Dharmasraya memiliki tipe iklim C (agak basah/ $Q=50,00\%$) tahun 2015, tipe iklim D (sedang/ $Q=83,33\%$) 2014, tipe iklim A (sangat basah/ $Q=10,00\%$) pada tahun 2013, dan tergolong tipe iklim B (basah/ $Q=22,22\%$) pada tahun 2012. Perbandingan klasifikasi tipe iklim dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.2.46.

Gambar 3.2.46.
Perbandingan Klasifikasi Tipe Iklim Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



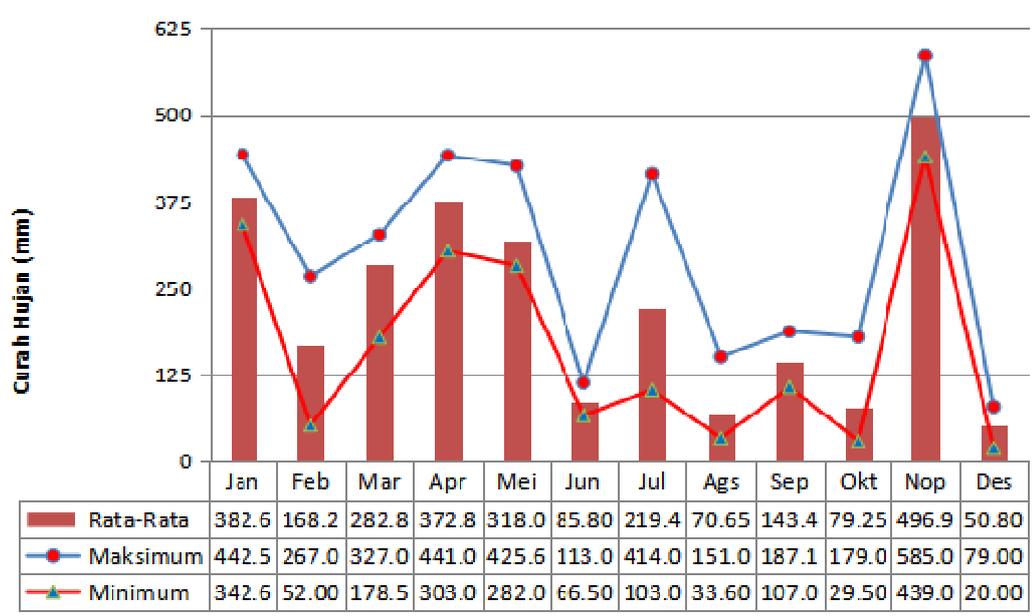
Sumber: Olahan Tabel-21. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Sementara itu, jika diambil nilai rata-rata dari lima stasiun pemantauan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dilakukan analisis statistik sederhana curah hujan bulanan untuk nilai rata-rata bulanan, nilai maksimum bulanan dan nilai minimum bulanan, maka curah hujan maksimum terjadi pada bulan November 2016 sebesar 585,0 mm dan minimum terjadi pada bulan Desember 2016 20,00



mm. Dengan analisis secara statistik sederhana diperoleh gambaran seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.47.

Gambar 3.2.47.
Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Pada Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-21. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

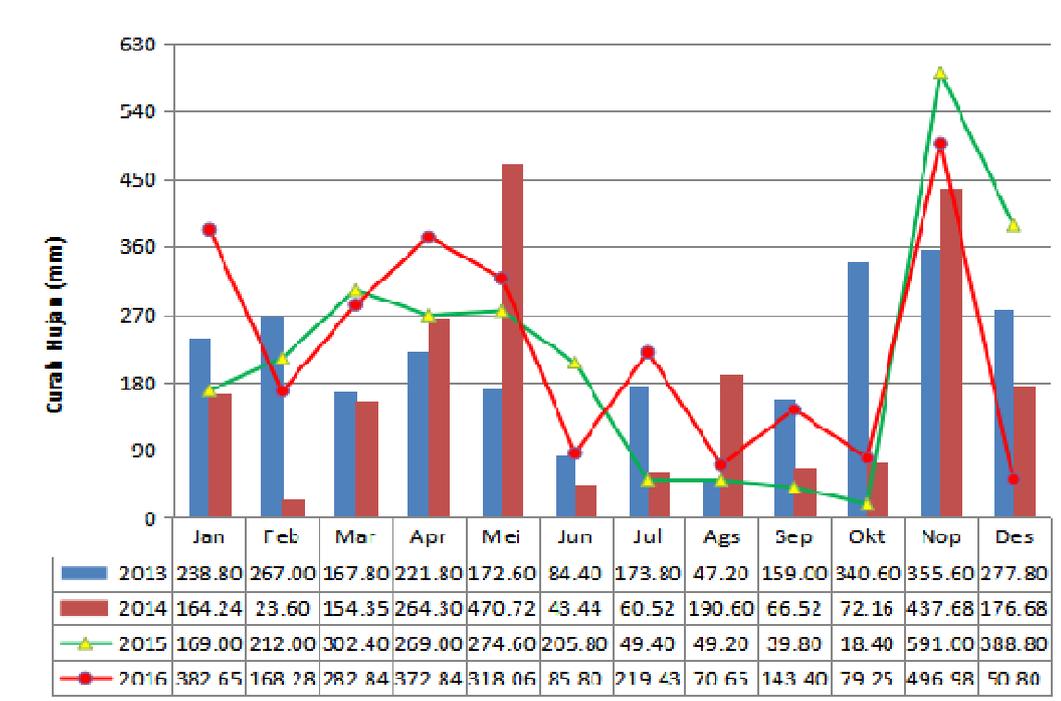
Kondisi curah hujan yang sangat ekstrim baik itu sangat tinggi maupun sangat rendah perlu diwaspadai, karena hal ini dapat dijadikan sebagai acuan untukantisipasi timbulnya bencana banjir saat musim penghujan dan bencana kekeringan pada saat musim kering datang. Hal ini juga berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah dan debit air sungai atau air embung yang dijadikan sebagai sumber air irigasi. Perbandingan curah hujan rata-rata bulanan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat trendnya pada Gambar 3.2.48. yang menunjukkan bahwa curah hujan

Curah hujan rata-rata tahun 2016 sebesar 223.20 mm/tahun dan termasuk tipe iklim sangat basah dengan curah hujan minimum terjadi pada bulan Agustus 2016 dan curah hujan maksimum terjadi pada bulan November 2016.



Desember, sedangkan curah hujan rendah terjadi pada bulan Juni sampai Oktober setiap tahunnya.

Gambar 3.2.48.
Perbandingan Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Pada Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-21. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Letak geografis lima stasiun pemantauan iklim sesuai dengan data Tabel 21 E Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 yaitu Stasiun Durian Simpai Silago di Kecamatan IX Koto terletak pada 01°00'35,1" LS dan 101°22'56,9" BT, Stasiun Bendungan Batu Bakawuik Batanghari di Kecamatan Pulau Punjung terletak pada 01°00'12,7" LS dan 101°26'15,2" BT, Stasiun Komplek Sedasi di Kecamatan Pulau Punjung terletak pada 00°57'08,8" LS dan 101°29'34,2" BT, Stasiun Padang Sidondang di Kecamatan Sitiung terletak pada 00°58'59,2" LS dan 101°36'31,0" BT, dan Stasiun Piruko di Kecamatan Koto Baru.



3.2.8. Respon Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Air di Kabupaten Dharmasraya

Respon atau tindakan yang dilakukan melalui kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas air di Kabupaten Dharmasraya diantaranya:

- a) Menanam tanaman penyangga seperti rumput vetifer disekitar DAS untuk menghindari terjadinya erosi pada bibir sungai dan menambah areal resapan air dengan meningkatkan fungsi ekohidrologis. Penanaman rumput vetifer sebagai penguat tebing DAS dilakukan melalui dana DAK Tahun 2016 bidang Lingkungan Hidup. Selain itu juga pengadaan Taman Hijau untuk menunjang Program Adiwiyata, menambah daerah resapan sekitar sekolah dan meningkatkan nilai estetika dilaksanakan melalui dana DAK Tahun 2016 bidang Lingkungan Hidup dan APBD Kabupaten Dharmasraya, seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.11. Pada Tabel 3.2.12 merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya pengembangan Kota Hijau, salah satunya yaitu penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang direncanakan dibangun di simpang Silago Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.

Tabel 3.2.11.
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Peningkatan Daerah Resapan Air dan Penyangga Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadaan dan Pembangunan penyangga tebing DAS dengan memakai rumput vertiver	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengadaan Tanaman Hias/Pelindung (Bunga Bougenvile)	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pembangunan dan Pengadaan Taman Hijau Sekolah SMP 1 Sitiung	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pembangunan dan Pengadaan Taman Hijau Sekolah SD Padang Duri Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Olahan Tabel-43. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





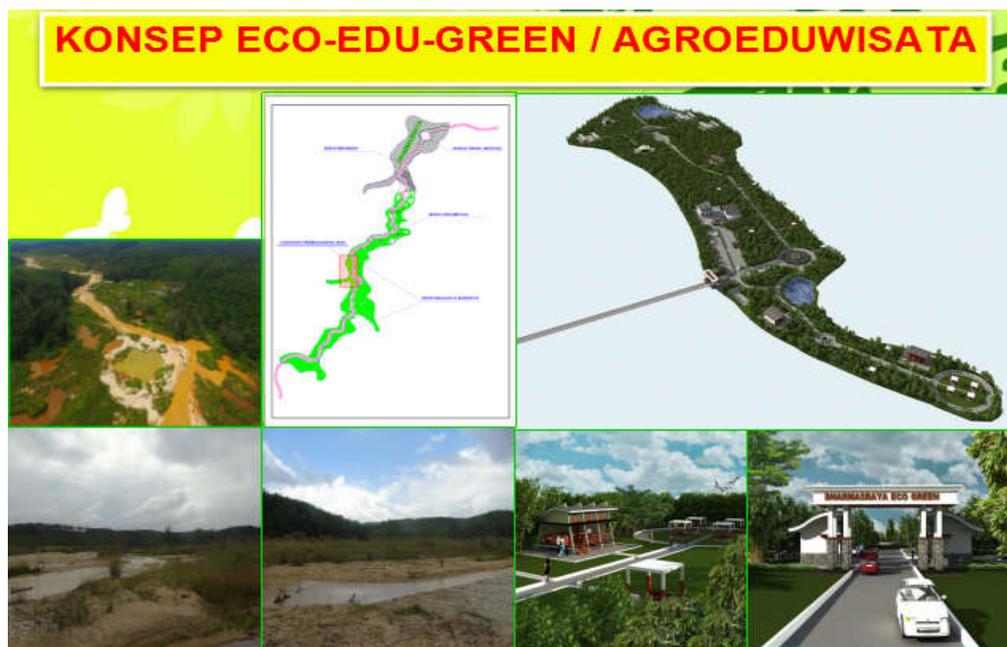
Tabel 3.2.12.
Produk Hukum Dalam Pengembangan Koto Hijau Tahun 2016 di
Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keputusan Bupati	189.1/327/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU KABUPATEN DHRAMASRAYA TAHUN 2016

Sumber: Olahan Tabel-48. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Melakukan pemulihan kawasan bekas tambang dengan mengajukan proposal pemulihan lahan akses terbuka ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2016 untuk lokasi Jorong Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung seluas ±300 Ha, dan mendapat respon dari KLHK RI untuk rencana lokasi pemulihan bekas tambang seluas 5 Ha.

Gambar 3.2.49.
Konsep Pengembangan Pemulihan Lahan Akses Terbuka Bekas
Tambang di Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau
Punjung Kabupaten Dharmasraya

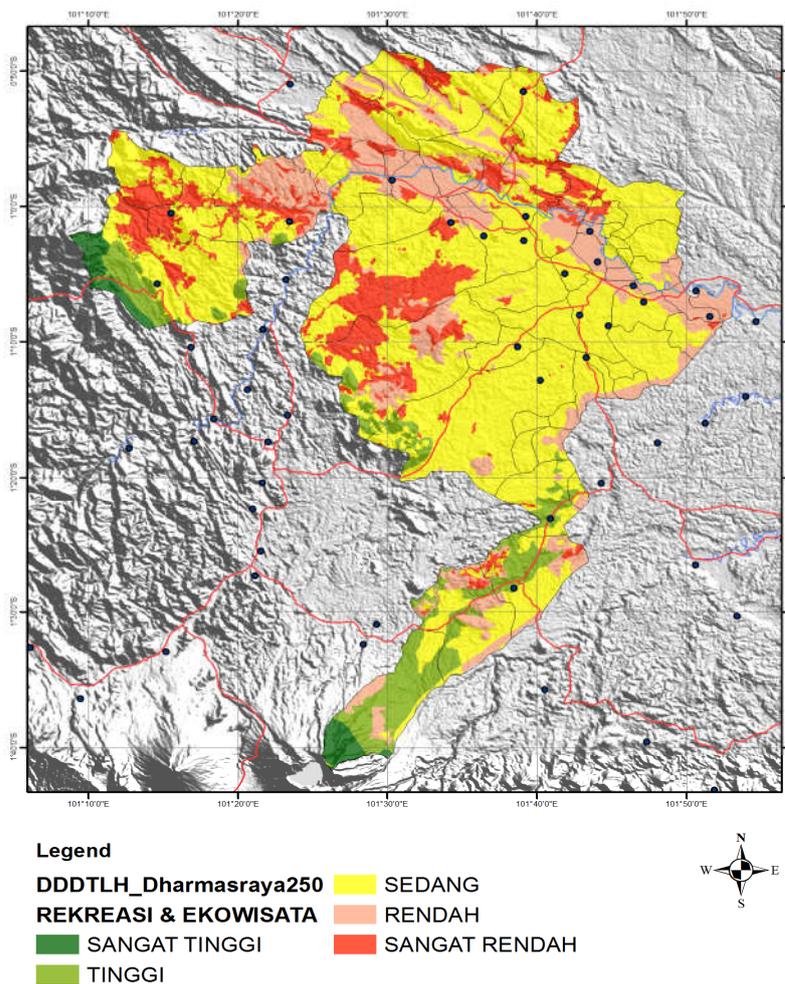


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Kegiatan pemulihan ini akan dilaksanakan tahun 2017 melalui dana APBN KLHK RI dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Bekas Tambang. Konsep kegiatan pemulihan ini mengambil tema Edu-Ecogreen Park, seperti yang terlihat pada Gambar 3.2.49.

Gambar 3.2.50.
Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Rekreasi dan Ekowisata Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Rekreasi dan Ekowisata yang akan Disusun Dalam Dokumen Rencana Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Rencana akan dilakukan penanaman berbagai jenis bambu sebagai tanaman yang mampu meremediasi merkuri dalam tanah dan meningkatkan fungsi ekohidrologis tanah yang terkontaminasi dan menjadi tempat penelitian bagi pengembangan bambu, serta nantinya dapat dijadikan sebagai tempat kunjungan wisata pemulihan bekas tambang.

Pada Gambar 3.2.50. terlihat peta rencana DDDTLH untuk jasa rekreasi dan ekowisata yang memperlihatkan bahwa kabupaten dharmasraya memiliki pelayanan jasa yang sangat rendah untuk ketersediaan rekreasi dan ekowisata. Oleh karena itu, dengan melakukan perencanaan pemulihan lahan bekas tambang menjadi kawasan edu-eco-green park diharapkan dapat meningkatkan jasa rekreasi dan ekowisata dari pemanfaatan lahan bekas tambang.

- c) Melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi untuk mengatasi ketersediaan fasilitas air minum, pengelolaan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari limbah domestik rumah tangga. Pada Tabel 3.2.13. terlihat ada 6 kegiatan swakelola masyarakat untuk pembangunan IPAL dan MCK Plus.

Tabel 3.2.13.
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Sanitasi Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Tiumang Jorong Lagan Jaya (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Sitiung Jorong Lubuk Aur (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)



No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Sungai Rumbai Jorong Tawakal (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Koto Besar Jorong Koto Ranah (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Koto Salak Jorong Padang Tengah II (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Timpeh Jorong Marga Jaya (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)

Sumber: Olahan Tabel-43. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Tabel 3.2.14. merupakan bentuk kebijakan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan penyediaan air minum, sanitasi atau penyehatan lingkungan.

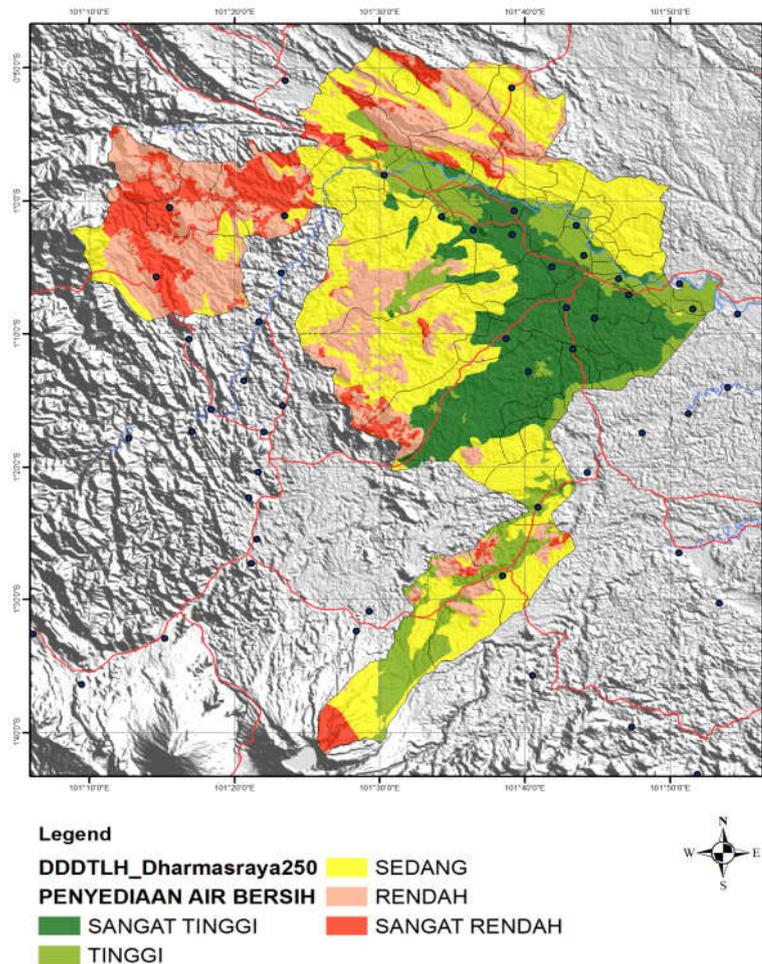
Tabel 3.2.14.
Produk Hukum Dalam Pengelolaan Sanitasi Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keputusan Bupati	189.1/467/KPTS -BUP/2016	Penetapan lokasi Sasaran Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2017.
2	Peraturan Bupati		Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019

Sumber: Olahan Tabel-48. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Gambar 3.2.51.
Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
untuk Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya

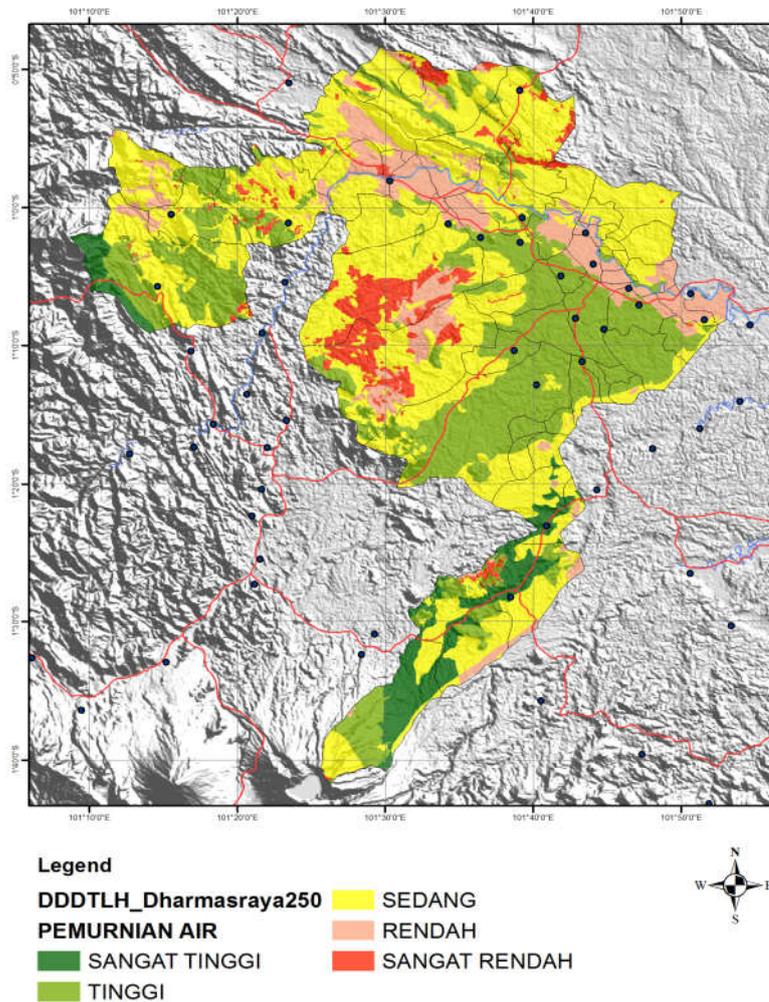


Sumber: Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Penyediaan Air Bersih yang akan Disusun Dalam Dokumen Rencana Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Berdasarkan Gambar 3.1.51. peta rencana daya dukung dan daya tampung (DDDTLH) jasa penyediaan air bersih, bahwa ada beberapa kecamatan yang rawan akan penyediaan air bersih, yaitu IX Koto, Pulau Punjung, Koto Besar, Timpeh, dan Asam Jujuhan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sanitasi dapat diarahkan nantinya ke kecamatan yang butuh dan rawan penyediaan air bersih.



Gambar 3.2.52.
Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
untuk Jasa Pemurnian Air Kabupaten Dharmasraya



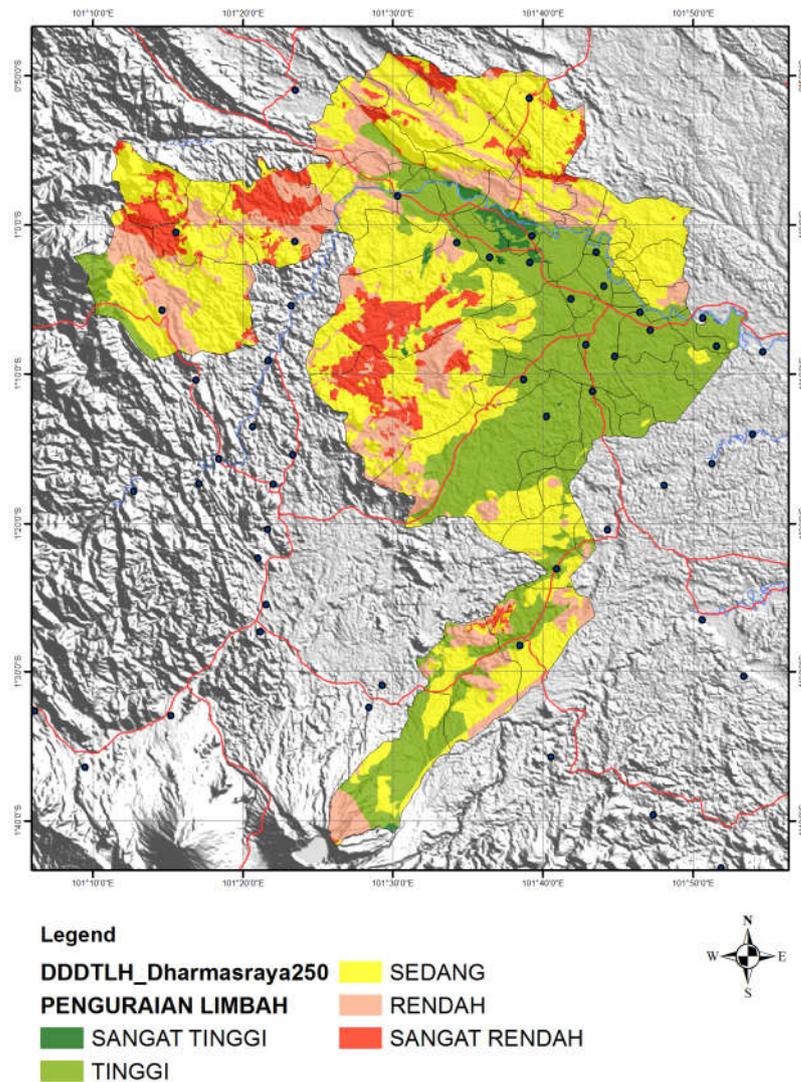
Sumber: Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Pemurnian Air yang akan Disusun Dalam Dokumen Rencana Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Gambar 3.2.52. menggambarkan peta rencana daya dukung dan daya tampung (DDDTLH) untuk jasa pemurnian air, bahwa ada beberapa kecamatan seperti sebagian IX Koto, Pulau Punjung, Koto Besar, Timpeh, Padang Laweh dan Tiumang memiliki kesulitan dalam pemurnian air. Pada umumnya untuk kecamatan Pulau Punjung terdapat lahan terbuka yang yang



cenderung memiliki jasa pelayanan rendah dan sangat rendah, yang ditandai dengan warna merah.

Gambar 3.2.53.
Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Penguraian Limbah Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Penguraian Limbah yang akan Disusun Dalam Dokumen Rencana Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Peta penguraian limbah pada Gambar 3.2.53 menunjukkan ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Dharmasraya yang memiliki jasa



penguraian limbah sangat rendah yaitu di Kecamatan Pulau Punjung, Koto Besar, IX Koto, dan Timpeh. Hal ini dapat menjadi rekomendasi untuk pemulihan kondisi pemulihan yang kontaminasi limbah pada lokasi tercemar.

Pembangunan sanitasi masyarakat tersebut baik dari dana APBN, DAK dan APBD tersebut untuk meningkatkan kualitas sanitasi pada pemukiman masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pola hidup bersih dan kesehatan masyarakat. Bentuk akibat lainnya, yaitu dengan peningkatan kualitas sanitasi pada pemukiman masyarakat tersebut akan menurunkan beban pencemaran bagi lingkungan akibat limbah domestik masyarakat dan dapat mempertahankan kualitas lingkungan.

- d) Bentuk kebijakan lainnya yaitu melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat melalui program dan kegiatan penyuluhan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, sebagai respon permasalahan kualitas air terhadap laju pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pembangunan sumber daya manusia seperti masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sekitar, dan tingkat masyarakat miskin yang butuh lingkungan yang layak, serta dapat berdampak terhadap kesehatan. Pada Tabel 3.2.15. merupakan beberapa bentuk kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, edukasi masyarakat, dan melalui pendidikan dari usia dini melalui Program Sekolah Adiwiyata.

Tabel 3.2.15.
Produk Hukum Dalam Upaya Peningkatan Edukasi Masyarakat dan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keputusan Bupati	189.1/106/KPTS-BUP/2016	Pembentukan Tim Pembina dan Penilai Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.
2	Keputusan Bupati	189.1/107/KPTS-BUP/2016	Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Dharmasraya Tahun



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
			2016.
3	Keputusan Bupati	189.1/70/KPTS-BUP/2016	Pembentuka Tim Perencanaan Obat, Reagen dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016.
4	Keputusan Bupati	189.1/82/KPTS-BUP/2016	Penunjukkan Fasilitas Kesehatan Penerima Alat dan Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016.
5	Keputusan Bupati	189.1/112/KPTS-BUP/2016	Pembentukan Kelompok Kerja Eradikasi Polio Kabupaten Dharmasraya.
6	Keputusan Bupati	189.1/119/KPTS-BUP/2016	Pembentukan Tim Pembina dan Kesekretariatan Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Dharmasraya Masa Bakti 2016 - 2021.
7	Keputusan Bupati	189.1/279/KPTS-BUP/2016	Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014

Sumber: Olahan Tabel-48. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

- e) Respon terhadap masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan pengelolaan limbah domestik yaitu dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup pada lingkungan sekitar tempat tinggal, serta pembinaan tentang pengolahan persampahan dan prinsip 3R kepada masyarakat, pembentukan Bank Sampah dan kelompok peduli sampah, dan pelarangan membuang sampah disekitar DAS, serta membuat papan informasi tentang pengelolaan Lingkungan Hidup di sekitar DAS. Sosialisasi dilakukan melalui pendanaan dari dana APBD pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan untuk Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dan Kegiatan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim. Dari kegiatan tersebut belum semua nagari yang ada di 11 kecamatan yang dapat dibina karena



keterbatasan APBD Dinas Lingkungan Hidup, seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.16.

Tabel 3.2.16.
Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Jorong Piruko Utara, Jorong Padang Sidondang, Nagari Koto Ranah, Nagari Koto Tinggi, Nagari Koto Laweh	Maret 2016 - April 2016	Dalam rangka pembinaan untuk Program Kampung Iklim dan Gerakan Sumatera Barat Bersih (GSB) Tahun 2016, dan seleksi lokasi untuk penilaian PROKLIM dan GSB.

Sumber: Olahan Tabel-47. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Tabel 3.2.17. merupakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dilaksanakan melalui dana DAK Tahun 2016 bidang Lingkungan Hidup, seperti peralatan pencacah sampah dan bangunan Bank Sampah, dan sebagian ada juga pengadaan yang menggunakan dana APBD untuk pencacah sampah, Bank Sampah, dan Tong Sampah Terpilah.

Tabel 3.2.17.
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Persampahan dan Limbah Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadaan Tong Sampah	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum



No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Pengadaan pembangunan pengelolaan limbah padat menjadi biogas beserta instalasi dan asesorisnya di Kec. Pl. Punjung	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pengadaan Peralatan Pencacah Sampah	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pengadaan Bangunan Bank Sampah (Green Store)	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
6	Pengadaan Peralatan Pencacah Sampah Plastik dan Organik	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
7	Pengadaan pembangunan pengelolaan limbah padat menjadi biogas beserta instalasi dan asesorisnya di Kec. Sitiung	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
8	Pengadaan pembangunan pengelolaan limbah padat menjadi biogas beserta instalasi dan asesorisnya di Kec. Koto Besar	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Olahan Tabel-43. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Adapun kelompok masyarakat yang telah dilakukan sosialisasi persampahan, yaitu diantaranya:

- a. Nagari IV Koto, Kecamatan Pulau Punjung
- b. Nagari Sitiung, Jorong Piruko Utara, Kecamatan Sitiung
- c. Nagari Panyubarangan, Kecamatan Timpeh
- d. Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru
- e. Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar
- f. Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai rumbai

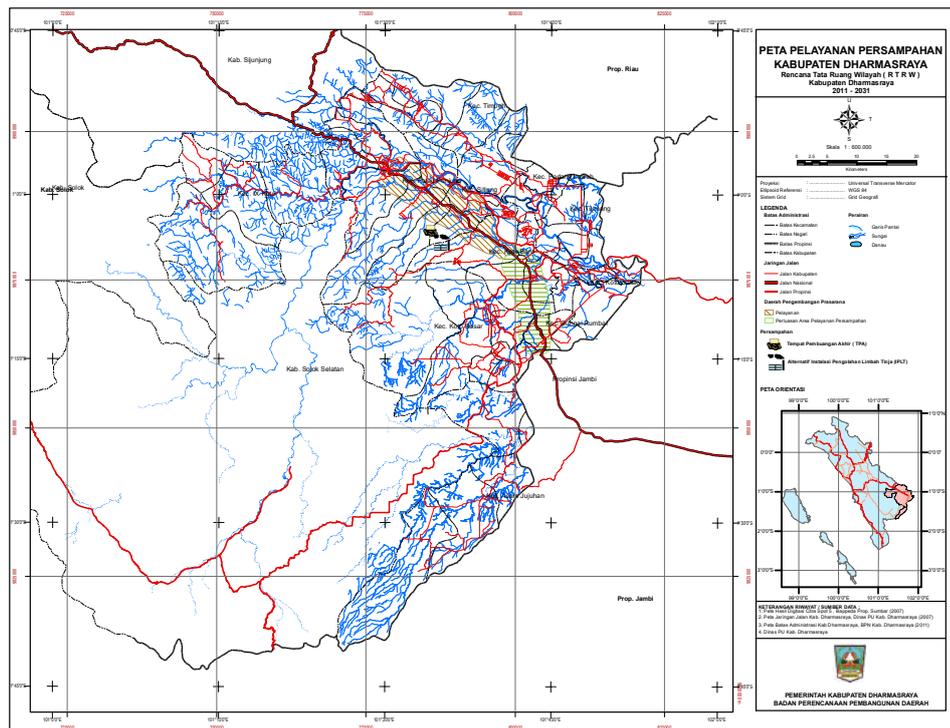
Berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 bahwasanya sudah ada perencanaan pengembangan pengelolaan sampah dan limbah. Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem sanitary landfill dan telah membangun Instalasi





Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT), yang keduanya berlokasi di Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru. Pada Gambar 3.2.54. berikut adalah peta pengelolaan sampah dan limbah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan RTRW.

Gambar 3.2.54.
Peta Layanan Persampahan Berdasarkan RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

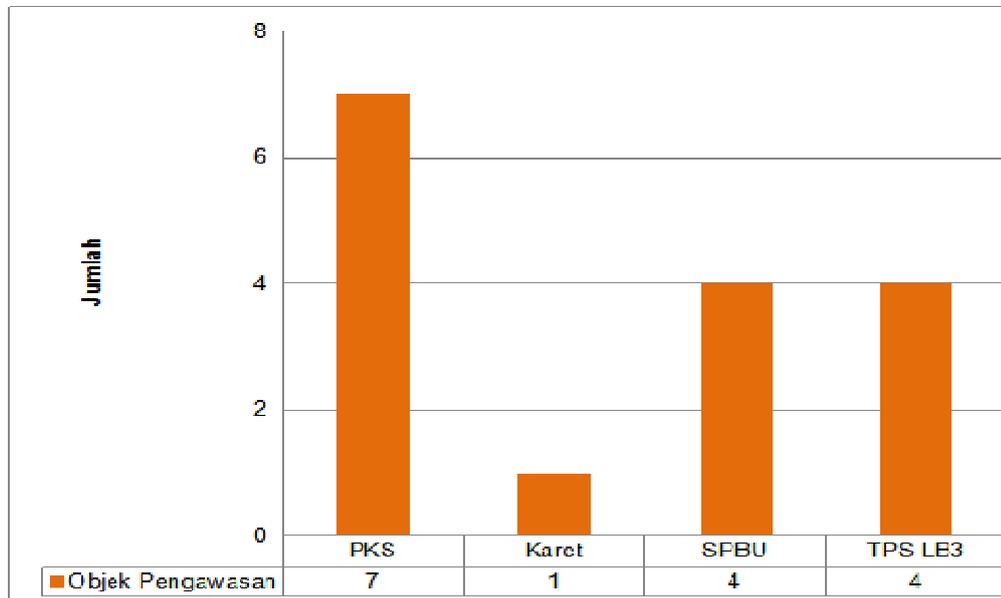


Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dharmasraya, 2016.

- f) Penertiban usaha/kegiatan disekitar DAS yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi terhadap usaha/kegiatan yang telah atau belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dan melaksanakan pengawasan rutin 1x 4 bulan, serta memberikan teguran secara lisan maupun tertulis terhadap usaha/kegiatan menurut tingkat ketaatannya dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Gambar 3.2.55.
Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Terhadap Usaha/Kegiatan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-36. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Tabel 3.2.18.
Hasil Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) Terhadap Usaha/Kegiatan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No.	Objek Pengawasan	Jumlah	Taat	Tidak Taat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PKS	7	5	2
2	Karet	1	1	0
3	SPBU	4	4	0
4	TPS LB3	4	4	0
	Total	16	14	2

Sumber: Olahan Tabel-36. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Ada 12 usaha/kegiatan yang diawasi dengan objek pengawasan sebanyak 16 objek pengawasan termasuk IPAL dan LB3. Pengawasan izin lingkungan seperti terlihat pada Gambar 3.2.55. dan Tabel 3.2.16. hasil pengawasan diperoleh ada 14 yang taat dan 2 tidak taat (PKS). Bagi usaha/kegiatan yang tidak taat akan diberikan teguran lisan dan pembinaan sehingga pemrakarsa dapat memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan LH usaha/kegiatannya. Dari data 135 sumber pencemaran (usaha/kegiatan) atau



13 jenis sumber pencemaran yang ada di Kabupaten Dharmasraya hanya 12 usaha/kegiatan yang dapat dilakukan pengawasan rutin. (*Sumber: Olahan Tabel-27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016*). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan personil dan pejabat PPLH yang kompeten di Kabupaten Dharmasraya.

Pada tahun 2016 ada 82 (delapan puluh dua) usaha/kegiatan yang mengurus dokumen izin lingkungan, yaitu sebanyak 8 usaha/kegiatan mengurus UKL/UPL dan 71 usaha/kegiatan mengurus SPPL. Adapun usaha/kegiatan yang mengurus UKL/UPL tersebut berupa UIPHHK, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, menara telekomunikasi, Produksi Air Minum dalam Kemasan, dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit), sedangkan yang mengurus SPPL terdiri dari kegiatan pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, agroindustri, industri rumah tangga, manufaktur, perbengkelan, pelayanan kesehatan, jasa, perumahan, agen gas LPG, dan jasa). (*Sumber: Tabel-34. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016*).

Berdasarkan data hasil inventarisasi usaha/kegiatan pada tahun 2016 hanya ada 4 (empat) perusahaan yang mengurus izin limbah B3 yaitu, group incasi raya dengan jenis izin berupa perpanjangan izin penyimpanan sementara limbah B3. (*Sumber: Tabel-35. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016*).

Jika diakumulasikan seluruh jumlah usaha/kegiatan yang telah terdata mengurus izin, akan besar sekali beban pencemaran yang akan disumbangkan ke sungai sebagai badan air.

- g) Melakukukan pengawasan dan pemantauan kondisi dan kualitas air sungai melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang rutin dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun. Ada 18 (titik sampling) air yang mewakili dari 10 (sepuluh) sungai yang dipantau setiap tahunnya, yaitu sungai Batanghari,



Batang Momong, Batang Pangian, Batang Mimpi, Batang Siat, Batang Piruko, Batang Timpeh, Sungai Koto Balai, Sungai Betung, dan Batang Sinabuhan.

- h) Memantau debit air sungai melalui Bendungan DAS Batanghari untuk menghindari terjadinya banjir besar dikala musim penghujan dengan curah hujan tinggi, kerjasama dengan Balai PSDA Provinsi Sumatera Barat.
- i) Membuat DAM sekitar sepadan DAS sebagai salah satu upaya memperkuat tebing pada bibir sungai dan menghindari terjadinya erosi. Mengaktifkan, memperbaiki jaringan irigasi dan mengontrol irigasi dengan mengalirkan air sungai sebagai sumber air irigasi ke sawah penduduk. Pada Tabel 3.3.19. merupakan bentuk kegiatan fisik perbaikan jaringan irigasi dan penguatan tebing di beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3.2.19.
Kegiatan Fisik dalam Perbaikan Jaringan Irigasi dan Penguatan Tebing DAS oleh Dinas PU Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Batang Asahan/Sei. Patapahan	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
2	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Lubuk Paraku	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
3	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I. Lubuk Talaok	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
4	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Mudik Banai	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
5	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Sungai Betung Nag. Silago	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
6	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Rawa Bintungan Koto Padang	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
7	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Tarok Jaya Koto Baru	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
8	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Ranah Parupuk (Siguntur)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
9	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Sepakat Siguntur	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
10	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Mudik Lago	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum





No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Sungai Batang Bugah Tengah	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
12	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Air Gemuruh Siguntur	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
13	Pemasangan Batu Batang Mimpi dan Rawa Bengkoang	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
14	Pengembangan Alur Sungai - Sungai Batang Momong IX Koto (Batu Manangih)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
15	Batu Bronjong Jr. Pasir Mayang Nag. Abai Siat	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
16	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET I (DI. Batang Timpeh Usau)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
17	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET II (DI. Sarana Baru)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
18	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET III (DI. Batang Mimpi)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
19	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET IV (DI. Sijawi Jawi)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
20	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET V (DI. Sungai Lamak, DI. Sei. Patapahan/Sei. Asahan, DI. Balik Parit, DI. Aur Duri Calau, DI. Batu Agung)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
21	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET VI (DI. Sungai Pinang)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
22	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET VII (DI. Sei Ambacang)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
23	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET VIII (DI. Bugah Kecil)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
24	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET IX (DI. Mudik Lago)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
25	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET X (DI. Timbulun Buyieh)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
26	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET XI (DI. Batang Rambah)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
27	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET XII (DI. Tarok Jaya)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum





No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET XIII (DI. Sungai Bungin)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum

Sumber: Olahan Tabel-43. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

- j) Pengendalian pencemaran air dan pengelolaan sumber air juga dilakukan oleh masyarakat, seperti membuat lubuk larangan yang berisi ikan bertuah pada aliran sungai yang ada di lingkungan tempat tinggal, dan hanya akan dipanen pada waktu-waktu tertentu dengan izin kepala suku/adat. Ini telah menjadi kearifan lokal pada beberapa nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya, seperti lubuk larangan di Nagari Silago dan Nagari Lubuk Karak Kecamatan IX Koto, lubuk larangan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung, Nagari Sinamar, Nagari Alahan Nan Tigo, Nagari Sungai Limau di Kecamatan Asam Jujuhan, serta pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) perairan umum dibawah koordinasi Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya. Perencanaan tahun 2018 akan dibentuk kawasan konservasi perairan umum yang berlokasi di Nagari Silago Kecamatan IX Koto dan telah ditetapkan dalam produk hukum untuk pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam.



3.3. KUALITAS UDARA

Udara normal terdiri atas komposisi gas nitrogen sekitar 78,1%, oksigen 20,93%, karbondioksida 0,03%, dan selebihnya berupa campuran mekanis dari bermacam-macam gas, seperti gas argon, neon, kripton, xenon dan helium, Selain itu, udara juga mengandung uap air, debu, bakteri, dan sisa materi lainnya.

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Peranan udara juga tak kalah penting dengan air yang juga memberikan kehidupan di permukaan bumi. Pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kegiatan industri dan transportasi yang berkontribusi pada penurunan kualitas udara, karena emisi yang berasal dari industri, transportasi, domestik ataupun kebakaran hutan dapat mempengaruhi daya dukung lingkungan.

Pada pembahasan sub bab ini akan dijelaskan berdasarkan *Pressure* (Tekanan), *State* (Kondisi), dan *Response* (Respon/Tindakan/Upaya) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap permasalahan perubahan kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya.

3.3.1. TEKANAN TERHADAP PERUBAHAN KUALITAS UDARA

Tekanan atau *Pressure* yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kualitas lingkungan terutama dipengaruhi oleh kondisi kualitas udara yang ada di Kabupaten Dharmasraya diantaranya yaitu:

- a) Perubahan iklim secara global di seluruh dunia telah menjadi isu lingkungan, tidak hanya di tingkat internasional, namun juga nasional dan daerah. Sesuai dengan hasil dari Konvesi Protokol Tokyo - UNFCCC yang menyampaikan tentang isu-isu perubahan iklim, termasuk kajian-kajian iklim di negara maju dan berkembang mempunyai kewajiban mengantisipasi perubahan iklim tersebut. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa



perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Indonesia sangat rentan terhadap dampak ganda perubahan iklim, seperti (1).Prakiraan kenaikan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Temperatur rata-rata tahunan di Indonesia telah mengalami kenaikan 0,3°C. Adanya perubahan suhu udara dan cuaca secara mendadak, perubahan suhu permukaan bumi dengan munculnya titik panas atau titik api yang memicu kebakaran hutan/lahan. (2).Curah hujan yang lebih tinggi. Diperkirakan, akibat perubahan iklim, Indonesia akan mengalami kenaikan curah hujan 2-3 persen per tahun, serta musim hujan yang lebih pendek (lebih sedikit jumlah hari hujan dalam setahun), yang menyebabkan resiko banjir meningkat secara signifikan. Hal ini akan merubah keseimbangan air di lingkungan dan mempengaruhi pembangkit listrik tenaga air dan suplai air minum. (3).Ketahanan pangan. Perubahan iklim akan mengubah curah hujan, penguapan, limpasan air, dan kelembapan tanah; yang akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Kesuburan tanah akan berkurang 2-8 persen dalam jangka panjang, yang akan berakibat pada penurunan produksi tahunan tanaman pangan pertanian. (4).Peningkatan berjangkitnya penyakit yang dibawa air dan vektor. Walaupun hubungan antara perubahan iklim dan masalah kesehatan belum banyak diteliti, ada potensi bahwa berjangkitnya penyakit yang dibawa air dan vektor akan meningkat. Beberapa berspekulasi bahwa peningkatan berjangkitnya kasus demam berdarah selama musim hujan di Indonesia, sebagiannya mungkin saja disebabkan oleh iklim yang lebih hangat.

Implikasi isu iklim ada di semua aspek, pertanian, kelautan, transportasi, kehutanan, kehidupan sehari-hari, RAN GRK perencanaan utk aksi isu perubahan iklim.

- b) Pencemaran yang disebabkan oleh emisi sumber tak bergerak yaitu yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak, gas dan bahan bakar lainnya untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan melalui tungku bakar, cerobong mesin boiler atau genset. Emisi yang berasal dari boiler atau ketel



uap harus memenuhi baku mutu emisi atau batas maksimum yang diperbolehkan masuk kedalam lingkungan sesuai dengan PermenLH nomor 07 tahun 2007.

Pada Tabel 3.3.1. terlihat penggunaan bahan bakar tahun 2016 yang berasal dari data penjualan Pertamina dan agen LPG di Kabupaten Dharmasraya. Selain penggunaan bahan bakar pada industri, penggunaan bahan bakar pada rumah tangga dan kendaraan bermotor juga menyumbang emisi kedalam lingkungan.

Tabel 3.3.1.
Jumlah Penggunaan Bahan Bakar Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Penggunaan Bahan Bakar	Gas	LPG	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten	4.864,00	3.284.007,00	40.374.202,99	53.410.783,05

Sumber: Olahan Tabel-31. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Emisi juga dapat berasal dari pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya). Pengolahan sampah secara termal hanya dapat dilakukan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tidak mengandung B3, Limbah B3, kaca, Poli Vinyl Clorida (PVC), dan aluminium foil. Bagi usaha/kegiatan yang melakukan pengolahan sampah secara termal, wajib melakukan pemantauan emisi untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu emisi, dan melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekitar lokasi usaha/kegiatannya.

- c) Pencemaran oleh emisi sumber bergerak yang berasal dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Setiap tahunnya terjadi peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, ditandai dengan jumlah penjualan kendaraan bermotor. Bertambahnya jumlah kendaraan akan berimplikasi terhadap bertambahnya pemakaian bahan bakar dan penyediaan sarana dan prasarana jalan, serta penyediaan tempat sarana transportasi. Bahan bakar yang tidak ramah



lingkungan dan kendaraan yang tidak ramah lingkungan dapat memicu peningkatan pencemaran udara.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dirlantas Padang untuk penjualan kendaraan bermotor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya diperoleh data seperti pada Tabel.3.3.2. Bahwasanya penjualan kendaraan bermotor tahun 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah kendaraan bermotor yang tercatat selama 4 (empat) tahun terakhir sudah meningkat pesat, total per-tahunnya yaitu sebanyak 5.556 unit tahun 2013, 6.288 unit tahun 2014, 4.396 unit tahun 2015 dan 4.332 unit tahun 2016.

Tabel 3.3.2.
Jumlah Penjualan Kendaraan Bermotor Tahun 2013 Sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (unit)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kendaraan	6.426	7.270	5.070	4.849

Sumber: Olahan Tabel-32A. Lampiran Dokumen IKPLH Kabupaten Dharmasraya, 2016

Tabel 3.3.3.
Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2010 Sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Kendaraan	Jumlah (unit)						
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kabupaten	50,147.00	31,173.00	57,673.00	35,508.00	33,403.00	5,897.00	4,849.00

Sumber: Olahan Tabel-32B. Lampiran Dokumen IKPLH Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Untuk menguji kelayakan kendaraan angkutan diperlukan uji KIR, namun jumlah angkutan yang melakukan uji KIR tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada. Pada Tabel.3.3.3. merupakan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Dharmasraya mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Jumlah Kendaraan yang Uji KIR pada tahun 2016 sebanyak 1.163 unit. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kendaraan angkutan yang

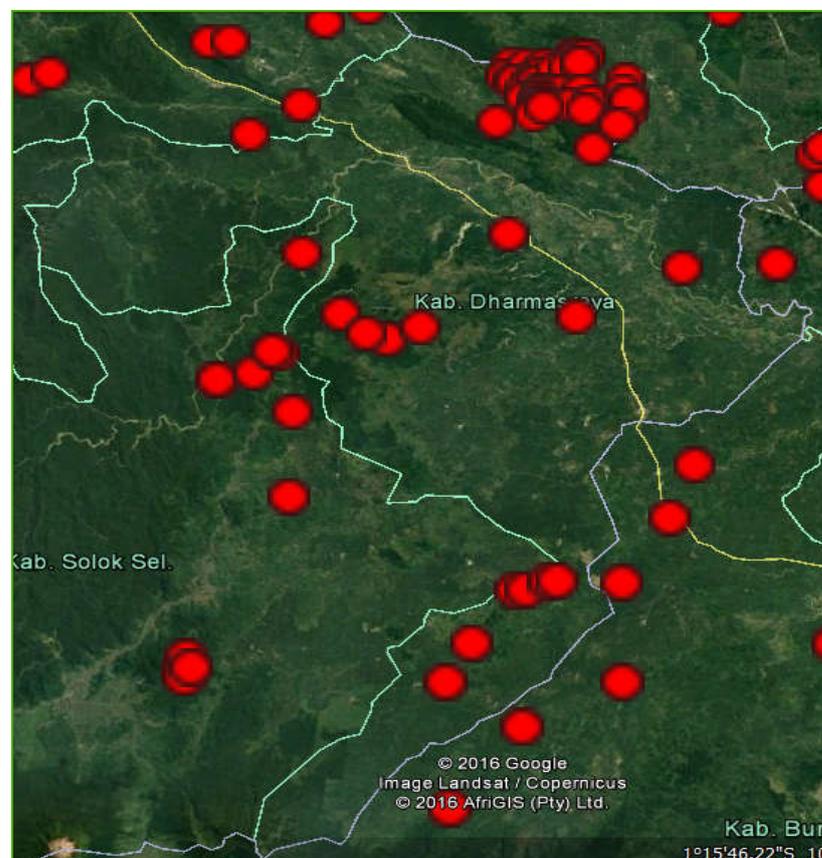


beroperasional telah lulus uji KIR dan memiliki kelayakan operasional. Kendaraan yang tidak layak operasional berarti tidak lulus terhadap uji beberapa parameter emisi yang telah ditetapkan dalam PermenLH nomor 05 tahun 2005 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama dan PermenLH nomor 04 tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Sedangkan untuk udara ambien lingkungan harus memenuhi baku mutu sesuai dengan PP nomor 41 Tahun 1999. (Sumber: *Olahan Tabel-32A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016*).

- d) Kebakaran hutan atau lahan yang dipicu oleh pembukaan lahan baru dan ditemukannya titik panas dan titik api pada beberapa lokasi di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 harus diwaspadai, karena berdampak terhadap perubahan kualitas udara.

Gambar 3.3.1.

Citra Satelit Sebaran Titik Panas Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



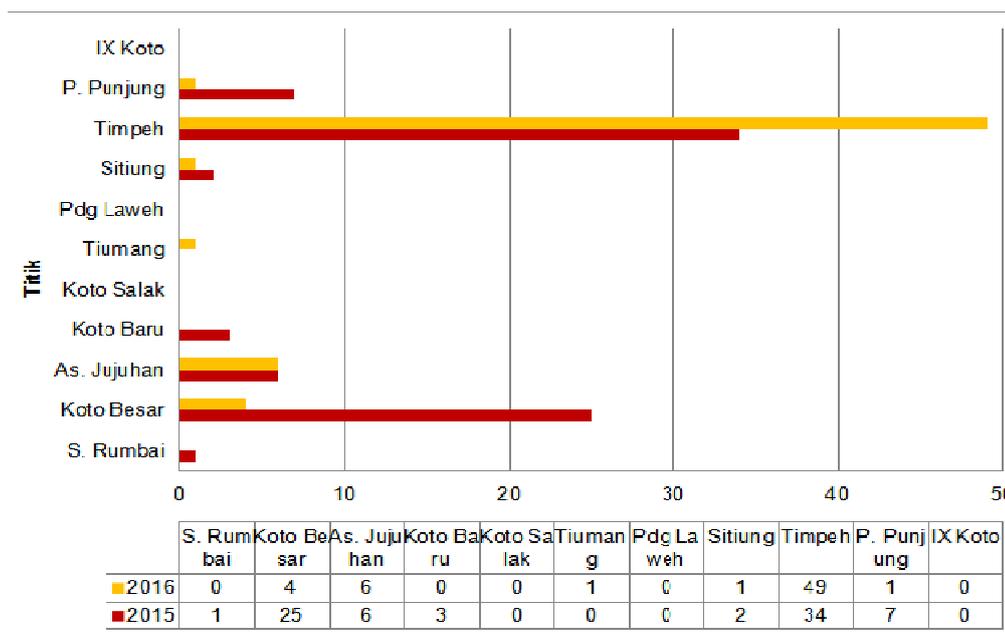
Sumber: <http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran>, 2016.





Pada Gambar 3.3.1. dan Gambar 3.3.2 terlihat hasil pemantauan sebaran titik panas tahun 2016 dan jumlah sebaran titik panas tahun 2015 dan tahun 2016, dengan menggunakan hasil interpretasi dari citra satelit NOAA (ASMC) dan LAPAN (MODIS dan NPP) yang ditampilkan pada website <http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran>, atas kerjasama antara Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK RI, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) dan LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional). Selama tahun 2016 telah ditemukan 62 (enam puluh dua) titik panas, sedangkan pada tahun 2015 ditemukan 80 (deapan puluh) titik panas yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Jumlah titik panas yang terdeteksi banyak terdapat di Kecamatan Timpeh, Koto Besar, Asam Jujuhan dan Pulau Punjung. Titik panas yang terdeteksi umumnya berada pada lahan hutan, lahan perkebunan dan lahan terbuka. (Sumber: Olahan Tabel-39E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.3.2.
Jumlah Sebaran Titik Panas Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-39E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

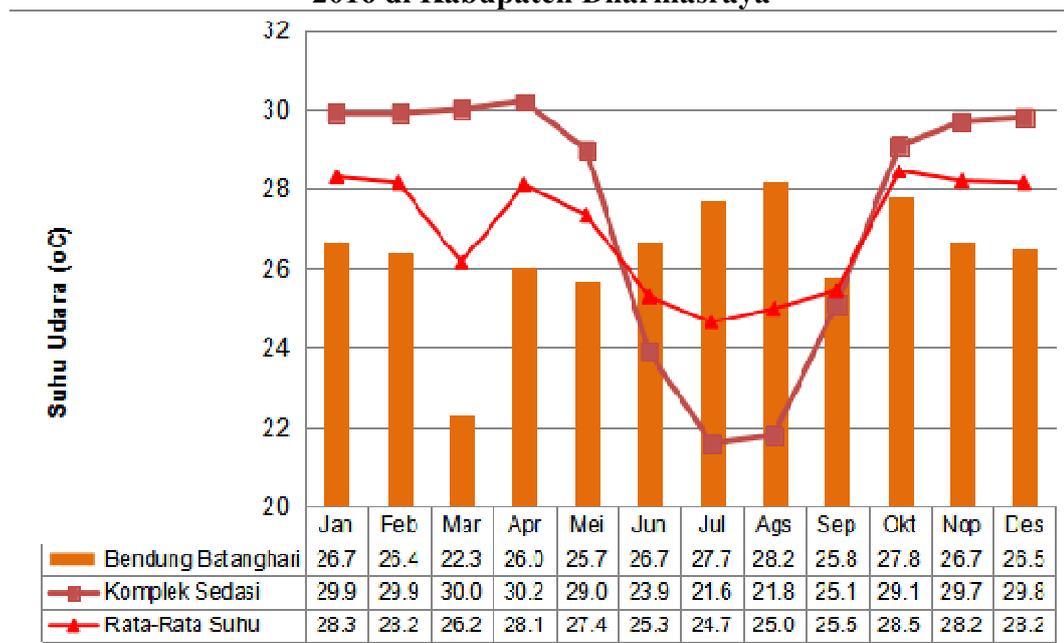


Adapun kondisi lingkungan yang terjadi akibat tekanan/pressure yang timbul selama tahun 2016 akan diungkapkan berdasarkan informasi kondisi kualitas udara, seperti suhu udara rata-rata bulanan, kualitas air hujan, kualitas udara ambien, penggunaan bahan bakar, penjualan kendaraan bermotor dan perubahan penambahan ruas jalan, dengan melakukan perbandingan dengan baku mutu (standar/kriteria), perbandingan nilai antar lokasi dan antar waktu, serta analisis statistik sederhana menurut frekuensi, maksimum, minimum dan rata-rata hasil pengukuran kualitas udara ambien dan air hujan.

3.3.2. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan

Suhu udara adalah tingkat atau derajat ukuran energi kinetik dari kegiatan pergerakan molekul-molekul dalam atmosfer. Suhu udara sangat berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Banyak faktor yang mempengaruhi suhu udara seperti letak geografis, sinar matahari (lamanya penyinaran dan awan), dan kecepatan angin.

Gambar 3.3.3.
Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Pada Dua Stasiun Pemantauan Pada Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-28. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





Pengamatan suhu udara bulanan dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016, yang dipantau melalui dua stasiun pemantauan yang terdapat di Bendungan Batanghari Kecamatan Pulau Punjung dan Kompleks Sedasi PSDA Kecamatan Pulau Punjung. Pada Gambar 3.3.3. dapat dilihat trend perubahan suhu udara rata-rata bulanan. Suhu udara rata-rata bulanan yang terpantau pada Stasiun Bendungan Batanghari terlihat fluktuatif yaitu berkisar antara 22,30°C sampai 28,2°C. Sedangkan suhu udara rata-rata bulanan yang terpantau pada Stasiun Komplek Sedasi Pulau Punjung berkisar antara 21,6°C sampai 30,20°C, lebih tinggi 2°C dibanding Stasiun Bendungan Batanghari. Suhu terendah terdeteksi 21,6°C pada bulan Juli dan suhu tertinggi terdeteksi 30,2°C pada bulan Maret.

Terjadi penurunan suhu udara rata-rata bulanan pada tahun 2016, dengan suhu udara rata-rata pertahun sekitar 26,94 °C

Jika dirata-ratakan suhu udara rata-rata bulanan di Kabupaten Dharmasraya berkisar antara 25,0°C sampai 28,5°C. Pada Tabel 3.3.4. terlihat rata-rata suhu udara per-tahun yaitu 26,94°C, maksimum 29,20°C dan minimum 21,95°C. Hal ini berbanding lurus dengan tipe iklim dari nilai curah hujan bulanan yaitu tipe sangat basah, karena juga terpantau suhu rata-rata cukup rendah.

Tabel 3.3.4.
Analisis Statistik Sederhana Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Pada Tahun 2016

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bendungan Batanghari, Pulau Punjung	22,30	26,38	28,20
2	Komplek Sedasi, Pulau Punjung	21,60	27,50	30,20
	Rata-Rata Suhu Udara	21,95	26,94	29,20

Sumber: Olahan Tabel-28. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





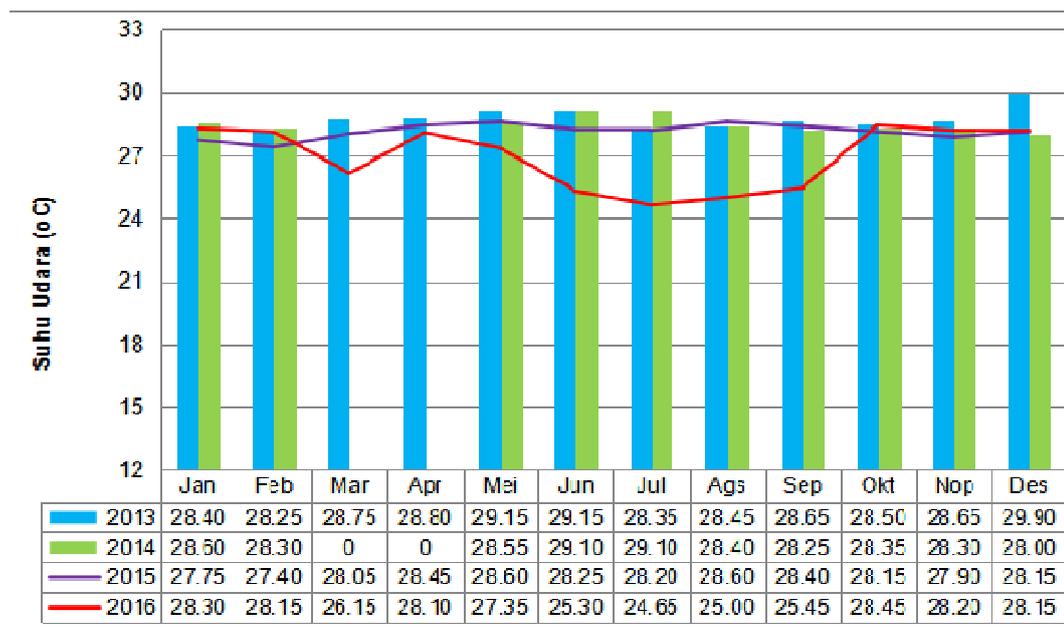
Pada Tabel 3.3.4. dan Gambar 3.3.4. dapat dilihat perbandingan suhu udara rata-rata bulanan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi penurunan suhu udara rata-rata bulanan yang terpantau, dimana pada tahun 2013 berkisar antara 28,25°C sampai 29,90°C, pada tahun 2014 berkisar antara 28,00°C sampai 29,10°C, pada tahun 2015 menjadi berkisar antara 27,40°C sampai 28,60°C, dan sedangkan pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 25,00°C sampai 28,50°C. Disimpulkan bahwa telah terjadi penurunan suhu udara rata-rata perbulan sebesar 1,40°C selam kurun waktu 4 (empat) tahun.

Tabel 3.3.5.
Analisis Statistik Sederhana Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya

No	Tahun	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Minimum	28,25	28,00	27,40	24,65
2	Rata-Rata	28,75	28,50	28,16	26,94
3	Maksimum	29,90	29,10	28,60	28,45

Sumber: Olahan Tabel-28. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.3.4.
Perbandingan Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-28. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

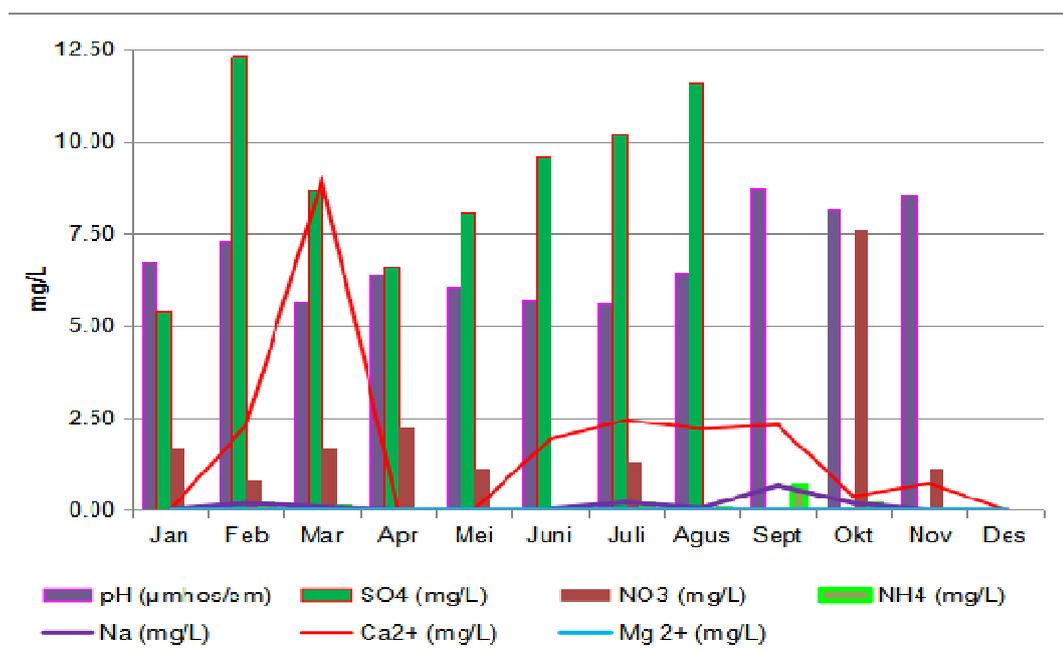


3.3.3. Kualitas air Hujan

Badan dunia WMO (*World Meteorologi Organization*) menyatakan bahwa batas nilai rata-rata air hujan secara internasional adalah sebesar 5,6 yang merupakan nilai yang dianggap normal atau hujan alami. Jika pH air hujan lebih besar dari 5,6 maka hujan bersifat basa, dan jika pH lebih rendah dari 5,6 maka hujan bersifat asam, namun jika pH air hujan lebih rendah dari 4,5, maka dinamakan hujan asam.

Pemantauan kondisi kualitas air hujan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember 2016 untuk parameter pH, Daya Hantar Listrik, Sulfat (SO_4), Nitrat (NO_3), logam Krom (Cr), Amonium (NH_4), logam Natrium (Na), ion Kalsium (Ca^{2+}), ion Magnesium (Mg^{2+}). Kualitas air hujan pada bulan Desember 2016 tidak dapat dilakukan pengambilan sampel dikarenakan curah hujan yang turun tidak mencukupi untuk diambil sampelnya. Hasil pengukuran beberapa parameter kualitas air hujan tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 3.3.5.

Gambar 3.3.5.
Hasil Analisis Parameter Kualitas Air Hujan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-29. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





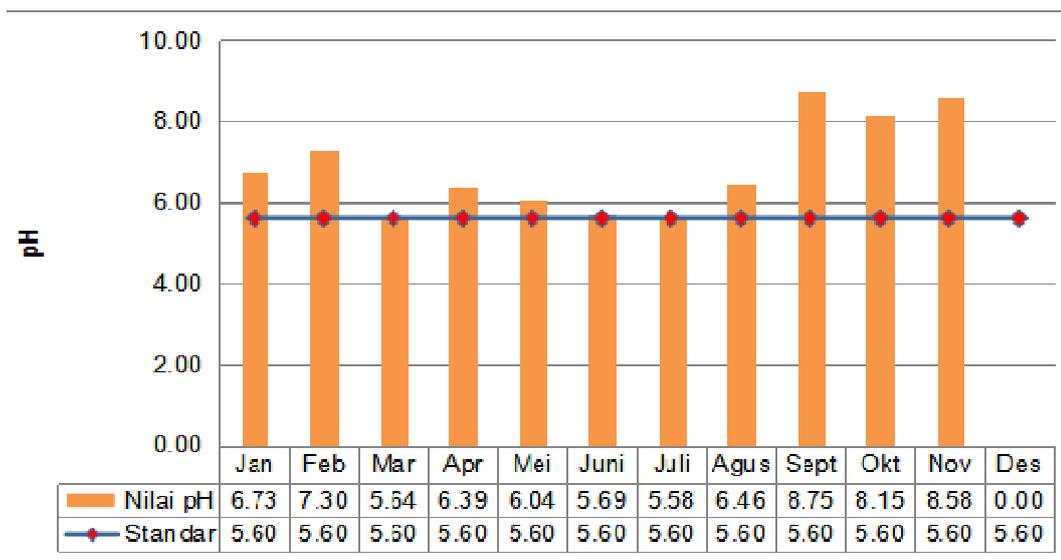
Tabel 3.3.6.
Analisis Statistik Kualitas Air Hujan Tahun 2016

Analisis Statistik	pH (µmhos /cm)	DHL (mg/L)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Cr (mg/L)	NH ₄ (mg/L)	Na (mg/L)	Ca ²⁺ (mg/L)	Mg ²⁺ (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Minimum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-Rata	6,85	6,60	1,96	1,89	< 0,03	0,17	3,60	2,65	< 0,2
Maksimum	8,75	12,30	7,63	9,96	< 0,03	0,66	3,60	9,00	< 0,2

Sumber: Olahan Tabel-29. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Tabel 3.3.6. terlihat hasil analisis statistik sederhana dari kualitas air hujan pada tahun 2016. Nilai rata-rata kualitas air hujan untuk masing-masing parameter berturut-turut, yaitu pH 6,85; Daya Hantar Listrik (DHL) 6,60 mg/L; SO₄ 1,96 mg/L; NO₃ 1,89 mg/L; Cr <0,03 mg/L; NH₄ 0,17 mg/L; Na 3,60 mg/L; Ca²⁺ 2,65 mg/L; dan Mg²⁺ <0,2 mg/L. Sedangkan nilai minimum adalah nol karena beberapa sampel dibawah nilai deteksi limit alat (LOD). Sementara itu, nilai maksimum dari hasil analisis kualitas air hujan masing-masingnya adalah pH 8,75; DHL 12,30 mg/L; SO₄ 7,63 mg/L; NO₃ 9,96 mg/L; Cr <0,03 mg/L; NH₄ 0,66 mg/L; Na 3,60 mg/L; Ca²⁺ 9,00 mg/L; dan Mg²⁺ <0,2 mg/L. (Sumber: Olahan Tabel-29. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.3.6.
Perbandingan Nilai pH Air Hujan Terhadap Baku Mutu Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-29A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





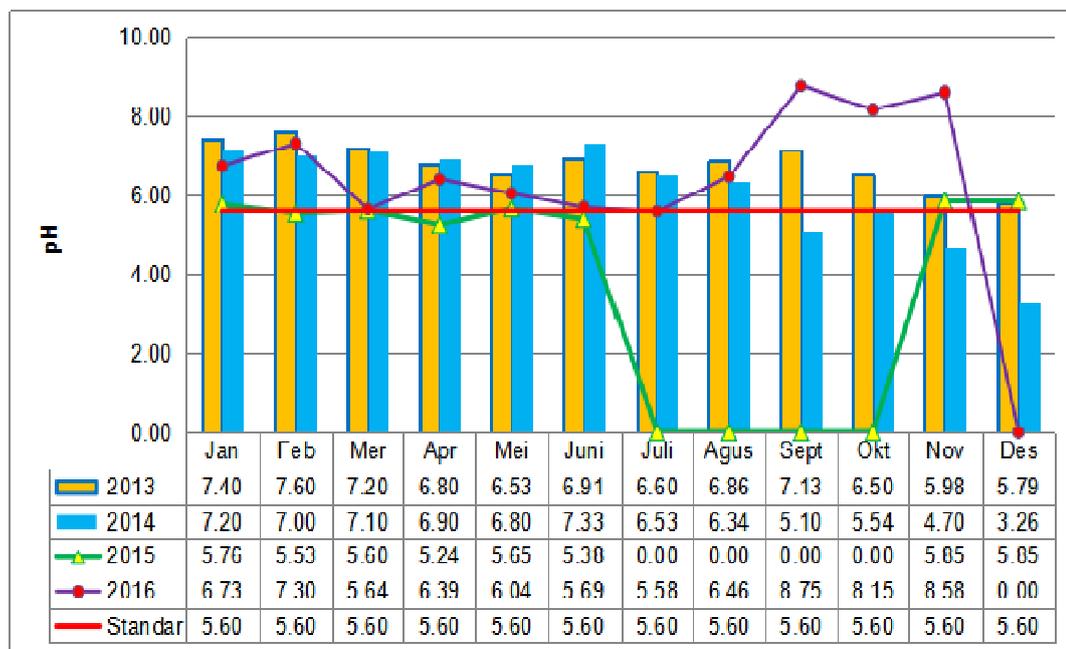
Berdasarkan perbandingan nilai pH air hujan terhadap baku mutu WMO ditetapkan 5,6 $\mu\text{mhos/cm}$, maka kualitas air hujan per-bulan semua berada diatas nilai 5,6 $\mu\text{mhos/cm}$, atau bersifat normal. Pada Gambar 3.3.6. terlihat trend nilai pH air hujan per-bulan dibandingkan terhadap standar WMO.

Pada Gambar 3.3.7. dan Gambar 3.3.8. terlihat perbandingan nilai pH air hujan bulanan dan nilai pH rata-rata tahunan dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Berdasarkan analisis data bahwa nilai pH air hujan per-tahunnya mengalami peningkatan sebesar 1,24 point lebih ke arah normal masing-masing nilai pH-nya yaitu

Hasil analisis air hujan tahun 2016 untuk beberapa parameter seperti pH, SO₄, NH₄, Na dan Ca²⁺ mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Air hujan hujan tahun 2016 ini sedikit lebih basa dibanding tahun 2015.

berkisar antara 5,98 sampai 7,60 $\mu\text{mhos/cm}$ pada tahun 2013, antara 3,26 sampai 7,24 $\mu\text{mhos/cm}$ pada tahun 2014, antara 5,24 sampai 5,85 $\mu\text{mhos/cm}$ pada tahun 2015, dan antara 5,58 sampai 8,75 $\mu\text{mhos/cm}$ pada tahun 2016.

Gambar 3.3.7.
Perbandingan Nilai pH Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016

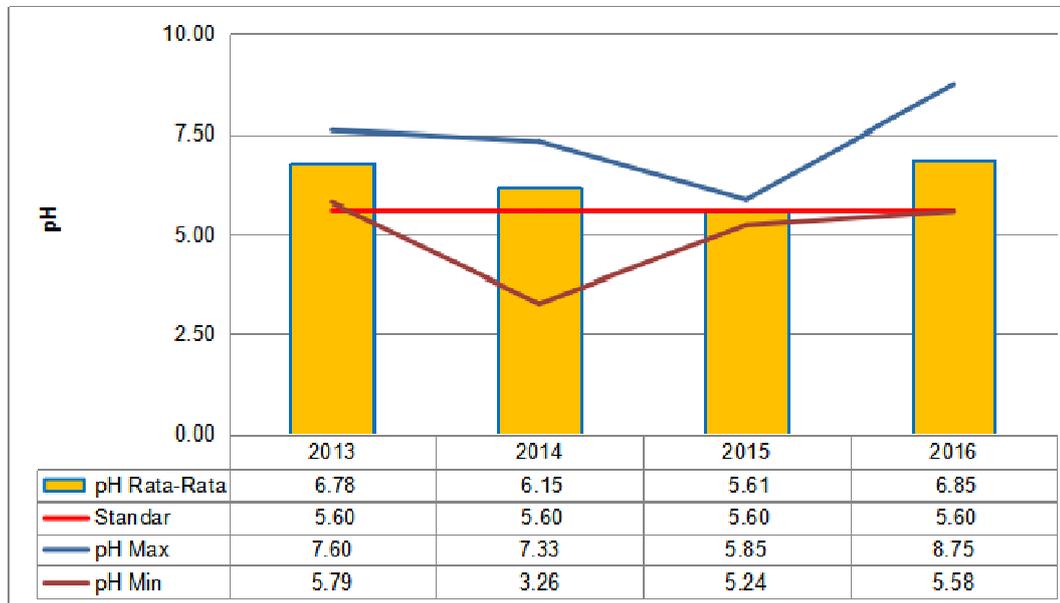


Sumber: Olahan Tabel-29B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





Gambar 3.3.8.
Perbandingan Nilai pH Rata-Rata Maksimum dan Minimum Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016



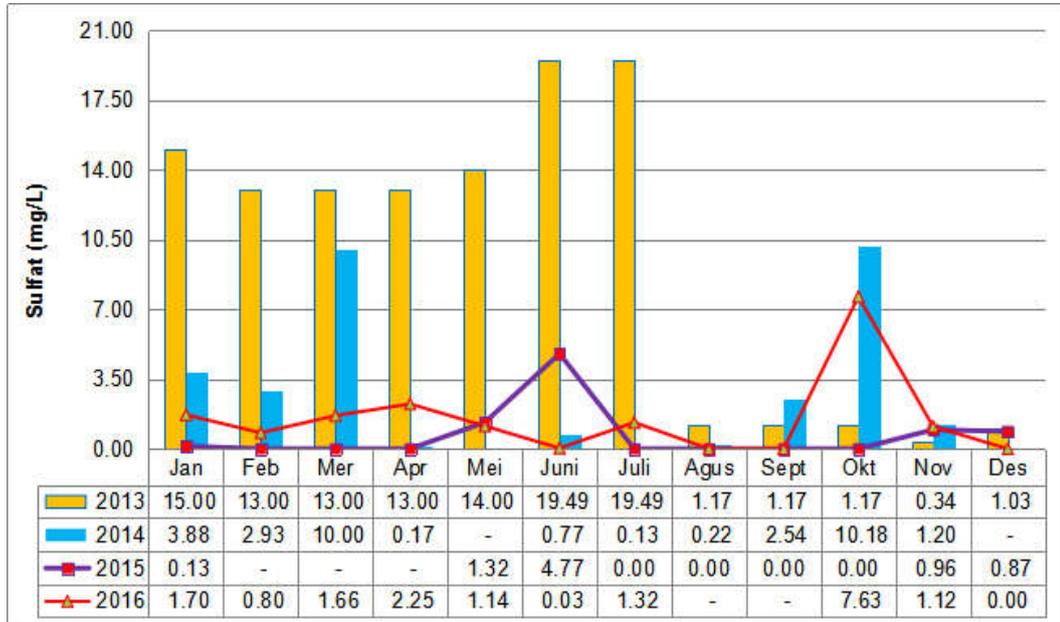
Sumber: Olahan Tabel-29B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Jika dilihat dari nilai pH tersebut, pH tahun 2016 terlihat normal. pH terendah terjadi sangat signifikan pada tahun 2014, namun tidak ada kemungkinan terjadinya deposisi asam di atmosfer selama tahun 2014, dan pada tahun 2015 masih dalam kisaran normal. Deposisi asam atau hujan asam menggambarkan jatuhnya asam yang ada di atmosfer berupa gas maupun cairan ke tanah, sungai, hutan dan tempat lainnya melalui tetes air hujan, kabut, embun, salju, butiran-butiran cairan (aerosol) ataupun jatuh bersama angin. Asam yang dihasilkan dari reaksi gas-gas SO_2 , NO_x dan HCl dengan reaksi yang cukup banyak dan kompleks merupakan penyebab deposisi asam.

Pada Gambar 3.3.9. terlihat perbandingan konsentrasi Sulfat air hujan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, yang menunjukkan terjadinya penurunan konsentrasi Sulfat yang sangat signifikan setiap tahunnya dan meningkat di tahun 2016 sebesar 0,35 mg/L. Konsentrasi sulfat tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014, sedangkan tahun 2015 dan tahun 2016 terlihat stabil, kecuali pada bulan Juni 2015 dan Oktober 2016.

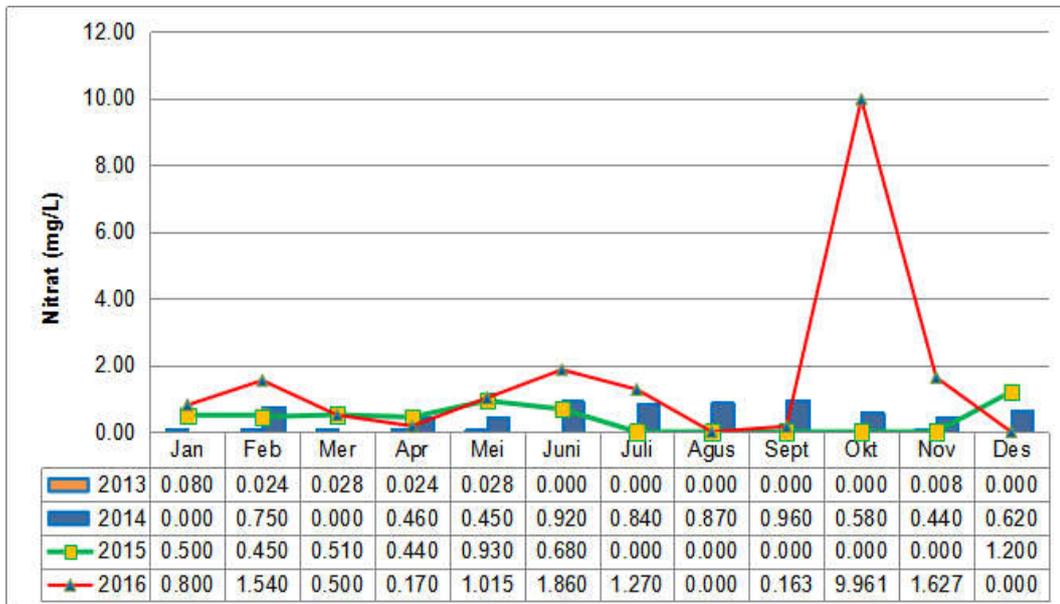


Gambar 3.3.9. Perbandingan Nilai Sulfat Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-29C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.3.10. Perbandingan Nilai Nitrat Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016



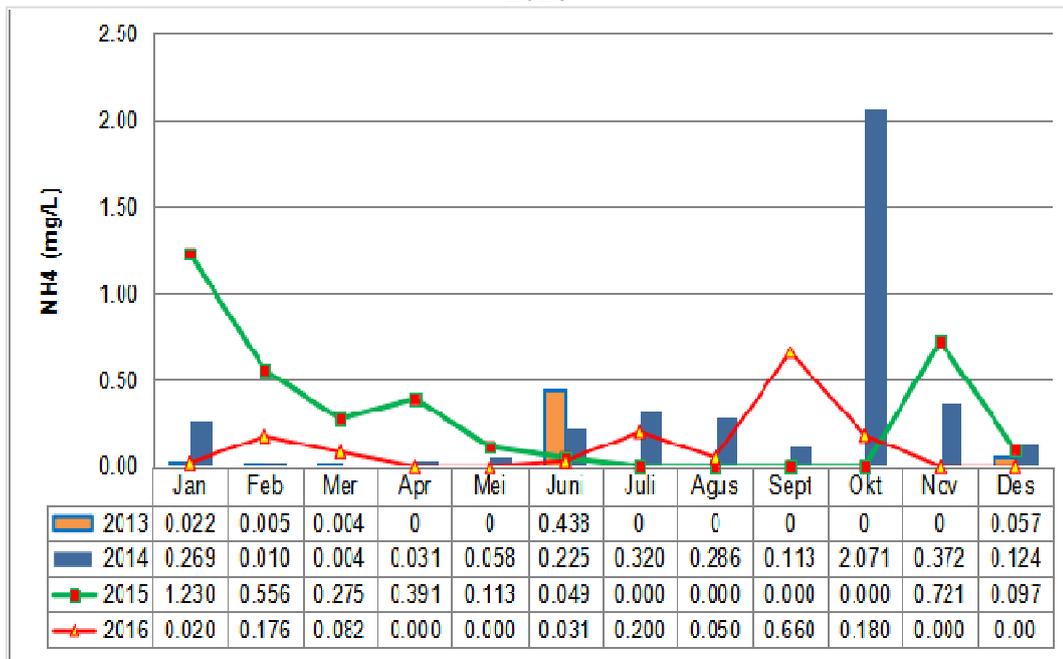
Sumber: Olahan Tabel-29D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Pada Gambar 3.3.10. memperlihatkan perbandingan konsentrasi Nitrat air hujan tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsentrasi Nitrat setiap tahunnya. Konsentrasi Nitrat air hujan berkisar dari tidak terdeteksi sampai 0,08 mg/L tahun 2013, pada tahun 2014 dari tidak terdeteksi sampai 0,920 mg/L, pada tahun 2015 berkisar antara <0,01 mg/L sampai 1,20 mg/L, dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 1,22 mg/L menjadi berkisar antara <0,01 mg/L sampai 9,961 mg/L.

Perbandingan konsentrasi Amonium air hujan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.3.11. yang menunjukkan terjadinya penurunan konsentrasi Amonium sebesar 0,25 mg/L pada tahun 2016 yaitu berkisar antara <0,014 mg/L – 0,660 mg/L. Sedangkan, konsentrasi amonium air hujan pada tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masingnya berkisaran antara <0,01 mg/L sampai 0,057 mg/L; 0,004 mg/L sampai 2,071 mg/L; dan 0,049 mg/L sampai 1,230 mg/L. Pada Gambar 3.3.12. merupakan perbandingan rata-rata konsentrasi untuk SO₄, NH₄, NO₃, logam Krom, Natrium, ion Kalsium dan ion magnesium.

Gambar 3.3.11.
Perbandingan Nilai Amonium Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016

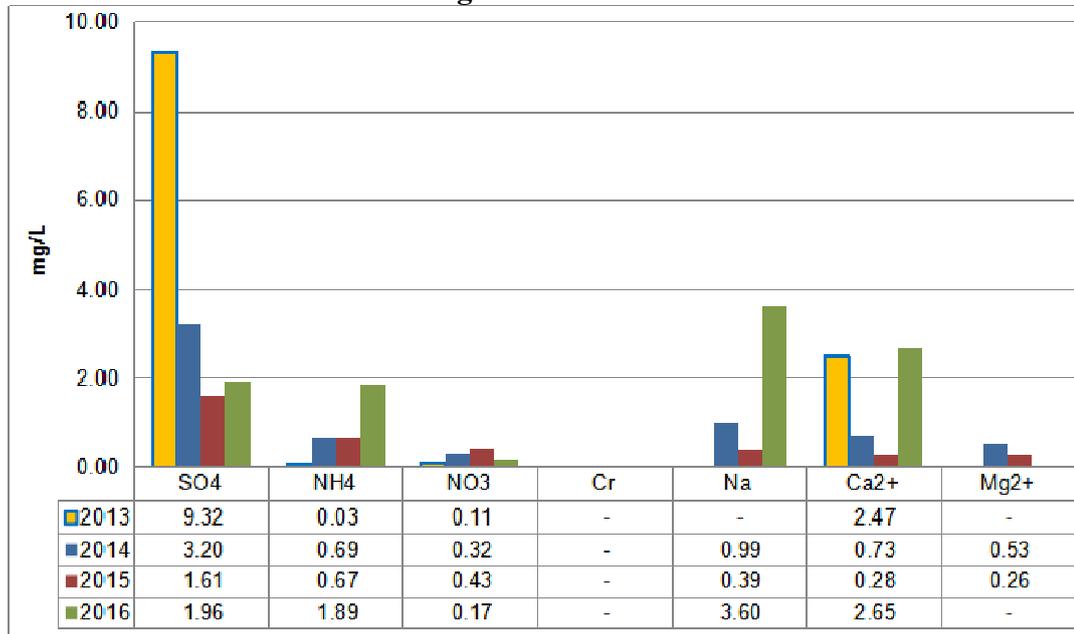


Sumber: Olahan Tabel-29E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.





Gambar 3.3.12.
Perbandingan Rata-Rata Parameter Kualitas Air Hujan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-29. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

3.3.4. Kualitas Udara Ambien

Tingkat atau mutu kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya dapat ditentukan melalui Indeks Pencemaran Udara (IPU), yang memberikan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Perhitungan nilai IPU berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu Sulfur Oksida (SOx) dan Nitrogen Oksida (NOx), yang dijadikan sebagai komponen IPU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Jadi kondisi dan perubahan kualitas udara suatu daerah dapat dijelaskan dan diinformasikan melalui IPU dengan cara yang lebih informatif dan mudah dipahami dan juga berguna sebagai masukan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Nilai IPU berkisar antara 0 sampai dengan 100. Nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk, sedangkan nilai ideal adalah 100 yang menggambarkan kualitas terbaik.



Adapun parameter yang ditetapkan untuk menentukan tingkat kualitas udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu, SO₂ (Sulfur Oksida), CO (Karbon Monoksida), NO₂ (Nitrogen Oksida), O₃ (Ozon), HC (Hidrokarbon), PM-10 (*Particulate Matter* <10 µm), PM-2,5 (*Particulate Matter* <2,5 µm), TSP (*Total Suspended Particulate* /Total Partikel Tersuspensi), logam Pb (Timbal), *Dustfall*, F (*Total Flouride*), *Flour Index*, Klorin dan Cl₂ (Klorin Dioksida), serta *Sulphat Index*. Pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 dilakukan pada lokasi depan Mesjid Al Ichwan Sungai Rumbai. Pemantauan kualitas udara ambien juga dilakukan di beberapa kecamatan yang memiliki sumber pencemaran. Pemantauan udara ambien dengan metode passive sampler juga dilakukan atas kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2016. Selain itu, pemantauan kualitas udara ambien di lokasi Perusahaan tahun 2016 juga dilakukan oleh PT.Tidar Kerinci Agung, dan Incasi Raya Group (PT.Incasi Raya Pangian, PT.Selago Makmur Plantation, PT.Bina Pratama Sakato Jaya, dan PT.Sumbar Andalas Kencana).

Kualitas udara ambien di Kabupaten Dharmasraya tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata Indeks Pencemaran Udara (IPU) sebesar 99,39, yang diukur dari nilai IPU SO₂ dan NO₂ masing-masing sebesar 99,58 dan 99,21.

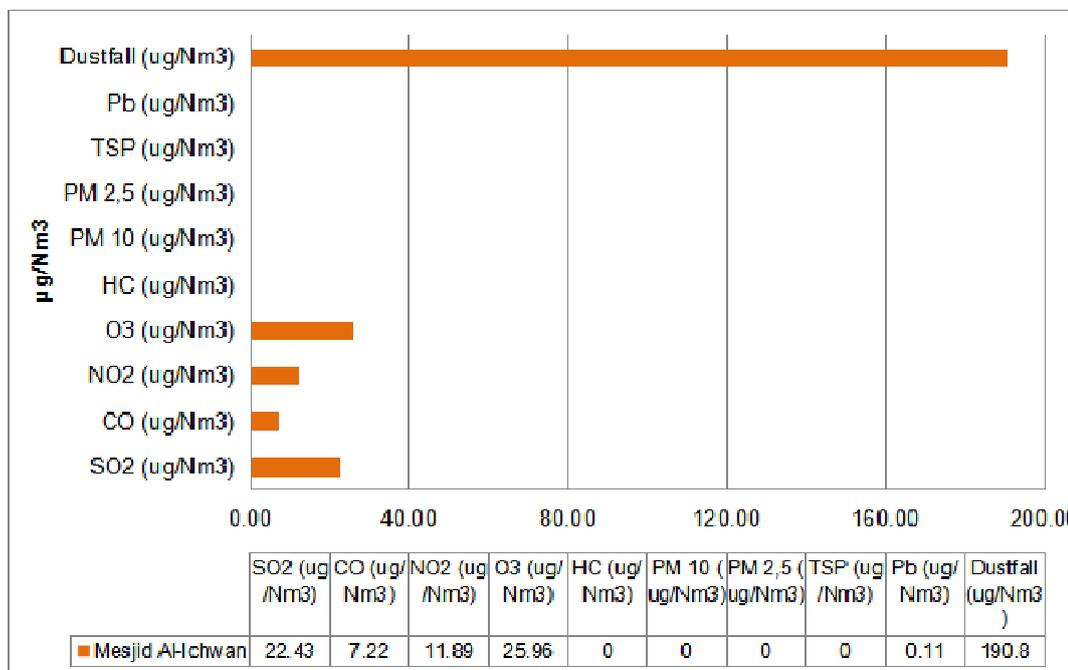
Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan pada beberapa lokasi, yaitu satu lokasi depan Mesjid Al Ichwan Sungai Rumbai oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dan 8 (delapan) lokasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, masing-masing untuk parameter SO₂, CO, NO₂, O₃, HC, PM 10, PM 2,5, TSP, Pb, *Dustfall*, Total Flourides sebagai F, *Flour Index*, Khlorine dan Khlorine Dioksida, dan *Sulphat Index*, seperti yang terlihat pada Pada Gambar 3.3.13. dan Pada Gambar 3.3.14.





Pada Gambar 3.3.13. dapat dilihat beberapa paramater dari hasil pengukuran pada lokasi tersebut seperti SO₂, CO, NO₂, O₃, Pb, dan Dustfall terdeteksi dengan kosentrasi masing-masingnya yaitu sebesar 22,43 µg/Nm³; 7,22 µg/Nm³; 11,89 µg/Nm³; 25,96 µg/Nm³; 0,11 µg/Nm³; dan 190,8 µg/Nm³. Sedangkan untuk beberapa parameter lainnya tidak terdeteksi, seperti HC, PM10, PM2,5, TSP, Total Flourides, Fluor Index, Khlorine dan Khlorine Dioksida, serta Sulphat Index. (Sumber: Olahan Tabel-30. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.3.13.
Kualitas Udara Ambien Tahun 2016 di Masjid Al-Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya

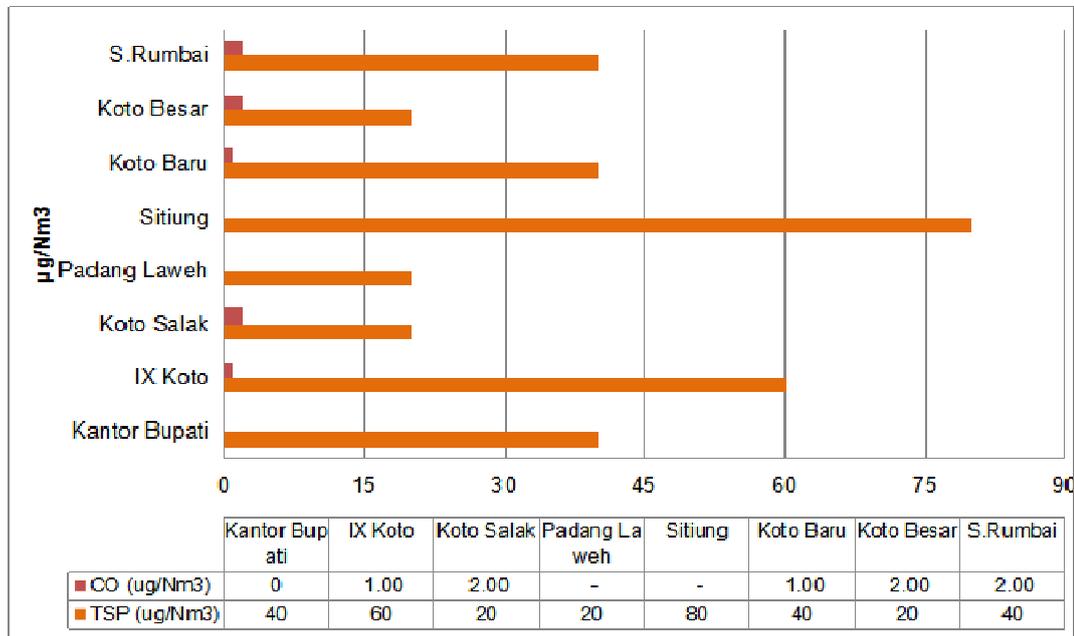


Sumber: Olahan Tabel-30. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Gambar 3.3.14. memperlihatkan bahwa pada Kecamatan Sitiung memiliki nilai TSP yang lebih tinggi dibanding kecamatan lain, hal ini disebabkan karena pada saat pemantauan jumlah kendaraan dan aktivitas cukup padat terjadi.



Gambar 3.3.14.
Perbandingan Kualitas Udara Ambien Tahun 2016 di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-30. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Tabel 3.3.7.
Perbandingan Parameter Kualitas Udara Ambien Yang Diukur di Mesjid Al-Ichwan Sei, Rumbai dengan Baku Mutu Tahun 2016

No	Parameter	Baku Mutu (PP No 41 Tahun 1999)	Hasil Analisa (µg/Nm ³)	Parameter yang melebihi Baku Mutu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SO ₂ (µg/Nm ³)	365,0	22,43	Tidak Ada
2	CO (µg/Nm ³)	10,000,0	7,22	Tidak Ada
3	NO ₂ (µg/Nm ³)	150,0	11,89	Tidak Ada
4	O ₃ (µg/Nm ³)	235,0	25,96	Tidak Ada
5	TSP (µg/Nm ³)	230,0	ttd	Tidak Ada
6	Pb (ug/Nm ³)	-	0,11	Tidak Ada
7	Dustfall (ug/Nm ³)	-	190,8	Tidak Ada

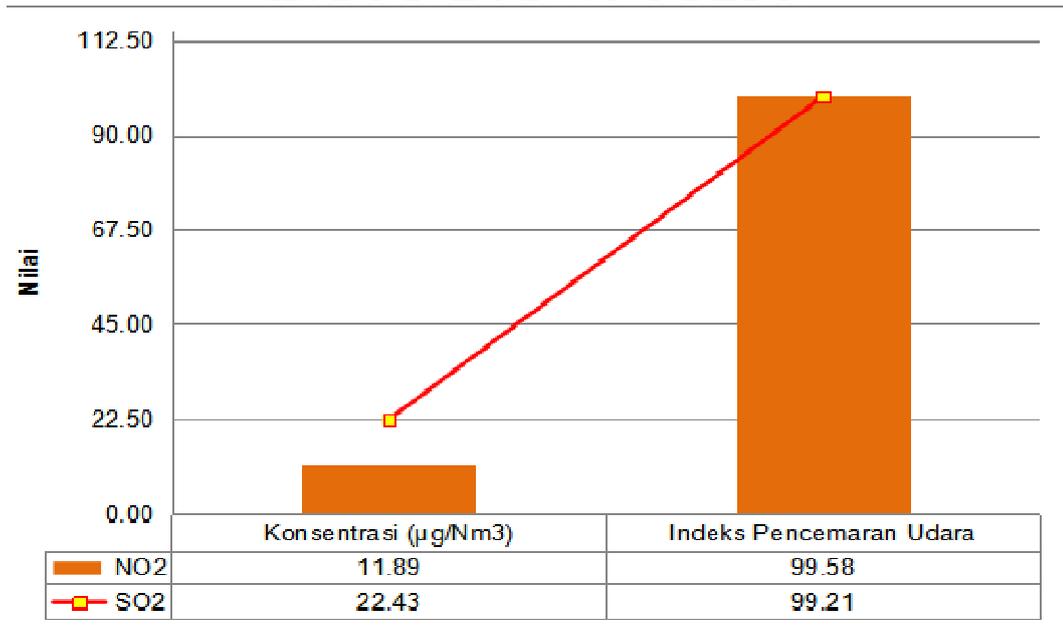
Sumber: Olahan Tabel 30A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Hasil analisis pemantauan tersebut untuk beberapa parameter seperti SO₂, CO, NO₂, O₃, TSP, Pb dan Dustfall dapat dilihat pada Tabel 3.3.7. Jika dibandingkan dengan nilai baku mutu berdasarkan PP 41/1999 tentang



Pengendalian Pencemaran Udara, menunjukkan bahwa tidak ada parameter yang melebihi nilai baku mutu (baku mutu udara ambien $SO_2 \leq 365 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, $CO \leq 10,000 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, $NO_2 \leq 150 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, $O_3 \leq 235 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, dan $TSP \leq 230 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$).

Gambar 3.3.15.
Indeks Pencemaran Udara Tahun 2016



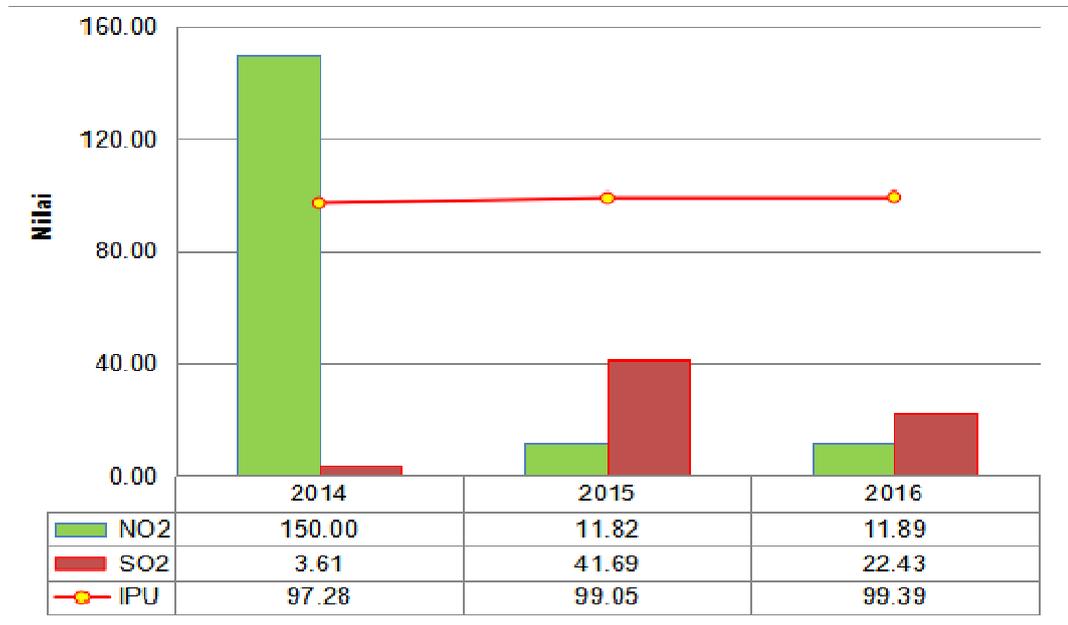
Sumber: Olahan Tabel-30. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Gambar 3.3.15. memperlihatkan perbandingan konsentrasi SO_2 dan NO_2 dan nilai IPU dari SO_2 dan NO_2 . Perhitungan Indeks Pencemaran Udara (IPU) dilakukan terhadap parameter SO_2 dan NO_2 . Hasil IPU menjelaskan bahwa nilai IPU SO_2 sebesar 99,59 dan IPU NO_2 sebesar 99,21, atau dengan rata-rata IPU 99,39. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencemaran udara di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 masih tergolong sangat baik, mendekati nilai 100, (Sumber: Olahan Tabel-30B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Pada Gambar 3.3.16. merupakan perbandingan nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU) tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya, yang menunjukkan bahwa nilai IPU meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Hal ini berarti terjadi peningkatan kualitas udara ambien di Kabupaten Dharmasraya.



Gambar 3.3.16.
Perbandingan Indeks Pencemaran Udara Tahun 2014 Sampai Dengan
Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-30C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

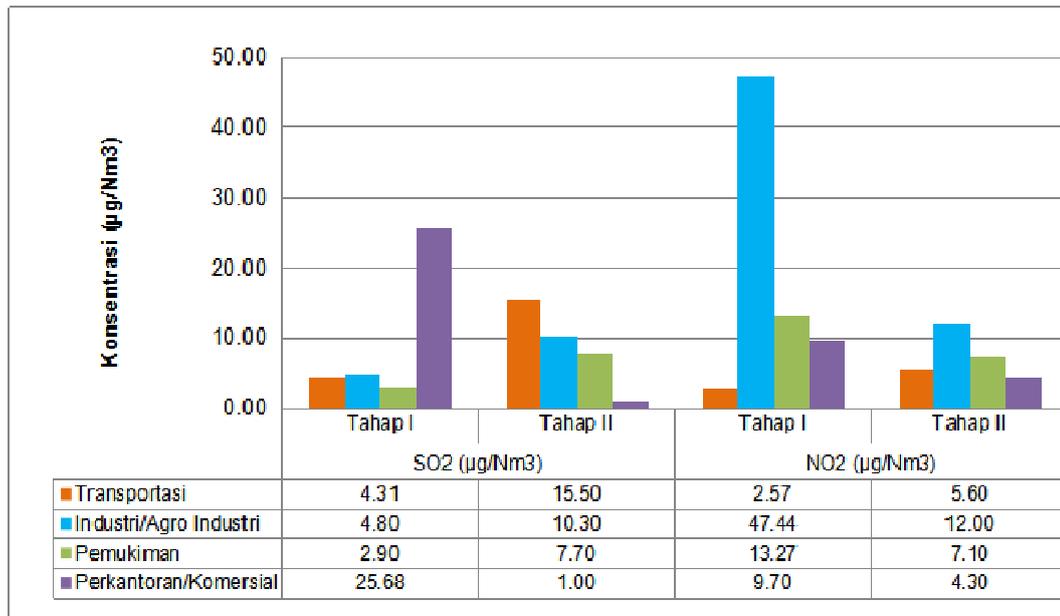
Walau pada tahun 2016 masih ditemukan adanya sebaran titik panas dan adanya kebakaran lahan di Kabupaten Dharmasraya, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan kualitas udara. Adanya sebaran titik panas ataupun titik api selalu muncul setiap tahun, hal ini terjadi karena adanya aktifitas pembukaan lahan baru dengan cara membakar dan meninggalkan bekas bakaran sehingga dapat menjalar dan meluas ke areal lahan lainnya.

Pemantauan kualitas udara ambien Tahap I dan Tahap II dilakukan dengan metode passive gas dengan menggunakan alat passive sampler untuk pengukuran konsentrasi SO₂ dan NO₂ pada lokasi transportasi (Pasar Pulau Punjung), kawasan industri (Koto Padang), perkantoran (Kantor Bupati) dan perumahan (Perumnas Sikabau), dengan hasil seperti yang terlihat pada Gambar 3.3.17. Hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis tersebut masih memenuhi baku mutu udara ambien sesuai dengan PP 41/1999 untuk baku mutu SO₂ ≤365 µg/Nm³, dan NO₂ ≤150 µg/Nm³, (Sumber: Olahan Tabel-30D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016). Pada Tabel 3.3.8. merupakan perbandingan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan metoda passive sampler



tahun 2015 dan tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya, yang menunjukkan adanya peningkatan nilai IKU dari 70,51% menjadi 84,17%.

Gambar 3.3.17.
Kualitas Udara Hasil Pengukuran Passive Sampler Tahap I dan Tahap II Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-30D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Tabel 3.3.8.
Perbandingan Indeks Kualitas Udara Hasil Pengukuran Passive Sampler Tahun 2015 dan Tahun 2016

No	Tahun	Parameter	Rata-Rata	Baku Mutu	Index	Indeks Kualitas Udara (IKU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2015	NO2	7,82	40	0,196	70,51
		SO2	21,33	20	1,066	
2	2016	NO2	12,75	40	0,319	84,17
		SO2	9,02	20	0,451	

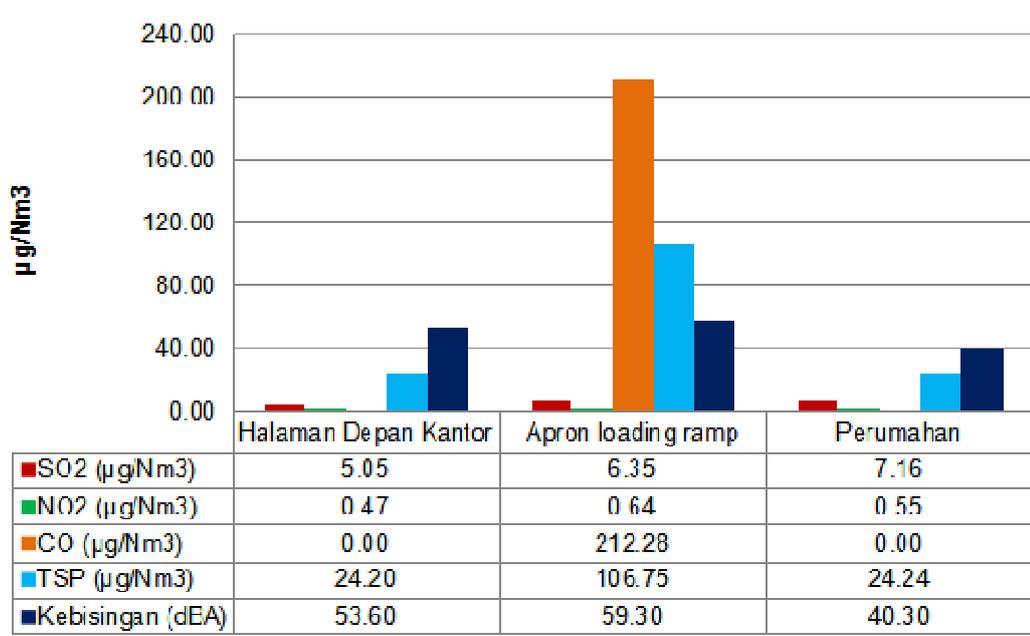
Sumber: Olahan Tabel-30E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pemantauan kualitas udara ambien untuk usaha/kegiatan dilakukan pada 4 (empat) Perusahaan Incasi Group yaitu PT.Incasi Raya Pangian, PT.Selago Makmur Plantation, PT.Bina Pratama Sakato Jaya, dan PT.Sumbar Andalas Kencana, masing-masingnya dilakukan untuk lokasi halaman depan kantor, apron



loading ramp, dan perumahan, serta jalur lintas CPO dan buah, Data pemantauan ini diperoleh dari laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester I masing-masing perusahaan, Hasil pemantauan kualitas udara ambien menunjukkan bahwa konsentrasi dari parameter SO₂, NO₂, CO, TSP, dan kebisingan masing-masing perusahaan masih dalam standar baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 untuk baku mutu udara ambien (SO₂ ≤900 µg/Nm³, NO₂ ≤400 µg/Nm³, CO ≤30,000 µg/Nm³, dan TSP ≤230 µg/Nm³), dan Kep-48/MENLH/II/1996 untuk baku mutu tingkat kebisingan (≤70 dBA), (Sumber: Olahan Tabel-30F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).

Gambar 3.3.18.
Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Incasi Raya Pangian Tahun 2016

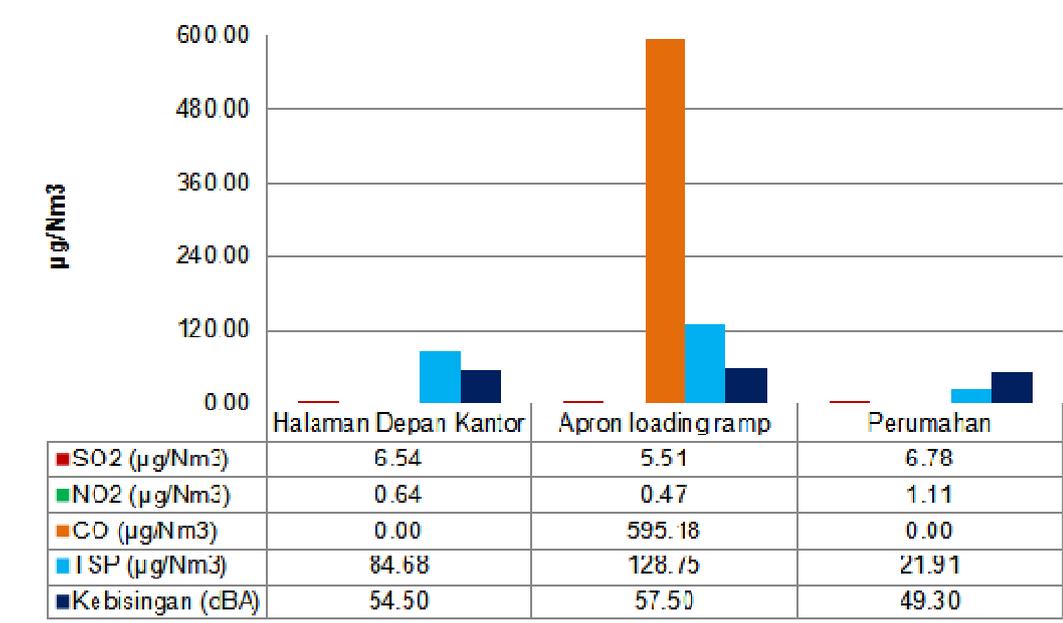


Sumber: Olahan Tabel-30F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pada Gambar 3.3.18. terlihat hasil pemantauan di PT. Incasi Raya Pangian dengan parameter SO₂, NO₂, CO, TSP dan kebisingan terdeteksi tertinggi pada lokasi apron loading ramp dengan konsentrasi masing-masingnya berurutan sebesar 6,35 µg/Nm³, 0,64 µg/Nm³, 212,28 µg/Nm³, 106,75 µg/Nm³ dan 59,30 dBA.



Gambar 3.3.19.
Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Selago Makmur Plantation Tahun 2016



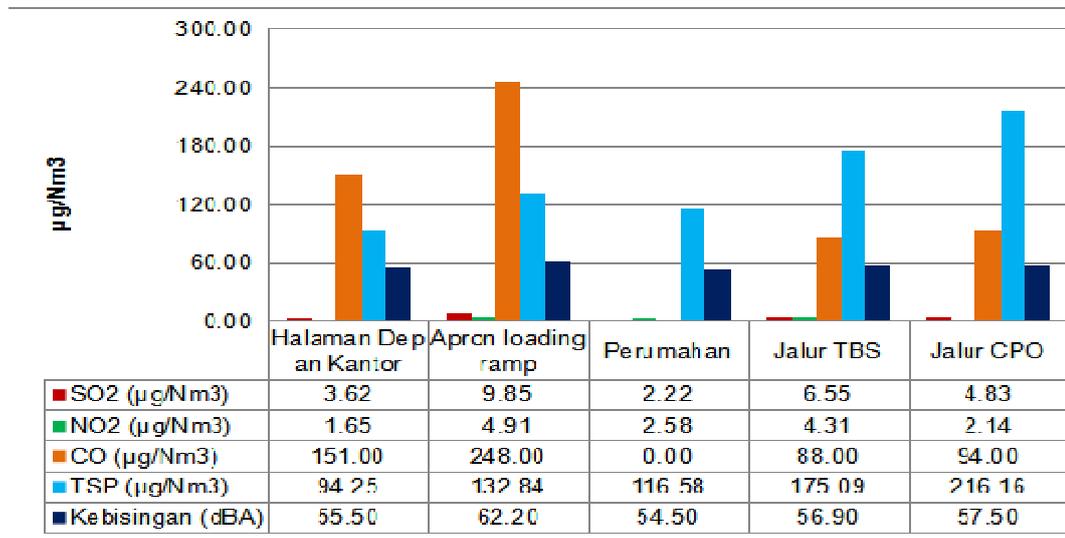
Sumber: Olahan Tabel-30F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Hasil pemantauan kualitas udara ambien PT.Selago Makmur Plantation terdeteksi untuk parameter SO₂ dan NO₂ tertinggi terdeteksi pada perumahan masing-masing 6,78 µg/Nm³ dan 1,11 µg/Nm³, seperti yang terlihat pada Gambar 3.3.19. Konsentrasi CO, TSP, dan Kebisingan terdeteksi tertinggi pada lokasi apron loading ramp dengan konsentrasi masing-masingnya sebesar 595,18 µg/Nm³, 128,75 µg/Nm³, dan 57,50 µg/Nm³.

Pemantauan kualitas udara ambien di PT.Bina Pratama Sakato Jaya dilakukan pada 5 (lima) lokasi, yaitu halaman depan kantor, apron loading ramp, perumahan, jalur TBS dan jalur CPO. Pada Gambar 3.3.20. terlihat bahwa konsentrasi untuk parameter SO₂, NO₂, CO dan Kebisingan tertinggi terdapat pada lokasi apron loading ramp dengan konsentrasi berurutan masing-masingnya adalah 9,85 µg/Nm³, 4,91 µg/Nm³, 248 µg/Nm³ dan 62,20 dBA. Sedangkan, konsentrasi TSP tertinggi terdeteksipada jalur CPO sebesar 216,16 µg/Nm³. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa semua parameter yang dipantau masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

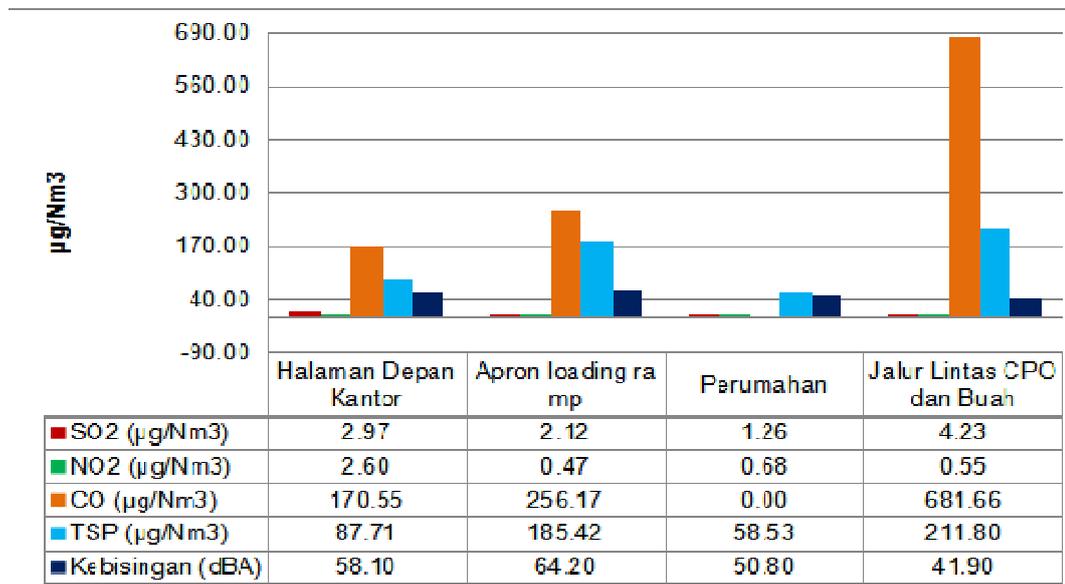


Gambar 3.3.20.
Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Bina Pratama Sakato Jaya Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-30F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.3.21.
Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Sumbar Andalas Kencana Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-30F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

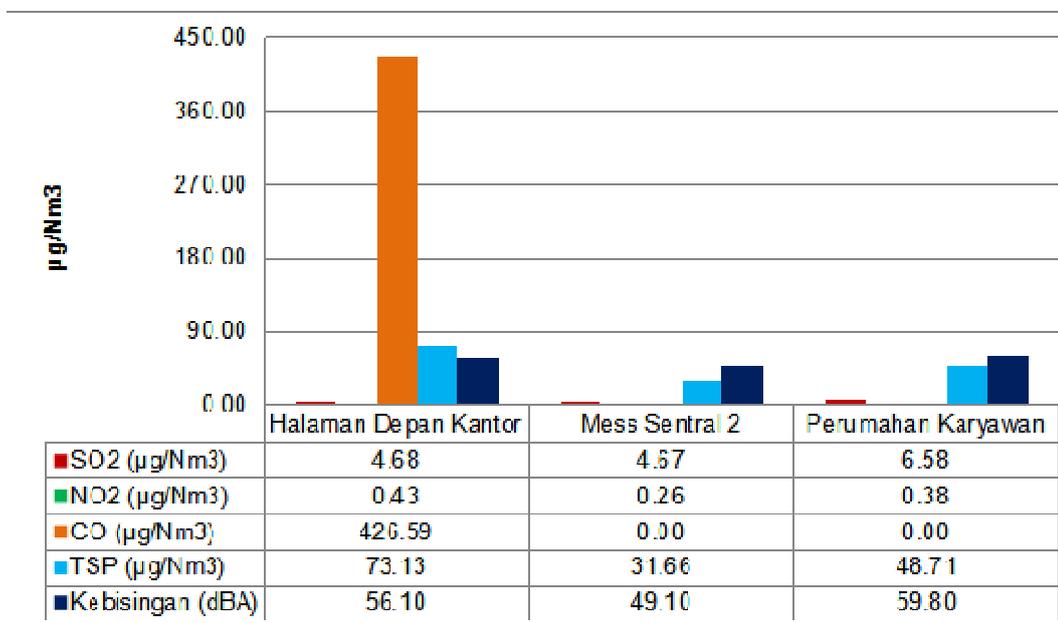
Pemantauan kualitas udara ambien di PT. Sumbar Andalas Kencana dilakukan pada 4 (empat) lokasi yaitu halaman depan kantor, apron loading ramp, perumahan, jalur lintas CPO dan buah. Pada Gambar 3.3.21. terlihat hasil pemantauan kualitas udara ambien di PT. Sumbar Andalas Kencana. Konsentrasi



SO₂, CO dan TSP tertinggi terdeteksi pada lokasi Jalur lintas CPO dan buah perumahan, yaitu sebesar 4,23 µg/Nm³, 681,66 µg/Nm³ dan 211,80µg/Nm³, Sedangkan konsentrasi NO₂ tertinggi terdeteksi pada lokasi halaman depan kantor aproan loading ramp sebesar 64,20 µg/Nm³. Sementara itu, kebisingan tertinggi terdeteksi pada aproan loading ramp yaitu sebesar 64,20 dBA pada jalur lintas CPO dan buah, Semua parameter yang diukur masing-masingnya masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Pemantauan kualitas udara ambien di PT. Tidar Kerinci Agung dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yaitu halaman depan kantor, mess sentral dan perumahan karyawan. Pada Gambar 3.3.22. terlihat hasil pemantauan kualitas udara ambien di PT. Tidar Kerinci Agung. Konsentrasi NO₂, CO, TSP dan Kebisingan tertinggi terdeteksi pada halaman depan kantor, yaitu sebesar 0,43 µg/Nm³, 426,59 µg/Nm³, 73,13µg/Nm³ dan 56,10µg/Nm. Sedangkan konsentrasi SO₂ tertinggi terdeteksi pada lokasi perumahan karyawan sebesar 6,58 µg/Nm³. Semua parameter yang diukur masing-masingnya masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

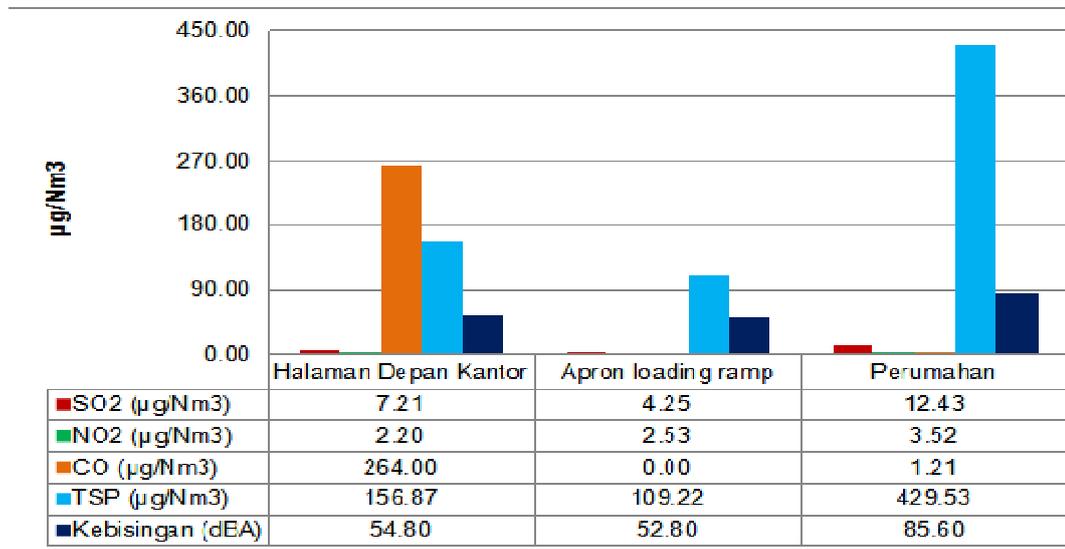
Gambar 3.3.22.
Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Tidar Kerinci Agung Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-30F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Gambar 3.3.23.
Kualitas Udara Ambien Lokasi PT. Transco Pratama Tahun 2016



Sumber: Olahan Tabel-30F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Pemantauan kualitas udara ambien di PT. Transco Pratama dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yaitu halaman depan kantor, Apron Loading Ramp dan perumahan karyawan. Pada Gambar 3.3.23. terlihat hasil pemantauan kualitas udara ambien yang mana hampir semua parameter terdeteksi tertinggi pada perumahan karyawan kecuali untuk parameter CO tertinggi pada lokasi Halaman Depan Kantor PT. Transco Pratama, yaitu dengan masing-masing konsentrasi SO₂, NO₂, TSP dan kebisingan pada perumahan karyawan yaitu sebesar 12,43 µg/Nm³, 3,53 µg/Nm³, 429,53 µg/Nm³ dan 86,60 dBA. Sedangkan konsentrasi CO tertinggi terdeteksi pada lokasi halaman depan kantor sebesar 1,21 µg/Nm³. Semua parameter yang diukur masing-masingnya masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

3.3.5. Respon Terhadap Upaya Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Udara di Kabupaten Dharmasraya

Respon atau tindakan yang dilakukan melalui kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas udara di Kabupaten Dharmasraya diantaranya:





- a) Respon terhadap pengaruh perubahan iklim yang dapat menimbulkan resiko bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan penyakit menular, dll yaitu Pemerintah Daerah bersama masyarakat ikut aktif terlibat dalam menggerakkan Program Kampung Iklim sebagai Program Nasional dengan menerapkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Kegiatan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim. (Sumber: Tabel-49. Lampiran Dokumen IKPLHD Tahun 2016).

Bentuk hasil dari kegiatan ini yaitu terbentuknya Kampung Iklim di Kenagarian sebagai Kampung yang memenuhi persyaratan sebagai Kampung Iklim dan dapat mengikuti seleksi Proklim di Tingkat Provinsi dan Nasional. Ada 2 (dua) Jorong yang mengikuti telah seleksi dan memperoleh penghargaan Proklim yaitu: Jorong Piruko Utara dan Jorong Padang Sidondang, Kecamatan Sitiung. (Sumber: Tabel-46. Lampiran Dokumen IKPLHD Tahun 2016).

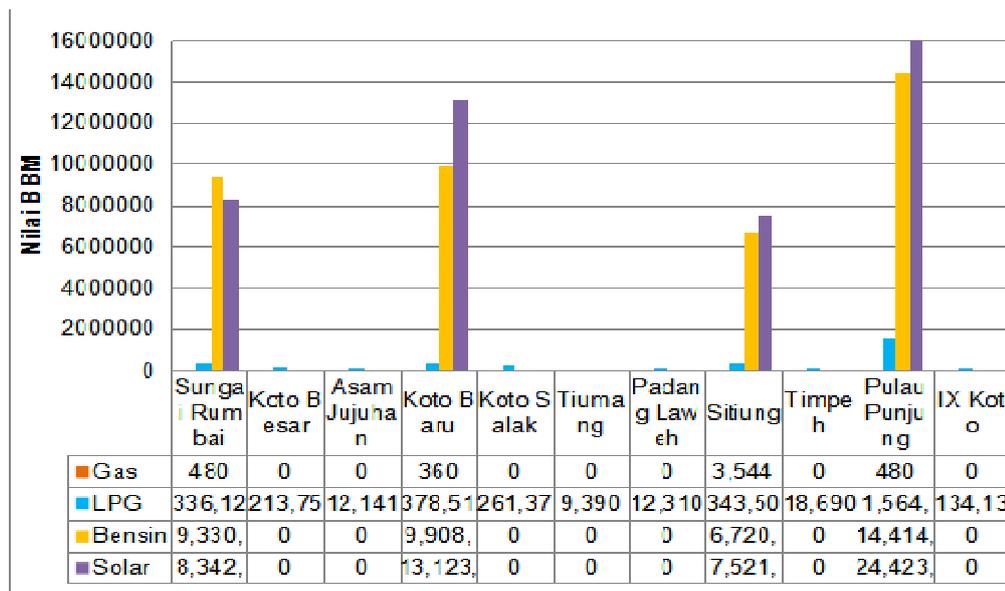
Masyarakat dibina untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dari lingkungan sekitarnya, seperti membuat sumur tadah hujan, sumur resapan dan lubang biopori, penanaman tanaman pelindung disekitar jorong tempat tinggal, menanam tanaman obat dan hortikultura sebagai tanaman pangan yang bisa ditanam disekitar perkarangan rumah seperti jahe, serai, cabe, tomat, dll; melakukan pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat kotoran sapi dengan pemanfaatan biodigester/biogas menjadi energi alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik dan api tungku memasak. Upaya lain yang telah dilakukan masyarakat yaitu mulai menerapkan pemilahan sampah dengan prinsip 3R, pemanfaatan sampah organik sebagai pupuk organik untuk tanaman perkarangan, karena sampah organik merupakan penyumbang gas metan di atmosfer.

- b) Respon terhadap upaya pengendalian pencemaran kualitas udara yang disebabkan oleh Pencemaran oleh emisi sumber bergerak yang berasal dari



penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu dengan melakukan pemantauan pasokan penggunaan bahan bakar di kabupaten dan perkiraan emisi yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Sedangkan pembatasan penggunaan BBM subsidi tidak signifikan berpengaruh terhadap penggunaan BBM, dan masih banyak yang menggunakan fasilitas BBM subsidi. Pada Gambar 3.3.24. dan pada Gambar 3.3.25. dapat dilihat konsumsi atau penggunaan BBM per-Bulan dan konsumsi BBM per-Kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, serta pada Tabel-31C. dan Tabel 31-D. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 terlihat daftar agen penjualan Gas dan Pertamina yang didominasi oleh agen penjualan BBM bersubsidi.

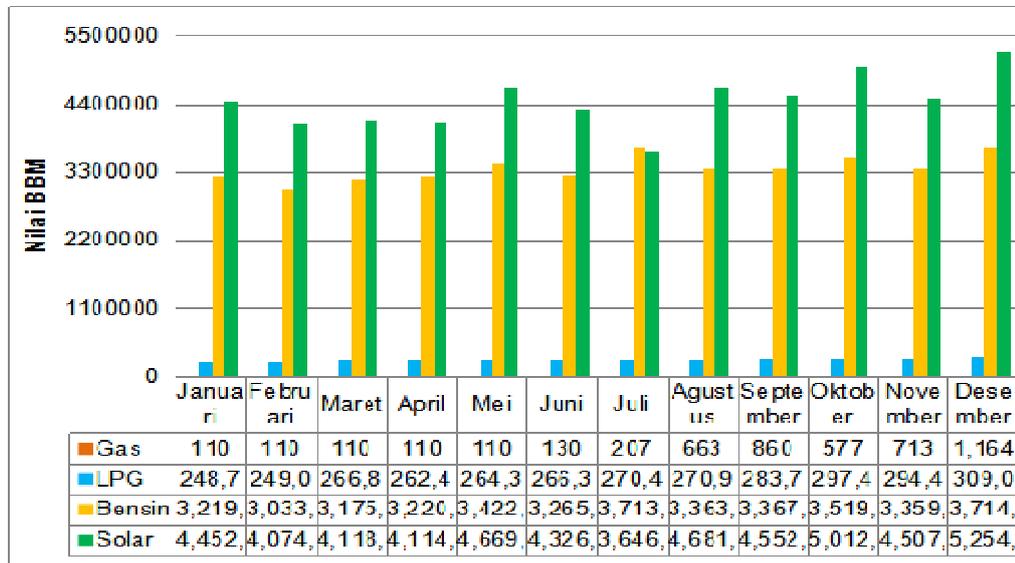
Gambar 3.3.24.
Perbandingan Penggunaan BBM per-Kecamatan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-31B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

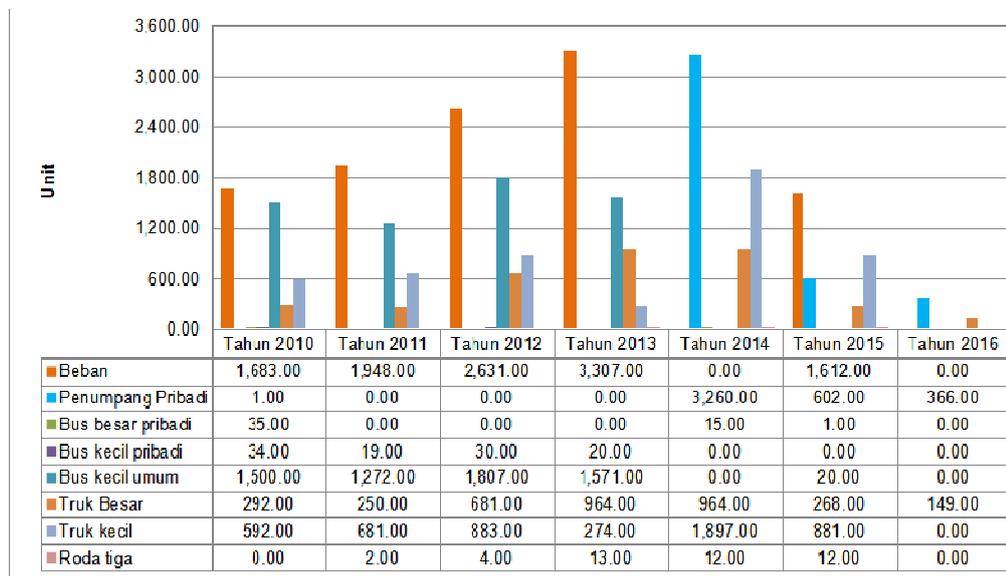


Gambar 3.3.25.
Perbandingan Penggunaan BBM per-Bulan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-31B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

Gambar 3.3.26.
Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-32B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

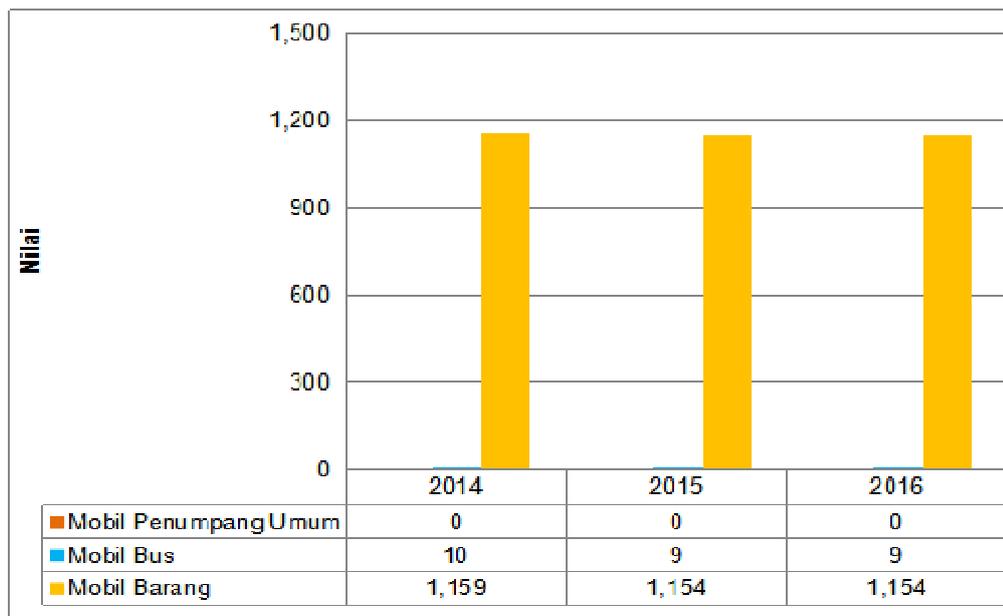
Pada Tabel-32A. dan Tabel-32B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, serta Gambar 3.3.26. terlihat jumlah



kendaraan bermotor yang semakin bertambah setiap tahunnya. Namun hanya sedikit kendaraan yang melakukan uji KIR seperti pada Gambar 3.3.27.

Penambahan jumlah kendaraan untuk angkutan umum juga mesti didukung oleh ketersediaan tempat prasarana terminal atau dermaga yang representatif bagi penumpang angkutan umum, sehingga masyarakat tidak enggan lagi menggunakan angkutan umum. Hal ini dapat dilihat pada Tabel-32D. dan Tabel-32E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, bahwa jumlah fasilitas terminal dan dermaga serta jumlah orang dan barang yang dapat diangkut dengan angkutan umum masih sangat minim sekali. Selain itu, penambahan jumlah kendaraan bermotor juga harus diiringi dengan penambahan dan perbaikan jalan yang ada di kabupaten sebagai sarana penghubung. Pada Gambar 3.3.28. terlihat perbandingan perubahan penambahan jalan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dimana panjang jalan kelas IIIA, IIIB dan IIIC masih sama, sehingga titik penggunaan jalur lalu lintas masih pada jalur yang sama, sehingga beban pencemaran udara dari transportasi masih bertumpu pada jalur tersebut.

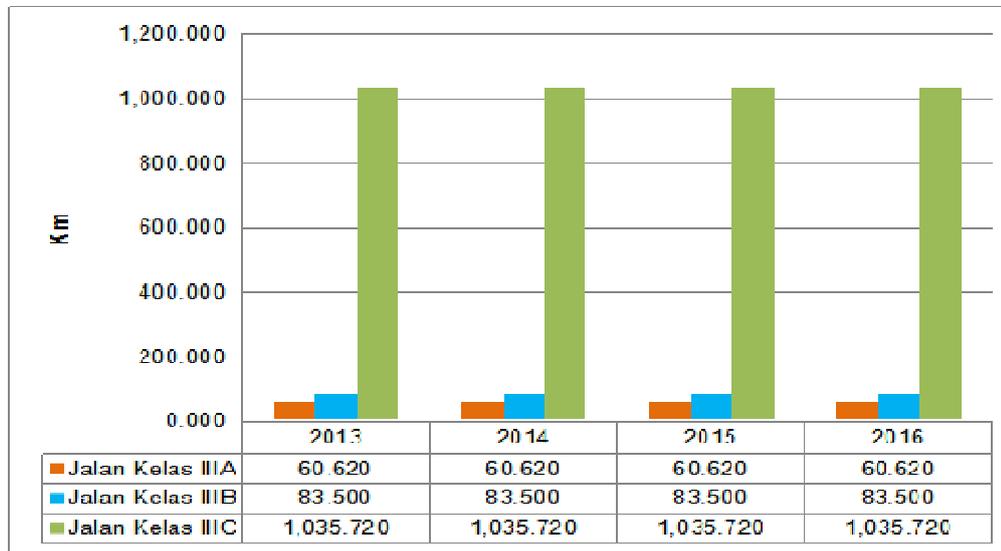
Gambar 3.3.27.
Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melakukan Uji KIR Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-32C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.



Gambar 3.3.28.
Perbandingan Perubahan Penambahan Ruas Jalan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Olahan Tabel-33A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016.

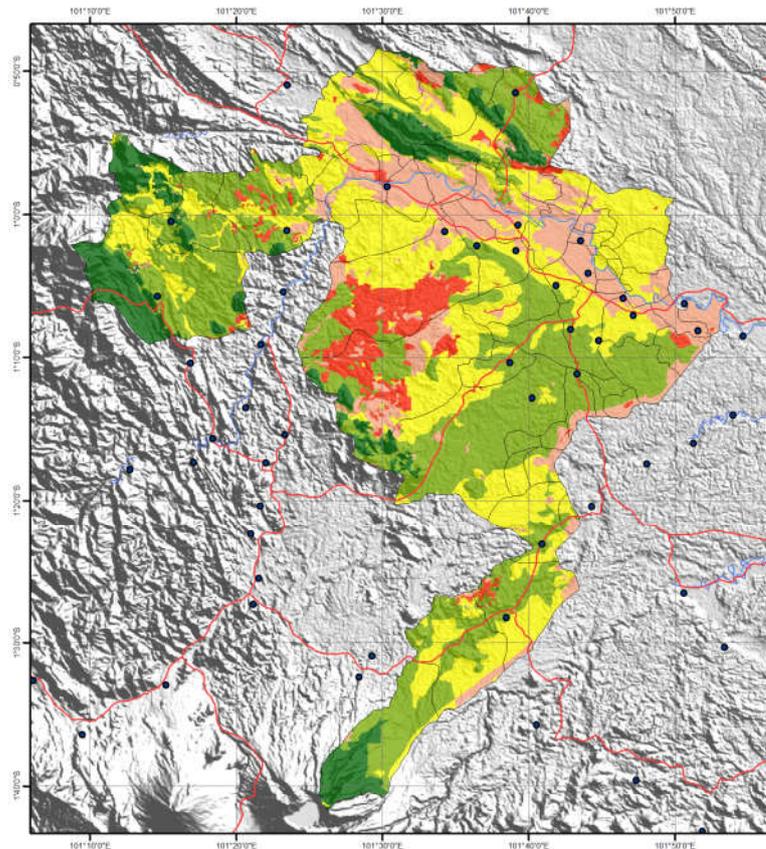
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya telah melakukan kerjasama dengan PO.DAMRI dan akan menerapkan angkutan masal yang lebih efektif dengan menyediakan fasilitas umum angkutan masal yang aman dan nyaman seperti bus, bus sekolah, bus karyawan dan bus PEMDA. Selain itu, PEMDA telah mendapatkan bantuan bus dalam bentuk hibah dari dana aspirasi DPR-RI untuk angkutan bus PEMDA sebanyak 2 unit. Solusi ini adalah diharapkan efektif dalam hal pengurangan emisi secara bertahap yang berasal dari kendaraan bermotor, dan masyarakat tidak perlu setiap saat menggunakan kendaraannya masing-masing, cukup menggunakan angkutan umum yang tersedia. Selain itu, penerapan *bike to work* atau *car free day* satu hari dalam seminggu dapat mulai digiatkan sebagai salah satu bentuk upaya pengendalian terhadap pencemaran udara.

Kabupaten Dharmasraya masih memiliki kondisi kualitas udara yang baik, ini terlihat dari peta DDDTLH jasa pemurnian kualitas udara pada Gambar 3.3.29. yang menunjukkan masih adanya hutan di daerah IX Koto, Timpeh, dan Asam Jujuhan sebagai paru-paru dunia. Walaupun di beberapa



kecamatan berpotensi rusak atau memiliki jasa sangat rendah seperti dai kawasan lahan terbuka perbatasan antara kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru.

Gambar 3.3.29.
Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Jasa Pemurnian Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya



Legend
DDDTLH_Dharmasraya250
PEMURNIAN KUALITAS UDARA
 SANGAT TINGGI
 TINGGI
 SEDANG
 RENDAH
 SANGAT RENDAH



Sumber : Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung untuk Jasa Pemurnian Kualitas Udara yang akan disusun dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ RPPLH Kabupaten Dharmasraya. (Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016).



- c) Respon terhadap pengendalian pencemaran udara dari emisi sumber tak bergerak yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak, gas dan bahan bakar lainnya untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan, yaitu dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha/kegiatan sesuai dengan dokumen RKL-RPL yang dibuat. Kegiatan pemantauan udara ambien rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya sebanyak 2 (dua) kali setahun untuk 8 (delapan) titik sampling mewakili kecamatan yang memiliki sumber pencemaran cukup tinggi, yang didanai melalui APBD Kabupaten Dharmasraya dalam Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan. Sementara itu, untuk kegiatan pengawasan pada usaha/kegiatan juga rutin dilakukan pengawasan sekali 4 (empat) bulan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan melalui kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan. *(Sumber: Tabel-46. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016).*
- d) Kebakaran hutan atau lahan yang dipicu oleh pembukaan lahan baru dan ditemukannya titik panas dan titik api pada tahun 2016 harus diwaspadai, karena dapat berdampak terhadap perubahan kualitas udara. Hal ini selalu menjadi perhatian Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kabupaten dan Provinsi tetangga Riau dan Jambi terhadap bencana kebakaran hutan atau lahan yang terjadi sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kasus asap kabut yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya, dan membuat posko bencana padadaerah rawan bencana kebakaran. Selain itu juga melakukan himbauan kepada masyarakat melalui tenaga penyuluh lapangan perkebunan dan pertanian untuk tidak melakukan pembakaran pada lahan perkebunan dan pertanian saat musim kering.



3.4. RESIKO BENCANA

Definisi Bencana pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. berdasarkan definisi tersebut penyebab bencana dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) faktor yakni faktor alam, nonalam, dan manusia. Definisi Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Sedangkan faktor penyebab bencana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial sebagai berikut :

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Sedangkan jenis-jenis bencana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhuan batuan.





2. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
3. *Tsunami* berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). *Tsunami* adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
4. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
5. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
6. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.
7. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan .
8. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
9. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
10. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).





11. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.
12. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
13. Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
14. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
15. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
16. Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
17. Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan



atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.

18. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kawasan bencana alam dibedakan menjadi beberapa kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang dan kawasan rawan banjir. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pada wilayah Kabupaten Dharmasraya teridentifikasi bencana alam berupa gerakan tanah, kerawanan longsor, dan banjir. Selain hal tersebut juga, akhir-akhir ini disebabkan perubahan iklim dan masih tingginya tutupan lahan dan pengusahaan kegiatan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya maka peta hotspot (titik api) yang direlease oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika terdapat beberapa hotspot (titik api) dengan tingkat kepercayaan diatas 80 % yang menandakan pada wilayah Kabupaten Dharmasraya juga berpotensi terhadap bencana kebakaran hutan. Disebabkan faktor perubahan iklim yang melanda saat ini, pada tahun 2016 juga terjadi bencana alam angin puting beliung walaupun tidak terlalu besar tetapi tetap memberikan dampak pada beberapa keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut diatas, pada wilayah Kabupaten Dharmasraya beberapa jenis kerawanan bencana yang terjadi adalah antara lain :

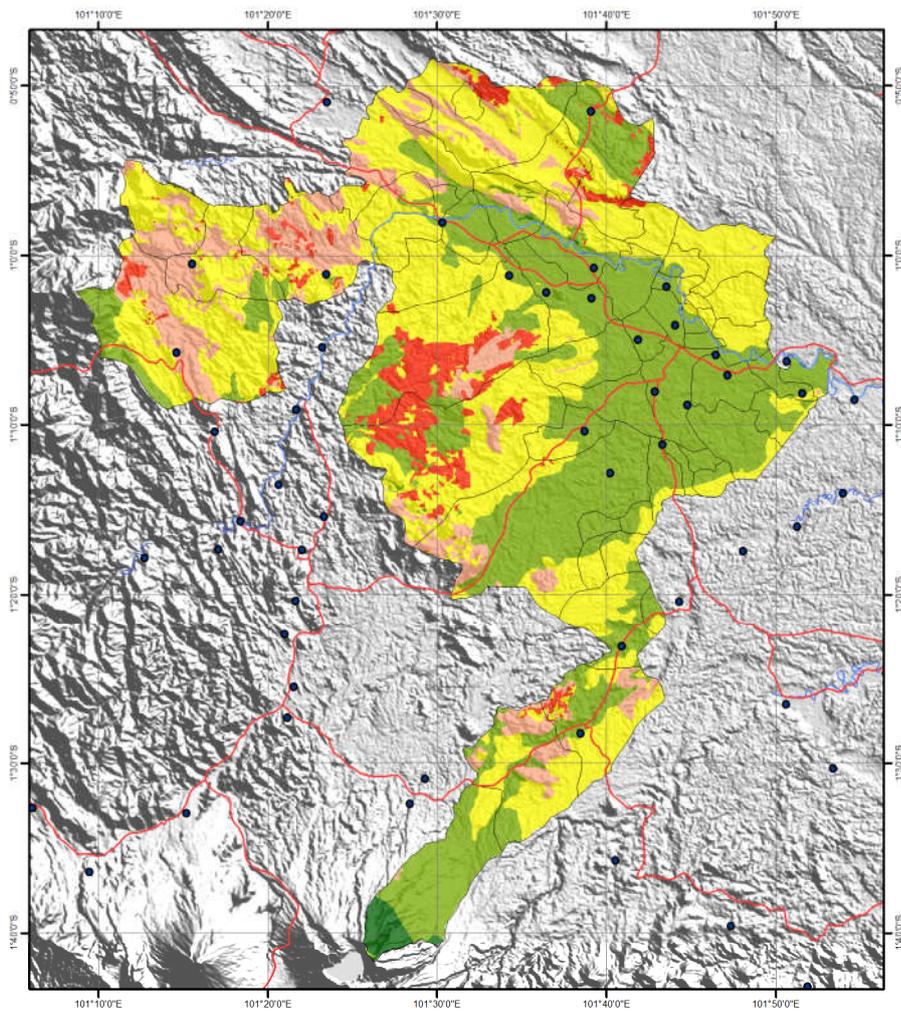
1. Gerakan tanah
2. Kerawanan longsor/tanah longsor
3. Bencana banjir
4. Bencana kebakaran hutan dan lahan
5. Bencana angin puting beliung.





Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Dharmasraya yang disusun oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera tahun 2015. Berikut Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kabupaten Dharmasraya terkait ketahanan terhadap bencana.

Gambar 3.4.1.
Peta DDDT Bencana Kabupaten Dharmasraya



Legend

DDDTLH_Dharmasraya250

PERLINDUNGAN DARI BENCANA

SANGAT TINGGI

TINGGI

SEDANG

RENDAH

SANGAT RENDAH



Sumber : Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Dharmasraya, 2015





Tekanan/*pressure* pada resiko bencana adalah kegiatan manusia atau kondisi alam memberikan tekanan kepada lingkungan hidup (*pressure*) dan menyebabkan perubahan dan dampak pada sumber daya alam dan lingkungan hidup baik secara kualitas maupun kuantitas. Tekanan/*pressure* pada resiko bencana meliputi interaksi-interaksi berikut ini:

- a. Kondisi alam dan lingkungan yang dapat menyebabkan resiko bencana;
- b. Aktifitas manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan resiko bencana;

Kondisi atau status resiko kebencanaan adalah kejadian kebencanaan atau resiko kejadian kebencanaan yang terjadi pada wilayah Kabupaten Dharmasraya dan respons adalah tingkat upaya para pemangku kepentingan melaksanakan terutama pemerintah terhadap status kejadian kebencanaan atau resiko kejadian kebencanaan pada wilayah Kabupaten Dharmasraya.

3.4.1. Bencana Gerakan Tanah

Informasi tekanan/*pressure* bencana gerakan tanah longsor dapat dilihat dari kajian pada Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, informasi tekanan/*pressure* bencana gerakan tanah longsor yang disebabkan gempa bumi, kelerengan terjal, maupun adanya kontak antara batuan yang mempunyai densitas yang berbeda. Gerakan tanah yang terjadi pada wilayah Kabupaten Dharmasraya umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah potensi tinggi longsor ada pada Kecamatan Silago, Jorong Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Jorong Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Bedasarkan kajian Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah



(morfologis), kondisi geologis, curah hujan, dan kegempaan sehingga dari parameter tersebut dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.1. Gerakan Tanah pada Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok anggota filit dan serpih formasi kuantan (PCks), batuan intrusi granit (g), andesit (Qatg), bahan vulkanik tak terpisah (Qtau)	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuhannya ataupun tumbang, lereng > 25 %, kekar dan sesar	Pada bagian Barat meliputi Kecamatan Silago, Jorong Sialang dan Jorong Kampung Surat Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok batuan anggota batu gamping formasi kuantan (PCks), anggota formasi kasai (QTpu), anggota formasi filit serpih formasi kuantan, batuan intrusi (g), andesit (Qatg) dan bahan vulkanik tak terpisahkan	Gelinciran-luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar)	Penyebaran zona ini terdapat di bagian Tengah dan Timur Laut meliputi Kecamatan Kotobaru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok batuan anggota batu gamping formasi Kuantan, anggota filit dan serpih formasi kauntan (Pcks), bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas alvium (Qf) dan	Gelinciran-luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar)	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara dan timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Koto Salak dan Kecamatan Sungai Rumbai



		endapan alluvium (Qaf)		
4	Sangat rendah	Terdiri dari bahan vulkanik (Qv), kipas alluvium dan endapan alluvium (Qal)	Erosi tebing sungai (litologi) bersifat lepas)	Sebaran zona ini terletak di bagian Tengah dan Timur

Sumber : Dokumen RTRW Kab Dharmasraya Tahun 2011-2031

Status bencana gerakan tanah pernah terjadi sebelum tahun 2010 di Kecamatan Silago, Jorong Sialang dan Jorong Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung yang mengakibatkan rusaknya sebagian prasarana jalan dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut bercirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi. Sampai dengan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya ini, sejak tahun 2010 sebelumnya sampai dengan saat ini belum pernah lagi terjadi kejadian gerakan tanah.

Adapun respon atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk resiko kebencanaan gerakan tanah adalah dengan penataan lokasi yang berpotensi mengalami resiko kebencanaan gerakan tanah tersebut tidak dijadikan kawasan pemukiman dan pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Penataan tersebut dikuatkan dan diimplementasikan pada Produk Hukum Daerah berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dan kebijakan daerah tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lokasi yang berpotensi gerakan tanah. Selain hal tersebut, dalam hal mitigasi atau penanggulangan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai dan menerapkan sistem tanggap darurat dalam penanggulangan tanggap darurat bencana di Kabupaten Dharmasraya.



3.4.2. Kerawanan Longsor

Informasi tekanan/pressure bencana kerawanan longsor berupa kondisi kontur lahan yang tinggi/kelerengan, curah hujan tinggi, dan tutupan lahan yang renggang/lahan terbuka serta jenis tanah merupakan variable utama terjadinya longsor. Berdasarkan beberapa variable tersebut, pada kajian Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 telah dipetakan persentase dan luasan kerawanan longsor dengan 4 (empat) kriteria kerawanan longsor yakni rawan, rendah, sedang, dan tinggi, berikut kriteria kerentanan bahaya longsor pada luasan wilayah Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3.4.2.
Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawanan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kriteria Kerentanan Bahaya Longsor	Luas	
		Ha	%
1	Tidak rawan	-	-
2	Kerawanan rendah	73.143	24,2
3	Kerawanan sedang	182.638	60,3
4	Kerawanan tinggi	96.818	15,5

Sumber : Dokumen RTRW Kab Dharmasraya Tahun 2011-2031

Status bencana longsor tanah pada tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Tabel 40 Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian di Kabupaten Dharmasraya pada Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, bahwa terjadi kejadian bencana tanah longsor menimpa pada Kecamatan Koto Baru dengan jumlah kerugian mencapai 65 juta serta ambruknya 1 (satu) unit prasarana jembatan.

Adapun respon atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk resiko kebencanaan tanah longsor hampir sama dengan upaya mitigasi bencana lainnya yakni dengan penataan lokasi yang berpotensi mengalami resiko kebencanaan tanah longsor tersebut tidak dijadikan kawasan pemukiman dan pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Penataan tersebut dikuatkan dan diimplementasikan pada Produk Hukum Daerah berupa Rencana



Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dan kebijakan daerah tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lokasi yang berpotensi tanah longsor. Selain hal tersebut, dalam hal mitigasi atau penanggulangan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai dan menerapkan sistem tanggap darurat dalam penanggulangan tanggap darurat bencana di Kabupaten Dharmasraya.

3.4.3. Bencana Banjir

Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam suatu daratan atau banjir sebagai perendaman sementara oleh air pada daratan yang biasanya tidak terendam air. Banjir terjadi disebabkan catchement area tidak mampu atau tidak tersedia untuk menyerap air ke tanah sehingga air akan menggenangi lahan atau kawasan yang rendah dan terbuka.

Informasi tekanan/pressure bencana banjir berupa kondisi kontur lahan yang rendah dari wilayah sekitarnya, curah hujan tinggi, dan tutupan lahan yang renggang sebagai penahan air serta kondisi jaringan drainase dan folder untuk penampung air. Variable utama penyebab banjir di Kabupaten Dharmasraya yang disebabkan oleh faktor pengelolaan manusianya berupa ketersediaan jaringan drainase dan kondisi tutupan lahan sekitar daerah yang terkena banjir. Sedangkan yang disebabkan alam seperti curah hujan tinggi kontur lahan yang lebih rendah dari wilayah sekitarnya.

Ketersediaan jaringan drainase beserta retensi folder pada Kabupaten Dharmasraya masih sangat minim ketersediaannya. Pada pusat ibukota kabupaten yakni Kecamatan Pulau Punjung sampai dengan saat ini belum tersedia jaringan drainase yang baik sehingga sering pada saat curah hujan relatif tinggi terjadi genangan air hingga merendam pemukiman. Selain ketersediaan jaringan drainase, tutupan lahan sebagian besar di Kabupaten Dharmasraya telah beralih fungsi dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan karet.

Kawasan di Kabupaten Dharmasraya yang sangat berpotensi mengalami kejadian bencana banjir adalah dataran banjir yang morfologi dataran sepanjang aliran Sungai Batanghari, Batang Timpeh dan Batang Siat. Pada saat kondisi





curah hujan normal tidak terjadi luapan tetapi pada saat curah hujan tinggi terutama pada bagian hulu sungai maka akan berpotensi terjadinya luapan dan genangan atau banjir.

Status kejadian banjir pada tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan informasi pada Tabel 37 Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2016 yang sumber informasinya berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya bahwa pada tahun 2016 terjadi 14 kali kejadian genangan air melanda pemukiman dan rumah warga atau sebanyak 394 unit rumah dan fasilitas umum yang terendam antara lain beberapa rumah ibadah dan kantor serta 2 (dua) unit jembatan terendam dan 17 (tujuh belas) titik jalan terendam.

Secara spesifik kejadian banjir tersebut terjadi pada Jorong Kampung Surau yang merupakan dataran banjir Sungai Pangian, Palayang Pulau Punjung yang merupakan dataran banjir Sungai Batanghari, kemudian banjor bandang pernah terjadi pada Kecamatan Timpeh yang disebabkan pembukaan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Selain itu sekitar Pasar Abai dan wilayah Bonjol sering terjadi genangan air disebabkan luapan air Sungai Batang Siat.

Adapun respon atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan berupa penataan kegiatan budi daya melalui Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah baik kegiatan pemukiman, perkebunan, industri dan kegiatan budi daya lainnya. Upaya penanggulangan berupa pertolongan pertama pada masyarakat terdampak banjir baik dari sisi sosial dan kesehatan dimana upaya penanggulangan bencana banjir ini dikordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk upaya pemulihan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait misalnya prasarana jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, restorasi lahan sawah terdampak banjir dilakukan bersama oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta dampak lainnya oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

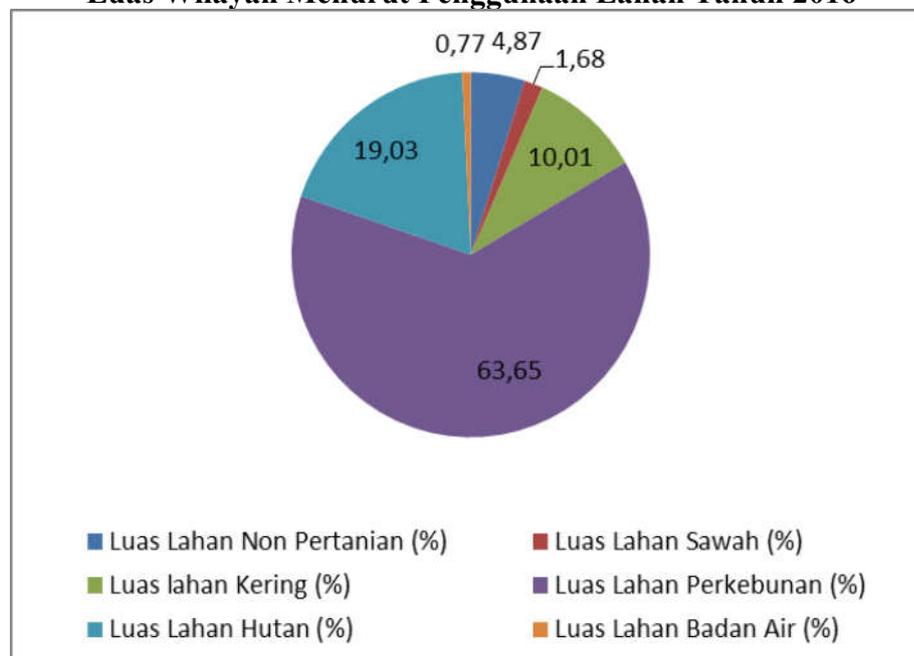


3.4.4. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kejadian bencana kebakaran hutan melanda wilayah Indonesia terparah pada tahun 2015 yang melanda sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Efek bencana kebakaran lahan ini menimbulkan dampak kabut asap tidak sekedar melanda kedua pulau tersebut tetapi juga menimbulkan dampak bagi negara sahabat yakni Malaysia dan Singapura. Untuk itu, pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan yang konverhensif melibatkan semua stakeholder mulai dari TNI, POLRI, BPBN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah.

Informasi tekanan/pressure bencana kebakaran hutan dan lahan meliputi kondisi tutupan lahan, cuaca atau musim, serta karakteristik dan kebiasaan masyarakatnya. Tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya di dominasi oleh perkebunan dan hutan dengan persentase mencapai 82,7 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya atau seluas 248 ribu hektar lebih. Sedangkan sisanya adalah sebagai badan air, penggunaan non pertanian, penggunaan lahan kering, dan pertanian sawah.

Gambar 3.4.2.
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Tahun 2016

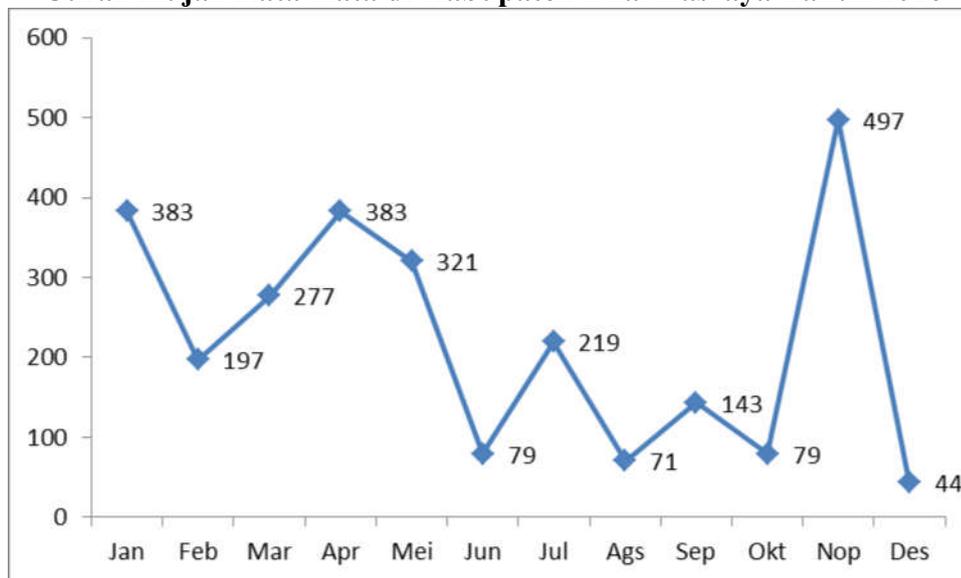


Sumber : Olahan Tabel-2. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016



Dengan luas tutupan lahan yang mayoritas adalah perkebunan dan hutan saat ini jika dipengaruhi oleh cuaca pada saat musim kering akan memberikan potensi yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pada Kabupaten Dharmasraya terdapat 5 (lima) titik pengamatan curah hujan yakni Stasiun Simpang Silago, Bendungan Batanghari, Komplek Sedasi, Padang Sidondang dan Kotobaru Piruko. Berikut ini gambaran curah hujan rata-tata bulanan pada tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya dari kelima stasiun pengamatan tersebut.

Gambar 3.4.3.
Curah Hujan Rata-Rata di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

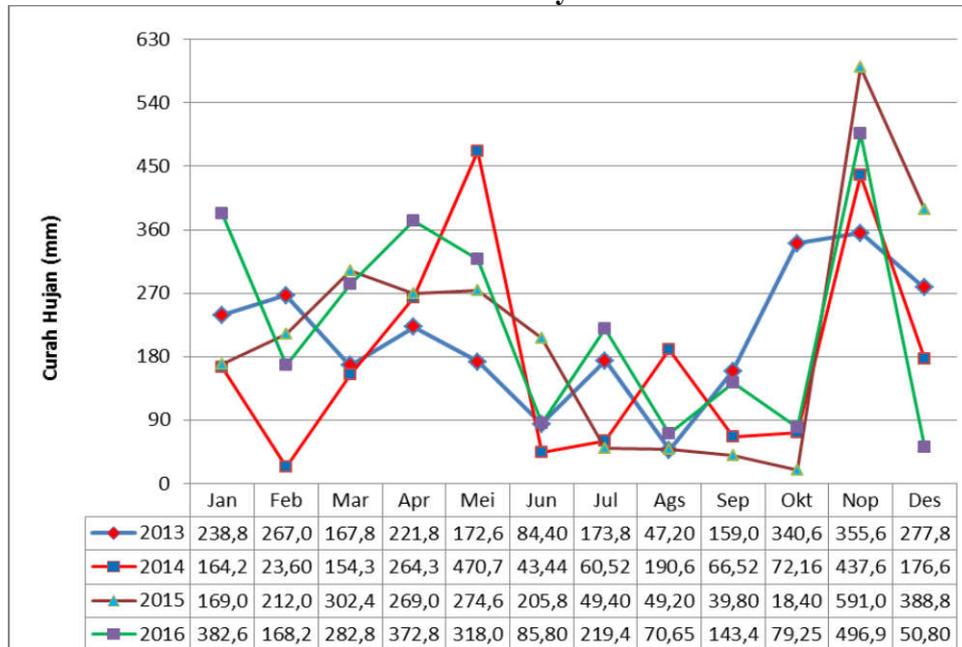


Ket : Curah hujan dalam mm

Sumber : Olahan Tabel-21. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016



Gambar 3.4.4.
Tren Curah Hujan Rata-Rata 4 (empat) Tahun Terakhir di Kabupaten Dharmasraya



Ket : Curah hujan dalam mm

Sumber : Olahan Tabel-21B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Dari tren curah hujan bulanan pada tahun 2016 tersebut, terlihat curah hujan rendah pada tengah tahun yakni bulan Juni hingga bulan Oktober. Pada bulan-bulan tersebut diperlukan kewaspadaan yang tinggi oleh stakeholder terkait terhadap penanggulangan potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Jika ditelaah pada tren curah hujan bulanan rata-rata pada 4 (empat) tahun terakhir maka terlihat pada tahun 2015 pada bulan Juli hingga bulan Oktober curah hujan rata-rata bulanan paling rendah. Hal ini senada dengan kondisi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tertinggi pada tahun 2015 sebelumnya yang menyebabkan kejadian bencana kabut asap melanda wilayah ini.

Selain kondisiutupan lahan dan kondisi cuaca, bencana kebakaran hutan dan lahan juga sangat dipengaruhi dengan karakteristik masyarakatnya dalam pengelolaan lahannya. Secara kebiasaan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya sebagian kecil masih melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat dengan cara penebangan dan perambahan hutan selanjutnya dilakukan pembakaran untuk pembersihan lahan tersebut sebelum dilakukan penanaman



komoditi perkebunannya. Pada saat kondisi curah hujan relatif rendah seperti pada tahun 2015 sebelumnya maka potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan akan cukup tinggi. Sedangkan untuk tingkatan korporasi para perusahaan perkebunan dan tanaman industri di Kabupaten Dharmasraya sudah menerapkan pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa membakar. Selain itu, perusahaan perkebunan dan tanaman industri di Kabupaten Dharmasraya telah memiliki tanggap darurat pengendalian kebakaran lahan dengan ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, menara pengawas, dan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Kebakaran Lahan serta personil yang telah dilengkapi dengan kompetensi dan pelatihan dalam penanggulangan kebakaran lahan.

Status kejadian kebakaran hutan dan lahan pada wilayah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Tabel 39. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2016), pada Kecamatan Sungai Rumbai terjadi kebakaran lahan kebun seluas 1,5 hektar dengan besar kerugian sebesar Rp. 15 juta, pada Kecamatan Pulau Punjung dengan luas lahan kebun terbakar seluas 5 hektar atau kerugian material sebesar Rp. 45 juta, pada Kecamatan Sitiung luas lahan terbakar 8,5 hektar dengan besar kerugian material sebesar Rp. 375 juta dan pada Kecamatan Koto Baru luas lahan kebun yang terbakar seluas 24 hektar dengan kerugian material sebesar 1,245 milyar.

Berdasarkan status pada satelit NOAA19 tahun 2015 jumlah sebaran titik api (hotspot) dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 % terdapat 80 titik api. Adapun sebarannya tersebut terdapat pada wilayah Kabupaten Dharmasraya sebelah Tenggara, sebelah Timur, sebelah Barat dan sebelah Selatan. Adapun titik api pada sebelah Tenggara dan sebelah Timur beberapa titik api pada Kawasan Taman Nasional Bukit Betabuah yang merupakan Gugusan Bukit Barisan perbatasan wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan titik api pada sebelah Barat merupakan sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Perkebunan. Titik api pada sebelah Selatan merupakan Kawasan Perkebunan. Berikut penampakan titik api (hostpot) tahun 2015 satelit NOAA 19 pada Peta Google Earth.





Gambar 3.4.5.
Hotspot Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Satelit NOAA19

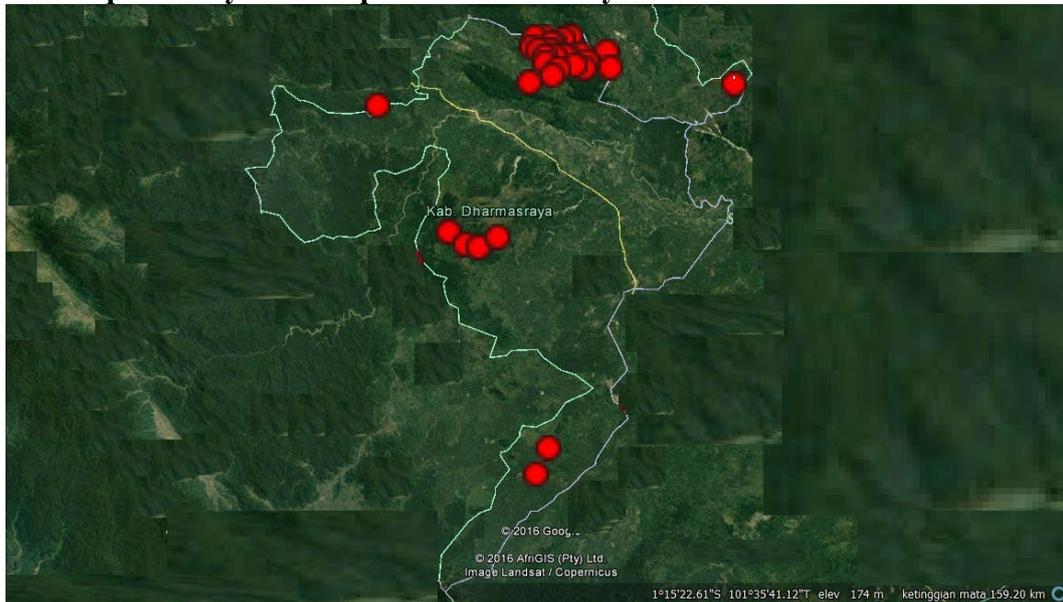


Sumber : Sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran, 2016

Pada tahun 2016 jumlah sebaran titik api (hotspot) dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 % sebanyak 62 titik api (hotspot). Adapun sebarannya tersebut terdapat pada wilayah Kabupaten Dharmasraya sebelah Tenggara, sebelah Barat dan sebelah Selatan. Adapun titik api pada sebelah Tenggara beberapa titik api pada Kawasan Taman Nasional Bukit Betabuah yang merupakan Gugusan Bukit Barisan perbatasan wilayah Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Kuantan Sengingi. Sedangkan titik api pada sebelah Barat merupakan sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Perkebunan. Titik api pada sebelah Selatan merupakan Kawasan Perkebunan. Berikut penampakan titik api (hostpot) tahun 2016 satelit NOAA 19 pada Peta Google Earth.

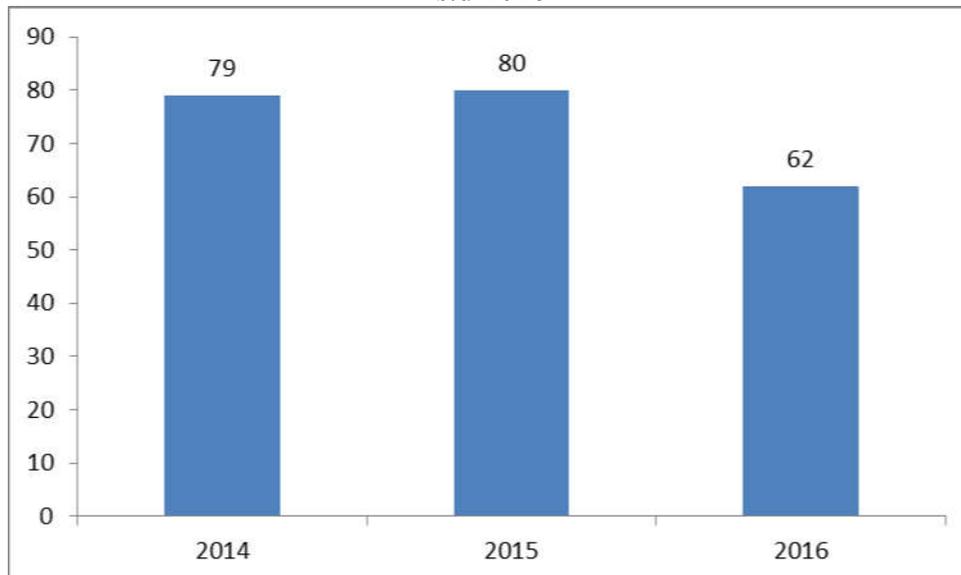


Gambar 3.4.6.
Hotspot Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Satelit NOAA19



Sumber : Sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran, 2016

Gambar 3.4.7.
Tren Penurunan Jumlah Hotspot di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 s.d 2016



Sumber : Olahan Tabel-39C. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Jika dibandingkan jumlah titik api (hotspot) pada 3 (tiga) tahun terakhir terlihat jelas pada tahun 2016 telah terjadi penurunan jumlah sebaran titik api (hotspot) di Kabupaten Dharmasraya. Penurunan jumlah hotspot tersebut sangat



dipengaruhi oleh cuaca dan musim serta kesigapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Adapun respon atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan berupa pembinaan tata cara pengelolaan lahan tanpa membakar pada masyarakat. Upaya penanggulangan berupa mensinergikan program penanggulangan antara pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (BPBD), TNI, POLRI, dan perusahaan yang memiliki sumber daya untuk penanggulangan secara cepat kejadian kebakaran hutan dan lahan, selain itu adalah membuka akses mensinkronkan informasi seluas-luasnya dari masyarakat kejadian-kejadian kebakaran lahan dengan informasi geografis hotspot satelit baik dari BMKG maupun dari KLHK sehingga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dharmasraya lebih cepat dalam bertindak.

Selain penanggulangan secara terpadu dari pemerintah, pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kejadian kebakaran hutan dan lahan juga lebih dikuatkan terutama penanggulangan kejadian kebakaran lahan perkebunan karet maupun kelapa sawit milik masyarakat itu sendiri. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya melalui kenagarian (desa) membentuk pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sehingga penanggulangan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Dharmasraya lebih konverhensif yang melibatkan semua stakeholder.

3.4.5. Kejadian Bencana Lainnya

Kejadian bencana lainnya yang menimpa Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 adalah angin puting beliung. Angin Puting Beliung ialah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63km/jam yang bergerak searah garis lurus dengan lama kejadian maksimal lima menit. Angin puting beliung ini sering terjadi pada siang hari atau pada sore hari saat musim pancaroba. Angin jenis ini dapat menghancurkan apa saja yang ia lewati, semua akan diterjang habis karena





pusarannya itu maka benda-benda apa saja yang di lewati akan terangkat dan terlempar.

Adapun karakteristik angin puting beliung adalah antara lain :

1. Angin puting beliung ialah dampak dari ikutan awan Cb atau Cumulonimbus yang biasa tumbuh selama musim hujan, akan tetapi tidak semua pertumbuhan awan ini akan menimbulkan angin puting beliung.
2. Kehadiran angin ini belum dapat diperkirakan.
3. Angin ini terjadi dengan tiba-tiba yakni 5 sampai 10 menit pada area dengan skala yang sangat lokal.
4. Pusaran angin puting beliung mirip dengan selang vacum cleaner atau belalai gajah

Adapun **informasi tekanan/pressure bencana angin puting beliung** disebabkan udara panas dan udara dingin bertemu sehingga keduanya saling bentrok dan terbentuklah angin puting beliung. Selain itu, angin ini terjadi juga karena dalam awan terjadi arus udara naik keatas yang kuat. Hujan belum turun dan titik air ataupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik keatas puncak awan.

Angin puting beliung biasanya terjadi saat musim pancaroba pada siang hari saat suhu udara panas, pengap dan awan hitam mulai berkumpul, karena radiasi matahari di siang hari maka tumbuh awan secara vertikal lalu di dalam awan akan terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi dengan tiba-tiba dan berjalan dengan acak.

Status kejadian angin puting beliung pada wilayah Kabupaten Dharmasraya terjadi pada tahun 2016 pada Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung. Kejadian angin puting beliung ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadian bencana angin puting beliung ini menimbulkan kerugian material dengan rusaknya 1 (satu) unit sekolah taman kanak-kanak dan bangunan atap rumah pada Kecamatan Pulau Punjung dan tap rumah warga pada Kecamatan Sitiung. Hasil perkiraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pada Kecamatan Sitiung bencana tersebut



menelan kerugian sebesar Rp. 120 juta dan pada Kecamatan Pulau Punjung sebesar Rp. 240 juta.

Adapun respon atau upaya dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah upaya pencegahan yakni melalui penataan pada izin mendirikan bangunan dengan memberikan spesifikasi bangunan yang kokoh dan tidak mudah roboh. Upaya penanggulangan meliputi memberikan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat melalui unsur pemerintah terendah yakni kenagarian atau desa serta memberikan bantuan fisik maupun sosialisasi pembinaan trauma pasca bencana. Upaya pemulihan dilakukan dengan merenovasi kembali prasarana public yang terdampak oleh kejadian bencana dan mengupayakan bantuan bagi masyarakat terdampak pada kejadian bencana.

Selain kejadian bencana angin puting beliung, kejadian bencana kekeringan pada tahun 2016 tidak menimpa tidak terdampak pada lahan pertanian, hanya sebagian kecil masyarakat yang mengandalkan air bersihnya berasal dari sumur gali sedikit kesulitan air bersih (Tabel 38. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2016). Untuk penanggulangannya maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya dan Dinas Pekerjaan Umum mendistribusikan air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan tersebut. Adapun upaya pemulihan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah melalui Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan program konservasi air tanah berupa program lobang biopori resapan dan program pemanenan air hujan.



3.5. PERKOTAAN

Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, sistem perkotaan yang direncanakan pada Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Propinsi Sumatera Barat, kawasan perkotaan Pulau Punjung meliputi koridor Pulau Punjung – Sungai Dareh – Sikabau.
2. Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi kawasan strategis gerbang timur Propinsi Sumatera Barat.

Secara umum sektor perkotaan menimbulkan permasalahan dan tekanan terhadap lingkungan hidup dilihat dari sisi fasilitas yang tersedia, sistem dan area perkotaan. Status lingkungan pada perkotaan dapat dilihat dari aspek fisik berupa pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan, dan timbunan sampah domestik dan aspek sosial ekonomi berupa dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman. Sedangkan upaya atau respon pemerintah daerah yang telah dilakukan terkait penanganan tekanan dan status lingkungan pada perkotaan meliputi upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan disebabkan kegiatan perkotaan terdiri dari upaya pencegahan, upaya penanggulangan dan upaya pemulihan.

3.5.1. TEKANAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

Sedangkan secara spesifik akan menguraikan informasi tekanan terhadap lingkungan seperti:

1. Tekanan berupa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta tingkat pendidikannya;
2. Tekanan berupa informasi jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah rumah tangga;





3. Tekanan berupa sarana dan prasarana lingkungan pemukiman terutama cakupan air bersih dan MCK, informasi yang akan diuraikan antara lain:
 - Jumlah rumah tangga dan sumber air minum;
 - Jumlah rumah tangga dan fasilitas buang air besar;
4. Tekanan berupa sistem pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan masyarakat perkotaan
5. Tekanan berupa sistem pengelolaan sampah perkotaan.

3.5.1.1. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan serta Tingkat Pendidikan

Data Informasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan berasal dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Informasi ini dilakukan updating oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan dari data pelaporan kelahiran, kematian dan migrasi yang bersumber dari data kecamatan dan nagari.

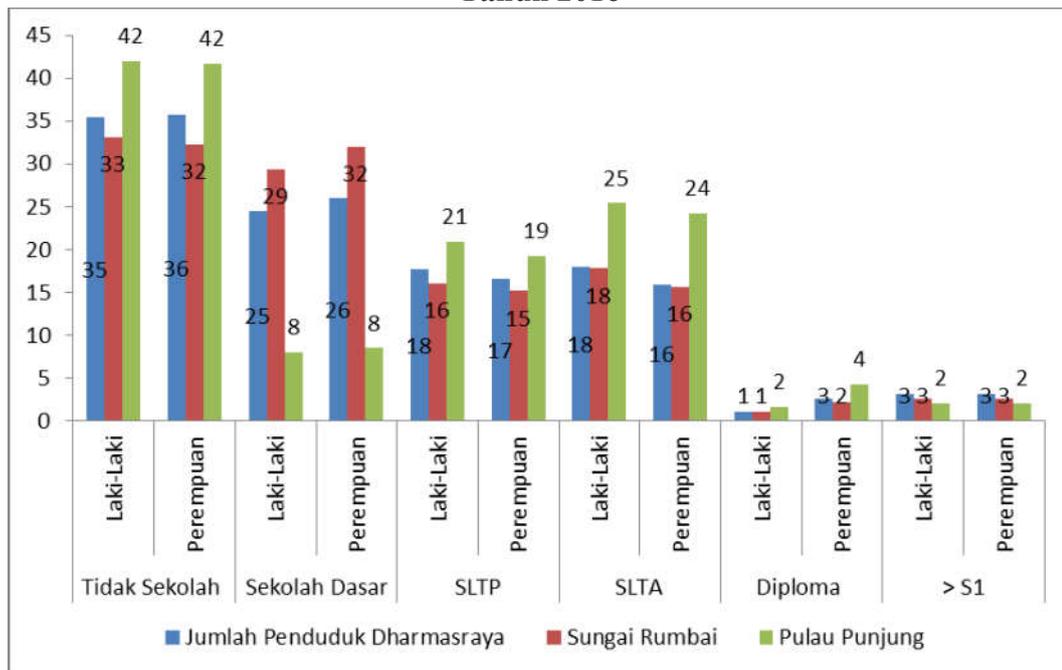
Gambaran tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 sebagaimana pada gambar berikut yang diuraikan persentase tingkat pendidikan berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan dari tidak sekolah hingga sarjana (S1) keatas.

Pada level data tidak sekolah termasuk data belum sekolah, dan tidak sekolah, sedang sekolah SD serta tidak tamat SD. Sehingga belum bisa ditentukan berapa jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya saat ini yang tidak sekolah atau tidak tamat SD. Jika dilihat dari keseluruhan penduduk Kabupaten Dharmasraya, sejumlah 35 % tidak sekolah dan 26 % tamat sekolah dasar, 18 % tamat SLTP, 17 % tamat SLTA, 1 % tamat Diploma serta hanya 3 % tamat sarjana keatas (S1, S2, dan S3). Dari gambar diatas, persentase tingkat pendidikan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan relatif sama dengan deviasi lebih kurang 1 %. Jika dikumulatikan untuk keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, tingkat pendidikan penduduk pendidikan



SLTP kebawah sangat tinggi yakni mencapai 70 %, dan 25 % tingkat SLTA serta sisanya kurang dari 5 % mengenyam pendidikan sarjana.

Gambar 3.5.1.
Tingkat Pendidikan Penduduk Dharmasraya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

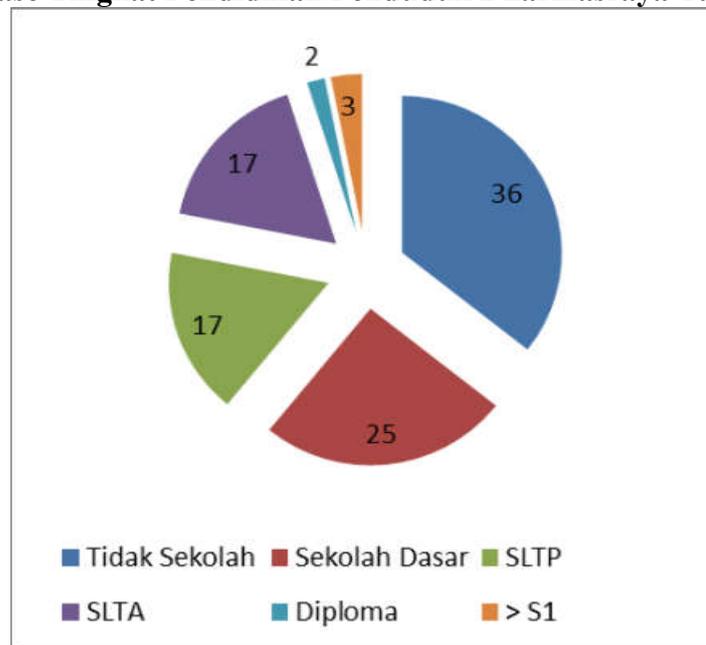
Jika dilihat dari tingkat pendidikan pada total penduduk Kabupaten Dharmasraya, penduduk Kecamatan Sungai Rumbai dan penduduk Kecamatan Pulau Punjung pada tahun 2016 dapat diuraikan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Dharmasraya, rencana pengembangan untuk perkotaan adalah Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai. Pada sisi tingkat pendidikan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan, jumlah penduduk yang pendidikannya Diploma dan S1 keatas mencapai 39 %. Pada Kecamatan Sungai Rumbai penduduk yang tingkat pendidikannya Diploma dan S1 mencapai 36 % atau dibawah rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan. Sedangkan pada Kecamatan Pulau Punjung tingkat pendidikan Diploma dan S1 keatas mencapai 44 %. Jika dievaluasi secara keseluruhan untuk Kecamatan Pulau Punjung sebagai salah satu



rencana pengembangan kota, tingkat pendidikan masyarakatnya yang mencapai pendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan penduduk Kabupaten Dharmasraya keseluruhan tetapi untuk Kecamatan Sungai Rumbai yang mencapai pendidikan tinggi lebih rendah dari dibandingkan penduduk Kabupaten Dharmasraya keseluruhan.

Dari sisi tingkat pendidikan tidak sekolah dan tamat SD pada jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan sejumlah 61 %, penduduk Kecamatan Sungai Rumbai mencapai 64 % dan untuk penduduk Kecamatan Pulau Punjung mencapai 50 %. Dari gambaran tersebut penduduk Kecamatan Pulau Punjung yang memiliki pendidikan rendah lebih kecil dibandingkan penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan dan penduduk Kecamatan Sungai Rumbai. Uraian tersebut diatas dapat dilihat pada gambar berikut.

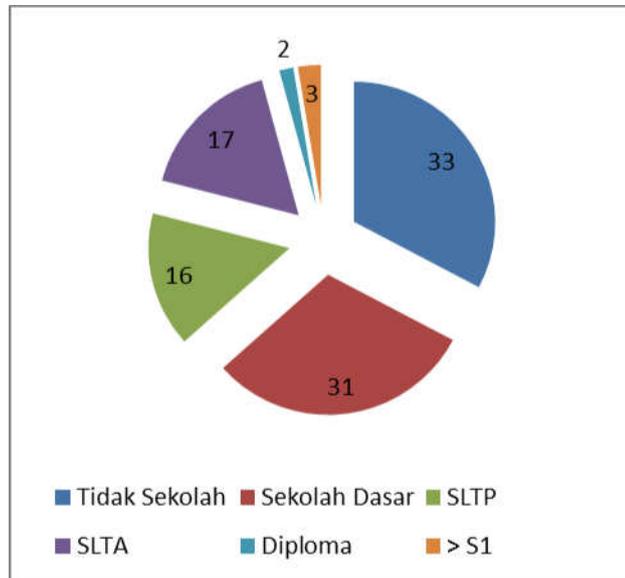
Gambar 3.5.2.
Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Dharmasraya Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

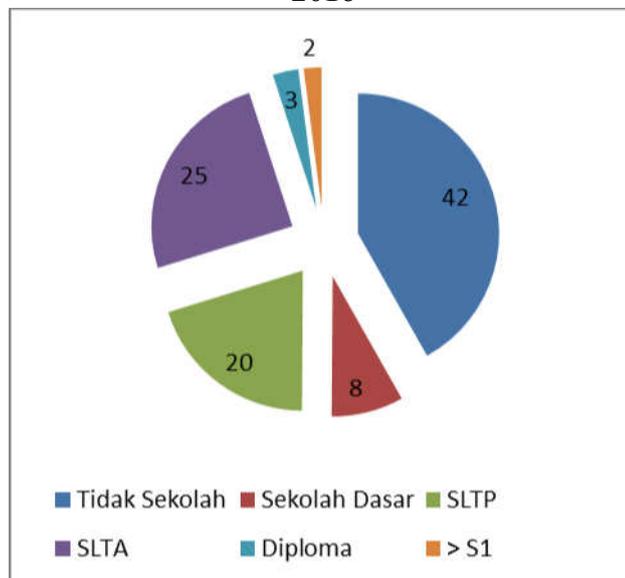


Gambar 3.5.3
Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sungai Rumbai Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Gambar 3.5.4.
Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel-24. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Dari gambaran uraian tersebut diatas, terlihat pada Kecamatan Pulau Punjung yang merupakan sebagai rencana perkotaan berdasarkan Rencana Tata



Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2031 tingkat pendidikannya lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan Sungai Rumbai dan penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan. Tingkat pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap ketepatan metode atau cara penyampaian program dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terkait upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada masyarakat.

3.5.1.2. Jumlah Rumah Tangga Miskin Terhadap Jumlah Rumah Tangga;

Indikator tekanan selanjutnya terhadap perkotaan adalah rumah tangga miskin. Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat berpengaruh terhadap bentuk pengelolaan lingkungan pemukiman dari masyarakat perkotaan tersebut. Selain itu cara hidup yang dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan penduduk sangat dipengaruhi dengan beban lingkungan yang dihasilkan nantinya. Makin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya, beban pencemaran yang dihasilkan oleh masyarakat pemukiman pemukiman tersebut makin tinggi.

Data rumah tangga miskin yang disampaikan disini adalah data rumah tangga miskin yang mendapatkan JKN. Data ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2016. Adapun kriteria rumah tangga yang menerima JKN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, diantaranya disebutkan bahwa:

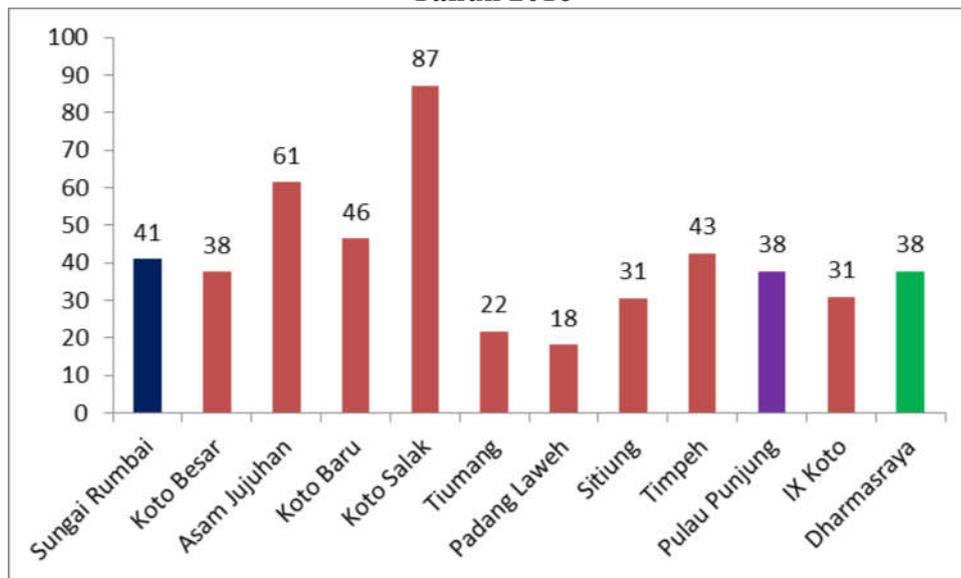
- 1 Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- 2 Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu.
- 3 Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan
- 4 Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.





Berikut ini gambaran persentase jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah rumah tangga pada kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 3.5.5
Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin Terhadap Jumlah Rumah Tangga Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel-26. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

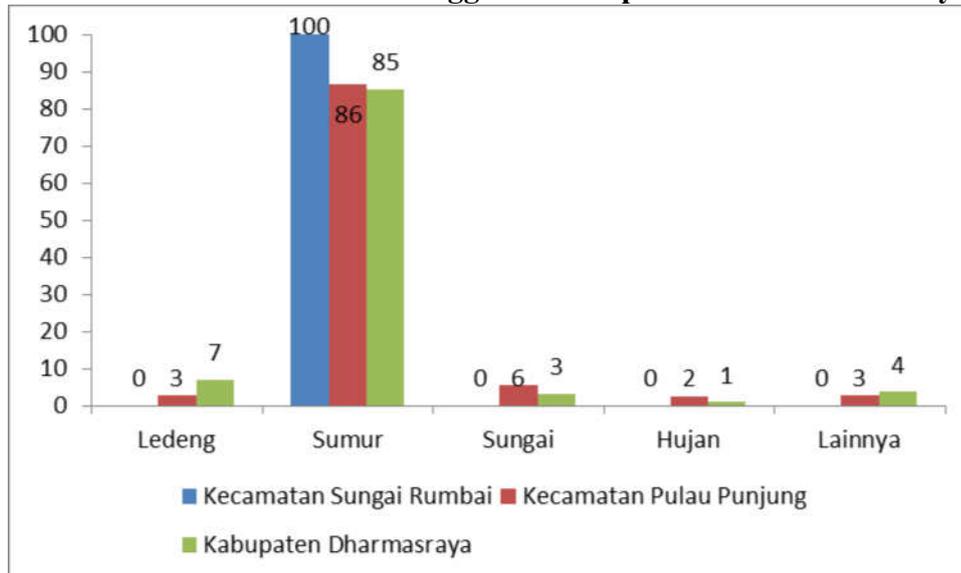
Pada Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan jumlah rumah tangga miskin mencapai 38 %, pada Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai sebagai rencana perkotaan berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 menunjukkan pada Kecamatan Pulau Punjung sama persentasenya dengan Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan dan pada Kecamatan Sungai Rumbai Rumah Tangga Miskin lebih tinggi yakni mencapai 41 %. Dengan masih tingginya tingkat rumah tangga miskin pada Kabupaten Dharmasraya secara umum dan secara khususnya pada Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai maka tingkat pola hidup sehat dan penataan kebersihan masih sangat rendah sehingga beban pencemar domestik yang dihasilkan akan lebih besar. Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas lingkungan adalah peningkatan kesejahteraan dari pada masyarakatnya.



3.5.1.3. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum;

Kualitas air minum dan air bersih mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Pada kumpulan pemukiman yang kurang sehat biasanya kualitas air minum dan air bersihnya kurang baik, selain itu prasarana sumber air bersihnya kurang tersedia. Data jumlah rumah tangga dan sumber air minum berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2016. Berikut ini gambaran penggunaan sumber air pada rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 dan Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai sebagai rencana perkotaan di Kabupaten Dharmasaya tersebut.

Gambar 3.5.6.
Persentase Jumlah Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minumnya



Sumber : Olahan Tabel-22. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

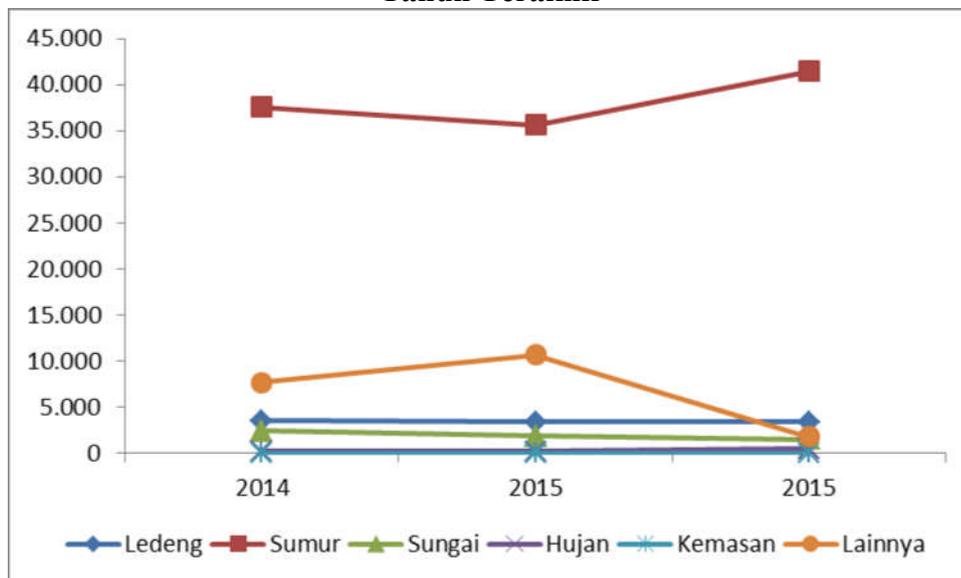
Pada Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan, sumber air minum utama masih berasal dari sumur baik sumur gali maupun sumur bor yakni mencapai 85 % penggunaannya. Pada Kecamatan Pulau Punjung juga sebanyak 86 % rumah tangga masih mengandalkan sumur sebagai sumber air minumnya tetapi pada Kecamatan Sungai Rumbai dari data yang ada hampir 100 % masyarakat masih menggunakan air sumur sebagai sumber air minumnya. Untuk air sungai, sebanyak 6 % penduduk Kecamatan Pulau Punjung masih mengandalkan sumber air minumnya pada sungai yakni Sungai Batanghari. Untuk



PDAM pada Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 3 % masyarakat telah menggunakannya.

Dilihat perubahan antar waktu penggunaan sumber air minum rumah tangga pada 3 (tiga) tahun terakhir, terlihat trennya relatif sama kecuali untuk air sumur. Hal ini diperkirakan seiring pertumbuhan rumah tangga, sumber air minumnya mengandalkan air sumur.

Gambar 3.5.7.
Tren Jumlah Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minumnya pada 3 (tiga) Tahun Terakhir



Sumber : Olahan Tabel-22. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Secara kualitas air sumur akan diuraikan penjelasan status lingkungan hidup pada sub bab perkotaan ini sehingga dapat tergambar kualitas air sumur yang menjadi konsumsi masyarakat di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya dan spesifiknya pada Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai.

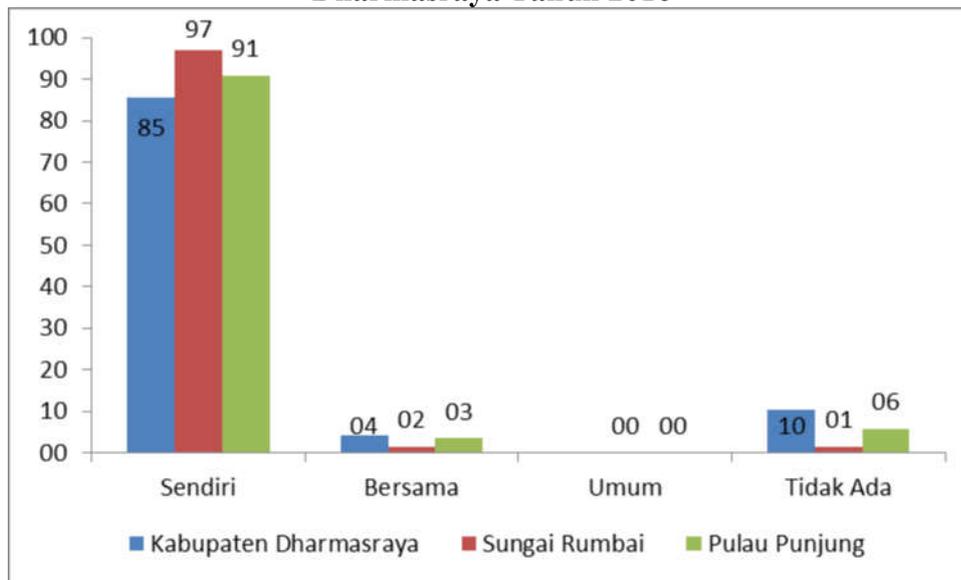
3.5.1.4. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Buang Air Besar;

Fasilitas buang air besar merupakan fasilitas yang sangat penting dalam rumah tangga. Fasilitas ini menunjukkan tingkat pola hidup yang terkait kesehatan dalam suatu rumah tangga. Fasilitas buang air besar juga merupakan langkah preventif dalam pengendalian pencemaran air dan pencegahan penyebaran vektor



penyakit. Berikut ini jumlah rumah tangga dengan fasilitas buang air besarnya di Kabupaten Dharmasraya pada umumnya dan spesifik Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai sebagai perkotaan yang direncanakan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

Gambar 3.5.8.
Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Buang Air Besar di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

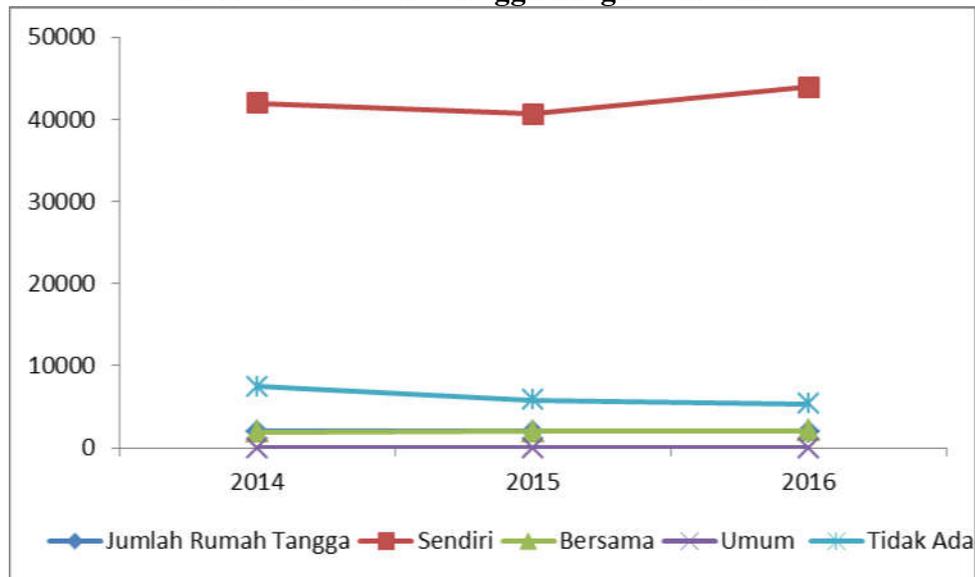


Sumber : Olahan Tabel-23 Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Secara persentase jumlah rumah tangga yang telah mempunyai fasilitas buang air besar sendiri sebanyak 85 % dari jumlah rumah tangga yang terdata, untuk rumah tangga yang tidak mempunyai fasilitas buang air besar sebanyak 10% dan rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar bersama sebesar 4%. Dari gambaran tersebut mayoritas rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya telah memiliki fasilitas buang air besar sendiri pada masing-masing rumah. Sedangkan untuk Kecamatan Pulau Punjung 97% telah mempunyai fasilitas BAB sendiri dan Kecamatan Sungai Rumbai 91% telah mempunyai fasilitas BAB sendiri. Terlihat berdasarkan fasilitas BAB yang dimiliki rumah tangga, pada Kabupaten Dharmasraya kesadaran masyarakat telah cukup tinggi penting fasilitas BAB untuk kenyamanan dan kesehatan keluarga.



Gambar 3.5.9.
Tren Jumlah Rumah Tangga dengan Fasilitas BAB



Sumber : Olahan Tabel-23. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Pada tren tersebut diatas, terlihat peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas BAB sendiri dan tren penurunan rumah tangga tidak memiliki fasilitas BAB. Secara umum terlihat peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya fasilitas BAB dalam rumah tangga sehingga diharapkan berkurangnya pencemaran lingkungan akibat limbah domestik kakus dan penyebaran vector penyakit akibat limbah domestik kakus.

3.5.1.5. Air Limbah Domestik Perkotaan;

Air limbah domestik perkotaan berasal dari pemukiman dan fasilitas kegiatan perekonomian masyarakat seperti hotel dan rumah makan. Sistem pengelolaan air limbah kegiatan rumah makan dilakukan pengelolaan parsial masing-masing rumah makan dengan membuat folder atau bak kontrol. Sedangkan untuk kegiatan perhotelan mengalirkan air kegiatan domestiknya ke drainase. Berikut ini gambaran kualitas dan kuantitas air limbah dari kegiatan hotel tahun 2016.



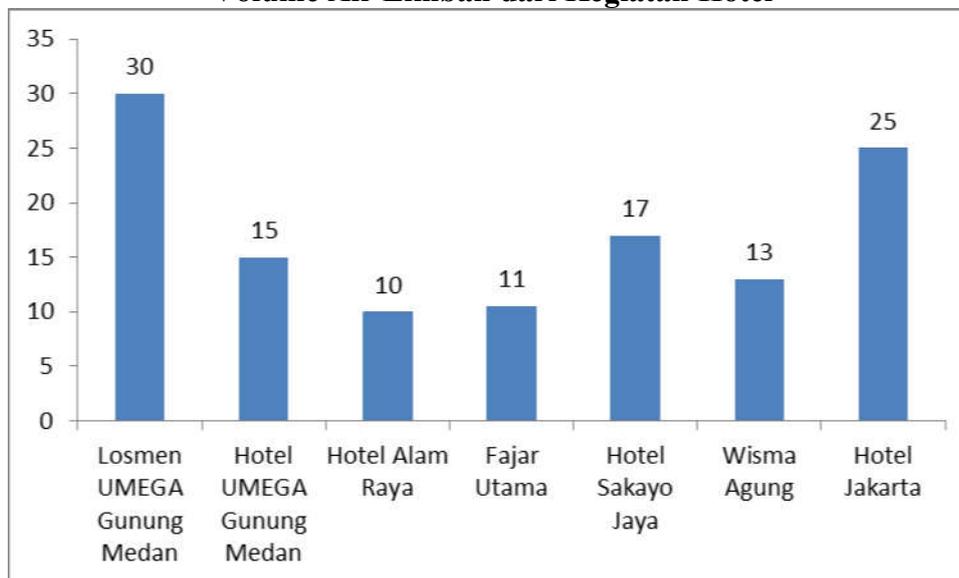
Tabel 3.5.1.
Prakiraan Limbah Domestik Kegiatan Hotel Tahun 2016

No	Kelas Hotel/Penginapan	Limbah Padat (m3/hari)	Limbah Cair (m3/hari)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)
1	Losmen UMEGA Gunung Medan	0,0168	30	0,602	0,828
2	Hotel UMEGA Gunung Medan	0,011	15	0,301	0,414
3	Hotel Alam Raya	0,009	10	0,201	0,276
4	Fajar Utama	0,0058	10,5	0,211	0,290
5	Hotel Sakayo Jaya	0,01	17	0,341	0,469
6	Wisma Agung	0,006	13	0,261	0,359
7	Hotel Jakarta	0,006	25	0,502	0,690

Sumber : Olahan Tabel-27A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Berikut ini volume air limbah dari kegiatan hotel yang ada di Kabupaten Dharmasraya, besarnya volume air limbah dihitung dari tingkat hunian kamar yang tersedia.

Gambar 3.5.10.
Volume Air Limbah dari Kegiatan Hotel



Keterangan : Unit dalam m³/hari

Sumber : Olahan Tabel-27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Hotel Jakarta, Hotel Sakato Jaya, Wisma Agung, Hotel Umega dan Losmen Umega berada pada Kecamatan Pulau Punjung. Dari gambaran tersebut terlihat sekitar 55 m³/hari air limbah kegiatan domestik hotel berada pada

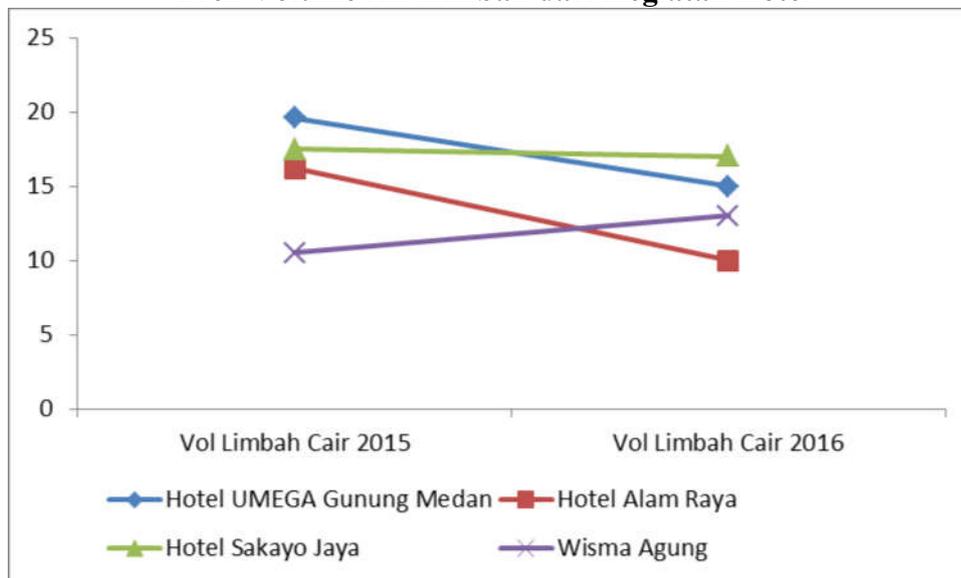




Kecamatan Pulau Punjung dan berada diluar kawasan Kecamatan Pulau Punjung sebesar 65 m³/hari. Dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diestimasi volume air limbah domestiknya adalah kegiatan RSUD Sungai Dareh dengan estimasi volume sebesar 45,6 m³/hari sedangkan untuk kegiatan klinik dan puskesmas belum dapat dilakukan pengitunngan prakiraan.

Jika dilihat tren antar waktu sebelumnya, terlihat volume limbah cair dari 4 (empat) hotel sebagian mengalami peningkatan volume sebagian mengalami penurunan volume air limbah disebabkan penurunan tingkat hunian hotel.

Gambar 3.5.11.
Tren Volume Air Limbah dari Kegiatan Hotel



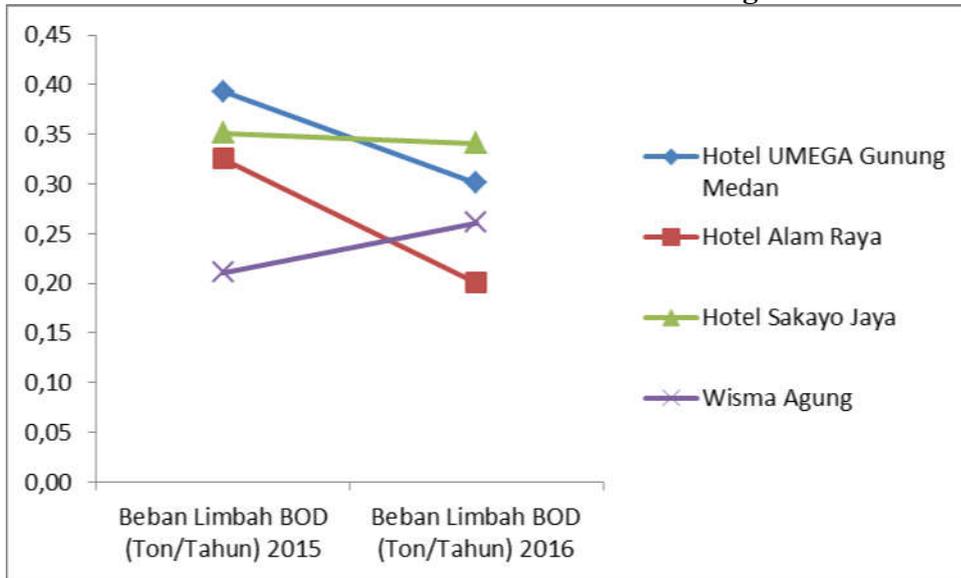
Keterangan : Unit dalam m³/hari

Sumber : Olahan Tabel-27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Penghitungan beban pencemar dilakukan dengan mengalikan volume air limbah terhadap kualitas BOD pada air limbahnya. Untuk beban pencemar BOD yang dihasilkan sama seperti volume air limbah yang dihasilkan, dimana sebagian kegiatan hotel mengalami peningkatan beban pencemar BOD dan sebagian mengalami penurunan beban pencemar BOD.



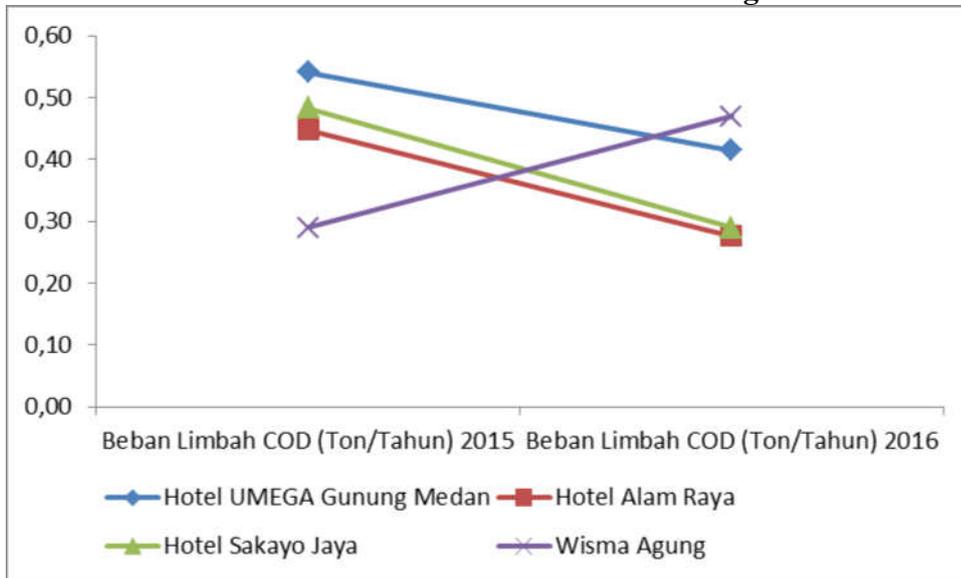
Gambar 3.5.12.
Tren Beban Pencemar BOD Air Limbah dari Kegiatan Hotel



Keterangan : Unit dalam ton BOD/tahun

Sumber : Olahan Tabel-27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Gambar 3.5.13.
Tren Beban Pencemar COD Air Limbah dari Kegiatan Hotel



Keterangan : Unit dalam ton COD/tahun

Sumber : Olahan Tabel-27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Untuk beban beban pencemar COD, penghitungannya sama seperti penghitungan beban pencemar BOD yakni volume limbah cair dikalikan dengan



kualitas COD dari hasil pengukuran COD secara laboratorium. Berbeda dengan tren volume air limbah dan beban pencemar BOD, beban pencemar COD mengalami penurunan mayoritas kegiatan hotel, hanya Hotel Umega Gunung Medan yang mengalami peningkatan.

Sistem pengelolaan air limbah pemukiman untuk limbah kakus dengan menggunakan *septic tank*. saat ini sebagian besar *septic tank* pada pemukiman masyarakat belum mempunyai kriteria kedap air sehingga tingginya tedensi infiltrasi atau penyerapan air limbah kakus pada tanah yang dapat menyebabkan pencemaran tanah. Air limbah domestik kegiatan mandi dan cuci pemukiman di Kabupaten Dharmasraya dialirkan seluruhnya pada drainase yang muaranya ke sungai. Air limbah mandi cuci kegiatan pemukiman ini mempunyai unsur pencemar deterjen dan suspended solid dapat menambah beban pencemar perairan. selain air limbah domestik dari kegiatan pemukiman, hanya sebagian rumah makan yang memiliki folder atau bak control untuk mengolah air limbah domestic cuciannya. Dari air limbah cucian rumah makan tersebut diperkirakan menyumbang beban pencemaran BOD (biological oxygen demand), minyak lemak dan deterjen yang cukup tinggi. Parameter tersebut cukup memberikan beban pencemar bagi lingkungan perairan sebab muara dari drainase adalah sungai. Dari air limbah kegiatan perhotelan yang mempunyai unsur pencemar yang tinggi berupa parameter deterjen dan parameter suspended solid sebagian besar langsung ke saluran drainase lingkungan yang muaranya adalah sungai. Beban pencemar ini mempunyai tedensi menambah beban pencemar bagi lingkungan perairan.

Secara idealnya kegiatan domestik ini harus melalui pengelolaan air limbah yang disebut Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal (IPAL Komunal). Dengan keterbatasan sumber daya keuangan dari daerah, Kabupaten Dharmasraya belum mampu menyediakan sarana pengolahan air limbah untuk kegiatan domestic masyarakat. Dalam perencanaan pengembangan wilayah (RTRW) dan dokumen RDTR, Kabupaten Dharmasraya telah merencanakan ketersediaan jaringan drainase dan IPAL Komunal yang akan mengolah air limbah kegiatan domestik masyarakat.





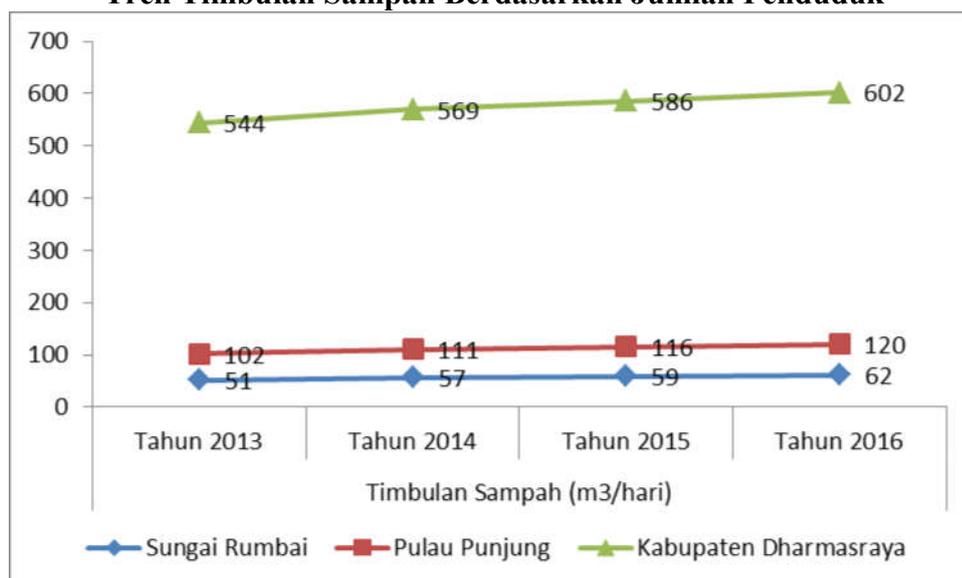
3.5.1.6. Timbulan Sampah Domestik;

Sampah domestik dari kegiatan perkotaan cukup tinggi, berasal dari kegiatan domestik masyarakatnya. Dalam uraian ini akan digambarkan timbulan sampah domestik jumlah penduduk, timbulan sampah domestik dari kegiatan hotel serta timbulan sampah domestik dari kegiatan kesehatan dan timbulan sampah dari kegiatan tempat wisata serta dari fasilitas perhubungan seperti terminal kapal, sedangkan timbulan sampah domestik dari pusat perekonomian masyarakat yakni pasar belum dapat dilakukan estimasi.

Pada uraian ini akan digambarkan timbulan sampah domestik dari jumlah penduduk baik penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan maupun dari penduduk Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai yang direncanakan sebagai perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

Berdasarkan Dokumen Kajian Timbulan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012 yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Dharmasraya, konversi timbulan sampah m^3 /orang/hari adalah $0,00263 m^3$ /orang/hari maka timbulan sampah di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.5.14.
Tren Timbulan Sampah Berdasarkan Jumlah Penduduk



Sumber : Olahan Tabel-27B. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya,

2016





Terlihat laju pertumbuhan timbulan sampah pada 4 (empat) tahun terakhir terjadi peningkatan timbulan sampah untuk Kabupaten Dharmasraya mencapai 3 % per tahun seperti Kecamatan Sungai Rumbai sedangkan pertumbuhan timbulan sampah pada Kecamatan Pulau Punjung lebih tinggi yakni mencapai 5 % pertahun.

Secara sarana dan prasarana persampahan dan sistem pengelolaan persampahan, pada Kecamatan Pulau Punjung telah terbentuk sistem pengelolaan sampah tetapi belum optimal. Dari TPS sampah pada beberapa titik lokasi di Kecamatan Pulau Punjung dilakukan penjemputan oleh truk sampah Dinas Pekerjaan Umum dan dilakukan penimbunan pada TPA (tempat pemrosesan akhir) sampah yang ada di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung yang berjarak 20 km dari Kecamatan Pulau Punjung. Sedangkan pada Kecamatan Sungai Rumbai, sistem pengelolaan sampah masih dikelola oleh nagari atau desa, dimana nagari tersebut melakukan penjemputan sampah pada beberapa titik lokasi dan dilakukan pembuangan pada TPA sementara (yakni dilakukan penimbunan pada suatu lokasi).

Kegiatan domestik lainnya di Kabupaten Dharmasraya seperti sarana perhubungan, tempat wisata, hotel, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari RSUD, puskesmas, dan klinik kesehatan sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.5.2.
Prakiraan Volume Limbah Padat Kegiatan Lainnya Tahun 2016

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Bergerak			1,6
1	Terminal Transit Sungai Betung	Terminal Barang	2,00	1,0
2	Pelabuhan Sungai di Batu Bakawik	Dermaga Sungai	0,25	0,50
3	Penyeberangan Sungai Lansat	Dermaga Ponton	0,20	0,05
4	Penyeberangan Jorong Siguntur	Dermaga Ponton	0,10	0,01
B.	Tidak Bergerak			
B1	Tempat Wisata			0,06
1	Air Terjun Timbulun Indah	Wisata Agro	3,00	0,0053
2	Bendungan Batang Mimpi	Wisata Agro	4,00	0,0001





No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Bendungan Batu Bakawik	Wisata Agro	4,00	0,0072
4	Hot Spring Sungai Belit	Wisata Agro	7,00	0,0007
5	Bendungan Batang Siat	Wisata Agro	2,00	0,0001
6	Puncak Gunung Medan	Wisata Alam	5,00	0,0026
7	Air Terjun Tujuh Tingkat	Wisata Alam	2,00	0,0002
8	Puncak Timpeh	Wisata Alam	10,00	0,0039
9	Gua Gadang (Timpeh)	Wisata Alam	2,00	0,0043
10	Air Terjun Sungai Suir	Wisata Alam	1,00	0,0006
11	Air Tejun IX Koto	Wisata Alam	2,50	0,0007
12	Pulau Cinta	Wisata Alam	3,00	0,0099
13	Talaga Baranang Siang	Wisata Alam	2,00	0,0053
14	Selaju Sampan	Wisata Alam	5,00	0,0099
15	Gua Jigak Kampuang Surau	Wisata Alam	2,00	0,0005
16	Rumah Kerajaan Siguntur	Wisata Sejarah	0,50	0,0010
17	Rumah Kerajaan Sungai Dareh	Wisata Sejarah	0,50	0,0004
18	Rumah Kerajaan Koto Besar	Wisata Sejarah	0,05	0,0004
19	Rumah Kerajaan Padang Laweh	Wisata Sejarah	0,12	0,0003
20	Rumah Gadang Pulau Punjung	Wisata Sejarah	0,05	0,0005
21	Rumah Gadang Puti Bulian	Wisata Sejarah	0,08	0,0006
22	Candi Pulau Sawah	Wisata Sejarah	2,00	0,0005
23	Candi Padang Roco	Wisata Sejarah	2,00	0,0007
24	Candi Awang Maombiak	Wisata Sejarah	1,50	0,0003
25	Candi Rambahan	Wisata Sejarah	1,50	0,0007
26	Makam Raja-Raja Koto Besar	Wisata Sejarah	0,05	0,0005
27	Makam Nenek Susu Tunggal	Wisata Sejarah	2,00	0,0004
28	Makam Syekh Alib Ba	Wisata Sejarah	0,07	0,0007
29	Makam Rajo Kuek Kuaso	Wisata Sejarah	0,10	0,0007
30	Makam Datuak Gadang	Wisata Sejarah	1,20	0,0005
31	Durian Di Takuak Rajo	Wisata Sejarah	1,00	0,0003
32	Mesjid Tua Siguntur	Wisata Sejarah	0,05	0,0010
33	Tugu PDRI	Wisata Sejarah	1,00	0,0007
B1	Penginapan			0,06
1	Losmen UMEGA Gunung Medan	Hotel	-	0,02
2	Hotel UMEGA Gunung Medan	Hotel	-	0,01
3	Hotel Alam Raya	Hotel	-	0,01
4	Fajar Utama	Hotel	-	0,01
5	Hotel Sakayo Jaya	Hotel	0,128	0,01
6	Wisma Agung	Hotel	-	0,01
7	Hotel Jakarta	Hotel	0,316	0,01
B2	Faskes Rawat Inap			
1	RSUD Sungai Dareh	Faskes	20,00	12,50





No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Puskesmas Sitiung	Faskes	-	-
3	Puskesmas Koto Baru	Faskes	-	-
4	Puskesmas Sungai Rumbai	Faskes	-	-
5	Puskesmas Silago	Faskes	-	-
6	Puskesmas Timpeh	Faskes	-	-
7	Puskesmas Sungai Limau	Faskes	-	-
8	Klinik Arba	Faskes	-	-
9	Klinik Orin	Faskes	-	-
10	Klinik Nurjinis	Faskes	0,0372	-
11	Klinik Suci Shati	Faskes	-	-
12	Klinik Innayah	Faskes	-	-
13	Klinik Restu Bunda	Faskes	-	-
14	Klinik Harapan Bunda	Faskes	-	-
15	Klinik Buah Hati	Faskes	-	-
16	Klinik PT BRM	Faskes	-	-
17	Klinik Desmiwati	Faskes	0,00108	-
18	Klinik Vortuna	Faskes	0,0108	-
19	Klinik Ariaah	Faskes	-	-
20	Klinik Fadila	Faskes	0,0288	-
21	Klinik Arga	Faskes	-	-
22	Klinik Bunda	Faskes	-	-
23	Klinik PMC	Faskes	0,0192	-
24	Klinik SS	Faskes	-	-
25	Klinik Chairunissa	Faskes	-	-
26	Klinik Merpahan	Faskes	-	-
27	Klinik Keluarga	Faskes	-	-
28	Klinik RSA	Faskes	-	-
29	Klinik Safa Marwah	Faskes	-	-
30	Klinik Twin Mdika	Faskes	-	-
31	Klinik Harapan Kita	Faskes	-	-
32	Klinik Ahsahla	Faskes	-	-
33	Klinik KMC	Faskes	-	-
34	Klinik Kyodafa	Faskes	0,052	-
35	Klinik Utama Arba	Faskes	0,144	-
36	Klinik Pratama Bunda	Faskes	0,136	-
37	Klinik Utama Buah Hati	Faskes	0,020	-

Sumber : Olahan Tabel-27. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Sebagian besar kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan belum dapat dilakukan estimasi timbulan sampah domestiknya disebabkan estimasi jumlah pengunjung belum terdata dengan baik, sedangkan kegiatan lainnya telah terdata dengan baik sehingga dapat diestimasi timbulan sampah domestiknya. Sedangkan





untuk hotel, keseluruhan limbah padat domestik (sampah domestik) sebesar 0,06 m³/hari dari 7 buah penginapan atau hotel di Kabupaten Dharmasraya, untuk hotel yang ada di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 0,03 m³/hari.

Pada tempat wisata, berdasarkan jumlah pengunjung, dari semua tempat wisata yang ada di Kabupaten Dharmasraya diestimasi menghasilkan limbah pada domestik (sampah domestik) sebanyak 0,06 m³/hari dan dari fasilitas perhubungan berupa terminal dan pelabuhan penyeberangan ponton sebanyak 1,6 m³/hari.

3.5.2. STATUS LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN

Secara spesifik indikator kualitas lingkungan yang diperkirakan dipengaruhi oleh tekanan pada perkotaan antara lain:

1. Kualitas air sungai sekitar perkotaan;
2. Kualitas air embung/kolam retensi sekitar perkotaan;
3. Kualitas air sumur sebagai air baku masyarakat;
4. Kualitas udara ambient pada perkotaan;
5. Jenis penyakit utama yang diderita masyarakat;

Berikut ini akan diuraikan secara rinci, indikator kualitas lingkungan terkait tekanan pada perkotaan dimana katagori kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 adalah Kecamatan Pulau Punjung sebagai ibukota kabupaten dan Kecamatan Sungai Rumbai merupakan gerbang Timur Propinsi Sumatera Barat dan kawasan strategis Propinsi Sumatera Barat.

3.5.2.1. Kualitas Air Sungai Sekitar Perkotaan;

Pada Kecamatan Sungai Rumbai, secara geografis kegiatan masyarakat tidak ada yang mendekati sungai, pola ruang pengembangan wilayah pada Kecamatan Sungai Rumbai adalah mengikuti pola jalan yakni Jalan Lintas Sumatera dan pola pemukiman wilayah pendudung sekitarnya yakni daerah transmigrasi yang mengelilingi Kecamatan Pulau Punjung. Untuk sungai yang mengalir pada Kecamatan Sungai Rumbai adalah Sungai Betung yang lokasinya berada pada perbatasan Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Baru

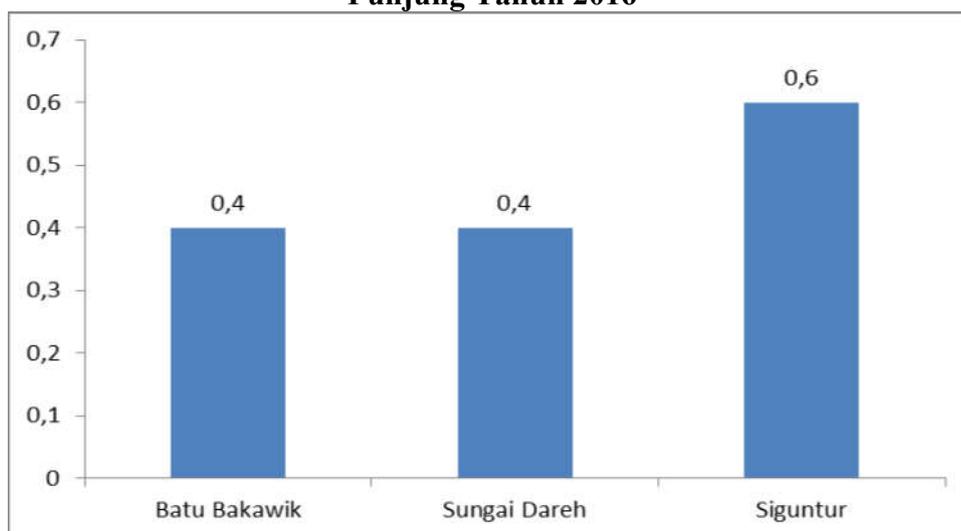


dimana pusat kegiatan masyarakat baik pemukiman maupun perekonomian masih relative jarang.

Pada Kecamatan Pulau Punjung, yang merupakan ibukota Kabupaten Dharmasraya pola ruang perkembangan wilayahnya mengikuti pola aliran Sungai Batanghari, sebab kecamatan ini dibelah oleh Sungai Batanghari. Pola ruang mengikuti Jalan Lintas Sumatera baru berkembang akhir-akhir ini disebabkan banyak infrastruktur pemerintah yang dirintis mengikuti pola jalan. Disebabkan mayoritas pola perkembangan wilayah mengikuti Sungai Batanghari, otomatis Sungai Batanghari merupakan wadah penampung beban pencemar dari kegiatan domestik masyarakat. Pada uraian ini akan digambarkan status mutu kualitas air Sungai Batanghari yang ada di Kabupaten Dharmasraya pada khususnya sekitar lokasi Kecamatan Pulau Punjung hingga batas Kecamatan Sitiung.

Pada sekitar Kecamatan Pulau Punjung hingga batas Kecamatan Sitiung, lokasi titik sampling kualitas air Sungai Batanghari dimulai dari Batu Bekawi, Jembatan Sungai Dareh dan Siguntur. Berikut ini gambaran kualitas air Sungai Batanghari pada titik sampling tersebut untuk parameter BOD (biological oxygen demand) sebagai indikator tinggi atau rendahnya pencemar organik biodegradable pada air sungai tersebut.

Gambar 3.5.15.
Kualitas Paramater BOD pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016



Satuan dalam mg/l (ppm)

Sumber : Olahan Tabel-17. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

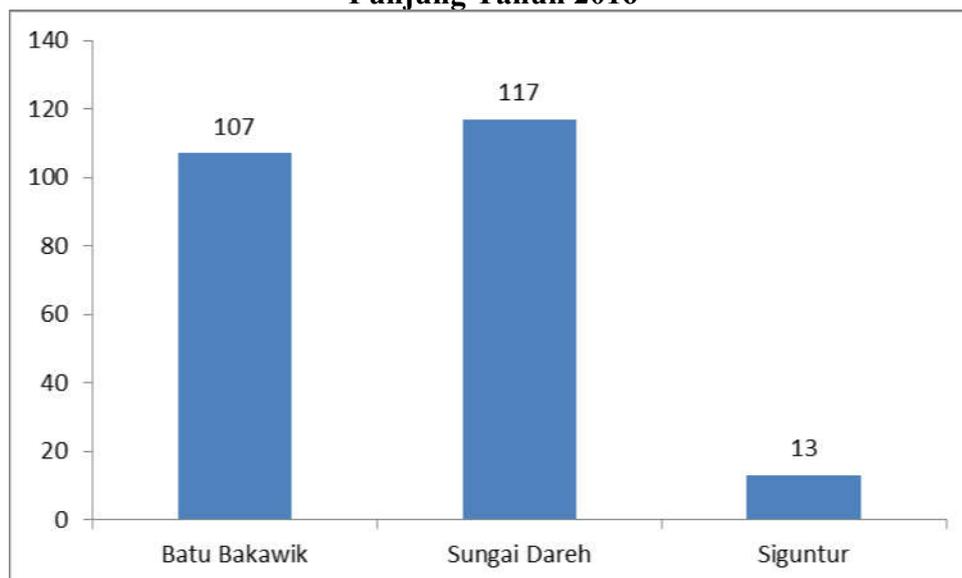




Baku mutu BOD untuk kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air adalah 3 ppm, kualitas pencemar BOD masih berada pada baku mutu yang dipersyaratkan. Masih rendahnya pencemar organik biodegradable teridentifikasi disini disebabkan Sungai Batanghari merupakan sungai besar dengan debit maksimum 1645 m³/dt dan debit minimum 49 m³/dt sehingga terjadi pengenceran yang tinggi terhadap pencemar organik domestik yang masuk pada sungai tersebut. Selain pengenceran pencemar organik domestik jumlahnya tidak terlalu significant untuk menimbulkan perubahan kualitas Sungai Batanghari.

Untuk pencemar organik nonbiodegradable (COD), pada lokasi sampling tersebut terlihat cukup tinggi melebihi baku mutu kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni < 25 ppm. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pencemar organik nonbiodegradable yang masuk pada sungai tersebut. Pencemar nonbiodegradable dapat berupa jasad tumbuh-tumbuhan, air larian dari catchment yang membawa organik sisa tumbuh-tumbuhan, karena Sungai Batanghari memiliki catchment area yang merupakan lahan perkebunan dan hutan.

Gambar 3.5.16.
Kualitas Paramater COD pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016



Satuan dalam mg/l (ppm)

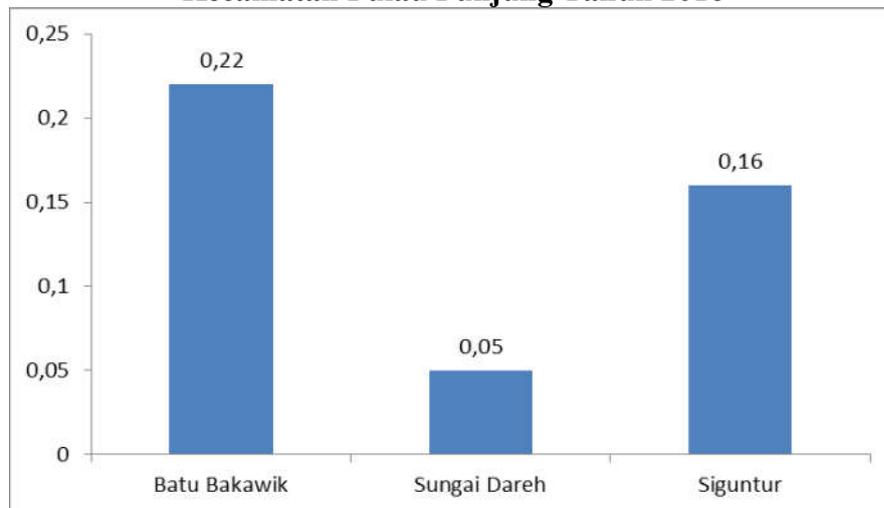
Sumber : Olahan Tabel 17. Lamipran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016





Untuk parameter minyak lemak juga dibawah baku mutu kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, dimana baku mutu parameter minyak lemak adalah $< 1 \text{ mg/l}$, hal ini juga disebabkan tingginya debit Sungai Batanghari dan masih rendahnya pencemar organik dari kegiatan domestik yang terbawa masuk ke sungai tersebut.

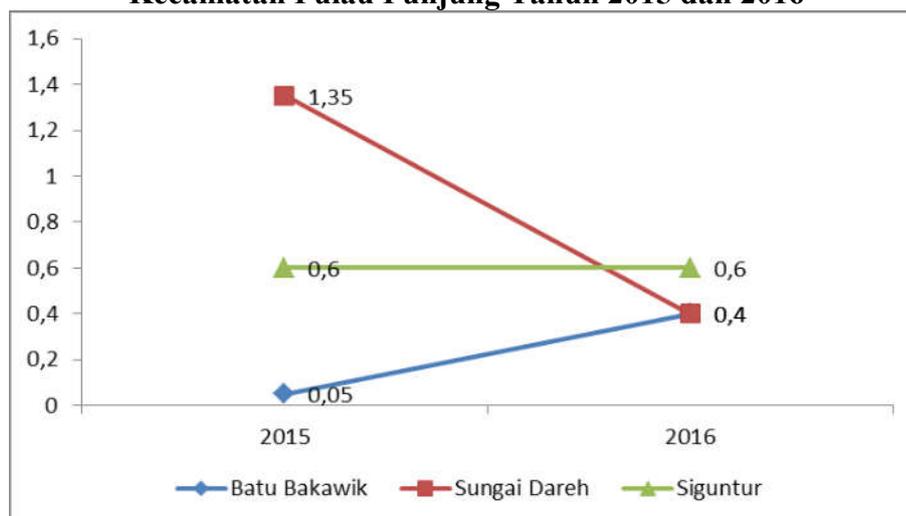
Gambar 3.5.17.
Kualitas Parameter Minyak Lemak pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016



Satuan dalam mg/l (ppm)

Sumber : Olahan Tabel-17. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Gambar 3.5.18.
Tren Perubahan Kualitas Paramater BOD pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016



Satuan dalam mg/l (ppm),

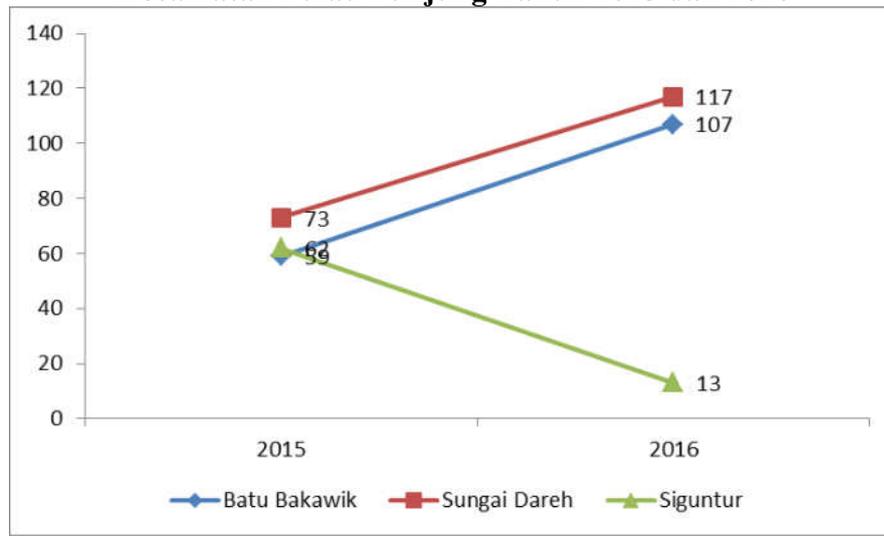
Sumber : Olahan Tabel-17H Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016





Kualitas parameter BOD cenderung makin baik pada 2 (dua) titik sampling yakni Sungai Dareh dan Siguntur, sedangkan Batu Bekawik malah makin memburuk kualitasnya.

Gambar 3.5.19.
Tren Perubahan Kualitas Paramater COD pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016



Satuan dalam mg/l (ppm)

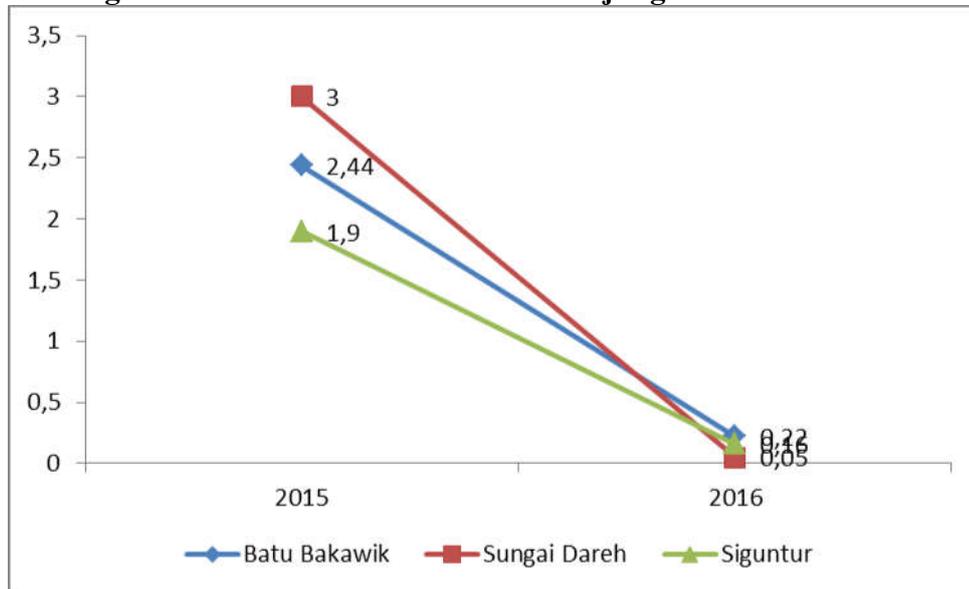
Sumber : Olahan Tabel-17H. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Kualitas parameter COD cenderung makin buruk pada 2 (dua) titik sampling yakni Sungai Dareh dan Batu Bekawik, sedangkan Siguntur malah makin membaik kualitasnya.

Sedangkan untuk kualitas parameter minyak lemak, terjadi perubahan yang significant kualitasnya dari tahun 2015 sebelumnya, semua lokasi titik sampling mengalami perbaikan kualitasnya dari melebihi baku mutu sebelumnya menjadi memenuhi baku mutu air kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.



Gambar 3.5.20.
Tren Perubahan Kualitas Parameter Minyak Lemak pada Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016



Satuan dalam mg/l (ppm)

Sumber : Olahan Tabel-17H. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Jika dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran sebagaimana ketentuan pada Kep MENLH Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, dengan menggunakan parameter TSS, BOD, COD, TP, Fecal Coli dan Total Coliform, pada 3 (tiga) lokasi titik sampling tersebut status mutunya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.5.3.
Indeks Pencemaran Sungai Batanghari Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2016

Lokasi	Konsentrasi Parameter						Indeks	Status Mutu Air
	TSS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	T-P (mg/L)	Fecal Coliform (jmlh/100 ml)	Total Coliform (jmlh/100 ml)		
Batu Bakawik	165	0,4	107	1,25	> 2400	> 2400	6,63	cemar sedang
Sungai Dareh	50	0,4	117	1,22	> 2400	> 2400	6,61	cemar sedang
Siguntur	217	0,6	13	1,46	> 2400	> 2400	4,24	cemar ringan

Sumber : Olahan Tabel-17C Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016



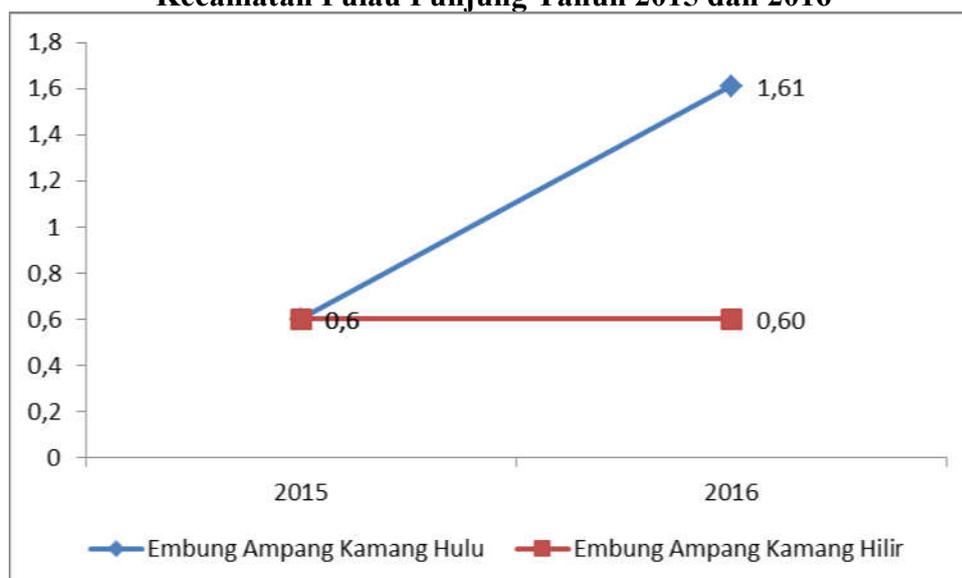
Secara rata-rata status mutu Sungai Batanghari pada 3 (tiga) titik lokasi sampling menunjukkan status mutu air cemar ringan. Sedangkan secara spesifik parameter, parameter yang melebihi baku mutu kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 adalah parameter COD, Fecal Coli dan Total Coliform. Parameter ini COD menunjukkan masih tingginya pencemar organik nonbiodegradable dalam air Sungai Batanghari dan parameter Fecal Coli dan Total Coliform menunjukkan masih tingginya pencemaran bakteri dari kegiatan domestik yang berkembang pada air Sungai Batanghari.

3.5.2.2. Kualitas Air Embung/Retensi Sekitar Perkotaan;

Pada Kecamatan Pulau Punjung, ada 1 (satu) buah embung yang berada pada lokasi pemukiman masyarakat yakni Embung Kamang pada Jorong Sungai Kilangan Nagari Sungai Dareh. Embung ini berfungsi sebagai penyedia air irigasi sebagian kecil sawah pada daerah tersebut. Selain itu, embung ini diperkirakan menerima beban kegiatan domestik pemukiman disekitarnya.

Berikut gambaran kualitas Embung Kamang dengan tren dari tahun 2016 untuk parameter BOD sebagai berikut.

Gambar 3.5.21.
Tren Perubahan Kualitas Parameter BOD pada Embung Kamang Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016



Satuan dalam mg/l (ppm).

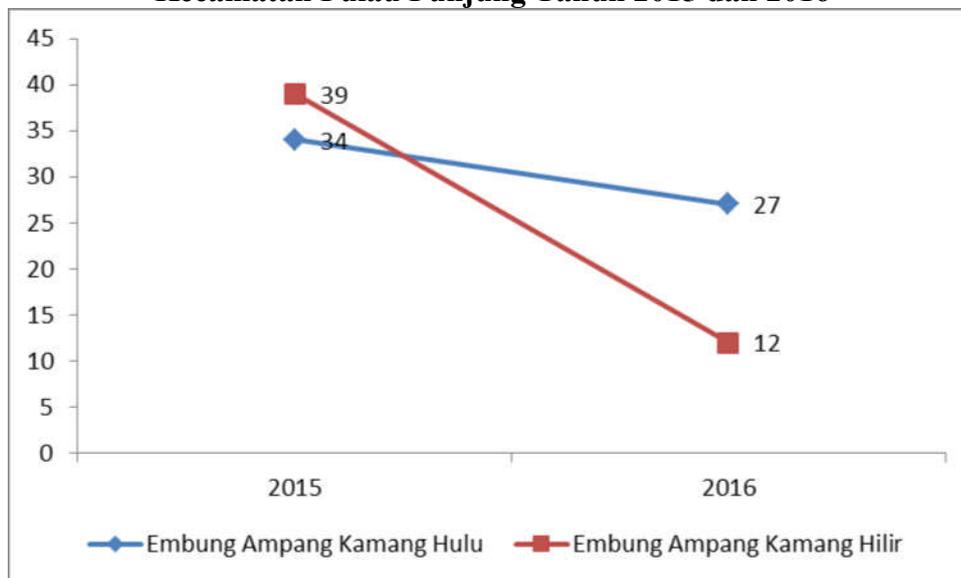
Sumber : Olahan Tabel-17F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016



Terjadi penurunan kualitas dari tahun 2015 sebelumnya untuk parameter BOD dengan meningkatnya parameter BOD walau masih berada pada baku mutu air kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni BOD 3 ppm.

Untuk kualitas parameter COD terlihat mengalami perbaikan kualitas pada tahun 2016 ini walaupun pada titik sampling hilir kualitasnya masih berada diatas baku mutu air kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni diatas 25 ppm.

Gambar 3.5.22.
Tren Perubahan Kualitas Paramater COD pada Embung Kamang Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016



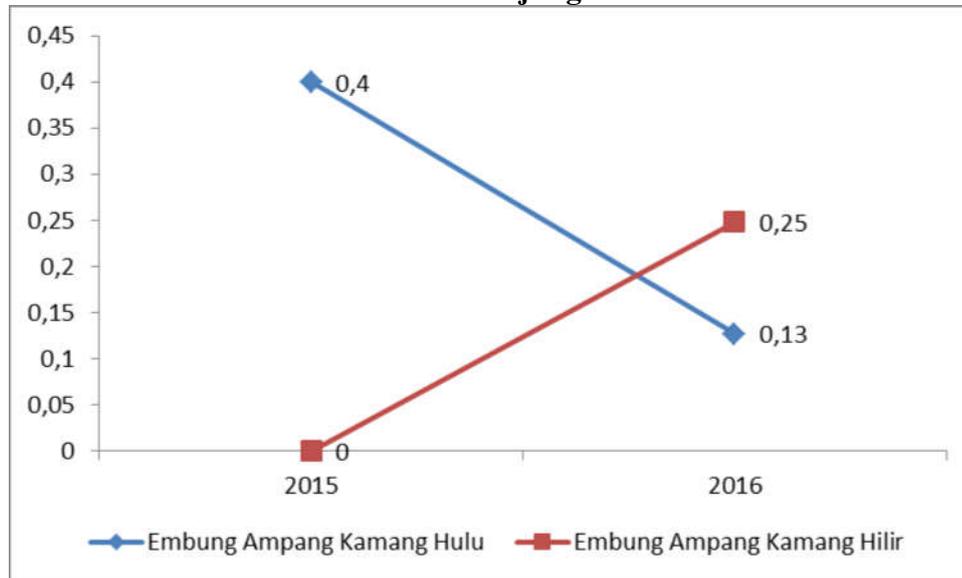
Satuan dalam mg/l (ppm)

Sumber : Olahan Tabel-17F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Untuk parameter minyak lemak, cenderung masih berada pada baku mutu kualitas air kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, dimana pada baku mutu tersebut parameter minyak lemak adalah sebesar 1 ppm, berdasarkan tren yang ada, pada tahun 2015 dan 2016 ini parameter minyak lemak masih jauh berada pada baku mutu air kelas II tersebut.



Gambar 3.5.23.
Tren Perubahan Kualitas Parameter Minyak Lemak pada Embung Kamang Sekitar Kecamatan Pulau Punjung Tahun 2015 dan 2016



Satuan dalam mg/l (ppm)

Sumber : Olahan Tabel-17F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Dapat disimpulkan bahwa kualitas parameter organik yakni BOD, COD, dan minyak lemak pada Embung Kamang masih berada pada baku mutu air kelas II Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 kecuali pada titik pantau Embung Kamang Hilir parameter COD sedikit diatas baku mutu air kelas II yakni 27 ppm, sedangkan baku mutu air kelas II parameter COD adalah < 25 ppm

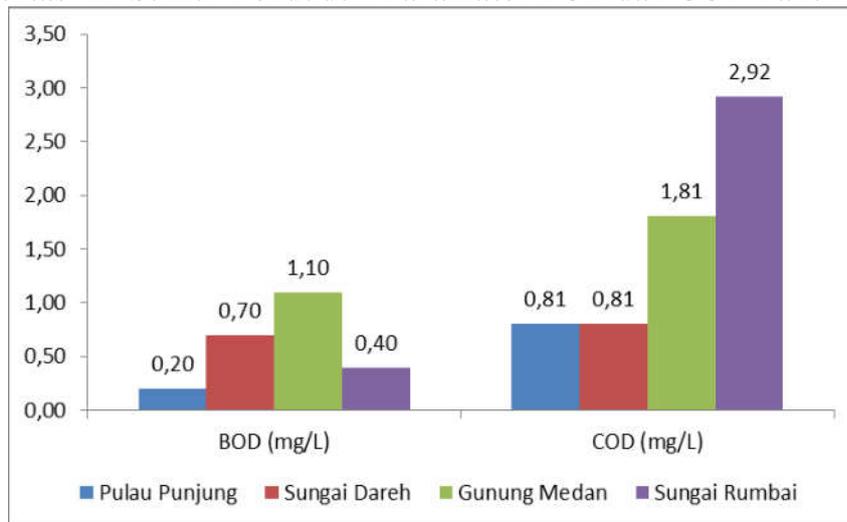
3.5.2.3. Kualitas Air Sumur Sebagai Air Baku Masyarakat;

Pada Kabupaten Dharmasraya hampir 85 % rumah tangga menggunakan air sumur sebagai sumber air bakunya, untuk Kecamatan Pulau Punjung mencapai 86 % rumah tangga menggunakan air sumur sebagai sumber air bakunya, dan Kecamatan Sungai Rumbai 100 % rumah tangga menggunakan air sumur sebagai sumber air bakunya. Untuk titik pantau tersebut, pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini terdapat 4 (empat) lokasi titik pantau kualitas air sumur yakni pada Pelayangan Pulau Punjung, Perumahan Vila Tama Nagari Sungai Dareh Pulau Punjung, Perumahan pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung dan, Perumahan pada Kecamatan Sungai Rumbai.



Berikut ini hasil analisa kualitas air sumur penduduk untuk parameter BOD dan COD. Hasil analisa berikut menunjukkan pada semua lokasi titik sampling berada pada baku mutu air baku untuk air minum kelas I Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni baku mutu tersebut BOD adalah 2 ppm dan COD adalah 10 ppm.

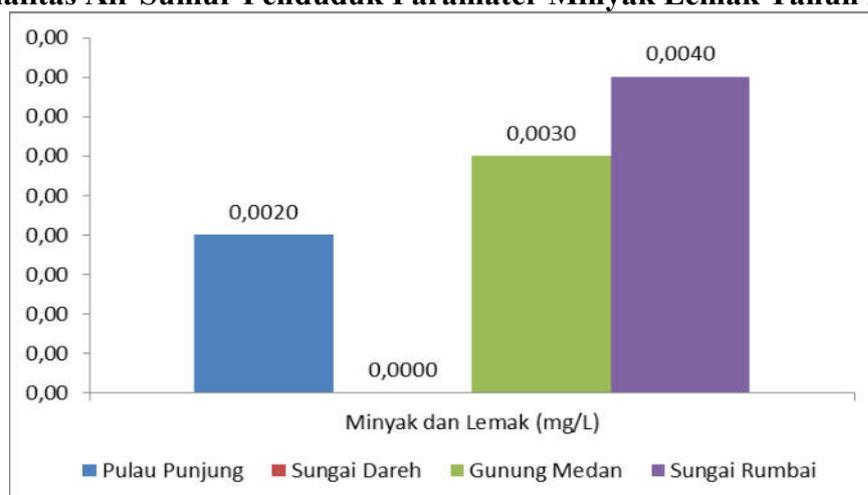
Gambar 3.5.24.
Kualitas Air Sumur Penduduk Paramater BOD dan COD Tahun 2016



Satuan dalam mg/l (ppm).

Sumber : Olahan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Gambar 3.5.25.
Kualitas Air Sumur Penduduk Paramater Minyak Lemak Tahun 2016



Satuan dalam mg/l (ppm).

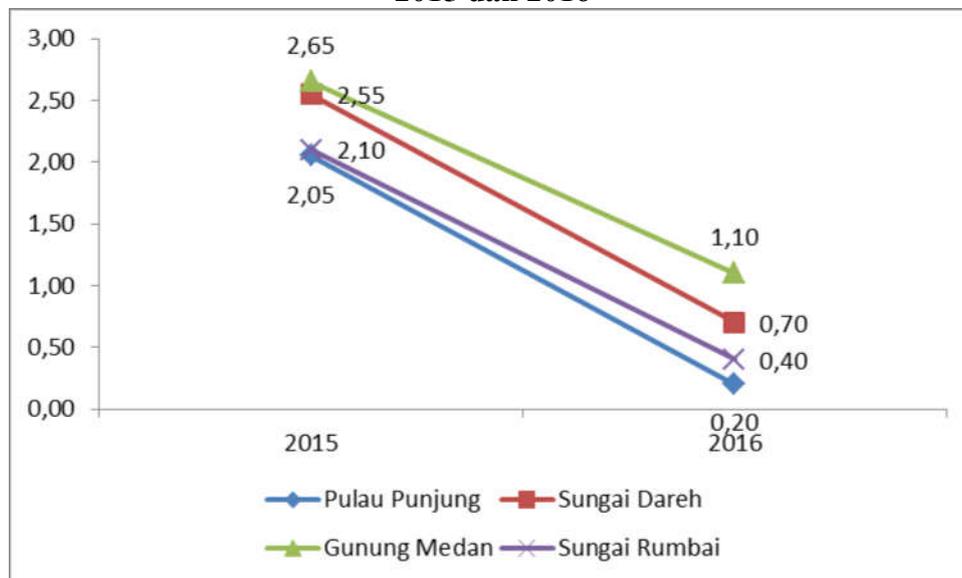
Sumber : Olahan Tabel-19. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016



Untuk parameter minyak lemak juga memenuhi baku mutu air baku untuk air minum yakni kelas I Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni sebesar 1 ppm. Untuk parameter Fecal Coli dan Fecal Coliform, pada semua titik sampling melebihi baku mutu air kelas I Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni semuanya melebihi 2.400/100 ml.

Jika dilihat perbandingan antara kualitas air sumur penduduk parameter BOD pada tahun 2015 dengan parameter BOD tahun 2016 sebagai berikut.

Gambar 3.5.26.
Tren Perubahan Kualitas Parameter BOD pada Sumur Penduduk Tahun 2015 dan 2016



Satuan dalam mg/l (ppm)

Sumber : Olahan Tabel-19F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

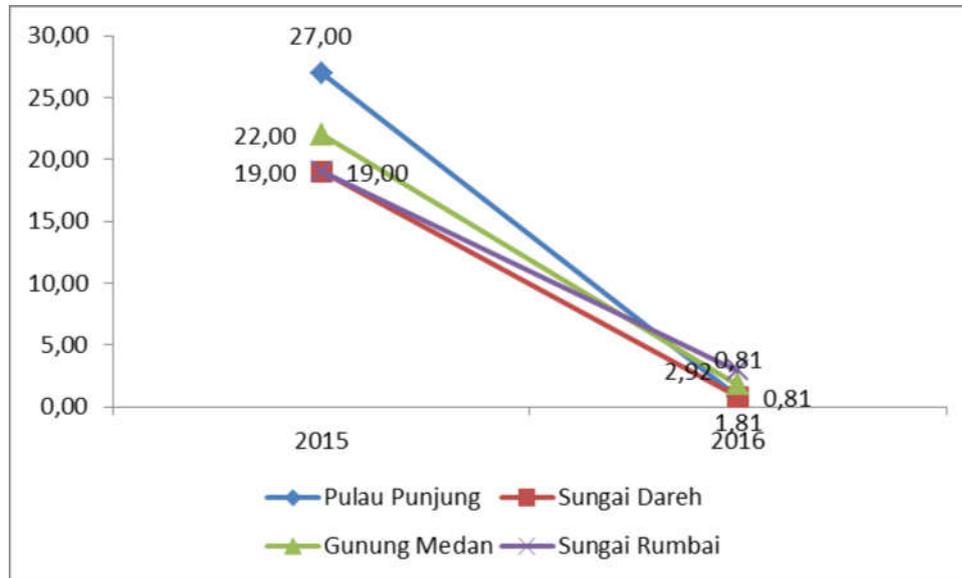
Terjadi peningkatan kualitas parameter BOD, dimana pada tahun 2015 berada diatas baku mutu air baku kelas I Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 yakni 2 ppm, pada tahun 2016 semua titik sampling parameter BODnya memenuhi baku mutu kelas I Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

Sama seperti parameter BOD, parameter COD juga mengalami peningkatan kualitas dimana pada tahun 2015 semua lokasi sampling parameter BODnya diatas 2 ppm, tetapi pada tahun 2016 paramater BODnya menjadi dibawah 2 ppm. Secara keseluruhan untuk parameter BOD dan COD terjadi peningkatan kualitas dari semua titik sampling dari tahun 2015 ke tahun 2016.





Gambar 3.5.27.
Tren Perubahan Kualitas Parameter COD pada Sumur Penduduk Tahun 2015 dan 2016



Satuan dalam mg/l (ppm)

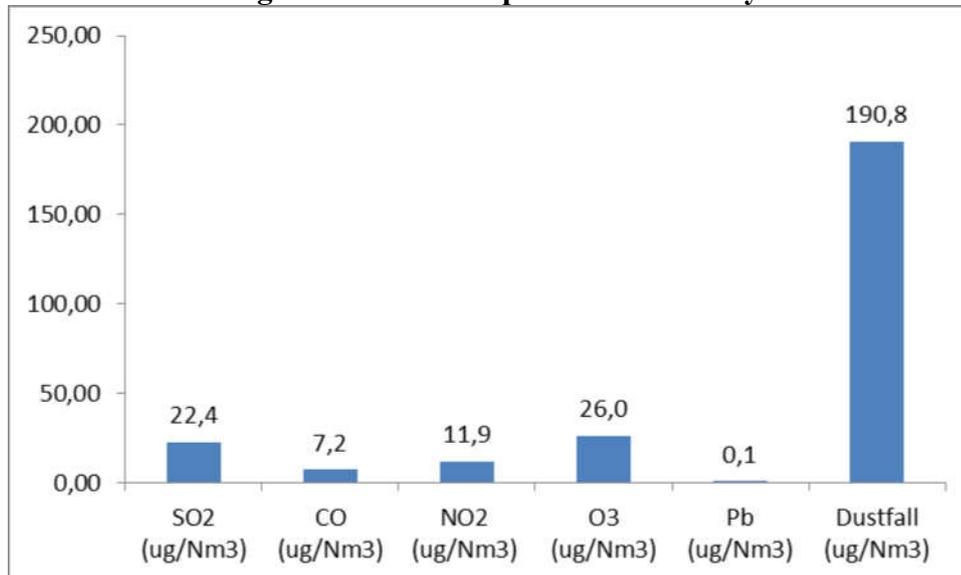
Sumber : Olahan Tabel-19F. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

3.5.2.4. Kualitas Udara Ambiet pada Perkotaan;

Kualitas udara ambiet yang akan digambarkan disini adalah kualitas udara ambiet perkotaan yakni Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai, untuk Kecamatan Sungai Rumbai ada pengukuran kualitas udara ambiet yang dilakukan oleh Propinsi Sumatera Barat dengan parameter SO_2 , CO, NO_2 , O_3 , Pb, dan *Dust Fall* dan untuk Kecamatan Pulau Punjung Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengukuran pada lokasi Kantor Bupati dengan parameter Total Solid Partikulat. Berikut ini hasil pengukuran kualitas udara ambiet pada lokasi sampling Mesjid Al Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya.



Gambar 3.5.28.
Hasil Kualitas Udara Ambient Lokasi Sampling Mesjid Al Ichwan
Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



Satuan dalam ug/Nm³ (ppm)

Sumber : Olahan Tabel-30. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Sedangkan untuk Kecamatan Pulau Punjung hanya parameter TSP yang dilakukan pengukuran dengan hasil 40 ug/Nm³ atau 40 ppm.

Jika dibandingkan dengan baku mutu udara ambient Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, maka hasil pengukuran kualitas udara ambient pada Mesjid Al Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.4.
Perbandingan Hasil Pengukuran Tahun 2016 Terhadap Baku Mutu Udara
Ambien

No	Parameter	Konsentrasi (ug/Nm ³)	Baku Mutu (PP No 41 Tahun 1999) (ug/Nm ³)	Keterangan
1	SO ₂	22,43	365	Masih memenuhi baku mutu
2	CO	7,22	10.000	Masih memenuhi baku mutu
3	NO ₂	11,89	150	Masih memenuhi baku mutu
4	O ₃	25,96	235	Masih memenuhi baku mutu
5	TSP	-	230	-

Sumber : Olahan Tabel-30A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya,

2016

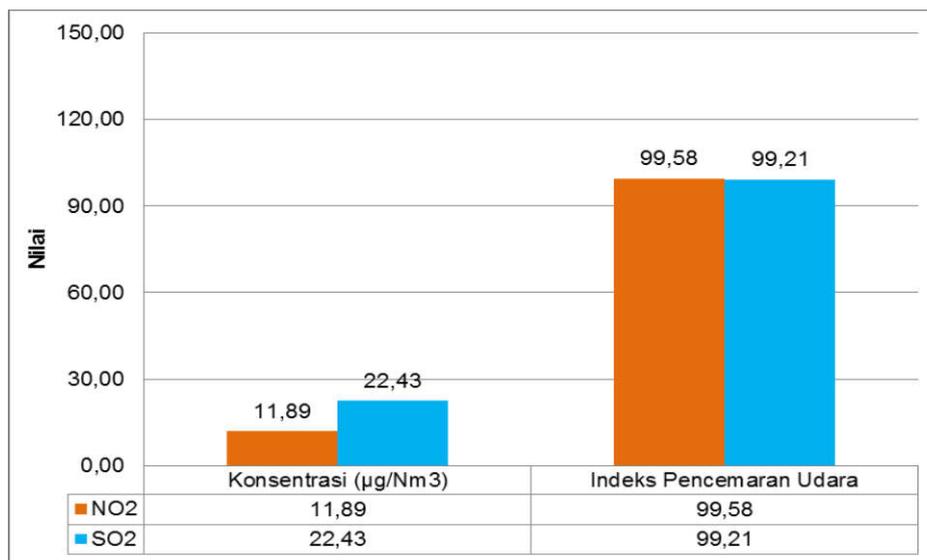




Dari hasil pengukuran tersebut semua parameter memenuhi baku mutu kualitas udara ambient Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999. Konsentrasi tersebut jauh dibawah baku mutu yang ada sehingga kualitas udara ambient pada lokasi sampling tersebut dapat dikategorikan baik.

Dari hasil pengukuran tersebut diatas, dapat digunakan perhitungan indeks pencemaran udara dengan parameter digunakan adalah parameter NO₂ dan SO₂. Berikut ini hasil perhitungan indeks pencemaran pada titik sampling kualitas udara ambient di Masjid Al Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. Hasil indeks pencemaran udara (IPU) diatas 99 % dengan kategori udara masih dinilai baik atau tidak tercemar.

Gambar 3.5.29. Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Udara pada Masjid Al Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai Tahun 2016

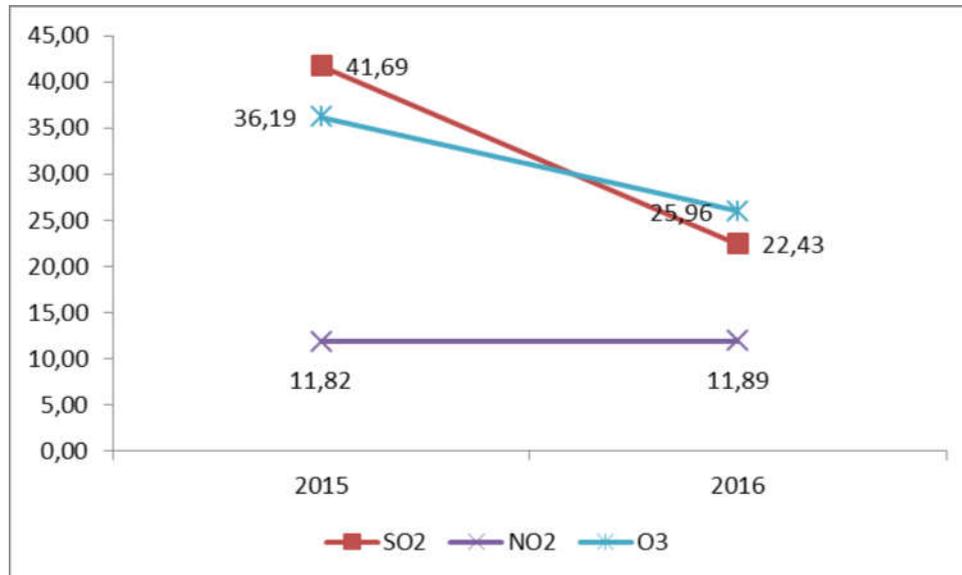


Sumber : Olahan Tabel-30B Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Berdasarkan hasil kualitas udara ambient pada tahun 2015 dan tahun 2016 titik sampling pada Masjid Al Ichwan Kecamatan Sungai Rumbai dapat digambarkan tren perubahannya, dari gambaran perubahan kualitas tersebut, parameter SO₂, NO₂, dan O₃ terjadi peningkatan kualitas udara atau penurunan konsentrasi untuk parameter tersebut, dari gambaran tersebut dapat dinilai terjadi peningkatan kualitas udara pada lokasi tersebut.



Gambar 3.5.30.
Tren Penurunan Konsentrasi Parameter SO₂, NO₂, dan O₃ dari Tahun 2015 ke Tahun 2016



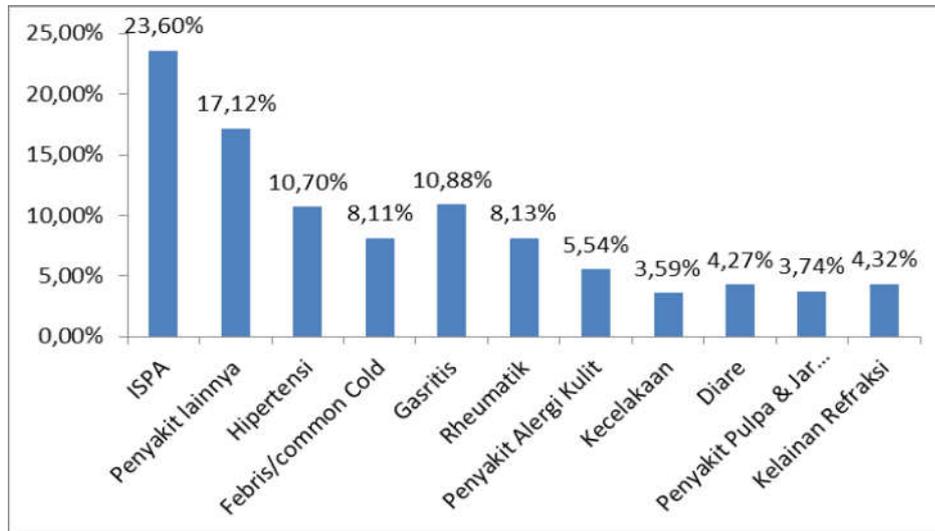
Sumber : Olahan Tabel-30E. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

3.5.2.5. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Masyarakat;

Informasi jenis penyakit utama yang diderita masyarakat pada Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 berasal dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, dari informasi tersebut diperoleh gambaran 10 (sepuluh) penyakit utama yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya. Berikut ini persentase jumlah penyakit utama yang diderita masyarakat Kabupaten Dharmasraya tahun 2016. Persentase penyakit ISPA paling banyak diderita yakni mencapai 23,6 % dan diikuti dengan penyakit Gasritis atau penyakit lambung sebanyak 10,9 %. Penyakit yang paling sedikit diderita oleh masyarakat Kabupaten Dharmasraya adalah penyakit Pulpa Jaringan sebanyak 3,74 dan Kecelakaan sebanyak 3,6 %. Penyakit ISPA dapat diperkirakan salah satu penyebabnya adalah kondisi cuaca dan kondisi kualitas udara. Tetapi jika dibandingkan dengan kualitas udara yang ada di Kabupaten Dharmasraya Indeks Pencemaran Udara (IPU) nya masih masuk dalam kategori baik yakni IPU diatas 90 %.



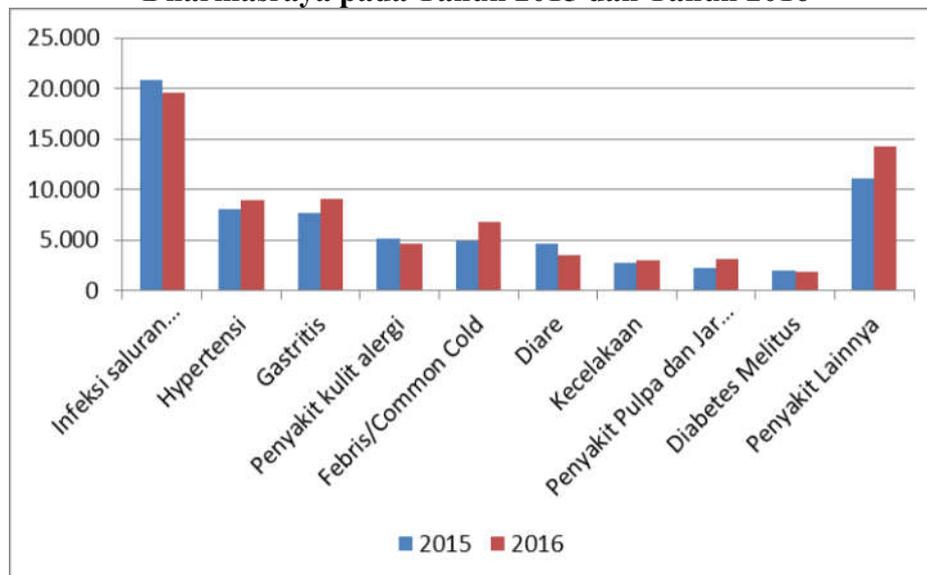
Gambar 3.5.31.
Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel-25. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Berikut gambaran jumlah penderita 10 (sepuluh) penyakit utama di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 dan tahun 2016.

Gambar 3.5.32.
Perbandingan Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk di Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2015 dan Tahun 2016



Sumber : Olahan Tabel-2A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016



Untuk perubahan penyakit utama yang diderita, dari tahun 2015 ke tahun 2016 terjadi peningkatan penderita yakni untuk penyakit Gasritis dan penyakit Febris/demam serta penyakit lainnya.

3.5.3. UPAYA / RESPON DAERAH DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN PERKOTAAN

Identifikasi tekanan terhadap lingkungan yang diuraikan pada uraian tersebut diatas antara lain :

1. Tekanan berupa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta tingkat pendidikannya;
2. Tekanan berupa informasi jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah rumah tangga;
3. Tekanan berupa sarana dan prasarana lingkungan pemukiman terutama cakupan air bersih dan MCK, informasi yang akan diuraikan antara lain:
 - Jumlah rumah tangga dan sumber air minum;
 - Jumlah rumah tangga dan fasilitas buang air besar;
4. Tekanan berupa sistem pengelolaan limbah cair domestik yang dihasilkan masyarakat perkotaan
5. Tekanan berupa sistem pengelolaan sampah perkotaan.

Dari beberapa tekanan tersebut diatas dapat dikelompokkan menjadi permasalahan sosial masyarakat, kelengkapan sistem dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari sistem perencanaan, sistem pengelolaan dan permasalahan kelengkapan sarana dan prasarana. Untuk menangani permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan upaya atau respon berupa **kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan** yang terdiri dari **kebijakan pencegahan pencemaran, kebijakan penanggulangan pencemaran, dan kebijakan pemulihan pencemaran.**

Kebijakan pencegahan pencemaran yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakatnya dan penataan kegiatan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan



Dinas Pendidikan. Sedangkan penataan kegiatan masyarakat melalui penerapannya pelaksanaan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencanan Detail Tata Ruang pada semua lini kegiatan masyarakat, baik kegiatan skala usaha maupun kegiatan domestik masyarakat. Penataan kegiatan masyarakat ini diperlukan ketegasan dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penerapannya.

Kebijakan penanggulangan pencemaran dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran yang antara lain kelengkapan sarana dan prasarana SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) Domestik berupa IPAL domestik, drainase atau saluran riol dan sarana prasarana pengelolaan persampahan seperti Container Sampah, Tempat Sampah dan (Tempat Pemrosesan Sementara). Selain melengkapi sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengoptimalkan sistem pengelolaan lumpur tinja (IPLT) yang telah ada saat ini dan mengoptimalkan sistem pelayanan persampahan (UPT Kebersihan) dan pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah di Gunung Medan. Selain tersebut diatas, implementasi regulasi daerah terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 melalui Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lingkungan Kegiatan dan/atau Usaha.

Berikut ini gambaran optimalisasi Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Dharmasraya untuk mengelola limbah kakus domestik masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

1 Septic tank

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pekerjaan Umum mengembangkan pembinaan terhadap konstruksi *septic tank* perumahan masyarakat dan pengembangan fasilitas BAB masyarakat. Secara berkala Dinas Pekerjaan Umum membina masyarakat agar *septic tank* masyarakat mempunyai konstruksi yang kedap air sehingga tidak ada tedensi infiltrasi dan resapan pada tanah yang dapat menimbulkan pencemaran air tanah dan air permukaan. Selain melalui pembinaan kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan





Umum melakukan penataan bangunan atau pemukiman masyarakat dengan mensyaratkan persyaraktan *septic tank* yang kedap sebagai kelengkapan bangunan untuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk masyarakat.

2 Penyedotan Berkala Lumpur Tinja

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan yang mengoperasikan prasarana Instalasi Lumpur Tinja berupa mobil tinja untuk melakukan penyedotan berkala *septic tank* masyarakat. Untuk penerapan sistem ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan membentuk sistem dimana pembiayaanya diberikan subsidi dan terintegrasi pada tagihan listrik sehingga tidak memberikan dampak langsung beban ekonomi bagi masyarakat yang akan menggunakan pelayanan ini.

3 Instalasi Lumpur Tinja

Lumpur tinja dari *septic tank* masyarakat yang dilakukan penyedotan melalui mobil tinja dilakukan pengolahan pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi pada lokasi pengolahan sampah TPA Gunung Medan Kecamatan Sitiung. Pengolahan lumpur tinja tersebut untuk mengurangi dan mengolah beban pencemar pada lumpur tinja *septic tank* yang ada. Out put dari IPLT ini adalah lumpur tinja padat yang dapat dimanfaatkan sebagai kompos dan air limbah tinja yang telah dikelola melalui pengolahan biologis dimana baku mutunya harus memenuhi baku mutu air limbah kegiatan domestik sebagaimana pada ketentuan Permen LHK RI Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

Selanjutnya untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada Kabupaten Dharmasraya, saat ini untuk lingkup Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung telah berjalan sistem pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan dengan pusat sistem pengelolaan sampah domestik Kabupaten Dharmasraya pada TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah yang ada pada Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung. Konsep pengelolaan sampah yang akan dan telah terbangun pada Kabupaten Dharmasraya antara lain:





1. Sampah domestik rumah tangga oleh masyarakat dilakukan pemilahan, hasil pemilahan sampah oleh rumah tangga terdiri dari: a. sampah yang mempunyai nilai guna dijual pada bank sampah, b. sampah domestik organik dimanfaatkan sebagai kompos pada rumah tangga, c. sampah yang tidak mempunyai nilai guna dikirimkan ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
2. TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah dibentuk sistem terpadu yakni, disediakan pemilahan II, dimana dilakukan pemilahan lagi oleh kelompok usaha masyarakat atau nagari untuk memilah sampah yang: a. sampah yang mempunyai nilai guna dijual pada bank sampah, b. sampah domestik organik diolah menjadi sebagai kompos menggunakan komposter pada TPS Sampah, c. sampah yang tidak mempunyai nilai guna dikirimkan ke TPA (Tempat Penampungan Akhir) Sampah Kabupaten Dharmasraya di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung;
3. TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah, pada TPA Sampah Kabupaten Dharmasraya dilakukan pemilahan lagi oleh petugas TPA, sampah yang dipilah sebagai berikut : a. sampah yang mempunyai nilai guna dijual pada bank sampah, b. sampah domestik organik diolah menjadi sebagai kompos menggunakan komposter pada TPA Sampah, c. sampah yang tidak mempunyai nilai guna dan mengandung B3 diolah pada incinerator dan sampah non B3 dilakukan penimbunan pada TPA yang telah menggunakan sistem *sanitary landfill*.



BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 menetapkan visi “Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.





4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

Pada ketujuh misi tersebut terdapat 3 (tiga) misi yang tujuan dan sasarannya terkait dengan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni :

**Tabel 4.1.1.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016-2021**

Misi ke-	Tujuan	Sasaran
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.	Membangun ruang publik untuk masyarakat	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tempat rekreasi dan interaksi penduduk
		Berkembangnya kawasan dan objek wisata utama kabupaten
	Air bersih	Peningkatan dan perluasan wilayah pelayanan penyediaan air minum perpipaan
	Perumahan & lingkungan sehat	Optimalisasi dan peningkatan pelayanan persampahan
		Peningkatan sanitasi rumah dan perbaikan lingkungan
		Peningkatan penyediaan



		perumahan bagi masyarakat miskin
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.	Mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan, keamanan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan
		Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak
		Meningkatkan produksi perikanan
		Peningkatan nilai tambah hasil pertanian
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan melalui perhutanan sosial	Terwujudnya pemanfaatan perhutanan sosial (hutan adat / hutan nagari)
	Peningkatan kinerja penataan ruang daerah	Tersedianya pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang kabupaten
		Aparatur pemerintah daerah yang semakin kompeten dalam penyelenggaraan penataan ruang daerah
	Penghijauan lahan kritis	Berkurangnya lahan kritis
	Pelestarian keanekaragaman hayati	Tertanganinya flora dan fauna yang terancam kepunahan



	Pengendalian pencemaran lingkungan	Berkurangnya dampak pencemaran pada DAS Batanghari
	Penanggulangan bencana	Peningkatan tanggap bencana

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016 - 2021

Misi, tujuan dan sasaran pada pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2016 - 2021 tersebut diatas diwujudkan dalam program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya. Tujuan dan sasaran tersebut terkait dengan perbaikan kualitas lingkungan atau juga bergantung pada kualitas lingkungan yang berupa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang optimal. Dengan tujuan dan sasaran RPJMD yang bergantung pada kualitas lingkungan maka secara tidak langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan mensinergikan program dan kegiatan OPD terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Sebagai contoh, pada pada RPJMD Kabupaten Dharmasraya dengan misi “Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat”. tujuan “mewujudkan ketahanan pangan” dengan sasaran “meningkatkan produksi perikanan”. Peningkatan produksi perikanan sangat bergantung dengan kualitas dan kuantitas dari pada sumber daya air sehingga program dan kegiatan dibidang lingkungan hidup yang mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya air sangat berperan penting dalam pencapaian tujuan terwujudnya ketahanan pangan.



4.2. Inisiatif Kepala Daerah dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

4.2.1. Kelembagaan

Pada tahun 2016, instansi lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya berstatus Badan Lingkungan Hidup dengan fungsi lebih dititik beratkan pada fungsi koordinasi. Adapun struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 terdiri dari 3 (tiga) bidang kerja dengan dengan lingkup kerja : Bidang Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, dan Bidang Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam serta fungsi administrasi perkantoran pada lingkup kerja Sekretariat.

Pada akhir tahun 2016 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta rujukan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, nomenklatur urusan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dengan bidang tata kelola urusan bidang lingkungan hidup, persampahan dan pertamanan. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaatn Dharmasraya saat ini berstatus sebagai dinas maka fungsi kerjanya tidak hanya fungsi koordinasi tetapi juga melaksanakan fungsi teknis. Selain itu, urusan pertamanan dan persampahan langsung menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup. Konverhensifnya tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya tersebut dapat mengakomodir semua lingkup fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan penegakan hukum sebagaimana





amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

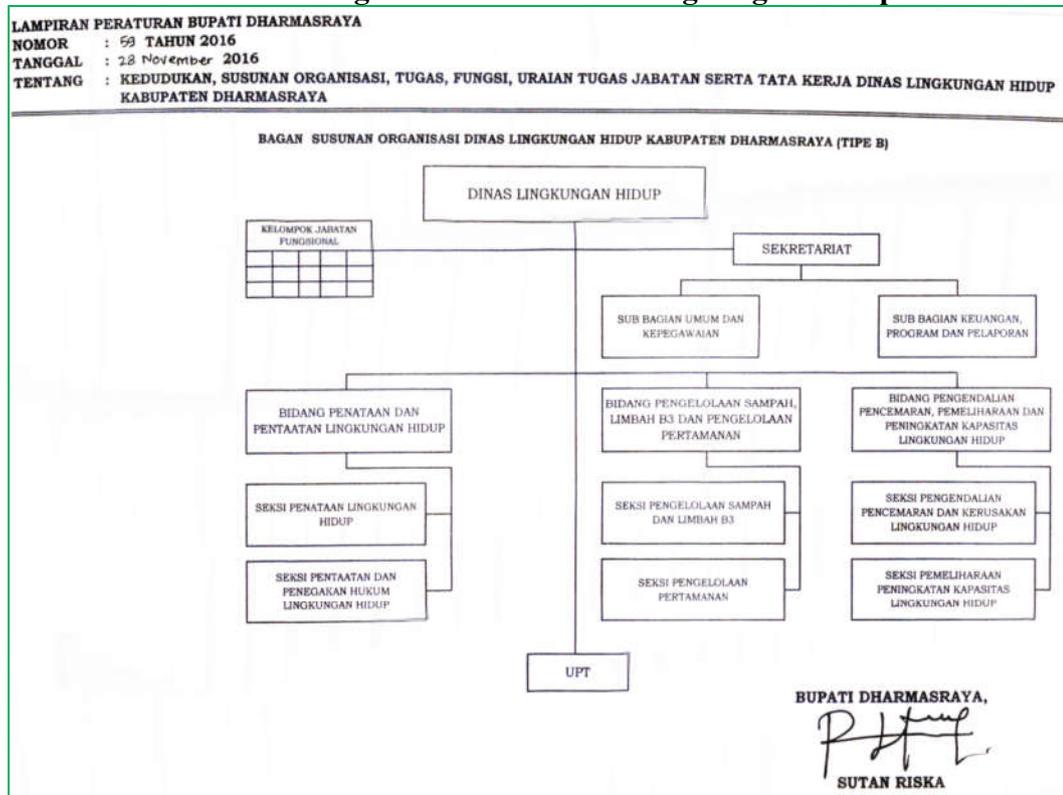
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 3 (tiga) Bidang Urusan dan 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional yakni Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Bidang urusan dalam struktur organisasi OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya terdiri dari bidang urusan Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup yang mengelola urusan perencanaan lingkungan seperti KLHS, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, RPPLH, kajian perencanaan lingkungan hidup lainnya, dan penyusunan regulasi lingkungan hidup. Pada bidang ini juga mengelola urusan pengawasan lingkungan hidup, pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan penyelesaiana sengketa lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan. Dalam kegiatan teknisnya bidang ini didukung oleh kelompok jabatan fungsional tertentu yakni Fungsional Pengawas Lingkungan dan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan. Bidang urusan selanjutnya adalah Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mengelola urusan persampahan dan limbah B3 yang dibantu oleh UPT Pengelola Sampah dan Limbah B3 serta pengadaan dan perawatan taman-taman kota. Dan terakhir bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan yang tugas fungsinya melakukan pemantauan kualitas lingkungan dan melakukan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan perusakan lingkungan yang didukung oleh UPT Laboratorium selaku dukungan teknis penyediaan data kualitas lingkungan.

Berikut ini struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya.





Gambar 4.2.1.
Struktur Organisasi OPD Dinas Lingkungan Hidup



Sumber : Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup secara tugas dan fungsi telah berdasarkan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya telah mengakomodir kebutuhan tugas dan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya. Tetapi sampai dengan saat ini untuk UPT Laboratorium Lingkungan dan UPT Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Medis Fasyankes belum dilakukan pengisian personil dalam menjalankan operasional dan tugas fungsinya. Tetapi hal ini telah direncanakan pada penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2017 ini, anggaran operasional dan personil akan segera dilakukan pengisian personil. Keterlambatan ini disebabkan pada penyusunan APBD tahun 2017 ini tadinya perubahan OPD dan pemindahan tugas pokok fungsi persampahan dari Dinas



Pekerjaan Umum ke Dinas Lingkungan Hidup tidak disertai dengan perencanaan anggaran operasional untuk UPT tersebut.

Adapun salah satu lingkup rencana operasional UPT Pengelolaan Sampah pada tahun 2017 ini antara lain menjalankan konsep pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya. Berikut konsep pengelolaan sampah yang akan dikembangkan pada Kabupaten Dharmasraya:

Gambar 4.2.2.
Konsep Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016

Selain hal tersebut diatas pada Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPA) Kabupaten Dharmasraya pada Kecamatan Sitiung tersedia incinerator untuk mengolah limbah B3 medis fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), UPT Pengelolaan Sampah juga akan mengelola limbah B3 medis dari fasyankes tersebut dengan sistem : pengangkutan dari limbah B3 medis dari fasyankes di handle langsung oleh UPT Pengelolaan Sampah dengan menggunakan kendaraan roda 3 (tiga) yang telah mendapatkan izin pengangkutan limbah B3 medis fasyankes dari Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya. Kemudian limbah B3 medis dibakar pada incenerator dan residunya dikubur dan ditimbun pada



lokasi penimbunan limbah B3 medis yang telah memenuhi ketentuan pengelolaan limbah B3 medis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk UPT Laboratorium saat ini dengan tenaga analis kontrak (PTT) telah mampu menganalisa parameter kualitas air yakni : pH, Total Suspended Solid (TSS), Total Dissolved Solid (TDS), Dissolved Oxygen (DO), Biologcal Oxygen Demand (BOD), Chemichal Oxygen Demand (COD), Minyak Lemak dan Total Phosfat, sedangkan untuk paramater pencemar udara, paramater Dust Fall (Debu), PM 10, PM 6 dan PM 2.5 serta kebisingan. Melalui evaluasi kinerja laboratorium oleh bidang yang membidangi pembinaan laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) KLHK, UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya telah mendapatkan point 70 % untuk kriteria yang mengacu pada Permen LH No 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan atau telah layak untuk pengajuan akreditasi pada Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tahun 2017 ini.

Selain hal tersebut, Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Kelompok Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup secara tugas fungsi telah dilaksanakan oleh pegawai yang telah memiliki kompetensi pendidikan dan pelatihan dibidang tersebut tetapi secara administrasi kepegawaian, pegawai tersebut belum berstatus Jabatan Fungsional Tertentu dan masih berstatus Fungsional Umum. Hal ini disebabkan pada Kabupaten Dharmasraya belum terbentuk Tim Penilai Angka Kredit untuk mengesahkan angka kredit pegawai yang mengerjakan tugas fungsi pegawai tersebut.

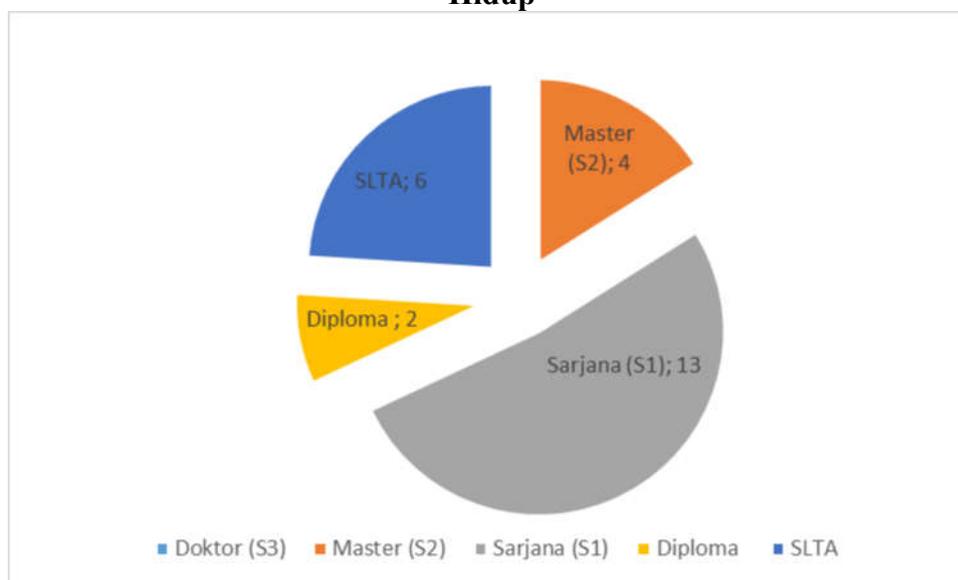
4.2.2. Peningkatan Kapasitas Personil

Dari struktur organisasi tersebut diatas, sampai dengan saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya didukung sumber daya manusia dengan gambaran komposisi jumlah oersonil dan tingkat pendidikan personil tersebut sebagai berikut :





Gambar 4.2.3.
Komposisi Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup



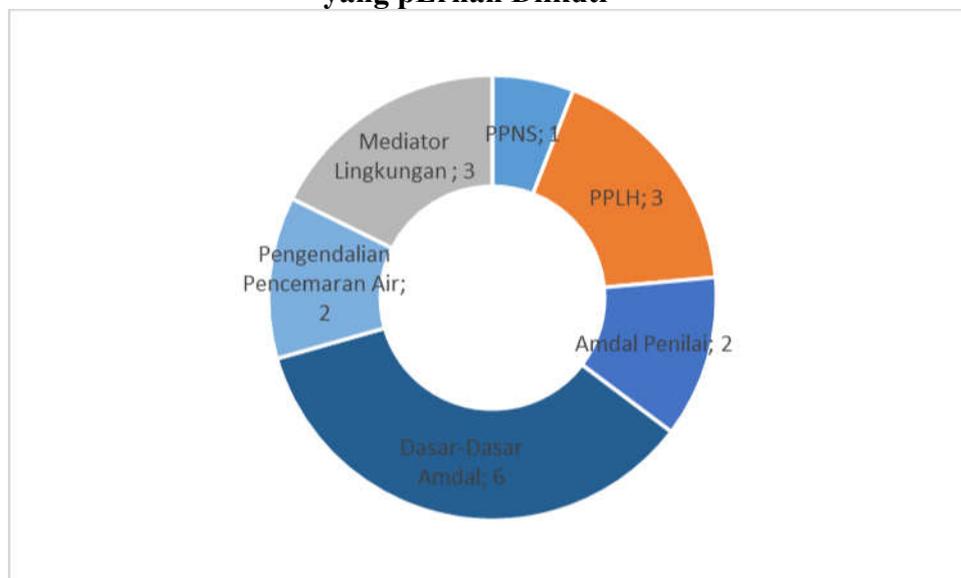
Sumber : Olahan Tabel-50. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Dari 25 (dua puluh lima) orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 13 orang atau sebesar 52 %, untuk tingkat pendidikan Master sebanyak 4 orang atau sebesar 16 %, sehingga dari gambaran tersebut lebih dari 68 % tingkat pendidikan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mempunyai tingkat pendidikan sarjana keatas. Secara persentase tingkat pendidikan komposisinya telah cukup baik tetapi secara jumlah personil dengan adanya 3 (tiga) bidang teknis dan 1 (satu) sekretariat serta 6 (enam) seksi teknis dan 2 (dua) seksi sekretariat.

Untuk peningkatan kapasitas pegawai, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya senantiasa mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sampai dengan akhir tahun 2016 diklat teknis dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diikuti oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup tergambar pada gambar berikut :



Gambar 4.2.4.
Diklat Teknis di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pernah diikuti



Sumber : Olahan Tabel-50A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasarya, 2016

Kapasitas personil dalam mengelola pengurusan izin lingkungan dengan pengenalan diklat AMDAL baik diklat Dasar – Dasar AMDAL maupun Penilai AMDAL cukup banyak yakni sebanyak 6 (enam) pegawai yang bekerja pada bidang terkait telah mengikuti diklat tersebut. Terkait dengan tugas fungsi penegakan hukum lingkungan baik pengawasan dan penyidikan, untuk diklat Dasar-Dasar Pengawas Lingkungan (Diklat PPLH) telah diikuti oleh 3 (tiga) orang personil dan 1 (satu) orang personil yang telah mengikuti diklat Penyidik Lingkungan Hidup Pegawai Negeri Sipil (Diklat PPNSLH). Untuk mengelola sengketa lingkungan, 3 (tiga) personil Dinas Lingkungan Hidup telah mengikuti Diklat Mediator Sengketa Lingkungan. Fungsi evaluasi Kebijakan Rencana Program (KRP) berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTLH), 3 (tiga) orang personil Dinas Lingkungan Hidup telah mengikuti Bimbingan Teknis Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penghitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta 1 (satu) orang telah mengikuti Diklat Informasi Gografi System (GIS).



Fungsi Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan adalah lingkup bidang kerja baru pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Untuk pengelolaan persampahan 2 (dua) orang personil telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan dan 1 (satu) orang personil telah mengikuti Bimtek Pengelolaan Limbah B3. Fungsi pengelolaan pertamanan sampai saat penyusunan dokumen ini belum ada satupun personil lingkungan hidup yang pernah mengikuti pelatihan baik setingkat Diklat maupun Bimtek.

Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, sampai saat ini telah ada 2 (dua) orang personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya telah mengikuti Diklat Pengendalian Pencemaran Air. Fungsi Peningkatan Kapasitas Lingkungan juga menjadi lingkup kerja bidang ini, terdapat 2 (dua) orang personil yang telah memahami tentang Program Adiwiyata, Program Proklim, Program Adipura, dan program-program peningkatan kapasitas lainnya.

4.2.3. Anggaran Kegiatan OPD Bidang Lingkungan Hidup

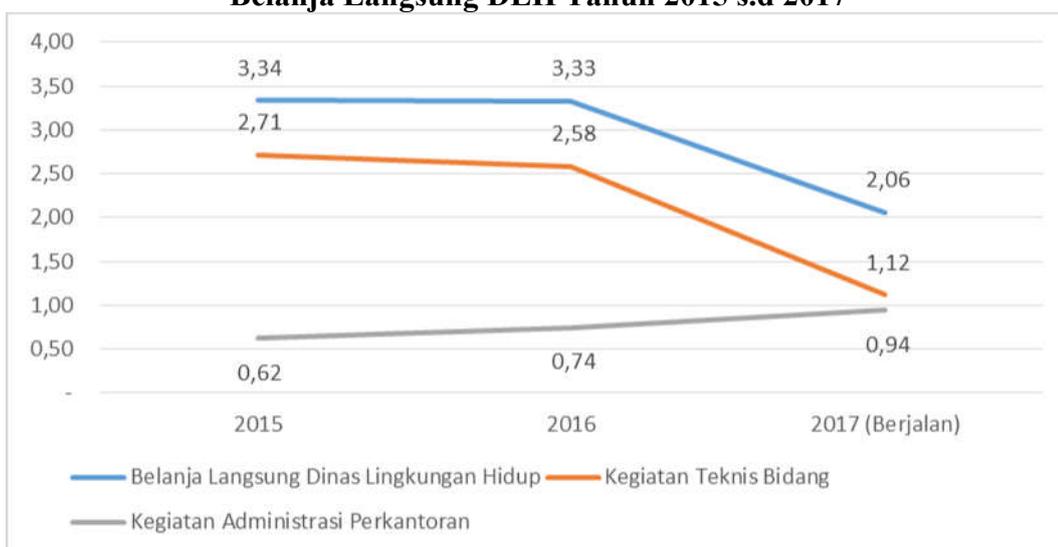
Kegiatan instansi lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang terakomodir dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/DAK Bidang Lingkungan Hidup), nominal besaran anggaran memang tidak terlalu besar dan cenderung mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Tetapi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai inisiatif untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui kontribusi berbagai kegiatan dan dukungan dari stakeholder terkait. Sebagai gambaran, pada tahun 2017 ini direncanakan ada Program Restorasi Lahan Akses Terbuka Lahan Bekas Tambang seluas 5 Ha atau direncanakan sebesar 5 milyar rupiah untuk restorasi pada Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jendral Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Direktur Pemulihan Lahan Akses Terbuka dimana Dokumen Engineering Desain



nya telah selesai penyusunan oleh konsultan penyusun dari LPPM Universitas Andalas pada tahun 2016 sebelumnya.

Berikut ini perkembangan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

Gambar 4.2.5.
Belanja Langsung DLH Tahun 2015 s.d 2017



Anggaran dalam Milyar Rupiah

Sumber : Olahan Tabel-49. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

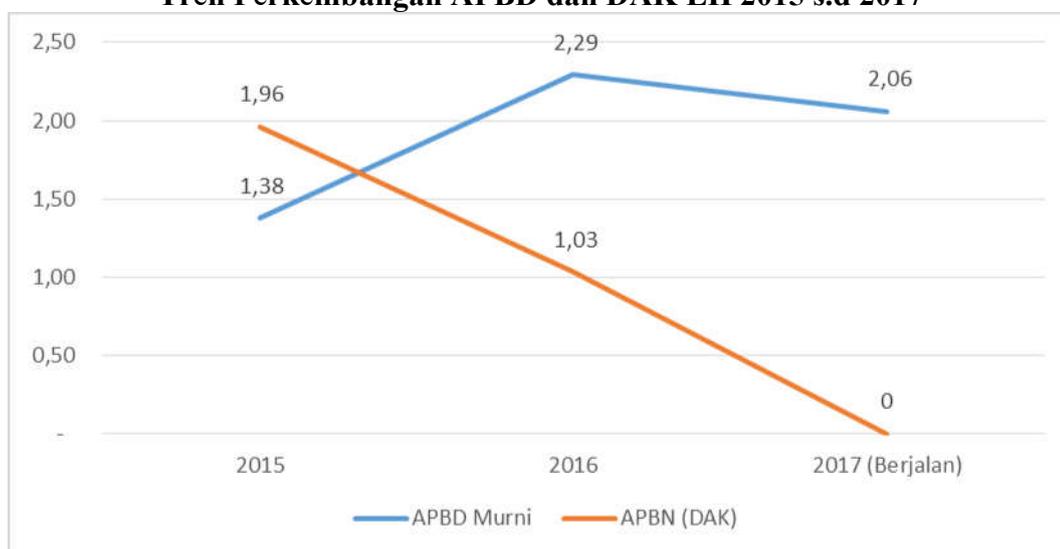
Dilihat dari kebijakan sumber anggaran, pembiayaan kegiatan bidang lingkungan hidup pada instansi lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya pada 3 (tiga) tahun terakhir untuk dana yang bersumber dari APBN (Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup) cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2017 ini tidak terdapat Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup yang membiayai kegiatan instansi lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya, konsekuensinya 100 % kegiatan instansi lingkungan hidup pada tahun 2017 ini hanya bersumber pada APBD Murni. Kebijakan pemerintah untuk dieliminirnya DAK Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2017 ini disebabkan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk lebih memprioritaskan pada kegiatan infrastruktur.

Secara tren perkembangan APBD Murni pada Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup 3 (tiga) tahun terakhir ini sebagai berikut :





Gambar 4.2.6.
Tren Perkembangan APBD dan DAK LH 2015 s.d 2017



Anggaran dalam Milyar Rupiah

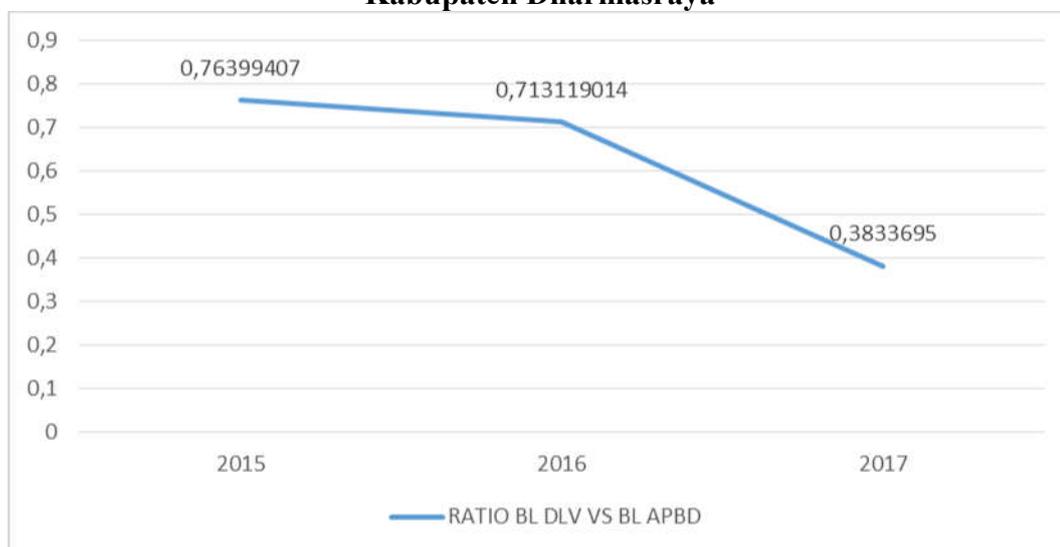
Sumber : Olahan Tabel-49. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Tren perkembangan besaran APBD Murni pada kegiatan instansi lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya terlihat mengalami peningkatan pada tahun 2016 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017 ini disebabkan pada awal tahun 2017 ini terbentuk Organisasi Perangkat Daerah baru maka memerlukan pembiayaan untuk Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk sehingga belanja lingkungan hidup terbagi dan mengalami penurunan.

Perbandingan anggaran belanja langsung instansi lingkungan hidup terhadap total anggaran belanja langsung APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada 3 (tiga) tahun terakhir terlihat pada gambar berikut :



Gambar 4.2.7.
Tren Rasio Belanja Langsung DLH terhadap Belanja Langsung APBD
Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Olahan Tabel-49A. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Secara rasio perbandingan belanja langsung anggaran instansi lingkungan hidup menunjukkan penurunan terhadap belanja langsung pada APBD Kabupaten Dharmasraya, tetapi konsep kebijakan dari Kabupaten Dharmasraya pengembangan program kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya bergantung dari anggaran pemerintah tetapi peran serta stakeholder terkait juga dimana fungsi pemerintah adalah konseptor dan stimulator bagi stakeholder terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4.2.4. Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Walaupun secara tren pendanaan baik Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup (DAK LH) maupun APBD dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan penurunan tetapi prestasi Kabupaten Dharmasraya dalam beberapa hal terkait program konservasi dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup tetap dapat diraih. Berikut ini penghargaan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:





Tabel 4.2.1.
Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

No	Nama Orang (Kelompok/Organisasi)	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Dinas Lingkungan Hidup	Nirwasita Tantra Peringkat II Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
2	Jorong Padang Sidondang	Program Kampung Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
3	Jorong Piruko Utara	Program Kampung Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
4	SDN 06 Pulau Punjung	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
5	SMPN 2 Pulau Punjung	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016

Sumber : Olahan Tabel-46. Lampiran Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya, 2016

Pada tahun 2016 Penghargaan Nirwasita Tantra yang sebelumnya adalah SLHD (Status Lingkungan Hidup) sedikit mengalami penurunan prestasi, pada tahun 2014 dan 2015, Kabupaten Dharmasraya untuk penghargaan SLHD mendapatkan Peringkat I Nasional tetapi pada tahun 2016 Kabupaten Dharmasraya mendapatkan Peringkat II Nasional dimana Kabupaten Buleleng yang mendapatkan Peringkat I Nasional atau Piala Bergilir Narwasita Tantra. Untuk penghargaan lainnya yang dianugerahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2 (dua) sekolah mendapatkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan 2 (dua) kampung / jorong mendapatkan penghargaan sebagai Kampung Iklim dari Program Kampung Iklim (Proklim) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

4.2.5. Prioritas Program dan Kegiatan di Bidang Lingkungan

Dengan keterbatasan APBD untuk mendukung program dan kegiatan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten





Dharmasraya berusaha untuk mengintegrasikan dan mensinergiskan semua sumber daya stakeholder terkait untuk mendukung dan menjalankan program dan kegiatan tersebut. Beberapa program prioritas dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedang dan akan dikembangkan tanpa bersandar penuh pada dukungan APBD Kabupaten Dharmasraya antara lain :

1. Penghijauan melalui Kearifan Lokal (Hutan Rakyat / Hutan Nagari / Peraturan Nagari tentang Hutan Adat dan Perlindungan Satwa) dan Penanaman Sadar Lingkungan Usia Dini;

Konservasi sumber daya alam alam tidak hanya bersandar dari kegiatan pemerintah tetapi sinergisitas stakeholder terkait. Sebelumnya telah banyak kegiatan penghijauan dan konservasi sumber daya alam baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun stakeholder terkait. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

- a Penanaman pohon Jabon di sepanjang 5 km pada turus saluran pengairan Jalan Nagari Sitiung oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya bersama masyarakat sekitar. Kegiatan dinilai cukup berhasil sebab ada peran serta masyarakat Nagari Sitiung untuk melakukan perawatan pohon Jabon tersebut sehingga hasilnya saat ini jalur turus saluran pengairan terlihat teduh dan asri.

Gambar 4.2.8.
Pohon Jabon Tanaman Pelindung pada Jalan Nagari Sitiung



Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan “Satu Milyar Pohon” dari Kementerian Kehutanan sebelumnya. Saat ini terlihat hasilnya, jalan sepanjang saluran \pm 5 km dari Kantor Camat Sitiung sampai ke arah Simpang 3 Sungai Duo terlihat asri. Adapun fungsi dari tanaman pelindung ini selain sebagai penyuplai oksigen tetapi juga sebagai penahan / penguatan tanah tanggul saluran irigasi untuk mengendalikan potensi jebolnya tanggul dimana muka air irigasi lebih tinggi dari badan jalan.

- b Penanaman tanaman pelindung pada lahan seluas 14 Ha ex rumah pompa Balai Wilayah Sungai V Kementerian Pekerjaan Umum di Jorong Pisang Barabui Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung. Program ini merupakan kelanjutan program “Satu Milyar Pohon” dari Kementerian Kehutanan sebelumnya. Penanaman ini dilakukan bersama instansi pemerintah dan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Dharmasraya. Program ini dinilai kurang berhasil sebab berada pada lahan pemerintah sehingga kurangnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil penanaman bibit tanaman pelindung tersebut;
- c Penanaman tanaman pelindung sepanjang bahu jalan pada Jalan Lintas Sumatera dari Kecamatan Pulau Punjung sampai dengan Kecamatan Koto Baru. Jenis bibit tanaman yang ditanam adalah jenis trembesi dan mahoni. Program ini hanya sebagian kecil titik–titik lokasi yang berhasil disebabkan kurang melibatkan masyarakat sekitar lokasi jalan-jalan yang ditanam, selain itu juga kurangnya penataan pada saat penanaman. Banyak titik – titik lokasi penanaman tepat dibawah jaringan listrik PLN sehingga rutin dilakukan pemangkasan oleh pihak PLN;
- d Tanaman Durian untuk penghijauan yang ditanam oleh Kelompok Tani Swadaya Pisang Berebus dengan luasan mencapai 5 Ha. Tanaman penghijauan ini mempunyai nilai ekonomi. Konsep konservasi sumber daya alam berbasis manfaat ekonomi langsung ini lebih mudah



- implementasinya dan tinggi antusiasme dari masyarakat sebab manfaat ekonominya dirasakan langsung bagi pelaku;
- e Penanaman Kebun Jabon oleh Kelompok Tani Sako Mandiri seluas 50 Ha. Penanaman ini merupakan usaha penghijauan yang dilakukan masyarakat. Lahan diluar kawasan dimana termasuk miliki Ulayat Sitiung telah dilakukan penebangan kayunya dan ditinggalkan oleh pengelola kayu. Oleh masyarakat Ulayat Sitiung direncanakan akan dilakukan penanaman komoditi kelapa sawit. Dalam perjalanannya melalui pembinaan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Dharmasraya, Ulayat Sitiung mengalihkan komoditinya ke penanaman Jabon yang merupakan komoditi jenis kayu-kayuan untuk lahan 50 Ha tersebut.

Kebun Jabon Kelompok Tani Sako Mandiri telah mendapat perhatian dari peneliti dari WWF, penelitian terkait perbandingan manfaat tanaman kayu-kayuan dibandingkan tanaman kelapa sawit terhadap lingkungan hidup dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Gambar 4.2.9.
Kebun Jabon Kelompok Tani Sako Mandiri Nagari Sitiung



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



- f Pada Nagari Koto Tinggi terdapat kearifan lokal yakni pada Calon Pengantin diwajibkan menanam pohon dengan tujuan memberikan persembahan dan sumbangsih pada alam sebagai perwujudan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Kearifan lokal ini sudah berlangsung sejak zaman Nenek Moyang masyarakat Nagari Koto Tinggi sebelumnya dan masih dipertahankan hingga saat ini baik oleh masyarakat nagari ini sendiri maupun oleh Pemerintah Nagari Koto Tinggi.

Gambar 4.2.10.

Kewajiban Menanam Pohon oleh Calon Pengantin pada Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016

- g Pada Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar memiliki regulasi nagari terkait penghijauan pada lingkungannya, melalui Peraturan Nagari Koto Tinggi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penghijauan Nagari, mewajibkan pada masyarakat Nagari Koto Tinggi untuk melakukan penanaman pohon dan penghijauan pada areal pekarangannya.
- h Nagari Koto Besar Kecamatan Koto Besar merupakan Nagari yang memiliki kearifan lokal yakni adanya Kerajaan Koto Besar yang secara tata administratif nagari diakui dalam semua lini kehidupan masyarakatnya. Kerajaan Koto Besar tersebut selalu dijaga pelestariannya oleh masyarakat



Nagari Koto Besar. Masyarakat Nagari Koto Besar memiliki Hutan Adat atau Hutan Nagari milik Kerajaan Koto Besar dimana berkembang suatu kepercayaan jika ada masyarakat yang melanggar dengan berburu satwa atau mengambil hasil hutan tanpa seizin dari pemangku adat atau pemegang adat dari Kerajaan Koto Besar maka akan ada efek atau hukuman langsung secara ghaib yang akan menimpa pelaku perusakan atau pelanggar tersebut.

Secara tata administrasi pemerintahan yang berlaku, Hutan Nagari atau Hutan Adat tersebut telah dikuatkan pengelolaannya melalui Peraturan Nagari Koto Besar Nomor 03/P-WN-KB/2012 tentang Pelestarian Hutan Nagari Koto Besar Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau. Selain menjaga fungsi Hutan Nagari, Nagari Koto Besar juga menerbitkan larangan perburuan satwa dan pemungutan tumbuhan pada Hutan Nagari Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau melalui Peraturan Nagari Koto Besar Nomor 04/P-WN-KB/2012 tentang Larangan Perburuan Satwa dan Pemungutan Tumbuhan di Hutan Nagari Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau.

- i Selain kegiatan penghijauan, konsep perlindungan satwa liar untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat juga dikembangkan. Perlindungan satwa untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat berupa perlindungan satwa walet dan lubuk larangan untuk tambak masyarakat yang banyak dikelola oleh nagari atau desa. Hampir setiap nagari atau desa yang memiliki sumber daya air mengembangkan lubuk larangan sebagai tambak nagari. Nagari menerbitkan Peraturan Nagari terkait pengelolaan lubuk larangan, regulasi nagari atau desa ini mengatur konsep konservasi sumber daya air dan pengelolaan tambak lubuk larangan untuk nagari atau desa. Selain itu dalam tataran pemerintahan dinas terkait, Dinas Peternakan juga menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Nomor 523.6/35/KPTS-Disnakan-IV2014 tentang Penetapan Lokasi Konservasi Perairan Darat. Regulasi ini untuk mendukung dan menguatkan program lubuk larangan nagari atau desa.



Terkait pengelolaan sarang burung walet Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya ini diterbitkan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam sarang burung walet yang substansi isinya berupa pedoman, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaannya.

Selain dari sisi masyarakat dan pemerintahannya, konsep konservasi dan perlindungan lingkungan hidup ini juga dikembangkan oleh kegiatan dan/atau usaha yang memanfaatkan sumber daya alam di Kabupaten Dharmasraya. Beberapa kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Dharmasraya mengembangkan konsep konservasi dan perlindungan lingkungan hidup antara lain seperti :

➤ PT Tidar Kerinci Agung;

PT Tidar Kerinci Agung mengembangkan konsep konservasi sumber daya alam dan pengelolaan perkebunan yang ramah lingkungan. Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengusulkan PT Tidar Kerinci Agung untuk mengikuti seleksi penghargaan Kalptaru sehingga pada tahun 2014 PT Tidar Kerinci Agung mendapatkan penghargaan Kalptaru untuk kriteria Korporasi Peduli dan Pembina Lingkungan Hidup. Beberapa konsep konservasi yang dikembangkan oleh PT Tidar Kerinci Agung antara lain:

1. Menetapkan kawasan konservasi sejak tahun 2008 sesuai dengan SK Dirut PT Tidar Kerinci Agung Nomor: K-01/DIRUT/TKA/HK/VIII/08 Tanggal 17 Agustus 2008 yang selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Sumbar melalui surat General Manager PT. Tidar Kerinci Agung Nomor : 621/GM-TKA/VIII/2008 tertanggal 26 Agustus 2008, tahun 2008 dengan luas ±2.400 (1.300 Ha berada di Jorong Sungai Talang Nagari Talao Sei Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan dan 1.100 Ha berada di Jorong Mangun Jaya Nagari Lubuk





- Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dan ± 500 Ha yang direncanakan untuk lahan konservasi di areal Divisi II Bukit Sembilan Jorong Bukit Sembilan Nagari Alahan Nan Tigo Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya menjadikan kawasan hutan sebagai pusat penelitian bekerjasama dengan jurusan Biologi Universitas Andalas semenjak tahun 2013 melalui Surat perjanjian kerjasama Kegiatan Penelitian Keanekaragaman Hayati Nomor 912/EXT/GM-TKA/XII/2013 dan Nomor 2513/UN.16.3.5.1/PG/2013 serta fasilitas transportasi, akomodasi, konsumsi dan pemberian bantuan biaya penelitian sebesar Rp. 15 juta per tahun untuk 10 orang mahasiswa baik S1 maupun S2.
2. Pembibitan tanaman hutan pada lahan seluas ± 0,75 Ha mulai tahun 2009 dengan berbagai jenis tanaman hutan seperti : Andalas (*Morus macroera*), Pulai (*Alstonia* sp), Surian (*Toona sureni*), Meranti Merah (*Shorea* sp), Gaharu (*Aquilaria moluensis*) dan tanaman tersebut dipergunakan untuk penanaman di kawasan.
 3. Mengembangkan hutan konservasi pada areal HGU perkebunannya sebagai hutan konservasi tempat perlindungan satwa korban konflik terutama spesies harimau dan spesies langka dan dilindungi yang endemik sumatera. Pembentukan lembaga Pusat Rehabilitasi Satwa Harimau Sumatera (PRSHS) melalui penandatanganan perjanjian Kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat dengan Nomor PK 1085/BKSDA-Sumbar-I/2012 dan No. 002/PK-TKA.JKT/12.12 tanggal 20 Desember 2012. Dalam pelaksanaan pengelolaan PRSHS ini difasilitasi oleh Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) PT Tidar Kerinci Agung yang melakukan kerjasama dengan Yayasan Alam Satwa Tatar Indonesia yang dikenal juga dengan ASTI (Animal Sanctuary Trust Indonesian) pada tanggal 26 Januari 2012 bertujuan untuk melaksanakan kegiatan penyelamatan dan perlindungan Harimau Sumatera dan species Sumatera lainnya.



4. Menjaga hulu sungai Jujuhan yang bermuara ke Sungai Batang Hari mulai tahun 2008 dan Membangun PLTMH tahun 2010 dibangun 1 (satu) unit di Jorong Talao dengan kapasitas terpasang 50 KW dan dipergunakan oleh masyarakat sebanyak 110 KK.
5. Kegiatan PT Tidar Kencana Agung (PT TKA) memberikan manfaat ekonomi yaitu Kegiatan calon juga memberikan manfaat bagi lingkungan a) Mengatasi banjir pada setiap musim hujan dan mengatasi kekeringan pada musim kemarau di Jurong Kampai Nagari Sitanang Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan mempelopori pembangunan Cek Dam Pengendali Air sehingga air hujan terkelola dengan baik. b) Membangun kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penebangan liar. c) Mempelopori pengamanan Daerah Tangkapan Air Anak Sungai “Aia Timbua” yang bermuara ke Batang Sinamar dengan penanaman berbagai jenis pohon seperti Mahoni, Surian, Pulai dll yang sebagian disediakan oleh Calon. d) Mendorong masyarakat untuk melakukan penanaman dengan berbagai jenis tanaman pada lahan-lahan kosong yang ada. Penanaman berbagai jenis pohon secara langsung maupun tidak langsung telah memperkaya jenis-jenis pohon yang ada. Disamping itu akan membentuk habitat baru flora dan fauna dan masyarakat menjadi gemar menanam sehingga diharapkan erosi dan lahan kritis menjadi berkurang.
6. Mengikuti sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), adalah program sertifikasi perkebunan kelapa sawit ramah lingkungan dari Kementerian Pertanian menggunakan asesor independent. Berbagai kriteria yang harus dipenuhi, mulai dari konsep konservasi areal variant, kawasan konservasi perlindungan setempat seperti mata air dan sumber air, dan kawasan yang berkontur lebih dari 45 %, perlindungan dan penyelamatan satwa endemik, sistem perkebunan yang ramah lingkungan lainnya.



- Incasi Raya Group (PT Sumbar Andalas Kencana, PT Incasi Raya Pangan, PT Sumbar Andalas Kencana dan PT Bina Pratama Sakato Jaya). Kelima perusahaan kelapa sawit ini mengikuti sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) seperti PT Tidar Kerinci Agung sehingga menerapkan konsep – konsep konservasi dan perlindungan lingkungan hidup.
 - PT Andalas Wahana Berjaya
Perusahaan ini mengikuti sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) seperti PT Tidar Kerinci Agung sehingga menerapkan konsep– konsep konservasi dan perlindungan lingkungan hidup.
 - PT Bukit Raya Mudisa
PT Bukit Raya Mudisa adalah perusahaan perkebunan tanaman industri dari PT Riau Andalas Pulp & Paper. Sebagai penyuplai bahan baku untuk pabrik kertas maka PT Bukit Raya Mudisa melakukan produksi pohon akasia, sistem perkebunan tanaman industri ini sudah mengikuti sistem pemasaran produk pulp PT RAPP yang mewajibkan bahan baku dari produsen tanaman industri yang melaksanakan konsep konservasi dan ramah lingkungan.
- j Penanaman kesadaran lingkungan dan harus ditanamkan sejak dini, untuk itu dengan adanya Program Sekolah Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kabupaten Dharmasraya sangat mendukung dan mendorong pengembangan program ini pada sekolah-sekolah terutama pada sekolah-sekolah dasar sebagai bekal penanaman kebiasaan pola hidup sadar lingkungan sejak dini. Melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Dinas Lingkungan Hidup mulai memberikan pembinaan dan dukungan pada sekolah-sekolah untuk menerapkan kriteria Sekolah Adiwiyata pada sekolah-sekolah tersebut. Hasilnya pada tahun 2016 2 (dua) sekolah yakni SD N 06 Pulau Punjung dan SMP N 02 Pulau Punjung mendapatkan Predikat Sekolah Adiwiyata Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Dinas Lingkungan Hidup juga menyelenggarakan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten dimana hasilnya, telah cukup banyak sekolah yang mendapatkan Penghargaan Sekolah Adiwiyata dari Kabupaten Dharmasraya.

2. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;

Program pengembangan energi baru dan terbarukan ini menjadi salah prioritas program perlindungan dan pengelolaan yang dirintis oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam rangka advokasi untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup mulai mengembangkan Program Energi Baru dan Terbarukan dimulai dari percontohan dan pembinaan pada:

- a. Pembangkit listrik mikrohidro pada tambak kelompok tani di Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung. Pada aliran irigasi Sungai Batanghari, sebelum dialirkan pada tambak – tambak ikan, dilewatkan pada kincir – kincir untuk memutar turbin, dan turbin tersebut menghasilkan listrik untuk keperluan penerangan aktifitas penjaga tambak.

Gambar 4.2.11.
Mikrohidro pada Tambak Ikan Jorong Pisang Barabus



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016

- b. Pengembangan solar cell pada fasilitas-fasilitas umum, Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pada setiap tahunnya mengadakan pengadaan penerangan



berbasis solar cell. Penerangan berbasis solar sell ini dipasang pada taman-taman, jalan-jalan umum dan sekolah-sekolah. Ini merupakan stimulasi untuk mendorong stakeholder terkait merubah pola pikir ke arah penggunaan energi baru terbarukan. Hal ini terlihat, beberapa stakeholder mulai melirik ke arah energi baru terbarukan seperti beberapa developer perumahan mulai menggunakan solar cell untuk penerangan pada areal – areal perumahan yang dikembangkannya.

- c Pengembangan biogas dari kotoran sapi untuk penganti bahan bakar domestik masyarakat dari kayu bakar. Konsep ini selain memanfaatkan energi methane dari kotoran sapi juga mengurangi penggunaan kayu bakar sebagai bahan bakar domestik. Konsep ini selain itu adalah mengkonversi methane yang dihasilkan dari kotoran sapi yang mempunyai efek rumah kaca 21 kali lebih kuat dari CO₂ untuk menjadi energy domestik dan sampingan berupa emisi CO₂ yang lebih ramah terhadap efek rumah kaca dibandingkan methane (CH₄). Program percontohan ini dilakukan Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup (DAK LH) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 kemarin. Melalui program ini Dinas Lingkungan Hidup memberikan bantuan reactor biogas kotoran sapi pada masyarakat yang mempunyai kandang ternak sapi. 1 (satu) unit reactor itu dapat melayani keperluan bahan bakar memasak untuk 3 (tiga) rumah tangga. Program ini telah dikembangkan pada 2 (dua) jorong yakni Jorong Padang Sari Nagari Tebing Tinggi dan Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung dan Jorong Padang Sidondang Nagari Sitiung. Pada ketiga jorong tersebut Dinas Lingkungan Hidup memberikan percontohan beberapa reactor biogas kotoran sapi beserta instalasi jaringan dan kompor gas methananya. Stimulasi ini cukup berkembang dengan terlibatnya PT Tidar Kerinci Agung melalui program CSR nya memberikan juga bantuan beberapa unit reaktor biogas kotoran sapi pada masyarakat jorong tersebut.

Selain melalui bantuan fisik, Dinas Lingkungan Hidup terus mendorong memberikan pembinaan untuk pengolahan dan pemanfaatan sampah,





konversi bahan bakar domestik kayu bakar ke penggunaan biogas pemanfaatan methane kotoran sapi, dan pembinaan konservasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga pada tahun 2016 Jorong Piruko Utara dan Jorong Padang Sidondang mendapatkan penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Pengembangan Konsep Ekowisata;

Pengembangan konsep ekowisata pada Kabupaten Dharmasraya adalah dengan mengembangkan wisata alam dan wisata agro. Konsep tersebut adalah dengan menjual potensi wisata alam dan wisata agro mengurangi potensi pengembangan ekonomi melalui eksploitasi sumber daya alam. Beberapa spot wisata alam dan wisata agro yang akan dikembangkan akan diakomodir dalam *Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Dharmasraya yang akan tetapkan Peraturan Daerahnya tahun 2017 ini dan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2021 serta Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 - 2031*. Beberapa spot program rencana pengembangan ekowisata di Kabupaten Dharmasraya antara lain:

a Sempadan Sungai Batanghari Pulau Punjung – Pulau

Sempadan Sungai Batanghari dari Jembatan Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung sampai dengan Pulau Kecamatan Sitiung direncanakan dilakukan normalisasi sungai dan perbaikan tebing sungai oleh BWS V (Balai Wilayah Sungai V). Sepanjang sempadan Sungai Batanghari tersebut akan dibuat jalan akses dari Jembatan Sungai Dareh hingga Jembatan Pulau, hal ini memberikan peluang bagi Kabupaten Dharmasraya untuk mengembangkan tanaman buah pada sepanjang sempadan Sungai Batanghari sehingga dapat dimanfaatkan wisata buah ala Sungai Bantanghari yakni mulai dari Jembatan Sungai Dareh dibuat rute perahu wisata yang akan berlabuh pada dermaga-dermaga buah sepanjang sempadan Sungai Batanghari. Lokasi utama sentral pemasaran buahnya



adalah di Lahan Eks Rumah Pompa Suharto di Pisang Barabus atau Jorong Padang Sidondang.

Selain wisata buah, pada Sungai Batanghari pacu jalur dapat dihidupkan kembali, beberapa titik lokasi pacu jalur dapat dikembangkan antara lain : Jembatan Sungai Dareh Batu Bekawi, Dermaga Buah pada Eks Rumah Pompa Suharto, dan Pulaui. Rencana pengembangan ini akan mendorong paket wisata dadakan bagi pengguna jalur Jalan Lintas Sumatera saat menuju Kota Padang akan menyempatkan untuk menikmati pesona wisata alam yang akan dikembangkan di Kabupaten Dharmasraya ini.

Gambar 4.2.12.
Pemandangan Sungai Batanghari dari Pulau Punjung



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016

b Pengembangan Kawasan Wisata Candi Padang Roco

Pengembangan kawasan wisata Candi Padang Roco telah mendapatkan perhatian dari Balai Perlindungan Cagar Budaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ada di Kota Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar. Fasilitas tersebut pada tahun 2017 ini akan dilakukan pemugaran dan pengembangan oleh Balai Perlindungan Cagar Budaya Bersejarah tersebut. Melalui rencana kegiatan tersebut Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya mendukung rencana pengembangan



dengan mengintegrasikannya dalam perencanaan di daerah mulai dari RTRW, RIPKAD dan RPJMD Kabupaten Dharmasraya, baik dalam program pengembangan fisik maupun pengembangan social ekonomi masyarakat sekitar untuk pengembangan pariwisata cagar budaya pada lokasi tersebut.

c Lahan Eks Rumah Pompa Suharto di Pisang Barabus

Aset Lahan Eks Pompa Suharto saat ini masih berada pada Balai Wilayah Sungai V (BWS V) Kementerian Pekerjaan Umum. Lahan Eks Pompa Suharto di Pisang Barabus merupakan lahan seluas 14 Ha pada sempadan Sungai Batanghari. kondisi kontur lahan sedikit perbukitan dan sebagian besar landai eks lahan sawah. Sisa-sisa bangun tua rumah pompa dan beberapa peralatan pompa yang berada pada bagian bawah perbukitan pada sempadan Sungai Batanghari saat ini dimanfaatkan oleh anak-anak muda melukis gravity.

Gambar 4.2.13.
Rencana Pengembangan Wisata Outdoor Rumah Pompa Suharto di Pisang Barabus



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Lokasi Lahan Eks Rumah Pompa Suharto tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan wisata view perbukitan dengan dibangun canopi bridge, rumah pohon, menara teropong, flying fox, gazebo tempat bersantai, bumi perkemahan, water park mini, kebun binatang mini, kebun burung, wisata edukasi cara bersawah dan berkebun serta sentra pemasaran buah pada kebun buah sepanjang Sungai Batanghari.

d Ekowisata Gunung Salasih

Nagari Gunung Salasih adalah nagari pada Kecamatan Pulau Punjung yang berada pada dataran rendah pada Lereng Gususan Perbukitan Barisan. Lokasinya yang berada pada ibu kota kabupaten dan akses jalan yang sudah baik merupakan dukungan untuk dikembangkan potensi ekowisatanya. Beberapa potensi alamnya dapat dikembangkan antara lain :

- Bukit Tambun untuk kegiatan paralayang dan bumi perkemahan dataran tinggi (outbond park);
- Ngalau Cigak pada Sungai Lalo, aliran sungai dibawah dinding perbukitan yang cukup terjal;
- Gua wallet dan wisata caving pada perbukitan di Jorong Lubuk Bulang Nagari Gunung Selasih. Goa wallet memiliki kedalaman ± 150 m dengan produksi ± 1 ton/tahun yang dipanen 3x/tahun dan terbesar di Sumatera Barat. Saat panen harus menuruni tangga dengan menggunakan tali pengaman, serta lampu kepala untuk penerangan. Saat panen sarang wallet, masyarakat Lubuk Bulang naik keatas bukit dan menuruni gua untuk memanen sarang burung wallet, aktifitas ini dapat dijual daya tariknya pada wisatawan manca negara bagaimana uniknya perjuangan mendapatkan sarang burung wallet tersebut.
- Boideoversty Gunung Selasih, pada perbukitan barisan pada Nagari Gunung Selasih menyimpan beberapa flora dan fauna langka yang menjadi pusat penelitian dari beberapa universitas terkemuka. Beberapa flora antara lain : Meranti Batu, Meranti Kuning, Meranti Merah, Meranti Putih, Kulim, Medang, Pulay, Rengas, Sungkai dan





Kruing. Beberapa fauna langka antara lain Harimau, Cigak-Cingkuak (Sejenis Monyet), Rusa, Beruang, Rusa, Kupu-kupu, Kunang-kunang dan Labi-labi. Jika konservasi hutan pada perbukitan barisan tersebut dapat terus terjaga, maka banyak peneliti dunia akan melirik objek tersebut sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan manca negara;

- Lubuk larangan pada Jorong Kampung Surau, aktifitas panen ikan larangan bersama diiringi kegiatan adat kampung memberikan daya tarik tersendiri;

e Wisata Reklamasi Ex Tambang Batubara

Pada Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan saat ini ada beberapa aktifitas perusahaan tambang batubara. Secara ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pertambangan, perusahaan tambang batubara tetap bertanggungjawab dalam reklamasi kembali bekas tambang. Walaupun perusahaan tambang melakukan reklamasi, sisa bekas lubang tambang dan perubahan bentang alam pasti terjadi. Untuk itu dalam perencanaan reklamasi tambang dapat dikembangkan menjadi wisata tambang seperti pada Kota Sawalunto seperti kebun buah naga, zona cross dan off road dan kegiatan alam bebas lainnya.

f Konservasi Harimau

PT Tidar Kerinci Agung telah mengurus perizinan konservasi satwa korban konflik, lokasi penangkaran pada lahan konservasi PT TKA seluas 500 Ha. Salah satu destinasi untuk lokasi pada Kecamatan Asam Jujuhan dan sekitarnya adalah wisata edukasi penangkaran satwa liar korban konflik yang dilakukan oleh PT Tidar Kerinci Agung;

Paket wisata tersebut dapat memanfaatkan villa PT Tidar Kerinci Agung, paket night trip pada hutan dan perkebunan kelapa sawit PT Tidar Kerinci Agung, dan beberapa objek wisata air terjun pada lokasi lahan HGU PT Tidar Kerinci Agung.



g Goa Timpeh

Goa Timpeh merupakan goa pada gugusan Bukit Barisan dengan view stalagnit pada bagian dalamnya. Goa Timpeh berlokasi pada Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya.

4. Implementasi Konsep Green Economy dan Jasa Lingkungan;

Konsep *green economy* berawal dari pengembangan program MCAI bersama WWF dalam program pengembangan karet dan sawit premium di Kabupaten Dharmasraya, program ini dimulai tahun 2015 dengan adanya MOU antara Bupati Dharmasraya dengan MCAI dan WWF. Konsep ini adalah konsep intensifikasi perkebunan, pembinaan dan pengembangan kompetensi petani terkait intensifikasi teknik berkebun kelapa sawit dan karet yang ramah lingkungan. Program ini melibatkan 3 (tiga) stakeholder yakni :

- a. *Bagaimana petani meningkatkan program intensifikasi perkebunannya dengan cara meningkatkan kompetensi petani dalam teknik pemanenan menghasilkan hasil panen kelapa sawit yang tinggi rendemannya dan hasil panen karet yang tinggi kualitas karetnya, teknik pemupukan menggunakan pupuk organik, dan teknik perawatan lahan lainnya.*
- b. *Bagaimana perusahaan sebagai mitra dapat memberikan harga yang maksimal berdasarkan kualitas dari pada hasil perkebunan para petani.*
- c. *Bagaimana pemerintah dapat mendorong agar program ini maksimal implementasinya baik pada petani maupun perusahaan agro selaku pembeli yang akan menampung hasil perkebunan masyarakat*

Selain itu program peningkatan kualitas dari pada hasil perkebunan masyarakat, program ini juga mengembangkan petani kebun untuk memanfaatkan potensi ekonomi berbasis lingkungan pada lahan perkebunnya seperti pengembangan lebah galo–galo pada lahan perkebunan karet. Madu lebah galo–galo ini mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi dan dapat dibudidayakan pada pinggiran lahan kebun karet. Tumpang sari tanaman jernang pada kebun karet, dimana buah jernang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi.





Gambar 4.2.14.
Potensi Lebah Galo-Galo pada Perkebunan Karet



Sumber: WWF Indonesia, 2016

5. Pemulihan Lahan Akses Terbuka;

Pada Kabupaten Dharmasraya terdapat lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan emas rakyat yang memerlukan pemulihan, lokasi lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan emas rakyat tersebut berada pada beberapa bantaran sungai-sungai kecil. Berikut ini gambaran lokasi lahan akses terbuka akibat kegiatan pertambangan emas rakyat sebagai berikut :

Gambar 4.2.15.
Pencitraan Udara Lahan Akses Terbuka di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Berdasarkan pencitraan tersebut, terdapat lahan akses terbuka pada 3 (tiga) alur sungai yakni pada Sungai Palangko Nyunyo, Sungai Rotan, dan Sungai Batih yang akhirnya bermuara pada Sungai Piruko. Kerusakan lahan tersebut mulai terjadi awal tahun 2000 an oleh aktifitas illegal logging dan dilanjutkan dengan aktifitas PETI. Kodisi aktifitas PETI saat ini telah terjadi pengurangan yang sangat significant disebabkan berkurangnya lahan untuk aktifitas PETI dan meningkatnya ketegasan petugas kepolisian dalam menindak kegiatan tersebut. Peningkatan ketegasan petugas kepolisian dalam menindak PETI terjadi setelah insiden penyanderaan Kapolres Dharmasraya Bpk Khairul Aziz pada tahun 2013 sebelumnya.

Dalam rangka restorasi lahan akses terbuka bekas tambang rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran pada Direktorat Pemulihan Lahan Akses terbuka, bersama dengan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya mengembangkan program “Restorasi Bekas Tambang Rakyat”. Melalui program ini instansi pemerintah mensinergikan program pemulihan kerusakan lahan pada Kabupaten Dharmasraya. Sebagai realisasinya sudah terjadi kesepakatan dengan Direktur Lahan Akses Terbuka KLHK, pada tahun 2017 ini Direktorat Lahan Akses Terbuka KLHK akan melakukan restorasi kawasan lahan akses terbuka di bantaran Sungai Nyunyo Nagari Tabiang Tinggi seluas 5 Ha. Restorasi lahan akses terbuka ini dengan konsep “Green Edu Ecoturisme” yakni lahan akses terbuka tersebut akan dilakukan restorasi dengan hutan bamboo, penelitian bamboo dan pusat kerajinan bamboo. Untuk mendukung program restorasi tersebut, Bapedalda Propinsi mendukung program pengembangan kapasitas masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup bersama OPD terkait mendukung melalui kelembagaan nagari, penyiapan infrastruktur lainnya mulai dari air bersih, akses jalan, dan listrik.

Progress pengembangan “Green Edu Ecoturisme” sampai dengan awal tahun 2017 ini bahwa pelaksanaan pengerjaan fisik telah dilakukan tender pekerjaan

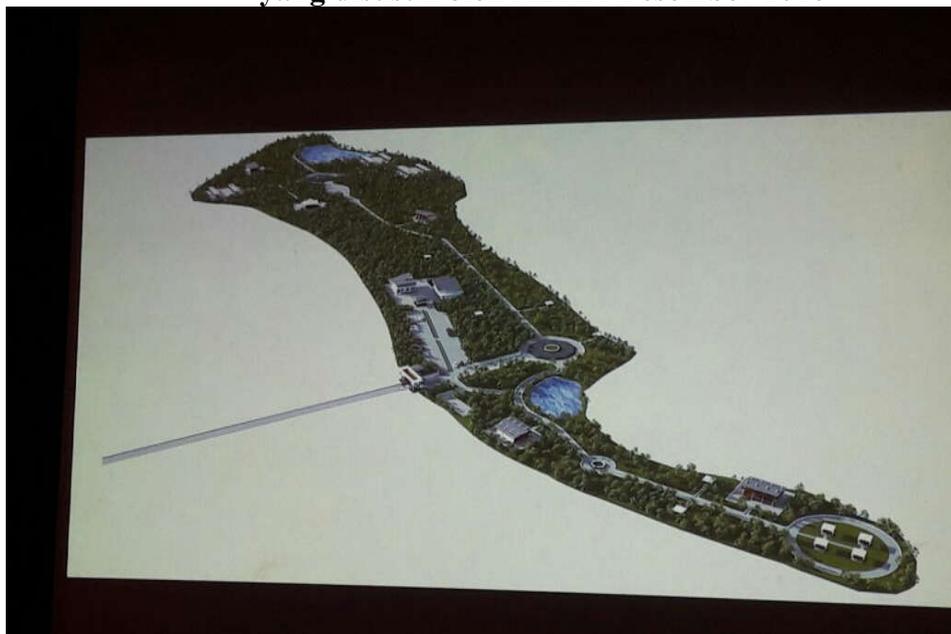




oleh Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka, telah terbentuk Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) / BUMD yang akan mengelola dan mengembangkan fasilitas Green Edu Ecoturisme yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Pengembangan lahan akses terbuka seluas 5 Ha ini merupakan demplot atau percontohan bagi rencana pengembangan pada kawasan 300 Ha lainnya. Pada kawasan seluas 300 Ha yang teridentifikasi mengalami kerusakan lahan tersebut akan dikembangkan dengan konsep konservasi bamboo dan wisata lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat setempat. Dengan sistem demplot atau percontohan ini diharapkan dapat mendorong sinergisitas dan antusiasme stakeholder terkait untuk menyatukan langkah dalam rencana restorasi dan pengembangan lahan akses terbuka. Stakeholder terkait tersebut antara lain pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, perusahaan melalui program CSR, masyarakat sendiri maupun LSM atau investor jika dilihat dari fungsi lingkungan maupun fungsi ekonomi.

Gambar 4.2.16.

DED Green Edu Ecoturisme Lahan Akses Terbuka Nagari Tabiang Tinggi yang disusun oleh KLHK Desember 2016



Sumber: Dokumen Detail Engineering Desain LAT Tabiang Tinggi, 2016



6. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Dari sisi regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam rangka untuk memperkuat penerapan konsep Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sesuai dengan kondisi yang ada pada Kabupaten Dharmasraya, pada tahun 2016 telah diajukan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Prolegda (Program Legeslasi Daerah) tahun 2016. Tetapi disebabkan kendala waktu, maka pada tahun 2016 Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup batal dilakukan pembahasan tingkat legelatif oleh DPRD Kabupaten Dharmasraya. Selanjut pada tahun 2017 kembali Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masuk dalam Prolegda (Program Legeslasi Daerah), sampai dengan penyusunan dokumen ini, Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengalami 1 (satu) kali pembahasan di DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Beberapa substansi yang ada dalam Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengakomodir karakteristik dan spesifik daerah antara lain:

- Pengakuan kearifan lokal spesifik daerah seperti hutan adat dan lubuk larangan;
- Pelibatan masyarakat dan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Apresiasi terhadap pelaku perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Larangan dan sanksi terhadap pelaku pengrusakan sempadan sungai dan penangkapan ikan menggunakan racun atau putas;
- Penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dan ketentuan dalam penebangan pohon pada lingkungan diluar lahan dan hutan;
- Penguatan pelaksanaan ketentuan/regulasi lingkungan baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri serta Peraturan Gubernur untuk pengimplementasiannya pada Kabupaten Dharmasraya.



7. Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya;

Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2015 telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya, untuk optimalisasi implementasi dari Peraturan Daerah tersebut, Kabupaten Dharmasraya melalui dinas terkait yang menjadi leading sektor terkait ketentuan dari Peraturan Daerah tersebut melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- **Bank Sampah;**

Untuk mendukung konsep pengelolaan sampah sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.2.2. Konsep Pengelolaan Sampah pada Kabupaten Dharmasraya, melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Bank Sampah pada 4 (empat) kecamatan induk yakni Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai. Hasil pembinaan dan fasilitasi tersebut maka sampai dengan saat ini telah terbentuk beberapa unit Bank Sampah pada 4 (empat) kecamatan tersebut. Tetapi berdasarkan hasil pengembangan saat ini, ada 1 (satu) unit Bank Sampah yakni Bank Sampah Sajati III di Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung berkembang menjadi Bank Sampah dengan cakupan pelayanan pada 1 (satu) kabupaten dan telah sukses secara ekonomi untuk mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Selain hal tersebut, Bank Sampah Sajati III telah menjadi salah satu Bank Sampah percontohan di Propinsi Sumatera Barat bahkan pada tahun 2015 telah mendapat penghargaan dari Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Propinsi Sumatera Barat yang penganugerahannya diberikan oleh Ir Haryono Isman selaku Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS). Penghargaan tersebut diberikan pada Bank Sampah Sajati III Gunung Selasih disebabkan Bank Sampah tersebut telah mampu membangun lapangan kerja dan tambahan penghasilan bagi masyarakat



tingkat ekonomi rendah seperti para ibu-ibu dan lansia yang masih produktif.

Gambar 4.2.17.
Bank Sampah Sajati III Gunung Selasih



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Dharmasraya, 2016

- **Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah;**

Untuk menjalankan fungsi pelayanan persampahan pada Kabupaten Dharmasraya, diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana persampahan. Beberapa kelengkapan sarana dan prasarana persampahan yang secara bertahap dilengkapi oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya antara lain:

- a. Tempat sampah terpisah pada unit-unit kegiatan/perumahan dan gantungan sampah pada komplek perumahan;
- b. Penyediaan fasilitas persampahan pada TPS Sampah meliputi container sampah terpisah, komposter dan sarana pemilahan sampah pada TPS Sampah;
- c. Kelengkapan peralatan mobilisasi sampah meliputi motor sampah untuk pengangkutan dari unit perumahan dan truk gandeng container sampah untuk pengangkutan dari TPS Sampah ke TPA Sampah;



- **Persampahan Terpadu;**

Konsep persampahan terpadu yang akan diterapkan sejak tahun 2015 adalah pemilahan bertahap. Pada tingkatan penghasil sampah perumahan maupun unit kegiatan, dilakukan pemilahan sampah rumah tangga oleh masyarakat, hasil pemilahan sampah oleh rumah tangga terdiri dari: a. sampah yang mempunyai nilai guna dijual pada bank sampah, b. sampah domestik organik dimanfaatkan sebagai kompos pada rumah tangga, c. sampah yang tidak mempunyai nilai guna dikirimkan ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah dibentuk sistem terpadu yakni, disediakan pemilahan II, dimana dilakukan pemilahan lagi oleh kelompok usaha masyarakat atau nagari untuk memilah sampah yang: a. sampah yang mempunyai nilai guna dijual pada bank sampah, b. sampah domestik organik diolah menjadi sebagai kompos menggunakan komposter pada TPS Sampah, c. sampah yang tidak mempunyai nilai guna dikirimkan ke TPA (Tempat Penampungan Akhir) Sampah Kabupaten Dharmasraya di Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung;

TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah, pada TPA Sampah Kabupaten Dharmasraya dilakukan pemilahan lagi oleh petugas TPA, sampah yang dipilah sebagai berikut : a. sampah yang mempunyai nilai guna dijual pada bank sampah, b. sampah domestik organik diolah menjadi sebagai kompos menggunakan komposter pada TPA Sampah, c. sampah yang tidak mempunyai nilai guna dan mengandung B3 diolah pada incinerator dan sampah non B3 dilakukan penimbunan pada TPA yang telah menggunakan sistem *sanitary landfill*.

- **Kelembagaan Pengelolaan Sampah;**

Sampai saat ini kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya masih dibawah lingkup kerja Dinas Pekerjaan Umum, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati



Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya tetapi pada tahun 2017 penganggaran kegiatan terkait pengelolaan dan operasional persampahan di Kabupaten Dharmasraya belum masuk anggaran Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2016 telah pernah disusun Draft Kelembagaan UPT Kebersihan melalui Draft Peraturan Bupati Dharmasraya tentang UPT Persampahan di Kabupaten Dharmasraya, tetapi disebabkan perubahan dengan perubahan OPD pada akhir tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya maka Draft Peraturan Bupati Dharmasraya tentang UPT Persampahan di Kabupaten Dharmasraya direncanakan akan disesuaikan dengan regulasi tersebut diatas dan akan dilanjutkan pembentukannya pada tahun 2017 ini.

- **Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada Kabupaten Dharmasraya;**

Dalam perencanaan konsep Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya tersebut, setelah kewajiban pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Daerah tersebut diatas dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui OPD terkait baik OPD teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum serta OPD Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penerapan sanksi sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 tersebut yang antara lain sanksi untuk pelaku pembuangan sampah pada sungai dan sumber air permukaan, sanksi untuk pelaku kegiatan yang tidak menyediakan dan melakukan pengelolaan sampah pada lingkup kegiatannya.



8. Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Kemasan dan Perusahaan Daerah Pengelola Limbah B3;

Pengelolaan lingkungan berbasis usaha dicoba akan diterapkan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah. Melalui peluang regulasi tersebut, dari sisi lingkungan hidup merencanakan ada 2 (dua) jenis usaha yang akan dibangun pada tahun 2017 ini yakni :

- **Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Kemasan;**

Pada Kecamatan IX Koto Nagari Lubuk Karak terdapat sumber air permukaan yang kualitasnya masih sangat baik sebagai air baku air minum. Kondisi tersebut didukung oleh catchment area wilayah sekitar Sungai Momong tersebut masih tinggi tutupan lahannya. Untuk rencana usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ini akan diterapkan system jasa lingkungan dimana dari setiap produk AMDK yang terjual akan diserahkan dan dikelola oleh masyarakat sekitar catchment area untuk kegiatan/usaha yang dapat mempertahankan tutupan lahan, misalnya pengembangan wisata alam pada lokasi tersebut, peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk pertanian wilayah tersebut. Dengan sistem jasa lingkungan ini diharapkan perusahaan dapat memberikan kontribusi pada masyarakat sekitar untuk memotivasi masyarakat sekitar mempertahankan tutupan lahan dan meningkatkan konservasi sumber daya air.

- **Perusahaan Pengelola Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan;**

Salah satu permasalahan dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan adalah limbah B3 medis yang belum terkelola dengan baik, untuk pusat kegiatan yakni pada Kota Padang Propinsi Sumatera Barat telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pengelolaan limbah B3 medis dengan menyerahkan limbah B3 medis pada usaha pengelola limbah B3 medis. Biaya per kilogram limbah B3 medis dibayar penghasil limbah B3 medis kepada usaha pengelola limbah B3 medis sebesar Rp. 40 ribu per kilogram. Pada Kabupaten Dharmasraya belum memiliki usaha yang bergerak dibidang pengelolaan limbah B3 medis sedangkan penghasil



limbah B3 medis di Kabupaten Dharmasraya cukup tinggi yakni mencapai 1 (satu) unit RSUD Sungai Dareh, 13 (tiga belas) unit puskesmas, 23 (dua puluh tiga) klinik rawat kesehatan dan puluhan praktek dokter dan bidan. Fasilitas incinerator yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ada 3 (tiga) unit incinerator dimana kesemuanya belum memiliki izin operasional.

Untuk itu mengingat sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan tingginya kebutuhan pasar terhadap pengelolaan limbah B3 medis ini, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya merencanakan salah satu usaha dari Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah Usaha Pengolah Limbah B3 Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sehingga dari kegiatan usaha tersebut selain mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi memberikan solusi pengelolaan limbah B3 medis di Kabupaten Dharmasraya.

9. Implementasi Fungsi PPLHD, PPNSLHD dan Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Tim Gakkum Kabupaten)

• Pembentukan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup

Untuk memperkuat fungsi pengawasan lingkungan hidup terhadap kegiatan dan/atau usaha sebagaimana amanat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.





- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Sebagaimana amanat dari regulasi tersebut diatas, dimana selama ini pelaksanaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan dan/atau usaha masih dilakukan oleh pejabat struktural, maka untuk meningkatkan profesional dari pada pejabat pengawas lingkungannya maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup. Sebagaimana persyaratan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Lingkungan Hidup, adalah personil minimal memiliki kepangkatann Penata Muda TK I/III.b, mempunyai spesifikasi pendidikan dari bidang eksak dan telah mendapatkan Sertipikat Tanda Lulus Diklat Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup. Saat ini pegawai Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki 2 (dua) orang personil yang telah memiliki kualifikasi tersebut diatas, untuk itu pada tahun 2016 sebelumnya telah dilakukan pengusulan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pembentukan Jabatan Fungsional tersebut di Kabupaten Dharmasraya.

- **Pembentukan Jabatan Fungsional Penyidik Lingkungan Hidup**

Senada dengan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, Jabatan Fungsional Penyidik Lingkungan Hidup sedang dalam proses pengusulan untuk pembentukannya pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diharapkan pada tahun 2017 ini akan terbentuk Jabatan Fungsional tersebut baik Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Jabatan Fungsional Penyidik Lingkungan Hidup untuk memperkuat penegakan lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya.



- **Penguatan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten**

Selain personilnya, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya dengan melibatkan OPD terkait dan Polres Kabupaten Dharmasraya, untuk operasional penyidikan, telah disediakan anggaran pada kegiatan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

10. Pemberdayaan Masyarakat Nagari dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Konsep pemberdayaan masyarakat nagari (desa) dalam pengelolaan lingkungan dikembangkan pada berbagai kegiatan kearifan lokal kegiatan konservasi seperti sebagai berikut:

- Lubuk larangan menjadi sumber daya perikanan bagi masyarakat nagari
Hampir setiap sumber daya air permukaan seperti sungai, embung dan situ menjadi sumber perikanan nagari dengan menerapkan lubuk larangan. Lubuk larangan adalah lokasi perairan yang ditetapkan oleh nagari/desa kemudian dilakukan usaha pembudidayaan perikanan dimana hasilnya adalah untuk kepentingan bersama yang dikelola sebagai pemasukan nagari/desa. Beberapa sumber daya perikanan lubuk larangan seperti lubuk larangan Nagari Gunung Selasih, lubuk larangan Nagari Padang Laweh, lubuk larangan Nagari Koto Nan IV Dibawauh, lubuk larangan Nagari Lubuk Besar, dan beberapa lubuk larangan lainnya pada beberapa nagari di Kabupaten Dharmasraya.
- Pemanfaatan pemulihan Lahan Akses Terbuka Nagari Tabing Tinggi melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Pada lahan akses terbuka bekas tambang emas rakyat pada Nagari Tabiang tinggi direncanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Direktur Pemulihan Lahan Akses Terbuka direncanakan dilakukan pemulihan dengan konsep Edueko





Green Park dengan dilakukan pemulihan penanaman bamboo, pembangunan pusat penelitian bamboo baik dari sisi pembibitan maupun sisi pemasaran berupa pusat kerajinan bamboo, serta dijadikan pusat Edukasi bagi anak-anak sekolah. Pengelolaan asset tersebut akan dikelola oleh masyarakat Nagari Tabiang Tinggi melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dimana sebagian hasil tersebut akan dikembangkan untuk kawasan tersebut menjadi kawasan ekowisata dan sebagian dari hasil tersebut diberikan pada nagari untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pada akhir tahun 2016 Dokumen Detail Engineering Desain (DED) telah disusun oleh Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka yang bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat (LPPM) Fisip Universitas Andalas Padang. DED tersebut akan dijadikan dasar perencanaan bagi KLHK untuk melakukan pemulihan lahan akses terbuka pada tahun 2017 ini.

11. Implementasi Rencana Detail Tata Ruang Dalam Penataan Kota

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, yang menjadi pusat kegiatan perkotaan adalah pada Kecamatan Pulau Punjung sebagai ibukota kabupaten dan Kecamatan Sungai Rumbai yang merupakan Gerbang Timur Propinsi Sumatera Barat. Untuk kedua kecamatan tersebut telah disusun Rencana Detail Tata Ruang, untuk kedua wilayah tersebut. Untuk itu dalam penerapan Rencana Detail Tata Ruang baik kegiatan usaha maupun kegiatan domestik /perumahan melalui Izin Lingkungan maupun Izin Mendirikan Bangunan diwajibkan mendapatkan Rekomendasi Tata Ruang dari BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) Kabupaten Dharmasraya sehingga semua kegiatan baik usaha maupun domestik mengikuti penataan pada Rencana Detail Tata Ruang.

Selain dari sisi penataan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemukiman, Perumahan dan Agraria melengkapi kebutuhan prasarana kegiatan meliputi sarana drainase, riol, dan sarana pengelolaan lingkungan lainnya seperti IPAL Komunal Domestik.





4.2.5. Pengembangan Jejaring Kerja

Pengembangan Jejaring Kerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2016 tidak hanya melibatkan dan bersinergi pada kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya tetapi juga beberapa stakeholder terkait lainnya seperti :

- Pemulihan Lahan Akses Terbuka Nagari Tabiang Tinggi bersama dengan Direktorat Pemulihan Lahan Akses Terbuka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat. Kerjasama tersebut dikuatkan melalui MOU (kesepakatan) antara Direktur Pemulihan Lahan Akses Terbuka, Gubernur Sumatera Barat, dan Bupati Dharmasraya dimana sampai dengan penyusunan Dokumen IKPLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 ini Draf MOU nya sedang dalam proses penelaahan oleh Biro Hukum masing-masing lembaga;
- Kerjasama dengan LSM WWF dalam program RIMBA Cluster Kuantan Sengingi, Dharmasraya dan Tebo. Program ini adalah pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam berbasis konservasi;
- Kerjasama dengan LSM WWF bersama MCAI dalam program Karet dan Sawit Premium. Program ini peningkatan kualitas hasil perkebunan masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi limbah/sisa sehingga mengurangi biaya pengelolaan produk dari pabrik. Melalui program ini diharapkan pabrik dapat menerima produksi perkebunan masyarakat lebih tinggi sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk melakukan intensifikasi dibandingkan ekstensifikasi sehingga diharapkan kegiatan pembukaan lahan baru oleh masyarakat dapat berkurang;
- Kerjasama dengan LSM WWF bersama MCAI terkait penelitian POME, adalah meneliti sumber daya dan pemanfaatan limbah dari kegiatan pabrik kelapa sawit yang saat ini menjadi objek dari penelitian adalah PT Dharmasraya Lestarindo, PT Damasraya Sawit Lestari dan PT Tidar Kerinci Agung;
- Kerjasama dengan LSM WARSI dalam program pengembangan Hutan Nagari untuk mengurangi alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan;





- Kerjasama dengan kegiatan-kegiatan masyarakat dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Dharmasraya melalui Forum Kota Hijau untuk mendorong pemanfaatan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau Publik;
- Dan beberapa program konservasi bersama kegiatan / perusahaan perkebunan di Kabupaten Dharmasraya seperti pengembangan Kawasan Konservasi Harimau bersama PT Tidar Kerinci Agung dan LSM ASTI (Animal Sanctuary Trust Indonesian);

4.2.6. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui beberapa hal sebagai berikut:

- Sosialisasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten melalui Petugas Pengolah Informasi Daerah) dimana setiap OPD memberikan informasi pada website Kabupaten Dharmasraya terkait rencana kerja program kegiatannya, realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan OPD, dan informasi lainnya dalam pelaksanaan tugas fungsi pemerintahan. Pada tahun 2016 PPID Kabupaten Dharmasraya mendapat Peringkat Terbaik I tingkat kabupaten pada penilaian Propinsi Sumatera Barat;
- Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa seleksinya telah menggunakan sistem online menghindarkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;
- Perizinan SPPL online dan pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup online (www.dlhkabdharmastraya.wordpress.com), Facebook (www.facebook.com/dharmasrayablh/), twitter (@blh_dharmasraya), WA (081261768595), e-mail (blhdharmasraya02@gmail.com)

4.3 Inisiatif yang Dikembangkan Masyarakat

Pada tahun 2016 ada beberapa kegiatan yang diinisiasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang antara lain:

- Kelompok Wanita Tani (KWT) pada Nagari Siguntur mengadakan arisan berkelompok untuk pembangunan fasilitas MCK masing-masing keluarga,





pengerjaanya dilakukan dengan cara Tobo atau kerja bakti bergantian. Pembangunan fasilitas MCK ini dalam rangka merubah pola kebiasaan masyarakat yang bergantung pada Sungai Batanghari untuk kegiatan MCK;

- Penanaman Kebun Jabon oleh Kelompok Tani Sako Mandiri seluas 50 Ha. Penanaman ini merupakan usaha penghijauan yang dilakukan masyarakat. Lahan diluar kawasan dimana termasuk milik Ulayat Sitiung telah dilakukan penebangan kayunya dan ditinggalkan oleh pengelola kayu. Oleh masyarakat Ulayat Sitiung direncanakan akan dilakukan penanaman komoditi kelapa sawit. Dalam perjalanannya melalui pembinaan dari Dinas Perkebunan Kabupaten Dharmasraya, Ulayat Sitiung mengalihkan komoditinya ke penanaman Jabon yang merupakan komoditi jenis kayu-kayuan untuk lahan 50 Ha tersebut;
- Pada Jorong Pulau Nagari Sitiung setiap hari besar Negara Republik Indonesia mengadakan kegiatan Pacu Jalur pada Sungai Batanghari, salah satu manfaat dari kegiatan ini adalah mengurangi para pelaku tambang emas ilegal (PETI) yang beraktifitas pada daerah tersebut. Setiap ada kegiatan dipastikan Kapal Dompeng Tambang Emas PETI menghentikan sementara kegiatannya. Pola ini sebenarnya dapat dimanfaatkan salah satu langkah penanggulangan kegiatan PETI pada Sungai Batanghari yang bila dilakukan berulang dan banyak lokasi sepanjang Sungai Batanghari cukup efektif untuk mengurangi aktifitas PETI tersebut;
- Nagari Gunung Selasih memiliki Hutan Nagari/Hutan Desa seluas 1000 Ha, inisiasi pembentukan hutan nagari berasal dari warga Jorong Lubuk Bulang Nagari Gunung Selasih yang peduli dengan banyaknya aktifitas illegal logging yang dilakukan oknum pada Gugusan Bukit Barisan tersebut, padahal pada perbukitan tersebut terdapat ladang Sarang Burung Walet Alam yang setiap tahun memberikan manfaat bagi warga Nagari Gunung Selasih tersebut. Dengan telah menjadi Hutan Nagari, Nagari Gunung Selasih berhak untuk menindak kegiatan tersebut. Langkah ini cukup efektif untuk menjaga biodioversty Gugusan Bukit Barisan pada wilayah tersebut.





- Lubuk larangan pada banyak nagari di Kabupaten Dharmasraya, pembentukan usaha perikanan nagari melalui lubuk larangan ini cukup efektif untuk mengendalikan pencemaran sungai sehingga membuat warga lebih berinisiatif untuk menjaga kualitas lingkungan perairannya. Beberapa titik lokasi perikanan lubuk larangan telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi saat ini telah menjadi perhatian dan tema penting baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah. Hal ini wajar terjadi karena lingkungan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan kondisi lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari berbagai macam kegiatan yang telah dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya penurunan kualitas fungsi lingkungan baik itu penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, perubahan sumberdaya alam, tataguna lahan dan tata kelola lingkungan, sehingga menimbulkan resiko bencana bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi dampak dari perubahan kondisi lingkungan, maka perlu diketahui apa penyebab utama perubahan itu terjadi, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, serta seberapa penting penyebab perubahan lingkungan itu terjadi. Dengan mengetahui penyebab dan besaran dampak yang telah terjadi inilah selanjutnya dapat ditentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan, sehingga pada satu sisi dapat tetap memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun pada sisi lainnya dapat seoptimal mungkin mengurangi dampak yang terjadi.

Pada proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dilakukan penyampaian isu-isu lingkungan melalui pendapat publik, yang dihadiri oleh perwakilan dari kalangan pemerintahan daerah, pemerintahan camat dan nagari, perwakilan masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, serta anggota tim data dan tim penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. Isu lingkungan yang diangkat adalah isu yang dominan dan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, serta pengaruhnya berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat.





Adapun kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah : kerusakan sumber daya alam; kerusakan keanekaragaman hayati; pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; dan mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen).

Adapun hasil konsultasi publik perumusan isu prioritas lingkungan hidup pada Kabupaten Dharmasraya diperoleh 5 (lima) isu prioritas lingkungan hidup sebagai berikut :

- 1 Penurunan kualitas air permukaan;
- 2 Kegiatan pertambangan yang berdampak terhadap lingkungan;
- 3 Alih fungsi lahan menjadi perkebunan;
- 4 Penanganan limbah domestik (sampah domestik dan limbah cair domestik);
- 5 Tata ruang dalam penataan drainase

Selain dari sisi persepsi publik melalui penelaahan *pressure, statue* dan *response* dari data primer dan data sekunder diperoleh gambaran informasi sebagai berikut :

1 Tataguna lahan

- Berdasarkan tren penggunaan lahan sebagai perkebunan terjadi penurunan luasan perkebunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 tetapi dari sisi persentase jumlah luasan, luasan lahan perkebunan masih memiliki persentase luasan tertinggi untuk jenis penggunaan lahan di Kabupaten Dharmasraya yakni mencapai 64 % dari jumlah luasan wilayah administratif Kabupaten Dharmasraya;
- Lahan kritis terdapat pada Kecamatan IX Koto dan Kecamatan Pulau Punjung dengan tren pada tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah luasan walaupun jumlahnya tidak berlaku signifikan (Tabel 3.1.2);
- Evaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan untuk tanah yang ditanami komodoti Hutan Tanaman Industri (akasia) kondisi kualitas tanah dimana hanya lapisan permukaan yakni ketebelan < 50 cm yang mengalami penurunan





kualitasnya sehingga diluar baku mutu PP 150 Tahun 2000, sedangkan untuk lahan yang ditanami komoditi kelapa sawit kualitas tanahnya masih memenuhi baku mutu PP 150 Tahun 2000;

- Luas hutan menurut fungsi dan status di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 dan Status Hutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 adalah sebagai berikut: Luas hutan berdasarkan fungsi hutan yaitu 92.150 Ha dengan rincian hutan produksi dengan luas 74.755 Ha, hutan lindung 11.986 Ha, taman nasional 3.546 Ha dan cagar alam 1.863 Ha dan Luas hutan berdasarkan status hutan dengan total luasan 117.307,07 Ha dengan rincian hutan negara (kawasan hutan) 92.150 Ha dan hutan hak/hutan rakyat 25.157,07 Ha;
- Luas areal pertambangan batubara yang merupakan IUP Produksi Batuan saat ini hanya 752 Ha, dengan total produksi batubara saat ini mencapai 120 ribu ton/tahun dan untuk jenis galian c mencapai 9 ribu ton/tahun. Tetapi jika termasuk IUP Ekplorasi jumlah luasan pertambangan batubara di Kabupaten Dharmasraya mencapai 7.674 Ha;

2 Kualitas air

- Beberapa tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas air antara lain : perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi lahan terbuka sehingga mengurangi catchment area, kerusakan SDA akibat kegiatan PETI, kondisi kualitas kehidupan masyarakat seperti ketersediaan fasilitas BAB, peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, pengelolaan limbah padat dan cair masih belum terkelola dengan baik, begitu juga untuk pengelolaan limbah B3 padat dan limbah B3 cair,
- Kondisi kualitas air di Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut :



- 1 Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) tahun 2016 telah dilakukan berdasarkan hasil analisis konsentrasi dari parameter TSS, BOD, COD, TP, Fecal Coliform dan Total Coliform dan menunjukkan hasil bahwa Air Sungai Batanghari memiliki status mutu air tercemar ringan;
- 2 Untuk anak Sungai Batanghari yakni Batang Mimpi berhulu di Kecamatan Pulau Punjung dan sumber pencemar dapat berasal dari perkebunan karet dan sawit, pertanian (sawah), pemukiman penduduk, dan lahan terbuka. Aliran sungai Batang Mimpi akan bermuara di Sungai Batanghari di Nagari Sitiung Kecamatan Sitiung. Hasil perhitungan rata-rata Indeks Pencemaran Air di Batang Mimpi dapat tergolong tercemar ringan (1,47) atau dengan nilai IPA 63,33%. Batang Timpeh mengalir sepanjang 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Timpeh dan Kecamatan Padang Laweh. Sumber pencemar Batang Timpeh umumnya berasal dari perkebunan sawit, karet dan campuran, dan lahan terbuka. Aliran sungai Batang Timpeh akan bermuara di sungai Batanghari di Kecamatan Padang Laweh. Hasil perhitungan Indeks Pencemaran Air di Batang Timpeh diperoleh status mutu air Batang Timpeh tergolong tercemar ringan (1,47);
- 3 Untuk kualitas air embung, hasil analisis statistik menjelaskan beberapa parameter telah melewati nilai baku mutu air kelas II berdasarkan standar baku mutu air kelas II dalam PP 82/2001. Nilai rata-rata masing-masing parameter yang melebihi baku mutu diantaranya yaitu DO 3,075 mg/L pada embung Ampang Kamang dan 3,45 mg/L pada embung Kamang Mani; Parameter H₂S pada embung Ampang Kamang 0,018 mg/L dan pada embung Kamang Mani 0,014 mg/L, sedangkan nilai rata-rata untuk parameter organik dan mikrobiologi tidak ada yang melebihi baku mutu;
- 4 Kualitas Air Tanah atau Sumur yang ada di Kabupaten Dharmasraya rata-rata masih belum memenuhi kriteria baku mutu untuk parameter



kimia anorganik dan mikrobiologi, sehingga untuk dapat dijadikan air baku harus dilakukan pengelolaan yang baik.

- Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah daerah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - 1 Menanam tanaman penyangga seperti rumput vetifer disekitar DAS untuk menghindari terjadinya erosi pada bibir sungai dan menambah areal resapan air dengan meningkatkan fungsi ekohidrologis;
 - 2 Melakukan pemulihan kawasan bekas tambang dengan mengajukan proposal pemulihan lahan akses terbuka ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada Tahun 2016 untuk lokasi Jorong Bukit Mindawa Nagari Tebing Tinggi Kecamatan Pulau Punjung seluas ± 300 Ha;
 - 3 Melakukan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sanitasi untuk mengatasi ketersediaan fasilitas air minum, pengelolaan limbah cair dan padat yang dihasilkan dari limbah domestik rumah tangga;
 - 4 Bentuk kebijakan lainnya yaitu melalui sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat melalui program dan kegiatan penyuluhan;
 - 5 Sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup pada lingkungan sekitar tempat tinggal, serta pembinaan tentang pengolahan persampahan dan prinsip 3R kepada masyarakat, pembentukan Bank Sampah dan kelompok peduli sampah, dan pelarangan membuang sampah disekitar DAS, serta membuat papan informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di sekitar DAS;
 - 6 Penertiban usaha/kegiatan disekitar DAS yaitu dengan melakukan kegiatan inventarisasi terhadap usaha/kegiatan yang telah atau belum memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, dan melaksanakan pengawasan rutin 1x 4 bulan, serta memberikan teguran secara lisan maupun tertulis terhadap usaha/kegiatan menurut tingkat ketaatannya dalam melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;



- 7 Melakukan pemantauan kondisi dan kualitas air sungai melalui program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang rutin dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun;
- 8 Memantau debit air sungai melalui Bendungan DAS Batanghari untuk menghindari terjadinya banjir besar dikala musim penghujan dengan curah hujan tinggi, kerjasama dengan Balai PSDA Provinsi Sumatera Barat.
- 9 Membuat DAM sekitar sepadan DAS sebagai salah satu upaya memperkuat tebing pada bibir sungai dan menghindari terjadinya erosi
- 10 Pengendalian pencemaran air dan pengelolaan sumber air juga dilakukan oleh masyarakat, seperti membuat lubang larangan yang berisi ikan bertuah pada aliran sungai yang ada di lingkungan tempat tinggal, dan hanya akan dipanen pada waktu-waktu tertentu dengan izin kepala suku/adat. Ini telah menjadi kearifan lokal pada beberapa nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya;

3 Kualitas udara

- Beberapa tekanan terhadap lingkungan yang menyebabkan penurunan kualitas udara antara lain : perubahan iklim secara global di seluruh dunia telah menjadi isu lingkungan, tidak hanya di tingkat internasional, namun juga nasional dan daerah, pencemaran yang disebabkan oleh emisi sumber tak bergerak yaitu yang berasal dari penggunaan bahan bakar minyak, gas dan bahan bakar lainnya untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan melalui tungku bakar, cerobong mesin boiler atau genset, pencemaran oleh emisi sumber bergerak yang berasal dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, kebakaran hutan atau lahan yang dipicu oleh pembukaan lahan baru dan ditemukannya titik panas dan titik api pada beberapa lokasi di Kabupaten Dharmasraya.
- Adapun kondisi kualitas udara dapat terlihat dari informasi antara lain :





- 1 Terjadi penurunan suhu udara rata-rata bulanan pada tahun 2016, dengan suhu udara rata-rata pertahun sekitar 26,94 °C;
 - 2 Hasil analisis air hujan tahun 2016 untuk beberapa parameter seperti pH, SO₄, NH₄, Na dan Ca²⁺ mengalami peningkatan dibanding tahun 2015. Air hujan tahun 2016 ini sedikit lebih basa dibanding tahun 2015;
 - 3 Kualitas udara ambien di Kabupaten Dharmasraya tergolong sangat baik dengan nilai rata-rata Indeks Pencemaran Udara (IPU) sebesar 99,39, yang diukur dari nilai IPU SO₂ dan NO₂ masing-masing sebesar 99,58 dan 99,21;
- Respon yang dilakukan pemerintah daerah antara lain :
 - 1 Pemerintah Daerah bersama masyarakat ikut aktif terlibat dalam menggerakkan Program Kampung Iklim sebagai Program Nasional dengan menerapkan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Kegiatan ini didukung oleh anggaran APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya dalam Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Kegiatan Pengembangan Dampak Perubahan Iklim;
 - 2 Uji Kier kendaraan bermotor berkala;
 - 3 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dibawah koordinasi Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya telah melakukan kerjasama dengan PO.DAMRI dan akan menerapkan angkutan masal yang lebih efektif dengan menyediakan fasilitas umum angkutan masal yang aman dan nyaman seperti bus, bus sekolah, bus karyawan dan bus PEMDA;
 - 4 Melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan sesuai dengan dokumen lingkungannya;
 - 5 Melakukan pemantauan kualitas udara ambient di Kabupaten Dharmasraya;



4 Resiko bencana

- Resiko bencana di Kabupaten Dharmasraya meliputi bencana gerakan tanah, kerawanan longsor/tanah longsor, bencana banjir, bencana kebakaran hutan dan lahan, dan bencana angin puting beliung. Adapun penyebab resiko bencana di Kabupaten Dharmasraya dapat disebabkan oleh kondisi alam dan lingkungan yang dapat menyebabkan resiko bencana seperti perubahan iklim, sedangkan aktifitas manusia yang dapat menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan resiko bencana antara lain pembukaan lahan sehingga mengurangi tutupan lahan;
- Sebelum tahun 2010 di Kecamatan Silago, Jorong Sialang dan Jorong Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung yang mengakibatkan rusaknya sebagian prasarana jalan dan lahan pertanian di daerah tersebut dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah yakni penataan lokasi yang berpotensi mengalami resiko kebencanaan gerakan tanah tersebut tidak dijadikan kawasan pemukiman dan pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya
- Kerawanan longsor tanah disebabkan oleh kondisi kontur lahan yang tinggi/kelerengan, curah hujan tinggi, dan tutupan lahan yang renggang/lahan terbuka serta jenis tanah. Pada tahun 2016 kejadian bencana tanah longsor menimpa pada Kecamatan Koto Baru dengan jumlah kerugian mencapai 65 juta serta ambruknya 1 (satu) unit prasarana jembatan dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah upaya mitigasi bencana lainnya yakni dengan penataan lokasi yang berpotensi mengalami resiko kebencanaan tanah longsor tersebut tidak dijadikan kawasan pemukiman dan pusat perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya;
- Banjir terjadi disebabkan catchement area tidak mampu atau tidak tersedia untuk menyerap air ke tanah sehingga air akan menggenangi lahan atau kawasan yang rendah dan terbuka, kondisi tahun 2016 tahun 2016 terjadi 14 kali kejadian genangan air melanda pemukiman dan rumah warga atau sebanyak 394 unit rumah dan fasilitas umum yang terendam antara lain



beberapa rumah ibadah dan kantor serta 2 (dua) unit jembatan terendam dan 17 (tujuh belas) titik jalan terendam dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Upaya pencegahan berupa penataan kegiatan budi daya melalui Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah baik kegiatan pemukiman, perkebunan, industri dan kegiatan budi daya lainnya. Upaya penanggulangan berupa pertolongan pertama pada masyarakat terdampak banjir baik dari sisi sosial dan kesehatan dimana upaya penanggulangan bencana banjir ini dikordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk upaya pemulihan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait misalnya prasarana jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan, restorasi lahan sawah terdampak banjir dilakukan bersama oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta dampak lainnya oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.

- Tekanan/pressure bencana kebakaran hutan dan lahan adalah tutupan lahan di Kabupaten Dharmasraya di dominasi oleh perkebunan dan hutan dengan persentase mencapai 82,7 % dari luas wilayah Kabupaten Dharmasraya, Dari tren curah hujan bulanan pada tahun 2016 tersebut, terlihat curah hujan rendah pada tengah tahun yakni bulan Juni hingga bulan Oktober, karakteristik masyarakatnya dalam pengelolaan lahannya. Secara kebiasaan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya sebagian kecil masih melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan masyarakat dengan cara penebangan dan perambahan hutan selanjutnya dilakukan pembakaran untuk pembersihan lahan tersebut sebelum dilakukan penanaman komoditi perkebunannya.
- Status kejadian kebakaran hutan dan lahan pada Kecamatan Sungai Rumbai terjadi kebakaran lahan kebun seluas 1,5 hektar dengan besar kerugian sebesar Rp. 15 juta, pada Kecamatan Pulau Punjung dengan luas lahan kebun terbakar seluas 5 hektar atau kerugian material sebesar Rp. 45 juta, pada Kecamatan Sitiung luas lahan terbakar 8,5 hektar dengan besar kerugian material sebesar Rp. 375 juta dan pada Kecamatan Koto Baru





luas lahan kebun yang terbakar seluas 24 hektar dengan kerugian material sebesar 1,245 milyar;

- Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah upaya pencegahan berupa pembinaan tata cara pengelolaan lahan tanpa membakar pada masyarakat. Upaya penanggulangan berupa mensinergikan program penanggulangan antara pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah (BPBD), TNI, POLRI, dan perusahaan yang memiliki sumber daya untuk penanggulangan secara cepat kejadian kebakaran hutan dan lahan, selain itu adalah membuka akses mensinkronkan informasi seluas-luasnya dari masyarakat kejadian-kejadian kebakaran lahan dengan informasi geografis hotspot satelit baik dari BMKG maupun dari KLHK sehingga saat terjadi kebakaran hutan dan lahan Tim Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Dharmasraya lebih cepat dalam bertindak;
- Informasi tekanan bencana angin puting beliung disebabkan udara panas dan udara dingin bertemu sehingga keduanya saling bentrok dan terbentuklah angin puting beliung. Selain itu, angin ini terjadi juga karena dalam awan terjadi arus udara naik keatas yang kuat. Hujan belum turun dan titik air ataupun kristal es masih tertahan oleh arus udara yang naik keatas puncak awan.
- Status kejadian angin puting beliung pada wilayah Kabupaten Dharmasraya terjadi pada tahun 2016 pada Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sitiung. Kejadian angin puting beliung ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kejadian bencana angin puting beliung ini menimbulkan kerugian material dengan rusaknya 1 (satu) unit sekolah taman kanak-kanak dan bangunan atap rumah pada Kecamatan Pulau Punjung dana tap rumah warga pada Kecamatan Sitiung. Hasil perkiraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya menunjukkan pada Kecamatan Sitiung bencana tersebut menelan kerugian sebesar Rp. 120 juta dan pada Kecamatan Pulau Punjung sebesar Rp. 240 juta.;



- upaya dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah upaya pencegahan yakni melalui penataan pada izin mendirikan bangunan dengan memberikan spesifikasi bangunan yang kokoh dan tidak mudah roboh. Upaya penanggulangan meliputi memberikan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat melalui unsur pemerintah terendah yakni kenagarian atau desa serta memberikan bantuan fisik maupun sosialisasi pembinaan trauma pasca bencana. Upaya pemulihan dilakukan dengan merenovasi kembali prasarana public yang terdampak oleh kejadian bencana dan mengupayakan bantuan bagi masyarakat terdampak pada kejadian bencana.

5 Perkotaan

Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, sistem perkotaan yang direncanakan pada Kabupaten Dharmasraya yaitu sebagai berikut:

1. Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Propinsi Sumatera Barat, kawasan perkotaan Pulau Punjung meliputi koridor Pulau Punjung – Sungai Dareh – Sikabau.
2. Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi kawasan strategis gerbang timur Propinsi Sumatera Barat.

Adapun tekanan pada kawasan perkotaan antara lain :

1. Tekanan berupa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan beserta tingkat pendidikannya dimana tingkat pendidikan pada Kecamatan Pulau Punjung yang merupakan sebagai rencana perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya tahun 2011-2031 tingkat pendidikannya lebih maju dibandingkan dengan Kecamatan



- Sungai Rumbai dan penduduk Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan;
2. Tekanan berupa informasi jumlah rumah tangga miskin terhadap jumlah rumah tangga dimana pada Kecamatan Pulau Punjung mencapai angka 38 % dan Kecamatan Sungai Rumbai mencapai 41 % dari jumlah rumah tangga;
 3. Tekanan berupa sarana dan prasarana lingkungan pemukiman terutama cakupan air bersih dan MCK, informasi yang akan diuraikan antara lain:
 - Mayoritas rumah tangga menggunakan air sumur sebagai sumber air minumnya;
 - Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri pada Kecamatan Pulau Punjung mencapai 91 % dan Kecamatan Sungai Rumbai mencapai 97 %;
 4. Pada Kabupaten Dharmasraya khususnya Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Sungai Rumbai belum memiliki fasilitas SIPAL (Sistem Pengelolaan Air Limba Domestik).
 5. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya belum optimal dimana cakupan saat ini hanya menyentuh Kecamatan Pulau Punjung sebagai ibukota kabupaten;

Adapun kondisi lingkungannya sebagai berikut :

1. Kualitas air permukaan pada perkotaan Kecamatan Pulau Punjung dilihat dari kualitas air Sungai Batanghari yang statusnya cemar ringan;
2. Kualitas air embung kamang statusnya baik
3. Kualitas air sumur penduduk kualitasnya baik kecuali untuk parameter mikrobiologi;
4. Kualitas udara ambient perkotaan pada Kecamatan Sungai Rumbai kondisi IPU baik;
5. Jenis penyakit yang diderita masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang paling banyak adalah ISPU dan Gasritis;



Kebijakan pengendalian pencemaran lingkungan yang terdiri dari kebijakan pencegahan pencemaran, kebijakan penanggulangan pencemaran, dan kebijakan pemulihan pencemaran. dimana Kebijakan pencegahan pencemaran yang dilakukan meliputi peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakatnya dan penataan kegiatan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sedangkan penataan kegiatan masyarakat melalui penerapaaan pelaksanaan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencanan Detail Tata Ruang pada semua lini kegiatan masyarakat, baik kegiatan skala usaha maupun kegiatan domestik masyarakat. Penataan kegiatan masyarakat ini diperlukan ketegasan dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penerapannya.

Kebijakan penanggulangan pencemaran dilakukan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran yang antara lain kelengkapan sarana dan prasarana SPAL (Sistem Pengelolaan Air Limbah) Domestik berupa IPAL domestik, drainase atau saluran riol dan sarana prasarana pengelolaan persampahan seperti Container Sampah, Tempat Sampah dan (Tempat Pemrosesan Sementara). Selain melengkapi sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengoptimalkan sistem pengelolaan lumpur tinja (IPLT) yang telah ada saat ini dan mengoptimalkan sistem pelayanan persampahan (UPT Kebersihan) dan pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah di Gunung Medan. Selain tersebut diatas, implementasi regulasi daerah terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 melalui Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Lingkungan Kegiatan dan/atau Usaha.



Dengan kondisi tersebut diatas, inovasi daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kabupaten Dharmasraya berupa beberapa program prioritas yang antara lain :

1. Penghijauan melalui Kearifan Lokal (Hutan Rakyat / Hutan Nagari / Peraturan Nagari tentang Hutan Adat dan Perlindungan Satwa) dan Penanaman Sadar Lingkungan Usia Dini;;
2. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan;
3. Pengembangan Konsep Ekowisata;
4. Implementasi Konsep Green Economy dan Jasa Lingkungan;
5. Pemulihan Lahan Akses Terbuka;
6. Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Optimalisasi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Kemasan dan Perusahaan Daerah Pengelola Limbah B3;
9. Implementasi Fungsi PPLHD, PPNSLHD dan Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Tim Gakkum Kabupaten)
10. Pemberdayaan Masyarakat Nagari dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Implementasi Rencana Detail Tata Ruang Dalam Penataan Kota

5.2. SARAN TINDAK LANJUT

Diperlukan perencanaan yang matang dan terpadu dalam usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diharapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (RPPLHD) segera dapat tersusun untuk dapat mensinergikan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap RPJMD serta program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya beberapa konsep inovasi tersebut diatas belum dapat menghasilkan dampak yang signifikan terkait perbaikan kualitas lingkungan, diperlukan sinergisitas antara semua stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, pelaku usaha, masyarakat dalam menjalankan program yang berbasis perbaikan kualitas lingkungan. Selain





sinergisitas stakeholder, diperlukan juga kerja sama yang erat secara ekoregion dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, penerapan konsep jasa lingkungan pada wilayah lainnya seperti konsep jasa lingkungan kualitas air Sungai Batanghari antara daerah hulu dan hilir untuk mendorong dan memotivasi daerah hulu Sungai Batanghari dalam menjaga kualitas lingkungan.

An aerial photograph of a wide, muddy river winding through a lush green valley. The river is the central focus, curving from the upper left towards the lower right. The surrounding landscape is a mix of dense green forest and cleared agricultural fields. In the background, a range of dark, forested mountains stretches across the horizon under a cloudy sky. The text 'DAFTAR PUSTAKA' is overlaid in the center of the image in a bold, yellow, serif font.

DAFTAR PUSTAKA



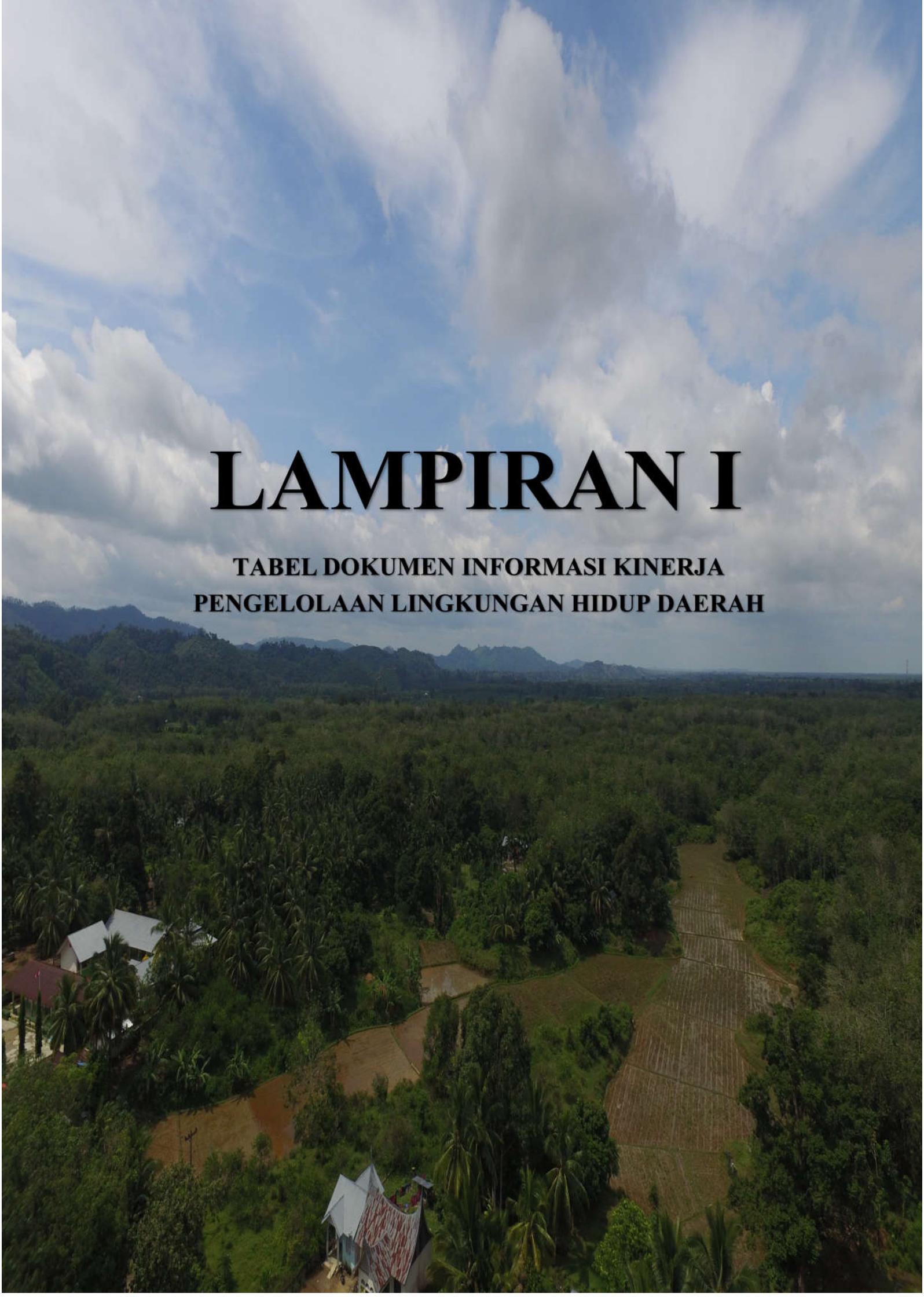
DAFTAR PUSTAKA

- Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2013. Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Dharmasraya.
- BPS Kabupaten Dharmasraya, 2016. Dharmasraya Dalam Angka 2016.
- Bina Pratama Sakato Jaya. PT, 2016. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Periode Januari s/d Juni 2016, Padang 2015, PT. Bina Pratama Sakato Jaya.
- Bukit Raya Mudisa. PT, 2016. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hutan Tanaman Industri PT. Bukit Raya Mudisa.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2016. Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- Durum, W.H. 1981. Agricultural Waste Water. In: Pollution and Water Resources . Ed. : G.J. Halashi-Kun. Pergamon Press. 14:69-82.
- Incasi Raya. PT, 2016. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Periode Januari s/d Juni 2014, Padang 2016, Incasi Raya Group.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Peraturan Pemerintah RI No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah.
- Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 04 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2016. Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra, KLHK Jakarta.
- Selago Makmur Plantation. PT, 2016. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Periode Januari s/d Juni 2016, Padang 2016, Incasi Raya Group.





-
- Sumbar Andalas Kencana. PT, 2016. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Periode Januari s/d Juni 2016, Padang 2016, Incasi Raya Group.
- Tidar Kerinci Agung. PT, 2016. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Periode Januari s/d Juni 2016, Padang 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

An aerial photograph of a tropical landscape. The foreground shows a small settlement with several houses, some with white roofs and others with more traditional thatched or corrugated metal roofs. The houses are surrounded by lush greenery, including many palm trees. A river or stream flows through the middle ground, surrounded by dense forest. In the background, there are rolling hills and mountains under a bright blue sky with scattered white clouds. The overall scene is a mix of natural beauty and human habitation.

LAMPIRAN I

**TABEL DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**



Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Nama Kawasan				Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
(1)	(2)	(3)	(4)		Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		11.365,37	10.922,98	-	442,39	-
		2. Kawasan Bergambut		-	-	-	-	-
		3. Kawasan Resapan Air		-	-	-	-	-
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		-	-	-	-	-
		2. Sempadan Sungai		3.115,05	3.036,96	78,09	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau		-	-	-	-	-
		4. Ruang Terbuka Hijau		-	-	-	-	-
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		5.369,25	5.295,68	-	73,24	0,33
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya		-	-	-	-	-
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut		-	-	-	-	-
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		1.847,07	1.840,07	-	6,67	0,33
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		-	-	-	-	-
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		3.522,23	3.455,66	-	66,57	-



Nama Kawasan				Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		-	-	-	-	-
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		914,97	864,73	25,49	21,16	3,59
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		-	-	-	-	-
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		-	-	-	-	-
		3. Kawasan Rawan Banjir		-	-	-	-	-
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	-	-	-	-	-
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	-	-	-	-	-
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	-	-	-	-	-
		2. Kawasan Rawan Bencana	i. Kawasan Rawan Rawan Letusan Gunung Berapi	-	-	-	-	-



Nama Kawasan				Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	-	-	-	-	-
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	-	-	-	-	-
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	-	-	-	-	-
			v. Kawasan Rawan Tsunami	-	-	-	-	-
			vi. Kawasan Rawan Abrasi	-	-	-	-	-
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	-	-	-	-	-
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	-	-	-	-	-
			ii. Sempadan Mata Air	-	-	-	-	-



Nama Kawasan				Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir		-	-	-	-	-
		2. Ramsar		-	-	-	-	-
		3. Taman Buru		-	-	-	-	-
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		768,77	724,26	-	44,51	-
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		-	-	-	-	-
		6. Terumbu Karang		-	-	-	-	-
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		-	-	-	-	-
Kawasan Budidaya		Budidaya Pertanian dan Nonpertanian		43.854,65	41.247,75	1.849,41	-	757,49

Keterangan: (-) = tidak ada kawasan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya tidak terdapat laut dan pesisir

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031 di Interpretasikan oleh WWF, 2016





Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sungai Rumbai	923,18	0,00	12,97	4.142,77	0,00	6,54
2	Koto Besar	3.386,94	0,00	3.438,64	45.680,53	3.188,89	144,52
3	Asam Jujuhan	906,92	0,00	2.636,38	38.026,39	6.384,36	340,27
4	Koto Baru	26,37	507,48	6.071,81	15.209,59	53,41	183,52
5	Koto Salak	697,38	1.483,18	1.020,17	8.699,62	0,00	199,17
6	Tiumang	183,58	890,87	233,03	11.788,66	0,00	245,68
7	Padang Laweh	113,36	282,02	965,06	4.477,29	0,00	191,86
8	Sitiung	1.082,89	1.795,79	1.450,20	6.330,23	1.466,63	291,49
9	Timpeh	3.962,92	0,00	2.202,71	14.295,28	11.554,04	87,23
10	Pulau Punjung	2.133,27	89,40	8.504,72	27.993,44	4.958,18	405,64
11	IX Koto	1.248,06	0,00	3.612,49	15.009,45	29.682,04	217,82

Keterangan : Rawa masuk dalam kelas Badan Air

Data merupakan hasil interpretasi Citra Landsat 8 OLI 2016

Sumber : WWF Indonesia, 2016



Tabel-2A. Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Kecamatan	Uraian	APL	HL	HP	HPK	HPT	KSA-KPA	Tubuh Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kecamatan Asam Jujuhan	a. Hutan	1.353,89	1.683,91	499,16	-	-	3.230,62	3.230,62
	b. Non Hutan	39.384,15	1.237,67	606,65	16,92	-	281,01	281,01
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan IX Koto	a. Hutan	7.047,23	6.915,93	7.396,11	10.245,31	3.410,13	1.691,76	-
	b. Non Hutan	6.641,47	645,57	1.421,51	1.414,78	2.802,21	138,06	-
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Koto Baru	a. Hutan	31,18	-	-	-	-	-	-
	b. Non Hutan	22.021,02	-	-	-	-	-	-
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Koto Besar	a. Hutan	125,29	-	2.614,95	-	5.937,69	-	-
	b. Non Hutan	30.622,94	-	13.100,59	68,89	3.369,14	-	-
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Koto Salak	a. Hutan	-	-	-	-	-	-	-
	b. Non Hutan	12.087,18	-	-	-	-	-	10,35
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Padang Laweh	a. Hutan	-	-	-	-	-	-	-
	b. Non Hutan	5.850,62	45,73	-	-	-	-	133,24
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Pulau Punjung	a. Hutan	1.578,29	268,44	392,86	-	4.586,73	-	-
	b. Non Hutan	32.728,42	239,99	268,38	-	3.839,03	-	183,07
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Sitiung	a. Hutan	238,58	-	-	-	1.186,12	-	-
	b. Non Hutan	10.154,26	-	-	-	622,50	-	215,65
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-





Kecamatan	Uraian	APL	HL	HP	HPK	HPT	KSA-KPA	Tubuh Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kecamatan Sungai Rumbai	a. Hutan	-	-	-	-	-	-	-
	b. Non Hutan	5.085,46	-	-	-	-	-	-
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Timpeh	a. Hutan	3.862,47	464,60	74,50	3.093,11	3.949,49	-	-
	b. Non Hutan	17.064,94	341,91	663,50	1.898,99	1.405,36	-	21,29
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Tiumang	a. Hutan	-	-	-	-	-	-	-
	b. Non Hutan	13.162,29	-	-	-	-	-	179,55
	c. Data Tidak Lengkap	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : Data merupakan hasil interpretasi Citra Landsat 8 OLI 2016 overlay dengan Fungsi Hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 dan Status Hutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031

Sumber : WWF Indonesia, 2016



Tabel-2B. Perbandingan Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Tahun	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tahun 2016	14.664,87	5.048,74	30.148,18	191.653,25	57.287,55	2.313,74
2	Tahun 2015	15.472,50	2.914,19	92.693,63	218.007,40	51.822,49	1.690,00
3	Tahun 2014	15.946,60	3.679,50	47.414,00	178.602,70	53.266,00	1.631,70
4	Tahun 2013	41.481,00	7.983,81	15.808,00	146.156,07	89.551,00	1.618,56

Keterangan : Buku Data SLHD Kabupaten Dharmasraya tahun 2015
Data merupakan hasil interpretasi Citra Landsat 8 OLI 2016

Sumber : WWF Indonesia, 2016



Tabel-2C. Perbandingan Luas Penutupan Lahan Dalam Kawasan Hutan dan Luar Kawasan Hutan Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.

Tahun : 2016

No.	Kecamatan	2014		2015		2016	
		Kawasan Hutan	Luar Kawasan Hutan	Kawasan Hutan	Luar Kawasan Hutan	Kawasan Hutan	Luar Kawasan Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kecamatan Asam Jujuhan	2.301,20	41.943,40	2.278,05	41.962,20	9.998,20	41.807,41
2	Kecamatan IX Koto	28.165,20	21.632,00	28.165,20	22.851,13	36.706,47	13.063,60
3	Kecamatan Koto Baru	15,10	22.119,10	-	22.134,20	31,18	22.021,02
4	Kecamatan Koto Besar	2.681,10	53.237,10	1.751,39	64.061,03	8.677,93	47.161,56
5	Kecamatan Koto Salak	-	11.958,40	-	11.958,40	-	12.097,53
6	Kecamatan Padang Laweh	-	5.882,30	-	5.882,30	-	6.029,59
7	Kecamatan Pulau Punjung	1.917,60	41.963,60	1.849,40	42.031,80	6.826,32	37.258,89
8	Kecamatan Sitiung	1.522,80	10.696,70	1.865,80	12.282,90	1.424,70	10.992,41
9	Kecamatan Sungai Rumbai	-	5.104,70	-	5.104,70	-	5.085,46
10	Kecamatan Timpeh	13.418,30	18.715,00	14.648,48	16.658,02	11.444,17	21.395,99
11	Kecamatan Tiumang	-	12.972,60	-	12.972,60		
	Total	50.021,30	246.224,90	50.558,32	257.899,28	75.108,97	230.255,30
			296,246.20		308,457.60		305,364.27

Keterangan : Data merupakan hasil interpretasi Citra Landsat 8 OLI Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016 overlay dengan Fungsi Hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 dan Status Hutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031

Sumber : Buku Data SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 dan WWF Indonesia, 2016





Tabel-2D. Luas Lahan Pertanian (Sawah Irigasi dan Sawah Non Irigasi) Per Kecamatan Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Lahan Pertanian 2015		Lahan Pertanian 2016	
		Luas Lahan Sawah Irigasi	Luas Sawah Non Irigasi	Luas Lahan Sawah Irigasi	Luas Sawah Non Irigasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sungai Rumbai	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koto Besar	108,90	169,00	149,00	120
3	Asam Jujuhan	12,00	0,00	12,00	0,00
4	Koto Baru	320,25	296,50	635,00	90,00
5	Koto Salak	658,00	5,00	588,00	89,00
6	Tiumang	475,00	0,00	475,00	0,00
7	Padang Laweh	128,50	0,00	129,00	0,00
8	Sitiung	1.653,00	333,00	1.593,00	282,00
9	Timpeh	330,75	42,50	339,00	43,00
10	Pulau Punjung	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00
11	IX Koto	786,00	0,00	606,00	0,00

Keterangan : 0 adalah data

Data merupakan pengklasifikasian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, Dharmasraya Dalam Angka, 2016



Tabel-2E. Luas Lahan Menurut Penggunaan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya.

Tahun : 2016

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	
		Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Lahan Bukan Pertanian (jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dan lain-lain)	30.885,20	37.069,00
II	Lahan Pertanian		
	Lahan Sawah		
	a. Sawah Irigasi	5.820,40	5.873,00
	b. Tadah Hujan	846,40	624,00
	Lahan Bukan Sawah		
	a. Tegal/Kebun	28.733,50	26.359,00
	b. Ladang/Huma	1.342,00	1.169,00
	c. Perkebunan	153.822,00	170.491,00
	d. Ditanami pohon/Hutan Rakyat	61.274,80	43.433,00
	e. Padang Pengembalaan/Padang Rumput	525,30	402,00
	f. Sementara Tidak Diusahakan*)	6.826,80	5.979,00
	g. Lainnya (Pekarangan Yang Ditanami pertanian, dan lain-lain)	6.066,70	4.714,00

Keterangan : 0 adalah data

*) Lebih dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun digolongkan menjadi lahan pertanian bukan sawah yang sementara tidak diusahakan
Data merupakan pengklasifikasian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, Dharmasraya Dalam Angka, 2016



Tabel-3. Luas Hutan Menurut Fungsi dan Status di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Fungsi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	74.755,00
2	Hutan Lindung	11.986,00
3	Taman Nasional	3.546,00
4	Taman Wisata Alam	0,00
5	Taman Buru	0,00
6	Cagar Alam	1.863,00
7	Suaka Margasatwa	0,00
8	Taman Hutan Raya	0,00
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	92.150,00
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	25.157,07
3	Hutan Kota	0,00
4	Taman Hutan Raya	0,00
5	Taman Keanekaragaman Hayati	0,00

Keterangan : Fungsi Hutan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013 dan Status Hutan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 – 2031
Hutan produksi terdiri dari HP, HPT, dan HPK

Sumber : Interpretasi WWF Indonesia, 2016



Tabel-3A. Lokasi Hutan Lindung di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	IX Koto	7.644,00
2	Asam Jujuhan	2.971,00
3	Timpeh	816,00
4	Pulau Punjung	510,00
5	Padang laweh	45,00

Keterangan : Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013
0 adalah data

Tidak ada perubahan data dari tahun sebelumnya

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-3B. Lokasi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	IX Koto	11.724,00
2	Timpeh	5.037,00

Keterangan : Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013
0 adalah data

Tidak ada perubahan data dari tahun sebelumnya

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-3C. Lokasi Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	IX Koto	8.921,00
2	Koto Besar	16.091,00
3	Asam Jujuhan	1.090,00
4	Pulau Punjung	668,00

Keterangan : Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013
0 adalah data

Tidak ada perubahan data dari tahun sebelumnya

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-3D. Lokasi Suaka Alam (SA) di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Cagar Alam (IX Koto)	2.863,00
2	Taman Nasional (Asam Jujuhan)	3.546,00

Keterangan : Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013
0 adalah data
Tidak ada perubahan data dari tahun sebelumnya

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-3E. Lokasi Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	IX Koto	6.244,00
2	Sitiung	1.815,00
3	Timpeh	5.372,00
4	Pulau Punjung	8.456,00
5	Padang Laweh	9.337,00

Keterangan : Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No. 35/Menhut-11/2013
0 adalah data

Tidak ada perubahan data dari tahun sebelumnya

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-4. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sungai Rumbai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2	Koto Besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3	Asam Jujuhan	0,00	0,00	0,00	113,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Perkebunan, pemukiman, lahan terbuka bekas tambang batubara
4	Koto Baru	0,00	0,00	0,00	1.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Perkebunan, pertanian, pemukiman, kebakaran lahan, lahan terbuka bekas PETI
5	Koto Salak	0,00	0,00	0,00	345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Perkebunan, pertanian, pemukiman
6	Tiumang	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Perkebunan, pertanian, pemukiman



No	Kecamatan	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	Padang Laweh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
8	Sitiung	102,05	0,00	0,00	605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Perkebunan, pertanian, pemukiman, kebakaran lahan.
9	Timpeh	311,42	29,17	0,00	46,21	0,00	0,00	0,00	42,11	Perkebunan, kebakaran hutan/lahan
10	Pulau Punjung	0,00	0,00	0,00	450,25	0,44	0,00	0,00	1.369,34	Pemukiman, pertanian, Perkebunan, HTI, kebakaran lahan
11	IX Koto	522,34	68,41	0,00	39,61	175,75	15,83	0,00	293,15	Perkebunan, HTI

Keterangan : 0 adalah data

Sumber : WWF Indoensia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016





Tabel-4A. Luas Lahan Agak Kritis dan Potensial Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Agak Kritis (Ha)				Potensial Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sungai Rumbai	0,00	0,00	0,00	246,79	0,00	0,00	0,00	888,80	Perkebunan, lahan terbuka, kebakaran lahan, pemukiman
2	Koto Besar	2.524,46	0,00	0,00	608,09	3.393,68	0,00	0,00	1.910,01	Perkebunan, HTI, lahan terbuka
3	Asam Jujuhan	19,84	0,00	0,00	1.344,89	470,23	341,75	2.702,21	9.611,21	Perkebunan, lahan terbuka bekas tambang batubara, lahan terbuka pada lahan konservasi
4	Koto Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,39	Perkebunan, pertanian, kebakaran lahan, lahan terbuka bekas PETI, pemukiman



No	Kecamatan	Agak Kritis (Ha)				Potensial Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	Koto Salak	0,00	0,00	0,00	131,72	0,00	0,00	0,00	2.591,89	Perkebunan, pertanian, pemukiman
6	Tiumang	0,00	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	0,00	966,82	Perkebunan, pertanian, pemukiman
7	Padang Laweh	0,00	3,88	0,00	0,00	0,00	41,92	0,00	531,57	Perkebunan, pemukiman
8	Sitiung	820,26	0,00	0,00	161,42	491,56	0,00	0,00	216,01	Perkebunan, pertanian, pemukiman, kebakaran lahan.
9	Timpeh	2.603,23	504,36	0,00	1.077,46	4.862,89	242,81	0,00	3.142,05	Perkebunan, kebakaran hutan/lahan
10	Pulau Punjung	1.622,57	14,03	0,00	1.133,03	682,54	493,99	0,00	3.965,18	Pemukiman, pertanian, Perkebunan, HTI, kebakaran lahan
11	IX Koto	1.736,49	2.463,74	371,21	307,15	10.181,74	4.395,08	1.470,35	4.421,19	Perkebunan, HTI

Keterangan : 0 adalah data

Sumber : WWF Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016





**Tabel-4B. Perbandingan Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Kritis (Ha)		
		Tahun 2013	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Rumbai	0,00	0,00	0,00
2	Koto Besar	0,00	0,00	0,00
3	Asam Jujuhan	103,00	145,00	113,09
4	Koto Baru	159,00	122,00	1.278,29
5	Koto Salak	346,00	345,00	345,41
6	Tiumang	267,00	154,00	9,60
7	Padang Laweh	0,00	63,00	0,00
8	Sitiung	1.596,00	1.342,00	707,5
9	Timpeh	399,00	244,00	386,8
10	Pulau Punjung	428,00	176,00	450,25
11	IX Koto	630,00	345,00	630,36

Keterangan : 0 adalah data

Sumber : WWF Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016



**Tabel-4C. Perbandingan Luas Lahan Sangat Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Sangat Kritis (Ha)		
		Tahun 2013	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Rumbai	0,00	0,00	0,00
2	Koto Besar	0,00	11,00	0,00
3	Asam Jujuhan	0,00	0,00	0,00
4	Koto Baru	0,00	0,00	0,00
5	Koto Salak	0,00	0,00	0,00
6	Tiumang	0,00	0,00	0,00
7	Padang Laweh	0,00	0,00	0,00
8	Sitiung	4,00	0,00	0,00
9	Timpeh	44,00	75,00	42,11
10	Pulau Punjung	1.365,00	789,00	1.369,78
11	IX Koto	485,00	333,00	484,73

Keterangan : 0 adalah data

Sumber : WWF Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016



**Tabel-4D. Perbandingan Perubahan Kondisi Lahan Tahun 2013, Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kondisi Lahan	Tahun 2013	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kritis	3.928,00	2.936,00	3.921,30
2	Sangat Kritis	1.898,00	1.208,00	1.896,62
3	Agak Kritis	0	0	17.725,14
4	Potensial Kritis	0	0	58.181,87

Keterangan : 0 adalah data

Sumber : WWF Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016



Tabel-5. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< 20 cm	0,2 - 1,3	1,98	Melebihi
2	20 - < 50 cm	1,3 - 4,0	4,89	Melebihi
3	50 - < 100 cm	4,0 - 9,0	4,98	Tidak
4	100 - 150 cm	9,0 - 12	9,84	Tidak
5	> 150 cm	> 12	12,83	Tidak

Keterangan : Lokasi pemantauan di PT BRM (Bukit Raya Mudisa) Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-6. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ketebalan Solum	> 20 cm	60,0	Tidak
2	Kebatuan Permukaan	< 40 %	1,67	Tidak
3.A	Komposisi Fraksi	< 18 % koloid	-	-
3.B	Komposisi Fraksi	> 80 % pasir kuarsitik	-	-
4	Berat Isi	< 1,4 g/cm ³	1,22	Tidak
5	Porositas Total	> 30 % ; < 70 %	53,96	Tidak
6	Derajat Pelulusan Air	> 0,7 cm/jam ; < 8,0 cm/jam	4,63	Tidak
7	pH (H ₂ O) 1 : 2,5	> 4,5 ; < 8,5	6,18	Tidak
8	Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	13,0	Tidak
9	Redoks	< 200 mV	30,0	Tidak
10	Jumlah Mikroba	> 10 ² cfu/g tanah	8,4 x 10 ⁵	Tidak

Keterangan: Sampel Tanah di Lokasi Jorong Aur Jaya III Kecamatan Sitiung dengan komoditi kelapa sawit tahun tanam 10 tahun
(-) = Tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/ 2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Subsistensi Gambut diatas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut \geq 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	-	-
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH \leq 2,5	-	-
3	Kedalaman Air Tanah dangkal	> 25 cm	-	-

Keterangan : (-) = tidak ada data, tidak ada lahan gambut di Kabupaten Dharmasraya

Sumber : (-)



**Tabel-8. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Prsntas Tutupan (%)	Krapatan (Pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

Keterangan: (-) = tidak ada data, wilayah Kabupaten Dharmasraya tidak terdapat komponen Mangrove

Sumber : (-)



Tabel-9. Luas dan Kerusakan Padang Lamun di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-

Keterangan : (-) = tidak ada data, wilayah Kabupaten Dharmasraya tidak terdapat komponen Padang Lamun

Sumber : (-)



**Tabel-10. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) = tidak ada data, wilayah Kabupaten Dharmasraya tidak terdapat komponen Terumbu Karang

Sumber : (-) = tidak ada



Tabel-11. Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Penggunaan	Luas Tutupan (Ha)		Sumber Perubahan
		Lama	Baru	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemukiman	-	-	-
2	Industri	-	-	-
3	Perkebunan	218.007,40	191.653,25	WWF Indonesia, 2016
4	Pertambangan	-	-	-
5	Sawah	2.914,19	5.048,74	WWF Indonesia, 2016
6	Pertanian lahan kering	28.733,50	26.359,00	BPS, DDA 2016
7	Perikanan	-	-	-
8	Hutan	51.822,49	57.287,55	WWF Indonesia, 2016
9	Badan Air	1.690,00	2.313,74	WWF Indonesia, 2016
10	Ladang	1.342,00	1.169,00	BPS, DDA 2016
11	Lainnya (Perkarangan Yang Ditanami Pertanian. dan lain-lain)	6.066,70	4.714,00	BPS, DDA 2016

Keterangan: Rawa masuk dalam kelas Badan Air

Data merupakan hasil interpretasi Citra Landsat 8 OLI 2016

Data BPS merupakan pengklasifikasian yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Dharmasraya

Sumber : WWF Indonesia, 2016; Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, Dharmasraya Dalam Angka, 2016; dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-12. Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertambangan	0	Besar	0	
		2	Menengah	752,73	Data UKL/UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
		6	Kecil	18,00	Data UKL/UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
		0	Rakyat	0	
2	Perkebunan	6	Besar	71.375,69	Data Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan
		0	Menengah	0	
		0	Kecil	0	
		0	Rakyat	0	
3	Pertanian	0	Besar	0	
		0	Menengah	0	
		0	Kecil	0	
		0	Rakyat	0	
4	Pemanfaatan Hutan	0	Besar	0	
		0	Menengah	0	
		0	Kecil	0	
		0	Rakyat	0	
5	Perindustrian	0	Besar	0	
		0	Menengah	0	
		0	Kecil	0	
		591	Rakyat	0	SIPD Koperindag

Keterangan : 0 adalah data

Sumber : Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2016

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, 2016

Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel-12A. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Perkebunan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Perusahaan	SK Pelepasan	Tanggal SK	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ANDALAS WAHANA BERJAYA PT	350/MENHUT-II/2007	22/10/2007	8.894,72
2	BINA PRATAMA SAKATO JAYA PT	SK.06/MENHUT-II/2006	29/12/1997	5.332,12
3	BINA PRATAMA SAKATO JAYA (I) PT	811/KPTS-II/1997	04/01/2006	3.309,85
4	BINA PRATAMA SAKATO JAYA (III) PT	SK.06/MENHUT-II/2006	04/01/2006	8.329,94
5	INCASI RAYA PT	379/Kpts-II/1990	30/07/1990	3.843,28
6	SELAGO MAKMUR PLANTATION PT	313/KPTS-II/1994	18/07/1994	6.569,76
7	SUMBAR ANDALAS KENCANA PT	339/Kpts-II/1990	10/07/1990	13.824,75
8	SUMBER ANDALAS KENCANA II PT	339/Kpts-II/1990	10/07/1990	1.428,73
9	SUMBER ANDALAS KENCANA III PT	339/Kpts-II/1990	10/07/1990	1.750,88
10	TIDAR KERINCI AGUNG PT	304/KPTS-II/1992	29/02/1992	7.362,67
11	TIDAR KERINCI AGUNG PT (b)	436/KPTS-II/1995	22/08/1995	10.728,99

Keterangan : -

Sumber : Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2016



Tabel-12B. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama	Nomor SK	Tanggal SK	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PT. Bukit Raya Mudisa	257/Kpts-II/2000	23-Agust-00	28.617

Keterangan : -

Sumber : Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2016



Tabel-12C. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Lokasi	WPP_SKP	Nomor SK	Tanggal SK	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Timpeh	XVII/G/1,2,3	45/KPTS-II/1992	16/01/1992	3.832,48

Keterangan : -

Sumber : Buku Basis Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2016



Tabel-13. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Bara	KUD Sinamar Sakato	197,33	-	75.457,43
2	Batu Bara	Sinamar Lintas Sumatera (SLN)	555,40	-	55.035,46
3	Batuan (Sirtukil)	Ridwan R	3,00	-	5.851,00
4	Batuan (Sirtukil)	Asrida	2,00	-	2.000,00
5	Batuan (Sirtukil)	Arjuna	4,00	-	280,00
6	Batuan (Sirtukil)	H. Abdul Haris Tuanku Sati	3,00	-	1.750,00
7	Batuan (Sirtukil)	Syahrial Salam	3,00	-	600,00
8	Batuan (Sirtukil)	Amrizal Dt Rajo Medan	3,00	-	4.700,00

Keterangan : (-) = tidak ada data

Data diperoleh dari Laporan Kegiatan Inventarisasi Data Base Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya Tahun 2016

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel-14. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sungai Rumbai	-	-	-	-	-	-
2	Koto Besar	-	-	-	-	-	-
3	Asam Jujuhan	-	-	-	-	-	-
4	Koto Baru	-	-	-	-	-	-
5	Koto Salak	-	-	-	-	-	-
6	Tiumang	-	-	-	-	-	-
7	Padang Laweh	-	-	-	-	-	-
8	Sitiung	-	-	-	-	-	-
9	Timpeh	-	-	-	-	-	-
10	Pulau Punjung	-	-	-	-	-	-
11	IX Koto	-	-	-	-	-	-
12	Sungai Rumbai	-	-	-	-	-	-

Keterangan: (-) = tidak ada data

Pada tahun 2016 tidak ada kegiatan penghijauan dan reboisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bantuan bibit tanaman hutan sebanyak ±500 batang merupakan CSR PT. Tidar Kerinci Agung diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya untuk dibagikan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah.

Penanaman pohon pelindung , seperti jabon, juga dilakukan oleh masyarakat KWT (Kelompok Wanita Tani) di perkebunan mereka dan beberapa kelompok masyarakat yang memiliki perkebunan yang diselingi dengan tanaman pertanian lainnya.

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya, 2016 dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



**Tabel-15. Kondisi Sungai di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pulau Punjung							
1	Batang Hari*	747,0	124,0	109,0	3,64	1.645,14	49,43
2	Sungai Pauh	9,0	8,0	6,0	1,20	6,50	1,20
3	Batang Piruko*	45,0	21,0	18,0	1,65	10,30	5,22
4	Batang Mimpi	20,0	24,0	22,0	1,50	8,56	4,01
5	Batang Pangian*	59,0	30,0	27,0	0,70	25,72	4,33
6	Batang Neli	8,0	7,0	6,0	0,75	1,92	0,63
7	Batang Lolo	15,0	10,0	9,0	1,10	1,40	1,45
8	Sungai Balit	3,0	3,0	2,0	0,50	0,80	0,31
9	Sei. Patapahan	5,0	4,0	3,0	0,65	0,73	0,27
10	Batang Asahan	6,0	5,0	3,0	0,65	0,52	0,13
11	Sungai Kamang	7,0	6,0	5,0	0,60	0,62	0,08
12	Batang Tandun	12,0	7,0	5,0	0,75	0,70	0,13
13	Sungai Lamak	6,0	3,0	2,0	0,30	0,51	0,25
14	Batang Palangko	10,0	8,0	6,0	0,80	6,77	1,54
15	Batang Nyunyo	7,0	9,0	7,0	0,85	3,10	0,82
IX Koto							
16	Batang Muaro Momong*	49,0	37,0	33,0	1,40	18,62	4,30
17	Batang Siraho	18,0	6,5	5,0	1,05	1,53	0,66
18	Batang Silago	12,0	10,0	9,0	1,50	2,40	0,80
19	Batang Banai	5,0	3,5	3,0	0,65	1,67	0,55
20	Batang Sabilah	7,0	10,0	9,0	0,80	0,70	0,10
21	Batang Salilik	8,0	8,0	7,5	0,70	0,44	0,15
22	Batang Rambah	9,0	7,0	5,0	0,75	0,62	0,17
23	Batang Bakur	12,0	10,0	8,5	0,85	0,68	0,41



24	Batang Bugah	15,0	11,0	10,0	0,90	3,45	0,80
25	Batang Sipotar	28,0	9,0	7,0	1,70	3,82	1,01
26	Batang Singolan	12,0	10,0	8,0	0,80	4,21	0,97
27	Sungai Tonang	10,0	10,5	9,0	0,75	1,70	0,30
28	Batang Labo	25,0	15,0	14,0	1,20	2,85	1,00
29	Batang Tosin	8,0	11,0	10,0	0,95	2,20	0,97
30	Batang Sigunggung	6,0	8,0	6,0	0,90	5,63	1,02
31	Batang Silogu	4,0	3,0	2,0	0,30	1,47	0,40
32	Sungai Tarok	5,0	6,0	5,0	0,45	2,62	0,60
33	Sungai Keru	15,0	9,5	8,0	0,75	1,80	0,53
34	Batang Olek	10,0	5,0	4,0	0,45	2,03	0,47
35	Sungai Talang	8,0	6,0	4,0	0,50	0,15	0,06
36	Batang Pakani	9,0	5,0	4,5	0,50	0,30	0,08
Sitiung							
37	Sei. Lubuk Agung	4,0	2,5	2,0	0,40	0,55	0,08
38	Sei. Udang	9,0	6,0	5,0	0,25	0,27	0,05
39	Sei. Tolu	12,0	6,0	5,0	0,35	0,32	0,04
40	Sei. Durian	3,0	3,0	2,0	0,35	0,09	0,02
41	Sei. Sarik	7,0	8,0	7,0	0,50	0,37	0,09
42	Sei. Kuko	10,0	10,0	8,0	0,65	2,03	0,45
43	Sei. Murai	5,0	4,5	4,0	0,25	0,20	0,04
44	Batang Tiung	2,0	4,0	3,0	0,20	0,18	0,03
45	Sungai Duo	2,0	5,0	3,0	0,35	0,17	0,02
Timpeh							
46	Sei. Temperatur	9,0	9,5	8,0	0,70	0,19	0,07
47	Sei. Pinang	10,0	7,0	6,5	0,85	0,35	0,10
48	Batang Timpeh	45,0	53,0	51,0	1,30	7,55	2,61
49	Ari Gemuruh	4,0	5,0	4,0	0,55	0,15	0,10
50	Batang Timpeh Usau	25,0	38,0	35,0	1,70	2,50	1,70
51	Sei. Garingging	6,4	9,0	7,0	0,90	0,30	0,25
52	Sungai Ngalau	8,0	8,0	7,0	0,60	0,23	0,05



53	Batang Lodan	1,0	3,5	2,5	0,35	0,15	0,10
54	Sarana Baru	4,0	4,0	3,0	0,45	0,15	0,11
55	Sei, Kambang Mani	8,0	6,5	5,0	0,50	0,60	0,40
56	Sei, Palabi	12,0	9,0	7,0	0,55	0,40	0,30
57	Sei, Ambacang	7,0	7,0	6,5	1,10	0,95	0,75
Koto Baru							
58	Sungai Betung AR	15,0	9,0	7,0	1,30	2,05	0,10
59	Batang Tarok	5,0	2,5	2,0	0,90	0,30	0,08
60	Sungai Rimbo	8,0	6,0	4,0	0,65	0,21	0,09
61	Sungai Kaciak	3,0	3,5	3,0	0,75	0,19	0,02
Padang Laweh							
62	Sungai Sopan Jaya	3,0	3,0	2,0	0,45	0,18	0,07
Koto Salak							
63	Sei Aman	4,0	7,0	5,0	1,40	0,31	0,05
Koto Besar							
64	Sei, Muai	5,0	5,5	5,0	0,80	1,18	0,33
65	Batang Siat*	73,0	22,0	21,0	2,28	90,77	1,54
66	Batang Bayeh	10,0	11,0	10,0	0,90	0,63	0,10
67	Sungai Betung	18,0	13,0	12,0	0,85	5,31	1,13
68	Sungai Nabuan	17,0	10,0	8,0	0,75	2,75	0,92
69	Sungai Bungin	9,0	6,5	4,0	0,35	0,61	0,07
Asam Jujuhan							
70	Sungai Jujuhan	30,0	45,0	44,0	2,10	27,33	5,01
71	Sungai Pangian*	59,0	25,0	24,0	1,60	20,17	6,23
72	Sungai Batang Sinamar	40,0	35,0	33,0	1,25	22,01	4,30
73	Sungai Asam	17,0	16,0	15,0	0,90	11,41	3,18
Sungai Rumbai							
74	Sei. Jernih	8,0	6,0	5,0	0,40	0,22	0,03
75	Sei. Cendrawasih	7,0	4,0	3,0	0,45	0,25	0,05
Tiumang							
76	Sungai Atang	8,0	6,0	5,0	1,25	1,29	0,11



Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD



2016

77	Batang Bungo	20,0	7,0	6,0	0,65	0,88	0,08
78	Sungai Kalang	13,0	9,0	8,0	1,00	1,37	0,18

Keterangan :*) Panjang DAS Besar meliputi Wilayah Dharmasraya dan Kabupaten Lainnya

Sumber : Balai PSDA Sumbar Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel-15A. Kondisi Sungai per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Sungai	Jumlah Panjang (km)	Panjang (km)		Debit (m ³ /dtk)		Lebar Permukaan (m)		Lebar Dasar (m)		Kedalaman (m)	
				Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pulau Punjung	15,00	959,00	747,00	3,00	1.645,14	0,08	124,00	3,00	109,00	2,00	3,64	0,30
2	IX Koto	21,00	275,00	49,00	4,00	18,62	0,06	37,00	3,00	33,00	2,00	1,70	0,30
3	Sitiung	9,00	54,00	12,00	2,00	2,03	0,02	10,00	2,50	8,00	2,00	0,65	0,20
4	Timpeh	12,00	139,40	45,00	1,00	7,55	0,05	53,00	3,50	51,00	2,50	1,70	0,35
5	Koto Baru	4,00	31,00	15,00	3,00	2,05	0,02	9,00	2,50	7,00	2,00	1,30	0,65
6	Padang Laweh	1,00	3,00	3,00	3,00	0,18	0,07	3,00	3,00	2,00	2,00	0,45	0,45
7	Koto Salak	1,00	4,00	4,00	4,00	0,31	0,05	7,00	7,00	5,00	5,00	1,40	0,31
5	Koto Besar	6,00	132,00	73,00	5,00	90,77	0,07	22,00	5,50	21,00	4,00	2,28	0,35
9	Asam Jujuhan	4,00	146,00	59,00	17,00	27,33	3,18	45,00	16,00	44,00	15,00	2,10	0,90
10	Sungai Rumbai	2,00	15,00	6,00	4,00	0,25	0,03	6,00	4,00	5,00	3,00	0,45	0,40
11	Tiumang	3,00	41,00	20,00	8,00	1,37	0,37	9,00	6,00	8,00	5,00	1,25	0,65
		78,00	1.799,40	747,00	1,00	1.645,14	0,02	124,00	2,50	109,00	2,00	3,64	0,20

Keterangan :*) Panjang DAS Besar meliputi Wilayah Dharmasraya dan Kabupaten Lainnya

Sumber : Balai PSDA Sumbar Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-16. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Jenis Inventarisasi	Nama	Luas (Ha)	Volume (m3)
(1)	(2)	(3)	(4)
Danau	-	-	-
Waduk	-	-	-
Situ	-	-	-
Embung	Sungai Lamak	0,53	13.125
	Bukit Kubu	0,02	300
	Calau Sawah Tabek	1,20	18.000
	Sungai Kamang/Ampang Kamang	1,50	45.000
	Bawah Koto	0,02	400
	Sijawi-jawi	0,80	12.000
	Rawang Tikuluk Tingga	0,13	1.875
	Ranah Tabek	0,24	2.880
	Kamang Mani	0,40	6.000
	Sungai Jernih	0,08	1.500
	Lubuk Tunggal	0,15	2.250
	Sungai Talang/Mudik Singgolan	0,15	1.800
	Lubuk Banio	0,00	45
	Sei, Ngalau	0,15	2.250
	Sei, Bungin	0,25	3.750
	Koto Ranah	0,36	3.600

Keterangan : (-) = tidak ada danau, situ ataupun waduk di Kabupaten Dharmasraya

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-16A. Jumlah Embung pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Embung
(1)	(2)	(3)
1	Sungai Rumbai	1,00
2	Koto Besar	2,00
3	Asam Jujuhan	0,00
4	Koto Baru	0,00
5	Koto Salak	0,00
6	Tiumang	0,00
7	Padang Laweh	0,00
8	Sitiung	2,00
9	Timpeh	3,00
10	Pulau Punjung	5,00
11	IX Koto	3,00
Total		16,00

Keterangan : 0 adalah data

Pada Tahun 2016 tidak terjadi perubahan jumlah embung,

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-16B. Lokasi Masing-Masing Embung di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Embung	Lokasi	Kecamatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Lamak	Lubuk Bulang/Gunung Selasih	Pulau Punjung
2	Bukit Kubu	Pulau Punjung/IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
3	Calau Sawah Tabek	Sei. Kambut/IV Koto Pulau Punjung	Pulau Punjung
4	Sungai Kamang/Ampang Kamang	Sei Kilang/Sei Dareh	Pulau Punjung
5	Bawah Koto	Koto Gadang/Sei Dareh	Pulau Punjung
6	Sijawi-jawi	Siguntur	Sitiung
7	Rawang Tikuluk Tinggi	Sitiung	Sitiung
8	Ranah Tabek	Trimulya	Timpeh
9	Kamang Mani	Tabek Penyebrangan	Timpeh
10	Sei, Ngalau	Timpeh	Timpeh
11	Sungai Jernih	Kodran/Kurnia Koto Salak	Sungai Rumbai
12	Lubuk Tunggal	Koto Baru/Silago	IX Koto
13	Sungai Talang/Mudik Singgolan	Ampang Kuranji/Silago	IX Koto
14	Lubuk Banio	Koto Baru/Silago	IX Koto
15	Sei, Bungin	Mayang Taurai/Koto Gadang	Koto Besar
16	Koto Ranah	Koto Ranah Nagari Koto Gadang	Koto Besar

Keterangan : Pada Tahun 2016 tidak terjadi perubahan jumlah embung
 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-16C. Luas Sawah Irigasi dari Masing-Masing Embung di Kabupaten Dharmasraya

Tahun : 2016

No	Nama Embung	Sawah Irigasi (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Sungai Lamak	94,00
2	Bukit Kubu	15,00
3	Calau Sawah Tabek	60,00
4	Sungai Kamang/Ampang Kamang	40,00
5	Bawah Koto	17,00
6	Sijawi-jawi	40,00
7	Rawang Tikuluk Tingga	15,00
8	Ranah Tabek	30,00
9	Kamang Mani	50,00
10	Sungai Jernih	0,00
11	Lubuk Tungal	18,00
12	Sungai Talang/Mudik Singgolan	25,00
13	Lubuk Banio	10,00
14	Sei, Ngalau	0,00
15	Sei, Bungin	8,60
16	Koto Ranah	5,50
Total		428,10

Keterangan : Pada Tahun 2016 tidak terjadi perubahan jumlah embung
 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-16D. Sumber Air Masing-Masing Embung di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Embung	Nama Sumber/Sungai
(1)	(2)	(3)
1	Sungai Lamak	Sei Lamak
2	Bukit Kubu	Mata Air
3	Calau Sawah Tabek	Mata Air
4	Sungai Kamang/Ampang Kamang	Sei Kamang
5	Bawah Koto	Mata Air
6	Sijawi-jawi	Sei Udang
7	Rawang Tikuluk Tingga	Sei London
8	Ranah Tabek	Mata Air
9	Kamang Mani	Sei Kamang Mani
10	Sungai Jernih	Sei. Jernih
11	Lubuk Tunggal	Sungai Labuai
12	Sungai Talang/Mudik Singgolan	Sei Talang
13	Lubuk Banio	Lubuk Banio
14	Sei, Ngalau	Sei Ngalau
15	Sei, Bungin	Sei Bungin
16	Koto Ranah	Mata Air

Keterangan : Sumber berasal dari mata air dan sungai

Pada Tahun 2016 tidak terjadi perubahan jumlah embung.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya. 2016



Tabel-16E. Panjang Saluran Primer dan Sekunder Masing-Masing Embung di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Embung	Saluran Pembawa (km)	
		Primer	Sekunder
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Lamak	1,68	2.837
2	Bukit Kubu	0,00	0,554
3	Calau Sawah Tabek	0,00	0,252
4	Ampang Kamang	0,33	0,969
5	Bawah Koto	0,00	0,986
6	Sijawi-jawi	0,00	1.512
7	Rawang Tikuluk Tinggi	0,00	0,355
8	Ranah Tabek	0,00	2.070
9	Kamang Mani	0,00	0,300
10	Sungai Jernih	0,00	2.130
11	Lubuk Tunggal	0,00	0,768
12	Sungai Talang	0,00	0,322
13	Lubuk Banio	0,00	0,428
14	Sei. Ngalau	0,00	1.114
15	Sei. Bungin	0,00	0,001
16	Koto Ranah	0,00	0,001

Keterangan : 0 adalah data

Pada Tahun 2016 tidak terjadi perubahan jumlah embung,

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya. 2016



Tabel-17. Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Nama Sungai	Nama Lokasi	Derajat Lintang	Menit Lintang	Detik Lintang	Derajat Bujur Timur	Menit Bujur Timur	Detik Bujur Timur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (oC)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	Fenol (ug/L)	Minyak dan Lemak (ug/L)	Detergen (ug/L)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(25)	(26)	(27)	(30)	(31)
Batanghari	Batu Bakawik	01	09	72,9	101	43	63,2	6 Juni 2016	26,3	9,44	165	6,28	0,09	0,22	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Batanghari	Sungai Dareh	01	09	37,4	101	50	51,8	6 Juni 2016	26,5	0,72	50	7,33	0,04	0,05	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Batanghari	Siguntur	01	09	53,4	101	55	62,4	6 Juni 2016	26,8	6,48	217	7,23	0,06	0,16	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Batanghari	Pulai	01	09	95,6	101	66	54,7	6 Juni 2016	26,9	2,88	177	6,90	0,02	0,3	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Batanghari	Teluk Lancang	01	10	34,7	101	83	50,7	6 Juni 2016	28,0	0,29	68	7,56	-	0,31	-	< 0,002	< 0,001
Momong	Muaro Momong	00	59	17,0	101	25	51,0	6 Juni 2016	25,3	0,43	63	6,11	0,02	0,09	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Momong	Hulu	00	59	14,0	101	16	56,0	6 Juni 2016	26,7	1,20	385	6,20	0,02	1,04	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Pangian	Sialang	00	54	49,0	101	25	14,0	6 Juni 2016	27,2	0,8	152	6,11	0,02	0,56	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Mimpi	Inlet PDAM	00	58	56,7	101	30	34,2	6 Juni 2016	27,8	1,28	3	6,40	-	0,1	-	-	-
Mimpi	Jembatan Sikabau	00	59	36,0	101	33	44,0	6 Juni 2016	27,3	3,04	102	6,32	-	0,34	-	-	-
Timpeh	Padang Laweh	01	00	03,1	101	44	24,5	6 Juni 2016	28,3	1,84	2	7,24	-	0,05	-	-	-
Piruko	Gunung Mesan	01	01	56,7	101	37	11,8	6 Juni 2016	28,3	2,8	91	6,83	0,02	0,45	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Kotobalai	RM Simpang Raya	01	05	15,9	101	41	22,7	6 Juni 2016	29,2	3,04	285	6,30	0,02	0,45	< 0,01	< 0,002	< 0,001
Siat	Jembatan Abai	01	09	50,4	101	38	59,6	6 Juni 2016	30,1	0,53	25	6,41	-	0,64	-	-	-
Siat	RM Suci	01	08	00,2	101	43	05,3	6 Juni 2016	29,5	0,8	134	6,70	-	0,15	-	-	-
Siat	Jembatan Pualu Mainan	01	11	56,6	101	48	18,3	6 Juni 2016	29,1	0,39	35	7,45	-	0,66	-	-	-
Betung	Jembatan Sungai Rumbai	01	10	58,2	101	43	18,3	6 Juni 2016	28,5	0,81	14	6,84	-	0,74	-	-	-
Sinabuhan	Abai Siat	01	10	05,6	101	39	19,0	6 Juni 2016	29,9	0,78	28	6,64	-	0,06	-	-	-



2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

Nama Sungai	Nama Lokasi	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)
(1)	(2)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(28)	(29)
Batanghari	Batu Bakawik	0,085	9,44	165	8,05	0,4	107	0,014	0,73	0,03	0,02	1,25	> 2400	> 2400
Batanghari	Sungai Dareh	0,085	0,72	50	2,99	0,4	117	0,01	0,79	0,02	0,02	1,22	> 2400	> 2400
Batanghari	Siguntur	0,1	6,48	217	7,5	0,6	13	0,07	2,42	< 0,014	0,03	1,46	> 2400	> 2400
Batanghari	Pulai	0,097	2,88	177	7,6	2,42	5	0,015	1,06	0,07	0,03	1,49	> 2400	> 2400
Batanghari	Teluk Lancang	0,097	0,29	68	6,8	3,62	7	-	-	-	0,03	-	> 2400	> 2400
Momong	Muaro Momong	0,064	0,43	63	8,05	1,81	15	0,006	1,08	0,03	0,02	0,53	> 2400	> 2400
Momong	Hulu	0,066	1,2	385	8,05	1,21	108	0,006	1,08	0,03	0,02	0,53	> 2400	> 2400
Pangian	Sialang	0,047	0,8	152	8,35	1,01	55	0,006	1,78	< 0,014	0,04	0,77	> 2400	> 2400
Mimpi	Inlet PDAM	0,029	1,28	3	6,64	1,21	17	-	-	-	-	-	-	-
Mimpi	Jembatan Sikabau	0,035	3,04	102	6,6	1,01	70	-	-	-	-	-	-	-
Timpeh	Padang Laweh	0,163	1,84	2	6,4	0,81	17	-	-	-	-	-	-	-
Piruko	Gunung Mesan	0,03	2,8	91	7	2,42	15	0,019	1,41	0,03	0,04	0,82	> 2400	> 2400
Kotobalai	RM Simpang Raya	0,023	3,04	285	6,2	1,41	73	0,032	1,49	0,2	0,08	1,15	> 2400	> 2400
Siat	Jembatan Abai	0,036	0,53	25	4,8	2,82	14	-	-	-	0,01	-	-	-
Siat	RM Suci	0,034	0,8	134	6,8	0,81	100	-	-	-	0,07	-	-	-
Siat	Jembatan Pualu Mainan	0,052	0,39	35	6,4	1,81	13	-	-	-	0,03	-	-	-
Betung	Jembatan Sungai Rumbai	0,021	0,81	14	6,2	4,03	2	-	-	-	0,02	-	-	-
Sinabuhan	Abai Siat	0,041	0,78	28	6,6	3,22	14	-	-	-	0,04	-	-	-

Keterangan : (-) Paramater tidak dilakukan analisa

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel-17A. Perbandingan Kualitas Air Sungai Batang Hari Parameter Fisika, Mikrobiologi dan Kimia Organik Dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Parameter Fisika dan Mikrobiologi	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai (mg/L)					Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Parameter Fisika								
1	Residu Terlarut	9,44	0,72	6,48	2,88	0,29	1000 mg/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter fisika (residu terlarut) masih memenuhi baku mutu
2	Residu Tersuspensi	165	50	217	177	68	50 mg/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter fisika (residu tersuspensi) tidak memenuhi baku mutu
Parameter Mikrobiologi								
1	Fecal Coliform	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400	1000 jml/100 ml	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter mikrobiologi (fecal coliform) tidak memenuhi baku mutu
2	Total Coliform	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400	5000 jml/100 ml	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter mikrobiologi (total coliform) masih memenuhi baku mutu
Parameter Kimia Organik								
1	Minyak dan Lemak	0,22	0,05	0,16	0,30	0,31	1000 ug/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter kimia organik (minyak dan lemak) masih memenuhi baku mutu



No	Jenis Parameter Fisika dan Mikrobiologi	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai (mg/L)					Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Detergen	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	-	200 ug/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter kimia organik (detergen) <u>masih</u> memenuhi baku mutu
3	Fenol	0,09	0,04	0,06	0,02	-	1 ug/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter kimia organik (fenol) <u>masih</u> memenuhi baku mutu

Keterangan : *)= Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas II

1 = Batang Hari (Batu Bakawik)

2 = Batang Hari (Sungai Dareh)

3 = Batang Hari (Siguntur)

4 = Batang Hari (Pulai)

5 = Batang Hari (Teluk Lancang)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-17B. Perbandingan Kualitas Air Sungai Batang Hari Parameter Kimia Anorganik Dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Parameter Kimia Anorganik	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai (mg/L)					Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BOD	0,40	0,40	0,60	2,42	3,62	3 mg/L	Tidak memenuhi baku mutu pada 1 (satu) titik pemantauan Teluk Lancang
2	COD	107	117	13	5	7	25 mg/L	Tidak memenuhi baku mutu pada 2 (dua) titik pemantauan, Batu Bakawuik dan Sungai Dareh
3	T-P	1,25	1,22	1,46	1,49	-	0,2 mg/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai pada 4 (empat) titik pemantauan untuk parameter T-P <u>tidak</u> memenuhi baku mutu
4	NO ₂	0,014	0,01	0,07	0,015	-	0,06 mg/L	Memenuhi baku mutu kecuali pada titik pemantauan Siguntur
5	NO ₃	0,73	0,79	2,42	1,06	-	10 mg/L	Memenuhi baku mutu
6	NH ₃ -N	0,03	0,02	< 0,014	0,07	-	(-)	Memenuhi baku mutu



No	Jenis Parameter Kimia Anorganik	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai (mg/L)					Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Khlorin Bebas	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03 mg/L	Tidak memenuhi baku mutu pada 3 (tiga) titik pemantauan, Siguntur, Pulai dan Teluk Lancang
8	Sianida	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,02 mg/L	Memenuhi baku mutu
9	H2S	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,002 mg/L	Memenuhi baku mutu

Keterangan : *) = Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas II

1 = Batang Hari (Batu Bakawik)

2 = Batang Hari (Sungai Dareh)

3 = Batang Hari (Siguntur)

4 = Batang Hari (Pulai)

5 = Batang Hari (Teluk Lancang)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. 2016



Tabel-17C. Perbandingan Analisis Statistik Kualitas Air Sungai Batang Hari Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Nama Lokasi	Baku Mutu*	2013			2014			2015			2016		
		Min.	Rata-Rata	Maks	Min.	Rata-Rata	Maks	Min.	Rata-Rata	Maks	Min.	Rata-Rata	Maks
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Parameter Fisika													
Temperatur (oC)	Deviasi 3	26,4	27,56	28,9	25,90	26,94	29,00	25,30	25,92	26,30	26,30	26,90	28,00
Residu Terlarut	1000	69	93,2	113	26,00	65,00	133,00	55,20	127,04	175,20	0,29	3,96	9,44
Residu Tersuspensi	50	7	23,2	34	17,00	125,60	198,00	162,00	252,00	341,00	50,00	135,40	217,00
Parameter Anorganik													
pH	6	6,47	6,84	7,43	5,86	6,00	6,10	6,10	6,23	6,61	6,28	7,06	7,56
DO	4	0,13	0,38	0,57	0,70	1,42	3,20	0,00	0,00	0,00	2,99	0,00	8,05
BOD	3	0,57	1,01	1,63	0,50	1,03	1,50	0,05	0,74	1,35	0,40	1,49	3,62
COD	25	6,33	11,07	18,67	29,00	35,60	41,00	59,00	66,20	78,00	5,00	49,80	117,00
NO2	0,06	0,00	0,0106	0,02	0,19	0,23	0,27	0,02	0,03	0,04	0,01	0,03	0,07
NO3	10	2,00	4,96	9,9	0,19	0,23	0,27	0,35	0,51	0,71	0,73	1,25	2,42
NH3	(-)	0,34	0,444	0,66	0,14	0,16	0,19	0,16	0,23	0,30	0,02	0,04	0,07
Klorin Bebas	0.03	<0,02	<0,02	<0,02	0,19	0,24	0,29	0,12	0,27	0,75	0,02	0,03	0,03
T-P	0.2	0,09	0,2372	0,567	0,05	0,13	0,26	0,14	0,31	0,38	1,22	1,36	1,49
H2S	0.002	<0,002	<0,002	<0,002	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00



2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

Nama Lokasi	Baku Mutu*	2013			2014			2015			2016		
		Min.	Rata-Rata	Maks	Min.	Rata-Rata	Maks	Min.	Rata-Rata	Maks	Min.	Rata-Rata	Maks
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Siani-da	0.02	<0,001	<0,001	<0,001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Parameter Organik													
Fenol	1,00	<0,0005	<0,0005	<0,0005	1,33	1,64	1,92	693,00	1.023,80	1.345,00	0,02	0,05	0,09
Minyak & Lemak	1000	0,06	0,1052	0,204	0,04	0,09	0,12	3,00	179,60	255,00	0,05	0,21	0,31
Detergen	200	0,03	0,0532	0,073	0,05	0,07	0,10	30,00	83,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Parameter Mikrobiologi													
Fecal coliform	1000	2.400	2.400	2.400	39,00	223,00	530,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Total coliform	5000	2.400	2.400	2.400	1.100	1.620	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Keterangan : *)= Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas II

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel-17D. Perbandingan Kualitas Air Sungai Batang Hari Terhadap Baku Mutu Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Nama Lokasi	Baku Mutu*	2013			2014			2015			2016		
		Rata-Rata	Melebihi BM	%									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Parameter Fisika													
Temperatur (oC)	Deviasi 3	27,56	Tidak Ada	Melebihi = 0%	26,94	Tidak Ada	Melebihi = 33,33%	25,92	Tidak Ada	Melebihi = 33,33%	26,90	Tidak Ada	Melebihi = 33,33%
Residu Terlarut	1000	93,20	Tidak Ada		65,00	Tidak Ada		127,04	Tidak Ada		3,96	Tidak Ada	
Residu Tersuspensi	50	23,20	Tidak Ada		125,60	Ada		252,00	Ada		135,40	Ada	
Parameter Anorganik													
pH	6	6,84	Tidak Ada	Melebihi = 18,18%	6,00	Tidak Ada	Melebihi = 45,45%	6,23	Tidak Ada	Melebihi = 27,27%	7,06	Tidak Ada	Melebihi = 27,27%
DO	4	0,38	Ada		1,42	Ada		0,000	Tidak Ada		0,000	Tidak Ada	
BOD	3	1,01	Tidak Ada		1,03	Tidak Ada		0,74	Tidak Ada		1,49	Tidak Ada	
COD	25	11,07	Tidak Ada		35,60	Ada		66,20	Ada		49,80	Ada	
NO2	0,06	0,011	Tidak Ada		0,226	Ada		0,029	Tidak Ada		0,03	Tidak Ada	
NO3	10	4,960	Tidak Ada		0,226	Tidak Ada		0,506	Tidak Ada		1,25	Tidak Ada	
NH3	(-)	0,444	Tidak Ada		0,159	Tidak Ada		0,234	Tidak Ada		0,04	Tidak Ada	
Klorin Bebas	0,03	<0,02	Tidak Ada		0,238	Ada		0,268	Ada		0,03	Ada	
T-P	0,2	0,237	Ada		0,130	Tidak Ada		0,305	Tidak Ada		1,36	Ada	
H2S	0,002	<0,002	Tidak Ada		0,004	Ada		0,012	Ada		0,00	Tidak Ada	
Siani-da	0,02	<0,001	Tidak Ada	0,000	Tidak Ada	0,004	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada				



2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

Nama Lokasi	Baku Mutu*	2013			2014			2015			2016		
		Rata-Rata	Melebihi BM	%	Rata-Rata	Melebihi BM	%	Rata-Rata	Melebihi BM	%	Rata-Rata	Melebihi BM	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Parameter Organik													
Fenol	1	<0,0005	Tidak Ada	Melebihi = 0%	1,637	Ada	Melebihi = 33,33%	1023,8	Ada	Melebihi = 33,33%	0,05	Tidak Ada	Melebihi = 0%
Minyak & Lemak	1000	0,105	Tidak Ada		0,089	Tidak Ada		179,60	Tidak Ada		0,21	Tidak Ada	
Detergen	200	0,053	Tidak Ada		0,067	Tidak Ada		83,00	Tidak Ada		0,00	Tidak Ada	
Parameter Mikrobiologi													
Fecal coliform	1000	2400	Ada	Melebihi = 50%	222,8	Tidak Ada	Melebihi = 0%	2400,0	Ada	Melebihi = 50%	2400,0	Ada	Melebihi = 50%
Total coliform	5000	2400	Tidak Ada		1620,0	Tidak Ada		2400,0	Tidak Ada		2400,0	Tidak Ada	

Keterangan: *)= Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas II

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel-17E. Indeks Pencemaran Air (Sungai Batang Hari) di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Lokasi	Konsentrasi Parameter							Indeks	Status Mutu Air
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	T-P (mg/L)	Fecal Coliform (jmlh/100 ml)	Total Coliform (jmlh/100 ml)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Batang Hari (Batu Bakawik)	165	8,05	0,4	107	1,25	> 2400	> 2400	3,88	cemar ringan
2	Batang Hari (Sungai Dareh)	50	2,99	0,4	117	1,22	> 2400	> 2400	3,76	cemar ringan
3	Batang Hari (Siguntur)	217	7,5	0,6	13	1,46	> 2400	> 2400	4,00	cemar ringan
4	Batang Hari (Pulai)	177	7,6	2,42	5	1,49	> 2400	> 2400	4,03	cemar ringan
5	Batang Hari (Teluk Lancang)	68	6,8	3,62	7	-	> 2400	> 2400	2,16	cemar ringan

Keterangan : Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Kep MENLH Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-17F. Kualitas Air Sungai Batang Hari Untuk Parameter Logam Berat di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Lokasi	Parameter						
		Kadmium (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Seng (mg/L)	Merkuri (Hg)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Batang Hari (Batu Bakawik)	-	0,010	1,870	<0,01	0,055	0,290	2,82
2	Batang Hari (Sungai Dareh)	-	0,035	1,240	<0,01	0,176	0,080	1,78
3	Batang Hari (Siguntur)	-	0,051	0,460	<0,01	0,055	0,090	1,73
4	Batang Hari (Pulai)	-	0,072	<0,03	<0,01	<0,026	0,210	2,10
5	Batang Hari (Teluk Lancang)	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : (-) = Paramater tidak dilakukan analisa

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-17G. Perbandingan Kualitas Air Anak Sungai DAS Batang Hari Parameter Kimia Anorganik Dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Parameter Kimia Anorganik	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai (mg/L)					Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BOD	1,81	1,21	1,01	2,42	1,41	3 mg/L	Memenuhi baku mutu
2	COD	15	108	55	15	73	25 mg/L	Tidak memenuhi baku mutu pada 3 (dua) titik pemantauan, Hulu Batang Momong, Hulu Pangian dan Sungai Koto Balai
3	T-P	0,53	0,53	0,77	0,82	1,5	0,2 mg/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter T-P tidak memenuhi baku mutu
4	NO ₂	0,006	0,006	0,006	0,019	0,032	0,06 mg/L	Memenuhi baku mutu
5	NO ₃	1,08	1,08	1,78	1,41	1,49	10 mg/L	Memenuhi baku mutu
6	NH ₃ -N	0,03	0,03	< 0,014	0,03	0,2	(-)	Memenuhi baku mutu
7	Khlorin Bebas	0,02	0,02	0,04	0,04	0,08	0,03 mg/L	Tidak memenuhi baku mutu pada 3 (tiga) titik pemantauan, Hulu Pangian, Batang Piruko dan Sungai Koto Balai
8	Sianida	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,02 mg/L	Memenuhi baku mutu
9	H ₂ S	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	< 0,001	0,002 mg/L	Memenuhi baku mutu

Keterangan: *)= Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas II

1 = Sungai Momong (Muaro)

2 = Sungai Momong (Hulu)

3 = Hulu Pangian

4 = Batang Piruko (Gunung Medan)

5 = Sungai Koto Balai (Simpang Raya Koto Baru)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel-17H. Perbandingan Kualitas Air Anak Sungai DAS Batang Hari Parameter Fisika, Mikrobiologi dan Kimia Organik Dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Parameter Fisika dan Mikrobiologi	Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai (mg/L)					Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Parameter Fisika								
1	Residu Terlarut	0,43	1,2	0,8	2,8	3,04	1000 mg/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter fisika (residu terlarut) masih memenuhi baku mutu
2	Residu Tersuspensi	63	385	152	91	285	50 mg/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter fisika (residu tersuspensi) tidak memenuhi baku mutu
Parameter Mikrobiologi								
1	Fecal Coliform	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400	1000 jml/100 ml	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter mikrobiologi (fecal coliform) tidak memenuhi baku mutu
2	Total Coliform	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400	> 2400	5000 jml/100 ml	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter mikrobiologi (total coliform) masih memenuhi baku mutu
Parameter Kimia Organik								



1	Minyak dan Lemak	0,09	1,04	0,56	0,45	0,45	1000 ug/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter kimia organik (minyak dan lemak) masih memenuhi baku mutu
2	Detergen	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	200 ug/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter kimia organik (detergen) masih memenuhi baku mutu
3	Fenol	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	1 ug/L	Untuk 5 (lima) titik pemantauan, kualitas air sungai untuk parameter kimia organik (fenol) masih memenuhi baku mutu

Keterangan: *)= Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas II

1 = Sungai Momong (Muaro)

2 = Sungai Momong (Hulu)

3 = Hulu Pangian

4 = Batang Piruko (Gunung Medan)

5 = Sungai Koto Balai (Simpang Raya Koto Baru)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-17I. Indeks Pencemaran Air (Anak Sungai DAS Batang Hari) di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Lokasi	Konsentrasi Parameter							Indeks	Status Mutu Air
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	T-P (mg/L)	Fecal Coliform (jmlh/100 ml)	Total Coliform (jmlh/100 ml)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sungai Momong (Muaro)	63,00	8,05	1,81	15,00	0,53	> 2400	> 2400	2.39	cemar ringan
2	Sungai Momong (Hulu)	63,00	8,05	1,81	15,00	0,53	> 2400	> 2400	4.18	cemar ringan
3	Hulu Pangian	152,00	8,35	1,01	55,00	0,77	> 2400	> 2400	3.10	cemar ringan
4	Batang Piruko (Gunung Medan)	91,00	7,00	2,42	15,00	0,82	> 2400	> 2400	3,09	cemar ringan
5	Sungai Koto Balai (Simpang Raya Koto Baru)	285,00	6,20	1,41	73,00	1,15	> 2400	> 2400	3,79	cemar ringan
6	Batang Mimpi (Inlet PDAM)	3,00	6.64	1,21	17,00	0,00	0,00	0,00	0,50	memenuhi BM
7	Batang Mimpi (Sikabau)	102,00	6,60	1,01	70,00	0,00	0,00	0,00	2,37	cemar ringan
8	Batang Timpeh (Padang Laweh)	2,00	6,40	0,81	17,00	0,00	0,00	0,00	0,49	memenuhi BM
9	Batang Siat (Abai Siat)	25,00	4,80	2,82	14,00	0,00	0,00	0,00	0,70	memenuhi BM
10	Batang Siat (RM Suci)	134,00	6,80	0,81	100,00	0,00	0,00	0,00	2,93	cemar ringan
11	Batang Siat (Pulau Mainan)	35,00	6,40	1,81	13,00	0,00	0,00	0,00	0,53	memenuhi BM
12	Sungai Betung (Sungai Rumbai)	14,00	6,20	4,03	2,00	0,00	0,00	0,00	1,18	cemar ringan



No	Lokasi	Konsentrasi Parameter							Indeks	Status Mutu Air
		TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	T-P (mg/L)	Fecal Coliform (jmlh/100 ml)	Total Coliform (jmlh/100 ml)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	Batang Sinabuhan (Abai Siat)	28,00	6,60	3,22	14,00	0,00	0,00	0,00	0,85	memenuhi BM

Keterangan: Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Kep MENLH Nomor 115 tahun 2003
0 adalah data

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



2016

*Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD***Tabel 18. Kualitas Air Danau/Situ/Embung di Kabupaten Dharmasraya
Tahun Data : 2016**

Nama	Nama Lokasi	Derajat Lintang	Menit Lintang	Detik Lintang	Derajat Bujur Timur	Menit Bujur Timur	Detik Bujur Timur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (oC)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Embung Ampang Kamang	Embung Ampang Kamang Hulu	01	09	67,2	101	49	32,8	1 November 2016	31,00	6,80	ttd	7,08	-	-
Embung Ampang Kamang	Embung Ampang Kamang Hilir	01	09	69,8	101	49	43,8	1 November 2016	31,00	5,52	ttd	6,65	-	-
Embung Kamang Mani	Embung Kamang Mani Hulu	0	0	0	0	0	0	1 November 2016	25,90	6,32	ttd	8,50	-	-
Embung Kamang Mani	Embung Kamang Mani Hilir	0	0	0	0	0	0	1 November 2016	27,50	6,48	ttd	7,22	-	-



*Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD*

Nama	Nama Lokasi	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (ug/L)	Minyak dan Lemak (ug/L)	Detergen (ug/L)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Embung Ampang Kamang	Embung Ampang Kamang Hulu	0,03	6,80	ttd	3,58	1,61	27,00	0,01	0,08	< 0,014	< 0,002	< 0,013	ttd	0,13	< 0,01	0,00	0,02
Embung Ampang Kamang	Embung Ampang Kamang Hilir	0,03	5,52	ttd	3,83	0,60	12,00	0,01	0,71	< 0,014	< 0,002	< 0,013	ttd	0,25	< 0,01	< 0,002	0,02
Embung Kamang Mani	Embung Kamang Mani Hulu	0,05	6,32	ttd	3,71	2,82	24,00	0,01	0,66	< 0,014	< 0,002	< 0,013	ttd	0,09	< 0,01	< 0,002	0,01
Embung Kamang Mani	Embung Kamang Mani Hilir	0,05	6,48	ttd	2,54	2,42	31,00	0,02	0,92	< 0,014	< 0,002	< 0,013	ttd	0,14	< 0,01	< 0,002	0,02

Keterangan: Pengambilan sampel air embung dilakukan pada Embung Ampang Kamang di Kecamatan Pulau Punjung dan Embung Kamang Mani di Kecamatan Timpeh, dengan 2 (dua) titik pengambilan sampel (hulu dan hilir)

ttd = tidak terdeteksi

'(-) = tidak dilakukan analisa

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. 2016





Tabel-18A. Perbandingan Kualitas Air Embung Parameter Fisika Dengan Baku Mutu Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Parameter Fisika	Hasil Pengujian Kualitas Air Embung (mg/L)				Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Residu Terlarut	6,80	5,52	6,32	6,48	1000 mg/L	Pada 4 (empat) titik pemantauan, kualitas air embung untuk parameter fisika (residu terlarut) masih memenuhi baku mutu
2	Residu Tersuspensi	-	-	-	-	50 mg/L	Tidak ada data

Keterangan: Pengelompokan parameter berdasarkan PP 82 Tahun 2001, untuk Kriteria Mutu Air Kelas II

1 = Embung Ampang Kamang Hulu

2 = Embung Ampang Kamang Hilir

3 = Embung Kamang Mani Hulu

4 = Embung Kamang Mani Hilir

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. 2016



Tabel-18B. Perbandingan Kualitas Air Embung Parameter Kimia Anorganik Dengan Baku Mutu Di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Parameter Kimia Anorganik	Hasil Pengujian Kualitas Air Embung (mg/L)				Baku Mutu*	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	pH	7,08	6,65	8,50	7,22	6 - 9	Memenuhi Baku Mutu
2	DO	3,58	3,83	3,71	2,54	4 ,00mg/L	Memenuhi Baku Mutu
3	BOD	1,61	0,60	2,82	2,42	3,00 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
4	COD	27,00	12,00	24,00	31,00	25,00 mg/L	Tidak Memenuhi Baku Mutu
5	NO ₂	0,014	0,014	0,007	0,018	0,06 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
6	NO ₃	0,0803	0,706	0,658	0,92	10,00 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
7	NH ₃	< 0,014	< 0,014	< 0,014	< 0,014	(-)	Memenuhi Baku Mutu
8	Cl ₂ Be-bas	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,03 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
9	T-P	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	0,20 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
10	Siani-da	0,004	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,02 mg/L	Memenuhi Baku Mutu
11	H ₂ S	0,019	0,017	0,011	0,016	0,002 mg/L	Tidak Memenuhi Baku Mutu

Keterangan : Pengelompokan parameter berdasarkan PP 82 Tahun 2001, untuk Kriteria Mutu Air Kelas II

1 = Embung Ampang Kamang Hulu

2 = Embung Ampang Kamang Hilir

3 = Embung Kamang Mani Hulu

4 = Embung Kamang Mani Hilir

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. 2016



Tabel-18C. Perbandingan Kualitas Air Embung Parameter Kimia Organik Dengan Baku Mutu Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter	Hasil Pengujian Kualitas Air Embung (ug/L)				Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Fenol	ttd	ttd	ttd	ttd	1 ug/L	-
2	Minyak dan Lemak	0,127	0,248	0,086	0,144	1000 ug/L	Memenuhi Baku Mutu
3	Detergen	0,01	0,01	0,01	0,01	200 ug/L	Memenuhi Baku Mutu

Keterangan : Pengelompokan parameter berdasarkan PP 82 Tahun 2001, untuk Kriteria Mutu Air Kelas II

1 = Embung Ampang Kamang Hulu

2 = Embung Ampang Kamang Hilir

3 = Embung Kamang Mani Hulu

4 = Embung Kamang Mani Hilir

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. 2016



Tabel-18D. Perbandingan Kualitas Air Embung Parameter Mikrobiologi Dengan Baku Mutu Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter	Hasil Pengujian Kualitas Air Embung (ug/L)				Baku Mutu	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
		1	2	3	4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Fecal Coliform	-	-	-	-	1000 Jml/100 ml	Tidak ada
2	Total Colifrom	-	-	-	-	5000 Jml/100 ml	Tidak ada

Keterangan : Pengelompokan parameter berdasarkan PP 82 Tahun 2001, untuk Kriteria Mutu Air Kelas II

1 = Embung Ampang Kamang Hulu

2 = Embung Ampang Kamang Hilir

3 = Embung Kamang Mani Hulu

4 = Embung Kamang Mani Hilir

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-18E. Perbandingan Parameter Air Embung Ampang Kamang Yang Melebihi/Tidak Memenuhi Baku Mutu Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Parameter	Parameter Yang Melebihi Baku Mutu								
		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		
		Ampang Kamang Hulu	Ampang Kamang Hilir	Ampang Kamang Hulu	Ampang Kamang Hilir	Ampang Kamang Hulu	Ampang Kamang Hilir	Ampang Kamang Hulu	Ampang Kamang Hilir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Fisika	Ada, parameter: Residu Tersuspensi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Kimia Anorganik	Ada, parameter: DO, COD	Ada, parameter: DO, COD	Ada, parameter: Khlorin, H ₂ S, DO, pH	Ada, parameter: Khlorin, H ₂ S, DO, pH	Ada, parameter: Khlorin Bebas, COD, H ₂ S	Ada, parameter: Khlorin Bebas, COD	Ada, parameter: COD, H ₂ S	Ada, parameter: COD	
3	Kimia Organik	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada, parameter: Fenol dan Detergen	Ada, parameter: Fenol dan Detergen	Tidak ada	Tidak ada	

Keterangan : Pengelompokan parameter berdasarkan PP 82 Tahun 2001, untuk Kriteria Mutu Air Kelas II
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-18F. Perbandingan Analisis Statistik Kualitas Air Embung Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Parameter	Ampang Kamang			Kamang Mani		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Parameter Fisika						
Temperatur (oC)	31,00	31,00	31,00	25,90	26,70	27,50
Residu Ter-larut (mg/L)	5,52	6,16	6,80	6,32	6,40	6,48
Residu Tersuspensi (mg/L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parameter Anorganik						
pH	6,65	6,87	7,08	7,22	7,86	8,50
DO (mg/L)	3,58	3,71	3,83	2,54	3,13	3,71
BOD (mg/L)	0,60	1,11	1,61	2,42	2,62	2,82
COD (mg/L)	12,00	19,50	27,00	24,00	27,50	31,00
NO ₂ (mg/L)	0,014	0,014	0,014	0,007	0,013	0,018
NO ₃ (mg/L)	0,080	0,393	0,706	0,658	0,789	0,920
NH ₃ (mg/L)	0,000	< 0,014	0,000	0,000	< 0,014	0,000
Klorin Bebas (mg/L)	0,000	< 0,002	0,000	0,000	< 0,002	0,000
T-P (mg/L)	0,000	< 0,013	0,000	0,000	< 0,013	0,000
Siani-da (mg/L)	0,000	0,004	0,004	0,000	< 0,002	0,000
H ₂ S (mg/L)	0,017	0,018	0,019	0,011	0,0135	0,016
Parameter Organik						



Parameter	Ampang Kamang			Kamang Mani		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Fenol (ug/L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minyak dan Lemak (ug/L)	0,127	0,1875	0,248	0,086	0,115	0,144
Detergen (ug/L)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Parameter Mikrobiologi						
Fecal coliform (jmlh/100 ml)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total coliform (jmlh/100 ml)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Keterangan: Pengelompokan parameter berdasarkan PP 82 Tahun 2001, untuk Kriteria Mutu Air Kelas II

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel – 18G. Perbandingan Kandungan BOD, COD dan Minyak Lemak Air Embun di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Lokasi	BOD		COD		Minyak Lemak	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Embung Ampang Kamang Hulu	0,6	1,61	34	27	0,4	0,13
2	Embung Ampang Kamang Hilir	0,6	0,60	39	12	0	0,25

Keterangan: Pengambilan sampel air embung dilakukandi Kecamatan Pulau Punjung dengan 2 (dua) titik pengambilan sampel (hulu dan hilir)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-19. Kualitas Air Sumur di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Nama Lokasi	Derajat Lintang	Menit Lintang	Detik Lintang	Derajat Bujur Timur	Menit Bujur Timur	Detik Bujur Timur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (oC)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	Detergen (ug/L)	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pulau Punjung	00	56	57,2	101	29	44,6	14 November 2016	29,10	6,00	18,00	7,59	0,03	18,00	0,01	2,400	2,400
Sungai Dareh	-	-	-	-	-	-	14 November 2016	29,60	14,90	27,00	6,92	0,21	-	<0,010	-	-
Gunung Medan	00	00	95,6	101	35	49,3	14 November 2016	26,30	18,40	20,00	6,91	2,02	20,00	0,01	2,400	2,400
Sungai Rumbai	00	12	50,5	101	43	84,4	14 November 2016	25,20	4,16	17,00	6,40	0,01	17,00	<0,010	2,400	2,400

Nama Lokasi	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	DO (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (ug/L)	TSS (mg/L)	Minyak dan Lemak (ug/L)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pulau Punjung	0,20	0,81	<0,006	0,22	-	<0,014	<0,02	<0,013	<0,0005	6,00	0,00	<0,002	<0,001
Sungai Dareh	0,70	0,81	<0,006	6,12	-	0,035	0,02	0,026	<0,0005	-	0,08	0,004	0,034
Gunung Medan	1,10	1,81	<0,006	3,10	-	<0,014	<0,02	0,09	<0,0005	1,81	0,00	<0,002	<0,001
Sungai Rumbai	0,40	2,92	<0,006	26,75	-	<0,014	<0,02	<0,013	<0,0005	4,16	0,00	<0,002	0,056





Keterangan: ttd = Tidak Terdeteksi

(-) = tidak ada data (tidak dilakukan analisa)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-19A. Perbandingan Kualitas Air Sumur Pulau Punjung Dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter Uji	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisis	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Residu Terlarut	mg/L	1.000,00	6,00	Memenuhi Baku Mutu
2	Residu Tersuspensi	mg/L	50,00	18,00	Memenuhi Baku Mutu
3	pH	-	6-9	7,59	Memenuhi Baku Mutu
4	TDS	mg/L	1.000,00	18,00	Memenuhi Baku Mutu
5	TSS	mg/L	50,00	6,00	Memenuhi Baku Mutu
6	DO	mg/L	4,00	-	-
7	BOD	mg/L	2,00	0,20	Memenuhi Baku Mutu
8	COD	mg/L	10,00	0,81	Memenuhi Baku Mutu
9	NO ₂	mg/L	0,06	<0,006	Memenuhi Baku Mutu
10	NO ₃	mg/L	10,00	0,216	Memenuhi Baku Mutu
11	NH ₃	mg/L	0,50	<0,014	Memenuhi Baku Mutu
12	Cl ₂ Bebas	mg/L	0,03	<0,02	Memenuhi Baku Mutu
13	T-P	mg/L	0,20	<0,013	Memenuhi Baku Mutu
14	Minyak & Lemak	µg/L	1.000,00	0,002	Memenuhi Baku Mutu
15	Fecal coliform	jml/100 ml	100,00	2.400,00	Tidak Memenuhi Baku Mutu
16	Total coliform	jml/100 ml	1.000,00	2.400,00	Tidak Memenuhi Baku Mutu
17	Siani-da	mg/L	0,02	<0,002	Memenuhi Baku Mutu
18	H ₂ S	mg/L	0,002	<0,001	Memenuhi Baku Mutu

Keterangan: Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas I

(-) = tidak ada data

ttd = tidak terdeteksi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-19B. Perbandingan Kualitas Air Sumur Sungai Dareh Dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter Uji	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisis	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Residu Terlarut	mg/L	1.000,00	14,90	Memenuhi Baku Mutu
2	Residu Tersuspensi	mg/L	50,00	27,00	Memenuhi Baku Mutu
3	pH	-	6-9	6,92	Memenuhi Baku Mutu
4	TDS	mg/L	1.000,00	-	-
5	TSS	mg/L	50,00	-	-
6	DO	mg/L	4,00	-	-
7	BOD	mg/L	2,00	0,70	Memenuhi Baku Mutu
8	COD	mg/L	10,00	0,81	Memenuhi Baku Mutu
9	NO ₂	mg/L	0,06	<0,006	Memenuhi Baku Mutu
10	NO ₃	mg/L	10,00	6,116	Memenuhi Baku Mutu
11	NH ₃	mg/L	0,50	0,035	Memenuhi Baku Mutu
12	Cl ₂ Bebas	mg/L	0,03	0,02	Memenuhi Baku Mutu
13	T-P	mg/L	0,20	0,03	Memenuhi Baku Mutu
14	Minyak & Lemak	µg/L	1.000,00	0,08	Memenuhi Baku Mutu
15	Fecal coliform	jml/100 ml	100,00	-	-
16	Total coliform	jml/100 ml	1.000,00	-	-
17	Siani-da	mg/L	0,02	0,004	Memenuhi Baku Mutu
18	H ₂ S	mg/L	0,002	0,034	Tidak Memenuhi Baku Mutu

Keterangan: Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas I

(-) = tidak ada data

ttd = tidak terdeteksi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel-19C. Perbandingan Kualitas Air Sumur Gunung Medan Dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter Uji	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisis	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Residu Terlarut	mg/L	1.000,00	18,40	Memenuhi Baku Mutu
2	Residu Tersuspensi	mg/L	50,00	20,00	Memenuhi Baku Mutu
3	pH	-	6-9	6,91	Memenuhi Baku Mutu
4	TDS	mg/L	1.000,00	20,00	Memenuhi Baku Mutu
5	TSS	mg/L	50,00	1,81	Memenuhi Baku Mutu
6	DO	mg/L	4,00	-	-
7	BOD	mg/L	2,00	1,10	Memenuhi Baku Mutu
8	COD	mg/L	10,00	1,81	Memenuhi Baku Mutu
9	NO2	mg/L	0,06	<0,006	Memenuhi Baku Mutu
10	NO3	mg/L	10,00	3,096	Memenuhi Baku Mutu
11	NH3	mg/L	0,50	<0,014	Memenuhi Baku Mutu
12	Cl2 Bebas	mg/L	0,03	<0,02	Memenuhi Baku Mutu
13	T-P	mg/L	0,20	0,09	Memenuhi Baku Mutu
14	Minyak & Lemak	µg/L	1.000,00	0,00	Memenuhi Baku Mutu
15	Fecal coliform	jml/100 ml	100,00	2.400,00	Tidak Memenuhi Baku Mutu
16	Total coliform	jml/100 ml	1.000,00	2.400,00	Tidak Memenuhi Baku Mutu
17	Siani-da	mg/L	0.02	<0,002	Memenuhi Baku Mutu
18	H2S	mg/L	0,002	<0,001	Memenuhi Baku Mutu

Keterangan: Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas I

(-) = tidak ada data

ttd = tidak terdeteksi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-19D. Perbandingan Kualitas Air Sumur Sungai Rumbai Dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter Uji	Satuan	Baku Mutu	Hasil Analisis	Memenuhi Baku Mutu/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Residu Terlarut	mg/L	1.000,00	4,16	Memenuhi Baku Mutu
2	Residu Tersuspensi	mg/L	50,00	17,00	Memenuhi Baku Mutu
3	pH	-	6-9	6,40	Memenuhi Baku Mutu
4	TDS	mg/L	1.000,00	17,00	Memenuhi Baku Mutu
5	TSS	mg/L	50,00	4,16	Memenuhi Baku Mutu
6	DO	mg/L	4,00	-	-
7	BOD	mg/L	2,00	0,40	Memenuhi Baku Mutu
8	COD	mg/L	10,00	2,92	Memenuhi Baku Mutu
9	NO ₂	mg/L	0,06	<0,006	Memenuhi Baku Mutu
10	NO ₃	mg/L	10,00	26,750	Tidak Memenuhi Baku Mutu
11	NH ₃	mg/L	0,50	<0,014	Memenuhi Baku Mutu
12	Cl ₂ Bebas	mg/L	0,03	<0,02	Memenuhi Baku Mutu
13	T-P	mg/L	0,20	<0,013	Memenuhi Baku Mutu
14	Minyak & Lemak	µg/L	1.000,00	-	-
15	Fecal coliform	jml/100 ml	100,00	2.400,00	Tidak Memenuhi Baku Mutu
16	Total coliform	jml/100 ml	1.000,00	2.400,00	Tidak Memenuhi Baku Mutu
17	Siani-da	mg/L	0,02	<0,002	Memenuhi Baku Mutu
18	H ₂ S	mg/L	0,002	0,056	Tidak Memenuhi Baku Mutu

Keterangan: Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas I

(-) = tidak ada data

ttd = tidak terdeteksi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-19E. Parameter Kualitas Air Sumur Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Lokasi Sampling	Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu	
(1)	(2)	(3)	
1	Pulau Punjung	Fisika	tidak ada
		Kimia AnOrganik	tidak ada
		Kimia Organik	tidak ada
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total Coliform
2	Sungai Dareh	Fisika	tidak ada
		Kimia AnOrganik	H2S
		Kimia Organik	tidak ada
		Mikrobiologi	tidak ada data
3	Gunung Medan	Fisika	tidak ada
		Kimia AnOrganik	tidak ada
		Kimia Organik	tidak ada
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total Coliform
4	Sungai Rumbai	Fisika	tidak ada
		Kimia AnOrganik	NO3
		Kimia Organik	tidak ada
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total Coliform

Keterangan: Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas I
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-19F. Parameter Kualitas Air Sumur Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya
Tabel : 2016**

No	Lokasi Sampling	Parameter	Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu		Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu		Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu		Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu	
			2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pulau Punjung	Fisika	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00
		Kimia Anorganik	DO, BOD, T-P	27,27	pH, DO, COD,NO2, NH3, Khlorin Bebas, H2S	63,64	pH, DO, BOD, COD	33,33	Tidak Ada	0,00
		Kimia Organik	-	-	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada, (detergen dan fenol tidak ada data)	0,00	Tidak Ada	0,00
		Mikrobiologi	Tidak Ada	0,00	Fecal coliform	50,00	Fecal coliform, Total Coliform	100,00	Fecal coliform, Total Coliform	100,00
2	Sungai Dareh	Fisika	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00
		Kimia Anorganik	pH	9,09	pH, DO, COD, NO2, T-P	45,45	pH, DO, BOD, COD, H2S	41,67	H2S	8,33
		Kimia Organik	-	-	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada, (detergen dan fenol tidak ada data)	0,00	Tidak Ada	0,00
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total coliform	100,00	Tidak Ada	0,00	Fecal coliform, Total Coliform	100,00	Tidak Ada	100,00
3	Gunung	Fisika	Residu	33,33	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00



No	Lokasi Sampling	Parameter	Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu		Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu		Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu		Parameter Yang Tidak Memenuhi Baku Mutu	
			2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Medan		Tersuspensi							
		Kimia Anorganik	BOD, Klorin Bebas, T-P	27,27	DO, COD, H2S	27,27	pH, DO, BOD, COD, H2S	41,67	Tidak Ada	0,00
		Kimia Organik	-	-	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada, (detergen dan fenol tidak ada data)	0,00	Tidak Ada	0,00
		Mikrobiologi	Fecal coliform, Total coliform	100,00	Tidak Ada	0,00	Fecal coliform, Total Coliform	100,00	Fecal coliform, Total Coliform	100,00
4	Sungai Rumbai	Fisika	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00
		Kimia Anorganik	pH, NO3, T-P	27,27	DO, COD, NH3	27,27	pH, DO, BOD, COD, H2S	41,67	NO3	8,33
		Kimia Organik	-	-	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada, (detergen dan fenol tidak ada data)	0,00	Tidak Ada	0,00
		Mikrobiologi	Tidak Ada	0,00	Tidak Ada	0,00	Fecal coliform, Total Coliform	100,00	Fecal coliform, Total Coliform	100,00

Keterangan : Baku Mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 Kualitas Air Kelas I

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel – 19G. Perbandingan Kandungan BOD dan COD Tahun 2015 dan 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016

No	Kecamatan	BOD		COD	
		2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pulau Punjung	2,05	0,20	27,00	0,81
2	Sungai Dareh	2,55	0,70	19,00	0,81
3	Gunung Medan	2,65	1,10	22,00	1,81
4	Sungai Rumbai	2,10	0,40	19,00	2,92

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2015



Tabel-20. Kualitas Air Laut di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Nama Lokasi	Derajat Lintang	Menit Lintang	Detik Lintang	Derajat Bujur Timur	Menit Bujur Timur	Detik Bujur Timur	Waktu Sampling (tg/bln/thn)	Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/L)	Sampah	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nama Lokasi	Lapisan Minyak	Temperatur (oC)	pH	Salinitas	DO (mg/L)	BOD5 (mg/L)	COD (mg/L)	Amonia Total (mg/L)	NO2-N (mg/l)	NO3-N (mg/l)	PO4-P (mg/l)	Sianida (N) (mg/l)	Sulfida (H2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak buni (mg/l)	Fenol (mg/l)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: (-)= Tidak Ada Komponen Laut di Kabupaten Dharmasraya

Sumber : (-)= tidak ada



Tabel-21. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Durian Simpai Silago	367,0	267,0	320,0	364,0	286,0	75,0	103,0	61,0	155,0	60,0	585,0	20,0
2	Bendungan Batanghari	342,6	250,4	283,7	441,0	425,6	106,9	130,7	33,6	187,1	48,5	466,9	49,0
3	Komplek Sedasi	442,5	151,0	178,5	303,0	282,0	66,5	230,0	37,0	124,5	29,5	497,0	27,0
4	Padang Sidondang	-	52,0	305,0	332,0	308,0	113,0	414,0	151,0	107,0	179,0	439,0	79,0
5	Koto Baru Piruko	378,5	121,0	327,0	424,2	288,7	67,6	-	-	-	-	-	79,0

Keterangan: (-): tidak ada data

Stasiun Curah Hujan berjumlah 5 stasiun

Total adalah nilai curah hujan rata-rata bulanan Kabupaten Dharmasraya

Satuan Curah Hujan Rata-Rata adalah= mm

Sumber : Balai PSDA Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-21A. Tipe Iklim Berdasarkan Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Curah Hujan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Rata-Rata Curah Hujan	382,65	168,28	282,84	372,84	318,06	85,80	219,43	70,65	143,40	79,25	496,98	50,80
2	Tipe Iklim	Basah	Basah	Basah	Basah	Basah	Lembab	Basah	Lembab	Basah	Lembab	Basah	Kering

Keterangan: Satuan Curah Hujan Rata-Rata adalah= mm

Sumber : Balai PSDA Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-21B. Perbandingan Tipe Iklim Berdasarkan Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Tahun 2012 Sampai Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Tahun	Nilai Q	Tipe Iklim	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	22,22	B	Basah
2	2013	10,00	A	Sangat Basah
3	2014	83,33	D	Sedang
4	2015	50,00	C	Agak Basah
5	2016	12,50	A	Sangat Basah

Keterangan: Nilai Q = perbandingan bulan kering dan bulan basah (%)
 Buku Laporan SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015
 Data Curah Hujan tahun 2012 s/d 2016 yang dipantau Balai PSDA
 Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten
 Dharmasraya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-21C. Analisis Curah Hujan Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nilai	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Maksimum	442,50	267,00	327,00	441,00	425,60	113,00	414,00	151,00	187,10	179,00	585,00	79,00
2	Rata-Rata	382,65	168,28	282,84	372,84	318,06	85,80	219,43	70,65	143,40	79,25	496,98	50,80
3	Minimum	342,60	52,00	178,50	303,00	282,00	66,50	103,00	33,60	107,00	29,50	439,00	20,00

Keterangan: Satuan Curah Hujan Rata-Rata adalah= mm

Nilai berasal dari curah hujan rata-rata bulanan pada 5 Stasiun Curah Hujan

Sumber : Balai PSDA Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-21D. Perbandingan Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	2013	238,80	267,00	167,80	221,80	172,60	84,40	173,80	47,20	159,00	340,60	355,60	277,80
2	2014	164,24	23,60	154,35	264,30	470,72	43,44	60,52	190,60	66,52	72,16	437,68	176,68
3	2015	169,00	212,00	302,40	269,00	274,60	205,80	49,40	49,20	39,80	18,40	591,00	388,80
4	2016	382,65	168,28	282,84	372,84	318,06	85,80	219,43	70,65	143,40	79,25	496,98	50,80

Keterangan: Satuan Curah Hujan Rata-Rata adalah= mm

Curah Hujan rata-rata bulanan dari data 5 stasiun

Sumber : Balai PSDA Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-21E. Lokasi Geografis Masing-Masing Stasiun Pemantauan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Derajat Lintang	Menit Lintang	Detik Lintang	Derajat Bujur Timur	Menit Bujur Timur	Detik Bujur Timur
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Durian Simpai Silago	01	00	35,1	101	22	56,9
2	Bendungan Batang Hari	01	00	12,7	100	26	15,2
3	Komplek Sedasi	00	57	08,8	101	29	34,2
4	Padang Sidondang	00	58	59,2	101	36	31,0

Keterangan: Lokasi Geografis Stasiun masih sama dengan tahun 2015, tidak ada pemindahan lokasi

Sumber : Balai PSDA Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-22. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sungai Rumbai	0	4.644	0	0	0	0
2	Koto Besar	492	6.002	210	28	0	0
3	Asam Jujuhan	741	930	2	0	0	432
4	Koto Baru	99	6.718	222	103	0	343
5	Koto Salak	627	3.872	0	0	0	0
6	Tiumang	219	2.894	1	0	0	0
7	Padang Laweh	100	939	4	20	0	0
8	Sitiung	180	5.048	45	67	0	117
9	Timpeh	0	2.336	106	18	0	124
10	Pulau Punjung	241	7.740	512	210	0	250
11	IX Koto	659	324	385	0	0	542

Keterangan: 0 adalah data

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-22A. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Sumber Air Minum	Jumlah Rumah Tangga				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ledeng	842,00	603,00	3.532,00	129,00	3.358,00
2	Sumur	18.647,00	11.640,00	37.571,00	35.643,00	41.447,00
3	Sungai	0,00	0,00	2.402,00	1.887,00	1.487,00
4	Hujan	523,00	147,00	159,00	199,00	446,00
5	Kemasan	9.063,00	24.981,00	0,00	0,00	0,00
6	Lainnya	18.798,00	16.143,00	7.691,00	10.640,00	1.808,00

Keterangan: 0 adalah data

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-22B. Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan Dikelola Masyarakat (Perdesaan) di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Lokasi	Sumber Air Baku	Jumlah Penduduk Yang Terlayani (jiwa)	Kondisi SPAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Siluluk, Kecamatan Sitiung	Sungai/Air Permukaan	300,00	Belum berfungsi
2	Siguntur, Kecamatan Sitiung	Mata Air	0,00	Rusak dihantam banjir
3	Sungai Limau, Kecamatan Asam Jujuhan	Mata Air	1.025,00	Berfungsi
4	Batu Kangkung, Kecamatan Asam Jujuhan	Mata Air	170,00	Berfungsi
5	Bukit IX, Kecamatan Asam Jujuhan	Mata Air	300,00	Berfungsi

Keterangan: Data merupakan kondisi sistem penyediaan air minum (SPAM) perdesaan pada tahun 2016
0 adalah data

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-22C. Kondisi SPAM Unit Pelayanan Air Minum (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Unit Pelayanan	Jumlah Penduduk Yang Terlayani (jiwa)	Kondisi Sarana dan Prasarana
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Unit Pelayanan Sungai Dareh	1.005,00	Berfungsi
2	Unit Pelayanan Sitiung	945,00	Berfungsi
3	Unit Pelayanan Silago	90,00	Berfungsi
4	Unit Pelayanan Pulau Punjung	0,00	Tidak Berfungsi/Rusak
5	Unit Pelayanan Koto Baru	0,00	Tidak Berfungsi/Rusak
6	Unit Pelayanan Koto Besar	0,00	Tidak Berfungsi/Rusak

Keterangan: Data merupakan inventarisasi kondisi sarana dan prasarana unit pelayanan air minum
0 adalah data

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-22D. Tingkat Pelayanan Air Minum Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Sistem Pelayanan	Jumlah Penduduk Yang Terlayani (jiwa)	% Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sistem Perpipaan		
1	Dikelola UPTD	2.045,00	0,91
2	Dikelola PAMSIMAS	23.184,00	0,94
3	SPAM Perdesaan	2.095,00	10,35
	Sistem Non Perpipaan		
1	Sumur Gali	86.530,00	40,45

Keterangan: Data sistem perpipaan merupakan tingkat pelayanan air minum perpipaan tahun 2015

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-22E. SPAM Dibangun Program PAMSIMAS Tahun 2008-2015
Tahun : 2016**

No	Tahun Pembangunan	Jumlah Terbangun	Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa)	% Pelayanan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2008	4	1.585	0,71
2	2009	6	2.857	1,28
3	2010	13	2.952	1,32
4	2011	12	5.018	2,25
5	2012	11	2.654	1,19
6	2013	15	4.312	1,93
7	2014	10	3.006	1,35
8	2015	12	799	0,36

Keterangan: Data merupakan tingkat pelayanan air minum perpipaan tahun 2015

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 22F. Jumlah Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum di Perkotaan Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Sumber Air Minum					Jumlah
		Ledeng	Sumur	Sungai	Hujan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kecamatan Sungai Rumbai	0	4.644	0	0	0	4.644
2	Kecamatan Pulau Punjung	241	7.740	512	210	250	8.953
3	Kabupaten Dharmasraya	3.358	41.447	1.487	446	1.808	48.546

Keterangan : 0 adalah data

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-23. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sungai Rumbai	4.507	72	0	65
2	Koto Besar	5.754	409	0	610
3	Asam Jujuhan	1.792	138	0	1.026
4	Koto Baru	6.422	615	0	295
5	Koto Salak	4.295	3	0	125
6	Tiumang	3.200	33	0	20
7	Padang Laweh	1.437	2	0	51
8	Sitiung	5.072	192	0	921
9	Timpeh	2.935	338	0	557
10	Pulau Punjung	7.773	299	0	489
11	IX Koto	702	20	0	1.186

Keterangan: 0 adalah data

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-23A. Perbandingan Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016

No	Jumlah Rumah Tangga	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2012	29.713,00	4.459,00	871,00	12.830,00
2	2013	33.255,00	4.459,00	966,00	12.197,00
3	2014	41.926,00	1.954,00	0,00	7.475,00
4	2015	40.640,00	2.043,00	0,00	5.815,00
5	2016	43.889,00	2.121,00	0,00	5.345,00

Keterangan: 0 adalah data

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-23B. Rekapitulasi Alokasi Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Melalui Dana APBD dan DAK Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Tahun	Jumlah Dana (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	2012	1.007.153.000
2	2013	1.040.862.100
3	2014	2.926.878.000
4	2015	3.824.085.300
5	2016	561.610.000

Keterangan : Dana di atas termasuk dana penunjang kegiatan
Tahun 2016 merupakan DAK Reguler murni bidang Perumahan,
Air Minum, dan Sanitasi

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-24. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Tidak Sekolah		Sekolah Dasar		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Sei Rumbai	3743	3535	3317	3502	1809	1663	2009	1718	115	243	281	361	13	8	0	0
2	Koto Besar	4719	4416	3628	3465	2534	2198	1758	1515	89	189	164	242	5	7	0	1
3	Asam Jujuhan	1533	1381	2525	2459	562	509	538	386	22	47	39	44	0	1	1	0
4	Koto Baru	5242	5116	2811	2663	2586	2380	3099	2634	208	401	463	566	28	18	0	1
5	Koto Salak	2833	2797	1502	1398	1538	1326	1201	919	87	161	142	176	11	1	0	0
6	Tiumang	2033	2039	2181	2261	1223	1061	1170	789	73	148	121	180	3	2	0	0
7	Padang Laweh	1015	1005	2603	2750	513	443	554	441	29	51	40	53	0	1	0	0
8	Sitiung	4559	4425	1601	1749	2106	1999	2851	2314	190	436	402	543	40	15	2	0
9	Timpeh	2832	2728	705	715	1590	1323	1009	884	56	125	87	113	8	1	0	0
10	Pulau Punjung	7062	6663	1347	1358	3517	3069	4273	3875	272	690	676	901	58	43	2	1
11	IX Koto	1593	1630	3498	3721	623	559	376	338	31	62	51	65	2	1	0	0

Keterangan: Data dari Disdukcapil ini, untuk kolom tidak sekolah merupakan jumlah penduduk yang termasuk didalamnya belum sekolah, tidak sekolah dan sedang Sekolah Dasar Sedangkan data SD merupakan data penduduk tamat SD

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-24A. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Yang Tidak Sekolah Hingga Pendidikan Tertinggi SLTA di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi SLTA (jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Rumbai	2.009	1.718
2	Koto Besar	1.758	1.515
3	Asam Jujuhan	538	386
4	Koto Baru	3.099	2.634
5	Koto Salak	1.201	919
6	Tiumang	1.170	789
7	Padang Laweh	554	441
8	Sitiung	2.851	2.314
9	Timpeh	1.009	884
10	Pulau Punjung	4.273	3.875
11	IX Koto	376	338

Keterangan: Data dari Disdukcapil ini, untuk kolom tidak sekolah merupakan jumlah penduduk yang termasuk didalamnya belum sekolah, tidak sekolah dan sedang Sekolah Dasar, sedangkan data SD merupakan data penduduk tamat SD

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-24B. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Dengan Tingkat Pendidikan Diploma Hingga S3 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Dengan Tingkat Pendidikan Diploma Hingga S3 (jiwa)	
		Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Rumbai	409	612
2	Koto Besar	258	439
3	Asam Jujuhan	62	92
4	Koto Baru	699	986
5	Koto Salak	240	338
6	Tiumang	197	330
7	Padang Laweh	69	105
8	Sitiung	634	994
9	Timpeh	151	239
10	Pulau Punjung	1.008	1.635
11	IX Koto	84	128

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-24C. Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk Laki-Laki (jiwa)				
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tidak Sekolah	23.742	34.149	20.830	38.696	37.164
2	SD	21.631	27.041	40.787	24.492	25.718
3	SLTP	19.317	19.280	19.227	17.854	18.601
4	SLTA	15.127	19.009	18.902	18.324	18.838
5	Diploma	1.399	1.234	1.224	1.164	1.172
6	S1	1.982	2.182	2.199	2.278	2.466
7	S2	86	138	149	159	168
8	S3	7	7	6	5	5

Keterangan : -

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel-24D. Perbandingan Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk Perempuan (jiwa)				
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tidak Sekolah	23.839	32.412	20.377	37.149	35.735
2	SD	20.093	27.183	40.071	25.137	26.041
3	SLTP	15.622	16.756	16.654	15.850	16.530
4	SLTA	12.890	15.786	15.638	15.429	15.813
5	Diploma	3.760	2.539	2.525	2.493	2.553
6	S1	2.205	2.718	2.778	2.887	3.244
7	S2	70	80	82	90	98
8	S3	7	7	7	3	3

Keterangan: -

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya,
2016



Tabel-24E. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Berdasarkan Data BPS di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah	5.166	6.623
2	Tidak Punya Ijazah SD	22.414	22.827
3	SD Sederajat	25.246	23.438
4	SLTP Sederajat	29.862	17.106
5	SLTA Sederajat	19.794	15.748
6	Diploma	919	1.936
7	D4/S1	4.380	3.764
8	S2/S3	212	266

Keterangan: -

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel-25. Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)
1	ISPA	1.635
3	Penyakit lainnya	1.186
4	Hipertensi	741
5	Febris/common Cold	562
6	Gasritis	754
7	Rheumatik	563
8	Penyakit Alergi Kulit	384
9	Kecelakaan	249
10	Diare	296
11	Penyakit Pulpa & Jar Periopikal	259
12	Kelainan Refraksi	299

Keterangan: Jumlah penderita dalam satuan jiwa

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 25A. Perbandingan Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Penyakit	2015		2016	
		Jumlah Penderita	%	Jumlah Penderita	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ISPA	20.785	29,97%	1.635	23,60%
3	Penyakit lainnya	13.103	18,89%	1.186	17,12%
4	Hipertensi	8.056	11,62%	741	10,70%
5	Febris/common Cold	4.941	7,12%	562	8,11%
6	Gasritis	7.636	11,01%	754	10,88%
7	Rheumatik	0	0	563	8,13%
8	Penyakit Alergi Kulit	5.131	7,40%	384	5,54%
9	Kecelakaan	2.779	4,01%	249	3,59%
10	Diare	4.652	6,71%	296	4,27%
11	Penyakit Pulpa & Jar Periopikal	2.270	3,27%	259	3,74%
12	Kelainan Refraksi	0	0	299	4,32%

Keterangan: Jumlah penderita dalam satuan jiwa

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. 2016



Tabel - 25B. Perbandingan Sepuluh Penyakit Utama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	10 Penyakit Utama					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ISPA	ISPA	ISPA	Infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas	Infeksi saluran pernafasan bagian atas (ISPA)	ISPA
2	Penyakit Kulit	Gastritis	Penyakit Lainnya	Penyakit lain pada saluran pernafasan bagian atas	Hypertensi	Penyakit lainnya
3	Rheumatik	Hipertensi	Hipertensi	Hypertensi	Gastritis	Hipertensi
4	Diare	Diare	Gastritis	Rheumatic	Penyakit kulit alergi	Gasritis
5	Luka	Kecelakaan dan Rudal Paksa	Penyakit Kulit	Penyakit kulit alergi	Febris/Common Cold	Rheumatik
6	Gastritis	Rheumatik	Rheumatik	Kecelakaan dan Ruda Paksa	Diare	Febris/common Cold
7	Hipertensi	Penyakit Kulit	Kecelakaan	Diare	Kecelakaan	Penyakit Alergi Kulit
8	Asma	Penyakit Otot & Jaringan Pengikat	Diare	Infeksi usus tertentu lainnya	Penyakit Pulpa dan Jar Periopikal	Kelainan Refraksi
9	Infeksi Usus Lain	Penyakit Pulpa & Jaringan Periopikal	Penyakit Otot & Jaringan Pengikat	Gastritis	Diabetes Melitus	Diare
10	Caries Gigi	Penyakit Lainnya	Penyakit Pulpa & Jaringan Periopikal	Penyakit Pulpa dan Jaringan Periopikal	Penyakit Lainnya	Penyakit Pulpa & Jar Periopikal & Kecelakaan

Keterangan: -

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. 2016





Tabel - 26. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Rumbai	14.068	5.761
2	Koto Besar	23.826	8.942
3	Asam Jujuhan	6.046	3.715
4	Koto Baru	19.889	9.226
5	Koto Salak	7.774	6.769
6	Tiumang	12.366	2.694
7	Padang Laweh	11.358	2.056
8	Sitiung	30.422	9.310
9	Timpeh	15.678	6.668
10	Pulau Punjung	39.272	14.829
11	IX Koto	24.149	7.485

Keterangan: Untuk Jumlah Rumah Tangga Miskin (kolom 4) adalah penduduk yang mendapatkan JKN

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 26A. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Mendapatkan JKN		
			2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sungai Rumbai	14.068	7.847	6.236	5.761
2	Koto Besar	23.826	17.365	9.830	8.942
3	Asam Jujuhan	6.046	5.749	4.450	3.715
4	Koto Baru	19.889	17.005	9.240	9.226
5	Koto Salak	7.774	10.646	10.428	6.769
6	Tiumang	12.366	5.528	3.199	2.694
7	Padang Laweh	11.358	3.280	2.044	2.056
8	Sitiung	30.422	14.720	11.147	9.310
9	Timpeh	15.678	10.439	7.450	6.668
10	Pulau Punjung	39.272	21.853	15.232	14.829
11	IX Koto	24.149	8.007	8.179	7.485

Keterangan: Untuk Jumlah Rumah Tangga Miskin (kolom 4) adalah penduduk yang mendapatkan JKN

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 26B. Jumlah Rumah Tangga dan Individu Menurut Status Kesejahteraan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Individu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Rumbai	513	2.073
2	Koto Besar	904	3.781
3	Asam Jujuhan	401	1.576
4	Koto Baru	999	3.899
5	Koto Salak	979	3.642
6	Tiumang	313	1.105
7	Padang Laweh	136	556
8	Sitiung	689	3.004
9	Timpeh	502	1.968
10	Pulau Punjung	913	3.954
11	IX Koto	697	3.022

Keterangan: Basis data terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Tahun 2015
 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 26C. Persentase Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	% Jumlah Rumah Tangga Miskin VS Jumlah Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)
1	Sungai Rumbai	40.95
2	Koto Besar	37.53
3	Asam Jujuhan	61.44
4	Koto Baru	46.38
5	Koto Salak	87.07
6	Tiumang	21.78
7	Padang Laweh	18.10
8	Sitiung	30.60
9	Timpeh	42.53
10	Pulau Punjung	37.75
11	IX Koto	30.99

Keterangan: -

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 27. Volume Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Bergerak						
1	Terminal Transit Sungai Betung	Terminal Barang	2,0	1,0	0 *	0 *	0 *
2	Pelabuhan Sungai di Batu Bakawik	Dermaga Sungai	0,25	0,50	0 *	0 *	0 *
3	Penyeberangan Sungai Lansat	Dermaga Ponton	0,20	0,05	0 *	0 *	0 *
4	Penyeberangan Jorong Siguntur	Dermaga Ponton	0,10	0,01	0 *	0 *	0 *
B.	Tidak Bergerak						
B1	Tempat Wisata						
1	Air Terjun Timbulun Indah	Wisata Agro	3,00	0,0053	0 *	0 *	0 *
2	Bendungan Batang Mimpi	Wisata Agro	4,00	0,0001	0 *	0 *	0 *
3	Bendungan Batu Bakawik	Wisata Agro	4,00	0,0072	0 *	0 *	0 *
4	Hot Spring Sungai Belit	Wisata Agro	7,00	0,0007	0 *	0 *	0 *
5	Bendungan Batang Siat	Wisata Agro	2,00	0,0001	0 *	0 *	0 *
6	Puncak Gunung Medan	Wisata Alam	5,00	0,0026	0 *	0 *	0 *
7	Air Terjun Tujuh Tingkat	Wisata Alam	2,00	0,0002	0 *	0 *	0 *
8	Puncak Timpeh	Wisata Alam	10,00	0,0039	0 *	0 *	0 *
9	Gua Gadang (Timpeh)	Wisata Alam	2,00	0,0043	0 *	0 *	0 *
10	Air Terjun Sungai Suir	Wisata Alam	1,00	0,0006	0 *	0 *	0 *
11	Air Tejun IX Koto	Wisata Alam	2,50	0,0007	0 *	0 *	0 *



2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Pulau Cinta	Wisata Alam	3,00	0,0099	0 *	0 *	0 *
13	Talaga Baranang Siang	Wisata Alam	2,00	0,0053	0 *	0 *	0 *
14	Selaju Sampan	Wisata Alam	5,00	0,0099	0 *	0 *	0 *
15	Gua Jigak Kampuang Surau	Wisata Alam	2,00	0,0005	0 *	0 *	0 *
16	Rumah Kerajaan Siguntur	Wisata Sejarah	0,50	0,0010	0 *	0 *	0 *
17	Rumah Kerajaan Sungai Dareh	Wisata Sejarah	0,50	0,0004	0 *	0 *	0 *
18	Rumah Kerajaan Koto Besar	Wisata Sejarah	0,05	0,0004	0 *	0 *	0 *
19	Rumah Kerajaan Padang Laweh	Wisata Sejarah	0,12	0,0003	0 *	0 *	0 *
20	Rumah Gadang Pulau Punjung	Wisata Sejarah	0,05	0,0005	0 *	0 *	0 *
21	Rumah Gadang Puti Bulian	Wisata Sejarah	0,08	0,0006	0 *	0 *	0 *
22	Candi Pulau Sawah	Wisata Sejarah	2,00	0,0005	0 *	0 *	0 *
23	Candi Padang Roco	Wisata Sejarah	2,00	0,0007	0 *	0 *	0 *
24	Candi Awang Maombiak	Wisata Sejarah	1,50	0,0003	0 *	0 *	0 *
25	Candi Rambahan	Wisata Sejarah	1,50	0,0007	0 *	0 *	0 *
26	Makam Raja-Raja Koto Besar	Wisata Sejarah	0,05	0,0005	0 *	0 *	0 *
27	Makam Nenek Susu Tunggal	Wisata Sejarah	2,00	0,0004	0 *	0 *	0 *
28	Makam Syekh Alib Ba	Wisata Sejarah	0,07	0,0007	0 *	0 *	0 *
29	Makam Rajo Kuek Kuaso	Wisata Sejarah	0,10	0,0007	0 *	0 *	0 *
30	Makam Datuak Gadang	Wisata Sejarah	1,20	0,0005	0 *	0 *	0 *
31	Durian Di Takuak Rajo	Wisata Sejarah	1,00	0,0003	0 *	0 *	0 *





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	Mesjid Tua Siguntur	Wisata Sejarah	0,05	0,0010	0 *	0 *	0 *
33	Tugu PDRI	Wisata Sejarah	1,00	0,0007	0 *	0 *	0 *
B1	Penginapan						
1	Losmen UMEGA Gunung Medan	Hotel	0 *	0,02	30,0	0 *	0 *
2	Hotel UMEGA Gunung Medan	Hotel	0 *	0,01	15,0	0 *	0 *
3	Hotel Alam Raya	Hotel	0 *	0,01	10,0	0 *	0 *
4	Fajar Utama	Hotel	0 *	0,01	10,5	0 *	0 *
5	Hotel Sakayo Jaya	Hotel	0,128	0,01	17,0	0 *	0 *
6	Wisma Agung	Hotel	0 *	0,01	13,0	0 *	0 *
7	Hotel Jakarta	Hotel	0,316	0,01	25,0	0 *	0 *
B2	Faskes Rawat Inap						
1	RSUD Sungai Dareh	Faskes	20,00	12,50	45,60	0,28	0,02
2	Puskesmas Sitiung	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
3	Puskesmas Koto Baru	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
4	Puskesmas Sungai Rumbai	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
5	Puskesmas Silago	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
6	Puskesmas Timpeh	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
7	Puskesmas Sungai Limau	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
8	Klinik Arba	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
9	Klinik Orin	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
10	Klinik Nurjinis	Faskes	0,0372	0 *	0 *	0 *	0 *
11	Klinik Suci Shati	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Klinik Innayah	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
13	Klinik Restu Bunda	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
14	Klinik Harapan Bunda	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
15	Klinik Buah Hati	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
16	Klinik PT BRM	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
17	Klinik Desmiwati	Faskes	0,00108	0 *	0 *	0 *	0 *
18	Klinik Vortuna	Faskes	0,0108	0 *	0 *	0 *	0 *
19	Klinik Ariaah	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
20	Klinik Fadila	Faskes	0,0288	0 *	0 *	0 *	0 *
21	Klinik Arga	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
22	Klinik Bunda	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
23	Klinik PMC	Faskes	0,0192	0 *	0 *	0 *	0 *
24	Klinik SS	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
25	Klinik Chairunissa	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
26	Klinik Merpahan	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
27	Klinik Keluarga	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
28	Klinik RSA	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
29	Klinik Safa Marwah	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
30	Klinik Twin Mdika	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
31	Klinik Harapan Kita	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
32	Klinik Ahsahla	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
33	Klinik KMC	Faskes	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
34	Klinik Kyodafa	Faskes	0,052	0 *	0 *	0 *	0 *
35	Klinik Utama Arba	Faskes	0,144	0 *	0 *	0 *	0 *





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	Klinik Pratama Bunda	Faskes	0,136	0 *	0 *	0 *	0 *
37	Klinik Utama Buah Hati	Faskes	0,020	0 *	0 *	0 *	0 *
B3	Pabrik						
1	PT Tidar Kerinci Agung	Pabrik Sawit	28.029,00	358,6	564,9	0,34	2,67
2	PT Incasi Raya Pangian	Pabrik Sawit	6.900,00	308,5	486,1	1,31	19,44
3	PT Sumbar Andalas Kencana	Pabrik Sawit	8.984,38	318,5	501,7	0,26	5,66
4	PT Bina Pratama Sakato Jaya	Pabrik Sawit	4.347,00	299,6	472,0	4,44	5,60
5	PT Selago Makmur Plantation	Pabrik Sawit	8.608,56	466,4	734,7	0,15	1,65
6	PT Darmasraya Sawit Lstari	Pabrik Sawit	0 *	324,6	511,3	0 *	0 *
7	PT Dharmasraya Lestarindo	Pabrik Sawit	0 *	432,7	681,7	0 *	0 *
8	PT Transco Pratama	Pabrik Karet	480,13	36,7	19,3	0,27	7,12
9	PT Kalidareh Dharma Agro	Pabrik Sawit	1.000,00	0 *	0 *	0 *	0 *
B4	Pertambangan						
1	PT. Global Mineral Sejahtera	Pertambangan Bijih Besi	200	0 *	0 *	0 *	0 *
2	KUD Sinamar Sakato	Pertambangan Batu Bara	197,33	0 *	0 *	0 *	0 *
3	Sinamar Lintas Sumatera (SLN)	Pertambangan Batu Bara	555,40	0 *	0 *	0 *	0 *
4	PT. Putramas Bumi Agung	Pertambangan Batu Bara	144.000,00	0 *	0 *	0 *	0 *
5	PT. Tambang Sungai Suir	Pertambangan Bijih Besi	180,00	0 *	0 *	0 *	0 *
6	PT. Indo Mining Resource	Pertambangan Batu Bara	5.061,00	0 *	0 *	0 *	0 *
7	CV. X DAREH	Penambangan Bahan Galian Batu Bara	198,00	0 *	0 *	0 *	0 *





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Alizar Syahputra	Pertambangan Batuan	4.821,00	0 *	0 *	0 *	0 *
9	PT. Permata Bumi Makmur	Pertambangan Batu Bara	115,40	0 *	0 *	0 *	0 *
10	Mairul Efendi	Pertambangan Batuan	2,00	0 *	0 *	0 *	0 *
11	PT. Centra Bara Indonesia	Pertambangan Batu Bara	1.000,00	0 *	0 *	0 *	0 *
12	Ridwan R	Batuan (Sirtukil)	3,00	0 *	0 *	0 *	0 *
13	Asrida	Batuan (Sirtukil)	2,00	0 *	0 *	0 *	0 *
14	Arjuna	Batuan (Sirtukil)	4,00	0 *	0 *	0 *	0 *
15	H. Abdul Haris Tuanku Sati	Batuan (Sirtukil)	3,00	0 *	0 *	0 *	0 *
16	Syahrial Salam	Batuan (Sirtukil)	3,00	0 *	0 *	0 *	0 *
17	Amrizal Dt Rajo Medan	Batuan (Sirtukil)	3,00	0 *	0 *	0 *	0 *
B5	Perkebunan						
1	PT. Andalas Wahana Berjaya	Perkebunan Kelapa Sawit	17.800,00	0 *	0 *	0 *	0 *
2	CV. X DAREH	Perkebunan Kelapa Sawit	1.000.00	0 *	0 *	0 *	0 *
B6	SPBU						
1	PT.Dharmasraya Multi Sarana	SPBU	0,450	0 *	0 *	0 *	0 *
2	SPBU Hj.Hasnidar	SPBU	1,440	0 *	0 *	0 *	0 *
3	PT. Jefri Abidin	SPBU	0,600	0 *	0 *	0 *	0 *
4	PT.Dharma Aditama	SPBU	0,644	0 *	0 *	0 *	0 *
5	PT. Dhar Multi Sarana	SPBU	0,045	0 *	0 *	0 *	0 *
6	PT. Putra Rumbai Mandiri	SPBU	6,000	0 *	0 *	0 *	0 *
7	PT. Umega Sembilan Berlian	SPBU	0,600	0 *	0 *	0 *	0 *





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	PT. Jaya Nusa Niaga	SPBU	0,500	0 *	0 *	0 *	0 *
9	SPBU PT Ananta Djanur Mandiri	SPBU	0,750	0 *	0 *	0 *	0 *
B7 UIPHHK							
1	CV. Karya Mandiri	UIPHHK	1,00	0 *	0 *	0 *	0 *
2	Rudi Hartono	UIPHHK	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
3	CV. Rimba Alam Nusantra	UIPHHK	0,40	0 *	0 *	0 *	0 *
4	CV. Kurnia Alam Lestari	UIPHHK	0,25	0 *	0 *	0 *	0 *
5	UD. Alnur Fauziah	UIPHHK	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
6	UD. Dzikra Utama	UIPHHK	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
7	CV. Teratai	UIPHHK	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
B8 HPHTI							
1	PT. Bukit Raya Mudisa	HPHTI	28.617,00	0 *	0 *	0 *	0 *
B9 Batching Plant dan Stone Crusher							
1	PT. Tri Jaya Putra	Batching Plant dan Stone Crusher	3,50	0 *	0 *	0 *	0 *
2	CV. Bobby Bersaudara	Stone Crusher	0,05	0 *	0 *	0 *	0 *
3	PT. Kharisma Wirajaya Perkasa	Stone Crusher	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
4	CV. Albarkah	Stone Crusher	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *
5	PT. Habib Jabal Nur	Stone Crusher	1,00	0 *	0 *	0 *	0 *
				0 *	0 *	0 *	0 *





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Sumber Pencemaran	Type/Jenis/ Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B10	Perumahan			0 *	0 *	0 *	0 *
1	PT. Tarko Mulia Persada	Perumahan	5,00	0 *	0 *	0 *	0 *
2	PT. Hikma Karya Nusantara	Perumahan	4,00	0 *	0 *	0 *	0 *
3	PT. Anugrah Bina Sarana	Perumahan	2,30	0 *	0 *	0 *	0 *
				0 *	0 *	0 *	0 *
B11	IPAL			0 *	0 *	0 *	0 *
1	IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja)	Pengolahan Tinja	1,90	0 *	0 *	0 *	0 *

Keterangan : 0 = adalah data

- = tidak ada data

* = Belum ada dilakukan pemantauan oleh pihak pemrakarsa dan Dinas Lingkungan Hidup karena terbatasnya ketersediaan anggaran pemantauan

Sumber : Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel - 27A. Rekapitulasi Volume Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Sumber Pencemaran	Jumlah Sumber Pencemaran	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah B3 Padat (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A.	Bergerak						
	Terminal dan Pelabuhan	4	2,55	1,56	-	-	-
B	Tidak Bergerak						
1	Tempat Wisata	33	68,27	0,06	-	-	-
2	Penginapan	7	0,44	0,06	120,50	-	-
3	Faskes Rawat Inap	37	20,45	12,50	45,60	0,28	0,02
4	Pabrik	9	58.349,07	2.545,57	3.971,74	6,76	42,14
5	Pertambangan	17	156.348,13	-	-	-	-
6	Perkebunan	2	18.800,00	-	-	-	-
7	SPBU	9	11,03	-	-	-	-
8	UIPHHK	7	1,65	-	-	-	-
9	HPHTI	1	28.617,00	-	-	-	-
10	Batching Plant dan Stone Crusher	5	4,55	-	-	-	-
11	Perumahan	3	11,30	-	-	-	-
12	IPAL	1	1,90	-	-	-	-
		135	262.236,34	2.559,75	4.137,84	7,04	42,15

Keterangan : 0 adalah data

- = tidak ada data

0* = Belum ada dilakukan pemantauan oleh pihak pemrakarsa dan Dinas Lingkungan Hidup karena terbatasnya ketersediaan anggaran pemantauan dan pengawasan LH

Sumber : Perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





**Tabel - 27B. Perbandingan Jumlah Timbulan Sampah Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Timbulan Sampah (m3/hari)			
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sungai Rumbai	51,44	56,83	59,25	61,85
2	Koto Besar	64,60	64,61	65,63	66,43
3	Asam Jujuhan	30,53	37,21	39,82	42,85
4	Koto Baru	81,57	83,55	85,40	87,08
5	Koto Salak	42,56	42,46	43,09	43,58
6	Tiumang	31,22	30,33	30,58	30,68
7	Padang Laweh	15,41	17,55	18,45	19,45
8	Sitiung	65,11	65,89	67,14	68,21
9	Timpeh	38,04	38,26	38,92	39,46
10	Pulau Punjung	102,35	111,29	115,55	120,03
11	IX Koto	20,81	21,39	21,88	22,33

Keterangan: -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel – 27C. Perkiraan Beban Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sarana Hotel/Penginapan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kelas Hotel/Penginapan	Limbah Padat (m3/hari)	Limbah Cair (m3/hari)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(5)	(6)	(6)	(7)
1	Losmen UMEGA Gunung Medan	0,0168	30	0,602	0,828
2	Hotel UMEGA Gunung Medan	0,011	15	0,301	0,414
3	Hotel Alam Raya	0,009	10	0,201	0,276
4	Fajar Utama	0,0058	10,5	0,211	0,290
5	Hotel Sakayo Jaya	0,01	17	0,341	0,469
6	Wisma Agung	0,006	13	0,261	0,359
7	Hotel Jakarta	0,006	25	0,502	0,690

Keterangan: Limbah padat estimasi menggunakan faktor timbulan Dinas Cipta Karya Dharmasraya 2009, BP limbah estimasi menggunakan faktor emisi Iskandar 2004 dalam Puslitbang SDA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel – 27D. Perkiraan Volume Limbah Padat dan Limbah Cair dari Rumah Sakit di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Rumah Sakit	Tipe/Kelas Rumah Sakit	Volume Limbah Padat (m3/hari)	Volume Limbah Cair (m3/hari)	Volume Limbah Padat B3 (m3/hari)	Volume Limbah B3 Cair (m3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	RSUD Sei Dareh	Kelas C	12,50	45,60	0,28	0,02

Keterangan: Kabupaten Dharmasraya memiliki 1 (satu) Rumah Sakit

Sumber : RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 28. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Bendungan Batanghari	26,7	26,4	22,3	26,0	25,7	26,7	27,7	28,2	25,8	27,8	26,7	26,5
2	Komplek Sedasi	29,9	29,9	30,0	30,2	29,0	23,9	21,6	21,8	25,1	29,1	29,7	29,8

Keterangan: Pos klimatologi hanya 2 pos yakni Komplek Sedasi (S 01°00'08.8" E 101°29'34.2") dan Bendungan Batanghari (S 01°57'12,7" E 101°26'15,2") Suhu rata-rata dalam satuan derajat Celcius

Sumber : Balai PSDA Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 28A. Analisis Statistik Suhu Udara Rata-Rata Bulanan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bendung Batanghari	22,30	26,38	28,20
2	Komplek Sedasi	21,60	27,50	30,20
	Rata-Rata Suhu Udara	21,95	26,94	29,20

Keterangan: Pos klimatologi hanya 2 pos yakni Komplek Sedasi (S 01°00'08.8" E 101°29'34.2") dan Bendungan Batanghari (S 01°57'12,7" E 101°26'15,2") Suhu rata-rata dalam satuan derajat Celcius

Sumber : Balai PSDA Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 28B. Perbandingan Suhu Udara Rata-Rata Bulanan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	2013	28,40	28,25	28,75	28,80	29,15	29,15	28,35	28,45	28,65	28,50	28,65	29,90
2	2014	28,60	28,30	-	-	28,55	29,10	29,10	28,40	28,25	28,35	28,30	28,00
3	2015	27,75	27,40	28,05	28,45	28,60	28,25	28,20	28,60	28,40	28,15	27,90	28,15
4	2016	28,30	28,15	26,15	28,10	27,35	25,30	24,65	25,00	25,45	28,45	28,20	28,15

Keterangan : Pos klimatologi hanya 2 pos

Suhu Rata-rata dalam satuan derajat Celcius

Sumber : Balai PSDA Sumbar dengan Kantor Cabang di Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, 2016

**Tabel - 29. Kualitas Air Hujan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

Waktu Pemantauan	pH (μ mhos/cm)	DHL (mg/l)	SO ₄ (mg/L)	NO ₃ (mg/L)	Cr (mg/L)	NH ₄ (mg/L)	Na (mg/L)	Ca ²⁺ (mg/L)	Mg ²⁺ (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Januari	6,73	5,41	1,70	0,80	< 0,03	0,02	< 0,52	< 0,08	< 0,2
Februari	7,30	12,30	0,80	1,54	< 0,03	0,18	< 0,52	2,30	< 0,2
Maret	5,64	8,70	1,66	0,50	< 0,03	0,08	3,60	9,00	< 0,2
April	6,39	6,60	2,25	0,17	< 0,03	< 0,014	< 0,52	< 0,08	< 0,2
Mei	6,04	8,10	1,14	1,02	< 0,03	< 0,014	< 0,52	< 0,08	< 0,2
Juni	5,69	9,60	0,03	1,86	< 0,03	0,03	< 0,52	1,92	< 0,2
Juli	5,58	10,20	1,32	1,27	< 0,03	0,20	< 0,52	2,43	< 0,2
Agustus	6,46	11,60	< 0,26	< 0,01	< 0,03	0,05	< 0,52	2,20	< 0,2
September	8,75	0,02	< 0,26	0,16	< 0,03	0,66	< 0,52	2,30	< 0,2
Oktober	8,15	0,02	7,63	9,96	< 0,03	0,18	< 0,52	0,37	< 0,2
November	8,58	0,02	1,12	1,63	< 0,03	< 0,014	< 0,52	0,71	< 0,2
Desember	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Keterangan: 0 = adalah data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel -29A. Perbandingan pH Air Hujan dengan pH Hujan Asam di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Bulan	Nilai pH	Status (Asam/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jan	6,73	Tidak
2	Feb	7,30	Tidak
3	Mar	5,64	Tidak
4	Apr	6,39	Tidak
5	Mei	6,04	Tidak
6	Juni	5,69	Tidak
7	Juli	5,58	Tidak
8	Agus	6,46	Tidak
9	Sept	8,75	Tidak
10	Okt	8,15	Tidak
11	Nov	8,58	Tidak
12	Des	0,00	-

Keterangan : pH air hujan normal > 5,
pH Hujan Asam < 4,5

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 29B. Perbandingan pH Air Hujan Tahun 2013 s/d Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016

No	Bulan	pH Air Hujan ($\mu\text{mhos/em}$)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Januari	7,40	7,20	5,76	6,73
2	Februari	7,60	7,00	5,53	7,30
3	Maret	7,20	7,10	5,60	5,64
4	April	6,80	6,90	5,24	6,39
5	Mei	6,53	6,80	5,65	6,04
6	Juni	6,91	7,33	5,38	5,69
7	Juli	6,60	6,53	0,00	5,58
8	Agustus	6,86	6,34	0,00	6,46
9	September	7,13	5,10	0,00	8,75
10	Oktober	6,50	5,54	0,00	8,15
11	November	5,98	4,70	5,85	8,58
12	Desember	5,79	3,26	5,85	0,00

Keterangan : 0 = adalah data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 29C. Perbandingan Kualitas Parameter Sulfat Air Hujan Tahun 2013 s/d Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Bulan	Sulfat (mg/L)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Januari	15.000	3.879	0,133	1.701
2	Februari	13.000	2.931	< 0,26	0,800
3	Maret	13.000	10.000	< 0,26	1.660
4	April	13.000	0.171	< 0,26	2.250
5	Mei	14.000	< 0,26	1.323	1.140
6	Juni	19.490	0,771	4.770	0,030
7	Juli	19.490	0,129	0,000	1.320
8	Agustus	1.165	0,218	0,000	< 0,26
9	September	1.165	2.544	0,000	< 0,26
10	Oktober	1.165	10.180	0,000	7.630
11	November	0,337	1.197	0,956	1.120
12	Desember	1.032	< 0,26	0,870	0,000

Keterangan: 0 = adalah data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 29D. Perbandingan Kualitas Parameter NO3 Air Hujan Tahun 2013 s/d Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Bulan	NO3(mg/L)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Januari	0,080	ttd	0,500	0,800
2	Februari	0,024	0,750	0,450	1,540
3	Maret	0,028	ttd	0,510	0,500
4	April	0,024	0,460	0,440	0,170
5	Mei	0,028	0,450	0,930	1,015
6	Juni	ttd	0,920	0,680	1,860
7	Juli	ttd	0,840	0,000	1,270
8	Agustus	ttd	0,870	0,000	< 0,01
9	September	ttd	0,960	0,000	0,163
10	Oktober	ttd	0,580	0,000	9,961
11	November	0,008	0,440	< 0,01	1,627
12	Desember	ttd	0,620	1,200	0,000

Keterangan: ttd= tidak terdeteksi,
0 = adalah data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 29E. Perbandingan Kualitas Parameter NH4 Air Hujan Tahun 2013 s/d Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Bulan	NH4 (mg/L)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Januari	0,022	0,269	1,230	0,020
2	Februari	0,005	0,010	0,556	0,176
3	Maret	0,004	0,004	0,275	0,082
4	April	<0,01	0,031	0,391	< 0,014
5	Mei	<0,01	0,058	0,113	< 0,014
6	Juni	0,438	0,225	0,049	0,031
7	Juli	<0,01	0,320	0,000	0,200
8	Agustus	<0,01	0,286	0,000	0,050
9	September	<0,01	0,113	0,000	0,660
10	Oktober	<0,01	2,071	0,000	0,180
11	November	<0,01	0,372	0,721	< 0,014
12	Desember	0,057	0,124	0,097	0,00

Keterangan: 0 = adalah data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 30. Kualitas Udara Ambien di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

Lokasi	Lama Pengukuran	SO2 (ug/ Nm3)	CO (ug / Nm3)	NO2 (ug/ Nm3)	O3 (ug/ Nm3)	HC (ug/ Nm3)	PM 10 (ug/ Nm3)	PM 2,5 (ug/ Nm3)	TSP (ug/ Nm3)	Pb (ug/ Nm3)	Dustfall (ug/ Nm3)	Total Fluorides sebagai F (ug/ Nm3)	Fluor Index (ug/ Nm3)	Khlorine & Khlorine Dioksida (ug/Nm3)	Sulphat Index (ug/ Nm3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Depan Mesjid Al Ichwan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya	24 jam	22.43	7.22	11.89	25.96	ttd	ttd	ttd	ttd	0.11	190.8	ttd	ttd	ttd	ttd
Kantor Bupati	3 jam	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	40	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
Kantor Wali IV Dibawah (Kec.IX Koto)	3 jam	ttd	1.00	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	60	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
Kantor Wali Nagari Ampalu (Kec. Koto Salak)	3 jam	ttd	2.00	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	20	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
Kantor Wali Nagari Muaro Sopan (Kec. Padang Laweh)	3 jam	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	20	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
Kantor Camat Sitiung	3 jam	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	80	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
Kantor Camat Kec. Koto Baru	3 jam	ttd	1.00	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	40	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
Kantor Camat Kec. Koto Besar	3 jam	ttd	2.00	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	20	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
Kantor Camat Kec. Sungai Rumbai	3 jam	ttd	2.00	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	40	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd



Keterangan: Kualitas udara ambien pada lokasi Depan Masjid Al Ichwan merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh DLH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016

Kualitas udara ambien pada lokasi Kantor Bupati dan Kantor Wali IV Dibawah merupakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Lab DLH Dharmasraya hanya untuk pengukuran paramater TSP sebab kemampuan alat Lab BLH hanya untuk paramater TSP

ttd = tidak terdeteksi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2016 dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya, 2016



Tabel - 30A. Perbandingan Parameter Kualitas Udara Ambien Yang Diukur (SO₂, CO, NO₂, O₃, TSP) dengan Baku Mutu di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter	Konsentrasi (ug/Nm ³)	Baku Mutu (PP No 41 Tahun 1999) (ug/Nm ³)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	SO ₂	22,43	365,00	Masih memenuhi baku mutu
2	CO	7,22	10.000,00	Masih memenuhi baku mutu
3	NO ₂	11,89	150,00	Masih memenuhi baku mutu
4	O ₃	25,96	235,00	Masih memenuhi baku mutu
5	TSP	ttd	230,00	Masih memenuhi baku mutu

Keterangan: Parameter Kualitas Udara Ambien yang diukur (sesuai Tabel 30), masih memenuhi baku mutu Pemantauan dilakukan oleh DLH Provinsi Sumatera Barat, pada 1 (satu) lokasi di depan Mesjid Al Ichwan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya

Sumber : DLH Provinsi Sumatera dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 30B. Indeks Pencemaran Udara (IPU) di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Parameter	Konsentrasi ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	Indeks Pencemaran Udara
(1)	(2)	(3)	(4)
1	NO ₂	11,89	99,58
2	SO ₂	22,43	99,21
Rata-rata			99,39

Keterangan: Index Pencemaran Udara (IPU) dihitung menggunakan formulasi perhitungan Index Pencemaran Udara Nilai rata-rata merupakan nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU) Kab. Dharmasraya Pemantauan dilakukan oleh DLH Provinsi Sumatera Barat, pada 1 (satu) lokasi di depan Mesjid Al Ichwan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya

Sumber : DLH Provinsi Sumatera Barat 2016 dan Hasil Perhitungan Indeks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 30C. Perbandingan Indeks Pencemaran Udara (IPU) Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Tahun	Konsentrasi (ug/Nm3)		Indeks Pencemaran Udara
		NO2	SO2	
(1)	(2)	(3)		(4)
1	2014	150,00	3,61	97,28
2	2015	11,82	41,69	99,05
3	2016	11,89	22,43	99,39

Keterangan: Index Pencemaran Udara (IPU) dihitung menggunakan formulasi perhitungan Index Pencemaran Udara

Nilai rata-rata merupakan nilai Indeks Pencemaran Udara (IPU) Kab. Dharmasraya

Pemantauan Tahun 2015 dan Tahun 2016 dilakukan oleh DLH Provinsi Sumatera Barat pada 1 (satu) lokasi di depan Mesjid Al Ichwan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya

Pemantauan Tahun 2014 dilakukan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat pada 1 (satu) lokasi di Kantor Bupati Dharmasraya

Sumber : Buku Data SLHD Kab.Dharmasraya Tahun 2015 dan Hasil Perhitungan Indeks Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 30D. Kualitas Udara Hasil Pengukuran Passive Sampler Tahap I dan Tahap II di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Peruntukan	SO ₂ (µg/Nm ³)		NO ₂ (µg/Nm ³)	
		Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Transportasi	4,31	15,50	2,57	5,60
2	Industri/Agro Industri	4,80	10,30	47,44	12,00
3	Pemukiman	2,90	7,70	13,27	7,10
4	Perkantoran/Komersial	25,68	1,00	9,70	4,30
5	Blank	<2,57	<0,41	<2,57	<0,41

Keterangan : Data kualitas udara ambien diambil dari hasil pengukuran Passsive Sampler Tahap I dan Tahap II yang dilakukan oleh KLHK RI

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016



**Tabel - 30E. Perbandingan Index Kualitas Udara (IKU) Berdasarkan Hasil Pengukuran Passive Sampler Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Tahun	Parameter	Rata-Rata	Baku Mutu	Index	Indeks Kualitas Udara (IKU)
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2015	NO2	7,82	40	0,196	70,51
		SO2	21,33	20	1,066	
2	2016	NO2	12,75	40	0,319	84,17
		SO2	9,02	20	0,451	

Keterangan: Index Kualitas Udara (IKU) dihitung menggunakan formulasi perhitungan Index Kualitas Udara
Data kualitas udara ambien diambil dari hasil pengukuran Passive Sampler Tahap I dan Tahap II yang dilakukan oleh KLHK RI Tahun 2015 dan Tahun 2016

Sumber : Buku Data SLHD Kab.Dharmasraya Tahun 2015, dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel - 30F. Kualitas Udara Ambien Lokasi Perusahaan Incasi Raya Group di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Parameter									
			SO2 (µg/Nm3)		NO2 (µg/Nm3)		CO (µg/Nm3)		TSP (µg/Nm3)		Kebisingan (dBA)	
			Hasil Analisa	Baku Mutu	Hasil Analisa	Baku Mutu	Hasil Analisa	Baku Mutu	Hasil Analisa	Baku Mutu	Hasil Analisa	Baku Mutu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PT Incasi Raya Pangian	Halaman Depan Kantor	5,05	Maks. 900*)	0,47	Maks. 400*)	TTD	Maks. 30.000*)	24,20	Maks. 230*)	53,60	70**)
		Apron loading ramp	6,35		0,64		212,28		106,75		59,30	
		Perumahan	7,16		0,55		TTD		24,24		40,30	
2	PT Selago Makmur Plantation	Halaman Depan Kantor	6,54	Maks. 900*)	0,64	Maks. 400*)	TTD	Maks. 30.000*)	84,68	Maks. 230*)	54,50	70**)
		Apron loading ramp	5,51		0,47		595,18		128,75		57,50	
		Perumahan	6,78		1,11		TTD		21,91		49,30	
3	PT Bina Pratama Sakato Jaya	Halaman Depan Kantor	3,62	Maks. 900*)	1,65	Maks. 400*)	151,00	Maks. 30.000*)	94,25	Maks. 230*)	55,50	70**)
		Apron loading ramp	9,85		4,91		248,00		132,84		62,20	
		Perumahan	2,22		2,58		TTD		116,58		54,50	
		Jalur TBS	6,55		4,31		88,00		175,09		56,90	
		Jalur CPO	4,83		2,14		94,00		216,16		57,50	
4	PT Sumbar Andalas Kencana	Halaman Depan Kantor	2,97	Maks. 900*)	2,60	Maks. 400*)	170,55	Maks. 30.000*)	87,71	Maks. 230*)	58,10	70**)
		Apron loading ramp	2,12		0,47		256,17		185,42		64,20	



No	Nama Perusahaan	Lokasi	Parameter									
			SO2 (µg/Nm3)		NO2 (µg/Nm3)		CO (µg/Nm3)		TSP (µg/Nm3)		Kebisingan (dBA)	
			Hasil Analisa	Baku Mutu	Hasil Analisa	Baku Mutu	Hasil Analisa	Baku Mutu	Hasil Analisa	Baku Mutu	Hasil Analisa	Baku Mutu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Perumahan	1,26		0,68		TTD		58,53		50,80	
		Jalur Lintas CPO dan Buah	4,23		0,55		681,66		211,80		41,90	
5	PT Tidar Kerinci Agung	Halaman Depan Kantor	4,68	Maks. 900*)	0,43	Maks. 400*)	426,59	Maks. 30.000*)	73,13	Maks. 230*)	56,10	70**)
		Mess Sentral 2	4,67		0,26		TTD		31,66		49,10	
		Perumahan Karyawan	6,58		0,38		TTD		48,71		59,80	
6	PT Dharmasraya Lestarindo	Perumahan Karyawan	2,90	Maks. 900*)	0,21	Maks. 400*)	27,30	Maks. 30.000*)	-	Maks. 230*)	85,9-87,7	70**)
		Perumahan Umum	1,40		0,12		18,40		-		60.1-64.4	
		Area Boiler	-		-		-		-		51,9-52,3	
		Depan Pos Satpam Pabrik	-		-		-		-		50,6-51,8	
7	PT Transco Pratama	Halaman Depan Kantor	7,21	Maks. 900*)	2,20	Maks. 400*)	264,00	Maks. 30.000*)	156,87	Maks. 230*)	54,80	70**)
		Apron loading ramp	4,25		2,53		TTD		109,22		52,80	
		Perumahan	12,43		3,52		1,21		429,53		85,60	

Keterangan: ttd = tidak terdeteksi

*) PP 41 Tahun 1999 (Baku Mutu Udara Ambien)

***)Kep. 48/MENLH/II/1996 (Baku Mutu Tingkat Kebisingan)

Sumber : Laporan Pelaksanaan RKL RPL masing-masing perusahaan (Incasi Raya Group) Semester I, 2016





**Tabel - 31. Penggunaan Bahan Bakar di Kabupaten Dharmasraya
Tahun: 2016**

No	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri :	0	0	0	4.864	0	0	0	0	0	0	112.000
1	Kimia dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Mesin dan logam dasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Aneka industri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Rumah Tangga :	0	0	0	0	0	3.284.007	0	0	0	0	0
C	Kendaraan :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.374.203	53.298.783
	Mobil beban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penumpang pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penumpang umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bus besar pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bus besar umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Bus kecil pribadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Bus kecil umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Truk besar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Truk kecil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Roda tiga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Roda dua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Data penggunaan bahan bakar diperoleh dari hasil penjualan pertamina dan agen penjualan LPG yang ada di Kab.Dharmasraya

Satuan penggunaan LPG adalah Kg, satuan penggunaan Bensin dan Solar adalah Liter.

Penggunaan bahan bakar bensin termasuk Premium, Peralite, dan Pertamax

Penggunaan bahan bakar solar termasuk Solar, Dexlite, dan Bio Solar

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016





Tabel - 31A. Penggunaan Bahan Bakar per-Bulan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batu bara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Bio massa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Januari	0	0	0	110	0	248.748	0	0	0	3.219.486	4.452.493
2	Februari	0	0	0	110	0	249.099	0	0	0	3.033.685	4.074.014
3	Maret	0	0	0	110	0	266.886	0	0	0	3.175.230	4.118.097
4	April	0	0	0	110	0	262.473	0	0	0	3.220.301	4.114.419
5	Mei	0	0	0	110	0	264.372	0	0	0	3.422.651	4.669.804
6	Juni	0	0	0	130	0	266.331	0	0	0	3.265.065	4.326.776
7	Juli	0	0	0	207	0	270.447	0	0	0	3.713.775	3.646.421
8	Agustus	0	0	0	663	0	270.960	0	0	0	3.363.056	4.681.591
9	September	0	0	0	860	0	283.731	0	0	0	3.367.251	4.552.412
10	Oktober	0	0	0	577	0	297.444	0	0	0	3.519.961	5.012.605
11	November	0	0	0	713	0	294.435	0	0	0	3.359.379	4.507.591
12	Desember	0	0	0	1.164	0	309.081	0	0	0	3.714.361	5.254.556

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Data penggunaan bahan bakar diperoleh dari hasil penjualan Pertamina dan agen penjualan LPG yang ada di Kab. Dharmasraya. Satuan penggunaan LPG adalah Kg, satuan penggunaan Bensin dan Solar adalah Liter.

Penggunaan bahan bakar bensin termasuk Premium, Pertalite, dan Pertamina. Penggunaan bahan bakar solar termasuk Solar, Dexlite, dan Bio Solar.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya, 2016





Tabel - 31B. Penggunaan Bahan Bakar per-Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Sungai Rumbai	0	0	0	480	0	336.129	0	0	0	9.330.348	8.342.411
2	Koto Besar	0	0	0	0	0	213.759	0	0	0	0	0
3	Asam Jujuhan	0	0	0	0	0	12.141	0	0	0	0	0
4	Koto Baru	0	0	0	360	0	378.518	0	0	0	9.908.066	13.123.208
5	Koto Salak	0	0	0	0	0	261.378	0	0	0	0	0
6	Tiumang	0	0	0	0	0	9.390	0	0	0	0	0
7	Padang Laweh	0	0	0	0	0	12.310	0	0	0	0	0
8	Sitiung	0	0	0	3.544	0	343.509	0	0	0	6.720.890	7.521.263
9	Timpeh	0	0	0	0	0	18.690	0	0	0	0	0
10	Pulau Punjung	0	0	0	480	0	1.564.053	0	0	0	14.414.899	24.423.901
11	IX Koto	0	0	0	0	0	134.130	0	0	0	0	0

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Data penggunaan bahan bakar diperoleh dari hasil penjualan pertamina dan agen penjualan LPG yang ada di Kab.Dharmasraya

Satuan penggunaan LPG adalah Kg, satuan penggunaan Bensin dan Solar adalah Liter.

Penggunaan bahan bakar bensin termasuk Premium, Peralite, dan Pertamax

Penggunaan bahan bakar solar termasuk Solar, Dexlite, dan Bio Solar

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel - 31C. Nama dan Lokasi Data Agen LPG di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Nama Agen	Tipe LPG	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)
1	CV Beringin Mitra Sejati	3 Kg	Sikabau, Pulau Punjung
2	CV Tegar Pratama	3 Kg	Sungai Dareh, Pulau Punjung
3	PT Ardhi Putra Padholi	3 Kg	Sei Betung, Koto Baru
4	PT Revpiyaldi Prima	3 Kg	Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai
5	PT Ghasyeela Bumi Dharmasraya	3 Kg	Koto Baru, Kec. Koto Baru
6	PT Dharmasraya Multi Sarana	3 Kg, 12 Kg	Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai
7	PT Polx Perdana Sukses	12 Kg	Kec. Sitiung
8	PT Cahaya Bumi Dharmasraya	12 Kg, BG, 50 Kg	Koto Baru, Kec. Koto Baru

Keterangan : -

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya, 2016 dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel - 31D. Nama dan Lokasi Data Pertamina di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama SPBU	Nama Perusahaan	Alamat
(1)	(2)		(3)
1	SPBU Sialang	SPBU Hj.Hasnidar	Sialang, Kec. Pulau Punjung
2	SPBU Rika	SPBU Hj.Hasnidar	Pulau Punjung, Kec. Pulau Punjung
3	SPBU 13.275.505	PT. Dharma Aditama	Sikabau, Kec. Pulau Punjung
4	SPBU Umega	PT. Umega Sembilan Berlian	Gunung Medan, Kec. Sitiung
5	SPBU 14.275.570	PT. Dharma Aditama	Koto Baru, Kec. Koto Baru
6	SPBU 13.275.512	PT. Jaya Nusa Niaga	Simpang Abai, Kec. Koto Baru
7	SPBU Jefri Abidin	PT. Jefri Abidin	Koto Baru, Kec. Koto Baru
8	SPBU 14.275.586	PT. Dharmasraya Multi Sarana	Sungai Rumbai Batas, Kec. Sungai Rumbai
9	SPBU 13.275.502	PT. Putra Rumbai Mandiri	Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai
10	SPBU Sei Rumbai	PT Ananta Djanur Mandiri	Sungai Rumbai, Kec. Sungai Rumbai

Keterangan :-

Sumber : Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Dharmasraya, 2016 dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel - 32. Penjualan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Dharmasraya Tahun: 2016

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (unit)		
		2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mobil beban	0	0	0
2	Penumpang pribadi	480	509	427
3	Penumpang umum	0	0	0
4	Bus besar pribadi	0	0	0
5	Bus besar umum	1	0	1
6	Bus kecil pribadi	0	0	0
7	Bus kecil umum	0	0	0
8	Truk besar	389	473	246
9	Truk kecil	0	0	0
10	Roda tiga	0	0	0
11	Roda dua	5.556	6.288	4.396

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Sumber : Dirlantas Padang dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel - 32A. Perbandingan Penjualan Kendaraan Bermotor Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (unit)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mobil beban	0	0	0	0
2	Penumpang pribadi	480	509	427	366
3	Penumpang umum	0	0	0	0
4	Bus besar pribadi	0	0	0	0
5	Bus besar umum	1	0	1	2
6	Bus kecil pribadi	0	0	0	0
7	Bus kecil umum	0	0	0	0
8	Truk besar	389	473	246	149
9	Truk kecil	0	0	0	0
10	Roda tiga	0	0	0	0
11	Roda dua	5.556	6.288	4.396	4.332

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Sumber : Dirlantas Padang dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel - 32B. Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Kendaraan	Jumlah (unit)						
		Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Beban	1.683,00	1.948,00	2.631,00	3.307,00	0,00	1.612,00	0,00
2	Penumpang Pribadi	1,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	602,00	366,00
3	Penumpang Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bus besar pribadi	35,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1,00	0,00
5	Bus besar umum	3,00	2,00	2,00	2,00	5,00	0,00	2,00
6	Bus kecil pribadi	34,00	19,00	30,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7	Bus kecil umum	1.500,00	1.272,00	1.807,00	1.571,00	0,00	20,00	0,00
8	Truk Besar	292,00	250,00	681,00	964,00	964,00	268,00	149,00
9	Truk kecil	592,00	681,00	883,00	274,00	1.897,00	881,00	0,00
10	Roda tiga	0,00	2,00	4,00	13,00	12,00	12,00	0,00
11	Roda dua	46.007,00	26.999,00	51.635,00	29.357,00	27.250,00	2.501,00	4.332,00

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Jumlah Kendaraan bermotor tahun 2010 s/d 2015 merupakan data dari dinas Perhubungan Kab.Dharmasraya Tahun 2015.

Jumlah Kendaraan bermotor tahun 2016 merupakan data dari Dirlantas Padang Tahun 2016 untuk penjualan kendaraan bermotor di Kab.Dharmasraya.

Sumber : Dirlantas Padang dan Dinas Perhubungan Kab.Dharmasraya, 2016



**Tabel - 32C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (unit)		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)
1	Mobil Penumpang Umum	0	0	0
2	Mobil Bus	10	9	9
3	Mobil Barang	1.159	1.154	1.154

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Data diperoleh dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
Kab.Dharmasraya Tahun 2016

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel - 32D. Jumlah Tempat Sarana Transportasi Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Tempat Sarana Transportasi	Jumlah (unit)	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Lokasi
		2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terminal Darat	1		
	a) Terminal Transit Sungai Betung	1	Terminal Barang	Sungai Betung, Kecamatan Koto Baru
2	Dermaga	3		
	a) Pelabuhan Sungai di Batu Bakawik	1	Dermaga Sungai	Batu Bakawik, Kecamatan Pulau Punjung
	b) Penyeberangan Sungai Lansat	1	Dermaga Ponton	Sungai Lansat, Kecamatan Sitiung
	c) Penyeberangan Jorong Siguntur	1	Dermaga Ponton	Siguntur, Kecamatan Sitiung

Keterangan : 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Data diperoleh dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kab.Dharmasraya Tahun 2016

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Dharmasraya , 2016



**Tabel - 32E. Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Jenis Angkutan	Jumlah					
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Orang	47.450	54.750	58.400	62.050	65.700	69.350
2	Barang	260	515	702	700	887	890

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Jumlah Orang dan Barang yang terangkut dengan angkutan diperoleh dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kab.Dharmasraya Tahun 2016

Jumlah orang dalam satuan orang, dan jumlah barang dalam satuan Ton

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Dharmasraya , 2016



**Tabel - 33. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan di Kabupaten Dharmasraya
Tahun: 2016**

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)		
		2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jalan Tol	0,000	0,000	0,000
2	Jalan Kelas I	0,000	0,000	0,000
3	Jalan Kelas II	0,000	0,000	0,000
4	Jalan Kelas IIIA	60.620	60.620	60.620
5	Jalan Kelas IIIB	83.500	83.500	83.500
6	Jalan Kelas IIIC	1.035,720	1.035,720	1.035,720

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



Tabel - 33A. Tabel Perbandingan Perubahan Penambahan Ruas Jalan Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (km)			
		2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jalan Tol	0.000	0.000	0.000	0.000
2	Jalan Kelas I	0.000	0.000	0.000	0.000
3	Jalan Kelas II	0.000	0.000	0.000	0.000
4	Jalan Kelas IIIA	60.620	60.620	60.620	60.620
5	Jalan Kelas IIIB	83.500	83.500	83.500	83.500
6	Jalan Kelas IIIC	1,035.720	1,035.720	1,035.720	1,035.720

Keterangan: 0 = adalah data

(-) = tidak ada data

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Dharmasraya, 2016



**Tabel - 34. Dokumen Izin Lingkungan Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UKL UPL	UIPHHK	CV. KURNIA ALAM LESTARI
2	UKL UPL	UIPHHK	UD. ALNUR FAUZIAH
3	UKL UPL	Pelayanan Kesehatan	KLINIK PRATAMA PMC
4	UKL UPL	Menara Telekomunikasi	PT TOWER BTS SUNGAI DAREH
5	UKL UPL	UIPHHK	UD. DZIKRA UTAMA
6	UKL UPL	UIPHHK	CV. TERATAI
7	UKL UPL	Fasilitas Kesehatan	KLINIK PRATAMA VORTUNA
8	UKL UPL	Fasilitas Kesehatan	KLINIK UTAMA BUAH HATI
9	UKL UPL	Produksi Air Minum dalam Kemasan	CV. TIRTA ALAM SUMATERA (SBL)
10	UKL UPL	Pabrik Minyak Kelapa Sawit	PT. KALIDAREH DHARMA AGRO
11	UKL UPL	Pelayanan Kesehatan	KLINIK UTAMA HARAPAN BUNDA
12	SPPL	Manufaktur	Karoseri Bak Truk Efrial Harun
13	SPPL	Agroindustri	Rumah Makan Bukit Tinggi
14	SPPL	Perdagangan	Klinik Suir Syam
15	SPPL	Agroindustri	Heler Katimo
16	SPPL	Jasa	Bengkel Motor Saparudin
17	SPPL	Agroindustri	Industri Kerupuk Bawang Bustanul
18	SPPL	Perdagangan	Distributor Pupuk Nazaruddin
19	SPPL	Industri	Depot Air Minum Noto Susanto
20	SPPL	Perdagangan	Rumah Makan Yance
21	SPPL	Industri	Industri Kerupuk Udang Indrawati
22	SPPL	Perdagangan	Toko Bendri
23	SPPL	Perdagangan	Dagang Pupuk dan Pestisida
24	SPPL	Industri Rumah Tangga	Usaha kerajinan Manik-Manik
25	SPPL	Industri Rumah Tangga	Industri Kerupuk Peyek
26	SPPL	Pelayanan Kesehatan	Apotik Al Kahfi
27	SPPL	Pertanian	Cetak Sawah Baru Kelp. Tani Sawah Godang II
28	SPPL	Pertanian	Cetak Sawah Baru Kelp. Tani Sawah Sungai Kutung
29	SPPL	Pertanian	Cetak Sawah Baru Kelp. Tani Sawah Akau Nyik Lubang
30	SPPL	Pertanian	Cetak Sawah Baru Kelp. Tani Jambu Air
31	SPPL	Perdagangan	Dagang Pupuk dan Pestisida Yarudin Syarif
32	SPPL	Agroindustri	Heler M Jamil
33	SPPL	Perdagangan	Dagang Onderdil dan Pelumas Nofri Hamidzen
34	SPPL	Perdagangan	Dagang Emas OYON
35	SPPL	Industri Rumah Tangga	Industri Kue Rian Asnirani
36	SPPL	Perdagangan	Rumah Makan Nofrika Jaya Sukma
37	SPPL	Perdagangan	Dagang Onderdil H. M. Nasrul
38	SPPL	Perdagangan	Dagang Batu Akik Harmadi
39	SPPL	Perdagangan	Toko Mas Mutiara
40	SPPL	Industri	Depot Air Minum Nora





No	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
41	SPPL	Perdagangan	Apotik Akmal Medica
42	SPPL	Perikanan	Kolam Ikan Surya
43	SPPL	Perbengkelan	Bengkel dan Pencucian Mobil Nurlia Agusfina
44	SPPL	Perdagangan	Dagang Ternak Yulizar
45	SPPL	Perbengkelan	Bengkel Las Masiran
46	SPPL	Manufaktur	Pandawa Trali
47	SPPL	Perdagangan	Distributor Pupuk Kaptan Maryon Medi
48	SPPL	Perdagangan	Dagang Emas Agusrian
49	SPPL	Perdagangan	Apotik Puti Aurora
50	SPPL	Perdagangan	Rumah Makan Lesehan Amor
51	SPPL		
52	SPPL	Perdagangan	Dagang Ternak
53	SPPL	Perdagangan	Dagang Emas
54	SPPL	Perbengkelan	Bengkel Motor Basuki Rahmat
55	SPPL	Perdagangan	Apotik Eko Widyani
56	SPPL	Perdagangan	Klinik Bukit Raya
57	SPPL	Jasa	Salon Richi
58	SPPL	Manufaktur	Perabot Pitu Aluminium
59	SPPL	Peternakan	Sarang Walet Sumarni
60	SPPL	Perdagangan	Agen Gas LPG 3 Kg Yetti Marsanti
61	SPPL	Perdagangan	Apotik Mardiyus
62	SPPL	Perdagangan	Apotik dendi
63	SPPL	Agroindustri	Hele Titis Wahyuningsih
64	SPPL	Manufaktur	Aneka Kaca
65	SPPL	Perdagangan	Daur Ulang Limbah CV. Sejati Gonsel
66	SPPL	Agroindustri	Pabrik Tahu KW Tahu
67	SPPL	Agen gas LPG 3 Kg	PT. Tegar Pratama
68	SPPL	Perdagangan	Apotik Sido Muncul
69	SPPL	Perbengkelan	Bengkel Mobil
70	SPPL	Dagang Onderdil	Dagang Onderdil Damai Motor
71	SPPL	Perdagangan	Dagang Pupuk Admen Fajri
72	SPPL	Perbengkelan	Service Dinamo Efendi
73	SPPL	Manufaktur	Interior dan Furniture
74	SPPL	Perdagangan	Toko Obat Riko Madani
75	SPPL	Perdagangan	Dagang Pupuk Mutiara Kandang
76	SPPL	Perumahan	PT. Hikmah Karya Nusantara
77	SPPL	Perdagangan	Dagang Ayam Potong Tarmizi
78	SPPL	Peternakan	Ternak Ayam Kusnadi
79	SPPL	Perdagangan	Dagang Teknak Sapi Akhmad Yani
80	SPPL	Perbengkelan	Bengkel Mobil Batu Elang Service
81	SPPL	Peternakan	Peternakan Ayam Yuli Komsiasi
82	SPPL	Manufaktur	Pembangunan Gedung PT. BPD

Keterangan: UKL-UPL= Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan

SPPL= Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel - 35. Perusahaan Yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PT Binapratama Sakatojaya	Pabrik Kelapa Sawit	Perubahan Izin Penyimpanan Sementara LB3	189.1/305/KPTS -BUP/2016
2	PT Incasi Raya Pangian	Pabrik Kelapa Sawit	Perubahan Izin Penyimpanan Sementara LB3	189.1/306/KPTS -BUP/2016
3	PT Selago Makmur Plantation	Pabrik Kelapa Sawit	Perubahan Izin Penyimpanan Sementara LB3	189.1/304/KPTS -BUP/2016
4	PT Sumbar Andalas Kencana	Pabrik Kelapa Sawit	Perubahan Izin Penyimpanan Sementara LB3	189.1/303/KPTS -BUP/2016

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



Tabel - 36. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT Tidar Kerinci Agung	5 April 2016	Taat
		29 Juli 2016	Taat
		8 Agustus 2016	Taat
2	PT Incasi Raya Pangian	24 Maret 2016	Taat
		26 Juli 2016	Taat
		13 Oktober 2016	Taat
3	PT Selago Makmur Plantation	21 Maret 2016	Taat
		22 Juli 2016	Taat
		18 Oktober 2016	Taat
4	PT Bina Pratama Sakato Jaya	15 Maret 2016	Taat
		19 Juli 2016	Taat
		11 Oktober 2016	Taat
5	PT Sumbar Andalas Kencana	17 Maret 2016	Taat
		20 Juli 2016	Taat
		13 Oktober 2016	Taat
6	PT Transco Pratama	28 Maret 2016	Taat
		28 Juli 2016	Taat
		18 November 2016	Taat
7	PT Dharmasraya Lestarindo	28 Maret 2016	Tidak Taat
		3 Agustus 2016	Taat
		16 November 2016	Taat
8	PT Damasraya Sawit Lestari	14 April 2016	Tidak Taat
		11 Agustus 2016	Taat
		24 November 2016	Taat
9	SPBU Sungai Rumbai	18 April 2016	Taat
10	SPBU Tarantang	20 April 2016	Taat
11	SPBU Sialang	19 April 2016	Taat
12	SPBU Pulau Punjung	13 April 2016	Taat
13	TPS LB3 PT BPSJ kebun	25 April 2016	Taat
14	TPS LB3 PT SAK Kebun	26 April 2016	Taat
15	TPS LB3 PT SMP Kebun	21 April 2016	Taat
16	TPS LB3 PT Incasi Raya Kebun	29 April 2016	Taat

Keterangan: Taat = Sudah memenuhi kewajiban sesuai dengan yang dipersyaratkan
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 37. Bencana Banjir, Korban dan Kerugian di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Total Area Terendam (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)		
			Jumlah Korban Mengungsi	Jumlah Korban Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sungai Rumbai	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koto Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Asam Jujuhan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koto Baru	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koto Salak	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Tiumang	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Padang Laweh	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sitiung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Timpeh	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pulau Punjung	3,00	0,00	0,00	0,00
11	IX Koto	7,00	0,00	0,00	0,00

Keterangan: 0 adalah data

1. Jumlah kejadian s.d 13 Desember 2016 adalah sebanyak 14 kejadian
2. Jumlah terendam (rumah ibadah, rumah tinggal, kantor, dan kios sebanyak 394 unit
3. Jembatan terendam sebanyak 2 unit
4. Jumlah jalan terendam sebanyak 17 titik

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 38. Bencana Kekeringan, Luas dan Kekeringan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Total Area (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Rumbai	0,00	0,00
2	Koto Besar	0,00	0,00
3	Asam Jujuhan	0,00	0,00
4	Koto Baru	0,00	0,00
5	Koto Salak	0,00	0,00
6	Tiumang	0,00	0,00
7	Padang Laweh	0,00	0,00
8	Sitiung	0,00	0,00
9	Timpeh	0,00	0,00
10	Pulau Punjung	0,00	0,00
11	IX Koto	0,00	0,00

Keterangan: Tidak ada bencana kekeringan yang terjadi selama tahun 2016
 Bencana kekeringan yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya yaitu merupakan kesulitan air bersih yang hampir merata di beberapa kecamatan, untuk itu BPBD Kab. Dharmasraya turun langsung ke lapangan untuk mendistribusikan air bersih

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Dharmasraya, 2016



Tabel - 39. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Rumbai	1,5	15.000.000,00
2	Koto Besar	0,0	0,00
3	Asam Jujuhan	0,0	0,00
4	Koto Baru	24,0	1.245.000.000,00
5	Koto Salak	0,0	0,00
6	Tiumang	0,0	0,00
7	Padang Laweh	0,0	0,00
8	Sitiung	8,5	375.000.000,00
9	Timpeh	0,0	0,00
10	Pulau Punjung	5,0	45.000.000,00
11	IX Koto	0,0	0,00

Keterangan: 0 adalah data

Data bencana kebakaran hutan/lahan ini berdasarkan sarana pemadam kebakaran yang turun langsung ke lapangan pada saat kejadian

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel - 39A. Perbandingan Luas Kebakaran Lahan Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Perkiraan Luas Kebakaran (Ha)				
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sungai Rumbai	0,00	0,00	4,00	16,00	1,50
2	Koto Besar	8,00	2,00	2,00	3,00	0,00
3	Asam Jujuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koto Baru	11,00	6,00	7,00	11,00	24,00
5	Koto Salak	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6	Tiumang	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
7	Padang Laweh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sitiung	5,00	10,00	9,00	19,00	8,50
9	Timpeh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pulau Punjung	9,50	14,00	18,00	27,00	5,00
11	IX Koto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Keterangan: Khusus Kebakaran Lahan Pertanian dan Perkebunan
0 adalah data

Sumber : Buku Data SLHD Kab. Dharmasraya Tahun 2015 dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 39B. Sebaran Titik Panas Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas (titik)	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat	Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sungai Rumbai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Koto Besar	4,0	2/19/2016	S = -1,165 T = 101,5	BONJOL	ASMC	NOAA19
			3/9/2016	S = -1,15 T = 101,53	BONJOL	ASMC	NOAA19
			4/29/2016	S = -1,12881 T = 101,67416	ABAI SIAT	LAPAN	LPN-MODIS
			9/27/2016	S = -1,16 T = 101,48	BONJOL	ASMC	NOAA19
3	Asam Jujuhan	6,0	5/17/2016	S = -1,52 T = 101,58	BATU KANGKUNG	ASMC	NOAA19
			10/11/2016	S = -1,41179 T = 101,672	SUNGAI LIMAU	LAPAN	LPN-NPP
			10/11/2016	S = -1,41288 T = 101,665	SUNGAI LIMAU	LAPAN	LPN-NPP
			12/16/2016	S = -1,48 T = 101,6	BATU KANGKUNG	ASMC	NOAA19
			12/19/2016	S = -1,42258 T = 101,645	SUNGAI LIMAU	LAPAN	LPN-NPP
			12/19/2016	S = -1,42387 T = 101,636	SUNGAI LIMAU	LAPAN	LPN-NPP
4	Koto Baru	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas (titik)	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat	Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Koto Salak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Tiumang	1,0	8/17/2016	S = -1,06756 T = 101,77054	Sei Langkok	LAPAN	LPN-MODIS
7	Padang Laweh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sitiung	1,0	9/3/2016	S = -1,03971 T = 101,605	KOTO BARU	LAPAN	LPN-NPP
9	Timpeh	49,0	5/20/2016	S = -0,91 T = 101,585	TIMPEH	ASMC	NOAA19
			6/5/2016	S = -0,905761 T = 101,702	TABEK	LAPAN	LPN-NPP
			6/9/2016	S = -0,83929 T = 101,62770	TARATAK TINGGI, HL, BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	LAPAN	LPN-MODIS
			6/13/2016	S = -0,935365 T = 101,68	PANYUBARANGAN	LAPAN	LPN-NPP
			6/23/2016	S = -0,89 T = 101,71	TABEK	ASMC	NOAA19
			6/30/2016	S = -0,87 T = 101,625	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			6/30/2016	S = -0,84 T = 101,65	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			6/30/2016	S = -0,870657 T = 101,628	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-NPP
			6/30/2016	S = -0,87144 T = 101,62814	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas (titik)	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat	Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			7/1/2016	S = -0,89 T = 101,67	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			7/1/2016	S = -0,9 T = 101,62	TIMPEH	ASMC	NOAA19
			7/1/2016	S = -0,88575 T = 101,62309	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/1/2016	S = -0,88575 T = 101,62309	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,87661 T = 101,71083	PANYUBARANGAN, HL, BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,88932 T = 101,62181	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,88805 T = 101,63072	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,87661 T = 101,71083	PANYUBARANGAN, HL, BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,88932 T = 101,62181	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas (titik)	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat	Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			7/2/2016	S = -0,88805 T = 101,63072	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,87661 T = 101,71083	PANYUBARANGAN, HL, BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,88932 T = 101,62181	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,88805 T = 101,63072	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/2/2016	S = -0,871759 T = 101,628	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-NPP
			7/2/2016	S = -0,880839 T = 101,63	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-NPP
			7/3/2016	S = -0,87 T = 101,645	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			7/5/2016	S = -0,83408 T = 101,66171	TARATAK TINGGI, HL, BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/5/2016	S = -0,83408 T = 101,66171	TARATAK TINGGI, HL, BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	LAPAN	LPN-MODIS





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas (titik)	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat	Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			7/6/2016	S = -0,885972 T = 101,627	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-NPP
			7/9/2016	S = -0,88767 T = 101,62572	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/9/2016	S = -0,87848 T = 101,62433	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/9/2016	S = -0,88767 T = 101,62572	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			7/9/2016	S = -0,87848 T = 101,62433	TARATAK TINGGI	LAPAN	LPN-MODIS
			8/7/2016	S = -0,844 T = 101,638	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			8/13/2016	S = -0,87 T = 101,64	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			8/14/2016	S = -0,885 T = 101,655	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			8/16/2016	S = -0,868 T = 101,665	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			8/29/2016	S = -0,88 T = 101,675	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas (titik)	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat	Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			10/4/2016	S = -0,89 T = 101,63	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			10/11/2016	S = -0,861179 T = 101,597	PANYUBARANGAN	LAPAN	LPN-NPP
			12/13/2016	S = -0,855 T = 101,59	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			12/13/2016	S = -0,855 T = 101,62	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			12/14/2016	S = -0,88 T = 101,61	TIMPEH	ASMC	NOAA19
			12/16/2016	S = -0,87 T = 101,61	TIMPEH	ASMC	NOAA19
			12/16/2016	S = -0,84 T = 101,595	TARATAK TINGGI, HL, BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	ASMC	NOAA19
			12/17/2016	S = -0,85 T = 101,625	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			12/21/2016	S = -0,84 T = 101,61	TARATAK TINGGI, HL, BUKIT BATABUH LUBUK JAMBI	ASMC	NOAA19





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas (titik)	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat	Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			12/21/2016	S = -0,868 T = 101,6	TIMPEH	ASMC	NOAA19
			12/22/2016	S = -0,86 T = 101,62	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			12/23/2016	S = -0,86 T = 101,615	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
10	Pulau Punjung	1,0	2/19/2016	S = -1,14 T = 101,455	SIKABAU	ASMC	NOAA19
11	IX Koto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Keterangan: 0 adalah data

Data sebaran titik panas yang terdeteksi dilakukan pemantauan oleh BMKG dan LAPAN berdasarkan citra satelit

Sumber : sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran, 2016





Tabel - 39C. Sebaran Titik Panas Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
1	Sungai Rumbai	1,0	20150130	S -1,190	T 101,810	SUNGAI RUMBAI TIMUR	ASMC	NOAA19
			20150815	S -1,160	T 101,495	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150816	S -1,160	T 101,495	BONJOL	ASMC	NOAA19
2	Koto Besar	25,0	20150111	S -1,120	T 101,550	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150112	S -1,250	T 101,500	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150705	S -1,150	T 101,500	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150706	S -1,210	T 101,490	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150722	S -1,160	T 101,485	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150727	S -1,160	T 101,490	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150729	S -1,150	T 101,470	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150729	S -1,180	T 101,485	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150730	S -1,160	T 101,495	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150822	S -1,180	T 101,510	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150822	S -1,150	T 101,520	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150823	S -1,160	T 101,410	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150830	S -1,174	T 101,498	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150831	S -1,140	T 101,505	BONJOL	ASMC	NOAA19
20150831	S -1,247	T 101,517	BONJOL	ASMC	NOAA19			



2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			20150901	S -1,270	T 101,500	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150901	S -1,220	T 101,500	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150901	S -1,146	T 101,506	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150901	S -1,250	T 101,515	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150902	S -1,150	T 101,500	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150918	S -1,170	T 101,505	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20150918	S -1,190	T 101,510	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20151004	S -1,210	T 101,450	BONJOL	ASMC	NOAA19
			20151005	S -1,180	T 101,690	KOTO BESAR	ASMC	NOAA19
20151023	S -1,170	T 101,520	BONJOL	ASMC	NOAA19			
3	Asam Jujuhan	6,0	20150111	S -1,490	T 101,600	BATU KANGKUNG	ASMC	NOAA19
			20150831	S -1,430	T 101,630	SUNGAI LIMAU	ASMC	NOAA19
			20150901	S -1,470	T 101,610	BATU KANGKUNG	ASMC	NOAA19
			20150901	S -1,430	T 101,625	SUNGAI LIMAU	ASMC	NOAA19
			20150911	S -1,470	T 101,565	LUBUK BESAR	ASMC	NOAA19
			20150918	S -1,450	T 101,620	SUNGAI LIMAU	ASMC	NOAA19
4	Koto Baru	3,0	20150105	S -1,082	T 101,765	SUNGAI LANGKOK	ASMC	NOAA19
			20151022	S -1,010	T 101,700	PADANG BINTUNGAN	ASMC	NOAA19
			20151101	S -1,130	T 101,760	KOTO BARU	ASMC	NOAA19
5	Koto Salak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Nagari	Sumber	Satelit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		
6	Tiumang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7	Padang Laweh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8	Sitiung	2,0	20150129	S	-1,080	T	101,590	GUNUNG MEDAN	ASMC	NOAA19
			20151010	S	-0,997	T	101,645	SITIUNG	ASMC	NOAA19
9	Timpeh	34,0	20150112	S	-0,890	T	101,705	TABEK	ASMC	NOAA19
			20150222	S	-0,890	T	101,690	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150518	S	-0,905	T	101,680	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150519	S	-0,940	T	101,655	RANAH PALABI	ASMC	NOAA19
			20150623	S	-0,910	T	101,685	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150702	S	-0,890	T	101,670	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150702	S	-0,920	T	101,680	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150702	S	-0,880	T	101,690	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150703	S	-0,887	T	101,675	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150704	S	-1,140	T	101,500	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150704	S	-0,830	T	101,620	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			20150704	S	-0,850	T	101,660	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			20150704	S	-0,875	T	101,665	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
20150705	S	-0,837	T	101,623	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19			
20150705	S	-0,890	T	101,670	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19			





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Nagari	Sumber	Satelit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
			20150709	S -0,910	T 101,675	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150710	S -0,870	T 101,660	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150711	S -0,880	T 101,670	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150712	S -0,860	T 101,650	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			20150712	S -0,840	T 101,660	TARATAK TINGGI	ASMC	NOAA19
			20150721	S -0,875	T 101,670	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150723	S -0,900	T 101,685	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150730	S -0,895	T 101,665	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150731	S -0,890	T 101,690	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150901	S -0,930	T 101,600	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150901	S -0,860	T 101,665	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150901	S -0,895	T 101,695	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150902	S -0,945	T 101,575	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150902	S -0,920	T 101,670	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150908	S -0,850	T 101,670	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20150918	S -0,900	T 101,700	TABEK	ASMC	NOAA19
			20151005	S -0,890	T 101,635	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20151006	S -0,960	T 101,610	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19
			20151101	S -0,910	T 101,620	PANYUBARANGAN	ASMC	NOAA19





2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Kecamatan	Jumlah Titik Panas	Waktu (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Nagari	Sumber	Satelit		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)		
10	Pulau Punjung	7,0	20150516	S	-0,910	T	101,470	GUNUNG SELASIH	ASMC	NOAA19
			20150623	S	-1,130	T	101,490	TEBING TINGGI	ASMC	NOAA19
			20150818	S	-1,130	T	101,465	SIKABAU	ASMC	NOAA19
			20150829	S	-1,110	T	101,435	SIKABAU	ASMC	NOAA19
			20150901	S	-1,090	T	101,485	BUKIK MINDAWA	ASMC	NOAA19
			20150910	S	-1,130	T	101,490	TEBING TINGGI	ASMC	NOAA19
			20151223	S	-1,100	T	101,460	SIKABAU	ASMC	NOAA19
11	IX Koto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Keterangan: 0 adalah data

Data sebaran titik panas yang terdeteksi dilakukan pemantauan oleh BMKG dan LAPAN berdasarkan citra satelit

Sumber : sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran, 2016





**Tabel - 39D. Perbandingan Sebaran Titik Panas Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Bulan	Jumlah Hotspot		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari	0	7	0
2	Februari	7	1	2
3	Maret	6	0	1
4	April	3	0	1
5	Mei	6	3	2
6	Juni	17	2	8
7	Juli	17	26	23
8	Agustus	3	11	6
9	September	16	20	2
10	Oktober	4	7	4
11	November	0	2	0
12	Desember	0	1	13

Keterangan : 0 adalah data

Data sebaran titik panas yang terdeteksi dilakukan pemantauan oleh BMKG dan LAPAN berdasarkan citra satelit "

Data tahun 2014 berdasarkan Statistik Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

Sumber : Buku Data SLHD Kab.Dharmasraya Tahun 2015 dan website sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran, 2016"



**Tabel - 39E. Titik Api Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Tahun	Jumlah Titik Api
(1)	(2)	(3)
1	2010	26
2	2011	108
3	2012	232
4	2013	112
5	2014	79
6	2015	80
7	2016	62

Keterangan: 0 adalah data

Data sebaran titik panas yang terdeteksi dilakukan pemantauan oleh BMKG dan LAPAN berdasarkan citra satelit Tahun 2015 dan 2016"Data tahun 2010 s/d 2014 berdasarkan Statistik Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014

Sumber : Buku Data SLHD Kab.Dharmasraya Tahun 2015 dan website sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran, 2016



Tabel - 40. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, Kerugian di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (Jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sungai Rumbai	Tidak ada bencana	0,00	0,00
2	Koto Besar	Tidak ada bencana	0,00	0,00
3	Asam Jujuhan	Tidak ada bencana	0,00	0,00
4	Koto Baru	Longsor	0,00	65.000.000,00
5	Koto Salak	Tidak ada bencana	0,00	0,00
6	Tiumang	Tidak ada bencana	0,00	0,00
7	Padang Laweh	Tidak ada bencana	0,00	0,00
8	Sitiung	Angin Putting Beliung	0,00	120.000.000, 00
9	Timpeh	Tidak ada bencana	0,00	0,00
10	Pulau Punjung	Angin Putting Beliung	0,00	236.810.000,00
11	IX Koto	Tidak ada bencana	0,00	0,00

Keterangan: 0 adalah data

Selama tahun 2016 terdapat 1 (satu) jembatan rusak karena longso

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Dharmasraya, 2016



Tabel - 41. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sungai Rumbai	51,06	23,561	4,25	461,35
2	Koto Besar	560,57	25,305	1,35	45,14
3	Asam Jujuhan	485,41	16,325	7,20	33,63
4	Koto Baru	221,2	33,173	2,04	149,80
5	Koto Salak	121,45	16,603	1,28	136,71
6	Tiumang	134,43	11,687	0,54	88,92
7	Padang Laweh	60,62	7,408	5,17	122,20
8	Sitiung	124,57	25,984	1,70	208,59
9	Timpeh	323,01	15,033	1,51	46,54
10	Pulau Punjung	443,16	45,727	3,79	103,18
11	IX Koto	500,5	8,507	2,14	17,00

Keterangan: Jumlah penduduk berdasarkan angka proyeksi
Jumlah penduduk dalam satuan jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel - 41A. Perbandingan Jumlah Penduduk Data BPS Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sungai Rumbai	19.598	21.649	22.571	23.561
2	Koto Besar	24.610	24.614	25.000	25.305
3	Asam Jujuhan	11.629	14.176	15.169	16.325
4	Koto Baru	31.073	31.828	32.532	33.173
5	Koto Salak	16.214	16.174	16.417	16.603
6	Tiumang	11.893	11.555	11.648	11.687
7	Padang Laweh	5.872	6.686	7.028	7.408
8	Sitiung	24.802	25.102	25.577	25.984
9	Timpeh	14.492	14.577	14.826	15.033
10	Pulau Punjung	38.990	42.396	44.018	45.727
11	IX Koto	7.928	8.148	8.334	8.507

Keterangan: Jumlah penduduk berdasarkan angka proyeksi
Jumlah penduduk dalam satuan jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 42. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Kabupaten Dharmasra Tahun : 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungai Rumbai	23.561	64,79
2	Koto Besar	25.305	69,59
3	Asam Jujuhan	16.325	44,89
4	Koto Baru	33.173	91,23
5	Koto Salak	16.603	45,66
6	Tiumang	11.687	32,14
7	Padang Laweh	7.408	20,37
8	Sitiung	25.984	71,46
9	Timpeh	15.033	41,34
10	Pulau Punjung	45.727	125,75
11	IX Koto	8.507	23,39

Keterangan: Jumlah penduduk berdasarkan angka proyeksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016



**Tabel - 43. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi dan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengadaan Tong Sampah	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan sekolah SD Neg. 08 Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
3	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Batang Asahan/Sei. Patapahan	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
4	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Lubuk Paraku	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
5	Konstruksi Jaringan Irigasi DI. Lubuk Talaok	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
6	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Mudik Banai	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
7	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Sungai Betung Nag. Silago	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
8	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Rawa Bintungan Koto Padang	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
9	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Tarok Jaya Koto Baru	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
10	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Ranah Parupuk (Siguntur)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
11	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Sepakat Siguntur	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
12	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Mudik Lago	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
13	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Sungai Batang Bugah Tengah	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
14	Konstruksi Jaringan Irigasi D.I Air Gemuruh Siguntur	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
15	Pemasangan Batu Batang Mimpi dan Rawa Bengkoang	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
16	Pengembangan Alur Sungai - Sungai Batang Momong IX Koto (Batu Manangih)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
17	Batu Bronjong Jr. Pasir Mayang Nag. Abai Siat	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
18	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET I (DI. Batang Timpeh Usau)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
19	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET II (DI. Sarana Baru)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
20	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan



No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
	III (DI. Batang Mimpi)		Umum
21	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET IV (DI. Sijawi Jawi)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
22	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET V (DI. Sungai Lamak, DI. Sei. Patapahan/Sei. Asahan, DI. Balik Parit, DI. Aur Duri Calau, DI. Batu Agung)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
23	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET VI (DI. Sungai Pinang)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
24	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET VII (DI. Sei Ambacang)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
25	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET VIII (DI. Bugah Kecil)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
26	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET IX (DI. Mudik Lago)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
27	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET X (DI. Timbulun Buyieh)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
28	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET XI (DI. Batang Rambah)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
29	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET XII (DI. Tarok Jaya)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
30	Konstruksi Jaringan Irigasi PAKET XIII (DI. Sungai Bungin)	Kab. Dharmasraya	Dinas Pekerjaan Umum
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Tiumbang Jorong Lagan Jaya (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Sitiung Jorong Lubuk Aur (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
33	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Sungai Rumbai Jorong Tawakal (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Koto Besar Jorong Koto Ranah (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Koto Salak Jorong Padang Tengah II (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)



No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Kecamatan Timpeh Jorong Marga Jaya (IPAL Komunal dan MCK Plus)	Kab. Dharmasraya	Swakelola Masyarakat (KSM)
37	Pengadaan Solar Cell	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
38	Pengadaan pembangunan pengelolaan limbah padat menjadi biogas beserta instalasi dan asesorisnya di Kec. Pl. Punjung	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
39	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
40	Pengadaan Tanaman Hias/Pelindung (Bunga Bougenvile)	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
41	Pengadaan Peralatan Pencacah Sampah	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
42	Pengadaan Bangunan Bank Sampah (Green Store)	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
43	Pembangunan dan Pengadaan Taman Sekolah SMP 1 Sitiung	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup
44	Pembangunan dan Pengadaan Taman Sekolah SD Padang Duri Pulau Punjung	Kab. Dharmasraya	Dinas Lingkungan Hidup

Keterangan : Merupakan kegiatan fisik lingkungan yang dilaksanakan tahun 2016

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dharmasraya, 2016 dan Dinas Lingkungan Hidup, 2016



Tabel - 44. Status Pengaduan Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Masalah Yang Diadukan	Status
(1)	(2)	(3)
1	Dugaan pencemaran air Sungai Lalo akibat luapan IPAL PT Bina Pratama Sakato Jaya	sudah ditindaklanjuti dengan pengawasan dan mediasi
2	Dugaan pencemaran udara akibat emisi asphalt mixing plant PT Cahaya Tunggal Abadi	sudah ditindaklanjuti dengan pengawasan dan sanksi administratif
3	Dugaan kerusakan terkikisnya DAS Sungai Batanghari akibat kegiatan PT Kharisma Wirajaya Perkasa	sudah ditindaklanjuti dengan pengawasan dan sanksi administratif
4	Dugaan kerusakan terkikisnya DAS Sungai Batanghari akibat Ilegal Mining	sudah ditindaklanjuti dengan pelimpahan pada kepolisian
5	Dugaan pencemaran air akibat limbah kegiatan rumah makan mengalir pada lahan pelapor	sudah ditindaklanjuti dengan pengawasan dan mediasi
6	Dugaan pencemaran air akibat limbah pabrik tahu pada Nagari Sialang Gaung	sudah ditindaklanjuti dengan pengawasan dan mediasi
7	Dugaan pencemaran air Sungai Lalo dan penyebab ikan mati akibat limpasan air limbah PT BPSJ	sudah ditindaklanjuti dengan pengawasan dan mediasi
8	Dugaan pencemaran Sungai Siat akibat aktifitas pabrik kelapa sawit PT Damasraya Sawit Lestari	sudah ditindaklanjuti dengan pengawasan dan mediasi
9	Dugaan limpasa air drainase kegiatan pertambangan PT SLN masuk pada lahan masyarakat	sudah ditindaklanjuti dengan pengawasan dan mediasi
10	Dugaan pencemaran Sungai Pangian akibat kegiatan pabrik kelapa sawit PT Kemilau Permata Sawit	sudah ditindaklanjuti dengan pelaporan pada Bapedalda Propinsi (kewenangan lintas kabupaten)*

Keterangan : * Permasalahan sudah ditindak lanjuti namun sampai akhir Desember 2016 masih dalam proses

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 45. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama LSM	Alamat
(1)	(2)	(3)
1	WWF Program RIMBA Cluster Muarobungi, Tebo, Kuantan Sengingi dan Dharmasraya	Sungai Dareh Pulau Punjung
2	Warsi Program Hutan Nagari	Pulau Punjung

Keterangan : (-) adalah Tidak ada komponen

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 46. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Nama Orang (Kelompok/Organisasi)	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Nirwasita Tantra	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
2	Jorong Padang Sidondang	Program Kampung Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
3	Jorong Piruko Utara	Program Kampung Iklim	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
4	SDN 06 Pulau Punjung	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
5	SMPN 2 Pulau Punjung	Adiwiyata Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2016
6	SMPN 1 Sitiung	Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat	BAPPEDALDA Provinsi Sumatera Barat	2016
7	SDN 12 Koto Baru	Adiwiyata Provinsi Sumatera Barat	BAPPEDALDA Provinsi Sumatera Barat	2016

Keterangan: -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



**Tabel - 47. Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat di Kabupaten Dharmasraya
Tahun : 2016**

No	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Jorong Piruko Utara	Mar-16
2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Jorong Padang Sidondang	Mar-16
3	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Nagari Koto Ranah	Apr-16
4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Nagari Koto Tinggi	Apr-16
5	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Nagari Koto Laweh	Apr-16

Keterangan : Kegiatan yang diinisiasi oleh Masyarakat dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kab,Dharmasraya

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya, 2016



Tabel - 48. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Keputusan Bupati	189.1/35/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS CETAK SAWAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
2	Keputusan Bupati	189.1/43/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) SE KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
3	Keputusan Bupati	189.1/46/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA DAN PALAKSANA DISTRIBUSI BERAS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
4	Keputusan Bupati	189.1/47/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN PAGU DAN TITIK DISTRIBUSI BERAS UNTUK MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (RASTRA/RASKIN) DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
5	Keputusan Bupati	189.1/60/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PETISIDA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
6	Keputusan Bupati	189.1/70/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN OBAT, REAGEN DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
7	Keputusan Bupati	189.1/71/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IU-IPHHK) CV. KURNIA ALAM LESTARI



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Keputusan Bupati	189.1/72/KPTS-BUP/2016	PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNAN PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT KEPADA PT. KALI DAREH DHARMA ARGO
9	Keputusan Bupati	189.1/74/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BUMI GRIYA INDAH PT. BUMI KARYA ANUGRAH
10	Keputusan Bupati	189.1/76/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IU-IPHHK) UD. ALNUR FAUZIAH ES.V
11	Keputusan Bupati	189.1/77/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA
12	Keputusan Bupati	189.1/78/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
13	Keputusan Bupati	189.1/82/KPTS-BUP/2016	PENUNJUKAN FASILITAS KESEHATAN PENERIMA ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Keputusan Bupati	189.1/93/KPTS-BUP/2016	PENUNJUKAN PETUGAS PENGENTRIAN LAPORAN PUPUK BERSUSIDI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
15	Keputusan Bupati	189.1/96/KPTS-BUP/2016	IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3 PABRIK KELAPA SAWIT PT DAMASRAYA SAWIT LESTARI
16	Keputusan Bupati	189.1/97/KPTS-BUP/2016	IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KEGIATAN INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT KE AIR ATAU SUMBER AIR KELAPA SAWIT PT. DHARMASRYA SAWIT LESTARI
17	Keputusan Bupati	189.1/106/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI CALON SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
18	Keputusan Bupati	189.1/107/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN SEKOLAH BINAAN ADIWIYATA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
19	Keputusan Bupati	189.1/112/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ERADIKASI POLIO KABUPATEN DHARMASRAYA
20	Keputusan Bupati	189.1/116/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGAUNTUK KORBAN BENCANA ALAM TANAH LONSOR DI JORONG SUNGAI NILI NAGARI SUNGAI KAMBUT KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
21	Keputusan Bupati	189.1/119/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN KESEKRETARIATAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN DHARMASRAYA MASA BAKTI 2016-2021





No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
22	Keputusan Bupati	189.1/183/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH SEBAGAI TEMPAT REHABILITASI RAWAT JALAN BAGI PECANDU NARKOBA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
23	Keputusan Bupati	189.1/199/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN PELAKSANA ELIMINASI DAN TIM PERANGKAP HEWAN PENULAR RABIES (HPR) PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN DHARMASRAYA
24	Keputusan Bupati	189.1/210/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IU-IPHHK) CV. DZIKRA UTAMA
25	Keputusan Bupati	189.1/211/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IU-IPHHK) CV. TERATAI
26	Keputusan Bupati	189.1/212/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA PERTAMA MEDICAL CENTRE
27	Keputusan Bupati	189.1/213/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TOWER BERSAMA BTS (BASE TRANSCIEVER STATION) SUNGAI DAREH PT. TOWER BERSAMA
28	Keputusan Bupati	189.1/218/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN KEBAKARAN DI JORONG KOTO LAMO NAGARI PADANG LAWEH KECAMATAN PADANG LAWEH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
29	Keputusan Bupati	189.1/219/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ANGIN PUTING BELIUNG DI JORONG KUBANG PANJANG NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
30	Keputusan Bupati	189.1/220/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN ANGIN PUTTING BELIUNG DI JORONG SIMPANG POGANG NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
31	Keputusan Bupati	189.1/233/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR DI JORONG LUBUK PAUH NAGARI BANAI KEC IX KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA
32	Keputusan Bupati	189.1/247/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN BAHAN MAKANAN BERBAHAYA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
33	Keputusan Bupati	189.1/248/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) CV. TIRTA ALAM SUMATERA (SBL)
34	Keputusan Bupati	189.1/267/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN KECAMATAN KOTO BESAR SEBAGAI KECAMATAN BESIHI HIJAU KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
35	Keputusan Bupati	189.1/270/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA VORTUNA



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
36	Keputusan Bupati	189.1/271/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN UTAMA BUAH HATI PT RUMAH SAKIT BERSALIN BUAH HATI
37	Keputusan Bupati	189.1/272/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT PT. KALIDAREH DHARMA AGRO
38	Keputusan Bupati	189.1/274/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJAS TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ANGIN PUTTING BELIUNG DI JORONG PASAR PULAU PUNJUNG NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
39	Keputusan Bupati	189.1/279/KPTS-BUP/2016	Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014
40	Keputusan Bupati	189.1/299/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN KEBAKARAN DI JORONG KOTO NAGARI GUNUNG MEDAN KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
41	Keputusan Bupati	189.1/303/KPTS-BUP/2016	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 189.1/312/KPTS-BUP/2014 TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PABRIK DAN KEBUN KELAPA SAWIT PT. SUMBAR ANDALAS KENCANA



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
42	Keputusan Bupati	189.1/304/KPTS-BUP/2016	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 189.1/314/KPTS-BUP/2014 TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PABRIK DAN KEBUN KELAPA SAWIT PT. SELAGO MAKMUR PLANTATION
43	Keputusan Bupati	189.1/305/KPTS-BUP/2016	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 189.1/313/KPTS-BUP/2014 TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PABRIK DAN KEBUN KELAPA SAWIT PT. BINA PRATAMA SAKOTA JAYA
44	Keputusan Bupati	189.1/306/KPTS-BUP/2016	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 189.1/315/KPTS-BUP/2014 TENTANG IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PABRIK DAN KEBUN KELAPA SAWIT PT. INCASI RAYA PANGIAN
45	Keputusan Bupati	189.1/310/KPTS-BUP/2016	PENCABUTAN KEBUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 189.1/412/KPTS-BUP/2015 TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE DAN PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN DHARMASRAYA
46	Keputusan Bupati	189.1/318/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN KEBAKARA DI JORONG SIMPANG POGANG NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016





No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
47	Keputusan Bupati	189.1/321/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PERCONTOHAN KANTOR BERBUDAYA LINGKUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
48	Keputusan Bupati	189.1/327/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SWAKELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
49	Keputusan Bupati	189.1/332/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ANGIN PUTTING BELIUNG DI JORONG MUARO MOMONG NAGARI SUNGAI KAMBUT KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
50	Keputusan Bupati	189.1/337/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PABRIK MINYAK KELAPA SAWIT PT. DHARMASRAYA LESTARINDO
51	Keputusan Bupati	189.1/350/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN PANITIA LELANG BARANG HASIL RAMPASAN BERUPA KAYU DAN BUKAN KAYU KEPADA KEJAKSAAN NEGERI PULAU PUNJUNG DI KABUPATEN DHARMASRAYA
52	Keputusan Bupati	189.1/365/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROYEK KEMAKMURAN HIJAU
53	Keputusan Bupati	189.1/369/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN KEBARAN DI JORONG SILAGO NAGARI SILAGO KECAMATAN IX KOTO KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
54	Keputusan Bupati	189.1/370/KPTS-BUP/2016	PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK
55	Keputusan Bupati	189.1/395/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN KLINIK UTAMA HARAPAN BUNDA
56	Keputusan Bupati	189.1/394/KPTS-BUP/2016	Penunjukan Komisi Penanggulangan Aids-HIV Kab. Dharmasraya T.A 2014
57	Keputusan Bupati	189.1/398/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN PENERIMA BANTUAN MAKANAN TAMBAHAN MASYARAKAT KURANG GIZI UNTUK PENANGGULANGAN ANANK DAN IBU HAMIL KURANG GIZI PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PENGANGAN DAERAH RAWAN PROGRAM DIKABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016
58	Keputusan Bupati	189.1/401/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
59	Keputusan Bupati	189.1/423/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ANGIN PUTTING BELIUNG DI JORONG LAMBAU NAGARI SUNGAI KAMBU KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
60	Keputusan Bupati	189.1/433/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PEMBINAAN PENGAMANAN DI PT. TIDAR KERINCI AGUNG WILAYAH HUKUM POLRES DHARMASRAYA TAHUN 2016
61	Keputusan Bupati	189.1/440/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN STONE CRUSHER CV. AL-BARCAH



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
62	Keputusan Bupati	189.1/441/KPTS-BUP/2016	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 189.1/404/KPTS-BUP/2015 TENTANG PIZIN LINGKUNGAN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (UIPHHK) UD. RIMBA ALAM NUSANTARA
63	Keputusan Bupati	189.1/442/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN VILLA BUKIT MINDAWA III
64	Keputusan Bupati	189.1/443/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TINJA KABUPATEN DHARMASRAYA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM
65	Keputusan Bupati	189.1/444/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SITE GUNUNG MEDAN 2 (SITE ID MSJ127) PT. DAYAMITRA TELEKOMUNISASI
66	Keputusan Bupati	189.1/445/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN STONE CRUSHING PLANT PT. KHARISMA WIRAJAYA PERKASA
67	Keputusan Bupati	189.1/446/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN STONE CRUSHING PLANT PT. HABIB JABAL NUR
68	Keputusan Bupati	189.1/447/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TOWER BTS MSJ 130 SITE KINARI PT TOWER BERSAMA
69	Keputusan Bupati	189.1/448/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN SHOWROOM DAN BENGKEL PT. INTERCOM MOBILINDO
70	Keputusan Bupati	189.1/453/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN SISA DAN ABANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR RAHUN 2011





No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
71	Keputusan Bupati	189.1/458/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN KEBAKARAN DI JORONG KAMPUNG SURAU NAGARI GUNUNG SELASIH KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
72	Keputusan Bupati	189.1/459/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ANGIN PUTTING BELIUNG DI JORONG KOTO LAMO NAGARI SUNGAI KAMBUT KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
73	Keputusan Bupati	189.1/460/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN KEBAKARAN DI JORONG KUBANG PANJANG NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
74	Keputusan Bupati	189.1/461/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ANGIN PUTTING BELIUNG NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
75	Keputusan Bupati	189.1/462/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ANGIN PUTTING BELIUNG DI JORONG LUBUK BULANG NAGARI GUNUNG SELASIH KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
76	Keputusan Bupati	189.1/463/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN KEBAKARAN DI JORONG SUNGAI BAYE NAGARISUNGAI RUMBAI KECAMATAN SUNGAI RUMBAI KABUPATEN DHARMASRAYA
77	Keputusan Bupati	189.1/464/KPTS-BUP/2016	PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KORBAN BENCANA ALAM ANGIN PUTTING BELIUNG NAGARI IV KOTO PULAU PUNJUNG KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
78	Keputusan Bupati	189.1/465/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN SEKOLAH PERAIH PENGHARGAAN ADIWIYATA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016
79	Keputusan Bupati	189.1/467/KPTS-BUP/2016	PENETAPAN LOKASI SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT TAHUN 2017
80	Keputusan Bupati	189.1/469/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TOWER TELEKOMUNIKASI/ TOWER BTS MSJ 272 TEBING TINGGI KECAMATAN PULAU PUNJUNG PT TOWER BERSAMA
81	Keputusan Bupati	189.1/470/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN SPBU PT. ANANTA DJANUR MANDIRI
82	Keputusan Bupati	189.1/471/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN KLINIK PRATAMA KYODIFA
83	Keputusan Bupati	189.1/473/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN KLINIK PRATAMA FADILLA



No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)
84	Keputusan Bupati	189.1/474/KPTS-BUP/2016	PENUNJUKAN TENAGA FUNGSIONAL KESEHATAN SEBAGAI FASILITATOR PELAYANAN PERIZINAN SPP ONLINE DAN PENGADUAN PENCEMARAN DAN PERUSAHAAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN DHARMASTRAYA
85	Keputusan Bupati	189.1/475/KPTS-BUP/2016	IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN KLINIK PRATAMA NURJINIS
86	Peraturan bupati	189.1/25/KPTS-BUP/2016	Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
87	Peraturan bupati	189.1/29/KPTS-BUP/2016	Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2019
88	Peraturan bupati	189.1/33/KPTS-BUP/2016	Penatakelolaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Dharmasraya
89	Peraturan bupati	189.1/35/KPTS-BUP/2016	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya
90	Peraturan bupati	189.1/36/KPTS-BUP/2016	Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Kabupaten Dharmasraya
91	Peraturan bupati	189.1/38/KPTS-BUP/2016	Tatakelola Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya

Keterangan : -

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel - 49. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2015 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2017 (Berjalan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dinas Lingkungan Hidup	3.336.889.875,30	3.327.961.363,00	2.060.124.700,00
		Kegiatan Teknis Bidang	2.714.568.374,00	2.583.021.263,00	1.119.223.800,00
1	APBN	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran (DAK)	1.960.920.350,00	-	-
2	APBD	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	76.715.749,00	75.176.000,00	172.542.750,00
3	APBD	Pengkajian Dampak Lingkungan dan Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan	65.640.250,00	66.541.500,00	65.898.000,00
4	APBD	Pendukung Operasional Laboratorium	95.479.700,00	317.166.713,00	187.957.000,00
5	APBD	Inventarisasi Penyusunan Data Base Pengelolaan Lingkungan	18.328.500,00	39.834.500,00	50.573.000,00
6	APBD	Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	19.626.000,00	19.375.700,00	30.674.750,00
7	APBD	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	169.827.225,00	170.442.500,00	151.896.500,00
8	APBD	Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan	65.833.000,00	539.414.250,00	206.945.000,00
9	APBD	Fasilitasi Pengaduan Masyarakat	32.289.000,00	20.916.500,00	39.187.000,00
10	APBD	Dharmasraya Menuju ADIPURA	103.213.500,00	91.005.250,00	-
11	APBD	Fasilitasi Koordinasi Sekretariat Bersama Pengelolaan DAS Batanghari	35.506.500,00	74.955.700,00	-
12	APBD	Inventarisasi Perusakan SDA dan Lahan	21.881.200,00	27.208.700,00	-
13	APBD	Fasilitasi Pembentukan KOMDA	20.506.500,00	16.255.200,00	-
14	APBD	Fasilitasi Penyusunan MIH	28.800.900,00	-	-
15	APBN	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (DAK 2016)	-	520.251.000,00	-
16	APBD	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	-	30.504.250,00	45.191.000,00
17	APBD	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	59.913.500,00	70.548.000,00
18	APBN	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi (DAK 2016)	-	514.060.000,00	-



2016

Lampiran I : Tabel Data Dokumen IKPLHD

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2015 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2016 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2017 (Berjalan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	APBD	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	-	5.409.000,00
20	APBD	Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	-	-	72.401.800,00
21	APBD	Kegiatan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		744.940.100,00	940.900.900,00

Keterangan : 0 adalah data

Sumber Anggaran Badan Lingkungan Hidup untuk pencapaian SPM berasal dari APBD

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel – 50. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Master (S2)	3	1	4
3	Sarjana (S1)	5	8	13
4	Diploma (D3/D4)	1	1	2
5	SLTA	4	2	6

Keterangan: Belum ada personil di Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup dengan Pendidikan Doktor (S3)

Jumlah personil BLH Kab. Dharmasraya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang, 24 orang berstatus PNS, 1 orang berstatus honor daerah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016

**Tabel – 50A. Jumlah dan Jenis Diklat yang Telah Diikuti Pegawai LH Tahun : 2016**

No	Nama Diklat Teknis	Tahun Diklat	Jumlah Pegawai
(1)	(2)	(4)	(5)
1	PPNS	2008	1
2	PPLH	2007	3
3	Amdal Penilai	2014	2
4	Dasar-Dasar Amdal	2014	6
5	Pengendalian Pencemaran Air	2012	2
6	Mediator Lingkungan	2016	3

Keterangan : -

Sumber : DLH Kabupaten Dharmasraya



Tabel - 51. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat Tahun : 2016

No	Nama Instansi	Staf Fungsional			Jumlah Staf yang Sudah Mengikuti Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Staf Yang Sudah Diklat Laki-Laki	Jumlah Staf Yang Sudah Diklat Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawas Lingkungan Hidup	-	-	2	1
		Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	-	-	0	0

Keterangan : (-)= Belum ada yang menduduki jabatan Fungsional Khusus, hanya sebagai Fungsional Umum

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016



Tabel - 52. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.761.719,7	1.984.036,8	2.227.638,9	2.395.549,9	-
	a. Pertanian	1.578.678,0	1.777.727,9	1.993.227,7	2.124.895,0	-
	- Tanaman Bahan Makanan	212.072,8	219.806,1	247.292,2	66.035,1	-
	- Tanaman Holtikultura Semusim	3.112,9	3.375,5	3.586,8	3.818,4	-
	- Tanaman Perkebunan Semusim	47,4	51,9	58,1	66,2	-
	- Tanaman Holtikultura Tahunan	17.710,4	18.953,5	22.743,9	25.031,1	-
	- Tanaman Perkebunan Tahunan	1.205.469,7	1.378.588,9	1.549.378,3	1.645.349,2	-
	- Peternakan dan Hasil-Hasilnya	106.966,3	121.071,4	131.649,9	144.270,1	-
	- Jasa Pertanian dan Perburuan	33.298,5	35.880,6	38.518,5	40.324,9	-
	b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	94.432,0	106.688,6	119.305,0	14.344,9	-
	c. Perikanan	88.609,7	99.620,3	115.106,2	126.310,0	-
2	Pertambangan dan Penggalian	678.993,3	741.044,2	782.141,9	762.109,0	-
3	Industri Pengolahan	383.212,0	403.148,0	430.231,7	454.621,7	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	861,1	874,6	983,1	1.315,9	-
	- Ketenaga Listrikan	830,5	840,9	946,7	1.276,0	-
	- Pengadaan Gas dan Produksi Es	30,6	33,7	36,4	39,9	-
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	666,0	826,7	930,9	1.047,6	-
6	Konstruksi	642.937,9	742.578,1	857.271,4	994.511,8	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	724.191,0	814.887,1	905.204,2	1.017.072,2	-
	- Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Revarasinya	44.596,9	50.096,1	55.096,5	59.106,4	-
	- Pedagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor	679.594,1	764.791,0	850.107,7	957.965,8	-
8	Transportasi dan Pergudangan	305.368,2	357.389,9	414.210,1	449.967,2	-



	- Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	- Angkutan Darat	265.155,8	310.192,8	362.284,4	391.788,4	-
	- Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	- ASDP	532,9	586,9	664,3	695,5	-
	- Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	- Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	39.679,5	46.610,2	51.261,4	57.483,3	-
9	Penyediaan Jasa Akomodasi Makanan dan Minuman	45.613,5	52.113,1	58.735,1	67.555,8	-
	- Penyediaan Akomodasi	2.975,8	3.484,4	4.107,9	4.732,1	-
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	42.637,7	48.628,7	54.627,2	62.823,7	-
10	Informasi dan Komunikasi	315.702,3	339.562,2	389.940,8	400.243,8	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	123.992,1	139.717,7	160.529,9	177.981,8	-
	- Jasa Perantara Keuangan	54.332,1	62.472,6	71.595,5	76.970,7	-
	- Jasa Dana Asuransi dan Pensiun	2.124,3	2.418,5	2.711,8	3.016,3	-
	- Jasa Keuangan Lainnya	66.425,0	73.625,2	84.797,8	96.341,5	-
	- Jasa Penunjang Keuangan	1.110,7	1.201,4	1.424,8	1.653,3	-
12	Real Estate	117.780,5	132.241,8	150.886,2	169.452,3	-
13	Jasa Perusahaan	1.134,6	1.288,3	1.442,2	1.630,6	-
14	Adm Pemerintahan, Keamanan, dan Jamsos	385.890,8	427.462,0	455.414,2	453.377,4	-
15	Jasa Pendidikan	127.707,1	150.635,0	176.586,0	196.625,3	-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88.631,2	100.792,1	114.071,6	123.176,6	-
17	Jasa Lainnya	36.893,8	44.229,9	48.945,2	53.125,8	-
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	5.741.295,1	6.432.827,5	7.175.163,4	7.719.364,7	-
	PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	5.741.295,1	6.432.827,5	7.175.163,4	7.719.364,7	-

Keterangan: (-) = tidak ada data

Belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh BPS terkait data tahun 2016, karena buku resmi BPS baru terbit bulan Juni setiap tahunnya

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2016





Tabel - 53. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Dharmasraya Tahun : 2016

No	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.571.968,0	1.641.901,3	1.739.012,2	1.829.961,9	-
	a. Pertanian	1.408.559,6	1.467.865,3	1.558.002,1	1.637.881,7	-
	- Tanaman Bahan Makanan	189.061,30	188.658,6	193.304,0	198.619,9	-
	- Tanaman Holtikultura Semusim	2.835,50	2.966,0	3.135,5	3.360,00	-
	- Tanaman Perkebunan Semusim	41,60	44,80	48,30	49,90	-
	- Tanaman Holtikultura Tahunan	16.817,9	16.941,8	18.260,3	19.034,5	-
	- Tanaman Perkebunan Tahunan	1.071.257,3	1.126.428,1	1.207.417,2	1.276.843,7	-
	- Peternakan dan Hasil-Hasilnya	98.215,8	101.759,0	103.937,2	107.200,8	-
	- Jasa Pertanian dan Perburuan	30.330,2	31.067,0	31.899,6	32.772,9	-
	b. Kehutanan dan Penebangan Kayu	86.001,1	92.340,4	95.082,9	101.624,6	-
	c. Perikanan	77.407,3	81.695,6	85.927,2	90.455,6	-
2	Pertambangan dan Penggalian	606.727,6	644.852,3	656.450,3	645.615,4	-
3	Industri Pengolahan	348.172,1	362.682,4	381.016,6	394.374,6	-
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	857,9	874,5	953,5	971,8	-
	- Ketenaga Listrikan	829,2	844,5	921,9	939,0	-
	- Pengadaan Gas dan Produksi Es	28,7	30,0	31,6	32,8	-
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	675,0	788,3	822,9	860,7	-
6	Konstruksi	569.473,8	624.084,0	678.472,2	748.673,8	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	634.470,9	689.735,9	746.242,2	792.820,3	-
	- Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor serta Revarasinya	41.212,0	43.412,7	45.922,3	46.909,6	-
	- Pedagangan Besar dan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor	593.258,9	646.323,2	700.319,9	745.910,7	-



8	Transportasi dan Pergudangan	282.388,6	309.046,0	338.030,9	367.215,9	-
	- Angkutan Rel	-	-	-	-	-
	- Angkutan Darat	244.410,9	267.456,0	294.042,7	320.683,0	-
	- Angkutan Laut	-	-	-	-	-
	- ASDP	488,5	501,7	522,8	529,1	-
	- Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	- Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	37.489,2	41.088,3	43.465,4	46.003,8	-
9	Penyediaan Jasa Akomodasi Makanan dan Minuman	39.883,0	42.488,2	45.414,8	47.998,1	-
	- Penyediaan Akomodasi	2.567,9	2.755,1	2.960,6	3.085,8	-
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	37.315,1	39.733,1	42.454,2	44.912,3	-
10	Informasi dan Komunikasi	303.798,8	339.883,7	377.181,1	420.857,8	-
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	112.456,8	120.481,0	128.928,0	134.403,4	-
	- Jasa Perantara Keuangan	48.591,2	53.081,2	57.266,5	58.595,0	-
	- Jasa Dana Asuransi dan Pensiun	1.947,7	2.056,2	2.185,2	2.276,8	-
	- Jasa Keuangan Lainnya	60.903,7	64.296,0	68.331,0	72.328,4	-
	- Jasa Penunjang Keuangan	1.014,2	1.047,6	1.145,3	1.203,2	-
12	Real Estate	108.287,6	114.085,6	120.339,3	128.101,1	-
13	Jasa Perusahaan	1.003,6	1.078,4	1.158,4	1.245,4	-
14	Adm Pemerintahan, Keamanan, dan Jamsos	335.712,3	343.165,3	348.660,3	367.069,6	-
15	Jasa Pendidikan	114.258,5	121.430,9	131.604,0	142.525,7	-
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75.967,7	81.722,4	88.385,4	95.910,1	-
17	Jasa Lainnya	34.093,6	36.596,0	38.711,5	40.989,2	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO		5.140.195,8	5.474.896,2	5.821.383,6	6.159.594,8	-
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		5.140.195,8	5.474.896,2	5.821.383,6	6.159.594,8	-

Keterangan: (-) = tidak ada data

Belum ada data resmi yang dikeluarkan oleh BPS terkait data tahun 2016, karena buku resmi BPS baru terbit bulan Juni setiap tahunnya

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2016



LAMPIRAN II

PERHITUNGAN DATA





Perhitungan 1: Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Air

Tabel 1 (data hasil pemantauan)

No	Parameter	Ci	Lij	Ci/Lij	Ci/Lij >1	Ci/Lij baru
A	B	C	D	E	F	G
1	TSS (mg/Lt)		50	=+C1/D1	=1+5*(LOG(E1))	=IF(E1>1,F1,E1)
2	DO (mg/Lt)		4	=+((7-C2)/(7-D2)/D7)	=1+5*(LOG(E2))	=IF(E2>1,F3,E2)
3	COD (mg/Lt)		25	=+C3/D3	=1+5*(LOG(E3))	=IF(E3>1,F3,E3)
4	BOD (mg/Lt)		3	=+C4/D4	=1+5*(LOG(E4))	=IF(E4>1,F1,E4)
5	Total fosfat (mg/Lt)		0.2	=+C5/D5	=1+5*(LOG(E5))	=IF(E5>1,F1,E5) =LOG(E5)
6	fecal coli (jml/100ml)		1000	=+C6/D6	=1+5*(LOG(E6))	=IF(E6>1,F1,E6)
7	total coliform (jml/100ml)	↑	5000	=+C7/D7	=1+5*(LOG(E7))	=IF(E7>1,F7,E7)
8		input data				
9	Ci/Lij max					=MAX(Ci/Lij baru)
10	Ci/Lij rata2					=AVERAGE(Ci/Lij baru)
11	IP					=SQRT((G9^2+G10^2)/2) memenuhi BM =H17

Kriteria Pencemaran :

=IF(G16>=10,"cemar berat",I17)

=IF(G16>5,"cemar sedang",J17)

=IF(G16>1,"cemar ringan",K17)

=IF(G16>=0,"memenuhi BM",L17)





Tabel 2 (PERHITUNGAN IPA)

Mutu Air	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	input data	=Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air/(=SUM(Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air))	70	=Bobot Indeks x Prosentase pemenuhan mutu air
Cemar Ringan	input data	=Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air/(=SUM(Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air))	50	=Bobot Indeks x Prosentase pemenuhan mutu air
Cemar Sedang	input data	=Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air/(=SUM(Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air))	30	=Bobot Indeks x Prosentase pemenuhan mutu air
cemar Berat	input data	=Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air/(=SUM(Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air))	10	=Bobot Indeks x Prosentase pemenuhan mutu air
Total	=SUM(Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air)	=SUM(Prosentase pemenuhan mutu air)		=SUM(Nilai Indeks per mutu air)

Langkah pengisian:

- a. masukkan data hasil pemantauan di kolom C
- b. Nilai Lij berasal dari kualitas air kelas II PP 82 Tahun 2001
- c. Nilai IP muncul di G16 dan kategori mutu air di H16
- e. tabel 1 hanya untuk 1 titik pantau dalam 1 periode waktu, Lakkan hal yang sama untuk setiap titik pantau dan setiap periode waktu pemantauan
- f. Input jumlah titik sampel yang diperoleh berdasarkan kategori indeks pencemaran (cell H) ke Tabel 2 Cell K
- g. IPA total akan muncul di cell N16 dan otomatis pindah ke sheet IKLH



Perhitungan 2: Formulasi Perhitungan Indeks Pencemaran Udara

Tabel 1.

No.	Kota /Kab /Desa	Lokasi Sampling	SO ₂ (µg/Nm ³)				NO ₂ (µg/Nm ³)				Rerata Kab/Kota/Prov.	
			Periode			Rata- Rata	Periode			Rata- Rata	SO ₂	NO ₂
			I	II	III		I	II	III			
1		Transportasi				0				0	=Rata- Rata SO ₂	=Rata- Rata NO ₂
2		Industri				0				0		
3		Pemukiman				0				0		
4		Perniagaan/ Perdagangan				0				0		
		Blank										

Langkah pengisian:

- Input nilai pemantauan NO₂ dan SO₂ sesuai periode dan lokasi pengambilan ke tabel 1
- Nilai rata-rata NO₂ dan SO₂ muncul pada cell M21 dan L21
- Nilai rata-rata NO₂ dan SO₂ otomatis masuk pada tabel di cell CD28 dan CD29
- Nilai Indeks Kualitas Udara akan muncul secara otomatis pada tabel 2 cellG31 dan langsung pindah pada sheet IKLH

Keterangan:

- ✓ Jika ingin menambah desa/kota/kabupaten maka angka pembagi di cell L21 dan M21 disesuaikan dengan jumlah desa/kota/kabupaten yang dipantau.
- ✓ Jika periode pemantauan kurang atau lebih dari 3 kali maka angka pembagi pada cell G dan K disesuaikan dengan periode pemantauan yang dilakukan.



Tabel 2.

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO2	=Rata- Rata NO2	40	=Baku mutu/Rerata pemantauan
SO2	=Rata- Rata SO2	20	=Baku mutu/Rerata pemantauan
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			=Rata-rata index
Indeks Kualitas Udara			= $100 - (50 / 0.9 * (\text{Indeks Udara} - 0.1))$



Perhitungan 3: Formulasi Perhitungan Indeks Tutupan Lahan

Tabel 1.

Luas Hutan/ Lahan (km ²)	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	ITH
		$=(\text{Luas Hutan/ Lahan} : \text{Luas Wilayah}) * 100$	$=100 - ((84.3 - \text{Persentase Luas Tutupan Hutan/ Lahan}) * (100 - 50) / (84.3 - 30))$

Langkah pengisian:

- Luas Hutan /lahan dan luas wilayah diisi dengan data yang didapat dari instansi terkait.
- Nilai ITH akan muncul di D4 dan langsung pindah ke sheet IKLH



Perhitungan 4 : Formulasi Perhitungan Nilai IKLH

Tabel 1.

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1	Indeks Pencemaran Air	Input nilai IPA	30%	=Nilai*Bobot
2	Indeks Pencemaran Udara	Input nilai IPU	30%	=Nilai*Bobot
3	Indeks Tutupan Hutan	Input nilai ITH	40%	=Nilai*Bobot
	IKLH KABUPATEN / PROVINSI			=Rata-Rata Hasil

Tabel 2.

No	Kategori IKLH	Nilai
1	Unggul	$x > 90$
2	Sangat Baik	$82 < x \leq 90$
3	Baik	$74 < x \leq 82$
4	Cukup	$66 \leq x \leq 74$
5	Kurang	$58 \leq x < 66$
6	Sangat Kurang	$50 \leq x < 58$
7	Waspada	$x < 50$

Langkah Pengisian:

- a. Nilai IKLH akan muncul otomatis dikolom Hasil
- b. Nilai IKLH akan menentukan Kategori IKLH seperti pada tabel 2





Perhitungan 5 : Perhitungan Beban Pencemaran

Beban Limbah BOD (Ton/Tahun):

$$=(\text{Debit Limbah Cair} \text{Ton/tahun} \times \text{BOD (mg/l)}) / 1000000$$

Beban Limbah COD (Ton/Tahun):

$$=(\text{Debit Limbah Cair} \text{Ton/tahun} \times \text{COD (mg/l)}) / 1000000$$

Beban Limbah TSS (Ton/Tahun):

$$=(\text{Debit Limbah Cair} \text{Ton/tahun} \times \text{TSS (mg/l)}) / 1000000$$

Minyak dan Lemak (Ton/Tahun):

$$=(\text{Debit Limbah Cair} \text{Ton/tahun} \times \text{Minyak dan Lemak (mg/l)}) / 1000000$$

Limbah Cair Hotel (1 m³/hari):

$$=(\text{Jumlah Kamar} \times \text{Tingkat Hunian (\%)} \times 1) / 100$$

Beban Limbah BOD (Ton/Tahun) (BOD 55 mg/L):

$$=(\text{Jumlah Kamar} \times \text{Tingkat Hunian}) / (100) * 55 * 365 * 10^{-6}$$

Beban Limbah COD (Ton/Tahun):

$$=(\text{Jumlah Kamar} \times \text{Tingkat Hunian}) / (100) * 75.625 * 365 * 10^{-6}$$

Volume Limbah Padat (m³/hari) Objek Wisata:

$$=0.00012 * (D14/365)$$





Perhitungan 6 : Penentuan Tipe Iklim

Bulan basah adalah bulan-bulan yang memiliki tebal curah hujan lebih dari 100 mm.

Bulan lembap adalah bulan-bulan yang memiliki tebal curah hujan antara 60 mm–100 mm.

Bulan kering adalah bulan-bulan yang memiliki tebal curah hujan kurang dari 60 mm.

Menurut teori Schmidt-Ferguson,

Perhitungan atas nilai Q, yaitu persentase perbandingan rata-rata jumlah bulan basah dan bulan kering, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q = (M_d/M_w) \times 100\%$$

Dimana:

- Q = perbandingan bulan kering dan bulan basah (%)
- M_d = mean (rata-rata) bulan kering, yaitu perbandingan antara jumlah bulan kering dibagi dengan jumlah tahun pengamatan
- M_w = mean (rata-rata) bulan basah, yaitu perbandingan antara jumlah bulan basah dibagi dengan jumlah tahun pengamatan,

Sistem klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson akan ditentukan menurut tipe iklim sebagai berikut,

1. Tipe Iklim A (sangat basah), jika nilai Q antara 0%–14,33%
2. Tipe Iklim B (basah), jika nilai Q antara 14,33%–33,3%
3. Tipe Iklim C (agak basah), jika nilai Q antara 33,3%–60%
4. Tipe Iklim D (sedang), jika nilai Q antara 60%–100%
5. Tipe Iklim E (agak kering), jika nilai Q antara 100%–167%
6. Tipe Iklim F (kering), jika nilai Q antara 167%–300%
7. Tipe Iklim G (sangat kering), jika nilai Q antara 300%–700%
8. Tipe Iklim H (kering sangat ekstrim), jika nilai Q lebih dari 700%





Perhitungan Laju Erosi

$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

A = Banyaknya tanah tererosi (ton/ha x yr)

R = faktor curah hujan dan aliran permukaan (Erosivitas) (MJ mm/ha x hr x yr)

K = faktor erodibilitas tanah (ton ha hr/MH mm ha)

LS = Panjang dan kemiringan lereng (dimensionless)

C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman (dimensionless)

P = Faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah (dimensionless)

A1 (ton/ha.yr) 12,791	R 1609,188503	K1 0,427341656	LS 3,1
BV (gr/cm3) 1,30	BV (kg/m3) 1300	BV (ton/m3) 1,3	1 ha = (10⁴ m²) 10000
A1 (ton/m².yr) 0,001279072	Tebal kikisan tanah (m/tahun) 0,000983902	Tebal kikisan tanah (mm/tahun) 0,983901769	A1 (< 20 cm) Tebal kikisan tanah (mm/10tahun) 9,839017694

$$R = 6.119 (\text{rain})^{1.21} \times (\text{Days})^{-0.47} \times (\text{MAXP})^{0.53}$$

R = indeks erosivitas rata-rata bulanan

Rain = curah hujan rata-rata bulanan (cm)

Days = jumlah hari hujan rata-rata perbulan

Maxp = curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan yang bersangkutan

R 1609,188503	Rain 85,46449309	Days 11,5	Maxp 12,48
-------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------

$$100K = (2.1 \times M^{1.14}) \times (10^{-4}) \times (12 - a) + 3.25 (b-2) + 2.5 (c-3)$$

K1 0,427341656	M 1447,8025	a 0,6896	b 3
% debu 8,06	% pasir 29,99	% liat 61,95	





A = R x K x LS x C X P

A = Banyaknya tanah tererosi (ton/ha x yr)

R = faktor curah hujan dan aliran permukaan (Erosivitas) (MJ mm/ha x hr x yr)

K = faktor erodibilitas tanah (ton ha hr/MH mm ha)

LS = Panjang dan kemiringan lereng (dimensionless)

C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman (dimensionless)

P = Faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah (dimensionless)

A1 (ton/ha.yr)	R	K1	LS	C	P
7,672	1609,189	0,256308	3,1	0,012	0,5

BV (gr/cm3)	BV (kg/m3)	BV (ton/m3)	1 ha = (10 ⁴ m2)	A1 (ton/m2.yr)
1,57	1570	1,57	10000	0,000767

Tebal kikisan tanah (m/tahun)	A1 Tebal kikisan tanah (mm/tahun)	A1 (20 – 50 cm) Tebal kikisan tanah (mm/10tahun)
0,000488633	0,488633	4,886334

R = 6.119 (rain)^{1.21} x (Days)^{-0.47} x (MAXP)^{0.53}

R = indeks erosivitas rata-rata bulanan

Rain = curah hujan rata-rata bulanan (cm)

Days = jumlah hari hujan rata-rata perbulan

Maxp = curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan yang bersangkutan

R	Rain	Days	Maxp
1609,188503	85,46449	11,5	12,48

100K = (2.1 x M^{1.14}) x (10⁻⁴) x (12 - a) + 3.25 (b-2) + 2.5 (c-3)

K1	M	a	b	c
0,25630847	1407,75	0,1724	3	0,71

% debu	% pasir	% liat	% C organik
10,39	27,13	62,48	0,1





A = R x K x LS x C X P

A = Banyaknya tanah tererosi (ton/ha x yr)

R = faktor curah hujan dan aliran permukaan (Erosivitas) (MJ mm/ha x hr x yr)

K = faktor erodibilitas tanah (ton ha hr/MH mm ha)

LS = Panjang dan kemiringan lereng (dimensionless)

C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman (dimensionless)

P = Faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah (dimensionless)

A1 (ton/ha.yr) 2,837	R 1609,189	K1 0,094784	LS 3,1	C 0,012	P 0,5
BV (gr/cm3) 1,43	BV (kg/m3) 1430	BV (ton/m3) 1,43	1 ha = (10⁴ m2) 10000		
A1 (ton/m2.yr) 0,000283696	Tebal kikisan tanah (m/tahun) 0,000198	A1 Tebal kikisan tanah (mm/tahun) 0,198389	A1 (50 – 100 cm) Tebal kikisan tanah (mm/10tahun) 1,983891		

R = 6.119 (rain)^{1.21} x (Days)^{-0.47} x (MAXP)^{0.53}

R = indeks erosivitas rata-rata bulanan

Rain = curah hujan rata-rata bulanan (cm)

Days = jumlah hari hujan rata-rata perbulan

Maxp = curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan yang bersangkutan

R 1609,188503	Rain 85,46449	Days 11,5	Maxp 12,48
-------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------

100K = (2.1 x M^{1.14}) x (10⁻⁴) x (12 - a) + 3.25 (b-2) + 2.5 (c-3)

K1 0,094783762	M 818,5321	a 0,37928	b 3	c 0,15
% debu 2,64	% pasir 25,97	% liat 71,39	% C organik 0,22	





A = R x K x LS x C X P

- A = Banyaknya tanah tererosi (ton/ha x yr)
- R = faktor curah hujan dan aliran permukaan (Erosivitas) (MJ mm/ha x hr x yr)
- K = faktor erodibilitas tanah (ton ha hr/MH mm ha)
- LS = Panjang dan kemiringan lereng (dimensionless)
- C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman (dimensionless)
- P = Faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah (dimensionless)

A1 (ton/ha.yr) 16,044	R 1609,189	K1 0,536024	LS 3,1	C 0,012	P 0,5
BV (gr/cm3) 1,25	BV (kg/m3) 1250	BV (ton/m3) 1,25	1 ha = (10⁴ m²) 10000	A1 (ton/m².yr) 0,001604	
Tebal kikisan tanah (m/tahun) 0,001283495	A1 Tebal kikisan tanah (mm/tahun) 1,283495	A1 (100 – 150 cm) Tebal kikisan tanah (mm/10tahun) 12,83495			

R = 6.119 (rain)^{1.21} x (Days)^{-0.47} x (MAXP)^{0.53}

- R = indeks erosivitas rata-rata bulanan
- Rain = curah hujan rata-rata bulanan (cm)
- Days = jumlah hari hujan rata-rata perbulan
- Maxp = curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan yang bersangkutan

R 1609,188503	Rain 85,46449	Days 11,5	Maxp 12,48
-------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------

100K = (2.1 x M^{1.14}) x (10⁻⁴) x (12 - a) + 3.25 (b-2) + 2.5 (c-3)

K1 0,536024236	M 1594,405	a 1,68952	b 3	c 11,84
% debu 7,82	% pasir 32,11	% liat 60,07		% C organik 0,98





$$A = R \times K \times LS \times C \times P$$

A = Banyaknya tanah tererosi (ton/ha x yr)

R = faktor curah hujan dan aliran permukaan (Erosivitas) (MJ mm/ha x hr x yr)

K = faktor erodibilitas tanah (ton ha hr/MH mm ha)

LS = Panjang dan kemiringan lereng (dimensionless)

C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman (dimensionless)

P = Faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah (dimensionless)

A1 (ton/ha.yr)	R	K1	LS	C
6,970	1609,189	0,232876	3,1	0,012

BV (gr/cm3)	BV (kg/m3)	BV (ton/m3)	1 ha = (10⁴ m2)
1,40	1400	1,4	10000

A1 (ton/m2.yr)	Tebal kikisan tanah (m/tahun)	A1	A1 (> 150 cm)
		Tebal kikisan tanah (mm/tahun)	Tebal kikisan tanah (mm/10tahun)
0,000697019	0,000498	0,497871	4,97871

$$R = 6.119 (\text{rain})^{1.21} \times (\text{Days})^{-0.47} \times (\text{MAXP})^{0.53}$$

R = indeks erosivitas rata-rata bulanan

Rain = curah hujan rata-rata bulanan (cm)

Days = jumlah hari hujan rata-rata perbulan

Maxp = curah hujan maksimum selama 24 jam dalam bulan yang bersangkutan

R	Rain	Days	Maxp
1609,188503	85,46449	11,5	12,48

$$100K = (2.1 \times M^{1.14}) \times (10^{-4}) \times (12 - a) + 3.25 (b-2) + 2.5 (c-3)$$

K1	M	a	b	c
0,232876152	1547,603	1,93088	3	0,42

% debu	% pasir	% liat	% C organik
10,12	29,04	60,48	1,12



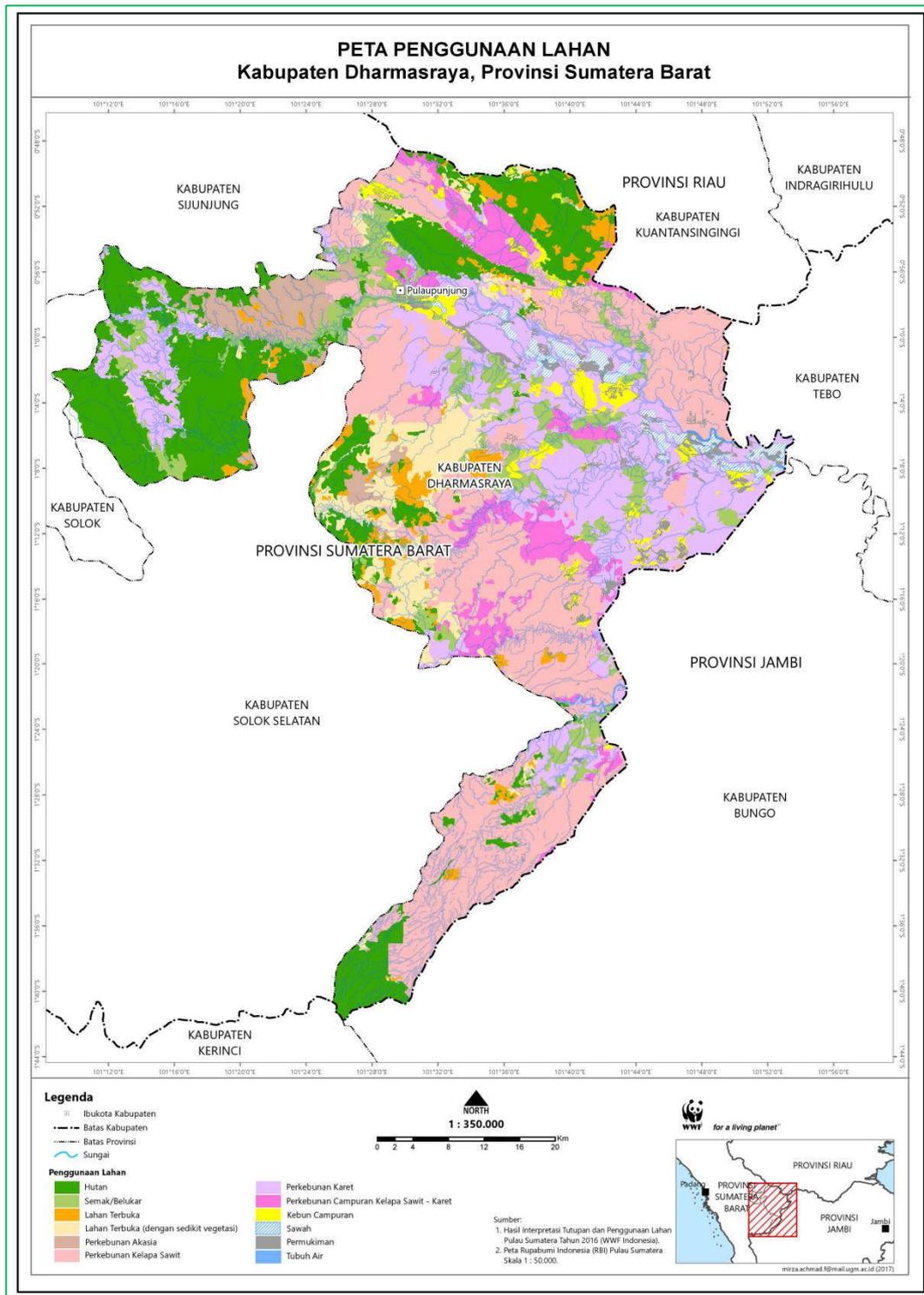
LAMPIRAN III

PETA





Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Citra Satelit.

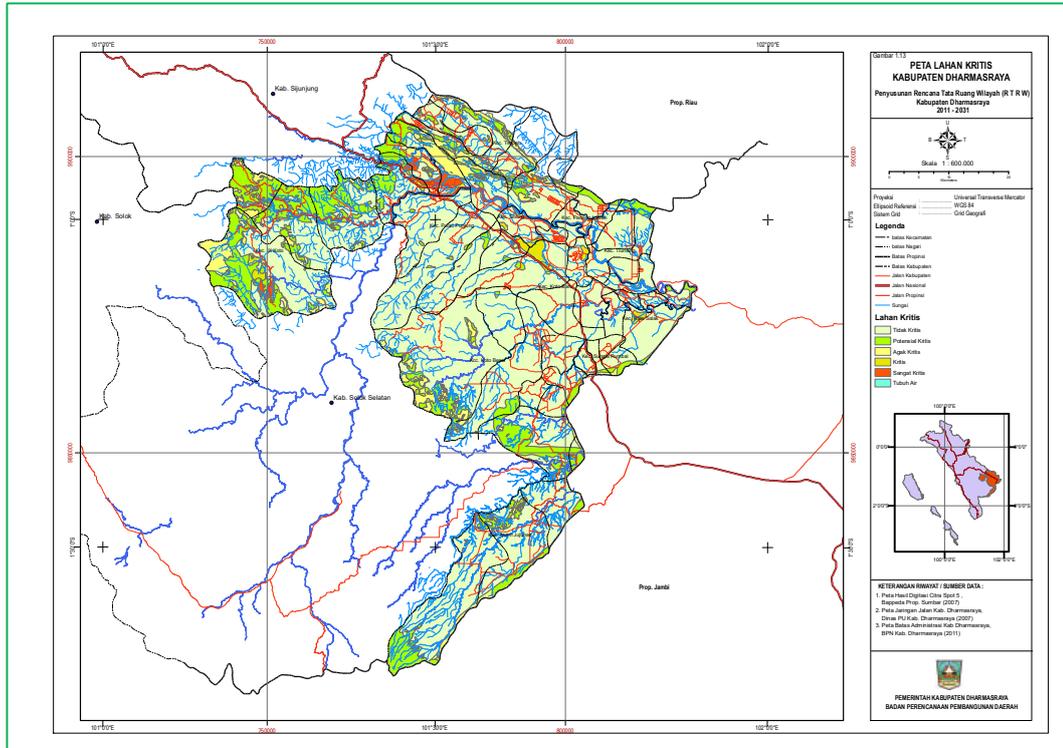


Keterangan : Hasil Interpretasi Tutupan dan Penggunaan Lahan Pulau Sumatera Tahun 2016. (Sumber: WWF Indonesia, 2016).





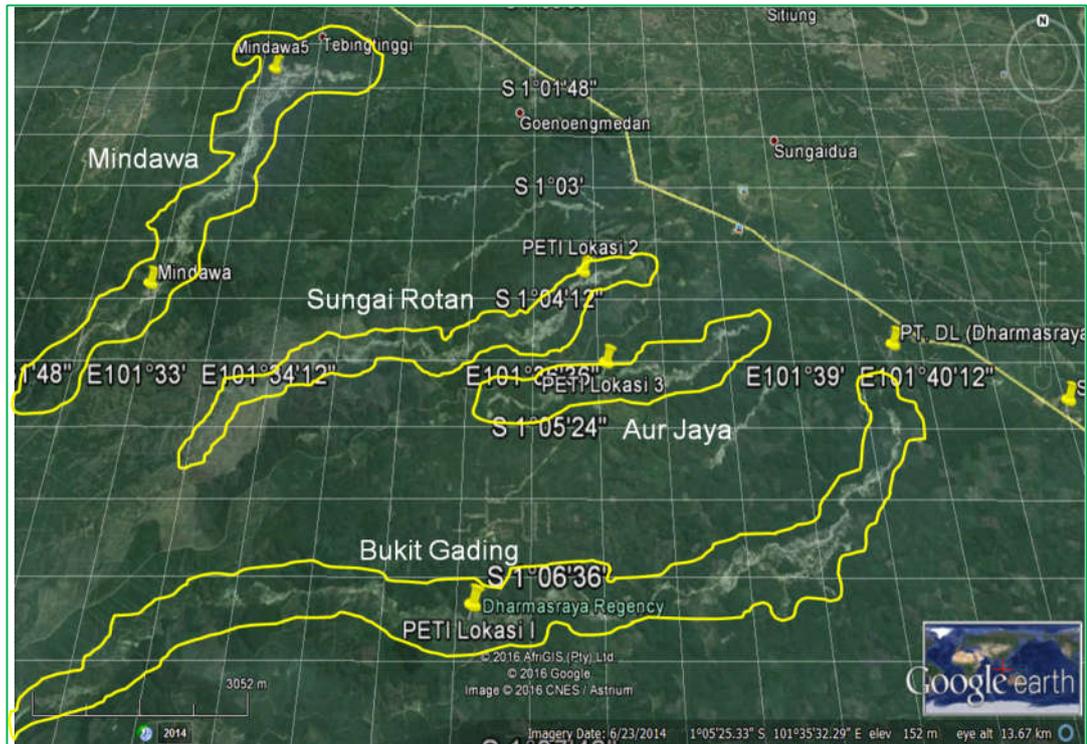
Gambar 4. Peta Lahan Kritis Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.



Keterangan : Peta Lahan Kritis Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031. (Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya, 2016).



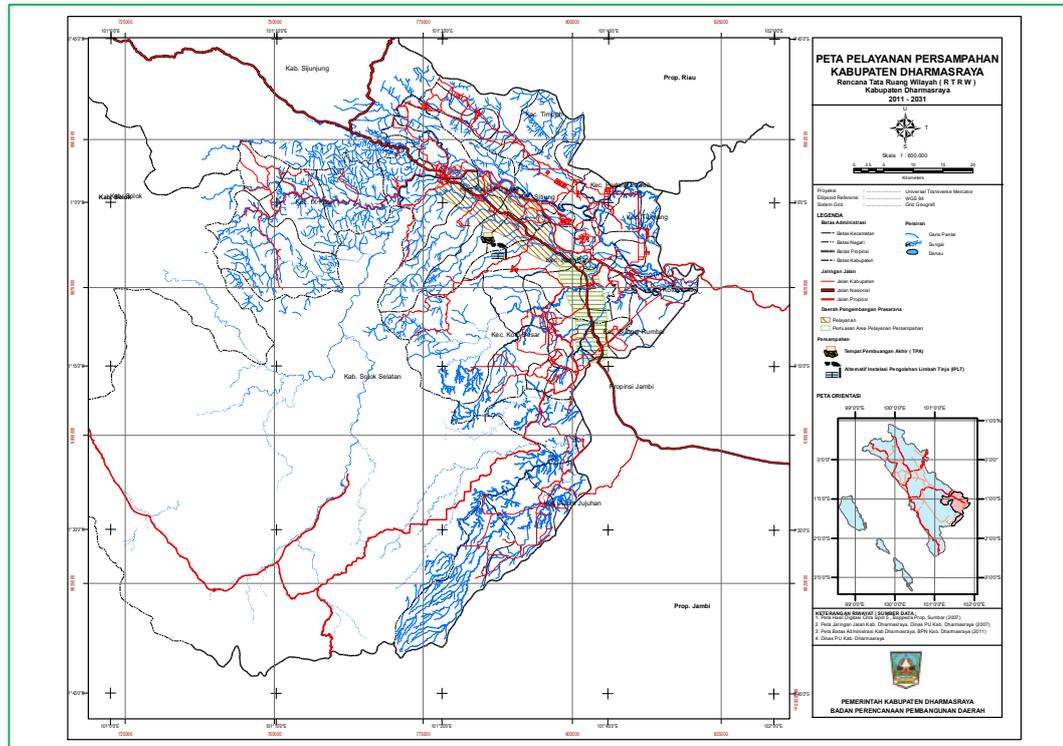
Gambar 6. Lokasi Penambangan Tanpa Izin Yang Dipantau melalui Google Earth Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Keterangan : Lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Yang Dipantau melalui Google Earth Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya (Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016).



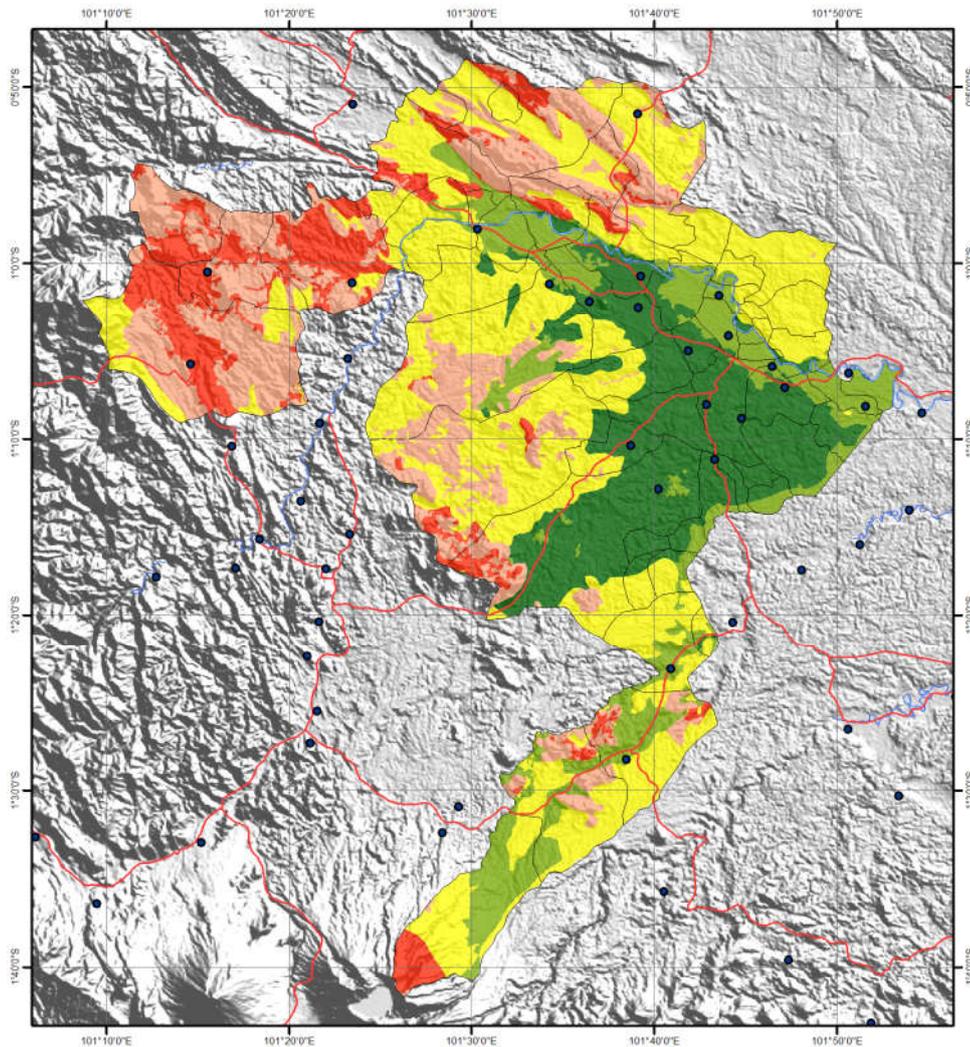
Gambar 7. Peta Pelayanan Persampahan dan Pengolahan Limbah Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.



Keterangan : Peta Pelayanan Persampahan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031. (Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ BAPPEDA Kabupaten Dharmasraya, 2016).



Gambar 8. Peta Rencana DDDTLH Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Dharmasraya



Legend

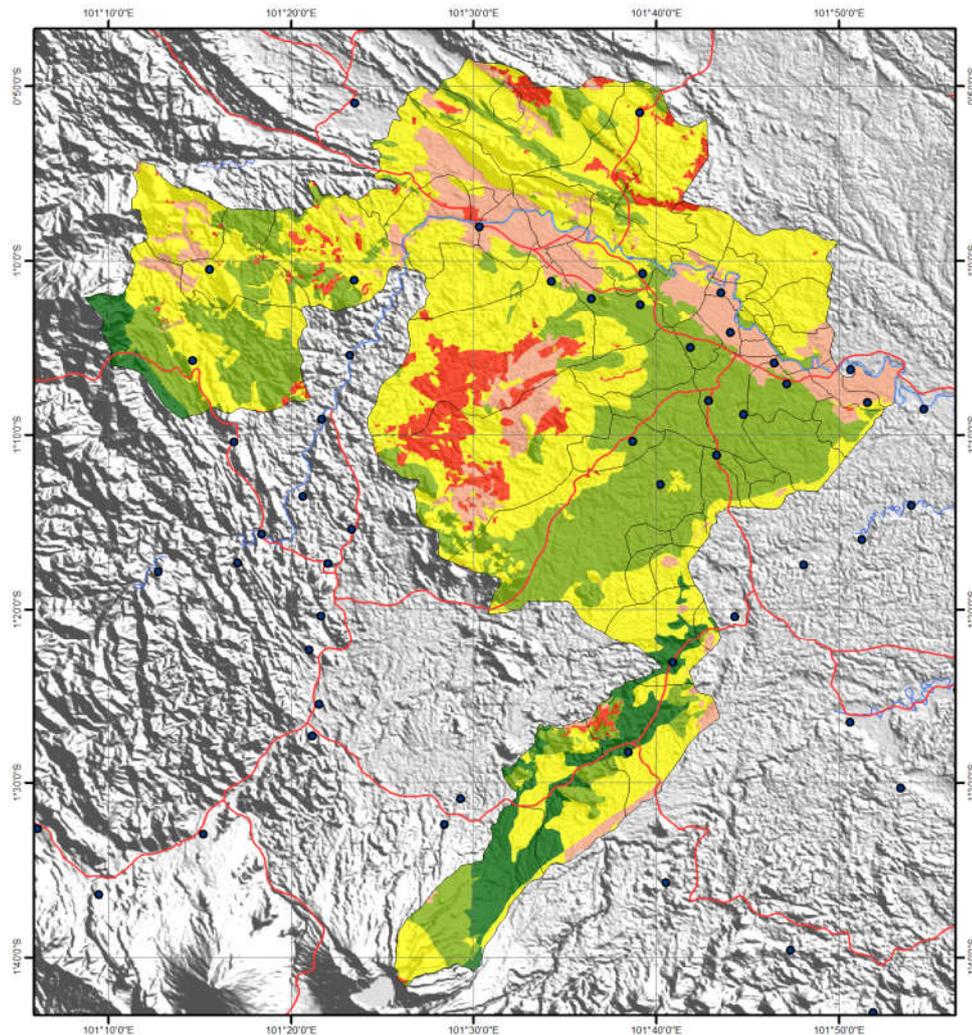
DDDTLH_Dharmasraya250		SEDANG
PENYEDIAAN AIR BERSIH		RENDAH
		SANGAT TINGGI
		SANGAT RENDAH
		TINGGI



Keterangan : Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung untuk Jasa Penyediaan Air Bersih yang akan disusun dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ RPPLH Kabupaten Dharmasraya. (Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016).



Gambar 9 : Peta Rencana DDDTLH Jasa Pemurnian Air Kabupaten Dharmasraya



Legend

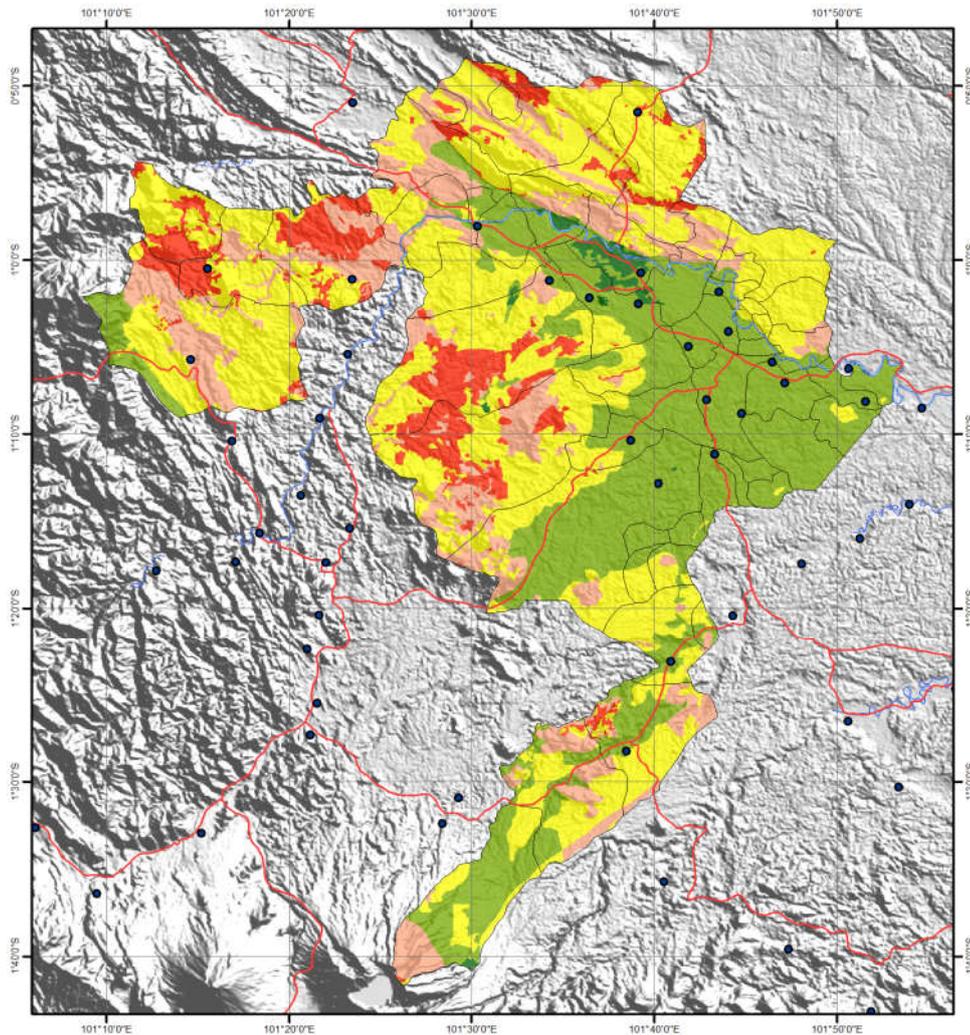
DDDTLH_Dharmasraya250		SEDANG
PEMURNIAN AIR		RENDAH
		SANGAT TINGGI
		TINGGI
		SANGAT RENDAH



Keterangan : Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung untuk Jasa Pemurnian Air yang akan disusun dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ RPPLH Kabupaten Dharmasraya. (Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016).



Gambar 10 : Peta Rencana DDDTLH Jasa Pemurnian Limbah Kabupaten Dharmasraya



Legend

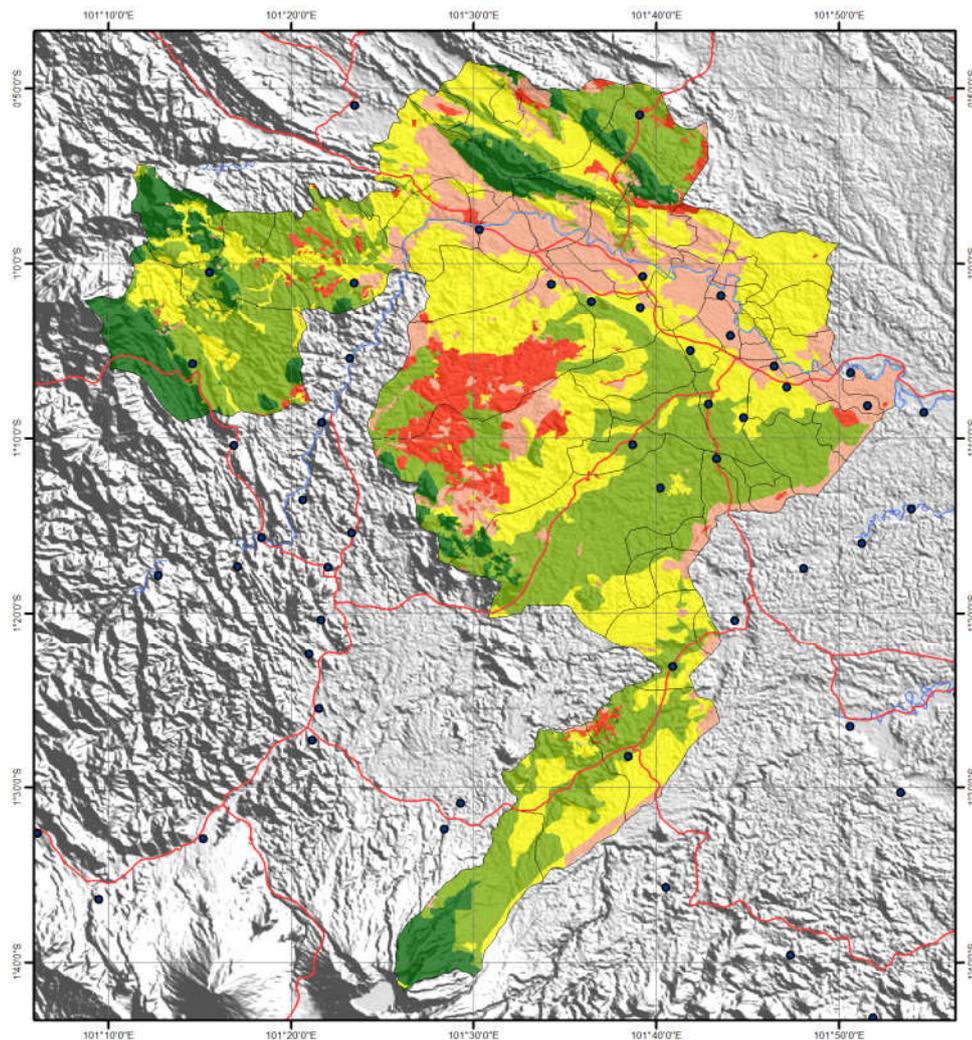
DDDTLH_Dharmasraya250		SEDANG
PENGURAIAN LIMBAH		RENDAH
		SANGAT TINGGI
		TINGGI
		SANGAT RENDAH



Keterangan : Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung untuk Jasa Pemurnian Limbah yang akan disusun dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ RPPLH Kabupaten Dharmasraya. (Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016).



Gambar 11 : Peta Rencana DDTLH Jasa Pemurnian Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya



Legend

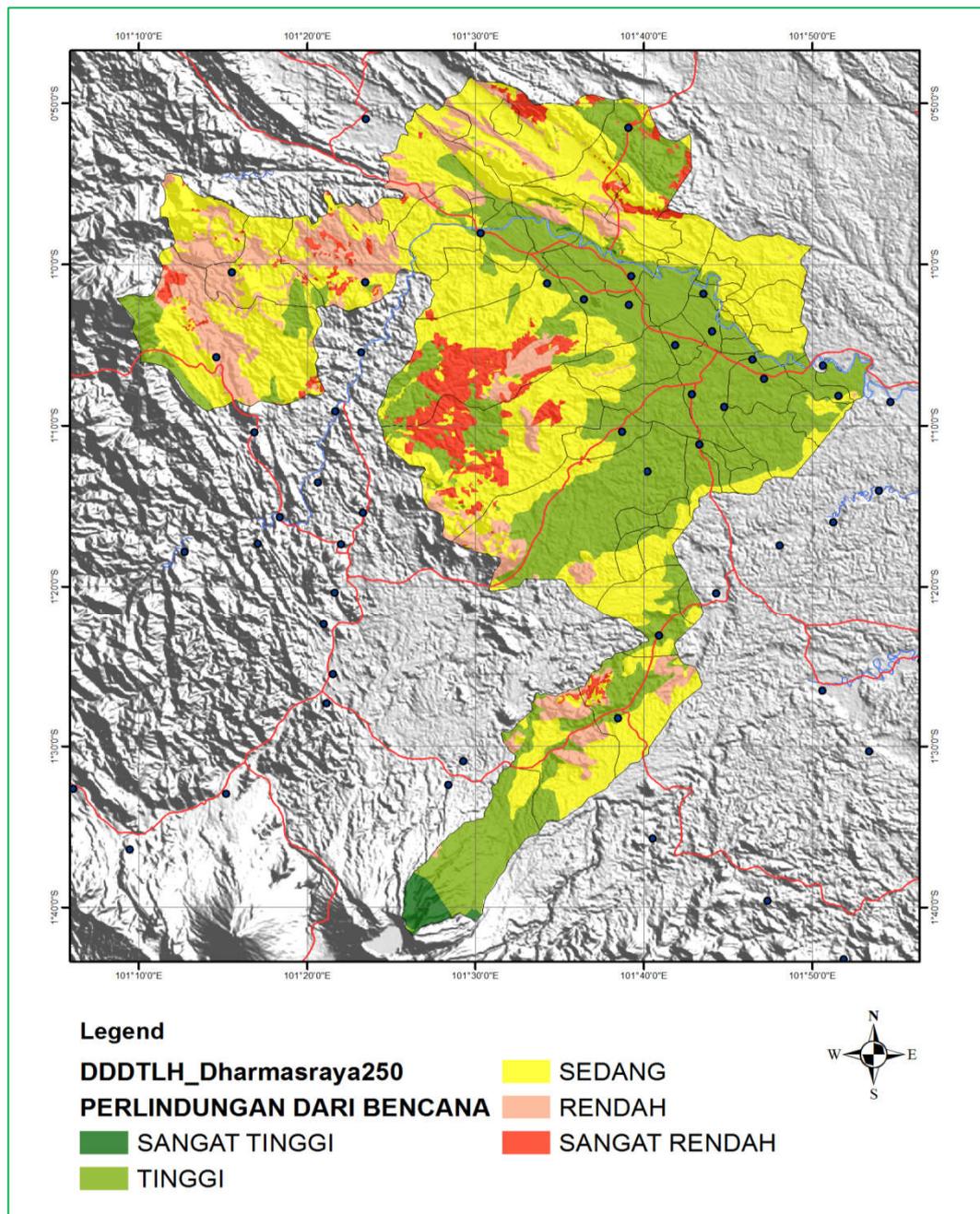
DDDTLH_Dharmasraya250	 SEDANG
PEMURNIAN KUALITAS UDARA	 RENDAH
 SANGAT TINGGI	 SANGAT RENDAH
 TINGGI	



Keterangan : Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung untuk Jasa Pemurnian Kualitas Udara yang akan disusun dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ RPPLH Kabupaten Dharmasraya. (Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016).



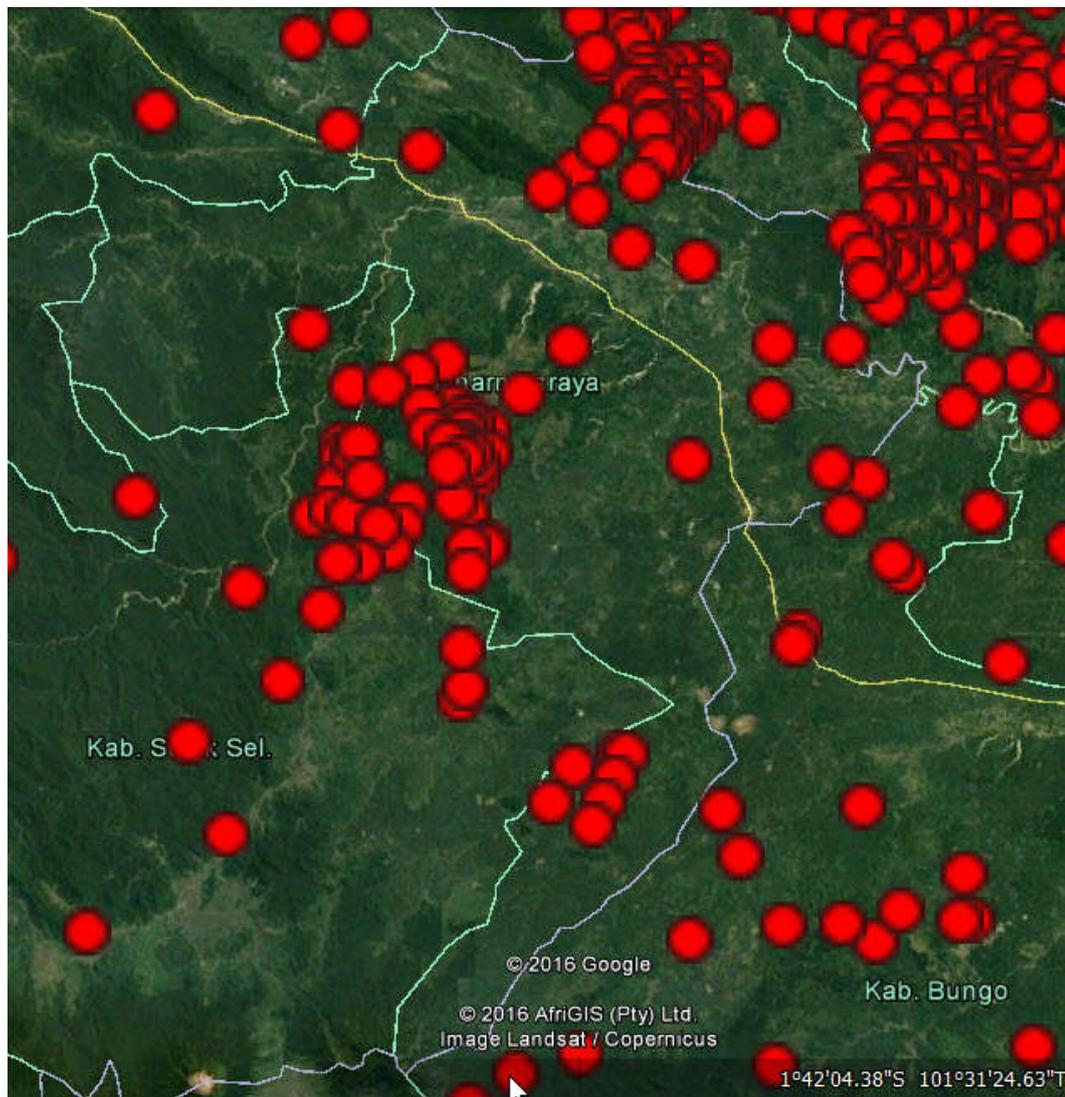
Gambar 12 : Peta Rencana DDDTLH Jasa Perlindungan Bencana Kabupaten Dharmasraya



Keterangan : Peta Rencana Daya Dukung dan Daya Tampung untuk Jasa Perlindungan dari Bencana yang akan disusun dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/ RPPLH Kabupaten Dharmasraya. (Sumber: Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016).



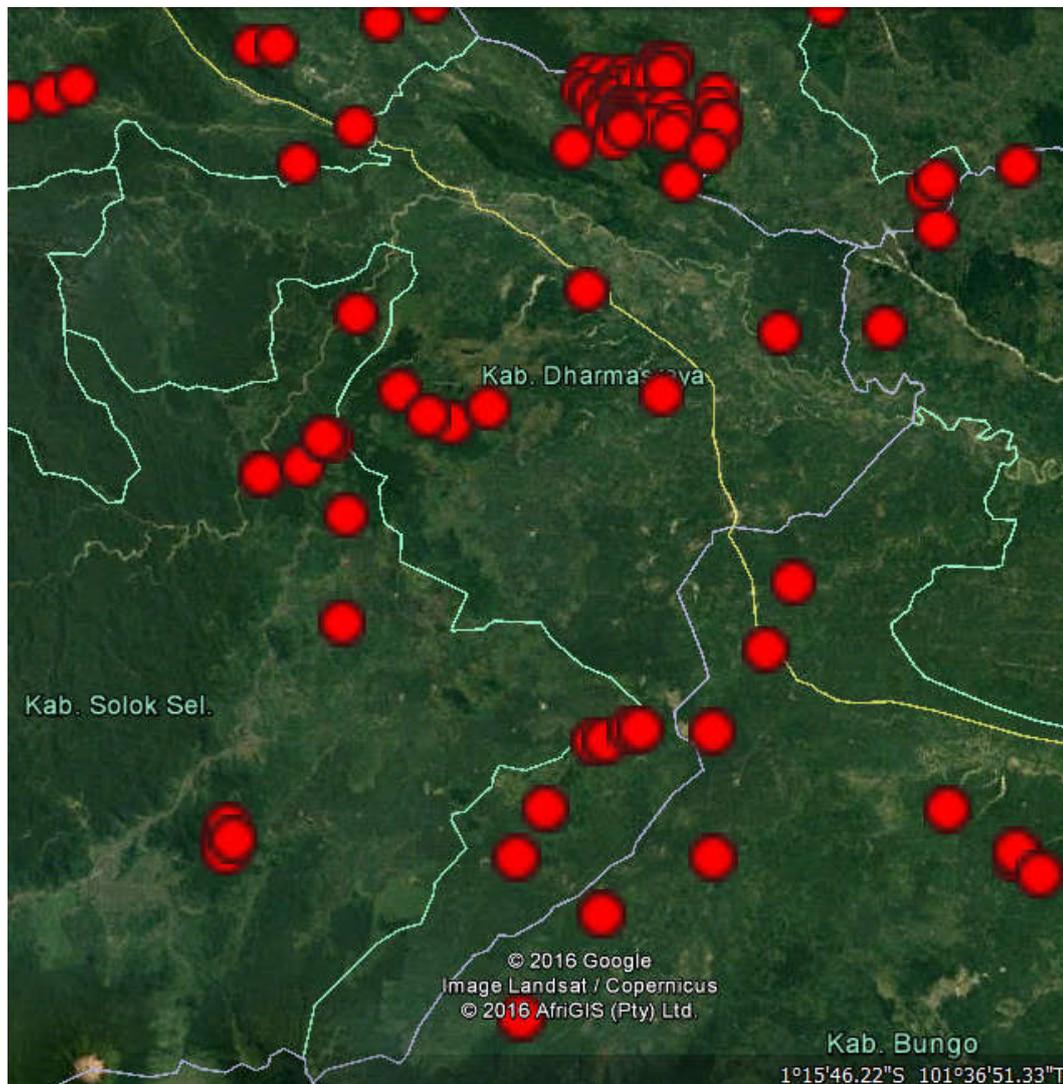
Gambar 13. Citra Satelit NOAA19 untuk Sebaran Titik Panas Tahun 2015 di Kabupaten Dharmasraya



Keterangan : website <http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran>, atas kerjasama antara Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK RI, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) dan LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional).



Gambar 14. Citra Satelit dari NOAA19 - TERRA - LAPAN untuk Sebaran Titik Panas Tahun 2016 di Kabupaten Dharmasraya



Keterangan : website <http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran>, atas kerjasama antara Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim KLHK RI, BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) dan LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional).

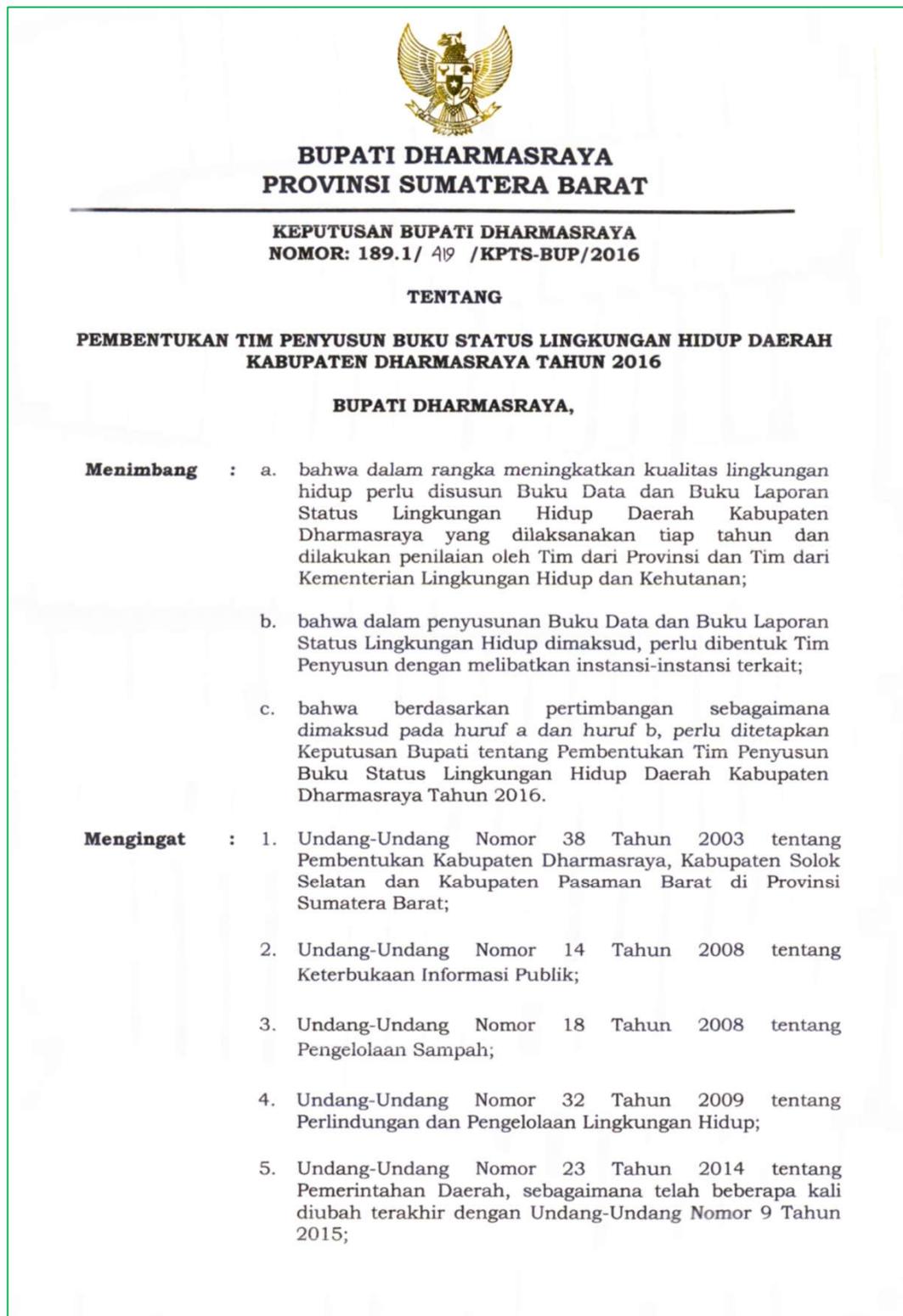
An aerial photograph of a tropical landscape. The foreground shows a small settlement with several buildings, including one with a prominent red and white striped roof. The middle ground is dominated by a dense forest of palm trees and other tropical vegetation. A river or stream flows through the landscape, winding between the trees. In the background, there are rolling hills and mountains under a bright blue sky with scattered white clouds. The overall scene is lush and green, typical of a tropical environment.

LAMPIRAN IV

FOTO - SK - KONSULTASI PUBLIK



Gambar 1. Foto SK Tim Penyusunan SLHD Tahun 2016 (IKPLHD) Kabupaten Dharmasraya





6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Kepada Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut;
- a. Pengarah, Rp. 1.450.000,-/orang/kegiatan
 - b. Wakil Pengarah, Rp. 1.400.000,-/orang/kegiatan
 - c. Penanggungjawab, Rp. 1.350.000,-/orang/kegiatan
 - d. Wakil Penanggung jawab I, Rp. 1.300.000,-/orang/kegiatan
 - e. Wakil Penanggung jawab II, Rp. 1.250.000,-/orang/kegiatan
 - f. Ketua Pelaksana, Rp. 1.200.000,-/orang/kegiatan
 - g. Pengumpul Data dan Hasil Pemantauan
 1. Koordinator, Rp. 550.000,-/orang/kegiatan
 2. Anggota, Rp. 400.000,-/orang/kegiatan
 - h. Penulis Buku Data dan Buku Analisis
 1. Penulis, Rp. 1.100.000,-/orang/kegiatan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

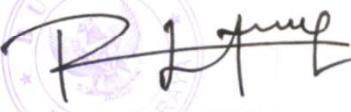
- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT** : Kepada Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut;
- a. Pengarah, Rp. 1.450.000,-/orang/kegiatan
 - b. Wakil Pengarah, Rp. 1.400.000,-/orang/kegiatan
 - c. Penanggungjawab, Rp. 1.350.000,-/orang/kegiatan
 - d. Wakil Penanggung jawab I, Rp. 1.300.000,-/orang/kegiatan
 - e. Wakil Penanggung jawab II, Rp. 1.250.000,-/orang/kegiatan
 - f. Ketua Pelaksana, Rp. 1.200.000,-/orang/kegiatan
 - g. Pengumpul Data dan Hasil Pemantauan
 1. Koordinator, Rp. 550.000,-/orang/kegiatan
 2. Anggota, Rp. 400.000,-/orang/kegiatan
 - h. Penulis Buku Data dan Buku Analisis
 1. Penulis, Rp. 1.100.000,-/orang/kegiatan



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2016 melalui DPA Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal, 11 November 2016

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

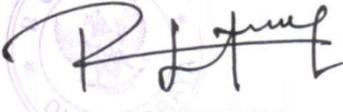
1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
2. Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
5. Kepala DPPKD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Kepala Dinas, Badan, Kantor se-Kab. Dharmasraya di Tempat;
7. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA****NOMOR : 189.1/419/KPTS-BUP/2016****TANGGAL : 11 November 2016****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016****SUSUNAN TIM PENYUSUN BUKU STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016**

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	Bupati	Pengarah	
2	Wakil Bupati	Wakil Pengarah	
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
4	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra	Wakil Penanggung Jawab I	
5	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab II	
6	Kepala Badan Lingkungan Hidup	Ketua Pelaksana	
PENGUMPUL DATA HASIL PEMANTAUAN			
	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
7	H. Miyarso, S.Sos, M.Si	Badan Lingkungan Hidup	Koordinator
8	Jalaluddin, SH	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
9	Deswati, S.Sos	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
10	Rasymi Nofriadi, SE	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
11	Danaswir, SKM	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
12	Samsul Azhar, A.Md Kl	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
13	Jumalita	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
14	Arnidawati Ahmad, SH	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
15	Sarti Novita, S.Si, Apt	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
16	Indi Syaukan, ST, M.Si	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
17	Zilfinanda, ST	Bagian Ekonomi Pembangunan dan Kesra	Anggota
18	Deswita, SH	Bagian Hukum dan Organisasi	Anggota
19	Frinaldi, ST, M.Sc	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Mulyadi Yansya, S.Sos	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
21	Yenti Hartati, SP	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian	Anggota
22	Jakiyo	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
23	Rima Sri Lestari, SP	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
24	Febriyeni Eka Putri, SKM	Dinas Kesehatan	Anggota
25	Jalinas, SE	Dinas Koperindag dan UMKM	Anggota
26	Rinda Agustina, ST	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
27	Yatmi Hasta Ferela, ST	Dinas PU	Anggota
28	Rabayana, S.Pt	Dinas Peternakan dan Perikanan	Anggota
29	Yulinar CH, SE	Dishubkominfoparbud	Anggota



30	Santy Virgo Putri, S.Hut	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Anggota
31	Nengsi Susti, SE, MM	DPPKD	Anggota
32	Siswani, S.Sos	Dinas Sosnakertrans	Anggota
33	Ayke Darsa, SE	BPS Kabupaten Dharmasraya	Anggota
34	Al Qudri	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat	Anggota
35	M. Yudi Agusrin	WWF	Anggota
36	Yona Angela, ST	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
37	Dewi Marlina, A.Md	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
38	Defri andi	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
39	Mardiana Chan, S.Si	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
40	Anggi Pratama Lusua, A.Md.Ak	Badan Lingkungan Hidup	Anggota
PENULIS BUKU DATA DAN BUKU ANALISIS			
	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	
41	Lasmiyati, M.Si	Penulis	
42	Ade Inggriani, ST	Penulis	
43	Dian Chandra Ardhani, ST	Penulis	


BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/419 /KPTS-BUP/2016
TANGGAL : 11 November 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING TIM

TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PENGARAH	Membina dan mengarahkan
WAKIL PENGARAH	
PENANGGUNG JAWAB	
WAKIL PENANGGUNG JAWAB I	
WAKIL PENANGGUNG JAWAB II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan dan operasional kerja Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2016. 2. Bertanggungjawab terhadap penyampaian Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 kepada Bupati Dharmasraya.
KETUA PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan koordinator dan anggota koordinator untuk proses pengumpulan dan penulisan data; 2. Bertanggungjawab terhadap kinerja dan operasional Tim Penyusun Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2016 kepada Penanggung jawab; 3. Bertanggungjawab terhadap penyampaian 2 (dua) buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 kepada Penanggung jawab.
KOORDINATOR PENGUMPUL DATA HASIL PEMANTAUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan data hasil pemantauan dari seluruh anggota; 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Koordinator Penulis terhadap data yang telah dikumpulkan.
ANGGOTA PENGUMPUL DATA HASIL PEMANTAUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data hasil pemantauan dari masing-masing institusi terkait terhadap data yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman Penyusunan SLHD Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Mengkoordinasikan hasil pengumpulan data dengan pimpinan masing-masing instansi; 3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Koordinator Pengumpul Data Hasil Pemantauan.



PENULIS	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penulisan Buku Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016;2. Melaksanakan penulisan Buku Analisis Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016;
----------------	--

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA



Gambar 2. Foto-Foto Kegiatan Rapat Tim Data dan Tim Penyusun SLHD/IKPLD Kabupaten Dharmasraya.



Keterangan : Foto-Foto Kegiatan Rapat Tim Data dan Tim Penyusun SLHD/IKPLD Kabupaten Dharmasraya di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup. (Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, 2016).



Gambar 3. Surat Permintaan Personil Teknis/Tim Ahli untuk Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (IKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

KA-DLH



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jalan Lintas Sumatera Km 2 Pulau Punjung Provinsi Sumatera Barat (27573)
 Telepon. (0754) 40333 Faksimilie. (0754) 40332 Email: Humas@dharmasraya.go.id
 Website: www.dharmasrayakab.go.id

Nomor : 660/ 57 / Sekre/DLH-2017
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Permintaan Personil Teknis Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2017**

Pulau Punjung, 28 Februari 2017

Kepada Yth.
 Sdr. (sebagaimana terlampir)
 di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:S.156/Setjen/DATIN/Set.0/2/2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra dan sesuai amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilaksanakan penyusunan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah tersebut akan dibentuk Tim Penyusun yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati, maka diharapkan kepada Kepala dan Pimpinan Instansi/Lembaga sebagaimana terlampir agar mengirimkan personil teknis yang akan menjadi bagian Tim Penyusun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.

Data personil tersebut agar segera disampaikan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya sebelum tanggal 10 Maret 2017.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA**



LELI ARNI, S.Pd., M.Si.
 Pembina Utama Muda(IV/c)
 NIP. 19580417 198112 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Dharmasraya (sebagai laporan) di Pulau Punjung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Sungai Dareh;
4. Arsip.



DAFTAR :

- a. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
- b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- c. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Kepala Badan Keuangan Daerah;
- e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Kepala Dinas Kesehatan;
- g. Kepala Dinas Pendidikan;
- h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- j. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- m. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan;
- n. Kepala Dinas Pertanian;
- o. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
- p. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- q. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- r. Kepala Dinas Perhubungan;
- s. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- t. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
- u. Kepala Badan Pusat Statistik;
- v. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat;
- w. Perguruan Tinggi;
- x. Pimpinan/Direktur WWF.



DATA PERSONIL

NAMA :

NIP :

PANGKAT/GOLONGAN :

JABATAN :

OPD/INSTANSI/LEMBAGA :



Gambar 4. Foto SK Tim Penyusunan SLHD Tahun 2017 (IKPLHD) Kabupaten Dharmasraya



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/041 /KPTS-BUP/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017**

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup perlu disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya yang terdiri dari Buku I (Ringkasan Eksekutif) dan Buku II (Laporan Utama);
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Buku I dan Buku II sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun dengan melibatkan instansi-instansi terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:
1. Tim Data, memiliki tugas:
 - a. melakukan pengumpulan data sesuai dengan ketentuan data yang tercantum pada petunjuk teknis Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Dharmasraya terkait validasi data per tahun;
 - b. melakukan penyempurnaan, memeriksa kelengkapan dan keterisian data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya;
 - c. melakukan penyusunan draft Tabel Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.
 2. Tim Analisis, memiliki tugas:
 - a. melakukan supervisi terhadap penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya;
 - b. melakukan penyusunan draft Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 (Buku I dan Buku II);
 - c. memberikan masukan terhadap permasalahan lingkungan hidup, isu-isu prioritas lingkungan hidup, status dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup (*pressure, state, and response analysis*).
- KETIGA** : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;



- KEEMPAT** : Kepada Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut;
- a. Pengarah, Rp. 1.600.000,-/orang/kegiatan
 - b. Penanggungjawab, Rp. 1.500.000,-/orang/kegiatan
 - c. Wakil Penanggung jawab Rp. 1.400.000,-/orang/kegiatan
 - d. Ketua Pelaksana, Rp. 1.350.000,-/orang/kegiatan
 - e. Koordinator Tim Data dan Analisis, Rp. 1.200.000,-/orang/kegiatan
 - f. Anggota Tim Data, Rp. 450.000,-/orang/kegiatan
 - g. Anggota Tim Analisis,, Rp. 1.200.000,-/orang/kegiatan
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 melalui DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal,

2017

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
6. Kepala Dinas, Badan, Kantor se-Kab. Dharmasraya di Tempat;
7. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 189.1/041 /KPTS-BUP/2017
TANGGAL : 28 April 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA TAHUN 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017

No	JABATAN		KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati		Pengarah
2	Wakil Bupati		Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah		Penanggung Jawab
4	Asisten Perencanaan dan Pembangunan		Wakil Penanggung Jawab
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup		Ketua Pelaksana
6	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup		Koordinator Tim Data dan Tim Analisis
TIM DATA			
	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM DATA
7	Jalaluddin, SH	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
8	Deswati, S.Sos	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9	Rasnam, A.Md	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10	Samsul Azhar, A.Md Kl	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11	Sarti Novita, S.Si, Apt	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12	Jumalita	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13	Danaswir, SKM.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
14	Arnidawati Ahmad, SH	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
15	Natra Hendri, A.Mak	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
16	Dewi Marlina	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
17	Warsono, S.Pd	Bagian Perencanaan dan SDA Setda Kab. Dharmasraya	Anggota
18	Deswita, SH	Bagian Hukum Setda Kab. Dharmasraya	Anggota
19	Amyuzelfita, ST	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
20	Rully Martha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
21	Negsi Susti, SE., MM	Badan Keuangan Daerah	Anggota
22	Oktavianus	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
23	Silva Kristina, S.Sos.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
24	Kanda Aulia Dia Pari Darusman, S.Hut	Dinas Pertanian	Anggota
25	Febriyeni Eka Putri, SKM	Dinas Kesehatan	Anggota



26	Jalinas, SE	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota
27	Drs. Burhanuddin, M.Si	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
28	Yatmi Hasta Ferela, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
29	Asmaidar, S.Pi.	Dinas Pangan dan Perikanan	Anggota
30	Iswardi	Dinas Perhubungan	Anggota
31	Anasir, SAP	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
32	Syaril Malfira, S.Pd	Dinas Pendidikan	Anggota
33	Yudelti	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
34	Edo Rizaldo, S.Pd	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
35	Ayke Darsa, SE	BPS Kabupaten Dharmasraya	Anggota
36	Al Qudri	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat	Anggota
	NAMA		KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM ANALISIS			
37	Lasmiyati, M.Si.	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator (Koordinator IKPLHD)
38	Dr. Ardinis Arbain	Perguruan Tinggi (UNAND)	Anggota
39	M Yudi Agusrin	WWF	Anggota
40	Dian Chandra Ardhani, ST	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
41	Ade Inggriani, ST	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA



Gambar 5. Surat Permohonan Bantuan Data Teknis Penyusunan Dokumen IKPLHD Tahun 2016 Kabupaten Dharmasraya



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Provinsi Sumatera Barat (27573)
 Telepon. (0754) 451506 Faksimilie. (0754) 451506

Pulau Punjung, 3 April 2017

<p>Nomor : 660/1721/Sekre/DLH-2017 Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Bantuan Data Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Dharmasraya Tahun 2016</p>	<p>Kepada Yth. di <u>Tempat</u></p>
---	---

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: S.156/Setjen/DATIN/Set.0/2/2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra dan sesuai amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilaksanakan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016. Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas Dokumen IKPLHD dan memenuhi beberapa kriteria data tersebut, maka bersama ini kami lampirkan beberapa data yang dibutuhkan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN DHARMASRAYA**



drg. ERINA, MKM
PEMBINA UTAMA MUDA/(IV/c)
NIP. 19620528 198802 2 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Sungai Dareh;
3. Sdr. Kabag Ekhang Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Arsip.

Keterangan : Surat permohonan bantuan data teknis dalam rangka Penyusunan Dokumen IKPLHD Tahun 2016 Kabupaten Dharmasraya untuk memenuhi kebutuhan data teknis yang masih kurang.





Gambar 6. Foto Undangan Rapat Konsultasi Publik Untuk Menjaring Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya



BUPATI DHARMASRAYA

Pulau Punjung, April 2017

Nomor : 660/46 / Sekre/DLH-2017
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Undangan Konsultasi Publik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2016**

Kepada Yth.
 Sdr. (sebagaimana terlampir)
 di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:S.156/Setjen/DATIN/Set.0/2/2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra dan sesuai amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka meningkatkan kualitas Status Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada Kepala Daerah yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan dilaksanakan Konsultasi Publik Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 untuk menjaring isu-isu prioritas bidang Lingkungan Hidup yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu/ 26 April 2017
 Pukul : 09:00 Wib - Selesai
 Tempat : Aula Lantai II Kantor Bupati

Diharapkan partisipasi aktif dari peserta masing-masing OPD/Instansi dalam mengungkapkan isu-isu prioritas bidang lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

WAKIL BUPATI DHARMASRAYA,



H. AMRIZAL DT. RAJO MEDAN, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Arsip.



DAFTAR :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya;
3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas Pendidikan;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan;
14. Kepala Dinas Pertanian;
15. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
16. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
17. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
18. Kepala Dinas Perhubungan;
19. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
20. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
21. Kepala Badan Pusat Statistik;
22. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat;
23. Perguruan Tinggi;
24. Pimpinan/Direktur WWF.
25. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
26. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
27. Camat Pulau Punjung
28. Camat IX Koto
29. Camat Sitiung
30. Camat Timpeh
31. Camat Padang Laweh
32. Camat Koto Baru
33. Camat Tiumbang
34. Camat Koto Salak
35. Camat Koto Besar
36. Camat Sungai Rumbai
37. Camat Asam Jujuhan



38. Warsono, S.Pd (Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya)
39. Deswita, SH (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya)
40. Amyuzelfhita, ST (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
41. Rully Martha (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
42. Nengsi Susti, SE, MM (Badan Keuangan Daerah)
43. Oktavianus (Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga)
44. Silva Kristina, S.Sos (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)
45. Kanda Aulia Dia Pari Darusman, S.Hut (Dinas Pertanian)
46. Febriyeni Eka Putri, SKM (Dinas Kesehatan)
47. Drs. Burhanuddin, M.Si (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
48. Yatmi Hasta Ferela, ST (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
49. Asmaidar, S.Pi (Dinas Pangan dan Perikanan)
50. Iswardi (Dinas Perhubungan)
51. Anasir, SAP (Dinas Komunikasi dan Informatika)
52. Syaril Malfira, S.Pd (Dinas Pendidikan)
53. Yudelti (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
54. Edo Rizaldo, S.Pd (Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja)
55. Ake Darsa, SE (BPS Kabupaten Dharmasraya)
56. Al Qudri (Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat)
57. Jalaluddin, SH (Dinas Lingkungan Hidup)
58. Deswati, S.Sos (Dinas Lingkungan Hidup)
59. Rasnam, A.Md (Dinas Lingkungan Hidup)
60. Samsul Azhar, A.Md.KI (Dinas Lingkungan Hidup)
61. Sartinovita, S.Si. Apt (Dinas Lingkungan Hidup)
62. Jumalita (Dinas Lingkungan Hidup)
63. Danaswir, SKM (Dinas Lingkungan Hidup)
64. Arnidawati Ahmad, SH (Dinas Lingkungan Hidup)
65. Natra Hendri, A.Mak (Dinas Lingkungan Hidup)
66. Dewi Marlina (Dinas Lingkungan Hidup)
67. Lasmiyati, M.Si (Dinas Lingkungan Hidup)
68. Dian Chandra Ardhani, ST (Dinas Lingkungan Hidup)
69. Ade Inggriani, ST (Dinas Lingkungan Hidup)



Gambar 7. Foto-foto Kegiatan Konsultasi Publik padaa hari Rabu tanggal 26 April 2017 di Aula Kantor Bupati Lt.II

A. Pembukaan Konsultasi Publik oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup drg.ERINA, MKM. dan Plt Sekretaris Daerah Kab.Dharmasraya, Leli Arni, Spd, M.Si., dengan moderator oleh Sekretaris DLH Miyarso, S.Sos., M.Si.





B. Penjaringan isu prioritas berdasarkan pendapat publik, dengan menyampaikan isu-isu lingkungan, permasalahan lingkungan yang dominan terjadi di lingkungan masyarakat.





- C. Penjaringan isu prioritas berdasarkan kriteria isu, pengisian isu lingkungan menurut pendapat masing-masing peserta melalui kertas yang disediakan panitia, pengumpulan kertas isu, dan menempelkan pengelompokan isu pada papan yang tersedia.



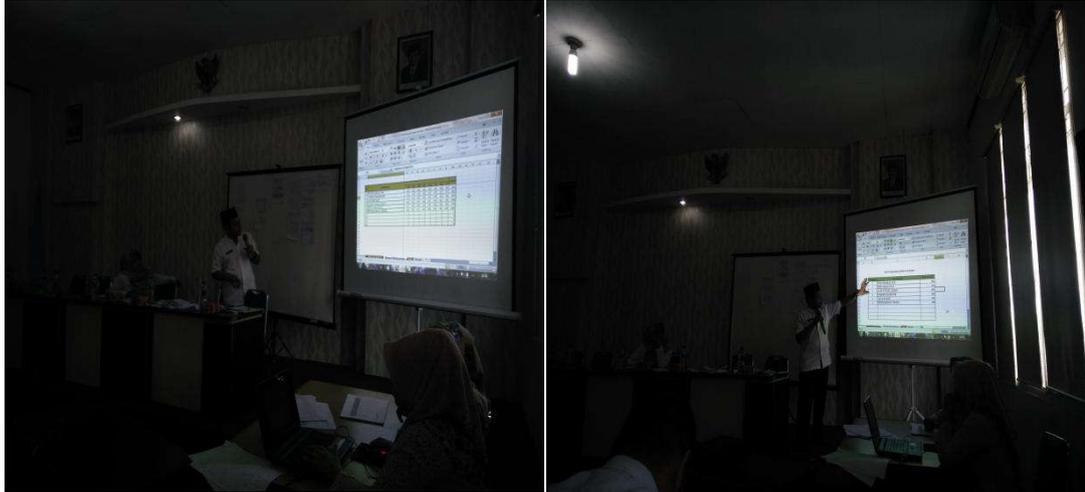


D. Pengisian skor penjaringan Isu Prioritas berdasarkan Kriteria: 1) Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan, 2) Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup, 3) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen):





- E. Penginputan skor dan penjumlahan hasil penjaringan isu lingkungan berdasarkan urutan skor tertinggi ke skor terendah untuk memilih isu prioritas lingkungan hidup:





- F. Penyampaian saran dan solusi untuk penetapan isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya, serta program kegiatan strategis yang akan disusun sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Dharmasraya di masa mendatang;





Gambar 8. Foto-Foto Hasil Skoring Penjaringan Isu Berdasarkan Kriteria Isu Lingkungan

Nama : Rahman
 Instansi/OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jabatan : KAPALA PANGG. PERATAAN DAN PENYATAN

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	29
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	28
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	6 7 8 (9) 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	29
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	161

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Suharna J
 Instansi/OPD : Kec. Padang Laweh
 Jabatan : Kasi Pem & Rantib

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10



Nama : Mukhtar
 Instansi/OPD : KWF
 Jabatan : SVE/VE/VEK Lapangan

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	29
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	30
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	30
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	28
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama :
 Instansi/OPD :
 Jabatan :

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	18
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	18
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : ALVI ANDRI
 Instansi/OPD : IBANI NAKSA
 Jabatan : Kepala Bidang Tenaga Kerja

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	30
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : SYAMSUL MAURI
 Instansi/OPD : DINAS PERIKANAN
 Jabatan : SEKRETARIS

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	28
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	25
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	22
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	25
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	20
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : Deswita
 Instansi/OPD : Bagian Hukum
 Jabatan : Kabid. Bantuan Hukum

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10



Nama : Yenti Buki
 Instansi/OPD : BKD
 Jabatan : Kasi Informasi dan Dokumentasi

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	(6) 7 8 9 10	21
3	TATA RUANG	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	(6) 7 8 9 10	20
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	6 (7) 8 9 10	24
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Deswati
 Instansi/OPD : DLH
 Jabatan : Kahid P.3 KLH

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	26
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 (7) 8 9 10	25
3	TATA RUANG	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	26
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	28
6	PENCEMARAN UDARA	(6) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	6 (7) 8 9 10	19
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : Asmaidar S.P.
 Instansi/OPD : Dinas Ponds dan Pura Pertiwangan
 Jabatan : Kasi Ponds dan U.M.M.

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	29
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
3	TATA RUANG	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 (10)	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	26
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	26
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	26
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Ketji S.Fas
 Instansi/OPD : Kec. Tupeh
 Jabatan : Kasi Pem & Bantu

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	25
3	TATA RUANG	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	(6) 7 8 9 10	20
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
6	PENCEMARAN UDARA	(6) 7 8 9 10	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	21
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : Hasan Basri, S.P.M.Si
 Instansi/OPD : KUMPEN DAG
 Jabatan : limbah rumah km 2 Rp

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	29
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
3	TATA RUANG	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	21
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	28
5	PERTAMBANGAN	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	21
6	PENCEMARAN UDARA	(6) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	21
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Ismi
 Instansi/OPD : Kel. Se. Kem. P.
 Jabatan : Kep. Sek. K. B. D. M. P.

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
2	LIMBAH DOMESTIK	6 (7) 8 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	24
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	26
4	ALIH FUNGSI LAHAN	(6) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	18
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 9 (10)	27
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : IKHWAN
 Instansi/OPD : DISBODPARIOLA
 Jabatan : KASI PEMBINAAN USMA

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	18
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	18
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	30
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : H. SYAFARUDDIN IB
 Instansi/OPD : DINAS PENDIDIKAN
 Jabatan : KABID PAUD / PAIF

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	23
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10



Nama : PAMPAUG SUTRISOO
 Instansi/OPD : KECAWATAN KOTA SALAK
 Jabatan : KASI SOSKESRA

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	26
3	TATA RUANG	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 (7) 8 9 10	(6) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	19
5	PERTAMBANGAN	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	21
6	PENCEMARAN UDARA	6 (7) 8 9 10	(6) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	19
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	139

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Darul Kuegi
 Instansi/OPD : Dinas Sosial pemberdayaan Prog. Prod. KB. fungsional Umum
 Jabatan :

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 (7) 8 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	23
2	LIMBAH DOMESTIK	6 (7) (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	6 7 8 (9) 10	23
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 (7) 8 9 10	(6) 7 8 9 10	22
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 (7) 8 9 10	26
5	PERTAMBANGAN	6 (7) 8 9 10	6 7 (8) 9 10	(6) 7 8 9 10	21
6	PENCEMARAN UDARA	(6) 7 8 9 10	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	20
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : SULARNO
 Instansi/OPD : KEC. PUNJUNG
 Jabatan : KAS. PAM

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	26
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
3	TATA RUANG	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	23
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	29
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	23
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Ira Chandra Andhika
 Instansi/OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 Jabatan : Staf PLH

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	26
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	29
3	TATA RUANG	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	26.
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	29
6	PENCEMARAN UDARA	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	21
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : Mami
 Instansi/OPD :
 Jabatan :

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	6 7 8 (9) 10	24
3	TATA RUANG	(6) 7 8 9 10	(7) 7 8 9 10	6 7 (8) 9 10	20
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	28
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
6	PENCEMARAN UDARA	(6) 7 8 9 10	(7) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	18
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Sausu
 Instansi/OPD :
 Jabatan :

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	29
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	27
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 9 (10)	27
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	29
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : Umi Lulam
 Instansi/OPD :
 Jabatan :

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	25
2	LIMBAH DOMESTIK	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	6 7 (8) 9 10	22
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	26
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	28
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Mardiana chan
 Instansi/OPD : DLH
 Jabatan : Staf

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
3	TATA RUANG	(6) 7 8 9 10	(6) 7 8 9 10	6 7 (8) 9 10	20
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 (8) 9 10	6 7 8 9 (10)	6 7 (8) 9 10	26
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10



Nama : Yeni
 Instansi/OPD :
 Jabatan :

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Ade
 Instansi/OPD : DLH
 Jabatan :

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	26
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	21
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10



Nama : FRINALDI
 Instansi/OPD : BAPPEDA
 Jabatan : Kabid. Fisik & Pasarana.

No	Isu	Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Kriteria		Jumlah/ Skoring
			Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	28
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	24
3	TATA RUANG	6 (7) 8 9 10	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	22
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	28
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 (7) 8 9 10	6 7 (8) 9 10	24
6	PENCEMARAN UDARA	6 (7) 8 9 10	(8) 7 (8) 9 10	(6) 7 8 9 10	28 21
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Sumalita
 Instansi/OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 Jabatan : Kasi Pengendalian Sengketa dan Litigasi

No	Isu	Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Kriteria		Jumlah/ Skoring
			Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 9 (10)	27
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
3	TATA RUANG	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	26
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 (7) 8 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 (7) 8 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	24
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	27
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : Arndawati Ahmad, SH
 Instansi/OPD : Dinas Lingkungan Hidup
 Jabatan : Kasi Penertaman dan Kerusakan

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	29
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	26
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	26
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	29
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	20
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Apni Yanti
 Instansi/OPD : Dinas Kesehatan
 Jabatan : Faskas - S.T.R.M.

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	26
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	27
3	TATA RUANG	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	22
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	25
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	24
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	19
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : Netti Helma
 Instansi/OPD : Diskominfo
 Jabatan : IC. cas

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	29
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	25
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	29
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 (8) 9 10	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	25
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10 165

Nama : BOBBY D. PIZA
 Instansi/OPD : DINAS PERHUMANGAN
 Jabatan : KEPALA DINAS

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	29
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
3	TATA RUANG	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	6 7 (8) 9 10	22
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	6 7 (8) 9 10	23
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	25
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10





Nama : Yuliana, OSF
 Instansi/OPD : Dinas Perkimatan
 Jabatan : Kasi

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 (9) 10	6 7 (8) 9 10	6 7 8 9 (10)	17
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 (8) 9 10	6 (7) 8 9 10	6 7 8 (9) 10	24
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 (7) 8 9 10	6 7 8 (9) 10	28
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	24
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	28
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	28
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10

Nama : Tri Handayani
 Instansi/OPD : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Dharmasraya
 Jabatan : Staf Statistik Sosial

No	Isu	Kriteria			Jumlah/ Skoring
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan sosekbud dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgen)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	29
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
3	TATA RUANG	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	28
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 (9) 10	6 7 8 9 (10)	29
6	PENCEMARAN UDARA	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	6 7 8 (9) 10	27
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10



Nama : FEBRIYENI Ika PUTRI, SIKRU
 Instansi/OPD : Dinas Kesehatan
 Jabatan : Kasubid Promosi & Pemberdayaan Masyarakat

No	Isu	Kriteria			TOTAL
		Merusak Sumber Daya Alam dan Lahan	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik yang luas perlu ditangani (urgensi)	
1	PENCEMARAN AIR	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
2	LIMBAH DOMESTIK	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
3	TATA RUANG	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9, 10	24
4	ALIH FUNGSI LAHAN	6 7 8 9 (10)	6 7 (8) 9 10	6 7 (8) 9, 10	26
5	PERTAMBANGAN	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	6 7 8 9 (10)	30
6	PENCEMARAN UDARA	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9 10	6 (7) 8 9, 10	21
7		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9, 10	
8		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9, 10	
9		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9, 10	
10		6 7 8 9 10	6 7 8 9 10	6 7 8 9, 10	

Keterangan: Skoring nilai antara 6 sampai dengan 10



Gambar 9. Surat Pernyataan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



BUPATI DHARMASRAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE**
Jabatan : **BUPATI DHARMASRAYA**

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Dharmasraya dimaksud adalah :

1. Penurunan Kualitas Air Permukaan;
2. Kegiatan Pertambangan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan;
3. Alih Fungsi Lahan Menjadi Perkebunan;
4. Pengelolaan Limbah Domestik (Sampah Domestik dan Limbah Cair Domestik);
5. Tata Ruang Dalam Penataan Drainase;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Pulau Punjung, April 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, SE



Gambar 10. Hasil Penjumlahan Nilai Isu Prioritas dari Tahap Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

Hasil Penjumlahan Nilai Isu Prioritas

Peringkat	Isu Prioritas	Total Scoring
1	PENCEMARAN AIR	962
2	PERTAMBANGAN	936
3	ALIH FUNGSI LAHAN	868
4	LIMBAH DOMESTIK	863
5	TATA RUANG	832
6	PENCEMARAN UDARA	809

Keterangan
Jumlah Kertas: 35 Buah

Pulau Punjung, 26 April 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Dharmasraya





Gambar 11. Penjumlahan Nilai Isu Prioritas dari Tahap Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016

No	Isu Prioritas	Nomor Urut Kertas																																		Jumlah		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		35	
1	PENCEMARAN AIR	27	29	30	29	30	26	29	27	28	27	29	27	24	29	24	28	27	27	30	26	27	30	29	30	21	23	30	23	26	26	30	29	25	30	30	962	
2	LIMBAH DOMESTIK	24	30	30	24	29	27	26	30	24	26	27	24	18	30	27	25	24	21	21	25	24	25	27	24	18	27	26	23	0	29	24	27	23	27	27	865	
3	TATA RUANG	25	28	24	22	27	22	26	26	22	21	28	27	27	27	30	22	21	21	20	24	24	20	21	26	18	24	24	22	24	26	20	27	26	20	20	832	
4	ALIH FUNGSI LAHAN	24	27	26	23	25	25	24	24	28	27	24	24	21	30	24	21	24	24	24	26	26	24	28	18	27	21	19	26	23	30	28	27	28	24	24	868	
5	PERTAMBANGAN	28	29	30	30	29	24	27	24	24	27	29	27	24	28	24	25	24	27	27	28	26	27	21	27	30	21	21	21	29	29	30	29	30	30	30	936	
6	PENCEMARAN UDARA	28	27	21	25	25	19	20	27	21	21	24	24	18	27	21	20	24	27	24	19	26	21	18	24	21	24	19	20	23	21	18	30	30	26	26	809	
7																																					0	
8																																						0
9																																						0
10																																						0





Gambar 12. Daftar Hadir Konsultasi Publik Penetapan Isu Prioritas dari Tahap Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Pulau Punjung
Telp. (0754) 451506 - Fax. (0754) 451506

Kode Pos 27573

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal : Rabu, 26 April 2017
Waktu dan Kegiatan : Konsultasi Publik Isu Prioritas

NO	NAMA	JABATAN / PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1	Ju. Arni	akta	[Signature]	
2	di. tana.	Kor. c.	[Signature]	
3	Nella Helma	Carer	[Signature]	
4	H. Mulya	Sec. DPH	[Signature]	
5	Sambel Agus	DPH	[Signature]	
6	Donal Kurni	Staf/Dinas Samudra	[Signature]	
7	Dia chandra kurni	DLH	[Signature]	
8	Amalbar	Kasi Perikanan umum	[Signature]	
9	EMSA KERTY	BPPD	[Signature]	
10	Tri Handayani	BPS Dharmasraya	[Signature]	
11	Dina Armatyuki	BPPD	[Signature]	
12	Suhurman	Kor. Pd. Lurah	[Signature]	
13	Dori Priscy	Bag. umum	[Signature]	
14	ALV, Ambar	TRANSKRIP	[Signature]	
15	Zumalir	BLH	[Signature]	
16	Dawaruz	DLH	[Signature]	
17	Ade Inggrani	DLH	[Signature]	
18	ST N Takep	COMINFO	[Signature]	
19	Bobby P. Piza	Dishub	[Signature]	
20	Sulawho	Kee PI Pujung	[Signature]	
21	Pulau Bera	Kurperda	[Signature]	
22	ICHWAN	DISTODPARPORA	[Signature]	
23	SYAFARUDIN IA	KASIBO PAUD/PRAF	[Signature]	
24	Kor. c.	Kasi Pem. Tumpuk	[Signature]	
25	Yenti Buki	Kor. infor dok	[Signature]	
26	BAKDIANG C	Kasi Sarana	[Signature]	
27	Frinaldi	Bappeda	[Signature]	
28	Yulian	Perwakilan	[Signature]	
29	Spemul Bai	Seleksi PIS	[Signature]	
30	Destina	Bag. Hutan	[Signature]	
31	Isha	Jelajah Sejahtera	[Signature]	
32	Febriyeni Elka Purni	Kasi Promaker	[Signature]	
33	Ami Yanti	Pastak STBM	[Signature]	
34	Zultraika PE	GP 3 KAS	[Signature]	
35	Abdullah M. Pak. Yip	WIFI Negeri Cendek	[Signature]	
36	Amran Umar	WWF Indonesia	[Signature]	
37	Mukhtar	WIFI Indonesia	[Signature]	
38	tem	DLH	[Signature]	
39	Mardiana chani	DLH	[Signature]	
40	Umi pulsum	DLH	[Signature]	



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Alamat : Jl. Lintas Sumatera Km 5 Sikabau Pulau Punjung
 Telp. (0754) 451506 - Fax. (0754) 451506

Kode Pos 27573

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/ Tanggal :

Waktu dan Kegiatan :

NO	NAMA	JABATAN / PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1	Mulyadi	DLH		
2	Andi Pratama	DLH		
3	Wibin Suwardi	Kasi Kam Kec. atung		
4	Pusi Lesraei	WWF		
5	Lesraei E.	WWF		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

 drg. ERINA, MKM
 NIP. 19620528 198802 2 001





LAMPIRAN V

BIODATA

TIM PENYUSUN

**Gambar 1. BIODATA TIM PENYUSUN I. Dr.Ardinis Arbain**

BIODATA	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Identitas Diri	
Nama	: Dr. Ardinis Arbain
Tempat/tgl Lahir	: Bukittinggi/ 14 Juni 1952
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Dosen Biologi FMIPA Unand
Jabatan	: Dewan Pakar PSLH Unand
Alamat	: Komp. Mawar Putih Blok N No. 13, Padang
Telp. Rumah	: 0751- 492209
Handphone	: 08126713290
Pendidikan	
S1	: Biologi – UGM
S3	: Biologi botani Universitas Heidelberg, Jerman
Training/Kursus	
1. Pengelolaan Fungsi Pelatihan	: 1996
2. Penyusunan Renstra P.S. Lingkungan	: 1998
3. Audit Lingkungan	: 2010
4. Valuasi Lingkungan	: 2010
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	: 2016
Karya Ilmiah/ Publikasi	
1. Studi Populasi Tapir di Taman Nasional Kerinci Seblat	: 1998
2. DAS Sumatera Kaninchen	: 1992
3. Percabangan pada Drynaria	: 1995
4. Pteridophyta in Kayu Tanam Area	: 1996
5. Keanekaragaman Hayati di Kepulauan Mentawai. Makalah di sampaikan pada Seminar Nasional tentang Pembangunan Pulau	: Maret 1997



- Pulau Kecil, Terpencil dan Strategis. Bukittinggi.
6. Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Makalah : Agustus 1997
disampaikan pada Kursus AMDAL. PSLH UNAND.
 7. Biodiversitas dan Pengendalian Hama. Makalah : Agustus 1997
disampaikan pada Seminar Regional Pestisida Ramah
Lingkungan. UNITAS.
 8. Kaji Ulang Manajemen Irigasi Indonesia. Makalah : Agustus 1997
disampaikan pada Lokakarya Penyesuaian Kelembagaan
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pemberdayaan Petani.
Bukittinggi.
 9. Autentitas Hutan Dalam Penentuan Zona Penyangga. Makalah : Agustus 1997
disampaikan pada interkonferensi PSL. Banda Aceh.
 10. Penyesuaian kelembagaan pengelolaan Sumber daya air dan : Agustus 1997
Pemberdayaan petani (kaji ulang manajemen irigasi Indonesia)
 11. Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati dan Pembagian : September 1997
Keuntungan Secara Adil dan Merata. Makalah disampaikan
pada Seminar/Sarasehan Keanekaragaman Hayati. Padang
 12. Ekosistem Pesisir dan Laut. Makalah di sampaikan pada : Oktober 1997
Lokakarya Pesisir dan Pelatihan Masyarakat. Padang.
 13. Masalah Lingkungan Hidup dan Kawasan Lindung di : Maret 1998
Sumatera Barat. Makalah disampaikan pada Diklat
Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Sumatera Barat.
Padang.
 14. Pengertian, Proses dan Manfaat AMDAL. Makalah : April 1998
disampaikan pada Kursus AMDAL.
 15. Studi Perambah Hutan di Taman Nasional Kerinci Seblat. : April 1998
(Kab. Solok) Laporan Penelitian.
 16. Studi populasi Tapir di Taman Nasional Kerinci Seblat. : Oktober 1998
Bengkulu.
 17. Arti Penting Taman Nasional Kerinci Seblat dan Kawasan : November 1998
Penyangga. Makalah disampaikan pada Pelatihan Masyarakat





- Desa Penyagga TNKS. Muaro Sijunjung.
18. Konservasi dan Pembangunan Daerah Terpadu. Studi 18 Des : 1998
ICDP TNKS. Laporan Penelitian.
 19. Minyak Atsiri dari Tanaman Asli Siberut. Laporan Penelitian. : April 1998
 20. Konsep Dasar Keanekaragaman Hayati. Makalah disampaikan : Juli 1999
Pada Lokakarya antara Bappedalda Sumbar dan PWI.
 21. Pengendalian Pencemaran. Makalah disampaikan pada : Juli 1999
Pelatihan Pemantauan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup.
 22. Pengelolaan Limbah Padat dan Permasalahannya. Makalah : Oktober 1999
disampaikan pada Seminar tentang Pengelolaan Limbah di
Pasca Sarjana UNP.
 23. Keanekaragaman Hayati di TNKS dan Kegiatan Konservasi di : November 1999
Desa-desa TNKS. Makalah di sampaikan pada Pelatihan
ICDPP-TNKS. Solok.
 24. Studi Populasi Tapir (*Tapirus indicus*) di Taman Nasional : April 2000
Kerinci Seblat (Prosiding hasil penelitian)
 25. Pengelolaan lingkungan hidup dan otonomi daerah : Agustus 2001
(kuliah umum Pascasarjana UNAND di UNRI)
 26. Pengelolaan integratif Danau Singkarak menuju pemanfaatan : Maret 2002
Berkelanjutan (Makalah pada seminar lingkungan hidup
dampak PLTA Singkarak)
 27. Interelasi aspek legalitas pengelolaan sumber daya air : September 2002
(visi irigasi no. 23)
 28. Regional dialogue on water governments Bangkok Thailand : November 2002
(Participant)
 29. Peningkatan kesadaran lingkungan global dan implikasinya : Agustus 2003
terhadap pengelolaan hutan dan penelitian bidang kehutanan
(prosiding nasional ke-6 MAPEKI)
 30. Pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan hidup : Desember 2003
daerah tangkapan air Danau Singkarak, Kabupaten Solok.





31. Workshop tentang pelestarian tapir (di Krau, Malaysia) : 2003
32. Pengolahan limbah domestic (makalah pada diklat pengawasan serta pengendalian pencemaran) : Agustus 2004
33. Ekosistem danau dan pengelolaannya makalah pada sosialisasi masalah lingkungan hidup di Maninjau) : September 2004
34. Pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan hidup Wilayah Kecamatan Lembah Gumanti. : Desember 2004
35. Kajian alternatif dalam Amdal (Makalah pada kursus Amdal PSLH Universitas Andalas) : Juli 2005
36. Pelingkupan (Makalah pada kursus Amdal PSLH Universitas Andalas) : Juli 2005
37. Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya Alam berkelanjutan (Makalah pada pelatihan kader-kader lingkungan hidup Dinas Kehutanan Sumatera Barat) : Agustus 2005
38. Seminar on Engineering for environment in Bandung : November 2005
39. Studi Areal Konservasi dalam konsesi Perkebunan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman. : November 2006
40. Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Tanah Datar : Desember 2006
41. Penatar pada pelatihan AA kopertis wilayah X (Aplikasi tindakan kelas) : Juli 2007
42. Studi Ekosistem Danau Diatas. Laporan Penelitian : Oktober 2007
43. Kualitas lingkungan hidup Sumatera (Anggota tim penyusun) : Desember 2007
44. Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Tanah Datar : Desember 2007
45. Manusia dan Lingkungan (Makalah pada sosialisasi masalah lingkungan hidup di Padang Panjang) : Juni 2008
46. Penatar pada pelatihan AA kopertis wilayah X (Aplikasi tindakan kelas) : Juni 2008
47. Sumatera Barat menuju propinsi Konservasi : Juni 2009
48. Pokok pokok pikiran untuk pengelolaan Mentawai Pasca Tsu Name. Round Table Discussion. : November 2010



49. Taman Kehati Sumatera Barat (disampaikan pada pertemuan
Pengelolaan Kehati KLH di Banjarmasin) : November 2010
50. Tinjauan kritik MP3EI dari sudut lingkungan : 2011
51. Status lingkungan hidup ekoregion Sumatera : 2012

Pengalaman Kerja

1. Ketua PSLH 1994-2004
2. Dekan FMIPA 2004-2008
3. Ketua Prodi Ilmu Lingkungan 1999-2004
4. Ketua Prodi Ilmu Lingkungan 2008-2014
5. Ketua Senat Universitas Andalas 2014-Sekarang

Demikianlah Biodata ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 03 Mei 2017
Yang Menyatakan,

Dr. Ardinis Arbain



Gambar 2. BIODATA TIM PENYUSUN 2. YUDI AGUSRIN SYAHRIR.

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DATA

Name	M. YUDI AGUSRIN SYAHIR
Place/BOD	Jakarta, August 19, 1969
Gender	Male
Education	Bachelor of Science in Anthropology Padjadjaran University – Bandung, Indonesia (1996)
	Master student majoring in Environment and Development at UKM (Universiti Kebangsaan Malaysia) (2015)
Address	Perumahan Taman Firdaus Blok D-12A Jl. HR. Soebrantas, Panam Pekanbaru - Riau 28294
Mobile Phone	+62 812 757 8740
E-mail	myudias@gmail.com yudiagusrin@yahoo.com

OBJECTIVE

SOCIAL DEVELOPMENT, STAKEHOLDER ENGAGEMENT AND ECOSYSTEM SERVICES

GENERAL QUALIFICATIONS

Achievement target oriented professional with 21 years' experience in areas of SOCIAL DEVELOPMENT, STAKEHOLDERS ENGAGEMENT and ECONOMIC ENVIRONMENT RESEARCH. Additional experience in the past seven years involved in the activities of spatial planning and conflict resolution based on community.

SUMMARY

In 2016 Received WWF Prince Bernhard Scholarships For Nature Conservation

In 2009 received the Russell E. Train Education for Nature Program (EFN) Professional Development Grant from WWF US

- In 2015 has succeeded in encouraging the cooperation of the parties through a memorandum of understanding (MoU) with the BBKSDA Riau and BKSDA West Sumatra, and also Andalas University for conservation area protection activities as well as research collaboration.
- Social Development Consultant for project "The Utilization of Waste Sago Industry on Meranti Islands district" by LP2M UMRI supporting by USAID-ICED. (September – December 2014)
- Involved in developing and strengthening smallholders groups in Ukui sub-district, Pelalawan District, Riau Province to obtain RSPO certification. The "Amanah" Association is the first Indonesian independent smallholders to receive RSPO certification for sustainable palm oil plantation management and the second at the global level. The project is a collaboration between WWF Indonesia and Carrefour Foundation. (2012 – 2013)
- Members of expert team for "Opportunities and potential of Corruption in REDD+ projects in Indonesia"



CURRICULUM VITAE

- are established by Transparency International Indonesia – Riau Field Office. (May – June 2012)
- Encouraging the Ministry of Forestry, in particular the Directorate General Management Environmental Services, Conservation Areas and Protected Forest (PJKKHL) to create the Tesso Nilo National Park as one of four national park became of REDD demonstration activities (DA) in Indonesia, which is based on Government Regulation. (2011)
 - In collaboration with Andalas University for assessment of REDD governance for Tesso Nilo Landscape. And starting in September 2009 until June 2010 assisting consultant from CIFOR for assessment community conflict mitigation strategy in Tesso Nilo areas (4 District, 9 sub-district, 23 villages). (March-June 2009).
 - In collaboration with Andalas University for Preparation of Technical Recommendation Socio-Economic Development of Communities surrounding Tesso Nilo Forest. (Juli – October 2006)
 - Mapping of potential social conflict in Timika areas at Papua surround PT Freeport activities (Nawaripi and Tipuka tribes) and encourage indigenous people in the Timika area to be able to dialoguing with the company to talk about their customary land tenure. (June 2001-December 2002)

Another part of the successes and achievements started since mid-2009, direct involvement in the activities of Corridor RIMBA until implementations in three priority districts (Kuantan Singingi, Dharmasraya and Tebo) representing three provinces (Riau, Jambi and West Sumatera). My work is build communication and coordination with local governments (provincial and district level) at Corridor RIMBA (Riau, Jambi and West Sumatra) in support of the achievement of Sumatra Road Map 2020 and realize the mandate Presidential Regulation No. 13/2012 on spatial planning of the island to prevent degradation of the quality carrying capacity and environmental capacity to support livelihoods and management of natural resources better.

SUMMARY OF EXPERIENCE

March 2016 – present

As a Program Manager Cluster 1 – RIMBA Program

This position to ensure the implementation of strengthening the forested wildlife corridors through Sustainable Production and Consumption (SPC), supply chain and renewable energy (POME) practices that applied to small holder to mitigate expansion into protected forest and develop business case of agroforestry of rubber in critical protected forest in RIMBA Corridor. Working areas: 2 Provinces (West Sumatra and Riau) that consist of Kuantan Singingi, Dharmasraya, Kampar, Dharmasraya, and Sijunjung Districts

- + Leader the implementation of the project, thus contributing to the development of the overall of project strategic planning and policy development in the implementation of the project.
- + Works within sustainable oil palm smallholders and chain of custody, sustainable nature jungle rubber, and renewable energy using mills waste in RIMBA corridors.
- + Required to make quarterly reports, six-monthly and annual reports. Internally to coordinate with the Technical Manager, experts and consultants. At the management level, Program Manager Cluster 1 manages the project finance and project administration.

October 2011 – September 2016

Secretary of Riau Watersheds Forum (Forum DAS Riau)

November 2014 – February 2016

As a Stakeholder Engagement & BMP Senior Officer

- + Encouraging communication with stakeholders with regard to collaborative management, legal cooperation or even build organizational synergy with WWF Indonesia
- + Developed and encourage collaboration with other stakeholders in work conservation, especially government and university.
- + Setting up the promotions material or documents BMP for companies or public
- + Promotions and convince companies or public regarding BMP





CURRICULUM VITAE

- + Facilitating the process of BMP in central Sumatra level for companies or public
- + Coordinate the monitoring and evaluation of collaborative partnership with other stakeholders

November 2012 – October 2014

WWF Indonesia

As a **Corridor Management and REDD Leader**

- + Provide technical assistance to local governments in RIMBA corridor is one of potential issue that it is relevant to promote regional cooperation (Presidential Decree No.13/2012 of Sumatra achieve ten Governors commitment on securing Sumatra ecosystem. RIMBA corridor as an example for corridor management Spatial Plan). The RIMBA corridor area is sharing from at least nineteen districts across three provinces. Spatial plan is one of instrument that can be used to establishing institutional sustainability and replication for RIMBA Green Economy
- + Organize stakeholders to develop governance concept of REDD that include institutional arrangement, financial mechanism, involvement of stakeholders that combined into demonstration activity concept.
- + Supporting effectiveness and efficiently organizing DAS Forum (Riau Watersheds Forum) to enhance actively collaborative with multi stakeholders (governments, universities, companies and NGO's). The formulated strategy of multi-party watershed management implementation as well as cross-province (Riau and West Sumatera)

September 2009 – October 2012

As a **REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) Senior Officer**

- + Proposed demonstration activity in Tesso Nilo Landscape is to substantially and measurably reduce emissions from deforestation and forest degradation (REDD) in the landscape through an at-scale, incentive-based, participatory approach and drivers of deforestation in Riau landscape (160,000 ha
- + Consolidate final governance report of REDD for Riau landscape with approval of local government and REDD commission. And also organize stakeholders meeting at provincial and district level to get feedback on REDD governance in Riau landscape.

June 2006 – August 2009

WWF Indonesia

As a **Community Engagement Leader** in Riau Conservation Program

- + To develop sustainable livelihood options for community that live in the surroundings of forests. All these communities rely heavily on the forests and when no assistance is given to these communities in the development of their economies they will remain dependent on forest resources. This program will be implemented in close cooperation with the Community Forum, local government and private sector

April 2005 – March 2006; YAYASAN AKATIGA (Center for Study and Social Analysis), Bandung,

As a **Research Assistant**,

- Research and study about "Promoting Fair Regulations in Indonesia; A Study and Advocacy in Improving Local Level Investment Environment in Tangerang and Pasuruan" Supported by European Union (EU)
- Planning research for labor community problems to support for policies and strategic plannings.

August 2004 – March 2005; NSR (National Survey Research), Jakarta, Indonesia

As a **Researcher**, project based

- Analyzing and research social and economic community activities in Jakarta area.
- Marketing research and analyzing data
- To gain information from field activities and it was utilized for developing field wise program strategic, data-base, and monitoring.





CURRICULUM VITAE

September 2003 – July 2004; YAYASAN PULIH (Center for the Prevention and Intervention of Psychological Trauma), Jakarta

As a **Community Recovery and Empowerment Leader** project based.

- Planning and analyzing information about community problems to support for psychosocial policies and strategic plannings.
- Provide technical assistance on community-based psychosocial healing programs for communities affected by violence.

(1999 – August 2003); YAYASAN PUSAKA SEJATI, Jakarta, Indonesia

Coordinator for Information Mediation and Dissemination (May 2001 - August 2003)

- Supervising "Recognition Programs" and community development transition in Timika, Papua.
- Developing network with the local Government and PT Freeport Indonesia and also other stake holders in Timika, Papua.
- Developing field wise program strategic for community, such as health and agriculture.
- Coordinating information provision and socializing activity media for internal Monitoring social and economic local community activities in Timika, Papua
- Providing media for developing health and agriculture sector.
- Facilitating discussions and dialogues with field facilitators in order to gain information covering their field activities and problems. Information was utilized for developing field wise program strategic, monitoring and evaluation.

As **Research and Development Assistant** (November 1999 – May 2001)

- Planning Recognition programs and community development transition in Timika, Papua.
- Monitoring social, culture and economic local community activities in Timika, Papua
- Data compilation and periodic program report writing. And also documentation and data base.

1998-1999 CENTER FOR POLICY AND IMPLEMENTATION STUDIES (CPIS), Jakarta, Indonesia

As **Project Associates**

- Analyzing, monitoring and evaluating social safety net from Ministry of Finance and research's
- Analyzing the development of small and medium entrepreneur scheme credits from Ministry of Cooperation, Small and Medium Entrepreneur Division.

PROFESIONAL QUALIFICATION or SPECIALIZED TRAINING

2011 – Faculty of Forestry, University of British Columbia, Vancouver, Canada

To learn how to use Forest Carbon Modeling Tools and Forest Economic

2009 - 2010, as a **Reviewer** for HCVF (High Conservation Values Forest) to PT Asian Agri (Inti IndoSawit Subur), Ukui Sector, Ukui, Pelalawan, Riau

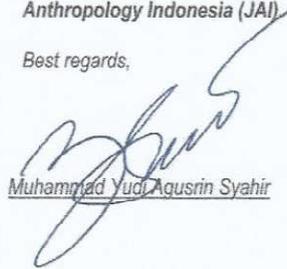
2009 - Stanford University in California, USA

Conservation Strategy Fund's International Training Course, about "Economic Tools for Conservation"

2006 – Yayasan AKATIGA (Center for Study and Social Analysis), Bandung

Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Sosial (Training of Social Scientific Essay Writing), by *Journal of Anthropology Indonesia (JAI)*

Best regards,


Muhammad Yud Agusrin Syahir





Gambar 3. BIODATA TIM PENYUSUN 3. LASMIYATI, S.Si., M.Si.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	
DATA PRIBADI	
Nama	: Lasmiyati, S.Si., M.Si
Tempat, Tanggal Lahir	: Padang, 23 Maret 1980
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan Lintas Sumatera Km.2 Kompleks Mesjid Babussalam, Nagari IV Koto, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat
No Telp/HP	: 0812-6678-8220
Alamat Email	: mamik_lasmiyati@yahoo.com
RIWAYAT PENDIDIKAN	
SD	: SD Negeri 29 Padang, 1986 – 1992
SMP	: SMP Negeri 9 Padang, 1992 – 1995
SMA	: SMU Negeri 1 Padang, 1995 – 1998
Strata 1	: Kimia, Universitas Andalas Padang, 1998 - 2002
Strata 2	: Kimia Material dan Industri, Kimia, Universitas Andalas Padang, 2004 - 2006
PENGALAMAN KERJA	
2000 – 2003	: Asisten Kimia Dasar, Laboratorium Kimia Dasar, Universitas Andalas, Padang
2001 – 2002	: Asisten Kimia Fisika, Jurusan Kimia, Universitas Andalas, Padang
2002 – 2003	: Asisten Pemisahan dan Elektroanalisis, Kimia Analisis Instrumen, Jurusan Kimia, Universitas Andalas, Padang
2004 - 2005	: Asisten Kimia Dasar, Laboratorium Kimia Dasar, Universitas Andalas, Padang



2006 - 2010	: Group Leader (Level 5), Application R&D Paper Section, Quality Control Departement, Quality Assurance Division, PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Corp. (Sinarmas Group), Perawang Mill, Riau
2010 - Februari 2010	: Vice Assistant Manager (Level 6), Application R&D Paper Section, Quality Control Departement, Quality Assurance Division, PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Corp. (Sinarmas Group), Perawang Mill, Riau
2010 – April 2014	: Staf (Pengendali Dampak Lingkungan) Badan Lingkungan Hidup.
April 2014 - 2016	: Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Badan Lingkungan Hidup.
2016 - Sekarang	: Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup.

PELATIHAN & SEMINAR

2006	: Felt Conditioning Technology and Enzyme Applications, from Buckman Laboratories, PT. IKPP, Tbk. Perawang Mill. Riau.
2007	: APP (Asia Pulp and Paper) Indonesia Intellectual Property Seminar, PT. Pindo Deli, Karawang Mill. Banten.
2007	: Paper Technology Training, PT.IKPP, Tbk. Trainer professors from Karlstad University and Tigilium AB Sweden. Perawang Mill. Riau.
2007	: Training and Support Services for FSC Chain of Custody Training by Global Forestry Services, PT. IKPP, Tbk. Perawang Mill, Riau.
2007	: Seminar Pulp dan Kertas. Aplikasi Bioteknologi dalam Industri Pulp dan Kertas dan “L&W Instrument Training”, BPPK (Balai Besar Pulp dan Kertas), Bandung, Indonesia.
2008	: Training Wet-End Chemistry. KEMIRA. PT. IKPP, Tbk. Perawang Mill. Riau.
2008	: Training for Six-Sigma Green Belt (Statistical Analysis Data), PT. IKPP, Tbk. Perawang Mill. Riau.
2008	: Pulp Technology Training, PT.IKPP, Tbk. Trainer professors from Karlstad University and Tigilium AB Sweden. Perawang Mill. Riau.
2009	: Internal Training ISO 9001 : 2008. PT.IKPP, Tbk. Perawang Mill.
2009	: Internal Training ISO 14001 : 2004. PT.IKPP, Tbk. Perawang Mill.
2010	: Bimtek Pelaksanaan Pengambilan Sampel dan Pengujian Parameter Kunci Kualitas Air Tingkat Menengah I. Padang.



2010	: Bimtek Peningkatan Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Laboratorium Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Kualitas Air. Medan. Sumatera Utara. (18,5 JP).
2011	: Pelatihan Pemantauan Kualitas Air Untuk Teknik Sampling dan Pengujian Parameter Kunci Tingkat Menengah II. Padang.
2011	: Training and Seminar Chemical Safety and Security Awareness. Himpunan Kimia Indonesia (HKI). Sandia Laboratories, and Chemical Security Engagement Program (CSP), United State Departement of State, USA. Pekanbaru. Riau.
2013	: Pelatihan GIS (Geographical Information System), WWF.
2013	: Pembinaan Perencanaan Melalui Daya Tampung Sungai. Batam.
2013	: Pelatihan Pemetaan dan Pengukuran Karbon. WWF Indonesia.
2013	: Pembinaan Aparat Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SPM Lingkungan, PPE Sumatera. Pekanbaru. Riau.
2013	: Peningkatan Kapasitas Penilaian Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim Bagi Kabupaten/Kota. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, KLH - CCROM SEAP IPB Bogor, Padang.
2014	: Diklat Pemantauan Kualitas Lingkungan. Batam. (30 JP).
2017	: Pelatihan GIS (Geographical Information System), MCAI - WWF.
2017	: Bimtek Pengelolaan Data/Peta untuk Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan berbasis Jasa Ekosistem.

PENGALAMAN PENELITIAN

Strata 1

Kerja Praktek (2001)	: Natural Product Laboratory, SEAMEO – BIOTROP (South-East Asian Ministry Education Organization-Biology Tropical), Bogor.
Tugas Akhir (2002)	: Pemisahan Ion Iodida dan Iodat Secara Kromatografi Ion Dengan Menggunakan Kolom ODS (Oktadesil Silika) Yang Dimodifikasi Dengan Setiltrimetilamonium Bromida (CTAB).
Seminar	: Lasmiyati, Safni, Zulfarman, "Separation of Iodate and Iodide by Ion Chromatography Using an ODS Column Modified with Cetyltrimethylammonium", presented on Asian Conference on Chemistry in Industry and Environment, Padang, September 3 –5, 2002.
Publikasi	: Lasmiyati, Safni, Zulfarman, Toyohide Takeuchi, "Pengaruh Fasa Gerak Terhadap Pemisahan Ion Iodat dan Iodida Secara



Kromatografi Ion Pada Kolom ODS yang Dilapisi Setiltrimetilamonium Bromida” ISSN: 0853-8018, Jurnal Kimia Andalas (Andalas Chemistry Journal), Vol. 9(2), 57-61, 2003.

: Safni, Safni and Abdullah, Zaimi and Sinta, Dewi and Lasmiyati, Lasmiyati and Takeuchi, Toyohide (2005). Pengaruh Fasa Gerak Terhadap Pemisahan Ion Nitrat dan Iodida Secara Kromatografi Ion Pada Kolom ODS Yang Dilapisi Setiltrimetilamonium Bromida. Jurnal Kimia Andalas, 11(1). ISSN 0853-8018.

: Safni, Hamzar Suyani, Ivo Savitri, Lasmiyati dan Toyohide Takeuchi. Studi Retensi Ion Iodida secara Kromatografi Ion Pada Kolom ODS yang Dilapisi Setiltrimetil Amonium Bromida. Jurnal Penelitian Universitas Negeri Malang, 200, 19(2), 320-330, 2007.

Strata 2

Thesis (2006) : Pembuatan Powder TiO₂ Doped-M (M = Ni, Cu, Zn) Dengan Metoda Sol-Gel dan Uji aktivitas Katalitik pada Metilen Biru.

Publikasi : Lasmiyati, Lasmiyati and Arief, Syukri and Safni, Safni (2006). Pembuatan Powder TiO₂ Doped-M (M = Ni, Cu, Zn) Dengan Metoda Sol-Gel dan Uji aktivitas Katalitik pada Metilen Biru. Working Paper. Pascasarjana Unand.

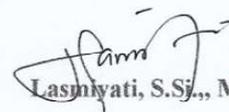
PENGALAMAN PENYUSUNAN SLHD

- Salah satu dari 2 (dua) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011;
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014;
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015;

KOMPETENSI LAINNYA

- Wet End Chemistry in Pulp and Paper Industry.
- Coating Technology in Pulp and Paper Industry.
- Teknik Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Hormat Saya,


Lasmiyati, S.Sj., M.Si.



Gambar 4. BIODATA TIM PENYUSUN 4. DIAN CHANDRA ARDHANI, ST. M.Si.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	
DATA PRIBADI	
Nama	: Dian Chandra Ardhani, ST, M.Si
Tempat, Tanggal Lahir	: OKU Selatan, 3 Mei 1982
Agama	: Islam
Alamat	: Komplek Sakinah Nomor A7 Jorong Lambau Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat
No Telp/HP	: 0812-735-7889
Alamat Email	: arr_dhan@yahoo.co.id
RIWAYAT PENDIDIKAN	
SD	: SD Negeri 6 Muaradua, 1988 – 1994
SMP	: SMP Negeri 1 Muaradua, 1994 – 1997
SMA	: SMA Negeri 1 Palembang, 1997 – 2000
Strata 1	: Teknik Kimia, Universitas Sriwijaya Palembang, 2000 – 2005
Strata 2	: Perencanaan Lingkungan, Program Studi Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2013 – 2014, Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas
PENGALAMAN KERJA	
2006 - 2009	: PT Pindodeli Perawang Tissue Mill, Supervisor at Tissue Quality Control Department
2009 – saat ini	: Staf Dinas Lingkungan Hidup
PELATIHAN	
2007	: Internal Auditor ISO 9001 at PT Pindodeli Perawang (Sinarmas Group)
2009	: Pelatihan Pemantauan Kualitas Air



	Bimtek Peningkatan Penaatan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Udara
2012	: Diklat Pengendalian Pencemaran Air (80 JP)
2015	: Diklat Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan (148 JP)
	Diklat Penilai Amdal (91 JP)
	Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Proper 2015
2016	: Bimtek Peningkatan Kapasitas Petugas Proper 2016

PENGALAMAN PENELITIAN

Strata 1

Kerja Praktek (2003)	: Pabrik Peleburan Timah, PT Timah Tbk, Muntok Bangka
Riset (2005)	: Jumlah Gelatin dari Tulang Sapi terhadap Variable Konsentrasi H ₂ SO ₄ dan Waktu Perendaman
Tugas Akhir (2005)	: Pra Rencana Pembangunan Pabrik Kalsium Carbonat Kapasitas 80.000 Ton/Tahun

Strata 2

Jurnal (2014)	: "Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Batanghari Menggunakan Program Qual2kw" Ekosain Jurnal
Seminar Nasional (2014):	"Status Mutu Air Sungai Batanghari Cluster Kabupaten Dharmasraya dengan Metode Indeks Pencemaran" Seminar Nasional Pengelolaan SDA dan Lingkungan, 16 Oktober 2014, Universitas Diponegoro Semarang
Thesis (2014)	: Pengelolaan Sungai Batanghari Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Daya Tampung Beban Pencemaran Dengan Metode Qual2kw

PENGALAMAN PENYUSUNAN SLHD

- Salah satu dari 2 (dua) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011;
- Salah satu dari 2 (dua) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2012;
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014;
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015;



KOMPETENSI LAINNYA

- Memahami proses industry pulp n paper dan turunannya (tissue dan kertas);
- “QUAL2Kw Water Quality Model” Permodelan Kualitas Air dengan metode program QUAL2Kw dimana program ini dapat mensimulasikan perkiraan beban pencemar sungai sepanjang aliran;
- Memahami konsep produksi bersih;
- Memahami proses industri kelapa sawit dan pengelolaan lingkungannya;
- Memahami proses industri pengolahan karet dan pengelolaan lingkungannya;
- Memahami pengelolaan lingkungan pertambangan batubara;
- Memahami kriteria pengelolaan lingkungan hidup kegiatan dan/atau usaha (pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran air, pengendalian kerusakan lahan dan pengelolaan limbah padat);

Hormat Saya,

Dian Chandra Ardhani, ST, M.Si



Gambar 5. CV TIM PENYUSUN 5. ADE INGGRANI, ST.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DATA PRIBADI	
Nama	: Ade Inggriani, ST
Tempat, Tanggal Lahir	: Padang, 21 Mei 1984
Agama	: Islam
Alamat	: Perumahan Sikabau Permata Indah Blok L No. 12 Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Propinsi Sumatera Barat
No Telp/HP	: 081363279229
Alamat Email	: adh3_my21@yahoo.com
RIWAYAT PENDIDIKAN	
SD	: SD Negeri 44 Kalumbuk Kota Padang, 1990 – 1996
SMP	: SMP Negeri 18 Padang, 1996 – 1999
SMA	: SMA Negeri 5 Padang, 1999 – 2002
Strata 1	: Teknik Lingkungan, Universitas Andalas Padang, 2002 – 2008
PENGALAMAN KERJA	
2009 – saat ini	: Staf Dinas Lingkungan Hidup
PELATIHAN	
2012	: Diklat Pengendalian Pencemaran Air (80 JP)
2015	: Diklat Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan (148 JP) Diklat Dasar-Dasar Amdal
PENGALAMAN PENELITIAN	
Strata 1	
Kerja Praktek (2006)	: PT Arun NGL Lhokseumawe, Aceh Utara
Tugas Akhir (2008)	: Pengukuran Tingkat Kebisingan di Kawasan Pasar Kota Pariaman



PENGALAMAN PENYUSUNAN SLHD

- Salah satu dari 3 (tiga) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014;
- Salah satu dari 3 (tiga) penulis SLHD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015;

Hormat Saya,



Ade Inggriani, ST